

# KOMUNIKASI MILITER



# KOMUNIKASI MILITER

Diterbitkan atas kerjasama:



## KOMUNIKASI MILITER

© Penulis

**Penulis:**

Tim Penulis

**Editor:**

Dr. Puji Lestari, M.Si., Agung Prabowo, M.Si.,  
Aswad Ishak, M.Si., Fajar Junaedi, M. Si.,  
Drs. Setio Budi HH, M. Si., Y. Widodo. M.A.

**Perancang sampul:** Mapa

**Gambar Cover:** Istimewa

**Penata Letak:** Mapa

Pertama kali diterbitkan oleh

**ASPIKOM**  
Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi

Bekerja sama dengan



Prodi Ilmu Komunikasi

Universitas  
Prof. Dr. Moestopo (Beragama)  
Jakarta

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan Pertama, Juli 2012  
xxviii + 662 hlm.; 15.5x23.5cm  
ISBN: 978-602-7636-10-1

**Dicetak Oleh:**

Mata Padi Pressindo

08179407446, 081227837806

tribima@yahoo.com, matapadi\_media@yahoo.com

# KATA PENGANTAR



## KEMENTERIAN PERTAHANAN RI SEKRETARIAT JENDERAL

**Eris Herryanto, M.A.**  
**Marsekal Madya TNI**

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di era globalisasi telah membawa implikasi munculnya tantangan baru dalam konteks ketahanan nasional. Dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, perang asimetris semakin mengemuka dalam percaturan global. Kita bisa melihat bagaimana, Amerika Serikat yang notabene merupakan satu-satunya negara adidaya, berhasil ditembus sistem pertahanannya oleh kelompok teroris Al Qaeda melalui aksi pembajakan pesawat yang diakhiri dengan menabrakan pesawat yang mereka bajak ke menara kembar gedung World Trade Center (WTC) pada tanggal 11 September 2001. Selain serangan pada tanggal 11 September ini, kelompok Al Qaeda juga melakukan serangkaian aksi terror yang mereka tujukan pada fasilitas yang berhubungan dengan kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara. Kelompok teroris ini dalam aksi terror bersenjata memanfaatkan aplikasi internet, seperti *google map* dan *google earth* untuk menentukan sasaran yang hendak mereka serang.

Sekitar satu dekade sebelumnya, justru Amerika Serikat bersama pasukan koalisi yang bergabung untuk mengusir Irak yang menginvasi Kuwait yang menggunakan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi untuk melumpuhkan kekuatan militer Irak, yang pada tahun awal dekade 1990-an menjadi salah satu kekuatan terbesar di Timur

Tengah. Pesawat-pesawat tempur Irak yang berjaya dalam Perang Irak - Iran menjadi lumpuh dalam Perang Teluk. Melalui Operasi Badai Gurun, militer Amerika Serikat berhasil melumpuhkan radar pasukan Irak dan sekaligus memutus akses informasi antar pasukan Irak yang menyebabkan konsolidasi kekuatan militer Irak menjadi kacau balau. Dalam perang yang bersifat simetris ini, pasukan Koalisi secara telak berhasil mengkonsolidasikan kekuatan militer yang berasal dari berbagai negara melalui sistem komunikasi yang terintegrasikan dalam manajemen sistem informasi yang digarap dengan serius.

Amerika Serikat bahkan tidak hanya berhenti dalam pengelolaan sistem komunikasi dan informasi di medan perang. Amerika Serikat membangun aktivitas public relations untuk membenarkan tindakan militer yang mereka lakukan di medan Perang Teluk. Melalui media televisi, Pentagon berkerjasama sama dengan industri penyiaran televisi menyiarkan supremasi militer Amerika Serikat dalam Perang Teluk. Berbagai stasiun televisi menyiarkan ulang, siaran yang dipancarluaskan oleh stasiun televisi Amerika Serikat terutama CNN (Cable News Network). Khalayak di seluruh dunia tiba-tiba mendapatkan suguhan menakjubkan pesawat-pesawat tempur pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat tatkala menggempur tentara Irak yang menduduki Kuwait.

Pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat yang tinggal landas dari kapal induk maupun pangkalan-pangkalan pasukan Koalisi di Timur Tengah menjadi gambar yang menakjubkan penonton, sebagaimana yang disuguhkan dalam film *Top Gun*. Pesawat F-16, F-18 dan F-15 menjadi varian pesawat tempur yang sangat akrab dengan penonton televisi. Yang membedakan adalah jika film *Top Gun*, sebuah film aksi yang meroketkan nama Tom Cruise, dibuat berdasarkan skenario maka apa yang disajikan dalam pemberitaan tentang Perang Teluk yang berisi aksi spektakuler pesawat tempur Amerika Serikat adalah realitas yang dikemas oleh kamera televisi.

Perang Teluk adalah sebuah contoh menarik dari keberhasilan pengelolaan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Pentagon benar-benar menyadari pentingnya teori *agenda setting* dalam membangun opini publik untuk mendukung aksi militer yang dilancarkan pasukan Koalisi. Dalam teori *agenda setting* diyakini bahwa agenda media mampu membangun agenda publik dan

selanjutnya adalah agenda politik.

Perkembangan internet, terutama dengan berkembangannya *platform web 2.0* yang memungkinkan khalayak tidak lagi menjadi konsumen media, namun juga sekaligus berperan sebagai produsen media - yang biasanya disebut sebagai prosumer - adalah fenomena aktual yang harus diantisipasi. Sebagaimana Amerika Serikat dan pasukan Koalisi berhasil mengintegrasikan sistem komunikasi dan informasi yang mereka jalankan dalam Perang Teluk, maka sudah selayaknya bagi bangsa Indonesia untuk semakin peduli dengan aspek komunikasi dalam sistem pertahanan dan ketahanan nasional kita. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang cepat mengharuskan kita untuk cepat tanggap pada tantangan terbaru. Perkembangan teknologi web 2.0 yang memungkinkan semua warga negara berperan menjadi produsen informasi yang melintasi batas negara-bangsa adalah salah satu tantangan yang harus dikelola dengan bijaksana. Beberapa negara bahkan telah mengintegrasikan para *hacker* yang digunakan untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara mereka melalui dunia maya, sebuah tindakan yang bisa dilekatkan dengan konsep pertahanan keamanan rakyat semesta (hankamrata).

Buku ini adalah sebuah langkah maju dalam mengembangkan kajian komunikasi militer dengan melihat berbagai tantangan yang dihadapi bangsa ini. Peran serta para akademisi yang menyumbangkan pemikirannya dalam buku ini harus diapresiasi setinggi-tingginya. Tentu buku ini bukan langkah terakhir. Perlu sinergis yang kuat dari semua pihak dalam mengembangkan pemikiran komunikasi militer sebagai bagian dari hankamrata. Pasti dengan sinergis yang kuat, bangsa Indonesia akan mampu duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang berhasil mengembangkan integrasi komunikasi dalam pertahanan nasional.

Jakarta, Juni 2012  
Sekretaris Jenderal,



Eris Herryanto, M.A.  
Marsekal Madya TNI





# KATA PENGANTAR

## GUBERNUR AKADEMI ANGKATAN UDARA

**Bambang Samoedro, S.Sos.  
Marsekal Muda TNI**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa generasi emas bangsa ini telah menyadari betapa pentingnya ketahanan nasional sebagai paradigma untuk membangun kembali kedaulatan dan kepentingan nasional. Hal ini terungkap dalam buku *Komunikasi Militer dan Ketahanan Nasional*, dimana digambarkan betapa dahsyatnya peran komunikasi dalam sebuah peperangan yang dalam istilah sekarang adalah peperangan informasi (*Information Warfare*). Untuk merebut keunggulan *information communication technology strategyc* dalam rangka memenangkan perang baik konvensional maupun inkonvensional, diperlukan konsep penggunaan kekuatan dan kemampuan peperangan informasi yang harus lebih tangguh dan dapat membuat musuh menyerah sebelum bertempur.

Kalau kita mencermati sejarah perang kemerdekaan Indonesia, terbukti bahwa kemenangan peperangan didukung penuh oleh keunggulan informasi yang mampu menembus Dewan Keamanan PBB. Demikian halnya Indonesia dalam operasi Trikora dan Timor Timur, salah satu strategi yang dilaksanakan adalah tindakan operasi informasi yang meyakinkan dunia Barat tentang pengakuan terhadap kedua wilayah tersebut sebagai bagian dari NKRI. Sebaliknya kegagalan dalam mempertahankan Timor Timur adalah akibat serangan perang informasi yang dilakukan oleh para pemimpinnya,

yang dapat meluluhlantakan perjuangan bersenjata dari TNI, demikian halnya dengan lepasnya Pulau Sipadan serta Ligitan adalah sebagai bukti kegagalan dalam melaksanakan perang informasi. Paradigma peperangan informasi sangat penting sehingga beberapa negara telah menyusun strategi untuk menghadapinya. Sebagian kalangan perwira muda TNI sudah mengangkat persoalan tersebut dalam seminar-seminar yang diselenggarakan baik Kemenhan maupun TNI, namun karena terbentur oleh mahalnnya peralatan peperangan informasi, menyebabkan terhambatnya penyelenggaraan operasi informasi secara komprehensif. Strategi peperangan informasi yang disiapkan oleh negara dalam menghadapi perang informasi ini masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dengan sistem pertahanan nirmiliter, yang notabene menjadi domain Kementerian dan Lembaga Pemerintah di luar bidang pertahanan. Operasi informasi memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang digunakan sebagai senjata *Ofensif* dan *Defensif* serta dapat digelar setiap saat, namun pemanfaatan iptek oleh bangsa ini belum optimal dihadapkan pada ancaman perang informasi yang didominasi oleh kekuatan *Soft Power* dan *Smart Power*.


Kemajuan pesat perkembangan iptek yang khusus digunakan dalam konsep operasi informasi, menjadi landasan penting bagi pengembangan strategi peperangan informasi saat ini dan di masa mendatang. Perkembangan lingkungan strategis menunjukkan bahwa Iptek mempengaruhi perubahan strategi yang sangat signifikan dan bersifat multidimensi yang dikenal sebagai revolusi militer, lazimnya disebut *Revolution in Military Affairs* (RMA) yang meliputi *Precision Strike*, *Standing Off*, *Unmanned Aerial System*, *Dominating Manouever*, *Space Warfare*, Dan *Information Warfare*<sup>1</sup>. Sedangkan aplikasi iptek dalam *Information Warfare* yang merupakan bagian dari strategi militer diantaranya meliputi Komando Kendali Komunikasi Komputerisasi Intelijen Pengamatan dan Pengintaian (K4IPP); Intelijen; *Network Centric Warfare* (NCW); *Cyber War*; *Psywar*; *Military Deception*; *Security Operation*; *Computer Network Operation* dan Perang elektronika. Ancaman dari implikasi perkembangan lingkungan strategis khususnya untuk menghadapi perang informasi sudah direspon dalam buku ini. Saya

---

<sup>1</sup> Seskoau, Kajian Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Guna Pengembangan Doktrin Di TNI AU Dalam Rangka Menghadapi Perang Modern, Februari 2011, hal 2.

berharap buku ini dapat dijadikan embrio dalam menyusun strategi untuk menghadapi ancaman Peperangan Informasi yang meliputi perang psikologi, peperangan elektronika, peperangan jaringan komputer, peperangan opini publik, pengelabuan informasi dan kontra intelijen.

Yogyakarta, Juni 2012  
Gubernur Akademi Angkatan Udara



Bambang Samoedro, S.Sos.  
Marsekal Muda TNI



# KATA PENGANTAR

## Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Prof. Dr. H. Sunarto, M.Si

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Berbagai macam kejadian yang dialami bangsa pada kurun waktu akhir-akhir ini diyakini merupakan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang diingini oleh kekuatan-kekuatan tertentu menerobos masuk Indonesia secara sistematis untuk memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang merdeka tanggal 17 Agustus 1945.

Ini merupakan salah satu manifestasi peperangan yang nyata kita hadapi bersama dewasa ini. Peperangan yang berlangsung secara kontinyu dan tanpa henti. Perang terjadi tidak lagi secara fisik menggunakan persenjataan yang mampu memporak porandakan suatu wilayah, namun telah bergeser pada infiltrasi budaya berupa gaya hidup, pemikiran, kesenian, dan sebagainya.

Dengan hal tersebut, maka yang terjadi kini lebih mengarah pada perang yang bersifat asimetris. Penggunaan sarana dan prasarana teknologi informasi yang apabila dilihat secara *content* menampakkan bagaimana sebuah penguasaan dan penyebaran *value* dari satu Negara secara perlahan namun pasti akan mengikis dan menggerogoti kesadaran bahkan perilaku kebangsaan yang telah dimiliki oleh negara lain.

Lambat laun rasa kebanggaan terhadap bangsanya sendiri menjadi memudar yang akan segera tergantikan dengan perasaan inferior berhadapan dengan bangsa lain. Bangsa kita menjadi lebih bangga bila

menggunakan segala macam produk yang dihasilkan oleh Negara lain. Merek-merek global banyak bermunculan dan disukai daripada hasil olahan bangsanya sendiri. Sebuah ironi namun inilah kenyataan yang dihadapi sekarang ini.

Tanpa disadari, disukai atau tidak, terpaksa maupun tidak, Bangsa Indonesia mulai terbawa arus yang mengombang-ambingkan “perahu nusantara” ke dalam pusaran air yang kuat yang akan dapat menenggelamkan bangsa ini pada keterpurukan apabila kita semua tidak menanggapinya dengan seksama. Padahal menurut Pahlawan Nasional Mayjend TNI. Purn. Prof. Dr. Moestopo kita telah memilih lima pilar yang harus diimplementasikan yaitu: Cinta Merah Putih, Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Kemajemukan yang dahulu dipandang sebagai potensi kuat membangun Negara justru berbalik menjadi potensi kuat terjadinya disintegrasi bangsa apabila tidak secara hati-hati dikelola. Media komunikasi dengan berbagai kompleksitas di dalamnya yakni memiliki peran terhadap hal tersebut. Maka dari itu, perlu adanya upaya yang serius dan mendalam untuk mengkaji ke depannya dapat melahirkan berbagai macam rekomendasi yang konstruktif bagi segenap elemen masyarakat untuk dapat mewujudkan ketahanan nasional yang kokoh sebagai bukti nyata untuk menciptakan bangsa yang berdaulat dalam segala aspeknya.

Untuk itu, saya mengucapkan selamat kepada Panitia Penyelenggara Seminar Nasional dan Konferensi Komunikasi Militer dan Ketahanan Negara yang diselenggarakan atas kerjasama antara ASPIKOM yang berkantor pusat di Universitas Profesor Doctor Moestopo Beragama (UPDM[B]) Jakarta dengan Prodi Ilmu Komunikasi UPN “Veteran” Yogyakarta. Hal ini sebagai salah satu bukti nyata para akademisi komunikasi di Indonesia turut memikirkan masalah yang dihadapi bangsanya.

Disamping itu, dengan diterbitkannya buku berisi tulisan mengenai komunikasi, militer dan ketahanan nasional ini akan dapat menumbuhkan kesadaran mendasar mengenai peran pentingnya komunikasi dalam membangun dan mempertahankan ketahanan nasional.

Selamat membaca, semoga Anda mendapatkan manfaat besar dari paparan buku ini.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, Medio Juni 2012

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Prof. Dr. H. Sunarto, M.Si  
Rektor UPDM (B)





## Pengantar Editor

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan rahmatNya, buku Komunikasi Militer dan Ketahanan Nasional dalam rangka membangun kedaulatan dan kepentingan Nasional NKRI, dapat selesai tepat waktu. Buku ini berisi kumpulan artikel dari para dosen di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia yang terjalin dalam wadah Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) di Indonesia. Penerbitan buku ini dimotori oleh Divisi Litbang ASPIKOM, didukung oleh Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Yogyakarta dan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta.

Buku ini dibagi menjadi lima bagian sesuai dengan tema yang sama. *Bagian pertama*, membahas mengenai **Komunikasi dan Kedaulatan Bangsa**, yang terdiri dari beberapa tulisan, yaitu; Sejarah Komunikasi, Sains, dan Akar-akar Militerisme yang Koersif: dari Soft Propaganda hingga Perang Urat Syaraf oleh Santi Indra Astuti (Universitas Islam Bandung), Pemanfaatan Aplikasi Geospasial untuk Inteligensi Militer (Studi kasus: Aplikasi Google Earth dan Google Maps) oleh Prio Handoko & Adhi Gurmilang (Universitas Pembangunan Jaya Jakarta), Kementerian Pertahanan: Budaya Militer di Institusi Sipil ? oleh Yugih Setyanto dan Riris Loisai (Universitas Tarumanegara Jakarta), Strategi Diplomasi Membangun Ketahanan Nasional dan Integritas Bangsa oleh Yuliandre Darwis (Universitas Andalas Padang), Perbatasan Aceh sebuah Celah yang "Menggiurkan" Bagi Wibawa dan Kedaulatan Bangsa dalam Konteks Komunikasi Internasional oleh Andrian Wira Syah Putra dan M. Najib Husain (Universitas Halu Oleo Kendari), Perang *Cyber* dalam Dinamika Komunikasi Internasional oleh M. Badri (Universitas Islam Negeri Suska Riau), Membangun Ketahanan Bangsa melalui Komunikasi Kebangsaan oleh Teguh Ratmanto (Universitas Islam B andung).

*Bagian kedua* membahas tentang **Konflik dan Kerentanan Bangsa**. Bagian ini berisi kajian-kajian tentang; Diplomasi Preventif sebagai upaya Pencegahan Meluasnya Konflik di Papua: Studi Kepustakaan tentang pencegahan konflik ditinjau dari perspektif Public Relations

Internasional oleh Maya (Universitas Islam Bandung), Manajemen Komunikasi Konflik dalam Rangka Mengatasi Potensi Konflik Sumber Daya Alam untuk Integrasi Sosial (Studi Kasus Konflik Sosial Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur) oleh Inda Fitriyani & Hj. Hairunnisa (Universitas Mulawarman), Strategi Penanganan Konflik Berbasis Komunikasi Menuju Pertahanan dan Keamanan Nasional oleh Sarmiati (Universitas Andalas Padang), Pemberitaan Konflik Aceh: Sebuah Kontrol Sosial di *Newsroom* oleh Tuti Widiastuti (Universitas Bakrie Jakarta), Konflik dalam Berita : Objektivitas dalam Pemberitaan Konflik oleh Lisa Lindawati (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta).

*Bagian ketiga* berisi tentang kajian **Militer dan Manajemen Komunikasi** meliputi artikel-artikel tentang; Strategi dan Taktik *Public Relations* Sebagai Tulang Punggung Komunikasi Militer dalam Masa Perang dan Damai oleh Elvinaro Ardianto (Universitas Padjadjaran Bandung), Strategi *Re Imaging* TNI-Polri Di tengah Kebebasan Informasi oleh Edwi Arief Sosiawan (UPN "Veteran" Yogyakarta), Wajah Militer di Dunia Maya: Studi Kasus Tinjauan Pemanfaatan Situs Internet oleh TNI oleh Doddy Salman (Universitas...), Perang Opini tentang Citra Militer Indonesia di Mata Publik oleh Aat Ruchiat Nugraha (Universitas Padjadjaran Bandung), "*The Power Of Story Telling*" dalam Pencitraan Militer oleh Ani Yuningsih (Universitas Islam Bandung), Pengembangan Komunikasi Persuasif TNI dalam Sistem Pertahanan Semesta oleh Ike Junita Triwardhani (Universitas Islam Bandung), Manajemen Komunikasi Militer oleh Dewi K. Soedarsono (Institut Manajemen Telkom Bandung).

*Bagian keempat* membahas kajian-kajian tentang: **Sinema, Budaya Pop, dan Kemiliteran**, meliputi : Remaja dalam Peperangan Film Barat dan Film Indonesia oleh Rita Gani (Universitas Islam Bandung), Identitas Pluralisme Militer dalam Sinema Indonesia : Studi Terhadap Etnographic Eksistensialisme Sejarah dan Makna Nasionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Film Trilogi "Merah Putih" oleh Ahmad Toni & Rocky Prasetyo Jati (Universitas Budi Luhur Jakarta), Imperialisme Budaya Populer K-Pop di Kalangan Remaja Indonesia oleh Rahmi Surya Dewi dan Anggi Ayudia Arifano (Universitas Andalas Padang), Media dan Industri Mesin Perang (Perspektif Politik Ekonomi Komunikasi dalam Industri Perang) oleh Anastasia Yuni Widyaningrum (Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya), Hollywood dan Perang Wacana: Makna Ideologis di Balik Film Perang Hollywood oleh Hadi

Purnama (Institut manajemen Telkom Bandung), Reprereri).ntasi Atribut Militer Indonesia dalam Fashion Komunikasi oleh Aprilani (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri).

*Bagian terakhir*, berisi tentang kajian **Media, Jurnalisme dan Ketahanan Nasional**, meliputi artikel-artikel ; Jurnalisme Perang oleh Andy Corry. W (Universitas Lampung), Kebebasan Pers dalam Konteks Hubungan Indonesia-Malaysia: Kajian Pelaporan Berita Ambalat di *Berita Harian* (Malaysia) dan *Kompas* (Indonesia) oleh Fitaha Aini (Universitas Islam 45 Bekasi), Posisi Media Dalam Perang Melawan Terorisme oleh Mubarok (Universitas Islam Sultan Agung Semarang), Penggunaan Media sebagai Instrumen Perang (Studi Analisis Diskursus dalam Kasus Nuklir Iran) oleh Salim Alatas (Universitas Pembangunan Jaya Jakarta), Representasi Peran Indonesia dalam Pemberitaan Kasus *Asylum Seekers* pada Surat Kabar Australia oleh Noveina Silviyani Dugis & Finsensius Yuli Purnama (Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya), Proses *Gatekeeping* Media Massa dalam Upaya Peningkatkan Ketahanan Nasional (Studi Kasus Pemberitaan Militer Jawa Timur di Surat Kabar Regional Harian *SURYA*) oleh Maria Yuliasuti & Yuli Nugraheni (Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Pertarungan Propaganda Ideologi Jihad dengan Keamanan melalui Internet oleh Dicky Andika dan Morissan (Universitas Mercu Buana Jakarta), Persepsi Masyarakat tentang "*Talkshow Indonesia Lawyers Club*" yang Memicu Ketidakstabilan Ketahanan Nasional oleh Elva Ronaning Roem dan Yesi Puspita (Universitas Andalas Padang), Komunikasi Militer dalam Kepungan "*Pop Culture*"(Kajian Kritis Atas Media Massa) Gregorius Genep Sukendro (Universitas Tarumanegara Jakarta).

Ucapan terima kasih Kami sampaikan kepada Rektor Universitas Pembangunan Nasional (UPN) 'Veteran' Yogyakarta, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), dan Aspikom, yang menjadi sponsor utama diterbitkannya buku ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Sekretariat Jenderal Kementrian Pertahanan RI, Gubernur Akademi Angkatan Udara, Kolonel Sungkono, SE., M.Si (Direktur Pendidikan AAU Yogyakarta), Sertu Yohanes Agus Purnomo (Ajudan Gubernur AAU Yogyakarta), seluruh penulis serta para pengggagas buku ini; Dr. Eko Harry Susanto (Ketua Aspikom Pusat), Agung Prabowo, M Si (UPN 'Veteran' Yogyakarta), Setio Budi HH, M Si (Ketua Litbang Aspikom), Dr. Puji Lestari (UPN 'Veteran' Yogyakarta), Aswad Ishak, M Si (Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta), Fajar Junaedi, M Si (Divisi Humas Aspikom), Johannes Widodo, MA (Universitas Atma Jaya Yogyakarta), Anang Hermawan, MA (Ketua Aspikom Korwil Yogyakarta), Herfriady, S.Sos (Ketua Aspikom Sumsel), Najib R. Husein, M.Si (Universitas Halu Oleo), Tribima (Penerbit Litera), Retno Hendariningrum, M.Si., Ida Wiendijarti, M. Si., Icha, dan Agung Mapa, serta semua pihak yang tidak kami sebutkan satu-satu.

Akhirnya, semoga penerbitan buku ini bermanfaat untuk membangun kesadaran terhadap ancaman ketahanan yang berbasis pada perang asimetris di kalangan militer dan masyarakat pada umumnya.

Yogyakarta, Juni 2012

Tim Editor

# DAFTAR ISI

## **Kata Pengantar**

<i>Kementerian Pertahanan RI Sekretariat Jenderal</i> <i>Eris Herryanto, M.A. Marsekal Madya TNI</i> .....	v
<i>Gubernur Akademi Angkatan Udara</i> <i>Bambang Samoedro, S.Sos. Marsekal Muda TNI</i> .....	ix
<i>Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)</i> <i>Prof. Dr. H. Sunarto, M.Si</i> .....	xiii
<i>Editor</i> .....	xvii

<b>Daftar Isi</b> .....	xxi
<b>Daftar Tabel</b> .....	xxv
<b>Daftar Gambar</b> .....	xxvii

## **BAGIAN I**

### **KOMUNIKASI DAN KEDAULATAN BANGSA**

<i>Sejarah Komunikasi, Sains, dan Akar-akar Militerisme</i> <i>yang Koersif: Dari Soft Propaganda Hingga Perang Urat Syaraf</i> <i>Santi Indra Astuti</i> .....	3
<i>Pemanfaatan Aplikasi Geospatial untuk Inteligensi Militer</i> <i>(Studi Kasus: Aplikasi Google Earth dan Google Maps)</i> <i>Prio Handoko dan Adhi Gurmilang</i> .....	27
<i>Kementerian Pertahanan: Budaya Militer di Institusi Sipil</i> <i>Yugih Setyanto dan Riris Loisa</i> .....	45
<i>Strategi Diplomasi Membangun Ketahanan Nasional</i> <i>dan Integritas Bangsa (Studi Kasus: Pembatasan Sambas</i> <i>dan Mesuji)</i> <i>Yulianne Darwis</i> .....	59

Perbatasan Aceh Sebuah Celah yang “Menggiurkan” Bagi Wibawa dan Kedaulatan Bangsa dalam Konteks Komunikasi Internasional <i>Andrian Wira Syah Putra dan M. Najib Husaini</i> .....	83
Perang <i>Cyber</i> dalam Dinamika Komunikasi Internasional <i>M. Badri</i> .....	101
Membangun Ketahanan Bangsa Melalui Komunikasi Kebangsaan <i>Teguh Ratmanto</i> .....	123

## **BAGIAN II**

### **KONFLIK DAN KERENTANAN BANGSA**

Diplomasi Preventif Konflik di Papua: Perspektif <i>Public Relations</i> Internasional <i>Maya</i> .....	139
Manajemen Komunikasi Konflik dalam Rangka Mengatasi Potensi Konflik Sumber Daya Alam untuk Integrasi Sosial (Studi Kasus Konflik Sosial Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur) <i>Inda Fitriyarini dan Hairunnisa</i> .....	155
Strategi Penanganan Konflik Berbasis Komunikasi Menuju Pertahanan dan Keamanan Nasional <i>Sarmiati</i> .....	181
Pemberitaan Konflik Aceh: Sebuah Kontrol Sosial di <i>Newsroom</i> <i>Tuti Widiastuti</i> .....	197
Konflik dalam Berita: Objektivitas dalam Pemberitaan Konflik <i>Lisa Lindawati</i> .....	217

## **BAGIAN III**

### **MILITER DAN MANAJEMEN KOMUNIKASI**

Strategi dan Taktik <i>Public Relations</i> sebagai Tulang Punggung Komunikasi Militer dalam Masa Perang dan Damai <i>Elvoinaro Ardianto</i> .....	237
Strategi <i>Re Imaging</i> TNI-Polri di Tengah Kebebasan Informasi <i>Edwi Arief Sosiawan</i> .....	253

Wajah Militer di Dunia Maya: Studi Kasus Tinjauan Pemanfaatan Situs Internet oleh TNI <i>Doddy Salman</i> .....	265
Perang Opini Tentang Citra Militer Indonesia di Mata Publik <i>Aat Ruchiat Nugraha</i> .....	281
“The Power of Story Telling” Dalam Pencitraan Militer <i>Ani Yuningsih</i> .....	303
Pengembangan Komunikasi Persuasif TNI dalam Sistem Pertahanan Semesta <i>Ike Junita Triwardhani</i> .....	317
Manajemen Komunikasi Militer <i>Dewi K. Soedarsono</i> .....	335

#### **BAGIAN IV**

#### **SINEMA, BUDAYA POP DAN “KEMILITERAN”**

Remaja dalam Peperangan Film Barat dan Film Indonesia <i>Rita Gani</i> .....	357
Identitas Pluralisme Militer dalam Sinema Indonesia: Studi Terhadap Etnographic Eksistensialisme Sejarah dan Makna Nasionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Film Trilogi “Merah Putih” <i>Ahmad Toni &amp; Rocky Prasetyo Jati</i> .....	371
Imperialisme Budaya Populer K-Pop di Kalangan Remaja Indonesia <i>Rahmi Surya Dewi dan Anggi Ayudia Arifano</i> .....	393
Media dan Industri Mesin Perang (Perspektif Politik Ekonomi Komunikasi dalam Industri Perang) <i>Anastasia Yuni Widyaningrum</i> .....	411
Hollywood dan Perang Wacana: Makna Ideologis di Balik Film Perang Hollywood <i>Hadi Purnama</i> .....	451
Representasi Atribut Militer Indonesia dalam <i>Fashion</i> Komunikasi <i>Aprilani</i> .....	483
Komunikasi Militer dalam Kepungan “Pop Culture” (Kajian Kritis Atas Media Massa) <i>Gregorius Genep Sukendo</i> .....	467

## BAGIAN V

### MEDIA, JURNALISME DAN KETAHANAN NASIONAL

Jurnalisme Perang dan Kontribusi Jurnalisme Alternatif untuk Perdamaian <i>Andy Corry. W</i> .....	485
Kebebasan Pers dalam Konteks Hubungan Indonesia-Malaysia: Kajian Pelaporan Berita Ambalat di <i>Berita Harian</i> (Malaysia) dan <i>Kompas</i> (Indonesia) <i>Fitaha Aini</i> .....	503
Posisi Media dalam Perang Melawan Terorisme <i>Mubarok</i> .....	523
Penggunaan Media Sebagai Instrumen Perang (Studi Analisis Diskursus dalam Kasus Nuklir Iran) <i>Salim Alatas</i> .....	545
Representasi Peran Indonesia dalam Pemberitaan Kasus <i>Asylum Seekers</i> pada Surat Kabar Australia <i>Noveina Silviyani Dugis dan Finsensius Yuli Purnama</i> .....	567
Proses <i>Gatekeeping</i> Media Massa dalam Upaya Peningkatkan Ketahanan Nasional (Studi Kasus Pemberitaan Militer Jawa Timur di Surat Kabar Regional Harian <i>SURYA</i> ) <i>Maria Yuliastuti dan Yuli Nugraheni</i> .....	587
Pertarungan Propaganda Ideologi Jihad dengan Keamanan Melalui Internet <i>Dicky Andika dan Morissan</i> .....	607
Persepsi Masyarakat Tentang " <i>Talkshow Indonesia Lawyers Club</i> " yang Memicu Ketidakstabilan Ketahanan Nasional <i>Elva Ronaning Roem dan Yesi Puspita</i> .....	633
<b>Glosarium</b> .....	651
<b>Indeks</b> .....	657
<b>Ucapan Terimakasih</b> .....	661



# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Simbol Budaya Organisasi.....	55
Tabel 1.2. Kekuatan Angkatan Perang <i>Cyber</i> Dunia .....	112
Tabel 1.3. <i>World Internet Usage and Population Statistics</i> (31 Desember 2011) .....	113
Tabel 1.4. Kota yang Bertanggung Jawab atas Sebagian Besar Insiden Keamanan .....	115
Tabel 1.5. Daftar Negara dengan Jumlah Penyerang Terbanyak .....	116
Tabel 1.6. Bidang Kajian Kemanan menurut Roland Paris .....	130
Tabel 1.7. Perbandingan antara Paradigma <i>Traditional Security</i> dan <i>Human Security</i> .....	131
Tabel 1.8. Komponen-Komponen <i>Human Security</i> Berdasarkan Laporan <i>Human Development</i> 1994 UNDP .....	132
Tabel 2.1. Konflik Perkebunan Kelapa Sawit Skala Besar di Kabupaten Paser .....	168
Tabel 2.2. Tipe Konflik .....	225
Tabel 2.3. Perbedaan <i>Peace Journalism</i> dan <i>War Journalism</i> .....	229
Tabel 2.4. Perbedaan Jurnalisme Berorientasi Konflik dan Jurnalisme Sensitif Konflik .....	230
Tabel 3.1. Kategorisasi dan Sub Kategorisasi Fitur dan Fungsi Manfaat Pesan Situs <i>www.tni.mil.i</i> .....	276
Tabel 3.2. Kategori Dua Fitur yang tidak menyediakan Interaktivitas .....	276
Tabel 3.3. Kategori 3 Kategori Penunjang .....	277
Tabel 3.4. Bentuk Gaya Komunikasi .....	297
Tabel 4.1. Film Barat vs. Film Indonesia.....	365
Tabel 4.2. Film Indonesia yang Dikategorikan Bagus .....	366

Tabel 4.3. Faktor Menonton Film Indonesia .....	367
Tabel 5.1. Label dan Penamaan Tindakan Terorisme.....	511
Tabel 5.2. Wilayah Asal <i>Asylum Seekers</i> 2011 .....	550
Tabel 5.3. Klaim Pengajuan <i>Asylum</i> di Sejumlah Daerah .....	552
Tabel 5.4. Rangking 15 Besar Negara Tujuan <i>Asylum Seeker</i> 2007-2011 .....	553
Tabel 5.5. Asal <i>Asylum Seekers</i> di Australia 2011.....	553
Tabel 5.6. Jumlah <i>Boat Arrivals</i> sejak 1989 di Australia .....	554
Tabel 5.7. <i>Issues in Election coverage from all pages in both</i> <i>newspapers from August 11 – 22, 2010.</i> .....	555
Tabel 5.8. Jumlah Berita Ambalat .....	573
Tabel 5.9. Format jurnalistik Berita Ambalat.....	574
Tabel 5.10. Fungsi Pesan dalam Berita Ambalat .....	576
Tabel 5.11. <i>Framing</i> Berita Ambalat.....	577
Tabel 5.12. Tema dan Waktu Tayang Indonesia <i>Lawyers Club</i> .....	640
Tabel 5.13. Persoalan yang Banyak Dibicarakan.....	642
Tabel 5.14. Persepsi Terhadap Pemberitaan .....	644
Tabel 5.15. Persepsi Terhadap Pengaruh Program Acara <i>Talkshow</i> <i>Indonesian Lawyers Club</i> Terhadap.....	646

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Tampilan Muka <i>Google Earth</i> .....	32
Gambar 1.2.	Tampilan <i>Google Earth</i> mengakses Air Terjun Niagara.....	33
Gambar 1.3.	Kualitas Pencitraan dari <i>Google Earth</i> .....	34
Gambar 1.4.	Tampilan Google Maps.....	35
Gambar 1.5.	Pangkalan Militer Amerika Serikat di Irak yang akan diserang dengan <i>Google Earth</i> .....	37
Gambar 1.6.	Pemetaan Istana Negara .....	42
Gambar 1.7.	Pemetaan Cilangkap .....	42
Gambar 2.1.	Unsur-Unsur yang Membentuk Proses Komunikasi.....	140
Gambar 2.2.	Hubungan Segitiga.....	158
Gambar 2.3.	Model Manajemen Komunikasi Bencana .....	161
Gambar 2.4.	Perkebunan Kelapa Sawit.....	171
Gambar 2.5.	????????????????.....	210
Gambar 2.6.	Segitiga Konflik.....	224
Gambar 2.7.	Segitiga Kekerasan .....	226
Gambar 3.1.	Contoh halaman muka situs <i>www.tni.mil.id.</i> .....	273
Gambar 3.2.	Proses Terbentuknya citra .....	310
Gambar 4.1.	Identitas.....	377
Gambar 4.2.	Tank Leopard 415	
Gambar 4.3.	Peristiwa Bom Atom Hiroshima-Nagasaki .....	416
Gambar 4.4.	F117 Stealth.....	417
Gambar 4.5.	Peluncuran rudal tomahawk .....	420
Gambar 4.6.	Model Hirarki (Shoemaker dan Reese, 1991:54). .....	448
Gambar 4.7.	Hubungan antara representasi, hubungan kekuasaan .....	455
Gambar 4.8.	Kaitan Representasi dengan Makna .....	455
Gambar 4.9.	<i>“Mercedes-Benz Uses Communist Madman Che Guevara to Sell Luxury Cars”, said the headline on a blog post from the Heritage Foundation, a prominent conservative political organization in Washington.</i> .....	473
Gambar 4.10.	Figur tokoh militer.....	476
Gambar 4.11.	<i>The Soldiers Fiesta</i> .....	478
Gambar 4.12.	Cuplikan Film Merah Putih II.....	479
Gambar 5.1.	<i>The Media-Terrorism Model, Six Bilateral Relations</i> .....	515

Grafik 5.2. Sepuluh Besar Negara Penerima <i>Asylum Seekers</i> 2011 .....	550
Gambar 5.3. Tujuh Besar Kewarganegaraan <i>Asal Asylum Seekers</i> 2011.....	551
Gambar 5.6. Peta Pencarian Perbatasan Indonesia-Australia. ....	560
Grafik 5.4. Indeks Kebebasan Pers Berdasarkan <i>Reporters Without Borders</i> .....	569
Gambar 5.5. Peta Ambalat .....	572
Gambar 5.7. Pengaliran Informasi Berita Ambalat .....	584
Gambar 5.8. Proses Produksi Surat Kabar .....	589
Gambar 5.9. Proses <i>Gatekeeping</i> .....	595
Gambar 5.10. Penerapan Model <i>Gatekeeping</i> .....	599
Gambar 5.11. Prinsip Kerja Harian Surya. ....	600
Gambar 5.12. Kekuatan Eksternal Media .....	601
Gambar 5.13. Skema Ketekaitan antara Input, Proses, <i>Output</i> .....	602
Gambar 5.14. Kerangka pikir .....	638

BAGIAN I  
KOMUNIKASI  
DAN  
KEDAULATAN BANGSA



# SEJARAH KOMUNIKASI, SAINS, DAN AKAR-AKAR MILITERISME YANG KOERSIF: DARI *SOFT* PROPAGANDA HINGGA PERANG URAT SYARAF

Santi Indra Astuti

## Pendahuluan

Menjelang akhir hidupnya, Wilbur Schramm (1907–1987) pernah meramalkan bahwa pada milenium mendatang, Ilmu Komunikasi akan menghilang. Sebagai gantinya, akan tercipta ilmu baru hasil peleburan disiplin komunikasi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu baru itu diistilahkannya sebagai “*behavioral science*” – sebutan untuk integrasi berbagai disiplin ilmu yang tujuan akhirnya kurang lebih untuk mempelajari dan mengubah perilaku manusia (Rogers, 1994: 495).

Bertahun lamanya, saya mencoba memahami mengapa seorang Wilbur Schramm, yang dipuja-puja sebagai Bapak Ilmu Komunikasi Dunia, perintis Ilmu Komunikasi, bahkan “*czar of communication*” (Rogers, 1994: 28), justru meramalkan akhir Ilmu Komunikasi yang tragis itu. Dengan segala keterbatasan pemahaman saya, rasanya sungguh tidak masuk akal kalau sosok sekaliber Wilbur Schramm – yang berhasil menginstitutionalisasi Ilmu Komunikasi di berbagai perguruan tinggi berpengaruh di dunia – telah menyempitkan fungsi komunikasi sebatas bagian dari mesin psikologi. Alangkah mengerikannya Ilmu Komunikasi di masa depan, jika sekadar difungsikan sebagai perekayasa kesadaran manusia.

Tentu saja, saya bersyukur karena komunikasi di milenium kedua ini memperlihatkan gejala yang berbeda dari ramalan Wilbur Schramm. Alih-alih menampakkan diri sebagai mesin masif pengontrol kesadaran manusia, sistem komunikasi publik justru semakin terfragmentasi dengan munculnya media sosial. Media yang disebut-sebut merepresentasikan pilar kelima demokrasi ini (*the fifth estate*) memperlihatkan bahwa upaya

mengontrol pemikiran manusia adalah pekerjaan mustahil, berhubung publik kini punya sarana yang bisa diakses secara meluas untuk menyampaikan opininya sendiri. Pada titik yang ekstrem, publik bahkan dikatakan tidak membutuhkan media lagi berhubung khalayak media telah bertransformasi menjadi *prosumer* – masyarakat produser sekaligus konsumen informasi penanda partisipasi publik yang semakin meluas melalui Revolusi Web 2.0 (Suciu, 2007). Bagaimanapun, ramalan akhir Wilbur Schramm tidak pernah hilang dari benak saya, terus terngiang. Tanpa menghilangkan respek dan apresiasi terhadap tokoh ini, rasa penasaran saya tak juga pupus. Mengapa Wilbur Schramm – sang tokoh dengan nama besar dalam dunia komunikasi ini – meramalkan masa depan komunikasi seperti ini?

Jawaban atas pertanyaan ini mulai tersibak sedikit demi sedikit ketika nama Christopher Simpson diperkenalkan oleh seorang sahabat. Pelacakan atas karya-karya Simpson pun mengungkap sejumlah fakta yang menarik. Christopher Simpson, pada tahun 2004 menulis buku berjudul *“Worldview Warfare and The Science of Coercion”*. Buku itu lumayan menggemparkan, karena memperlihatkan campur tangan intelijen dalam proses-proses propaganda yang melibatkan nama-nama besar pendiri komunikasi, termasuk Wilbur Schramm. Tulisan berikut ini menyampaikan kilasan sejarah terbentuknya disiplin komunikasi berdasarkan bukti-bukti asumsi keterlibatan militer di Amerika Serikat (AS), sekaligus memberikan latar atas ramalan Schramm. Tulisan ini juga berupaya memaparkan sejumlah implikasi yang berkembang dalam studi Ilmu Komunikasi sendiri, baik dalam lingkup internasional maupun nasional, ketika sejarahnya diwarnai oleh campur tangan pihak-pihak yang politis dan justru sangat berseberangan dengan prinsip ketidakberpihakan sains terhadap sikap politik apapun.

### **Pelebagaan Disiplin Komunikasi: Sains dan Benih-Benih Militerisme**

Pelebagaan Ilmu Komunikasi berawal dari keterlibatan para pendiri disiplin Ilmu Komunikasi dalam Perang Dunia II. Nama-nama besar seperti Wilbur Schramm, Paul Lazarsfeld, Harold Laswell, Kurt Lewin, hingga Carl I. Hovland, mencatat sejarah komunikasi saat bergabung bersama dalam beberapa biro yang bergerak dalam tujuan yang sama: menjamin kemenangan perang melawan Nazi Jerman.



Mereka tidak sendiri. Sejumlah ilmuwan sosial terkemuka lainnya terlibat pula dalam diskusi-diskusi awal yang memunculkan urgensi disiplin sosial baru yang belakangan dikenal sebagai komunikasi massa. Dalam sesi-sesi diskusi informal di Washington, tercatat pula nama-nama besar seperti antropolog Margaret Mead dan Direktur Divisi Program Survey, Rensis Likert (Hilgard, 1992 dalam Rogers, 1994: 12). Belakangan, hasil diskusi tersebut menjadi landasan penerapan berbagai operasi yang dilakukan oleh *Office of Facts and Figures* (OFF) atau *Office of War Information* (OWI)--tempat para pionir komunikasi bergabung semasa Perang Dunia II.

Memang tidak lengkap bicara mengenai sejarah disiplin Ilmu Komunikasi di Amerika Serikat—yang menjadi patron studi komunikasi di manapun—tanpa menyinggung OFF atau OWI. Didirikan pada bulan Oktober 1941, OFF dimaksudkan untuk meningkatkan moral publik (*to boost public morale*). Langkah ini dilakukan sebagai persiapan AS memasuki ajang Perang Dunia II, karena enam minggu setelah terbentuknya OFF, AS secara resmi bergabung dengan pasukan Sekutu. Pendirian OFF bukannya tanpa kontroversi. Beberapa kalangan, terutama pers, telah “mencium” kemungkinan OFF terlibat dalam operasi militer—khususnya dalam aksi-aksi propaganda. Kecurigaan itu memang ada benarnya. Setelah Jepang menyerang Pearl Harbour, Wilbur Schramm menulis surat kepada Direktur OFF—Archibald McLeish—menawarkan dirinya secara sukarela bergabung dalam OFF. Menurutnya, perang kali ini berbeda dengan perang-perang sebelumnya. Perang kali ini adalah “*a war of communication*” (Rogers, 1994: 14). Tentu saja McLeish tidak mungkin melewatkan lamaran yang sangat meyakinkan seperti ini. Dua minggu kemudian, McLeish menunjuk Schramm mengepalai Departemen Pendidikan OFF. Sebuah penunjukan yang berimplikasi sangat luas baik pada Schramm, kolega-koleganya, maupun arah perkembangan disiplin baru ilmu sosial yang diberi nama—belakangan—sebagai Ilmu Komunikasi Massa. Sebagaimana diungkapkan Gladner, “*Schramm’s fifteen months with OFF and OWI would drastically change his life—change the direction of his intellectual pursuits, thrust him into a circle of national decision-making elites, and prompt him to refer himself as a social scientist rather than a literary humanist*” (1990: 269 dalam Rogers, 1994: 14).

OWI didirikan delapan bulan kemudian sebagai hasil reorganisasi OFF. Pada awal pendiriannya—13 Juni 1942—OWI mempekerjakan

400 karyawan, dengan anggaran sebesar 1.5 juta dollar. Jumlah yang luar biasa di jaman serba susah itu. Salah satu biro OWI terbesar—dan kemungkinan terpenting—adalah Bureau of Intelligence. Biro yang diketuai oleh Budd Wilson ini bertugas untuk memompa opini publik terkait perang. OFF, dengan sayap Biro Intelijennya, tercatat aktif melaksanakan riset-riset untuk mengukur opini publik guna mengetahui kadar pemahaman publik mengenai informasi-informasi terkait perang. Misalnya, penelitian menyangkut seberapa efektif Pandu Remaja menyebarkan poster-poster pemerintah yang memuat informasi maupun propaganda perang. Tugas lainnya adalah menangkai propaganda musuh dengan menganalisis pesan-pesan propaganda pihak lawan. Dari sinilah cikal-bakal paradigma Laswell yang melegenda itu bermula (*who says what – to whom – in which channel – with what effect*).

Terlepas dari krisis internal, pemotongan anggaran, maupun masalah kepemimpinan, dan menurunnya kredibilitas lembaga, OFF atau OWI menjadi andalan pemerintah AS ketika itu untuk melaksanakan “*white proganda*” yang ditujukan pada khalayak domestik. Office of Special Services (OSS), yang belakangan menjadi Central Intelligence Agency (CIA), bertanggungjawab atas “*black propaganda*”--*communication messages in which the true identity of the communicator is falsified and which include false information* (Rogers, 1994: 15). Kita dapat melihat kaitan antara lembaga penggodokan para ahli komunikasi ini dengan benih-benih militerisme yang tersembunyi di balik jubah CIA.

Kini, mari kita amati sejarah disiplin komunikasi dari perspektif Simpson yang sangat kritis. Simpson menarik sejarah disiplin komunikasi dalam hubungannya dengan militerisme melalui fakta-fakta yang ditemukannya pada, pertama, sosok Hadley Cantril; dan kedua, pada organisasi Center for International Studies (CENIS).

Penelusuran keterlibatan CIA dalam sejarah komunikasi dari sosok Hadley Cantril. Profesor Cantril dikenal sebagai Direktur *Princeton Radio Project* (1937-1939), sekaligus pendiri dan Direktur *Princeton's Office of Public Opinion Research*. Lembaga yang disebut-sebut belakangan ini mendapatkan banyak proyek dari CIA, khususnya dalam Layanan Penyiaran Informasi Asing (*Foreign Broadcast Information Services*). Beberapa proyeknya menjadi karya klasik penelitian komunikasi massa di manapun, seperti *The Psychology of Radio* yang dikerjakannya bersama Gordon Allport. Cantril juga melakukan kajian seminal terhadap teori

dan riset komunikasi massa. Survei opini publiknya di Eropa dan negara-negara Dunia Ketiga menjadi landasan pelebagaan kajian opini publik internasional selama lebih dari dua dekade.

*Cantril specialized in international surveys intended to determine how factors such as class, nationalism, and ethnicity affected the stereotypes present in a given population, and how those stereotypes in turn affected national behavior in various countries, particularly toward the United States.” (Prison Planet Forum, 2009).*

Kajian Cantril bertitik tolak dari dua premis: pertama, ia mengelaborasi risetnya dengan konsep “*picture in our head*”-nya Walter Lippman sebagai cara manusia bereaksi ketika menghadapi dunia di luar pengalaman langsungnya; kedua, Cantril percaya bahwa tujuan dan cita-cita AS adalah mulia dan bermanfaat bagi dunia secara luas. Ia yakin bahwa sikap-sikap tidak simpatik yang ditujukan terhadap AS disebabkan oleh kesalahpahaman atas niat baik AS. Kajiannya, karena itu, adalah langkah pertama untuk mengubah opini khalayak internasional agar lebih bersahabat dengan AS.

CIA menyediakan dana tak kurang dari 1 juta dollar pada tahun 1956 untuk Cantril dan koleganya, Lloyd Free, guna mengumpulkan informasi intelijen mengenai sikap-sikap publik di negara-negara yang menjadi target sasaran operasi CIA. Dari mana CIA memperoleh dana riset sebesar itu? Kuat dugaan, *Rockefeller Foundation* melakukan praktik pencucian uang dengan menggelontorkan dana tersebut bagi riset-riset opini publik untuk kepentingan CIA. Tentu saja, semua ini bukan tanpa perhitungan bisnis jangka panjang. Bagi *Rockefeller Foundation*, pendanaan ini merupakan sebetulnya investasi untuk mengamankan rencana ekspansi bisnis kelompok Rockefeller di masa depan dalam lingkup industri berskala internasional.

Fakta kedua yang mengaitkan sejarah komunikasi dengan keterlibatan CIA terkait dengan keberadaan *Center of International Studies* (CENIS), yang didirikan di salah satu perguruan tinggi paling prestisius di AS—kalau bukan di dunia: *Massachusetts Institute of Technology* (MIT). Keterlibatan CIA dengan CENIS yang berdiri pada kurun 1950-an dilaporkan berlangsung dalam beberapa area. *Pertama*, CIA membiayai awal pendirian CENIS; *Kedua*, CIA mensponsori sejumlah publikasi penting CENIS; *Ketiga*, terdapat fakta yang memperlihatkan CENIS sebagai konduit bagi aliran dana CIA yang digunakan untuk

riset di lembaga-lembaga lain terkait dengan kepentingan CIA; *Keempat*, Direktur CENIS, Max Millikan, sebelumnya bekerja sebagai konsultan CIA, bahkan menjadi salah satu asisten direktur lembaga tersebut. Semua kontrak kerja CENIS dengan CIA ini diamini oleh cendekiawan komunikasi jebolan CENIS, *Ithiel de Sola Pool* (1966 dalam *Prison Planet Forum*, 2009).

CENIS mendapatkan dana sebesar 850.000 dollar selama empat tahun dari *Ford Foundation*. Tidak didapatkan bukti bahwa dana tersebut berasal atau diatasmamakan CIA. Dokumen *Ford Foundation* memang memperlihatkan aliran dana dari lembaga tersebut untuk membiayai operasi-operasi intelijen CIA di bidang propaganda. Proyek tersebut bernama *Congress for Cultural Freedom*, diback-up langsung oleh Direktur *Ford Foundation* Edward Shils. Belakangan, nama-nama cendekiawan yang tergabung dalam CENIS memegang posisi penting dalam sejumlah tugas maupun karya penting studi komunikasi massa di masa depan—baik yang terkait langsung dengan strategi militer, ataupun tidak. Hans Speier menjadi Direktur Riset Sosial RAND Corporation (yang menjadi cikal-bakal pengembangan internet), Wallace Carroll menjadi wartawan spesialis topik-topik keamanan nasional—salah satu publikasinya adalah serial mengenai perang klandestin melawan Uni Soviet untuk kepentingan biro intelijen militer. “*In short, CENIS communication studies were from their inception closely bound up with both overt and covert aspects of US national security strategy of the day*” (Simpson dalam *Prison Planet Forum*, 2009).

Nama-nama di atas tidak seberapa dikenal dalam diskusi ilmiah komunikasi di Indonesia, bagaimana dengan nama berikut ini: Daniel Lerner. Cikal-bakal komunikasi pembangunan diinspirasi dari terminologi modernisasi yang bersumber dari Daniel Lerner melalui karya klasiknya, *The Passing of Traditional Society* (1964). Teks ini merupakan puncak dari kajian-kajian CENIS pada area-area yang diidentifikasi biro intelijen AS sebagai “*problems*”, yaitu “para agitator” di Indonesia, radikalisme mahasiswa di Chili, para individu “pendukung perubahan” di Puerto Rico, dan dampak sosial akibat pertumbuhan ekonomi yang luarbiasa di Timur Tengah. CENIS, di bawah Lerner, juga mengkaji desegregasi sekolah-sekolah di Little Rock, Arkansas, sebagai contoh “modernisasi”. Puncaknya, tentu saja, teks *The Passing of Traditional Society* yang disebut-sebut sebagai “*a clear echo of Lippmann’s*

*earlier thesis*” --yaitu bahwa partisipasi publik dalam kekuasaan melalui opini sesungguhnya telah menyebar jauh sebelum partisipasi politik dan ekonomi yang sesungguhnya terjadi di tengah masyarakat negara-negara sedang berkembang. Ini berarti, komunikasi massa memang memainkan peranan penting dalam penciptaan situasi yang eksplosif ini di tangan manajemen elit tertentu. Tidak heran, model strategi pembangunan Dunia Ketiga yang diajukan Lerner sangat berorientasi pada model-model operasi militer “... that combined ‘white’ and ‘black’ propaganda, economic development aid, and US-trained and financed counterinsurgency operations to manage these problems in a manner that was “responsible” from the point of view of industrialized world” (Prison Planet Forum, 2009).

Laju disiplin komunikasi yang berorientasi pada model militeristik tampaknya tak terbendung lagi. Menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana publik lantas bereaksi terhadap model-model komunikasi semacam ini? AS adalah negara besar yang melahirkan begitu banyak pemikir dunia. Bagaimana tanggapan tokoh-tokoh intelektual AS di tengah dinamika dunia seperti ini?

Simpson menunjukkan bahwa perjalanan Schramm, Laswell, OFF atau OWI, CENIS dan organisasi lain sejenis tidak mulus-mulus amat. Sejumlah cendekiawan mengkritik keras cara Schramm dan rekan-rekannya memainkan opini publik demi kepentingan penguasa. Ini terkait dengan kecurigaan mereka seputar praktik yang diasumsikan sama kotornya dengan siasat licik pihak musuh. Praktik yang dikritik habis-habisan itu adalah propaganda dan *psychological warfare* atau perang urat syaraf – mesin perang nan canggih warisan Perang Dunia II.

### **Propaganda dan Perang Urat Syaraf: Cikal-bakal Praktik Manipulasi Komunikasi**

Prison Planet Forum – sebuah milis yang didedikasikan bagi para mahasiswa ilmu sosial, pada tahun 2009 mengangkat topik *Globalization and new plan of the NWO: Mind Control*. Diskusi ini diangkat dari buku karya Christopher Simpson, *Psychological Warfare and The Science of Coercion*. Dalam buku Simpson dikatakan merupakan sebuah dokumen putih yang memperlihatkan sisi lain dari kedigdayaan ilmu komunikasi – sisi gelap yang mengejutkan. Simpson sendiri menuturkan, buku ini ditulisnya demi tiga tujuan besar:

*First, it outlines the history of US psychological warfare between 1945-1960, discussing the basic theories, activities and administrative structure of this type of communication enterprise. Second, it looks at the contributions made by prominent mass communications researchers and institutions to that enterprise. Third, it examines the impact on psychological warfare programs on widely held preconceptions about communication and science within the field of communication research itself. (Simpson, 2004: 3)*

Keterkaitan sejarah komunikasi dengan konsep-konsep propaganda terlihat jelas pada tujuan ketiga.

Jika cikal-bakal disiplin komunikasi bersumber dari propaganda, maka apakah sesungguhnya propaganda itu dalam benak para pendiri disiplin komunikasi? Karya klasik Laswell, *Propaganda Technique in the World War* yang dikutip oleh Severin & Tankard (2001), mendefinisikan propaganda sebagai berikut.

Propaganda semata merujuk pada kontrol opini dengan simbol-simbol penting, atau berbicara secara lebih konkret dan kurang akurat melalui cerita, rumor, berita, gambar, atau bentuk-bentuk komunikasi sosial lainnya. Propaganda dalam arti yang paling luas adalah teknik memengaruhi tindakan manusia dengan memanipulasi representasi (penyajian). Representasi bisa berbentuk lisan, tulisan, gambar, atau musik. (Poerwito-Setijadi, 2011: 151)

Definisi Laswell ini agaknya merujuk pada Walter Lippmann dalam esainya *Public Opinion*. Merekayasa kehendak bersama, tutur Lippmann, jelas bukan perkara mudah. Pasalnya, bagaimana ide yang kabur (sebagaimana dalam ideologi) dapat memiliki kekuatan untuk mempersatukan opini secara mendalam? Fakta yang terjangkau oleh manusia, dikarenakan keterbatasannya, tidak bisa mewakili kekuatan perasaan itu sendiri, pun tak bisa menyatakan semua dimensi kenyataan. Di sinilah stimulus bermain. Tepatnya, memainkan emosi untuk menarik pelatuk dan yang namanya pelatuk bisa ditarik oleh lebih dari satu stimulus.

Stimulus-stimulus boleh jadi merupakan serangkaian gambar atau film dalam pikiran kita yang ditimbulkan oleh tulisan-tulisan di media cetak atau berita siaran radio. Gambar-gambar pelahan-lahan memudar dan sulit dipertahankan durasinya. Kontur gambar dan getarannya berubah-ubah. Secara berangsur-angsur, Anda memasuki proses mengetahui apa yang Anda rasakan tanpa rekayasa sama sekali mengapa Anda merasakannya. Gambar yang pelahan-lahan menghilang itu diganti oleh gambar lain, dan kemudian oleh nama atau lambang. Sementara emosi jalan terus, dan kini digerakkan oleh lambang dan nama yang menggantikan gambar yang asli... (Lippmann, 1998: 194)



Beginilah mesin propaganda bekerja dalam merekayasa kesadaran manusia, dan menggiring mereka untuk membentuk opini tertentu—yang sebagian besar terjadi karena manusia berusaha menyederhanakan realitas dengan cara mengganti realitas dengan simbol-simbol tertentu. Pada fase ini, menurut Lippmann, manusia tergelincir ke dalam verbalisme—yaitu sebuah situasi ketika manusia berbicara tentang nama dan simbol tanpa peduli pada obyek (Lippmann, 1998: 195).

... ketika seseorang berusaha membandingkan dua situasi yang kompleks, ia akan segera merasa repot dan lelah dalam usaha menyimpan keduanya dalam memorinya secara lengkap dan rinci. Maka, ia akan menggunakan steno singkatan nama, simbol, dan sampel... supaya jika ia ingin maju, ia dapat melakukannya tanpa harus membawa seluruh beban itu dalam tiap kalimat untuk tiap langkah yang diambilnya ... menurut para pakar psikologi, “reaksi yang dikondisikan” atau *conditioned response*, bukan tempelan belaka pada sebuah ide. Segala sesuatu menimbulkan emosi ... manusia mengasosiasikan emosi dengan ide-ide lain, lalu ide tersebut berasosiasi lagi dengan hal-hal lain, begitu seterusnya. Seluruh struktur kebudayaan manusia dalam satu seginya merupakan elaborasi stimulus dan reaksi atas kemampuan emosionalnya yang asli dan tetap di pusat kesadaran manusia. (Lippmann, 1998: 195)

Pada masa sezamannya, memang tidak ada ahli yang dapat mendefinisikan propaganda opini publik sebagai hasil rekayasa kesadaran secanggih Lippmann. Lippmann tidak hanya menganalisis anatomi propaganda sebagai bagian dari perekayasa kesadaran. Ia juga mengaitkannya dengan revolusi politik, demokrasi, dan hakekat kebenaran dalam industri pers. Tidak disangsikan lagi, pemikiran-pemikiran seperti inilah yang menjadi acuan para pendiri komunikasi yang dipraktikkan dalam menganalisis dan merumuskan strategi-strategi OFF atau OWI, sehingga pada gilirannya juga memengaruhi cara mereka mempersepsi dan mendefinisikan komunikasi.

Propaganda pada dasarnya adalah praktik manipulasi kesadaran. Istilah canggih yang berkembang semasa perang, untuk merujuk pada praktik propaganda, adalah “*psychological warfare*” atau perang urat-syaraf. Istilah ini muncul pertama kali pada tahun 1941 dalam teks yang menganalisis propaganda di tahap awal perang yang berlangsung di Eropa (Daugherty dalam Simpson, 1994: 11). Secara literal, *psychological warfare* adalah terjemahan dari istilah Nazi *Weltanschauungskrieg* (*worldview warfare*), “... meaning the purportedly scientific application of propaganda, terror, and state pressure as a means of securing an ideological

*victory over one's enemies* (Prison Public Forum, 2009). Simpson menambahkan, *psychological warfare* mencakup "... a broader range of application of psychology and social psychology to wartime problems, including battlefield preparation, ideological training of friendly forces, and ensuing morale and discipline on the home front" (Simpson, 1994: 11). Dalam praktik, *psychological warfare* mewujud sebagai propaganda, operasi terselubung (*covert operations*), perang gerilya, hingga istilah yang paling modern: *public diplomacy*. Negara-negara komunis menyebutnya sebagai "agitasi dan propaganda", serta mengaitkannya dengan konsep yang lebih besar: pergulatan kelas dan *people's war*. Kaitan antara *psychological warfare* dengan konsep-konsep komunikasi massa tidak disangsikan lagi.

*Within the present context, psychological warfare can best be understood as a group of strategies and tactics designed to achieve the ideological, political, or military objectives of the sponsoring organizations (typically a government or political movement) through exploitation of a target audience's cultural psychological attributes and its communication system. Put another way, psychological warfare is the application of mass communication to modern social conflict: it focuses on the combined use of violence and more conventional forms of communication to achieve politicomilitary goals.* (Simpson, 1994: 15)

Penggunaan komunikasi massa untuk maksud-maksud propaganda atau *psychological warfare* mewarnai pemikiran awal tentang komunikasi (massa), sehingga komunikasi pun didefinisikan sebagai instrumen untuk membujuk atau mendominasi kelompok target. Bagi para ahli komunikasi, "... they understood "communication" as little more than a form of transmission into which virtually any type of message could be plugged (once one had mastered the appropriate techniques) to achieve ideological, political, or military goals" (Simpson, 1994: 6). Komunikasi juga dipandang berstrata – sebuah proses yang hierarkis, di mana inisiatifnya selalu dimulai dari kelompok elit dan karenanya bersifat indoktrinatif dan satu arah. Simpson selanjutnya mengutip Chaffee dan Hochheimer yang menyatakan bahwa komunikasi massa "... was "appropriately viewed from [the perspective of] the top or power center rather than from the bottom or periphery of the system" (Simpson, 1994: 6).

Secara inheren, pendefinisian komunikasi massa seperti ini jelas mengandung kesalahan moralitas. Menimbang situasi yang dihadapi pada penghujung perang ketika itu (Perang Dunia II dan situasi menjelang Perang Dingin), maka dapat dipahami mengapa para ahli komunikasi



tergelincir dalam pemaknaan semacam itu. Program *psychological warfare* sendiri dipandang jauh lebih “sehat” dan “manusiawi” ketimbang membuka front perang fisik di zona perang. Paling tidak, *psychological warfare* dianggap “... an enlightened and relatively peaceful means of managing international conflicts through measuring short of all out war” (Simpson, 1994: 7). Tidak heran jika para ahli—yang secara terbuka menyatakan anti perang sekalipun—cenderung merekomendasikan *psychological warfare* jika memang negara harus terlibat dalam peperangan.

Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa praktik manipulasi kebenaran yang telah ditunjukkan oleh esei-esei Lippmann dalam bentuk propaganda justru tidak membuat Schramm, maupun para ilmuwan sosial terkemuka lainnya, secara kritis mempertanyakan kesalahan moralitas yang inheren dalam konsep dan aplikasi *psychological warfare* dalam konteks propaganda yang lebih modern. Situasi politik dunia di tengah perang memang sangat genting. Segenting-gentingnya situasi, tidak adakah gagasan lain muncul dari benak para ilmuwan—atau jangan-jangan mereka terjebak dalam pola *groupthink* yang menumpulkan kekritisannya?

Sejarah yang berhasil dilacak oleh Simpson menunjukkan bahwa pada titik inilah telah terjadi kemandekan wacana di tengah lingkaran para cendekiawan. Laswell mengajukan gagasan yang kurang lebih merupakan siasat *psychological warfare* untuk menyusun upaya sistematis guna memanipulasi sentimen massa demi melindungi demokrasi dari ancaman masyarakat otoritarian seperti Nazi Jerman maupun Uni Soviet, beberapa tokoh pun muncul sebagai *devil's advocate* di tengah menguatnya wacana tersebut. Di antaranya, Donald Slesinger, mantan Dekan Fakultas Sosial di University of Chicago. Dalam salah satu sesi seminar Rockefeller Foundation, Slesinger mengemukakan gagasan-gagasan Laswell yang dinyatakannya telah memanfaatkan tipuan-tipuan demokrasi sebagai dalih untuk menerapkan tujuan dan metode otoritarianisme bentuk baru. Operasi semacam ini, ia menilai bahwa para ilmuwan telah mengorbankan baik kebenaran maupun individualitas manusia untuk mengangkat respons massa sebagai stimuli perang. Tak ada yang lebih mengerikan daripada kenyataan bahwa diskusi para ilmuwan tersebut pada dasarnya tak berbeda dengan operasi politik para diktator. “We have thought in terms of fighting dictatorship-by-force through the establishment of dictatorship-by-manipulation” (Prison Public Forum,

2009). Perbedaannya, diktator pada umumnya meraih kekuasaan secara paksa melalui kekuatan pasukan militer, sementara *psychological warfare* pada dasarnya adalah upaya meraih kekuasaan melalui manipulasi (kesadaran).

Slesinger tidak sendiri. Joseph Willitz, seorang pejabat Rockefeller Foundation juga mengkritik pandangan-pandangan Laswell, yang dinilainya otoritarian, bahkan fasis. Opini general yang terbentuk di tengah kepanikan perang cenderung mendukung Laswell, sehingga tokoh-tokoh kritis yang berbeda pendapat dengan Laswell ini pun tersingkir dari panggung.

### ***Soft Psychological Warfare* sebagai “Teknologi” Komunikasi Pembangunan**

Pasca Perang Dunia II, terjadi rekonstruksi tatanan dan konstelasi politik internasional, yang berakibat pada terciptanya bentuk-bentuk diplomasi publik dan kebijakan luar negeri yang baru. Ini tak lepas dari munculnya negara-negara yang memerdekakan diri, termasuk Indonesia. Sekumpulan negara baru hasil proses kemerdekaan ini dinamai sebagai Negara Dunia Ketiga (*Third World Countries*), atau dalam konteks pembangunan diistilahkan sebagai *development countries*, dalam berbagai level: *underdeveloped*, *less-developed*, atau *developing countries* (Nasution, 1988: 12).

Situasi ini membawa konsep dan aplikasi propaganda Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya ke dalam konteks baru. Kemiskinan, ketidaksejahteraan, dan ketimpangan ekonomi menjadi “musuh baru” yang harus dihadapi—di samping ancaman Perang Dingin dengan negara-negara Blok Timur. Upaya memblokir pengaruh Komunisme, Presiden AS Harry S. Truman pada tahun 1949 menggagas Marshall Plan, yaitu suatu paket bantuan teknik keuangan yang tadinya ditujukan kepada negara sekutu AS untuk membangun negara masing-masing dari kehancuran perang, tetapi kemudian menjadi lebih berkembang pada bantuan yang ditujukan bagi negara-negara miskin yang siapa lagi kalau bukan negara-negara Dunia Ketiga.

Komunikasi pembangunan bertitik tolak dari paradigma modernisasi yang memandang pembangunan sebagai proses penyempurnaan yang—meminjam istilah Nasution (1988)—bersifat tunggal arah

(*unilinear*) dan bersifat evolusioner. Permasalahan pembangunan sebenarnya sederhana saja, yaitu kurangnya atau perbedaan kapasitas dan kompetensi pengelolaan aset-aset ekonomi dan sumberdaya negara yang dimiliki oleh negara-negara Dunia Ketiga. Solusinya dapat dicapai dengan:

“penerapan (kurang lebih secara mekanistik) sistem ekonomi dan politik yang ada di Barat ke negara-negara Dunia Ketiga karena itu, unsur sentral pemikiran pembangunan adalah metafora pertumbuhan (*growth*), dan mengidentikkan pertumbuhan dengan kemajuan (*progress*)” (Nasution, 1988: 13)

Salah satu diktum pembangunan yang ditawarkan melalui Marshall Plan maupun program lain sejenis adalah adopsi prinsip-prinsip demokrasi sebagai landasan pengelolaan negara. Komunikasi pembangunan diyakini merupakan bagian dari propaganda negara-negara demokrasi untuk memblokir pengaruh komunis dengan menawarkan paket bantuan ekonomi sekaligus ideologi demokrasi. *“The development theory”, which combined propaganda, counter-insurgency warfare, and selective economic development of targeted regions, was rapidly integrated into US psychological warfare practice worldwide as the decade drew to a close (Prison Public Forum, 2009).* Contohnya sendiri bisa dilihat dari “keseriusan” AS ketika menggarap Vietnam dan Laos yang dikoyak perang saudara, dan Indonesia yang juga terancam hal serupa—jika berkaca dari Tragedi G30 PKI. Bisa disimpulkan bahwa melalui paket bantuan yang dioperasionalkan via komunikasi pembangunan, AS dan sekutunya tampaknya tengah menjadikan problematika kemiskinan dan instabilitas Negara Dunia Ketiga sebagai ajang kontestasi dan eksperimen negara-negara maju sendiri. Inilah bentuk *soft propaganda*, yaitu *“instrument of persuasion and manipulation of public opinion which coerces the truth by claiming universality for its views”* (Zaglove, 2012).

Bagaimana persisnya konsepsi dan aplikasi komunikasi pembangunan sebagai bagian dari *soft propaganda*? Nama yang harus disebut-sebut sebagai pemrakarsanya adalah salah satu cendekiawan jebolan CENIS, Daniel Lerner. Karya klasik Lerner, *The Passing of Traditional Society*, menurunkan konsep modernisasi yang secara sosiologis didefinisikan sebagai *“a model of an evolutionary transition from a ‘pre-modern’ or ‘traditional’ to a ‘modern’ society”* (Wikipedia, 2012). Bagi Lerner modernisasi bukan sekadar transisi perubahan. Modernisasi

adalah proses yang disebutnya sebagai “*the secular evolution of a participant society*” (Siegelman, 1974: 8). Lerner memandang, modernisasi dapat mengatasi hambatan-hambatan kultural yang kuat dipengaruhi oleh cara berpikir nonsekuler. Mengikuti alur berpikir Lerner, modernisasi berlangsung melalui serangkaian tahap: urbanisasi, literasi, komunikasi massa, dipuncaki dengan partisipasi politik (Siegelman, 1974). Program-program “modernisasi” Negara Dunia Ketiga pun mencakup serangkaian bantuan pendidikan untuk mengatasi masalah literasi, dan dukungan terhadap media massa sebagai wahana demokrasi.

*... the concept of modernity or modernization as a continuous change in the mindset (and life style) of a person, with regard to its social, legal, economic, political and technological environments. A person or a group of people (a society) to be modern refers to a process of development (or becoming mature/organized) enabled through mass media. Where one turns from its traditional ways of thinking and doing things to a more advanced/more developed or in other words modern way of thinking and doing things. Thus, modernity is a product of development. And development is made possible through effective mass media. (Watts, 2012)*

Pandangan klasik developmentalis semacam ini, yang menempatkan media massa sebagai agen pembangunan yang paling efektif dalam memodernisasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang berkembang lebih maju, terwujud dalam proyek-proyek komunikasi pembangunan. Wujud bantuan komunikasi pembangunan bagi media massa juga dinikmati oleh negara-negara Asia, termasuk Indonesia, yang baru merdeka pasca Perang Dunia II. Indonesia, atau tepatnya Asia, dianggap sebagai target yang perlu diseriusi, dan didemokratisasi secepatnya.

*“Ostensibly, development of mass media and increasing exposure to mass communication stimulates modernization and the growth of democracy in a society. Likewise, rapid democratic progress creates media development and growth. This explains the priority granted to mass media sectors in development aids and programs in many countries of the past.” (Dahlan, 2000: 72).*

Keterkaitan antara media massa dan demokrasi menjadi bagian penting dari pembelajaran mengenai komunikasi pembangunan. Dalam perspektif komunikasi pembangunan, kontribusi media massa bagi proses demokrasi mencakup banyak hal. “*Media can facilitate public discourse, transparency, and broad participation in governance, all the basic requisites for a democracy*” (Dahlan, 2000: 72). Jelas, fungsi media tidak

terbatas sebagai saluran informasi belaka, tapi juga memenuhi fungsi-fungsi komunikasi lainnya.

*“In the first, media play its role by informing the public of the latest development at all the stages of the democratic process. The second involves mediation of public discourse simultaneously and openly between the many sides in the exercise of democracy, e.g. Various publics, institutions, or interests” (Dahlan, 2000: 74).*

Demokrasi sendiri, belakangan disadari, adalah persoalan kultural. Setiap wilayah menerima, mengolah, dan mengaplikasikan gagasan-gagasan demokrasi sesuai dengan konteks sosial politik dan budayanya yang khas. Itu sebabnya, demokrasi versi Asia menjadi berbeda wajahnya dibandingkan dengan konsep demokrasi dari negara pengimpornya. “... *democracy in Asia, especially here in South East Asia, ASEAN countries have often been considered ‘soft authoritarian’ states” (Tay, 2000: 6).* Lebih jauh lagi, dalam kumpulan makalah *Asean Media Information and Communication Center (AMIC)*, dijelaskan bahwa proses transformasi demokrasi menjadi *soft authoritarian states* seperti telah disinggung sebelumnya, memiliki latar tersendiri.

*In the pre-crisis years, many had voting democracies but limited freedoms for individuals and the media. A single party or regime instead dominated the young democracies. Into the 1990s, most ASEAN countries propounded “Asian values” and regional approaches to human rights and democracy that emphasized differences in culture and developmental levels. (Tay, 2000: 6)*

Kondisi semacam ini, maka asumsi Lerner bahwa media massa dapat menjadi indikator atau pemicu demokratisasi, menjadi *questionable*. Beberapa kritik dilontarkan bahwa komunikasi pembangunan sesungguhnya bentuk lain dari westernisasi—yaitu, masuknya nilai-nilai Barat. Kritik ini tak terhindarkan kemunculannya, berhubung segala macam teknologi maupun sistem yang berhubungan dengan modernisasi memang diimpor dari “Barat”. Media massa dalam negeri sendiri lazimnya kalah kreatif mengolah produk medianya, sehingga kalah gaya, kalah aksi, kalah menghibur. Publik pun memilih program-program impor yang dengan sendirinya membawa nilai-nilai tertentu bagi masyarakat penontonnya di negara asalnya.

Paper ini tidak bermaksud untuk mendalami pro-kontra seputar modernisasi dan westernisasi—karena memang *concern*-nya bukan pada isu tersebut. Paling tidak, kontroversi ini perlu diungkap berhubung

kecurigaan terhadap gagasan dan proyek komunikasi pembangunan selamanya tak dapat dilepaskan dari tendensi westernisasi. Sedikit banyak, kecurigaan ini bersumber dari pemikiran para penggagas awal komunikasi pembangunan, yang berkeyakinan bahwa masalah keterbelakangan dan ketertinggalan di negara miskin hanya dapat diatasi dengan penerapan (yang kurang lebih secara mekanistik) sistem ekonomi dan politik yang ada di Barat ke negara-negara Dunia Ketiga (Nasution, 1988: 13).

Alur perkembangan propaganda dan *psychological warfare* seperti ini, yang mewujud dalam ideologi komunikasi pembangunan, maka lagi-lagi kita melihat betapa dominannya model-model strategi propaganda diaplikasikan dalam praktik-praktik komunikasi di masa “modern”. Disimpulkan, ruang lingkup komunikasi dalam perspektif *psychological warfare* yang digunakan militer di masa perang dengan sukses diwariskan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dunia di masa berikutnya. Ideologi dan praktik komunikasi era perang militer telah berhasil diterjemahkan secara luwes dalam diktum-diktum dan aplikasi komunikasi pembangunan, sedemikian rupa sehingga proses “*manufacturing consent*” – meminjam terminologi Chomsky (1988) – atas nama pembangunan berlangsung mulus dan nyaris tanpa retensi.

### **Konteks Indonesia: Antara Propaganda dan Sistem Komunikasi yang Koersif**

Sejarah Indonesia sebagai sebuah negara tak dapat dilepaskan dari hiruk-pikuk Perang Dunia II. Indonesia belajar berdemokrasi melalui gagasan-gagasan impor yang dibawa oleh para Bapak Bangsa. Indonesia kemudian belajar mempraktikkannya di bawah “bimbingan” atau ‘pendampingan intensif’ negara-negara Dunia Pertama yang memberikan bantuan dana pembangunan kepada Indonesia. Wujud sistem komunikasi publik dan komunikasi massa di Indonesia, karena itu, juga tak berbeda jauh dari propaganda ala komunikasi pembangunan.

Dari mana Indonesia belajar menggunakan propaganda? Sebelum mampu berpropaganda sendiri, Indonesia terlebih dahulu menjadi sasaran empuk propaganda. Sejarah mencatat, propaganda modern pertama yang bersifat politis tentang Indonesia dimulai oleh seorang jenderal Belanda, yang menancapkan nama sebagai salah satu pemimpin militer yang kejam di Batavia. Jan Pieterzoon Coen, pada tahun 1615, menulis

iklan dengan tulisan tangan indah di surat kabar Memoire De Nouvelles. Isinya “mengimbau” masyarakat Kepulauan Maluku untuk menolak dan melawan aktivitas pedagang Portugis dalam perdagangan rempah-rempah di kepulauan itu (Adityawan, 2008: 63). Dengan kata lain, merayu rakyat Indonesia supaya berpihak pada penguasa. Sistem pers di masa kolonial memang bisa dikatakan otoriter. Kontrol sepenuhnya berada di tangan pemerintah kolonial Belanda. Tumbuhnya sistem pers nasional baru dimulai pada abad ke-19. Sejarahwan Taufik Abdullah mengategorikan periode ini sebagai era “pra-sejarah pers nasional” (Adityawan, 2008: 65). Seiring dengan menguatnya nasionalisme, maka pers pun tidak lagi sekadar menyebarkan berita, melainkan menjadi sarana tempat menyemai gagasan-gagasan kebangsaan. Sesungguhnya, pada masa ini, proses transformasi masyarakat Indonesia dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern telah dimulai—jauh sebelum demokratisasi ala komunikasi pembangunan dilancarkan negara-negara maju.

Perang propaganda pada masa-masa ini di Indonesia berlangsung di antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk menguasai tanah air. Pada jaman pergerakan, para pendukung pembaharu Indonesia harus bersaing dengan propaganda pemerintah Belanda untuk menarik simpati rakyat. Melalui poster-poster, misalnya, pemerintah Belanda merekrut serdadu-serdadu pribumi dengan iming-iming gaji besar.

Gambar utama poster adalah orang berkulit sawo matang, berseragam tentara, menyangand senjata laras panjang sambil mengayuh sepeda. Agak di belakang gambar tersebut tampak serombongan tentara bersepeda. Sementara di sisi kiri terlihat gambar sederet penduduk bumiputra yang berdiri rapi memandang mereka dengan takjub. Secara keseluruhan, poster tersebut merepresentasikan citra tentara kolonial Hindia-Belanda yang memesonakan sekaligus, yang terpenting, menjanjikan kehidupan jauh lebih baik di masa depan. (Adityawarman, 2008: 66).

Lepas dari Belanda, Indonesia jatuh ke tangan Jepang. Lagi-lagi, perang propaganda terjadi. Jepang melakukan praktik *psychological warfare* yang ditujukan untuk menarik simpati rakyat, sambil menanamkan kebencian rakyat terhadap bangsa barat. Jepang memopulerkan diri sebagai ‘saudara tua’ yang datang untuk membebaskan bangsa Asia dari penjajah barat. Propaganda Jepang dipersiapkan dengan cermat oleh sejumlah pakar, di antaranya Shimizu Hitoshi (Adityawarman, 2008: 67). Bentuk propaganda Jepang kepada rakyat Hindia Belanda (a.k.a. Indonesia) bermacam-macam.



... penayangan film-film tentang kebesaran balatentara Jepang dan kemoderenan masyarakat Jepang; pemutaran piringan hitam lagu-lagu, antara lain "Bengawan Solo" dan "Indonesia Raya"; peredaran besar-besaran majalah yang berisi kemajuan bangsa Jepang; penyiaran aneka berita dari Radio Tokyo yang diawali dan diakhiri pemutaran lagu "Indonesia Raya"; penyiaran pidato berbahasa Indonesia oleh orang-orang Indonesia dengan menyanjung Dai-Nippon serta menghujat Belanda dan Tentara Sekutu; penyebaran sejumlah pamflet dengan mengutip ramalan Jayabaya tentang bangsa berkulit kuning yang datang membebaskan rakyat dari penjajah; peredaran buku tulis, pensil Sakura, dan buku bacaan dongeng "Momotaro" yang dibagikan gratis kepada murid-murid Sekolah Rakyat. (Adityawarman, 2008: 88)

Zaman sekarang, apa yang dilakukan Jepang merupakan wujud *integrated (social) marketing communication*, karena sangat komprehensif, ruang lingkungannya luas, targetnya tersebar, dan tidak menggantungkan diri sepenuhnya hanya pada satu saluran atau satu jenis media massa. Tidak cukup dengan ini saja, Jepang juga membuat dan menyebarkan slogan-slogan seperti "Asia untuk Asia", "Nippon dan Indonesia adalah sahabat baik", "Asia Bersatu", dan lain-lain. Adalah seniman Saseo Ono (1906-1954) yang membuat begitu banyak propaganda grafiti semacam ini, yang dihiasi dengan sketsa-sketsa "Indonesia": gadis Bali, pemandian di Indonesia, candi, pura, wayang golek, perempuan tengah bersembahyang, gadis Minang, karapan sapi Madura, dan lain-lain (Adityawarman, 2008: 68). Berkaca pada contoh ini, Jepang jelas menang media dan teknologi. Keunggulan Jepang ini dilawan oleh para seniman Indonesia dengan poster-poster hitam putih merah memakai cat minyak pada kanvas kertas murahan berukuran 80 x 100 cm (Adityawarman, 2008: 69). Affandi, Sudjojono, Chairil Anwar, dan Dullah yang menjadi pemrakarsa karya-karya semacam ini. Belakangan, mereka menjadi seniman yang sukses dalam bidang seninya masing-masing.

Agresi 1948, pemerintah Indonesia berupaya mengencarkan propaganda sebagai bagian dari upaya memenangkan perang psikologis melawan pihak asing. Mediana, selain poster, ada pula selebaran (pamflet atau leaflet), karikatur surat kabar, dan malah serta grafiti. Penggalan frase "Inggris kita linggis, Belanda kita setrika" dinyanyikan di mana-mana dalam berbagai versi, oleh orang dewasa maupun anak-anak.



Sepenuhnya bebas dari ancaman penjajahan, maka propaganda di Indonesia pun beralih menjadi perang psikologis antara pihak-pihak yang berusaha memenangkan pemilu melalui raihan suara terbanyak. Pada masa awal Indonesia memperlihatkan sikap pro pada pemerintah Barat, namun belakangan presiden Soekarno menggagas inisiatif untuk mengembangkan kelompok negara-negara Non Blok. Menjelang tahun 1966, perang psikologis yang dialami Indonesia mencapai puncaknya. "Keindahan" perang psikologis dan seni "*manufacturing consent*" hilang, digantikan oleh propaganda primitif, banal, dan murahan yang dilancarkan oleh seniman-seniman Lekra untuk mempromosikan komunisme sebagai asas tunggal, PKI sebagai penguasa, dan penyingkiran musuh-musuh PKI.

Perang propaganda sedemikian dahsyat, kenyataannya kudeta PKI mengalami kegagalan. Indonesia pun masuk dalam era baru, yang disebut sebagai Orde Baru. Ambisi penguasa Orde Baru adalah memperbaiki demokrasi yang tercemar oleh anasir-anasir PKI. Kenyataannya, pemerintah Orde Baru membawa trauma politik Orde Lama yang sangat parah, sehingga demokrasinya tak lebih dari jargon belaka, karena sesungguhnya yang terjadi adalah praktik "*soft authoritarian*" dalam mengelola pemerintahan.

David T. Hill mencatat, pada masa awal Orde Baru, pemerintah memiliki dua instrumen yang membatasi kebebasan pers, yaitu Surat Izin Terbit (SIT) dari Departemen Penerangan, dan Surat Izin Cetak (SIC) dari lembaga keamanan militer KOPKAMTIB (2011: 35). Tanpa izin-izin tersebut, pers terancam dibredel. Warna militerisme yang kuat juga terlihat dari berkembangnya tipe media yang berafiliasi pada institusi militer. Misalnya, Harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha (terbit mulai 1965) yang berafiliasi pada ABRI. Terbit Suara Karya pada Maret 1971 yang berafiliasi pada Golkar. Sempat meraih tiras hingga 75.000 pada tahun 1970an, Berita Yudha akhirnya bubar karena "gagal menjembatani jurang pasar antara pembaca militer-pembaca sipil dan berakhir sebagai surat kabar yang tak banyak dibaca oleh orang banyak" (Hill, 2011: 37).

Perkembangan pers di Indonesia pada masa Orde Baru ditandai dengan praktik-praktik yang militeristik. Gelombang breidel terjadi beberapa kali. Pada periode 1970an, pasca tragedi Malari, sejumlah surat kabar dan wartawan senior ditindak pemerintah. Tak kurang dari

12 penerbitan kehilangan SIT dan SIC, di antaranya *Nusantara*, *Harian KAMI*, *Indonesia Raya*, *Abadi*, *Pedoman*, *Suluh Berita*, *Mahasiswa Indonesia*, hingga *Indonesia Pos*. Muchtar Lubis dipenjarakan. Hancurlah ilusi “kemitraan” semu antara pemerintah, pers, dan warga yang selama ini didengungkan oleh penguasa Orde Baru (Hill, 2011: 39). Frustrasi seorang Muchtar Lubis terekam dari pilihannya untuk lebih bergiat di forum internasional, ketimbang di dalam negeri.

“... seperti mendayung melawan arus politik yang amat kuat di Indonesia sekarang ini. Apa pun yang Anda lakukan, anda akan gagal, dan jika Anda melakukannya dengan cara yang kuat, Anda akan mendapat reaksi dari pemerintah yang akan menghentikan seluruh kegiatan Anda ...” (Hill, 2011: 195).

Periode 1980an, terjadi lagi pencabutan izin. *Jurnal Ekuin*, *Prioritas*, dan *Sinar Harapan* menjadi korbannya. Alasannya, pemberitaan mereka bertentangan dengan “nilai-nilai Pancasila”. Tahun 1990an, terjadi lagi pembredelan, kali ini menimpa *Tempo*, *De-TIK*, dan *Editor*. Apa pasal yang membuat mereka sampai dibredel?

Media-media tersebut menurunkan aneka tulisan (terkadang kritik) tentang bisnis keluarga presiden [Suharto – *pen.*], pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan kekuasaan, cacat administrasi pada anggaran pemerintah, dan pecahnya kelompok-kelompok sempalan dalam tubuh pemerintah maupun tentara. Sementara itu, beberapa bulan sebelumnya, ketiga media ini beradu nyali melawan pemerintah melalui laporan-laporannya, sehingga terjadi akumulasi sejumlah persoalan. (Hill, 2011: 43).

SIT dan SIC, juga proses bredel hanyalah salah satu instrumen yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mengontrol pers. Bersamaan dengan itu, pemerintah membentuk lembaga-lembaga yang kepadanya diberikan kuasa untuk mengontrol informasi dan loyalitas lembaga terhadap “negara”. KOPKAMTIB, Departemen Penerangan, BAKIN, hingga LIN. Pengekangan pers berlangsung sistematis, hingga pada tingkat akar. Pada masa Orde Baru, pemerjaraan wartawan sudah tidak aneh lagi. Pada saat-saat tertentu, menjelang naik cetak, para redaktur pelaksana harus siap di depan telepon, menanti kalau-kalau ada panggilan dari Departemen Penerangan terkait dengan berita yang dimuatnya. Terkadang, telepon bahkan datang dari aparat Polres atau Polsek. Praktik pembungkaman terhadap pers ini memperlihatkan situasi yang membelenggu – wajah dari sebuah sistem komunikasi yang koersif.

Jelas, apa yang terjadi di masa-masa ini memperlihatkan bahwa sistem pers nasional dikembangkan berdasarkan pijakan-pijakan yang otoriter-militeristik. Pers—yang dalam *psychological warfare* semasa OWI atau OFF menjadi salah satu instrumen pemerintah—justru menjadi korban. Pemerintah Orde Baru, dengan jargon “pers yang bebas dan bertanggungjawab”, telah memanfaatkan ideologi komunikasi pembangunan untuk kepentingan yang berpihak pada penguasa, bukan pada rakyat. Ini jelas bukan cerita baru.

Apa yang ingin ditunjukkan, melalui gambaran singkat mengenai perkembangan pers yang mewarnai tatanan sistem komunikasi di Indonesia, memperlihatkan konsekuensi ketika komunikasi dikembangkan dalam perspektif *psychological warfare*. Trauma masa perang menjadikan komunikasi hanya difungsikan sebatas untuk kepentingan intelijen—yang pada akhirnya lebih berorientasi pada kemenangan pihak berkuasa. Komunikasi menjadi sains yang koersif, dan pada praktiknya, menindas siapa saja, termasuk—dalam kasus Indonesia—mengorbankan pers yang pada awalnya digunakan sebagai media propaganda nasional. Apa yang terjadi di negara kita merupakan cetak biru dari sistem komunikasi yang dikembangkan pada Perang Dunia II—dalam berbagai bentuk. Sistem komunikasi kita hingga pada masa Orde Baru, secara eksplisit memperlihatkan warisan cara berpikir komunikasi dalam perspektif *psychological warfare* yang sempit.

Lantas, bagaimana dengan tatanan komunikasi kita pasca Orde Baru sekarang ini? Begitu lepas dari sistem yang mengekang, kita berpindah pada situasi yang tampaknya non-sistem. Tanpa sistem. Kebebasan mengutarakan pendapat mencapai euforia hingga pada tingkat yang memuakkan saat *talk show-talk show* radio, misalnya, dipenuhi cacik dengan kata-kata kotor kepada mantan-mantan penguasa. Upaya membangun sistem komunikasi yang adil dan beradab mendapatkan tantangan yang sulit. Lembaga yang begitu berkuasa seperti Departemen Penerangan memang sudah tidak ada lagi. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) tampaknya kurang gigih memperjuangkan kepentingan publik dan lebih asyik berkuat dengan proyek pengadaan internet, misalnya, alih-alih mengembangkan masyarakat yang kritis terhadap media. Kominfo juga masih bersilang-sengketa dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sehingga upaya menata sistem penyiaran yang baik tampak berjalan lambat. Para kapitalis media berlenggang semakin bebas tanpa batasan apapun.

Situasi semacam ini lahir dari ketidaksiapan kita melepaskan diri dari bayang-bayang komunikasi paradigma klasik. Sekaligus, memperlihatkan sukses paradigma komunikasi psychological warfare tertanam dan terlembagakan dalam institusi pendidikan komunikasi. Semua ini tak dapat dilepaskan dari kerja keras dan ambisi seorang Wilbur Schramm.

*Schramm recommended targeting educational institutions to start a "comprehensive network" using media and textbooks, and "organizing faculty and student groups to disseminate information and monitoring public opinion ... He stressed the importance of using educational broadcasting in post-war period to solidify a national ideology." (Glander, 1996: 378).*

Tujuan Schramm sesungguhnya mulia, apabila terkait dengan kepentingan menyolidkan ideologi nasional. Tetapi, berpotensi menjadikan komunikasi sebagai sains yang mampu menghasilkan mesin berbahaya di tangan orang-orang yang memang berniat memanipulasi kesadaran publik demi kepentingannya sendiri.

Tulisan ini berpangkal pada Schramm, dan berakhir pula pada tokoh luar biasa tersebut. Sepak terjang Schramm dan keterlibatannya dalam operasi militer memang mengejutkan kita. Sebagaimana dinyatakan oleh penulis biografinya, Stephen Chaffee, Schramm layak didudukkan pada menara terhormat—*"towers above our field"*. Tidak disangsikan lagi, mengingat kontribusinya yang mengagumkan, periode 1937 hingga 1997 ditahbiskan sebagai *"The Age of Schramm"* (Simmons, 2004: 107). Di sisi lain, Schramm telah mewariskan komunikasi sebagai sebetuk ilmu yang pada tataran tertentu bisa menjadi sangat koersif. Kenyataan ini harus diakui, sehingga kita punya kesempatan untuk merenungkan, akankah komunikasi mengubah dunia menjadi lebih baik dari sekarang jika tatanannya dibangun tidak berdasarkan trauma-trauma *psychological warfare*? Akankah tatanan komunikasi kita—nasional maupun internasional—akan lebih "beradab" jika orang-orang seperti Slesinger dan Willitz tidak dibungkam dan disingkirkan dari pentas hanya karena berbeda pendapat dengan Schramm dan kelompoknya? Menilik sejarah ini, barangkali, komunikasi memang bukan sains yang netral. Netral atau tidak, pertanyaan yang paling utama sekarang adalah bagaimana memperbaiki cacat-cacat komunikasi ketika sains ini dibangun dari asumsi-asumsi yang hanya berpihak pada kepentingan segelintir "penguasa" di masa perang (000).

## Daftar Pustaka

- Adityawarman, Arief, 2008, *"Propaganda Pemimpin Politik Indonesia: Mengupas Semiotika Orde Baru Soeharto"*, Jakarta: LP3ES.
- Dahlan, Alwi, 2000, *"The Indonesian Experience: Country Report"*, Dalam *"Media & Democracy in Asia: An AMIC Compilation"* Singapore: AMIC.
- Glander, Timothy, 1996, *"Wilbur Schramm and The Founding of Communication Studies"*, Dalam *Jurnal Educational Theory*, Volume No. 46, Issue 3, 1996.
- Herman, S. Edward & Noam Chomsky, 1988, *"Manufacturing Consent: Political Economy of Mass Media"*, New York: Pantheon Books.
- Hill, David T, 2011, *"Jurnalisme dan Politik di Indonesia: Biografi Kritis Mochtar Lubis (1922-2004) sebagai Pemimpin Redaksi dan Pengarang"*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hill, David T, 2011, *"Pers di Masa Orde Baru"*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lippmann, Walter, 1998, *"Opini Umum"* (penerjemah: S. Maimoen), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nasution, Zulkarimein, 1988, *"Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya"*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Poerwito-Setijadi, Naniek, *"Multi Disiplin Ilmu Dalam Ilmu Komunikasi" dalam Jurnal Ilmiah Communique*, Vol. 6, No. 2 Januari 2011.
- Prison Planet Forum, 2009, *"Globalization and the plan for NWO -> Mind Control"*. <http://forum.prisonplanet.com/index.php?topic=117196.0>. Tanggal akses terakhir 27 April 2012, pk. 13.10 WIB.
- Rogers, Everett M, 1994, *"A History of Communication Study: A Biographical Approach"*, New York: The Free Press.
- Siegelman, Lee, *"The Reanalysis of Modernization"*, Dalam *The Journal of Developing Areas* Vol. 8, No. 4 (July 1974), <http://www.jstor.org/discover>. Tanggal akses terakhir 27 April 2012, pk. 13.17 WIB.
- Suciu, Peter, 2007, *"The Rise of the Prosumer"*, <http://techcrunch.com/2007/06/15/the-rise-of-the-prosumer/> Tanggal akses terakhir 27 April 2012, pk. 14.09 WIB.

Tay, Simon S C, 2000, "*Democracy and the Media in ASEAN and Asia*",  
Dalam "*Media & Democracy in Asia: An AMIC Compilation*" Singapore:  
AMIC.

Watts, Geraint, [http://termpaperaccess.com/doc\\_the\\_concept\\_of\\_modernity\\_with\\_reference\\_to\\_sociological\\_contributions\\_of\\_dfksp.html](http://termpaperaccess.com/doc_the_concept_of_modernity_with_reference_to_sociological_contributions_of_dfksp.html) Tanggal akses terakhir 28 April 2012, pk. 14.02 WIB.

Zaglove, Jerald, *Propaganda*. <http://www.custom-essay.net/essay-encyclopedia/Propaganda-Essay.htm> Tanggal akses terakhir 28 April 2012, pk. 15.29 WIB.

# PEMANFAATAN APLIKASI GEOWEB UNTUK INTELIGENSI MILITER (STUDI KASUS: APLIKASI *GOOGLE EARTH* DAN *GOOGLE MAPS*)

**Prio Handoko dan Adhi Gurmilang**

## **Pendahuluan**

Di tahun 1765, seorang prajurit Angkatan Laut Inggris bernama James Rennel bertugas untuk melakukan pemetaan daerah India. Berangkat bersama sekelompok perajurit lainnya, ia menggunakan teknologi tercanggih pada zamannya yaitu sebuah kompas dan alat pengukur jarak yang disebut *perambulator*. Selama perjalanan enam tahun, satu prajurit tewas diserang harimau, lima lainnya dianiaya macan tutul dan Renell sendiri terluka diserang penduduk lokal. Renell bertahan hidup dan berkat map dan atlas buatan Renell yang diterbitkan tahun 1780-an, menjadi bukti bahwa Inggris mencoba memahami India. Seorang pakar geografi Inggris pun menulis bahwa peta Renell merupakan petunjuk kehidupan.

Kemampuan membuat pemetaan biasanya merupakan sebuah keahlian khusus yang dimiliki segelintir orang. Bahkan setelah munculnya satelit komersil dan fotografi udara, kemampuan untuk membuat map hanya dapat dilakukan oleh para pakar. Saat ini, kemampuan membuat peta menjadi dapat dilakukan oleh semua orang dengan menggunakan aplikasi *geoweb*. Aplikasi *geoweb* yang menggunakan data *geospatial* dan teknis *geoprosesing* menjadikan siapapun yang ingin mengenal dunia secara lebih mendalam menjadi lebih mudah dengan kombinasi peta jalan dan citra satelit yang memetakan dunia (Ratliff, 2007).

Lake dan Farley (2007) menyatakan bahwa *geoweb* yang menggunakan data *geospatial* dan teknis *geoprosesing* sangat terkait dengan

proses bisnis di berbagai bidang. Perdagangan, transportasi, dan logistik, perencanaan, pertahanan, respon darurat, pelayanan kesehatan, manajemen aset, dan bidang lainnya menggunakan informasi spasial dan kemampuan untuk menggunakan data ini meningkatkan efisiensi dan mengembangkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengambilan keputusan yang cepat dan akurat untuk meningkatkan kesuksesan mengalahkan musuh dan menekan korban merupakan karakteristik penting dalam bidang militer. Hal ini dapat dicapai jika intelijen militer mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Sun Tzu, filsuf, dan ahli strategi perang, menyatakan bahwa perang didasarkan pada prinsip keunggulan intelijen, penyekatan, dan pengetahuan akan pemikiran musuh. Doktrin militer modern juga memiliki kepentingan terhadap aplikasi pada intelijen. Informasi adalah komoditas kunci di medan perang, sangat berguna untuk mengetahui medan perang. Intelijen Militer (IM) digunakan untuk menyediakan keunggulan intelijen yang dibutuhkan untuk memenangkan perang.

Menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, intelijen militer adalah informasi dan pengetahuan yang didapatkan melalui pengamatan, penyelidikan, analisis, atau pemahaman. Beberapa jenis intelijen didapatkan melalui teknologi ruang, kedekatan, dan peralatan darat. Teknologi satelit merupakan salah satu teknologi yang digunakan pada *system* IM (Varhsney, 2002).

Intelijen yang didapatkan melalui eksploitasi dan analisis pencitraan dan informasi *geospasial* untuk menggambarkan fitur fisik dan aktivitas secara geografis di bumi disebut *Geospatial Intelligence*. Salah satu contoh pemanfaatan yang sangat jelas terlihat adalah pemanfaatan aplikasi *geoweb* *Google Earth* dan *Google Maps* oleh pasukan Amerika Serikat dalam operasi penyergapan dan penangkapan Osama bin Laden di rumah persembunyiannya pada tanggal 2 Mei 2011 yang lalu, yang berakhir dengan terbunuhnya pimpinan Taliban dalam operasi tersebut. Berkat *Google Maps* dan *Google Earth*, perjalanan Bin Laden dapat diikuti mulai dari Khartoum sampai Jalalabad sampai daerah terpencil di mana ia bersembunyi dari kejaran Amerika Serikat sampai area Pakistan di mana ia menemui akhir hidupnya (Kolasowki, 2011).

Keberhasilan operasi ini tidak terlepas dari peran kedua aplikasi tersebut yang secara tepat memberikan informasi letak posisi tempat persembunyian Osama bin Laden, baik dalam bentuk 3 dimensi (3D)



maupun 2 dimensi (2D). Hasil pemetaan yang diberikan secara tepat oleh kedua aplikasi ini menjadi referensi untuk penyusunan strategi penyerbuan dan memperkecil kemungkinan jatuhnya korban di pihak pasukan militer AS, karena pasukan akan mendapatkan informasi yang tepat.

*Google Earth* melakukan pemetaan bumi dari gambar-gambar hasil pemetaan satelit, fotografi udara, dan *Global Information System (GIS) 3D*. Hasil dari pemetaan yang telah dilakukan kemudian diubah kedalam bentuk 2D yang menawarkan informasi yang lebih rinci lokasi yang dimaksud. Perubahan bentuk tampilan hasil pemetaan bumi oleh *Google Earth* dalam tampilan 3 dimensi menjadi tampilan 2 dimensi oleh *Google Earth* kemudian kita kenal sebagai *Google Maps*.

Pemetaan ini dimungkinkan karena *geospasial* sendiri merupakan sebuah analisis geografis permukaan bumi menggunakan pendekatan analisis statistik dan teknik pengumpulan data geografis, seperti GIS. Kemampuan GIS dalam melakukan pemetaan bumi ini memungkinkan setiap informasi yang terkait dengan hasil pemetaan akan dikaitkan dengan data lainnya seperti nama jalan, koordinat lintang, dan bujur, atau dengan lingkungan sekitar hasil pemetaan atau konteks spasial. Pemanfaatan *global positioning system (GPS)* dalam GIS memberikan kemampuan pada aplikasi *Google Earth* dan Google untuk mengukur garis lintang dan bujur secara langsung, dan untuk membuat database yang luas dari trek kendaraan, binatang, dan pejalan kaki (Goodchild, 2008).

*Google Earth* dan *Google Maps* sendiri pada awalnya merupakan sebuah aplikasi yang dimaksudkan untuk pemetaan bumi bagi pengguna dalam pencarian lokasi dan penentuan lokasi tujuan secara cepat dan tepat. Kita menggunakannya untuk pencarian arah ketika melakukan perjalanan, membeli rumah bahkan melakukan perencanaan ketika melakukan perjalanan keluar negeri. Teknologi *geospasial* ini merupakan kombinasi dari pencitraan bumi tingkat tinggi, perpustakaan digital, dan geoportal. Tidak ketinggalan, pihak militer memanfaatkan aplikasi pemetaan bumi untuk tujuan intelijensi militer (Goodchild, 2008).

Sayangnya, seiring berjalannya waktu, ternyata pengguna aplikasi pemetaan bumi ini bukan hanya pihak militer tetapi digunakan juga oleh pihak-pihak tertentu seperti teroris sebagai alat untuk menyusun strategi penyerangan dan usaha-usahanya untuk menganggu keamanan

negara. Sebagai contoh pada bulan September tahun 2006, militan Al Qaeda di Yaman meledakkan empat bom mobil dalam usahanya yang gagal untuk melakukan penyerangan terhadap fasilitas minyak dan penyusunan strategi penyerangan tersebut memanfaatkan bantuan *Google Earth* (Open Source, 2008).

Quasti (2008) menyatakan sebagai usaha untuk melindungi penyalahgunaan informasi geospasial ini, berbagai negara melakukan usaha untuk melindungi mereka dari ancaman luar. Ini menjelaskan mengapa mereka menyimpan informasi yang bersifat rahasia dan penting. Ketika bersinggungan dengan pangkalan militer, nuklir, informasi ini menjadi rahasia. Hal inilah yang menjadi polemik ketika hal-hal yang seharusnya bersifat rahasia menjadi konsumsi publik berkat adanya teknologi *geospasial*. Langkah lainnya yang dilakukan adalah melakukan pelarangan untuk produk-produk *Google Earth* dan *Google Maps*, mengembangkan produk yang sama untuk aplikasi *geospasial* tersebut, sampai melakukan usaha-usaha untuk melakukan sensor terhadap *Google Earth* dan *Google Maps*.

Berdasarkan paparan di atas, penulis ingin melakukan kajian bagaimana aplikasi *geoweb* seperti *Google Earth* dan *Google Maps* menjadi alat untuk melakukan intelijen militer. Selain itu, penulis ingin menggambarkan berbagai akibat yang muncul akibat penggunaan *Google Earth* dan *Google Maps* dan berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai negara terhadap kontroversi tersebut.

Penulis juga melakukan pengujian terhadap beberapa tempat yang dianggap penting di Indonesia dengan menggunakan *Google Earth* dan *Google Maps* dengan relevansi ketahanan nasional Indonesia.

### ***Geospasial Web***

Definisi *geospasial web* atau *geoweb* biasanya menekankan kekuatan lokasi geografis sebagai kunci untuk mengintegrasikan pengetahuan dan memberikan informasi posisi. Kedua hal ini menjadi dasar dari ilmu sistem informasi geografis atau GIS namun mendapatkan momentum baru ketika pertumbuhan Web dan karena kesiapan akses terhadap mekanisme untuk menambah lokasi data. Misalnya menjadi mudah untuk mengubah nama jalan menjadi informasi berbeda dengan menambahkan lintang dan bujur sehingga tercipta berbagai *database* geografis yang sangat kaya.

Di masa depan, dimungkinkan untuk membentuk sebuah dunia untuk mengetahui lokasi apapun dengan menggunakan RFID (*radio-frequency identification*) *tags* untuk berbagai keperluan dan pengembangan teknologi untuk penentuan lokasi. Hal ini menunjukkan potensi *geoweb* namun di sisi lain membuka kemungkinan penyalahgunaan *geoweb* (Goodchild, 2008).

### **Cara Kerja Geoweb**

Guna memahami teknologi *geoweb* yang mengubah sistem pemetaan yang menggunakan web, kita harus memahami bagaimana melakukan pemetaan berdasarkan *geoweb*. Secara tradisional, produk *web mapping* sangat bergantung pada infrastruktur data, perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia.

Data untuk aplikasi *web mapping* tradisional dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu *base data* dan *application specific data*. *Base data* atau *background data* biasanya memiliki wilayah geografis yang dijabarkan oleh aplikasi dan biasanya memiliki lapisan (*layer*) seperti citra dan foto udara, jalan dan batas wilayah. *Application specific data* termasuk *geographic data layers* yang sangat berhubungan dengan aplikasi. *Geographic data layers* ini seperti lokasi sekolah, kantor swasta pemerintahan dan masih banyak lagi. Setiap data *layers* ini harus diperbaharui oleh setiap pengguna sehingga data *geoweb* selalu *up-to-date*.

### **Google Earth**

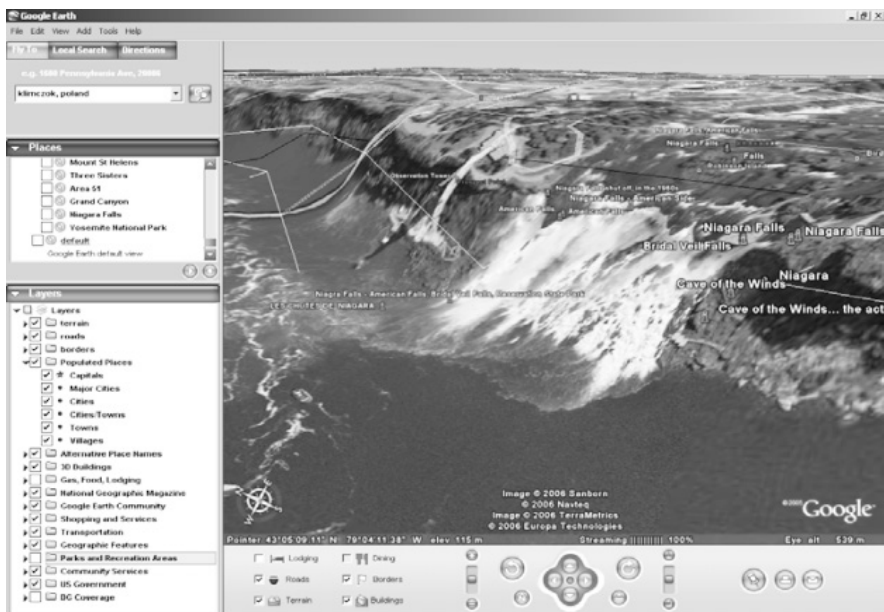
Educause (2010) menjabarkan bahwa *Google Earth* merupakan pemetaan interaktif, aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan navigasi dunia, melakukan pemindaian citra satelit dengan citra jalan, bangunan, fitur geografik, dan berbagai lokasi lainnya. Pengguna dapat menambah *point of interest* mereka dan berbagi dengan pengguna lainnya seperti rute jalan, plot areas, memperhitungkan jarak tempuh, dan menghamparkan berbagai citra pada aplikasi tersebut. *Google Earth* terhubung pada internet dan memungkinkan *online resources* tersedia. Misalnya, kita ingin ke Stadion Utama Senayan, dapat ditunjukkan lokasi, map, komentar tentang lapangan, dan hasil pencarian Web untuk topik tersebut. Di beberapa lokasi, *Google Earth* menyertakan 3D *representation*, maupun topografi daerah. Pengguna dapat menampilkan atau menyembunyikan layer dalam berbagai komunikasi.



**Gambar 1.1. Tampilan Muka Google Earth**

*Google Earth* dapat digunakan untuk merencanakan perjalanan, misalnya untuk peta jalan, penginapan, dan tempat makan. *Google Earth* menjadi favorit bagi pengguna yang membutuhkan lokasi seperti perusahaan tambang yang menyajikan data potensi pertambangan dan membantu siswa untuk memahami geografi mulai dari topografi dan area sekitar. *Google Earth* dapat diunduh dan dipasang dengan bebas biaya. Pengguna dapat berkeliling dunia dengan memasukkan alamat, nama monumen, koordinat lintang, dan garis bujur.

Kekuatan dari *Google Earth* terletak pada data yang dapat dilihat. Tampilan visual dari *Google Earth* bukanlah merupakan sebuah pemodelan dari suatu kenyataan seperti pada peta *cartographic* tetapi lebih kepada refleksi hasil pengambilan gambar (*image capture*) dalam bentuk photo yang diambil dari udara menggunakan satelit atau pesawat udara. Hasil dari pengambilan gambar dapat ditambahkan lapisan-lapisan informasi lainnya dalam bentuk *vector*. Data yang tersimpan dalam lapisan-lapisan informasi tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang kemudian dapat ditampilkan atau disembunyikan.



**Gambar 1.2. Tampilan *Google Earth* mengakses Air Terjun Niagara**

Dengan menggunakan *Google Earth*, pengguna dapat memanfaatkan database geografis berbasis internet dan *visual tool* yang mudah digunakan untuk melihat berbagai penjuru dunia. Di sisi lain, karena *Google Earth* menampilkan citra berdasarkan data satelit, pengguna melihat data berdasarkan potret. Saat terjadi perubahan, perubahan tersebut tidak dapat terlihat secara langsung pada aplikasi *Google Earth*.

Data dasar yang disediakan oleh *Google Earth* adalah data hasil pengambilan foto satelit atau udara yang datang dari berbagai penyedia data dasar tersebut. Peta yang ditampilkan oleh *Google Earth* sebenarnya adalah data hasil pengambilan gambar oleh satelit yang berumur kurang dari tiga tahun dan akan akan terus diperbarui oleh Google (Myrda, 2007).

Sebagian besar informasi pada peta disediakan oleh Google tetapi tidak menutup kemungkinan pengguna dapat menambahkan informasi lainnya dan dapat diakses tidak hanya untuk si penggunaan sendiri tetapi dapat diakses oleh pengguna lainnya.

Foto-foto yang dihasilkan dari pengambilan gambar satelit memiliki akurasi yang berbeda-beda, mulai 15 meter hingga beberapa centimeter untuk satu piksel pada layar monitor, artinya bahwa salah satu titik pada layar monitor mewakili beberapa meter dari tanah.

Kasus satu tempat paling menarik, misalnya lokasi padat penduduk dapat diakses dalam resolusi yang lebih tinggi, biasanya satu meter. Ada beberapa tempat di mana akurasi mencapai 16 sentimeter dan kantor pusat perusahaan Google terlihat dalam resolusi sebesar 2,5 cm. Seperti resolusi tinggi berarti bahwa Anda tidak hanya dapat melihat mobil di jalan, tetapi juga membedakan antara bangunan mereka.



**Gambar 1.3. Kualitas Pencitraan dari Google Earth**

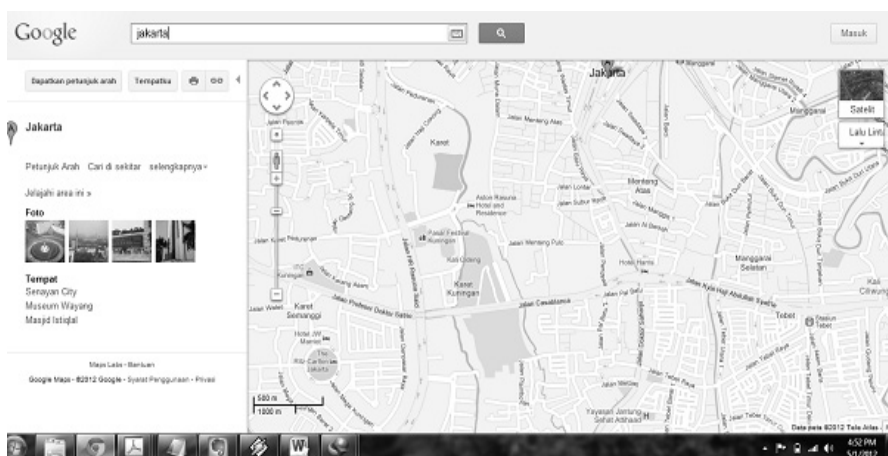
Citra satelit juga tidak tersedia dalam resolusi yang sama pada semua lokasi. Pada beberapa kota, kita dapat melakukan zoom secara detil namun di tempat lain, resolusi yang muncul hanya menampilkan bangunan atau mobil secara kabur. *Google Earth* juga membutuhkan memori dan *bandwidth* yang sangat besar serta kemampuan grafik yang kuat untuk dijalankan pada komputer. Harris (2006) menyatakan salah satu hal yang harus diperbaiki dari *Google Earth* adalah kualitas data yang meliputi tanggal dan waktu pada saat citra di ambil dan resolusi spasial yang tidak tersedia bagi pengguna.

### **Google Maps**

*Google Maps* menyediakan antarmuka, pemetaan sangat responsif, dan intuitif dengan jalan peta jalan yang sangat rinci dan data pemetaan via udara. Pengguna dapat mengendalikan peta melalui kontrol penuh



atas peta navigasi dan tampilan jalan dan data citra. Pengguna juga dapat melakukan *panning* peta menggunakan *keyboard* dan *mouse*. Semua ini menjadikan *Google Maps* sebagai produk yang menarik, tetapi kunci utama di balik penerimaan yang cepat pada konsumen adalah kemampuan untuk menyesuaikan peta untuk sesuai dengan kebutuhan aplikasi spesifik. Misalnya, sebuah agen *real estate* mungkin mengembangkan aplikasi berbasis web yang memungkinkan pengguna akhir mencari properti hunian yang hasilnya dapat ditampilkan pada aplikasi *Google Maps*. Kemampuan untuk menyesuaikan tampilan peta melalui penambahan data aplikasi spesifik adalah faktor utama penerimaan konsumen terhadap *Google Maps*.



**Gambar 1.4. Tampilan Google Maps**

## **Intelijen Militer**

Menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, intelijen militer adalah informasi dan pengetahuan yang didapatkan melalui pengamatan, penyelidikan, analisis, atau pemahaman. Beberapa jenis intelijen didapatkan melalui teknologi ruang, kedekatan, dan peralatan darat. Awalnya teknologi navigasi satelit adalah untuk aplikasi militer, meningkatkan presisi senjata ke sasaran dan meningkatkan tingkat kerusakan sekaligus mengurangi sengaja (*sipil*) korban dari senjata salah arah (Harris, 2006). Teknologi satelit merupakan salah satu teknologi yang digunakan pada sistem intelijen militer. Intelijen *geospasial* atau *Geospatial Intelligence* (GEOINT) adalah penjelajahan dan analisis, citra, intelijen pencitraan dan informasi *geospasial* untuk menggambarkan,

mengkaji dan menggambarkan secara visual fitur fisik dan aktivitas geografis bumi (Varhsney 2008).

Pengawasan adalah pengamatan sistematis untuk mengumpulkan data dan pengintaian adalah misi khusus yang dilakukan untuk mendapatkan data khusus. Sistem persenjataan dan intelijen militer dan sistem operasi memberikan latar belakang yang kaya untuk bagaimana pengawasan dan pengintaian satelit tidak hanya mendeteksi objek dan manusia namun juga memproduksi subjek pengawasan dan objek. Sistem pengawasan ini identik sistem pengawasan sipil seperti *close circuit television* (CCTV), pusat kendali, dan *database* pencitraan satelit (Harris, 2006). Fungsi utama IM adalah pengumpulan, analisis, produksi, dan penyebaran intelijen pada tingkat strategis dan taktis. Hal ini dicapai melalui pengerahan sumber daya intelijen yaitu kombinasi dan persiapan seluruh sumber daya intelijen, persiapan perencanaan intelijen untuk perang, dan koordinasi pengawasan udara dan darat.

Menurut *Intelligence Guide For First Responders* (ITACG), sebuah manual yang diterbitkan untuk mengantisipasi serangan teroris dan melakukan koordinasi antara badan-badan penegak hukum, intelijen memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut; (1) keuntungan pada saat pengambilan keputusan dengan memberikan informasi dan analisis yang dapat meningkatkan proses pengambilan keputusan ketika menghalangi musuh, (2) Peringatan akan potensi ancaman, (3) pemahaman akan peristiwa terbaru, (4) Kesadaran situasional, (5) Penilaian strategis jangka panjang pada isu yang sedang berkembang, (6) Laporan akan topik khusus baik jangka pendek atau jangka panjang (7) pengetahuan akan sebuah topik khusus.

Informasi yang dikumpulkan mengenai musuh atau potensi musuh diteruskan kepada para pengambil keputusan. Para pengambil keputusan ini dapat saja seorang jenderal atau prajurit yang sedang berada di lapangan menghadapi musuh.

### **Kontroversi *Google Earth* Sebagai Alat Intelijen**

Juru bicara *Google* pada April 2006 mengatakan bahwa kehadiran *Google Earth* sama sekali bukanlah merupakan suatu ancaman bagi keamanan, bahkan memberikan ketersediaan resolusi tinggi citra satelit dan foto udara dari setiap negara di dunia. Satu tahun kemudian, pernyataan ini dementahkan oleh pakar teroris Dick Leurdijk yang



menyatakan bahwa justru dengan kemudahan akses terhadap lokasi-lokasi potensial yang disediakan oleh Google dengan pencitraan detail satelit membuat lokasi-lokasi tersebut lebih rentan terdeteksi oleh teroris.

Hal ini terbukti dari foto-foto penyitaan teroris Al-Qaeda di tahun 2006 menunjukkan bahwa sedang dilakukan perencanaan serangan terhadap pangkalan militer di Irak. Perencanaan serangan menggunakan berbagai citra yang menggunakan *Google Earth*.

Di tahun 2007, penyerangan pangkalan militer Inggris di Basra, Irak direncanakan dengan menggunakan pencitraan *Google Earth*. Foto bangunan-bangunan di dalam pangkalan dan target-target sasaran lainnya disita dari teroris yang sangat akurat berdasarkan garis bujur dan bujur lintang. Setelah peristiwa Basra, *Google Earth* lebih terbuka menjalin kerjasama dengan pemerintah asing untuk mengatur keamanan negara. Sebagai contoh, pangkalan militer Inggris di Irak diburamkan dan pangkalan kapal selam nuklir Inggris di Faslane, Skotlandia juga diburamkan.



**Gambar 1.5. Pangkalan Militer Amerika Serikat di Irak yang akan diserang dengan *Google Earth***

### **Antisipasi *Google Earth***

Pada bulan Agustus 2006, Menteri Informasi Bahrain memerintahkan seluruh penyedia jasa internet di Bahrain untuk melakukan penutupan akses terhadap *server Google Earth*. Pelarangan ini berlangsung selama tiga hari dan dilakukan untuk menutupi pemetaan lokasi perumahan dan pertanahan kaum kaya di Bahrain. Di China, Pemerintah China melakukan penyelidikan terhadap situs pemetaan ilegal di tahun 2008. Tercatat ada 10.000 situs pemetaan *online* di China dan kebanyakan dari mereka menunjukkan *map* ilegal. Di Sudan, Pemerintah Sudan melarang impor produk Amerika Serikat dan memberikan sanksi ekonomi terhadap

Amerika Serikat akibat *Google Earth* menambahkan data layaer mengenai krisis kemanusiaan di Darfur, Sudan (Open Source Center, 2008).

Beberapa negara menciptakan aplikasi yang mirip dengan *Google Earth* dalam versinya sendiri dengan maksud untuk mempersulit pihak teroris yang ingin mengganggu keamanan negara, karena dengan demikian pemerintah dapat leluasa membatasi hak akses ke tempat-tempat vital di negara tersebut. Pada awal 2006, Thailand mengumumkan penggunaan Digital Thailand yang bekerja sama dengan pihak NASA menggunakan *engine whirlwind* milik NASA. Pada Mei 2008 sebuah artikel menyatakan bahwa China juga melakukan hal yang sama dengan mengembangkan aplikasi yang juga mirip dengan *Google Earth*, tiga nama yang diberikan untuk aplikasi *Google Earth* milik China disebut dengan *China Earth*, *Google China* atau *Image China*. Pihak pemerintah China mengatakan bahwa:

“... yang negara besar ... semua memiliki kemampuan yang lebih baik pengintaian satelit dan karena itu tidak memerlukan layanan seperti *Google Earth*. Negara yang tidak memiliki pengintai setiap satelit, *Google Earth* telah menyediakan mereka dengan saluran baru untuk mengamankan intelijen informasi, yang memungkinkan mereka untuk lebih mudah mencari tahu tentang aspek-aspek tertentu dari militer besar fasilitas dari negara lain, seperti bandara dan pelabuhan laut.”

Tentara India mengumumkan bahwa mereka telah melakukan pengelakkan terhadap “foto intrusif dari instalasi strategis”, tetapi pihak India tidak akan memberikan keterangan detail bagaimana mekanisme yang dilakukannya. Norwegia adalah mengembangkan cara-cara menyembunyikan instalasi pertahanan dari satelit dan tertunda pelaksanaannya teknologi itu menyatakan akan mencari cara lain seperti menyembunyikan bangunan bawah tanah dan dalam instalasi gunung.

Quasti (2008) menyatakan bahwa dahulu isu penggunaan satelit dan kepentingan negara sudah menjadi polemik. Di tahun 1978, di zaman pemerintah Presiden Carter, Pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk membatasi kualitas pencitraan (resolusi 10 meter) dari satelit AS yang dijual ke pasar bebas. Pada tahun 1986, Pemerintah Prancis meluncurkan SPOT-1 dan hasil pencitraan SPOT-1 digunakan oleh kantor berita dan hal ini juga menjadi polemik. Masalah utama adalah bagaimana penyebaran citra resolusi tinggi ini dapat dikendalikan.

Hal ini menjelaskan mengapa negara melakukan pemalsuan atau penghilangan informasi pada map yang digunakan sipil. Di zaman Perang Dingin, Inggris menghilangkan infrastruktur pangkalan militer, nuklir, dan pertahanan sipil dari *map* topografik. Menarik bahwa data ini dapat digunakan oleh musuh dan membahayakan keamanan negara. Misalnya bagaimana data yang digunakan oleh musuh untuk menyerang pangkalan militer Inggris di Basra (Irak) selama Perang Teluk II. Hal ini menyebabkan *Google* harus melakukan pemalsuan data dengan menerbitkan citra area yang sudah kadaluarsa.

Pendapat berbeda dikeluarkan oleh John Pike, Direktur Global Security, sebuah *think tank* di Washington DC yang menyatakan bahwa walaupun musuh memiliki data intelijen berdasarkan *Google Earth*, tidak berarti bahwa mereka memiliki keuntungan berdasarkan hal tersebut. Tanpa teknologi *Google* pun, para teroris tidak memiliki kesulitan untuk menemukan tentara Amerika Serikat di Irak. Pike juga menekankan akurasi *Google Earth* berdasarkan tanggal pemotretan. Dapat saja sebuah kamp militer tertera di *Google Earth* namun kenyataannya mereka sudah berpindah tempat (National Geographic, 2007).

Menurut Bell (2008), ada berbagai langkah antisipasi yang dapat dilakukan untuk menghadapi pihak asing mendapatkan citra satelit militer dengan membuat kebijakan seperti melakukan sensor di beberapa daerah tertentu, dikembangkan melalui penyangkalan, penutupan, bahkan penipuan bagi informasi yang bersifat pencitraan militer. Penting sekali akan anti-pengintaian terhadap satelit, penyamaran yang benar dan melindungi fasilitas rahasia penting, dan memahami interval antar jarak tembak satelit yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan militer besar. Sejak gagalnya pemberlakuan ketentuan atau konvensi internasional yang akan membatasi posting dari citra satelit di Internet, visi pengembangan ke depan sangat penting bagi masyarakat internasional untuk menghindari ketidaksiapan tertangkap pencitraan satelit dalam situasi lain yang serupa yang disebabkan oleh *Google Earth*.

Setelah aksi teroris 9 September, Amerika mengambil posisi tegas terhadap data dengan membatasi detil data *geospasial* dan berbagai informasi relevan telah di buang dari domain publik oleh agensi federal AS. Penggunaan data antara sipil dan militer serta dan teknologi yang dapat membahayakan keamanan nasional sangat dikendalikan. Hal ini menambah ketakutan bahwa negara terus menerus dalam keadaan

bahaya. Hal ini menjadi paradoks di mana demokrasi melakukan sensor informasi (Quasti, 2008).

### **Ketahanan Nasional dan Aplikasi *Geoweb***

Selama sepuluh tahun terakhir, Indonesia mengalami ancaman ketahanan nasional seperti terorisme, pembajakan, nelayan ilegal, bencana alam, perdagangan manusia, dan ancaman keamanan tradisional dan non tradisional. Khusus terorisme, terorisme di Indonesia merupakan ancaman nasional. Kasus bom Bali di tahun 2002, pemboman hotel J.W. Marriott dan Ritz Carlton Hotel di tahun 2009 merupakan berbagai aksi terorisme di Indonesia. Indonesia menganggap terorisme sebagai ancaman keamanan nasional yang tidak hanya harus dihadapi oleh aparat keamanan namun oleh seluruh bangsa.

Kebijakan pertahanan Indonesia menurut UU no 3 tahun 2002 adalah mempertahankan, melindungi, dan menegakkan kedaulatan bangsa, memelihara kesatuan Republik Indonesia, dan memastikan keamanan bangsa Indonesia dari seluruh ancaman dan gangguan. Hal ini dicapai melalui; (1) menghalangi seluruh bentuk ancaman terhadap Indonesia dan seluruh penduduknya; (2) mengalahkan seluruh agresi militer oleh negara asing; (3) menaklukkan ancaman militer yang mengancam eksistensi Indonesia; (4) mengantisipasi ancaman non-militer yang mungkin memiliki dampak terhadap kedaulatan, kesatuan teritorial dan keamanan penduduk; dan (5) memberikan kontribusi terhadap perdamaian internal dan stabilitas regional (Sukma, 2011).

Dikaitkan dengan ancaman non-militer yang mengancam ketahanan nasional, penggunaan aplikasi *geoweb* yang bertujuan untuk memetakan sasaran penting merupakan potensi ancaman yang dapat saja terjadi di Indonesia. Hal ini tentunya harus disikapi oleh Pemerintah Indonesia dengan melakukan berbagai tindakan antisipasi seperti yang telah dilakukan oleh negara-negara lainnya.

### **Pembahasan**

Awalnya teknologi satelit merupakan sebuah teknologi yang dibangun untuk intelijen militer dengan tujuan memaksimalkan daya rusak dan meminimalkan korban akibat salah sasaran ketika melakukan perang. Teknologi satelit merupakan alat intelijen untuk mengumpulkan data *geospasial* untuk melakukan kajian visual dan aktivitas berbagai

tempat di bumi. Dengan teknologi identik seperti CCTV, *control centre*, *database*, intelijen satelit menjadi salah satu sumber daya intelijen militer.

Di sisi lain, teknologi pemetaan bumi menggunakan satelit pada sisi konsumen diterapkan pada berbagai aspek seperti perdagangan, transportasi dan logistik, perencanaan, pertahanan, respon darurat, pelayanan kesehatan, manajemen aset, dan bidang lainnya. Teknologi satelit sangat membantu dalam mengambil keputusan sehingga keputusan yang diambil bersifat efektif dan efisien.

Dengan berkembangnya teknologi internet, Google melahirkan sebuah perangkat lunak yang menggunakan teknologi pemetaan bumi berbasis internet melalui *Google Earth*. Tidak hanya *Google Earth* namun Google juga mengeluarkan perangkat lunak khusus untuk pemetaan jalan bernama *Google Maps*.

*Google Earth* merupakan perangkat lunak pemetaan interaktif yang memungkinkan pengguna untuk melakukan navigasi. Tampilan visual *Google Earth* merupakan kompilasi pengambilan gambar seluruh dunia berbasis pemotretan udara. Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk melakukan penambahan berupa *point of interest* yang memungkinkan pengguna lainnya menggunakannya. Citra yang dihasilkan *Google Earth* memiliki akurasi yang sangat bervariasi namun dapat dijadikan sebagai referensi oleh penggunanya.

*Google Earth* menjadi sebuah kontroversi ketika pihak berwenang Amerika Serikat melakukan penangkapan pemberontak di Arab Saudi. Ditemukan berbagai citra satelit pangkalan militer Amerika Serikat di Irak yang diunduh menggunakan *Google Earth*. Kasus lainnya adalah militan Al-Qaeda yang gagal meledakkan ladang minyak di Hadramaut Yaman. Perencanaan usaha peledakan minyak ini juga menggunakan citra-citra yang diunduh melalui *Google Earth*. Tidak hanya pihak militer, ternyata pihak teroris juga menggunakan *Google Earth* untuk melakukan intelijen sebagai bagian perencanaan penyerangan mereka.

Berbagai negara melakukan tindakan antisipasi terhadap *Google Earth* dengan melakukan pemburaman terhadap tempat-tempat rentan diserang oleh teroris. Hal ini tercapai melalui kerjasama internasional antara negara dan Google.

Tindakan lainnya adalah beberapa negara melarang akses *Google Earth* di negara mereka sampai negara-negara lainnya melakukan pem-

buatan perangkat lunak yang memiliki kesamaan fungsional dengan *Google Earth*.

Berhubungan dengan tema penulisan, penulis menggunakan aplikasi *Google Earth* dan mengakses beberapa tempat yang dianggap penting di Indonesia dan memiliki potensi menjadi serangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tempat-tempat tersebut seperti Istana Negara, Lapangan Monas, dan Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di Cilangkap.



**Gambar 1.6. Pemetaan Istana Negara**



**Gambar 1.7. Pemetaan Cilangkap**



Pada citra Istana Negara, terlihat telah terjadi pemburaman sehingga kualitas pencitraan memberikan gambaran yang jelas mengenai Istana Negara. Pada citra Mabes ABRI Cilangkap belum terlihat upaya pengamanan. Hal ini tentunya dapat menjadi perhatian bersama kita untuk melakukan upaya pengamanan tempat-tempat penting di *Google Earth* dengan koordinasi departemen terkait.

### **Daftar Pustaka**

- Kolasowki, Nicholas, 2011, *Google Maps Shows Location Where Osama Bin Laden Died*, E-week.com, Diunduh 5 Maret 2011.
- Varshney, Lav, 2002, *Technical Report, Ground Surveillance Radars and Military Intelligence*, North Syracuse, NY: Syracuse Research Corporation. Diunduh 8 Maret 2012.
- ITACG, 2011, *Intelligence Guide For First Responders*, 2nd Edition, Diunduh 21 Maret 2012.
- The OSC Map Services Center, 2008, *The Google Controversy, Two Years Later*. Open Source, Diunduh 20 Februari 2012.
- Bell, William Scott, 2008, *Commercial Eyes In Space: Implications For U.S. Military Operations In 2030*, Air War College: Blue Horizons Paper, Center for Strategy and Technology. <http://www.surveillance-and-society.org>. Diunduh 19 Maret 2012.
- Harris, Chad, 2006, *The Omniscient Eye: Satellite Imagery, "Battlespace Awareness", and the Structures of the Imperial Gaze*, Diunduh 17 April 2012.
- Ratliff, Evan, 2007, *The Whole Earth, Cataloged How Google Maps Is Changing The Way We See The World*, Wired Magazine. [www.wired.com](http://www.wired.com), Diunduh 21 Maret 2012.
- Myrda, Grzegorz, 2007, *Google Earth, or how to find the map of your area online!*, Geostrada.com, Diunduh 6 Maret 2012.
- Sukma, Rizal, 2011, *Indonesia's Security Outlook, Defence Policy and Regional Cooperation*, CSIS, Diunduh 5 April 2012.
- Farley & Lake, 2007, in Tochtermann, Ed, (2007) *Infrastructure for the Geospatial Web*. London: Springer.
- News, National Geographic, 2007, *Terrorist Use of Google Earth*

*Raises Security Fears*, [http://news.nationalgeographic.com/news/2007/03/070312-google-censor\\_2.html](http://news.nationalgeographic.com/news/2007/03/070312-google-censor_2.html), Diunduh 1 Mei 2012.

Michael F. Goodchild, Michael, F, 2008, *Spatial Accuracy 2.0. Proceeding Of The 8th International Symposium On Spatial Accuracy Assessment In Natural Resources And Environmental Sciences*, Shanghai, June 25-27, 2008, Diunduh 7 Maret 2012.

Ouasti, Murad, 2012, *GIS and Mapping Specialist*, [www.SkyToEarth.com](http://www.SkyToEarth.com), Diunduh 17 April 2012.



# KEMENTERIAN PERTAHANAN: BUDAYA MILITER DI INSTITUSI SIPIL

**Yugih Setyanto dan Riris Loisa**

## **Pendahuluan**

Kementerian Pertahanan (Kemhan) adalah sebuah lembaga departemen yang dipimpin oleh seorang menteri pertahanan dan berada di bawah presiden. Tugas menteri pertahanan (Menhan) adalah membantu presiden menangani masalah pertahanan.

Sejarah Kemhan tidak bisa terlepas dari sejarah terbentuknya negara ini dan sejarah TNI. Muhaimin (2002) mengutip AH Nasution mengungkapkan bahwa menyadari situasi negara yang sedang dalam bahaya sesuai pendudukan Jepang dan masuknya tentara sekutu, pimpinan negara menyadari sulitnya dan bahkan tidak mungkin mempertahankan negara dan kemerdekaannya tanpa suatu angkatan perang.

Pada tanggal 5 Oktober 1945, melalui "Maklumat Pemerintah", terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Sehari kemudian dikeluarkan maklumat lagi yang mengangkat Suprijadi, bekas Komandan Peleton Pembela Tanah Air (PETA), menjadi Menteri Keamanan Rakyat. Pada saat itu TKR masih dalam keadaan seadanya, dan dibentuk dalam situasi politik dan negara yang gawat, sehingga belum memuaskan terutama bagi mereka yang sudah pernah mendapatkan pendidikan atau latihan kemiliteran, seperti KNIL atau PETA.

Menteri Pertahanan silih berganti. Orang yang menjabat posisi ini tidak melulu berasal dari kalangan militer, ada juga yang berasal dari kalangan sipil, seperti Sultan Hamengkubuwono, Iwa Kusumasumantri, Juwono Sudarsono, dan Mahfud MD. Di era Soeharto, Kemhan bernama Kementerian Pertahanan dan Keamanan (Kemhankam), yang dipimpin oleh seorang menteri yang juga merangkap sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Sejak saat itu, Kemhankam selalu diidentikkan dengan sebuah institusi militer.

Pada tahun 1984 Kemhankam dipisahkan dari Markas besar (Mabes) ABRI. Mabes ABRI berdiri sendiri di bawah Panglima ABRI yang mengepalai Markas besar ABRI. Kemhankan tetap dipimpin oleh seorang menteri yang berasal dari ABRI.

Pada masa kepemimpinan Menteri Prof.Dr. Moh. Mahfud MD, Kemhan mengalami perubahan organisasi. Pada tingkat Eselon 1, selama ini Kemhan hanya terdiri dari tiga Direktorat jenderal, maka kemudian ditambah dua lagi yang spesifik mengurus soal pertahanan dan keamanan negara.

Perubahan tidak hanya terjadi pada struktur organisasi, tapi juga pada pengisian jabatan-jabatan Eselon 1. Jabatan Eselon 1 yang biasanya dijabat oleh personil militer diisi oleh personil berlatar belakang sipil. Tiga orang berlatar belakang sipil menjabat sebagai Dirjen Perencanaan Sistem Pertahanan, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan. Gubernur Lemhannas pun, yang selama ini dipimpin oleh militer, diserahkan kepada sipil.

Kemhan adalah sebuah lembaga departemen yang istimewa dilihat dari personilnya. Kemhan memiliki karyawan dari sipil dan militer. Berbeda dengan departemen lainnya, biasanya pegawai dari kalangan militer ketika berada di dalam sebuah instansi akan segera menyesuaikan diri dengan pegawai sipil lainnya, namun di Kemhan setiap pegawai tetap membawa latar belakang sipil dan militernya.

Sebenarnya pola apapun dapat dilakukan dalam organisasi sipil ataupun militer. Perbedaannya, apabila diterapkan, konsekuensi yang terjadi tentu berbeda. Konsekuensi yang terjadi akibat dari pesan yang disampaikan jelas berbeda. Seorang prajurit, pesan yang disampaikan oleh atasan adalah perintah yang tidak bisa ditawar. Tanggung jawabnya pun jelas, apabila ia melakukan kesalahan hukum yang mengenai dirinya diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku di tubuh militer.

Dengan kondisi demikian, muncul sejumlah pertanyaan. Bagaimana seorang pimpinan dapat memberikan suatu *punishment and reward* bagi bawahannya yang berasal dari sipil dan militer. Lalu bagaimana pula bawahannya yang dari sipil menyikapi atasannya yang berlatar belakang militer atau sebaliknya. Bagi seorang prajurit, tunduk kepada atasan adalah sebuah kewajiban, artinya ada suatu budaya militer yang dipegang olehnya.

## Kemhan Dilihat Secara Institusi dan Personil

Banyak pengamat yang memberi batasan pihak sipil secara beragam. Eliot A. Cohan mendefinisikan pihak sipil dapat berupa masyarakat umum, lembaga pemerintah, swasta, para politisi, dan negarawan. Sedangkan Sayidiman Suryohadiprojo memberikan batasan pengertian sipil sebagai semua lapisan masyarakat (Yulianto, 2002: 30).

Dalam kajian ini, pengertian sipil dibatasi dengan mengacu pada pendapat AS Hornby seperti dikutip arif Yulianto bahwa istilah sipil dalam Bahasa Inggris *Civilian*, yakni (*person*) *not serving with armed forces* atau seseorang yang bekerja di luar profesi angkatan bersenjata. Berarti dapat diartikan, batasan sipil sebagai semua orang dengan segala macam profesi yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta, di luar organisasi militer, termasuk polisi.

Militer yang dalam Bahasa Inggrisnya *military* adalah *the soldier; the army, the armed forces*, yang dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai prajurit atau tentara; angkatan darat; angkatan bersenjata (terdiri dari beberapa angkatan, yakni: darat, laut, dan mariner serta udara). Di negara bangsa modern, apa yang dinamakan militer adalah angkatan bersenjata yang biasanya terdiri dari tiga atau empat angkatan perang, yakni darat, laut, dan atau mariner. Polisi, meskipun diberi kewenangan memegang senjata tidak termasuk di dalamnya.

Menurut Yulianto (2003: 27) di Indonesia batasan militer berbeda dari waktu ke waktu. Militer dalam periode orde lama adalah Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) yang terdiri dari angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Pada tahun 1959 sebutan APRI diubah menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Pada pasca orde baru terhitung mulai tanggal 1 April 1999 yang disebut militer adalah bukan lagi ABRI melainkan TNI yang terdiri dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Polri secara organisasi terpisah dari TNI.

Dalam hubungan sipil-militer, para peneliti, dan pengamat militer sering berbeda pendapat mengenai siapa pihak militer. Amos Permitter dikutip Arief Yulianto membatasi konsep militer ditekankan kepada semua perwira yang duduk dalam jabatan yang menuntut kecakapan politik, aspirasi, dan orientasi bersifat politik, tidak memandang kepangkatan apakah perwira tinggi, menengah, atau pertama. Cohan berpendapat bahwa pihak militer dapat berupa personal, lembaga militer atau hanya para perwira senior. Berbagai pengertian di atas,

batasan yang dipakai dalam makalah ini adalah seluruh personil militer yang terdapat di dalam struktur organisasi Kemhan terutama pada level pimpinan.

Hubungan sipil-militer yang terjadi di Kemhan dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui kondisi komunikasi di tubuh Kemhan. Clausewitz seperti disampaikan Sulistyaningtias mengatakan bahwa perang adalah kelanjutan dari politik dengan menggunakan cara-cara lain. Politik merupakan wilayah kelompok sipil, sedangkan perang adalah wilayah kelompok militer.

Kemhan mempunyai “keistimewaan” bila dibandingkan dengan institusi kementerian yang ada. Keunikannya adalah terdapat personil sipil dan militer dalam sebuah institusi. Personil militer masih tetap mempertahankan identitas militernya seperti seragam, pangkat, termasuk perilaku seperti cara penghormatan, cara berbicara, apel pagi dan sore, dan lain-lain. Menurut pengamat pertahanan Ade Muhammad (wawancara, 2012) ini merupakan ciri umum institusi *department of defence* (DoD) dimanapun. Ade menyebutnya sebagai organisasi “hybrid”.

Di Indonesia, secara normative kebijakan-kebijakan pemerintah sipil baru di era transisi menuju demokrasi, tentu saja terkait dengan kebijakan reformasi yang ditetapkan GBHN tahun 1999-2004. Sudi Silalahi yang saat itu menjabat Pangdam V/Brawijaya dalam makalahnya berjudul “Rekonstruksi Hubungan Sipil-Militer Menuju Indonesia Baru” mengemukakan pendapatnya bahwa supremasi sipil bukan adanya kekuasaan sipil atas militer, melainkan mengedepankan kekuasaan hukum dalam penyelenggaraan Negara, seperti; 1) sipil-militer memberikan arah kebijakan namun tidak mencampuri masalah operasional maupun manajemen internal tentara; 2) sipil-militer dengan dilandasi nilai moral dan sikap mental yang baik saling menghargai, mempercayai, dan mempunyai kehendak kuat untuk bekerjasama dengan baik; 3) prinsip kesetaraan, kedekatan, dan kerja sama, tidak ada hubungan dikotomik, tetapi interaksi sinergi, dan strategis; 4) sipil-militer harus mengembangkan sikap perilaku yang konstruktif; 5) militer menghargai kewenangan sipil, tunduk pada hukum dan system nasional bersikap nonpartisan atau tidak memihak salah satu partai atau tidak melibatkan diri dalam politik praktis; 6) sipil menghargai sungguh-sungguh tentara yang merupakan komponen sah dalam Negara demokrasi atau merasa memilikinya; 7) secara sosialogis, sipil-

militer mempunyai keinginan yang sama, yaitu berkuasa, namun jangan sampai kekuasaan tersebut hanya dimiliki oleh salah satu pihak saja, karena akan menimbulkan sentiment yang mendalam (Kompas, 4/10/2000).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa supremasi sipil yang normative baru bermula di era reformasi setelah sekian lama di bawah pengaruh militer. Kemhan merupakan salah satu institusi yang terimbas oleh perubahan politik ini. Kepemimpinan Kemhan di bawah menteri dari sipil menjadi salah satu tonggak dimulainya era baru di Kemhan. Tidak berlebihan bila dikatakan sebagai salah satu indikator supermasi sipil di negeri ini. Pengamat politik militer Ben Anderson menulis bahwa penempatan sipil dalam jabatan Menhan adalah perubahan yang sangat menggembirakan dan merupakan jaminan bahwa pemerintahan Abdurrahman Wahid akan menghapus jejak politik militer yang mendominasi selama hampir setengah abad dalam pemerintah Negara Indonesia (*Newsweek* edisi April 1999). Ditematkannya seorang sipil sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan merupakan salah satu kunci penting dalam usaha reformasi untuk meletakkan dasar yang kuat dan stabil yang menjamin supremasi pemerintahan sipil atas militer.

Sejak dimulainya kekuasaan orde baru, Kemhan selalu dipimpin oleh menteri dari kalangan militer. Pegawai di lingkungan Kemhan terdiri dari pegawai sipil dan militer, maka kiranya perlu ada penyesuaian gaya kepemimpinan yang khas. Pimpinan Kemhan harus mampu memadukan gaya kepemimpinan yang militer, namun tidak kaku ketika berhadapan dengan anak buahnya yang berasal dari sipil. Meski dipimpin oleh menteri dari kalangan militer, Kemhan bukanlah lembaga militer.

Landasan hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar bahwa Kemhan adalah institusi sipil adalah Peraturan Pemerintah Nomor. 39 tentang administrasi Prajurit TNI Pasal 32 ayat (1) yang tertulis:

*Jabatan di luar struktur TNI pada instansi sipil yang dapat diduduki oleh Prajurit aktif adalah jabatan pada kantor yang membidangi Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), **Pertahanan Negara**, Sekretariat Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung, serta instansi lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.*

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural Pasal 9 yang berbunyi:

*Selain oleh Pegawai Negeri Sipil, jabatan struktural tertentu pada instansi sipil:*

- a. Departemen Pertahanan;
- b. Sekretariat Militer Presiden;
- c. Badan Intelijen Negara;
- d. Lembaga Sandi Negara;
- e. Lembaga Ketahanan Nasional;
- f. Dewan Ketahanan Nasional;
- g. Badan S.A.R. Nasional,

*dapat diduduki oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa dialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.*

Dari dua Peraturan Pemerintah di atas jelas bahwa institusi Kemhan adalah sipil. Landasan ini diperkuat pernyataan Mahfud MD yang mengatakan,

*Menurut saya, Dephan (sekarang Kemhan) adalah pelaksana administrasi pemerintahan, yaitu mengadministrasi kegiatan pertahanan di Indonesia. Oleh karena itu, bagi saya, Dephan sama dengan departemen lain, departemen orang-orang sipil*

Kembali ke internal Kemhan sendiri dari sisi jumlah personil, sebagian besar pegawai Kemhan adalah PNS, dan sisanya TNI. Meski jumlah PNS lebih banyak, pengaruh militer sangatlah kuat. Hal ini terjadi karena dalam sejarahnya Kemhan memang tidak terlepas dari pimpinan yang berasal dari militer.

Personil TNI yang berada di Kemhan tentu memberi pengaruh dalam organisasi Kemhan. Diungkap Menteri Pertahanan Mahfud MD saat diwawancara penulis bahwa ada dua pengaruh yaitu personil dan perilaku. Dari sisi personil disampaikan Mahfud,

*Ketika saya masuk, pejabat eselon I nya semuanya militer. Itu dari sisi personil, ya. Sehingga saya waktu itu mengambil kebijakan untuk menjadikan orang-orang sipil sebagai pejabat eselon I. kalau tidak salah, ada tujuh orang yang saya masukin untuk mengisi jabatan eselon I.*

Di Kemhan, personil PNS merasa sulit bersaing dengan personil TNI untuk dapat menduduki jabatan-jabatan pimpinan. Kecilnya

kemungkinan untuk dapat menduduki jabatan yang dipegang oleh personil TNI membuat personil PNS seakan menjadi “nomor dua” di institusi tersebut. Mereka sadar bahwa sebagai besar level pimpinan masih dipegang personil militer.

Jajaran pimpinan Kemhan masih dipimpin militer atau mantan militer, sehingga Kemhan masih dianggap sama dengan institusi militer lainnya. Personil militer itu dapat saling berpindah-pindah atau mutasi dari Kemhan ke institusi militer lainnya dan sebaliknya. Perpindahan itu tidak mengubah status personil tersebut sebagai seorang militer.

Ditinjau dari landasan hukum ada beberapa landasan yang dapat dijadikan acuan. Dalam Undang-undang nomor. 34 tahun 2004 tentang TNI pada Pasal 47 ayat 1-3 tertulis:

- (1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
- (2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, **Pertahanan Negara**, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.
- (3) Prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen dimaksud

Undang-undang TNI seperti tertulis di atas dijelaskan bahwa personil TNI dapat menduduki institusi sipil seperti Kemhan. Atas dasar undang-undang ini pulalah status personil TNI di Kemhan dipertahankan sebagai seorang prajurit dan tidak menjadikannya sebagai seorang sipil.

Banyak personil militer yang dimutasi dari institusi militer, seperti Mabes ABRI, Mabes AD, Mabes AL, atau Mabes AU untuk mendapatkan promosi kenaikan pangkat atau jabatan di Kemhan.

Menurut Karo Kepegawaian Kemhan (wawancara 2003) alasan yang mendasari banyaknya jabatan yang diduduki anggota TNI karena ada pekerjaan-pekerjaan yang spesifik hanya dapat dipegang oleh militer.



Begitu pula apa yang pernah disampaikan Jenderal Wiranto yang saat itu menjabat Panglima ABRI serta Menteri Pertahanan dan Keamanan bahwa jabatan-jabatan sipil yang diberikan kepada ABRI benar-benar jabatan yang membutuhkan spesifikasi yang dimiliki ABRI atau sangat erat dengan kepentingannya dengan kepentingan masalah keamanan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa di era orde baru kekuasaan di pemerintahan dikuasai birokrat berlatarbelakang militer. Personil militer menguasai setiap lini di pemerintah, dari lurah sampai tingkat pusat. Militer mengisi jabatan-jabatan sipil di departemen-departemen.

Sejak dahulu institusi Kemhan sangat kental ciri kemiliterannya. Salah satu yang paling menonjol adalah kedisiplinan. Disiplin merupakan salah satu komponen yang harus dimiliki bagi suatu organisasi. Menurut Gouzali Saydam ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tegak tidaknya disiplin dalam suatu organisasi atau perusahaan antara lain diciptakannya kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Menunbuhkan disiplin juga membutuhkan kebiasaan-kebiasaan positif di lingkungan organisasi atau perusahaan, sehingga dengan kebiasaan positif tersebut para karyawan atau pegawai akan terbiasa berdisiplin tanpa merasa terpaksa atau ada tekanan dari luar. Dibandingkan kementerian lainnya, kedisiplinan menjadi kelebihan yang dimiliki Kemhan.

Ciri kedisiplinan Kemhan dibawa oleh personil militer yang ada di dalamnya. Akibatnya, personil sipil pun terbawa dalam suasana militer. Salah penegakkan disiplin adalah mematuhi peraturan. Bila ada yang melanggar peraturan diberikan sanksi yang sesuai dengan kesalahannya. Tidak jarang pemberian sanksi berciri militer juga dialami personil sipil antara lain hukuman fisik seperti *push up*, dijemur di lapangan bahkan di beberapa kasus sampai ke pemukulan oleh pimpinan bisa terjadi.

Disiplin yang diterapkan pada tentara adalah jenis disiplin mati. Tanpa toleransi, indoktrinatif dan bersifat pemaksaan eksternal, atau jika menolak akan menghadapi resiko dikemplang komandannya. Maklum ini karena harus menangani hal hal yang sifatnya berbahaya, seperti meriam, pesawat, bahan peledak dan lain sebagainya. Sementara disiplin yang diterapkan pada masyarakat madani adalah disiplin biasa. Yang mempunyai toleransi, hasil pendidikan edukatif dan bersifat kesadaran internal (motivasi diri). (A.Muhammad <http://hankam.kompasiana.com/2011/02/22/krisis-budaya-dalam-militer-indonesia/> 24 April 2012).



Situasi yang terjadi di dalam Kemhan menurut Ade Muhammad (wawancara 2012) sebagai kondisi militeristik. Kondisi militeristik yaitu sebuah kondisi atmosfer militer yang berada di domain sipil. Menurutnya, hal ini masih terjadi di Kemhan, sehingga konsekuensi logisnya terjadi “kanker budaya” sehingga kaidah dan norma sipil tidak tumbuh di Kemhan. Ade Muhammad berpendapat;

Kaidah dan norma yg dimaksud secara spesifik adalah ; tunduk pada komandan daripada tunduk pada hukum dan aturan, bersifat top down bukan bottom up sehingga gagasan arus bawah, inisiatif dan kreatifitas tidak terasah dengan baik, seharusnya beragam jadi seragam - termasuk pemikiran, indoktrinasi bukan edukasi, berpikir jangka pendek dan pragmatis daripada berpikir jangka panjang dan idealis, produk pertimbangan dan solusi yg parsial dan sektoral daripada holistik dan komprehensif, kapasitas sipil yg mandul sehingga posisi sipil pada birokrasi Kemhan lebih pada lini bawah melayani orang militer yang di atasnya. Demikian sakitnya birokrasi di Kemhan.

Apa yang disampaikan pengamat pertahanan Ade Muhammad senada dengan pernyataan Mahfud MD bahwa yang pertama Ia rasakan ketika di Kemhan adalah terlalu hirarkis. Menurut Mahfud, yang dapat bertemu dengan menteri hanya eselon 1. Bila Mahfud ingin memanggil pejabat setingkat direktur atau kepala bagian maka menteri harus memanggil Dirjenjnya terlebih dahulu. Hal ini, menurut Mahfud, menjadi sebuah kesulitan karena belum tentu atasannya mengerti perihal suatu masalah.

Mahfud MD menyatakan bahwa hirarkis berbeda dengan demokratis. Dalam komunikasi yang hirarkis pesan yang disampaikan cenderung bersifat instruktif dan komando. Pesan yang disampaikan atasan harus sampai ke bawah secara persis (*top down*). Organisasi yang demokratis lebih bersifat terbuka dan lebih banyak menyerap aspirasi dari bawah (*bottom up*). Mahfud mengaku untuk membangun budaya organisasi yang demokratis ketika mengangkat pejabat, Ia memilih orang-orang yang berani mau mengkritik atau menegur menteri tentu dengan cara yang baik.

Hirarki yang kuat mempersulit terjadinya komunikasi, akibatnya adalah membuat kurangnya diskusi-diskusi di Kemhan. Mahfud MD mengungkapkan:

Di Depan budaya organisasinya rapi sekali. Antara atasan dan bawahan ada jaraknya. Diskusi-diskusi jarang dilakukan. Tidak boleh misalnya, pejabat eselon 2 langsung menghadap menteri, tapi harus lewat atasannya, dari situ ke menteri. Tukar pendapat jarang dilakukan, yang terjadi biasanya minta petunjuk. Itu budaya mereka.

Ada banyak hambatan yang mengganggu proses komunikasi (Gibson, Ivanchevich, Donnely, 1993: 440). Hambatan komunikasi tersebut merupakan hambatan umum yang biasa terdapat dalam organisasi tatap muka dan pada komunikasi bukan lisan di dalam struktur organisasi. Beberapa diantara yang menyebabkan hambatan tersebut adalah perbedaan status. Perbedaan status dapat menimbulkan ancaman bagi seseorang yang lebih rendah kedudukannya dalam hirarki, yang dapat menghindari atau menyimpang komunikasi.

Tentu sebagai pesonil TNI yang ada di Kemhan untuk menyesuaikan suasana institusi sipil dimana diskusi-diskusi yang demokratis dapat sering terjadi menjadi sebuah kendala. Kondisi mental seperti ini bila dilihat dari latar belakang seorang personil militer menjadi suatu yang wajar. Hasnan Habib mengatakan bahwa institusi militer bukanlah demokrat. Menurutnya naluri dasar seorang militer cenderung komando, perintah, pengambilan keputusan secara cepat, tidak melibatkan orang lain (*Kompas* 27 April 2004).

Apa yang disampaikan Hasnan Habis dapat pula dijadikan sebagai gambaran militer yang ada di Kemhan. Hal ini menyebabkan personil Kemhan menjadi kaku dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Ada rasa takut sehingga bekerja hanya sesuai perintah yang diberikan atasan. Dalam budaya militer, tidak melaksanakan perintah apalagi melanggarnya adalah perbuatan yang bisa mendapatkan sanksi yang serius.

### **Budaya Organisasi Kementerian Pertahanan**

Ada tiga asumsi mengenai Teori Budaya Organisasi. Tiga asumsi yang dikemukakan Pacanowsky dan O' Donnell Trujillo (West dan Turner, 2008: 319) antara lain adalah penggunaan dan interpretasi simbol. Anggota-anggota organisasi menciptakan, menggunakan, dan menginterpretasikan simbol setiap hari. Simbol-simbol ini mencakup komunikasi verbal dan non verbal di dalam organisasi.

**Tabel 1.1. Simbol Budaya Organisasi**

<b>Kategori Umum</b>	<b>Tipe/Contoh Spesifik</b>
Simbol-simbol fisik	Seni/desain/logo Gedung/dekorasi Pakaian/penampilan Objek-objek material
Simbol-simbol prilaku	Adat istiadat/ritual Tradisi/kelaziman Penghargaan/hukuman
Simbol-simbol verbal	Cerita jenaka/lelucon Jargon/penamaan/julukan Penjelasan-penjelasan Kisah/mitos/sejarah Metafora

Kemhan sebagai sebuah organisasi juga memiliki simbol-simbol yang menjadi tanda budaya organisasinya. Simbol fisik di Kemhan dapat dilihat dari seragam yang dikenakan personilnya. Untuk personil TNI tetap mengenakan seragam dinas militer berikut atribut yang dimiliki seorang personil TNI. Personil sipil mengenakan seragam coklat. Seragam ini baru beberapa tahun terakhir ini dikenakan pada seluruh personil Kemhan. Sebelumnya PNS Kemhan mengenakan seragam putih dan biru yang dilengkapi lambang Mabes TNI di lengan. Saat itu memang lambang Kemhan masih sama dengan lambang Mabes TNI, bedanya ada tulisan Departemen Pertahanan di atas lambang TNI.

Di samping pakaian yang dikenakan personil Kemhan, nomor mobil dinas Kemhan pun berbeda dengan kementerian lain. Nomor mobil dinas Kemhan hampir sama dengan nomor mobil dinas institusi militer yang ada. Cara pemberian nomornya pun hampir sama dengan penomoran pada mobil dinas TNI.

Penerapan simbol perilaku pada Kemhan sangatlah ketara. Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan adalah upacara Penaikan bendera setiap Senin dan pelaksanaan apel pagi dan petang setiap hari. Kegiatan ini menjadi pembeda dengan kementerian lain sekaligus menjadi pencirian dari kegiatan yang juga dilakukan militer. Setiap personil Kemhan wajib mengikuti apel dan ada sanksi bagi yang melanggarnya. Pada saat apel ini, seorang pejabat yang menjadi inspektur upacara memberi arahan untuk bawahan. Untuk menjadi inspektur upacara biasanya ditunjuk pejabat eselon III ke atas.

Simbol verbal dapat ditemukan dari penyebutan “mohon izin” dan “siap” dalam setiap pembicaraan antara atasan dan bawahan. Kata “mohon izin” kerap digunakan bila seorang bawahan ingin mengutarakan suatu hal pada atasan. Ini merupakan kebiasaan pada personil militer termasuk juga selalu mengatakan “siap” manakala atasan memberi arahan atau perintah. Ungkapan tersebut menjadi sebuah kelaziman untuk diucapkan bagi seluruh personil Kemhan baik sipil apalagi militer.

## **Simpulan**

Kemhan adalah sebuah institusi sipil namun masih menganut budaya militeristik. Pengaruh ini sangat terkait dengan kekuasaan militer yang pernah terjadi sebelum era reformasi. Ciri yang paling terlihat adalah komunikasi yang cenderung satu arah, walau saat Mahfud berusaha mengubahnya menjadi lebih demokratis namun gaya kepemimpinan militeristik masih sangat kuat.

Iklm komunikasi tidak dipengaruhi oleh pimpinan tetapi juga oleh elemen-elemen dasar organisasi seperti struktur, aturan yang ada, dan pedoman lembaga. Dalam menghadapi perkembangan politik dan sosial saat ini dan akan datang perlu adanya perubahan-perubahan dan penyesuaian agar terjalin kerja sama dan iklim kerja yang kondusif.

## **Daftar Pustaka**

*Buku Putih Kementerian Pertahanan.*

Davis, Keith & Werther, William B Jr, 1989, *Human Resources and Personnel Management*, Singapore: McGraw Hill Book Company.

Diamond, Larry dan Palttner (Ed), 2000, Marc F, *Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Gibson Ivancevich,, Donnely, 1983, *Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Goldhaber, Gerald, 1990, *Organization Communication*, USA: Wim C Brown Publisher.

Hardjana, Andre A, Corporate Culture dalam Budaya Komunikasi Menyongsong Abad XXI: Tren Komunikasi, *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*,

- Jablin Frederic M, Putnam Linda L, Roberets Karlene H, Porter Lyman W, 1987, *Handbook of Organizational Communication*, Sage Publication.
- Lubis, Hari SB dan Huseini, Martani, 1987, *Teori Organisasi Suatu Pendekatan Makro*, Jakarta: Pusat antar Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- McKevitt, David, 1998, *Managing Core Public Services*, Blackwell Publisher Inc.
- Moleong, Lexy J, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muhaimin, Yahya A, 2002, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Neuman, W. Lawren, 1979, *Social Research Methods, Qualitative, and Quantitativw Approach*, Boston: Allyne & Bacon.
- Pace, R Wayne and Faules Don F, 2001, *Komunikasi Organisasi Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Robbins, Stephen P, 1990, *Teori Organisasi, Struktur Desain dan Aplikasi*, edisi 3, Bandung: Arcan.
- Sastrodiningrat, Soebagio, 1999, *Kapita Selekta Manajemen dan Kepemimpinan*, Jakarta: In-Hill-Co.
- Saydam, Gouzali, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Yulianto, Arif, 2002, *Hubungan Sipil-Militer di Indonesia pasca Orba*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yukl, Gary, 1998, *Kepemimpinan dalam Organisasi*, Jakarta: Prenhallindo.
- Zainun, Buchari, *Perencanaan Operasional Sumber Daya Manusia*, makalah program magister manajemen SDM.



# STRATEGI DIPLOMATIS MEMBANGUN KETAHANAN NASIONAL DAN INTEGRITAS BANGSA

*(Studi Kasus: Perbatasan Sambas dan Tragedi  
Mesuji)*

**Yuliandre Darwis**

## **Pendahuluan**

Kompleksitas pengelolaan dan pemeliharaan status pertahanan negara telah membawa konsekuensi tersendiri untuk senantiasa mengarahkan sumber daya manusia militer yang handal. Bukan saja berhubungan dengan segala sesuatu yang berupa pergerakan fisik, namun kini yang harus menjadi fokus perhatian adalah pertahanan sesungguhnya yang mempertaruhkan integritas dan kedudukan bangsa di mata asing. Wilayah Indonesia yang sebagian besar berupa daerah perairan dan bentuk negara yang terdiri dari kepulauan tidak menjadikan suatu alasan lemahnya kekuatan pertahanan nasional.

Melihat kondisi terkait tanggung jawab keutuhan wilayah, isu wilayah perbatasan seakan masih tidak ada habisnya. Kasus perbatasan sebuah kawasan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat adalah salah satu contoh polemik tersebut. Wilayah perbatasan yang pada dasarnya merupakan tolak ukur pembangunan nasional, kini menjadi objek sumber bergulirnya konflik kenegaraan. Kasus bermula dari mencuatnya permasalahan tapal batas Indonesia-Malaysia di Camar Bulan, Kabupaten Sambas. Adapun kabar yang merebak Indonesia kehilangan 1.499 hektare lahan yang masuk ke kawasan Malaysia (Bandoro, 2005). Masalah perbatasan telah terbukti sering memperuncing hubungan bilateral negara Indonesia dan Malaysia. Tidak cukup dengan tragedi Sipadan Ligitan, propaganda untuk memperuncing keadaan seakan terus berdatangan. Di sisi lain ada hal yang harus dicermati, bagaimana sejauh ini pemerintah berperan dalam mengatasi berbagai

masalah tersebut. Kemampuan diplomatik dalam memegang teguh kepentingan negara menjadi satu unsur yang paling penting. Dialog konsensus tidak serta merta merupakan strategi yang ampuh jika tidak diimbangi oleh kekuatan negosiasi yang cerdas, jangan sampai akhirnya mempertaruhkan keamanan dan kedudukan negara. Keahlian disini bukan berarti hanya saja harus dimiliki oleh menteri yang mewakili negara, namun para pasukan militer yang bertugas menjaga armada wilayah Indonesia juga dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi yang handal. Ini menjadi senjata dalam mempertegas kedudukan wilayah negara manakala dihadapi ancaman-ancaman serius terutama masalah perbatasan.

Strategi komunikasi berupa adanya format dialog antara kedua belah pihak yang berkepentingan, juga harus dilanjutkan dengan langkah-langkah pemeliharaan keamanan dan pertahanan lainnya. Peningkatan pos keamanan darat dan pengembangan sarana prasarana pertahanan keamanan di sekitar laut (pantai) harus tetap menjadi fokus upaya yang berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan mengembangkan pos keamanan minimal dalam ruang lingkup wilayah kecamatan, sehingga gangguan keamanan dari negara tetangga dapat diminimalisir. Para petugas militer yang bertugas juga sangat dituntut untuk dapat mengawasi kondisi masyarakat setempat jangan sampai mudah terpropaganda. Tidak jarang konflik pada akhirnya justru berkembang menjadi konflik horizontal. Hal seperti ini yang menciptakan kondisi semakin memanas dan sulit menemukan titik temu, karena kepentingan bangsa menjadi terpecah-pecah. Untuk menangani masalah ini kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah harus terorganisir dengan baik, sehingga masalah disintegrasi informasi dapat dihindari.

Masalah yang juga timbul dari wilayah perbatasan adalah kejadian yang juga mengancam pertahanan dan integritas bangsa, yaitu isu adanya penduduk perbatasan telah dijadikan pasukan cadangan militer Malaysia yang biasa dikenal dengan *Askar Watania*. Kejadian yang terjadi pada akhir tahun 2007 ini terungkap dimana sejumlah warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan berhasil direkrut oleh pemerintah Malaysia menjadi tentara milisi. Masyarakat yang mendengar seakan harus menghela nafas karena tidak cukup dengan konflik perbatasan yang menunggu jaminan kepastian keamanan, namun peristiwa yang menyangkut sumber daya



manusia lokal telah dipertaruhkan. Integritas bangsa dipertaruhkan sekaligus jiwa nasionalisme serta tekad mempertahankan wilayah RI kemudian dipertanyakan.

Masalah pertahanan kembali muncul dan melibatkan oknum aparat kita. Peristiwa Mesuji yang bergulir sejak tahun 2009 dan baru muncul di permukaan di akhir tahun 2011 kemarin telah mengiris martabat bangsa. Lahan atau wilayah penduduk terancam keberadaannya dikarenakan adanya perluasan lahan oleh pihak tertentu yang merupakan perusahaan sawit milik Malaysia. Pembantaian terjadi diakibatkan penduduk setempat tidak mau mengosongkan daerahnya dalam rangka pembukaan lahan sawit yang dilakukan oleh pihak perusahaan hingga pembantaian pun terjadi, dimana menurut kabar yang bergulir dibeking pula oleh aparat kita yang disewa pihak perusahaan.

Dapat diketahui akar masalah yang sesungguhnya perlu dicermati. Ada 2 sudut pandang permasalahan yang mengakibatkan peristiwa ini dapat terjadi. Pertama, apakah benar oknum aparat yang bekerjasama. Jika memang benar terbukti, tentu integritas para aparat setempat yang dipertaruhkan. Bagaimana pengawasan komunikasi internal dalam lingkungan tentara keamanan. Latar belakang koordinasi yang lemah dalam menghadapi pengaruh propaganda pihak luar menjadi faktor yang sangat krusial. Inilah yang sesungguhnya dikatakan sebagai perang modern melalui strategi komunikasi, dimana bukan lagi pergerakan fisik sebagai alat utama yang digunakan untuk menguasai objek penjajahan. Pengaruh terhadap arah pemikiran dan penguasaan terhadap mental sumber daya manusia lokal. Kedua, pengawasan terhadap keberadaan pihak asing yang seolah dapat memonopoli kekuasaan setempat. Perang kepentingan dapat saja menyeruak dan eksistensi diplomasi pemerintahan daerah dalam membangun ketahanan sangatlah diandalkan.

Melihat kondisi demikian, strategi komunikasi efektif berupa *Defence Diplomacy* sangatlah ditekankan. Ini ditujukan untuk membantu mengembangkan hubungan sipil-militer yang demokratis yang ditandai dengan supremasi otoritas politik atas militer dan pembentukan tata pemerintahan yang baik di bidang pertahanan (*good governance*). Adanya kemampuan komunikasi tersebut, diharapkan tidak hanya saja mengedepankan gardu pertahanan terhadap pihak asing, namun hubungan sipil-militer dapat terjaga sehingga tidak akan ada perpecahan

antara keduanya, atau bahkan menimbulkan perlawanan yang bersifat fisik. *Defence diplomacy* bisa menjadi indikasi dari kemauan untuk mengembangkan hubungan yang lebih luas, mengembangkan saling percaya dengan kebijakan-kebijakan yang transparan, dan komitmen untuk bekerjasama dalam mencegah potensi konflik (*conflict prevention*) serta sebagai upaya untuk mengelola perbedaan-perbedaan yang mungkin lahir dalam hubungan antar negara. Adanya dialog terbuka secara berkelanjutan juga menjadi alternatif solusi yang juga dapat ditempuh untuk menghindari propaganda-propaganda terselubung yang menarik atau mengubah pola pikir masyarakat setempat, hingga kemungkinan yang tidak diharapkan yaitu berbalik membela pertahanan asing. Beberapa bentuk kerjasama pertahanan diselenggarakan melalui dialog pertahanan strategis, dialog keamanan dan kemitraan strategis yang sudah dilaksanakan dengan negara-negara tetangga di kawasan dan beberapa negara besar. Dalam kaitannya ini, sebagaimana telah diketahui Indonesia telah berhasil mengembangkan saling percaya baik dalam lingkup ASEAN, termasuk melalui pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN, serta forum-forum lain yang dilakukan melalui jalur formal maupun tidak formal.

Dalam Bandoro (2005), *defence diplomacy* dapat membentuk persepsi bersama tentang suatu masalah dan *mind-set* militer negara lain. Untuk kepentingan *defence* dan *security reform*, *defence diplomacy* mencakup bidang-bidang: supremasi otoritas politik atas militer, kontrol demokratik atas kebijakan pertahanan, pengembangan fungsi atau peran pengawasan parlemen, *rule of law* dan HAM, dan keterlibatan masyarakat sipil. Dalam konteks Indonesia *defence diplomacy* merupakan bagian dari strategi pertahanan yang didasarkan atas pemikiran strategis yang menempatkan kerjasama pertahanan dan upaya perdamaian sebagai salah pilar untuk melindungi kepentingan pertahanan Indonesia. Tujuan lainnya yang tersiat jangka panjang adalah terciptanya hubungan saling percaya dengan negara lain, terutama dengan negara-negara tetangga. membangun persepsi bersama tentang masalah keamanan secara umum, serta untuk memberikan sumbangan terhadap upaya menciptakan stabilitas dan perdamaian internasional.

Berdasarkan uraian diatas pada paper ini penulis bermaksud menjelaskan strategi komunikasi diplomatis yang dapat dilakukan dalam upaya menjaga pertahanan nasional. Adapun studi kasus yang menjadi

objek kajian adalah kasus perbatasan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dan Peristiwa Mesuji. Dengan harapan tidak terulangnya konflik yang serupa, sudah sepatutnya evaluasi pola komunikasi dalam mendukung rancangan strategi pertahanan dapat dilakukan. Semua tujuan tersebut dapat terwujud jika semua pihak yang terkait, khususnya para pemegang kepentingan dan armada militer memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan strategi dan hukum positif serta kebijakan yang telah ditetapkan. Tentunya, sekali lagi langkah tersebut diiringi oleh pengembangan komunikasi yang efektif dengan mengedepankan kepentingan negara. Tidak dipungkiri perubahan dalam lingkungan sering terjadi dan ancaman bisa datang kapanpun, namun semua itu bergantung dari komitmen dan rancangan pertahanan yang berkelanjutan untuk senantiasa siap sedia mengantisipasi berbagai kemungkinan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa hampir semua kalangan masyarakat di Indonesia membutuhkan informasi. Baik dari kaum muda atau tua, baik kalangan bawah atau atas. Seakan haus akan informasi, masyarakat Indonesia terlebih lagi yang berada di kota-kota, hampir tiap waktu membutuhkan informasi. Hal ini dikarenakan begitu mudahnya mengakses informasi di mana pun.

Media tidak lagi hanya memberikan informasi tentang pejabat-pejabat, pemerintahan, dengan segala bentuk kegiatan-kegiatan, dan kebijakan yang dari sisi baiknya saja. Media juga mampu memberikan informasi yang sesuai fakta yang terjadi di masyarakat serta mampu menjadi wadah opini masyarakat yang berbeda pendapat, jika memang tidak sesuai apa yang terjadi.

Beberapa macam kasus sering ditutupi oleh pemerintah, sampai terbukanya kran informasi yaitu pada zaman orde baru. Saat ini hampir semua media menginformasikan tentang berbagai macam kasus yang sedang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah Mesuji dan perbatasan Sambas.

Masyarakat Indonesia memang masih kurang akan informasi tentang daerah yang berbatasan dengan Negara tetangga. Tidak heran jika terjadi banyak konflik dan akhir-akhir ini juga ada pemberitaan tentang kasus perebutan lahan yang telah merenggut banyak nyawa yang tidak bersalah. Hal ini dikarenakan tidak tahunya informasi tentang batasan-batasan lahan yang menjadi dan digunakan oleh pihak

asing. Memunculkan terjadinya konflik sesama masyarakat Indonesia.

Pada umumnya berita bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas. Salah satu fungsi media adalah informasi (*to inform*). Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya media massa, baik cetak maupun elektronik.

Fungsi utama media massa menurut Haris Sumadiria, ada lima fungsi yang dapat ditemukan pada setiap negara yang menganut paham demokrasi, yakni: (1) Informasi (*to inform*); (2) Edukasi (*to educate*); (3) Koreksi (*to influence*); (4) Rekreasi (*to entertain*); dan (5) Mediasi (*to mediate*) (Bandoro, 2005).

Pengertian dari fungsi informasi seperti yang dikemukakan oleh Elvinaro Ardianto, Lukiati Komala, dan Siti Karlinah dalam bukunya Komunikasi Massa (2009: 18) bahwa media massa adalah penyebar informasi bagi pembaca, pendengar atau pemirsa. Informasi dibutuhkan oleh khalayak media massa yang bersangkutan sesuai dengan kepentingannya. Khalayak sebagai makhluk sosial akan selalu merasa haus akan informasi yang terjadi (Bandoro, 2005).

Peran media dalam menyampaikan informasi sangat diperlukan, sehingga dapat mengurangi konflik yang saat ini terjadi di masyarakat. Masyarakat di era ini sudah pandai memilih informasi apa yang diinginkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: *“Bagaimana strategi diplomatis dalam membangun ketahanan nasional dan integritas dalam studi kasus perbatasan Sambas dan tragedi Mesuji”*

## **Perang Modern dan Propaganda Media**

Definisi Perang modern adalah suatu bentuk perang yang dilakukan secara non militer dari negara maju atau asing untuk menghancurkan suatu negara tertentu melalui bidang IPOLEKSOSBUDHAN (Ideologi Politik Sosial Budaya dan Pertahanan). Perang modern dapat pula dikatakan sebagai bentuk kontrol dari negara-negara koalisi global yang dimotori oleh negara besar terhadap negara lain yang tidak mengakomodasi kepentingan negara koalisi tersebut atau membahayakan negaranya.

Disadari ataupun tidak, ada negara “besar” bersama koalisinya yang sedang menggelar konsep perang modern di wilayah Indonesia

dengan tujuan memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) supaya lemah dan dapat dikuasai Sumber Daya Alamnya (SDA). Kebanyakan masyarakat Indonesia tidak menyadarinya bahwa diri mereka saat ini sedang dijajah dan menjadi korban dari perang modern. Asing merubah konsepnya dari perang konvensional menjadi non konvensional (perang modern) karena harganya yang sangat murah meriah dan hasilnya pun sangat dahsyat hingga mampu merusak sendi-sendi kekuatan negara sasaran tersebut. Hal tersebut sangat berbahaya bagi keutuhan wilayah NKRI karena didalamnya telah hidup jutaan manusia yang berasal dari berbagai macam elemen suku, agama, ras, dan budaya (SARA) sehingga sangat memungkinkan bagi asing untuk "bermain" didalamnya dan setiap kerusuhan bisa dipastikan adanya "domplengan" atau "tunggang" dari pihak luar.

Salah satunya perang modern yang diangkat oleh penulis adalah kasus pembunuhan antar warga di Mesuji dan konflik perbatasan di Sambas. Tidak dipungkiri lagi bahwa saat ini Negara Republik Indonesia sedang dilanda perang modern. Begitu banyak perang modern namun penulis mengambil konflik di atas karena konflik tersebut sampai mempengaruhi pembuat media. Banyak media yang mengambil konflik tersebut sebagai bahan beritanya. Lantas dari mana mereka dapat pasokan dana dan senjata? Mereka timbul karena adanya sifat tidak puas terhadap pemerintah kemudian mereka protes dan tanpa disadari kegiatan mereka telah ditunggangi dan mendapatkan dorongan dari pihak luar untuk melakukan suatu pemberontakan dan perlawanan bersenjata kepada pemerintah. Asing hanya membiayai dan menyediakan segala keperluannya sedangkan pelakunya adalah mereka yang tidak puas terhadap pemerintah. Dana yang mereka dapatkan biasanya disalurkan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dibiayai oleh asing dengan kedok sumbangan atau donatur.

Invasi negara besar yang di motori oleh Amerika Serikat (AS) terhadap negara-negara timur tengah (Irak) dengan dalih mencari senjata pemusnah massal dan terorisme adalah salah satu contoh dari di gelarnya konsep perang modern. Mereka memiliki kepentingan tetapi tidak bisa menguasai ataupun mengontrol negara sasaran, sehingga perlu untuk digelar perang modern di timur tengah dan menggulingkan pemerintahannya untuk kemudian diganti dengan pemerintahan baru yang pro AS. AS bisa lebih mudah untuk mengontrol negara bentukannya

tersebut sesuai dengan keinginan mereka.

Mereka (AS) dengan dalih mencari senjata pemusnah massal meski tidak terbukti keberadaannya telah berhasil merobohkan sebuah negara yang berdaulat dan mengganti pemerintahannya sesuai keinginan mereka. Untuk menutupi operasi perang modern yang mereka lancarkan, mereka kemudian mencari pembenaran di mata internasional dengan dalih adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Irak. Kenapa Irak yang konon katanya kuat bisa dengan mudah ditekuk oleh AS? Karena AS sebelumnya telah melancarkan perang modern dengan sasaran masyarakatnya yang dengan mudah bisa dipecah dan dikotak-kotakkan (Sunni dan Syiah) sehingga pada saat di invasi, Irak dalam posisi lemah dan tidak adanya persatuan ikatan yang kuat. AS juga telah berhasil mencari dukungan internasional dengan kebohongannya bahwa Irak telah membuat senjata pemusnah massal sehingga perlu untuk dijadikan musuh bersama dan di invasi.

Perubahan bentuk dari perang konvensional menjadi non konvensional dengan mengandalkan (1) Kekuatan Politik; (2) Kekuatan Ekonomi; dan (3) Kekuatan Sosial Budaya.

Tujuan dari perang modern adalah (1) Mengeliminir kemampuan negara sasaran agar tidak menjadi suatu potensi ancaman; (2) Melemahkan kemampuan negara sasaran sehingga semakin tergantung dan lebih mudah ditekan; (3) Melemahkan kemampuan negara sasaran; dan (4) Kemudian menguasai secara mutlak.

Tahap-tahap perang modern meliputi (1) tahap I = Infiltrasi; (2) tahap II = Eksploitasi; (3) tahap III = Politik Adu Domba; (4) tahap IV = Cuci Otak; dan (5) tahap V = Invasi atau Pencapaian Sasaran.

Tahap Invasi meliputi hal-hal (1) Intelijen; (2) Militer; (3) Pendidikan; (4) Ekonomi; (5) Ideologi; (6) Politik; (7) SOSBUD atau kultur dan agama; (8) Bantuan-bantuan asing; (9) Kerjasama disemua bidang; dan (10) Media atau Informasi.

Tahapan Hancurkan, lemahkan, dan kuasai terdiri dari (1) Intelijen; (2) TNI; (3) Ekonomi; (4) Politik; (5) Budaya; dan (6) Ideologi. Semuanya itu adalah titik berat kekuatan Negara.

- a. Tahapan Politik adu domba terdiri dari (1) Timbulkan kekacauan atau kekerasan; (2) Timbulkan konflik horisontal (SARA); (3) Timbulkan atau bantu separatis adakan pemberontakan; dan (4) Timbulkan

perang saudara.

- b. Ubah paradigma atau pola cara berpikir terhadap wawasan negara atau wawasan nusantara.
- c. Sasaran direbut dan dikuasai, hingga pada akhirnya negara akan dalam keadaan terjajah.

Bentuk bentuk kegiatan perang modern berupa Narkoba; VCD porno; Orang asing yang bekerja di Indonesia; Dana bantuan untuk pondok, LSM dan lain-lain; dan Embargo ALUTSISTA.

Televisi di Indonesia terutama yang gratisan alias tanpa harus membayar (hanya bayar listrik saja) untuk bisa menonton setiap acara di stasiun tv tersebut ada 10 stasiun tv nasional plus 2 tv lokal yang ada di beberapa daerah, dan kita semua sudah tau siapa pemilik masing-masing tv tersebut. GLOBAL, MNC, dan RCTI satu boss yaitu Hary Tanusibdyo sementara TRANS dan TRANS 7 milik Chairul Tandjung, METRO TV milik Surya Paloh, SCTV dan INDOSIAR pemilik (informasinya belum begitu jelas) yang puya info silahkan di share, sedangkan ANTV dan TV ONE milik Aburizal Bakrie.

Apa hubungannya dengan propaganda sesuai dengan judul, kita semua tahu bahwa media yang tersebut diatas adalah televisi yang bisa dinikmati secara gratis oleh masyarakat Indonesia sampai detik ini, masih jauh dari yang namanya NETRAL dalam menyikapi setiap masalah yang ada dan terkesan PROVOKATIF, hanya media online yang saat ini masih bisa dikatakan netral walau tidak semuanya, kita masih bisa berharap semoga PSSI segera sadar bahwa mereka diserang dari segala penjuru, (ibaratnya 8 penjuru mata angin) dan terbukti bahwa *alat propaganda paling ampuh adalah televisi dan media cetak.*

Gerakan rakyat anti perampasan tanah setidaknya diikuti oleh sekitar dua ratus ribu orang yang tergabung dalam berbagai organisasi tersebar di 27 propinsi yang selama ini berjuang dalam penegakan hak-hak ekonomi, sosial, budaya, dan politiknya untuk merebut kedaulatan atas pengelolaan sumber-sumber kehidupan yang berkeadilan.

Sehubungan dengan beberapa agenda penting nasional yang menarik perhatian publik maka kami menyampaikan pandangan sebagai berikut:

1. Rekomendasi bagi penyelesaian kasus Mesuji sebagaimana yang disampaikan oleh TGPF pada hari Senin (16/1) malam, mencerminkan



dangkalnya pemahaman pemerintah soal konflik agrarian dan PSDA, serta pelanggaran hak asasi manusia yang melingkupinya. Persoalan Mesuji, Sungai Sodong Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan meliputi 3 hal: *Pertama*, penerbitan HGU di atas tanah-tanah masyarakat. Hal demikian mencerminkan pengingkaran pemerintah pusat dan daerah yang terbukti menunjukkan watak anti tani dan anti rakyat karena tidak memenuhi hak-hak rakyat atas sumber kehidupan yang layak (Agraria) dan mengalihkan isu menjadi masalah spekulan tanah; *kedua*, penerima plasma perkebunan bukan kepada yg berhak; *ketiga*, adanya Wanprestasi atas perjanjian kemitraan antara masyarakat (petani) sungai sodong dengan perusahaan, dimana hak-hak masyarakat tidak dipenuhi sejak tahun 1995 berdasarkan perjanjian.

Ketiga, hal tersebut diatas adalah pemicu utama konflik, yang mengakibatkan Pam Swakarsa, karyawan, aparat kepolisian beradu dengan masyarakat sekitar. Mustahil menyelesaikan sengketa dengan menghormati hak-hak korban jika rekomendasi kasus tidak menyentuh hal tersebut sama sekali.

2. Terkait dengan kasus di Register 45, rekomendasi TGPF justru menjauhkan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam memenuhi hak-hak atas penghidupan yang layak (agraria) warga negara dengan mengalihkan isu menjadi spekulan tanah. Istilah Penduduk asli dan tidak asli tidak pernah dikenal dalam UUD 1945 dan UUPA tahun 1960. Mereka justru adalah subjek utama penerima manfaat dari objek landreform sepanjang mau dan mampu memproduktifkan lahan dan menjaga keberlanjutan jasa layanan alam.

Kami memandang, keseluruhan rekomendasi TGPF tidak menyentuh sama sekali soal-soal pelanggaran perusahaan dalam memperoleh HGU perkebunan dan ijin HTI yang sudah barang tentu di dalamnya ada keterlibatan Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, Bupati, dan Gubernur.

Pengusutan secara tuntas terhadap seluruh pejabat utama di Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, BPN, Gubernur, Bupati. Mereka yang bersalah harus diseret di muka hukum. Termasuk pengusutan terhadap pihak-pihak perusahaan perkebunan yang terbukti melanggar hukum harus ditindak dan dihentikan operasinya.



3. Rekomendasi kebijakan atas reforma agraria yang menggunakan INPRES di bawah UKP4 menunjukkan dangkalnya pemahaman pemerintah atas masalah agraria yang hanya mengacu pada masalah pengawasan dan pengendalian, di tengah situasi gunung es konflik agraria yang pecah di seluruh negeri. Rekomendasi tersebut juga menunjukkan lemahnya dasar hukum dan usaha mengatasi konflik agraria dan sumber daya alam yang tidak akan bisa dijalankan dengan tegas dan berkeadilan bagi rakyat.

Menurut kami, persoalan agraria dan pengelolaan sumber daya alam kita sekarang dalam kondisi darurat karena pengingkaran negara dan pemerintah SBY yang telah terbukti anti-tani dan anti rakyat dengan membela kepentingan perusahaan besar asing maupun dalam negeri.

Kami menuntut kepada Pemerintah SBY untuk melakukan terobosan politik dan hukum dengan menjalankan reforma agraria secara utuh sesuai dengan UUPA tahun 1960 dan menerbitkan peraturan terkait yang membela kepentingan kaum tani dan rakyat dengan dipimpin langsung oleh Presiden RI.

4. Sikap presiden SBY yang memberikan apresiasi tinggi kepada POLRI sungguh menunjukkan watak pemerintahan yang sejalan dengan tindakan fasisnya, melukai hati jutaan rakyat dari kaum tani, masyarakat adat, buruh, nelayan, perempuan, pemuda, mahasiswa yang telah bergerak menyuarakan aspirasi yang mengutuk tindakan kekerasan fasis yang dilakukan oleh aparat POLRI atau TNI dalam menangani konflik agraria hingga terjadi pembunuhan, penganiayaan HAM berat, penangkapan, dan kriminalisasi.

Berdasarkan pada penilaian tersebut kami menuntut kepada Presiden SBY untuk melakukan evaluasi komprehensif (termasuk hubungan modal internasional dengan aparat Negara seperti TNI atau Polri) atas kinerja aparat Polri atau TNI, menarik seluruh aparat TNI atau Polri dari wilayah konflik agraria dan sumberdaya alam, dan mengusut tuntas dan memberikan hukuman yang setimpal terhadap seluruh aparat yang terbukti melakukan tindak kekerasan dan pembunuhan.

Dengan membaca dan memahami situasi kekinian, kami Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-hak Rakyat Indonesia akan melaksanakan agenda mendesak sampai dengan 100 hari kedepan, diantaranya:

1. Melakukan konsolidasi gerakan dengan terus memperluas aliansi guna membangun gerakan rakyat anti perampasan tanah berskala nasional;
2. Pimpinan-pimpinan organisasi lintas sektor yang tergabung di dalam Sekber akan mengunjungi wilayah-wilayah konflik sekaligus melakukan propaganda dan pendidikan massa untuk membangkitkan dan menggerakkan sebuah gerakan rakyat anti perampasan tanah. Memberikan dukungan secara penuh dan langsung kepada rakyat yang sedang berjuang merebut kedaulatan atas pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya;
3. Mendesak terbentuknya PANSUS Agraria dan Pengelolaan Sumber daya Alam di DPR dengan tujuan untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas masalah agraria dan merekomendasikan penanganan komprehensif yang berpihak pada rakyat;
4. Mendesak Presiden untuk melaksanakan Reforma Agraria sesuai UUD 1945 pasal 33 (naskah asli) , TAP MPR No. IX/2001 dan UUPA tahun 1960. Segera bentuk komite Ad Hoc penyelesaian konflik agraria dan pengelolaan sumberdaya alam dalam konteks pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana tersebut diatas.

Pada akhirnya *secretariat* bersama Pemulihan Rakyat Indonesia menyerukan kepada seluruh rakyat khususnya buruh tani dan masyarakat adat untuk memperkuat organisasi tani dan persatuan organisasi rakyat agar sanggup merebut kembali tanah, mempertahankan tanah, melawan perampasan tanah, dan mengelola tanah agar bermanfaat bagi keluarga petani untuk mengurangi kelaparan, busung lapar, membuka lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan pedesaan di seluruh Indonesia.

### **Konflik Perbatasan**

Isu konflik sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia kembali menghangat setelah muncul laporan intelijen bahwa Malaysia mencaplok wilayah di dusun Tanjung Datu dan Camar Bulan yang berbatasan langsung dengan distrik Kuching di Negara Bagian Serawak dan Sambas Kalimantan Barat. Berdasarkan penelusuran tim TNI, beberapa patok yang diduga digeser pihak Malaysia belum bisa dipastikan faktanya demikian, karena sebagian daerah perbatasan tersebut merupakan tanah rawan abrasi sehingga pergeseran jarak tepi air dan tanah bisa berubah.

Kementerian Luar Negeri berjanji akan menyelesaikan isu konflik ini dengan sebaik-baiknya. Dalam banyak kasus konflik perbatasan RI-Malaysia, warga setempat yang diminta pendapatnya mengaku tidak terlalu mempermasalahkan konflik ini karena bagaimanapun hubungan sosial masyarakat kedua negara melalui jalur lintas batas baik-baik saja.

Memang ada klaim sepihak yang dilancarkan pihak Malaysia, tapi secara umum hubungan diplomasi kedua negara baik-baik saja dan selalu bertumpu pada penyelesaian masalah berbasis kesepakatan internasional dan memorandum kesepahaman antara kedua negara yang disepakati pada tahun 1978. "Perbatasan baik-baik saja, Tanjung Datu dan Camar Bulan masih aman dan tidak ada konflik di masyarakat".

Guru Besar Hukum Internasional UI Hukmahanto, menjelaskan, pada kenyataannya MOU perbatasan RI-Malaysia tahun 1978, ada sebagian wilayah Malaysia yang masuk ke Indonesia. Dalam peta yang dibuat pemerintah Malaysia, justru tidak dicantumkan daerah Tanjung Datu yang berdasarkan MOU masuk ke wilayah mereka. Satu hal ini saja yang perlu dicari solusi diplomatisnya, karena wilayah-wilayah kedua negara sudah ditentukan jelas.

### **Informasi dan Komunikasi dalam Perang Modern**

Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda, atau sebagai sinyal berdasarkan gelombang. Informasi adalah jenis acara yang mempengaruhi suatu negara dari sistem dinamis. Para konsep memiliki banyak arti lain dalam konteks yang berbeda. Informasi bisa di katakan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Istilah ini memiliki banyak arti bergantung pada konteksnya dan secara umum berhubungan erat dengan konsep seperti arti, pengetahuan, negentropy, persepsi, stimulus, komunikasi, kebenaran, representasi, dan rangsangan mental.

Dalam beberapa hal pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa tertentu atau situasi yang telah dikumpulkan atau diterima melalui proses komunikasi, pengumpulan intelejen, ataupun didapatkan dari berita juga dinamakan informasi. Informasi yang berupa koleksi data dan fakta seringkali dinamakan informasi statistik. Dalam bidang

ilmu komputer, informasi adalah data yang disimpan, diproses, atau ditransmisikan. Penelitian ini memfokuskan pada definisi informasi sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi, dan alirannya.

Informasi adalah data yang telah diberi makna melalui konteks. Sebagai contoh, dokumen berbentuk *spreadsheet* (semisal dari Microsoft Excel) seringkali digunakan untuk membuat informasi dari data yang ada di dalamnya. Laporan laba rugi dan neraca merupakan bentuk informasi, sementara angka-angka di dalamnya merupakan data yang telah diberi konteks sehingga menjadi punya makna dan manfaat.

Berkembangnya strategi perang dan memikirkan resiko kehancuran saat ini perang dilakukan dengan skenario lain tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Skenario ini dilancarkan dengan memaksa elite suatu bangsa agar silau dan terpengaruh terhadap faham luar, yang pada akhirnya mengakibatkan suatu bangsa terpecah dan terkotak-kotak kedalam tiga parameter yaitu: pertama adalah mayoritas masyarakat dibuat tidak tahu apa yang sesungguhnya sedang terjadi, hal ini terjadi pada masyarakat awam; kedua adalah sebagian masyarakat tahu namun tidak sadar atau tidak menyadari bahwa bangsa ini berada dalam jebakan, ini terjadi pada kaum intelektual; dan yang ketiga adalah sebagian masyarakat tahu dan sadar apa yang sesungguhnya terjadi, namun akibat kerakusan, mereka justru bersedia berkhianat kepada negara bangsanya, dengan bekerja sebagai agen asing atau sebagai komprador.

Di Indonesia skenario perang ini sebenarnya dimulai beberapa waktu sebelum krisis moneter 1997 atau 1998, dimana krisis tersebut sangat cepat berubah menjadi krisis multi dimensi yang dampaknya terus dirasakan sampai sekarang. Krisis yang berkepanjangan itu seharusnya harus menjadi peringatan sekaligus ujian bagi bangsa Indonesia karena terjadi melalui desakan keras dari kekuatan luar agar menerima faham yang dihembuskan dalam kemasan globalisasi, diawali dengan penggoyangan sektor moneter, kemudian meluas ke sektor ekonomi riil dan selanjutnya berkembang menjadi krisis kepercayaan dan krisis politik, serta krisis budaya. Kondisi yang tidak stabil tersebut justru disikapi oleh para elite politik dan beberapa kelompok kepentingan di dalam negeri untuk mengambil kesempatan demi kepentingan pribadi dan kelompok-kelompoknya (Oligarkhi di tingkat partai dan birokrasi), dengan mengabaikan kepentingan nasional dalam jangkauan jauh ke depan.

Sadar ataupun tidak dari situasi dan kondisi saat ini, sesungguhnya sudah dan sedang berlangsung perang modern di wilayah Indonesia, dengan menjalankan strategi sesuai tahapan perang modern di atas kapitalisme internasional yang dipimpin oleh negara maju dan sekutunya, berusaha mengikis wawasan kebangsaan, berusaha memecah belah persatuan bangsa Indonesia agar lemah dan akhirnya mampu mempengaruhi berbagai kebijakan, dan pelaksanaannya untuk tujuan akhir yakni menguasai mayoritas Sumber daya alamnya (SDA).

Banyak masyarakat Indonesia tidak menyadarinya bahwa saat ini sedang dijajah dan menjadi korban dari perang modern. Satu alasan pasti bahwa melakukan invasi fisik sangat tidak memungkinkan sehingga mereka merubah konsep dari konvensional menjadi non konvensional (perang modern). Perang modern, dengan biaya yang murah namun hasilnya sangat dahsyat karena dapat merusak sendi-sendi kekuatan negara sasaran. Hal tersebut sangat berbahaya bagi keutuhan wilayah NKRI karena didalamnya hidup jutaan manusia yang berasal dari berbagai macam elemen suku, agama, ras, dan budaya (SARA) sehingga sangat memungkinkan bagi mereka untuk “bermain” untuk memecah belah struktur masyarakat yang demikian majemuk.

Faktor utama yang menjadi daya tarik adalah kekayaan alam yang dimiliki Indonesia yang luar biasa besarnya. Dengan jumlah penduduk lebih kurang 230 juta jiwa merupakan pasar yang besar bagi penjualan barang-barang produksi. Indonesia mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar. Faktor inilah yang mengundang pihak asing ingin menguasai Indonesia, dengan strategi penguasaan secara tidak langsung yang dibungkus dengan cara mempengaruhi baik cara hidup maupun cara berpikir masyarakat melalui globalisasi komunikasi, media, kebudayaan, ekonomi, keuangan, sosial, dan politik.

Di sisi jumlah penduduk, masyarakat Indonesia di dorong agar konsumtif atau menjadi pasar potensial dengan membelanjakan uangnya. Untuk menguasai sisi potensi sumber daya alamnya, didorong adanya aturan atau kebijakan investasi yang mengikuti atau berpihak kepada pasar bebas yang lebih banyak menguntungkan investor.

Sejalan dengan tujuan dari perang modern maka sasaran antaranya adalah melemahnya wawasan kebangsaan serta menghilangkan jati diri dimana berikutnya akan muncul persoalan-persoalan kebangsaan mulai dari pelecehan terhadap negara, tumbuhnya terorisme, penguasaan,

dan pengelolaan sumberdaya alam oleh pemodal asing, konflik horizontal terutama di masyarakat kelas bawah, korupsi merajalela, perseteruan antar lembaga negara, dan banyak lagi contoh persoalan yang memprihatinkan. Adanya campur tangan asing dalam pembuatan berbagai undang-undang merupakan bagian dari agenda perang modern untuk merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

### *Defence Diplomacy*

Pola *defence diplomacy* juga mengalami pergeseran. Di masa lalu, *defence diplomacy* ditujukan untuk menggalang kerjasama dengan sekutu strategis atau aliansi atas dasar pertimbangan-pertimbangan real politik dan kepentingan pertahanan nasional. Misalnya dilakukan dengan memberikan bantuan kepada negara-negara lain untuk membendung kekuatan musuh, membentuk wilayah pengaruh, atau untuk membantu pemerintah-negara sekutu atau sahabat dalam menghadapi pemberontakan dalam negeri, dan untuk mengejar kepentingan-kepentingan komersial, misalnya penjualan senjata dan kepentingan perdagangan yang lain.

Secara umum *defence diplomacy* mencakup: pertama, upaya untuk membantu membina hubungan dengan negara-negara bekas musuh dan untuk mengembangkan apa yang disebut saling percaya (*CBM, confidence building measures*). Ini seperti yang terjadi dalam *defence diplomacy* antara NATO dengan negara-negara bekas anggota Pakta Warsawa dalam paket yang disebut Pfp (*Partnership for Peace*) yang mencakup berbagai program atau kegiatan dalam paket kerjasama bilateral antara NATO dengan masing-masing negara-negara target. Upaya ini sering juga disebut *strategic engagement*.

Secara umum, CBM mencakup 3 langkah besar yaitu upaya untuk menciptakan kepercayaan melalui transparansi kebijakan dan langkah-langkah lain misalnya melalui penerbitan buku putih, pemberitahuan penyelenggaraan latihan militer, tukar menukar personal militer dalam pendidikan-pendidikan militer, dan saling mengundang negara lain sebagai observer dalam suatu latihan militer dan sebagainya. Kedua, menciptakan CBM melalui penerapan beberapa pengaturan tentang pembatasan (*constraint CBM*). Langkah-langkah dalam *constraint CBM* mencakup antara lain: pembatasan jumlah pasukan yang dilibatkan dalam suatu latihan militer, tidak menempatkan pasukan pada

jarak tertentu dari perbatasan masing-masing negara, membatasi jangkauan atau kemampuan suatu persenjataan pada titik tertentu, dan sebagainya. Ketiga adalah pembentukan CBM melalui langkah-langkah sepihak (unilateral CBM) untuk membentuk kepercayaan pada pihak lain. Misalnya satu pihak tertentu secara sepihak menyatakan tidak akan mengembangkan senjata dengan kemampuan tertentu, tidak mengembangkan senjata nuklir atau tidak akan menjadi pengguna pertama senjata nuklir, dan sebagainya.

Kedua, *defence diplomacy* saat ini juga ditujukan untuk membantu mengembangkan hubungan sipil-militer yang demokratis yang ditandai dengan supremasi otoritas politik atas militer dan pembentukan tata pemerintahan yang baik di bidang pertahanan (*good governance*). Kedua tujuan ini merupakan aspek-aspek penting dari pengembangan demokrasi. Langkah-langkah dalam kategori ketiga ini sering dilakukan dalam bentuk paket kerjasama keamanan secara umum. Ketiga, *defence diplomacy* juga ditujukan untuk memberikan sumbangan kepada upaya-upaya perdamaian dunia, misalnya ndalam misi-misi operasi perdamaian yang mencakup *peacekeeping* dan *peace enforcement operations*.

*Defence diplomacy* dengan demikian sangat politis. Dalam konteks CBM ia bisa menjadi indikasi dari kemauan untuk mengembangkan hubungan yang lebih luas, mengembangkan saling percaya dengan kebijakan-kebijakan yang transparan, dan komitmen untuk bekerjasama dalam mencegah potensi konflik (*conflict prevention*) serta sebagai upaya untuk mengelola perbedaan-perbedaan yang mungkin lahir dalam hubungan antar negara. *Defence diplomacy* juga bisa membentuk persepsi bersama tentang suatu masalah dan *mind-set* militer negara lain. Untuk kepentingan *defence* dan *security reform*, *defence diplomacy* mencakup bidang-bidang: supremasi otoritas politik atas militer, kontrol demokratik atas kebijakan pertahanan, pengembangan fungsi atau peran pengawasan parlemen, *rule of law* dan HAM, dan keterlibatan masyarakat sipil.

Tujuan besar yang ketiga dari *defence diplomacy* yaitu mengembangkan kemampuan dalam melakukan operasi perdamaian biasanya mencakup: pengembangan konsep dan doktrin operasi, pengembangan kerangka institusional untuk mengintegrasikan keterlibatan negara-negara target, dan kemampuan operasional baik melalui *training* maupun melalui pengembangan pusat kajian dan latihan *peace operations*.



Dalam konteks Indonesia *defence diplomacy* adalah bagian dari strategi pertahanan yang didasarkan atas pemikiran strategis yang menempatkan kerjasama pertahanan dan upaya perdamaian sebagai salah pilar untuk melindungi kepentingan pertahanan Indonesia. Tujuan penting dari langkah ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia dan membangun saling percaya dengan negara lain, terutama negara-negara tetangga, membangun persepsi bersama tentang masalah keamanan secara umum, serta untuk memberikan sumbangan terhadap upaya menciptakan stabilitas dan perdamaian internasional.

Pemikiran ini menunjukkan kesadaran penuh Indonesia bahwa pemenuhan kepentingan pertahanan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari interaksi dengan masyarakat internasional. Kerjasama pertahanan dan perdamaian dunia didasarkan atas prinsip-prinsip: penghormatan kedaulatan nasional, sesuai dengan Piagam dan mandat PBB, dan tidak mengarah pada pembentukan suatu pakta pertahanan. Kerja sama pertahanan dengan negara lain di kawasan maupun di luar kawasan dikembangkan dalam kerangka politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Penyelenggaraan kerjasama pertahanan dikembangkan dalam model kerja sama bilateral dan multilateral untuk membangun saling percaya dan menyelesaikan masalah-masalah keamanan secara bersama.

### **Ketahanan Nasional**

Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas, integrasi, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional dapat dijelaskan seperti dibawah ini:

#### **1. Ketangguhan**

Adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya;



## 2. Keuletan

Adalah usaha secara giat dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut diatas untuk mencapai tujuan;

## 3. Identitas

Yaitu ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat secara keseluruhan. Negara dilihat dalam pengertian sebagai suatu organisasi masyarakat yang dibatasi oleh wilayah dengan penduduk, sejarah, pemerintahan, dan tujuan nasional serta dengan peran internasionalnya;

## 4. Integritas

Yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensional maupun fungsional;

## 5. Ancaman

Yang dimaksud disini adalah hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan usaha ini dilakukan secara konseptual, kriminal, dan politis;

## 6. Hambatan dan gangguan

Adalah hal atau usaha yang berasal dari luar dan dari diri sendiri yang bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional.

## **Strategi Diplomasi dan Konflik Perbatasan**

Banyak pihak menduga hasil perundingan pertama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia terkait dengan konflik di perbatasan tak menghasilkan apa-apa, ternyata terbukti. Penyebabnya, lemahnya strategi diplomasi yang dimiliki delegasi Indonesia.

Sejumlah keberhasilan Indonesia dalam proses diplomasi di atas menunjukkan bahwa diplomasi perbatasan maritim menjadi sebuah preseden yang baik dalam penguatan konsepsi wawasan nusantara guna menjaga dan memelihara keamanan dan pertahanan wilayah Indonesia. Hal ini disebabkan oleh:

1. Diplomasi perbatasan menjadi sebuah ujung tombak penegakan kedaulatan NKRI;
2. Diplomasi perbatasan menjadi jembatan penghubung konsep politik luar negeri Indonesia dalam persepsi "pemeliharaan kepentingan

- nasional” dan juga pemeliharaan hubungan bertetangga yang baik;
3. Diplomasi perbatasan maritim memberikan sebuah keterjaminan realokasi dan pengembangan SDA perairan dan kelautan;
  4. Diplomasi perbatasan adalah sebuah kunci menuju manajemen wilayah perbatasan dan penguatan sistem pertahanan melalui *soft diplomacy*.

Dalam konsep kekinian, terutama arus globalisasi yang mengaburkan konsep-konsep perbatasan suatu negara, sebuah agenda dan tugas besar bagi Indonesia untuk tetap memelihara dan menjaga patok-patok perbatasan, khususnya perbatasan maritime dengan negara tetangga. Diungkapkan oleh Robert Frost “*good fences make good neighbors*” nyatanya sejalan dengan konsep politik luar negeri Indonesia yang mengutamakan konsep “*good neighbor policy*”. Sejumlah perundingan dan negosiasi baik bilateral, trilateral, dan multilateral digagas untuk melindungi keutuhan NKRI di samping isu “sengketa” wilayah antara Indonesia-Malaysia di wilayah Camar Bulan, Delimitasi Batas Laut teritorial dengan sejumlah wilayah baik Singapura, Filipina, dan Timor Leste.

Metode dan *Platform* diplomasi perbatasan maritim yang digagas oleh Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Indonesia bernegosiasi dengan negara-negara tetangga untuk menyelesaikan masalah perbatasan. Pemerintah akan menyelesaikan masalah tersebut melalui dialog dan perundingan yang terjadwal;
2. Indonesia membentuk komite perbatasan bersama dan komite perbatasan umum sebagai kerangka penyelesaian masalah lintas perbatasan. Komite-komite ini juga memfasilitasi aktifitas sosio-ekonomi masyarakat di perbatasan;
3. Indonesia mempercepat pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah perbatasan melalui penguatan koordinasi antar lembaga. Pemberdayaan masyarakat, akan mengurangi kesenjangan sosio-ekonomi antar masyarakat di perbatasan;
4. Pemerintah terus meningkatkan kapasitas domestik dari aspek keselamatan navigasi hingga keamanan maritim. Dari perlindungan lingkungan maritim hingga pengelolaan perikanan yang berkelanjutan;

5. Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam negosiasi multilateral isu-isu maritim dan hukum laut. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Konvensi PBB tahun 1982 mengenai Hukum Laut. Partisipasi itu, juga diarahkan untuk menyelesaikan isu-isu maritim terkini seperti pembajakan, dampak perubahan iklim terhadap laut, eksploitasi sumber-sumber genetik, dan perlindungan maritim;
6. Diplomasi preventif Indonesia untuk menciptakan saling percaya dan menghindari konflik. Upaya preventif ini dilakukan melalui serangkaian pertemuan para pakar dan ilmuwan guna membahas isu-isu maritim seperti Laut China Selatan. Melalui pembentukan Pertemuan antar sesi ARF mengenai Keamanan Laut dan Forum Maritim ASEAN.

Sebuah diplomasi perbatasan menjadi *bridge* bagi persatuan dan kesatuan serta kekokohan wilayah suatu negara. Diplomasi perbatasan yang dimulai dari alokasi, delimitasi, dan demarkasi wilayah akan menjadi *road map* pembangunan wilayah sekaligus pengembangan sektor-sektor kewilayahan, khususnya wilayah maritim menuju manajemen dan pemeliharaan wilayah perbatasan.

### **Strategi Komunikasi Efektif**

Komunikasi adalah tentang teknologi atau medium yang dipilih sebagai “kendaraan” untuk menyampaikan pesan-pesan dari organisasi atau institusi atau lembaga. Strategi komunikasi yang efektif tidak hanya membuat pesan-pesan anda bisa memberi dampak bagi target *audiens* tapi juga merefleksikan misi atau tujuan atau sasaran organisasi anda yang terintegrasi ke dalam operasi sehari-hari. Strategi itu butuh artikulasi yang jelas tentang *audiens*, kejelasan pesan, dan pilihan media. Berisi *feedback* tentang hubungan antara planning dan evaluasi.

Strategi komunikasi yang efektif selalu diawali oleh perencanaan yang solid. Perencanaan yang matang adalah kunci bagi keberhasilan proyek anda. Perencanaan yang bagus bisa dijadikan koridor kerja bagi orang-orang yang melaksanakan misi komunikasi. Strategi anda akan membimbing ke arah mana komunikasi digerakkan, mulai dari proses persiapan hingga menyampaikan pesan pada publik. Tiga jenis *planning* yang harus dipertimbangkan dalam era digital ini

adalah: *Organizational planning*; terkait dengan siapa-siapa saja yang bertanggung jawab melakukan tindakan-tindakan apa saja untuk misi komunikasi ini. *Communications planning*, terkait penentuan cara-cara apa anda mengkomunikasikan pesan. Apakah lewat media tertentu atau umum, bagaimana isi pesannya, dan lain-lain. *Technology Planning*, terkait alat bantu teknologis untuk menyampaikan pesan. Apakah Anda mengirim *press release* via e-mail, apakah menyampaikaian undangan untuk *konferensi pers*, dan lain-lain. Tiga unsur *planning* sering kali tumpang tindih. Dalam praktik, kita selalu menggunakan ketiganya secara bersamaan. Rencana komunikasi anda adalah menyampaikan pesan pada publik. Pesan itu harus diciptakan sejelas-jelasnya demi sasaran organisasi anda. Pesan disampaikan dengan cara apa supaya bisa sampai ke publik yang anda bidik. Untuk mencapai target ini, tentu dibutuhkan teknologi pembantu. Penyusunan *planning* jadi lebih mudah, pertimbangkan petunjuk berikut tentang *audiens*, pesan, dan media.

## Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuatan strategi diplomatis sangatlah berperan dalam menyelesaikan konflik perbatasan dalam membangun ketahanan nasional dan integritas. Dalam hal ini terutama berkaitan dengan penyelesaian konflik perbatasan Sambas dan tragedi Mesuji. Praktik komunikasi efektif berupa *defence diplomacy* dalam membangun ketahanan nasional dimulai dengan diplomasi dengan negara tetangga serta mengetahui birokrasi hubungan dengan negara tetangga, sehingga konflik bisa diminimalisir.

Dengan harapan tidak terulangnya konflik yang serupa, sudah sepatutnya evaluasi pola komunikasi dalam mendukung rancangan strategi pertahanan dapat dilakukan. Semua tujuan tersebut dapat terwujud jika semua pihak yang terkait, khususnya para pemegang kepentingan dan armada militer memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan strategi dan hukum positif serta kebijakan yang telah ditetapkan. Tentunya, sekali lagi langkah tersebut diiringi oleh pengembangan komunikasi yang efektif dengan mengedepankan kepentingan negara.

## Daftar Pustaka

- Bandoro, Bantarto, 2005, *Perspektif Baru Keamanan Nasional*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Kerahkan Militer Rebut Camar Bulan, [www.equator-news.com](http://www.equator-news.com), diakses pada 16 Maret 2012.
- H. Lanza Conrad, 2010, *Napoleon Dan Strateg I Perang Modern*, Indonesia: Komunitas Bambu.
- [Kompasiana.com/bola/2012/01/03](http://Kompasiana.com/bola/2012/01/03).
- Baran, Stanley. J dan Davis, Dennis, 2000, *Mass Communication Theory*, Canada: Wadworth a division thomson learning.
- Biagi, S, 1988, *Media Impact AN Introduction to Mass Media*, New York: wadworth, inc.
- Ignatius Haryanto, 2007, *Propaganda, Kuasa dan Pengetahuan*, diambil dari: <http://www.propaganda/propaganda-kuasa-dan-pengetahuan.html>.
- Colin S. Gray, 1999, *Inescapable Geography*, dalam Colin S. Gray dan Geoffrey Sloan, *Geopolitics: Geography and Strategy*, London: Frank Cass.
- Cdr PK Ghosh, " *Maritime Security Challenges in South Asia and the Indian Ocean: Response Strategies*", A paper presented for the Center for Strategic and International Studies-American-Pacific Sealanes Security Institute conference on Maritime Security in Asia, Honolulu, Hawaii, January 18-20, 2005.
- YB Dato Sri Chan Kong Choy, Minister of Transport Malaysia pada 3rd Indian Ocean Research Group (IORG) Conference on Sealane Security in the Indian Ocean, Kuala Lumpur, 11 July 2005.



# PERBATASAN ACEH - SEBUAH CELAH YANG “MENGGIURKAN” BAGI WIBAWA DAN KEDAULATAN BANGSA DALAM KONTEKS KOMUNIKASI INTERNASIONAL

**Andrian Wira Syah Putra dan M. Najib Husain**

## **Pendahuluan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara kepulauan dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 9 juta km<sup>2</sup>, di mana 75% wilayahnya berupa lautan, struktur wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil yang jumlahnya mencapai 17.508 buah. Indonesia juga memiliki garis pantai yang panjangnya sekitar 81.000 km. Sebuah wilayah yang sangat besar dan menjadi sebuah anugerah bagi bangsa Indonesia, namun potensi yang dimiliki bisa menjadi sebuah pintu masuk-keluar nya bencana jika tidak dikelola dengan baik dan mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal ini yang terjadi dengan wilayah perbatasan di Propinsi Aceh yang sangat rawan dengan berbagai transaksi illegal dan berbagai aktivitas yang dapat merusak *Nasionalisme Paripurna di Tapal Batas* sebuah istilah yang digunakan dalam *headline* Harian Kompas dalam mengkaji daerah-daerah di tapal batas.

Permasalahan pembangunan di kawasan perbatasan sangat erat berkaitan dengan masalah kedaulatan bangsa dan negara, kesejahteraan rakyat, perlindungan kepentingan masyarakat perbatasan yang masih tertinggal dan kurang terurus, serta lingkungan hidup. Berbagai isu tentang batas wilayah negara dan pengelolaan kawasan perbatasan yang selama ini terjadi masih dianggap sebagai masalah *defence-security* dan *law enforcement*, padahal di era damai dewasa ini permasalahan lebih menyangkut masalah *social-security* dan kesetaraan terhadap akses perekonomian yang kurang perhatian.

Adanya kesenjangan ekonomi dan pembangunan di perbatasan dengan negara tetangga berdampak pada kehidupan dan perilaku sosial budaya masyarakat. Kondisi prasarana dan sarana pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap informasi dan lapangan kerja yang sangat kurang di perbatasan dihadapi oleh masyarakat perbatasan, yang mengakibatkan tingkat kehidupan sosial mereka tertinggal dibanding dengan masyarakat di negara tetangga.

Perbatasan provinsi Aceh sangat rawan peredaran narkoba jenis shabu dan heroin dari luar negeri dengan pintu masuk-keluarnya melalui laut Aceh Timur, Aceh Utara, dan melalui darat wilayah Aceh Singkil dan jalur udara melalui bandara internasional Sultan Iskandar Muda. Sindikat narkoba internasional kelompok Malaysia memasok barang haramnya ke Indonesia melalui Selat Malaka ke pelabuhan tradisional di Aceh. Mereka memasukan narkoba menggunakan perahu kecil ke Aceh. Memasukan narkoba ke Jakarta melalui jalan darat dengan menggunakan kendaraan umum dan membawa narkoba tersebut dengan menggunakan bus dari Aceh kemudian Padang, Pekanbaru, Lampung, baru masuk ke Jakarta. Jaringan narkoba juga memasarkan barangnya ke kota-kota besar di Indonesia.

Polda Aceh memperkirakan 65 kilogram sabu-sabu asal Malaysia sudah lolos diselundupkan ke Indonesia melalui Aceh. Penyelundupan itu diduga dilakukan melalui jalur darat, udara, dan laut. Data ini merupakan estimasi polda Aceh berdasarkan kegagalan penyelundupan sabu dilakukan tahun 2011. Aceh dimanfaatkan sebagai salah satu jalur masuk sabu ke Indonesia oleh mafia narkotika. Mafia ini menjadikan rute penyelundup senjata semasa konflik Aceh dulu sebagai jalur memasukkan sabu.

Malaysia merupakan tempat yang paling dekat dengan Nangroe Aceh Darussalam, yang dapat di tempuh hanya dalam waktu 30 menit dengan menggunakan jalur udara, di samping hal itu terdapat ribuan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berasal dari Aceh yang bekerja di Malaysia baik melalui jalur resmi maupun ilegal. Hampir setiap tahun pemerintah Malaysia merilis data-data kasus narkoba yang terjadi di Negara tersebut dan kebanyakan dari mereka-mereka yang terancam hukuman gantung kebanyakan berasal dari Aceh dan setiap tahun semakin membengkak angkanya. Kebanyakan pula masyarakat Aceh yang terkait kasus narkoba di Malaysia adalah pendatang ilegal yang



sebelumnya adalah orang-orang yang menghindari konflik di daerahnya. Mereka bertahan hidup dengan membawa ganja ke Malaysia kemudian di barter dengan narkoba jenis Sabu yang nantinya didistribusikan kembali ke Indonesia. Terbukanya Aceh melalui jalur udara sekarang juga dimanfaatkan oleh para mafia sebagai jalur menyelundup barang haram tersebut. Secara geografis Aceh sangat dekat dengan Malaysia.

Secara global, pematat narkoba di dunia menurut data WHO mencapai 190 juta orang. Pengguna narkoba (*end user*) di Indonesia yang cenderung mengalami trend peningkatan dari tahun ke tahun, tahun 2009 prevalensi penyalahgunaan Narkoba sebanyak 3,60 juta orang, tahun 2010 prevalensi penyalahgunaan Narkoba 4,02 juta orang, dan tahun 2011 prevalensi penyalahgunaan Narkoba 5,00 juta orang (**Sumber:** Hasil Survei BNN & Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) Universitas Indonesia, 2009-2011).

Menjadi tugas penting bagi Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi peredaran narkoba dari jalur internasional agar dapat menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta kegiatan ekonomi dan perdagangan yang memberikan keuntungan bagi pemerintah maupun masyarakat. Diharapkan pemerintah Indonesia dapat melakukan Komunikasi internasional pada Negara tetangga dengan menekankan kajian atas realitas politik dan *focus* perhatian pada pesan yang bermuatan kebijakan dan kepentingan suatu negara dengan negara lain yang terkait dengan masalah ekonomi, politik, dan pertahanan. Jalur diplomatik yang dilakukan pemerintah atau Negara dengan pemerintah atau Negara lain diharapkan dapat mendinamisasikan hubungan internasional yang terjalin antara dua negara atau lebih serta hubungan di berbagai bidang antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda negara atau kebangsaan. Menunjang upaya-upaya pencapaian tujuan hubungan internasional dengan meningkatkan kerjasama internasional serta menghindari terjadinya konflik atau kesalahpahaman baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar penduduk serta mendukung pelaksanaan politik luar negeri bagi masing-masing negara untuk memperjuangkan pencapaian kepentingan di negara lain.

Melalui tulisan ini dapat mengetahui bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam membangun sebuah pertahanan dan keamanan yang kuat serta mendukung terciptanya komunikasi internasional dengan

negara-negara di sekitar daerah perbatasan di Indonesia, karena terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal dan pelanggaran hukum merupakan cerminan atas terbatasnya prasarana, sarana, dan sumberdaya manusia di bidang pertahanan dan keamanan. Jumlah aparat Kepolisian dan TNI-AL beserta kapal patroli sesuai dengan kebutuhan maka pengawasan di sepanjang garis perbatasan laut dan di pulau-pulau terluar dapat teratasi. Celah-celah di perbatasan Aceh dengan Negara tetangga yang selama ini dimanfaatkan sebagai jalur narkoba dapat dihentikan dan dapat menjadi sebuah celah yang menguntungkan bagi kedua negara yang berada di daerah perbatasan sebagai jalur perdagangan yang legal dan saling menguntungkan.

### **Kawasan Perbatasan**

Pengertian perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat. Awalnya perbatasan sebuah negara atau *state's border* dibentuk dengan lahirnya negara. Penduduk yang tinggal di wilayah tertentu tidak merasakan perbedaan itu pada awalnya, bahkan tidak jarang mereka berasal dari etnis yang sama. Munculnya negara, mereka terpisahkan dan dengan adanya tuntutan negara itu mereka mempunyai kewarganegaraan yang berbeda.

Riwanto Tirtosudarmo dalam Ardhana (2007: 1) mengategorikan ada empat tipe perbatasan, yaitu *pertama*, *Alienated borderland* suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktivitas lintas batas sebagai akibat berkecamuknya perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan, dan persaingan etnik. *Kedua*, *Coexistent borderland* suatu wilayah perbatasan dimana konflik lintas batas bisa ditekan sampai ke tingkat yang bisa dikendalikan meskipun masih muncul persoalan yang terselesaikan misalnya yang berkaitan dengan masalah kepemilikan sumberdaya strategis di perbatasan. *Ketiga*, *Interdependent borderland* suatu wilayah perbatasan yang dikedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relative stabil. Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan, juga di kedua negara terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara. *Keempat*, *Integrated borderland* suatu wilayah perbatasan yang kegiatan ekonominya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya tergabung dalam sebuah pesekutuan yang erat.

Berdasarkan tipe perbatasan di atas, pada hakikatnya kawasan perbatasan RI adalah batas berakhirnya kedaulatan penuh dari pemerintah Indonesia terhadap wilayahnya berikut segala isi di atas, permukaan, dan dibawahnya. Menjalankan kedaulatannya ini, pemerintah Indonesia berhak melakukan apa saja (*to govern it self*) terhadap isi dan ruang kawasan perbatasan sesuai dengan cita dan tujuan negara Indonesia serta arah pembangunan negara Indonesia. Dalam melaksanakan kedaulatan penuhnya di kawasan perbatasan, pemerintah RI berhak menolak segala campur tangan atau intervensi dari pihak atau negara lain. Pemerintah RI tidak boleh melakukan intervensi terhadap kawasan yang bukan dibawah yurisdiksi kedaulatannya. Intervensi terhadap kawasan perbatasan diperbolehkan sepanjang ada kesepakatan antara pemerintah RI dengan pihak atau negara lain (Kurnia: 2011, 83).

### **Peran Strategis Komunikasi Internasional dalam Menjaga Keamanan**

Menurut Effendy (Shoelhi: 2009, 26-27) komunikasi internasional adalah komunikasi yang dilakukan komunikator yang mewakili suatu negara untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan negaranya kepada komunikan yang mewakili negara lain dengan tujuan untuk memperoleh dukungan, bantuan, dan kerja sama, melalui berbagai media komunikasi atau media massa internasional. Komunikasi internasional, lanjut Effendy, adalah sebuah komunikasi yang interaksi dan ruang lingkupnya bersifat lintas negara serta berlangsung diantara orang-orang yang berbeda kebangsaan atau lembaga-lembaga dari negara yang berbeda-beda dan memiliki jangkauan penyampaian pesan melintasi batas-batas wilayah suatu negara.

Sastropetro (1991: 12) menjelaskan bahwa komunikasi internasional mempelajari pernyataan antarnegara, antarpemerintah, atau antarbangsa yang bersifat umum melalui lambang-lambang yang berarti. Rumusan itu memberikan arti, bahwa pendekatan terhadap subdisiplin komunikasi dengan melihat unsur-unsur serta hukum-hukum yang berlaku dibidang ilmu Komunikasi. Gerhard Maletzke dalam bukunya *Intercultural and International Communications* menyatakan, komunikasi Internasional adalah proses komunikasi antara berbagai negara atau bangsa yang melintasi batas-batas negara. Pandangan Maletzke, komunikasi ini tercermin dalam diplomasi dan propaganda, dan seringkali berhubungan dengan situasi *intercultural* (antarbudaya).

Komunikasi internasional lebih menekankan kajian atau perhatian pada pesan yang bermuatan kebijakan dan kepentingan suatu negara dengan negara lain sebagai realitas politik yang terkait dengan masalah ekonomi, politik, pertahanan, dan lain-lain. Hal ini sangat relevan jika diterapkan dalam persoalan-persoalan yang terjadi antara Indonesia dengan beberapa negara tetangga baik itu Malaysia, Singapura, Timor Leste, dan Papua Nugini.

Menurut K.S. Sitaram (Shoelhi: 2009, 26-27), komunikasi internasional adalah komunikasi antara struktur-struktur politik alih-alih antara budaya-budaya individual, artinya komunikasi internasional sering dilakukan lewat para pemimpin negara atau wakil-wakil negara (menteri luar negeri, duta besar, konsul jenderal). Para wakil negara tersebut mewakili kepentingan negaranya dalam upaya meyakinkan negara lain atas berbagai kebijakan yang tengah ditempuhnya. Keterampilan komunikasi interpersonal pemimpin negara sangat penting, yang digunakan untuk menimbulkan persepsi positif dan komitmen bawahan akan kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin mereka. Dengan kata lain apa yang penting tentang apa dan bagaimana pemimpin mengatakan apa yang dirasakan oleh bawahan yang berinteraksi langsung dengan daerah-daerah konflik (Bambacas and Patrickson, 2008: 51-53). Tidak perlu Negara Indonesia, harus kehilangan wilayah lagi jika ada konflik perbatasan karena semuanya dapat diselesaikan secara musyawarah antara dua pemimpin negara yang bertikai.

Secara spesifik dijelaskan Liliweri (2003: 22), bahwa studi komunikasi Internasional disandarkan atas pendekatan-pendekatan maupun metodologi sebagai berikut:

1. Pendekatan peta bumi (*geographical approach*) yang membahas arus informasi maupun liputan internasional pada bangsa atau negara tertentu, wilayah tertentu, lingkup dunia, dan antarwilayah atau antarkawasan;
2. Pendekatan media (*media approach*), adalah pengkajian berita internasional melalui suatu media atau multimedia;
3. Pendekatan peristiwa (*event approach*) yang mengkaji suatu peristiwa internasional lewat suatu media;
4. Pendekatan ideologis (*ideological approach*), yang membandingkan

*system* pers antarbangsa atau melihat penyebaran arus berita internasional dari sudut ideologis semata-mata.

Suatu fenomena atau realitas tidak hadir dengan sendirinya, melainkan selalu melibatkan faktor yang menjadi penyebabnya. Timbul persoalan mengapa komunikasi internasional dianggap penting? Sejauh mana arti penting komunikasi internasional? Beberapa faktor yang menunjukkan urgensi komunikasi internasional dapat dilihat dari beberapa aspek yang melatarbelakanginya, sebagai berikut:

#### 1. Aspek Kepentingan Nasional

Setiap negara di dunia tentu memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang unik sekaligus fenomenal dengan kebhinekaannya. Secara sosiologis Indonesia terdiri dari beragam suku, etnik, bahasa, agama, budaya, dengan segala nilai-nilai, dan falsafah pemikiran, kepercayaan, dan sejarah yang berbeda. Kebhinekaan ini membawa dampak terhadap berbagai hal, mulai dari penataan *system* politik, hukum, militer, ekonomi, perdagangan, *social* budaya, hingga memperkuat “tali” integrasi bangsa yang kokoh, dan kuat. Ditinjau dari sisi hubungan internasional, Indonesia berkepentingan untuk menjelaskan dan memahami kekayaan potensi Indonesia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia (penduduk) serta tata kehidupannya, kepada negara dan bangsa lain bagi kemajuan hubungan kerja sama internasional. Para diplomat melakukan komunikasi agar dunia internasional memiliki pemahaman tersebut yang dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan tercapainya kepentingan nasional untuk kemudian disumbangkan bagi peningkatan kesejahteraan internasional.

Dalam komunikasi internasional, setiap negara pasti memiliki kepentingan masing-masing sehingga timbul konflik kepentingan. Dalam situasi semacam itu, suatu negara harus mengutamakan kepentingan nasionalnya.

#### 2. Aspek Kebergantungan dan Bantuan Ekonomi

Pada saat ini kebanyakan negara secara ekonomi bergantung pada negara lain. Negara-negara sedang berkembang membutuhkan banyak dana untuk membiayai pembangunan di negerinya. Pada umumnya, mereka bergantung kepada negara-negara yang

memiliki modal. Misalnya, Indonesia bergantung kepada Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara donor lainnya. Secara timbal balik, pemenuhan kebutuhan negara berkembang meski dikemas dalam bentuk bantuan ekonomi dan keuangan di bayar dengan jaminan pasokan hasil-hasil sumber daya alam atau berbagai bentuk kompensasi lainnya yang dibutuhkan negara pemilik modal. Kebergantungan ekonomi mengharuskan negara-negara berkembang mengetahui pola pergaulan dengan negara-negara pemilik modal yang tentu saja memiliki kepentingan yang berbeda.

### 3. Aspek Stabilitas Internasional

Keadaan suatu kawasan tidak selamanya terkendali secara politik. Kenyataannya, banyak negara dikawasan mengalami gejolak politik yang menyebabkan dunia penuh ketidakpastian alam arena ekonomi. Persaingan ekonomi kerap menimbulkan gejolak akibat perang harga, politik dumping, kebijakan yang tidak adil, aturan perdagangan internasional yang mengeksploitasi pihak yang lemah, serta permainan di bursa efek tingkat global. Semua ini berpotensi memicu ketidakpastian. Hubungan antara gejolak politik dan ekonomi dalam arah ini saling berpengaruh dan kerap tak terhindarkan dalam lingkungan internasional.

### 4. Aspek Globalisasi dan Tata Informasi

Kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi yang dicapai pada akhir abad ini telah mempengaruhi perkembangan komunikasi internasional. Setiap bangsa terdorong untuk memanfaatkan kemajuan tersebut untuk memajukan pergaulan antarbangsa. Secara factual, sampai sejauh ini tidak terasa manfaat globalisasi pasar bebas selain membuat negara berkembang semakin bergantung kepada negara maju dan kian kuatnya ekonomi negara maju menerobos tempat pasar negara berkembang. Kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi juga dimanfaatkan negara maju untuk semakin memperkuat posisi mereka dalam percaturan internasional. Ketimpangan semakin berkembang tidak hanya menyangkut persoalan ekonomi, politik, dan ideologi semata, tetapi merembet ke masalah ketidakseimbangan tata informasi dan komunikasi internasional, (Shoelhi: 2009, 41-43).

Politik dan ekonomi internasional perlu senantiasa di jaga kestabilannya dengan mencegah setiap potensi gejala untuk berkembang. Dalam menjaga stabilitas Internasional, setiap negara harus bersungguh-sungguh memelihara kelangsungan persahabatan Internasional serta ketertiban dan perdamaian dunia. Setiap persoalan internasional harus dapat diatasi melalui komunikasi yang efektif hingga berhasil melahirkan penyelesaian. Pada ranah inilah komunikasi internasional menjadi penting dan diperlukan.

## **Upaya Penanggulangan Peredaran Narkoba di Indonesia**

Pemerintah Indonesia selama ini telah menjalankan 4 (empat) langkah upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba:

### **1. Pre-emptif**

Layaknya penanganan setiap gangguan kamtibmas, maka penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba apabila dilakukan lebih dini di hulu jauh lebih baik daripada di muara. Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan narkoba, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal serta terbina, dan terciptanya kondisi prilaku atau norma hidup bebas narkoba yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan narkoba.

Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif terutama bagi remaja atau pemuda dengan kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif, dan kreatif, sedangkan kegiatan yang bersifat pre-emptif edukatif dilakukan dengan metode komunikasi informasi edukatif yang dapat dilakukan melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan, lembaga keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan.

Di Aceh sejak di bangku sekolah dasar maupun di dayah atau pesantren harus di masukkan pendidikan atau ajaran yang berkaitan dengan syariat Islam, guna untuk mencegah perilaku-perilaku yang menyimpang, diantaranya penyalahgunaan narkoba sejak dini kepada para siswa maupun santri sebagai implementasi dari pendekatan pre-emptif.

## 2. Preventif

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar *Police Hazard* tidak berkembang, menjadi ancaman faktual antara lain dengan tindakan:

- a. Mencegah agar jumlah dan jenis yang tersedia hanya untuk dunia pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. Menjaga ketepatan pemakaian sehingga tidak mengakibatkan ketergantungan;
- c. Mencegah agar kondisi geografi Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai jalur gelap dengan mengawasi pantai serta pintu-pintu masuk ke Indonesia;
- d. Mencegah secara langsung peredaran gelap narkoba di dalam negeri di samping mencegah agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai perdagangan gelap baik tingkat nasional, regional, maupun internasional.

## 3. Represif

Merupakan upaya penindakan dan penegakkan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera para pelaku penyalahguna dan pengedar narkoba. Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam usaha represif adalah: a) memutus jalur peredaran gelap narkoba; b) mengungkap jaringan sindikat; c) mengungkap motivasi atau latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan narkoba.

## 4. *Treatment* dan Rehabilitasi

Upaya *treatment* dan rehabilitasi dilaksanakan oleh Departemen Sosial dengan Departemen Kesehatan melalui Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO). Secara konsepsional, penanggulangan penyalahgunaan narkoba umumnya dibagi dalam tiga instrumen:

1. *Suply reduction*: yakni mempersempit ruang gerak produksi dan peredaran narkoba. Kendala yang dihadapi saat ini adalah kolusi antara Bandar dan aparat. Muncul fenomena *kitchen lab*, industri rumahan yang yang dikelola secara industri garmen, yang



mengakibatkan kontrol menjadi lebih sulit.

2. *Deman reduction*: mengurangi pasar (pengguna) narkoba, yang ditempuh melalui program rehabilitasi para pengguna. Intinya mengacu pada hukum pasar: kalau permintaan kurang pada akhirnya akan mengurangi suplai. Pemerintah dan beberapa lembaga swasta (LSM) telah melakukan advokasi dan pendampingan untuk memaksimalkan pusat-pusat rehabilitasi pengguna narkoba. Kepala BNN mengatakan, Pembangunan pusat rehabilitasi akan dilakukan secara simultan di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat. Pemerintah juga sudah membentuk Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) di Cibubur, Jakarta. Beberapa pondok pesantren juga memiliki program khusus rehabilitasi pecandu narkoba seperti Ponpes Suryalaya di Tasikmalaya, Jawa Barat.
3. *Harm reduction*: mengurangi dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba, yang khusus difokuskan terhadap pengguna pecandu. Biasanya, terapi yang ditempuh adalah *Terapi Metadon*, suatu jenis narkoba dengan tingkat ketagihan rendah (interval 24 jam), dibandingkan dengan tingkat ketagihan jenis sabu (setiap 7 jam). Asumsinya, dengan Terapi Metadon, pengguna bisa lebih produktif, karena interval sakau (kesakitan akibat ketagihan) menjadi lebih panjang.

Pemerintah Indonesia juga sudah memiliki beberapa lembaga resmi yang menangani langsung kasus-kasus narkoba: BNN (Badan Narkotika Nasional); Divisi Narkotika Bareskrim Polri; NAFZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) yang dikelola Badan Pengasawan Obat dan Makanan (BPOM). Terdapat satu organisasi sosial kemasyarakatan GRANAT (Gerakan Nasional Anti Narkoba) yang kemudian menjadi Organisasi Perjuangan memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Granat secara sendiri maupun bersama kelompok lainnya atau lembaga Pemerintah, melakukan penyuluhan tentang bahaya peredaran gelap dan bahaya penyalahgunaan narkoba, serta mengkampanyekan tentang cara-cara untuk menangkal peredaran gelap dan mengatasi berbagai bahaya penyalahgunaan narkoba. Secara kelembagaan, Granat sudah tersebar di seluruh Indonesia, dari tingkat kelurahan atau desa, kemudian tingkat kecamatan, tingkat kabupaten atau kotamadya, sampai tingkat propinsi, serta Badan Pelaksana Organisasi di Kampus

Perguruan Tinggi, Akademi, Sekolah Menengah, dan Pondok Pesantren, serta tempat-tempat khusus (seperti pemukiman, perusahaan, industri, dan kelompok kerja). Granat telah diterima sebagai anggota WFAD (*World Federation Against Drugs*) yang berkantor pusat di Stockholms serta beranggotakan lebih dari 50 NGO dari seluruh penjuru dunia.

Secara segi legal formal, penanggulangan narkotika juga dikuatkan dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Telah ada sebelumnya UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1976; UU RI No. 7 Tahun 1997 tentang pengesahan *United Nation Convention Against Llicit Traffic In Narcotict Drug And Psycotropict Substances* Tahun 1998 (Konvensi PBB Tentang Pemberantasan Tentang Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika Tahun 1998). Pemberdayaan penegakan hukum dilakukan antara lain dengan rumusan ancaman hukuman terhadap orang yang menyalahgunakan narkotika, yang dapat berupa: Hukuman mati; Hukuman penjara seumur hidup; Hukuman tertinggi 20 tahun dan terendah 1 tahun; Hukuman denda dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah). Semua upaya yang dilakukan masih jauh dari apa yang diharapkan, setiap tahun jumlah pemakai dan produsen narkoba di Indonesia mengalami peningkatan. Penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2005 disebutkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba pada laki-laki menempatkan Jakarta pada posisi ketiga dengan 11,4 % di bawah Medan dan Bandung. Yogyakarta berada pada urutan ke empat dengan 8,5 %. Ketua Pelaksana Harian BNN, Komjen Makbul Padmanegara, mengatakan peredaran narkoba sudah sampai keseluruhan wilayah di Indonesia. 200 juta penduduk Indonesia, 1 % atau 2 juta diantaranya positif mengkonsumsi narkoba.

### **Kondisi Kawasan Perbatasan Aceh sebuah Celah yang Menggiurkan**

Secara umum, penyalahgunaan narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan Bahan berbahaya lainnya) melibatkan tiga kelompok pelaku utama: *pertama*, produsen, baik jaringan nasional maupun internasional; *kedua*, pengedar yang terdiri dari dua kategori pengedar yang berasal dari jaringan produsen, dan pengedar lepas yang biasa disebut kurir; *ketiga*, pengguna, yaitu masyarakat Indonesia dari semua elemen. Tiga kelompok utama tersebut dapat menjadi satu mata rantai yang sulit

dipisahkan. Seorang pengguna bisa saja beralih menjadi pengedar, atau sebaliknya. Dalam beberapa kasus, seorang pengedar beralih menjadi produsen.

Tiga pelaku utama penyalahgunaan narkoba tersebut, hanya dua di antaranya (produsen dan pengedar) yang kemungkinan terkait langsung dengan keamanan nasional. Kegiatan produksi dan pengedaran atau distribusi merupakan bisnis yang melibatkan dana besar, dan karena itu memerlukan pengamanan maksimal karena menyangkut keamanan nasional.

Secara global, dikenal tiga kawasan yang menjadi basis produksi bahan dasar narkoba:

1. Kawasan Sabit Emas (Pakistan, Afghanistan, Iran, Turki). Afghanistan dikenal memiliki lahan terluas perkebunan bunga opium;
2. Kawasan Segi Tiga Emas (Thailand, Laos, dan Myanmar), yang juga memproduksi opium;
3. Amerika Latin, terutama Kolumbia yang memproduksi sekitar 2/3 produksi kokain global, dengan sasaran penyelundupan Amerika Serikat dan Eropa.

Secara nasional Indonesia, wilayah Aceh sudah lama dikenal sebagai produsen dan lahan perkebunan narkoba jenis ganja serta pintu keluar-masuknya barang haram tersebut. Ratusan hektar ganja, seperti di Peudada (Bireuen), Lamteuba (Aceh Besar), Kutacane (Aceh Tenggara), dan Blang Pidie (Aceh Barat Daya). Dalam satu bulan tersebut, operasi dilakukan oleh aparat itu belum maksimal, karena medan yang harus dilalui sangat berat, disamping tidak adanya informasi ladang-ladang lainnya yang masih tersebar luas. Kabupaten Bireuen disinyalir mempunyai ladang ganja terluas di Aceh. Diperkirakan ada 44 titik ladang ganja yang tersebar di enam lokasi di lima kecamatan di Provinsi Aceh.

Provinsi Aceh yang berada di ujung barat wilayah Indonesia itu, rawan peredaran narkoba jenis shabu dan heroin dari luar negeri dengan pintu keluar- masuknya melalui laut Aceh Timur, Aceh Utara, dan melalui darat wilayah Aceh Singkil dan jalur udara melalui bandara internasional Sultan Iskandar Muda. Pelabuhan Perupuk di Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara, disinyalir menjadi lokasi keluar-masuknya narkoba dari Aceh dan Malaysia.

Pelabuhan kecil yang padat kegiatan nelayan tidak hanya mencari ikan, tetapi juga terlibat dalam melakukan transaksi narkoba. Kapal yang berlabuh sekaligus ada proses transaksi dha-dha (sebutan narkoba), narkoba berbagai jenis itu didatangkan dari Malaysia. Barang haram itu dijemput menggunakan mobil pribadi dan selanjutnya meluncur ke arah Gambus, Indrapura. Pengangkutan daging adalah modus baru masuknya narkoba via jalur laut. Biasanya, pelaku menggunakan harga paket dalam setiap pengiriman. Kegiatan transaksi bukan hanya sekali, tapi sudah berulang-ulang. Kadang modusnya kemasan daging dan minyak, hingga kebutuhan keluarga.

Sabu-sabu yang masuk dari Aceh melalui pelabuhan tikus (kecil) mencapai 50 kilogram dan hanya 5-6 kilogram yang beredar di Aceh selebihnya beredar ke daerah lain. Satu kali operasi di Bireuen saja aparat bisa menemukan 20-90 hektar ladang ganja. Bayangkan jika biasanya satu hektar ladang ganja akan menghasilkan 100 kilogram ganja siap pakai dengan harga lokal Rp. 200 ribu per kilogram maka sekali panen bisa menghasilkan omzet Rp. 20 juta. Jika sampai di Medan dan sekitarnya harga ganja sudah melambung mencapai Rp. 700 ribu per kilogram. Di Jakarta dan kota-kota lainnya di Jawa, harga ganja untuk partai besar mencapai Rp. 2 juta per kilogram atau Rp. 200 juta per hektar. Harga eceran justru lebih tinggi lagi yakni melonjak sampai Rp. 3,5 juta.

Data faktual memang belum ada ditemukan, katakanlah jumlah total ladang ganja di Aceh ada 1000 hektar (100 ribu kilogram ganja) dengan asumsi setahun bisa tiga kali panen dengan harga Rp. 3,5 juta per kilogram, maka setiap kali panen omzet per tahun dari tanaman ganja adalah  $100 \text{ ribu kg} \times 3,5 \text{ juta} \times 3 = \text{Rp } 1,05 \text{ triliun per tahun}$ . Sangat fantastis, hampir sepertiga dari jumlah APBD Provinsi Aceh tiap tahunnya.

Bayangkan jika hasil tanaman ini di ekspor, perbedaan kurs akan menghasilkan potensi keuntungan yang berlipat, apalagi ganja Aceh mendapat pengakuan telah mencapai standar kualitas dunia. Banyak negara melegalkan ekspor-impor ganja, seperti Swiss dan Belanda yang sering menjadi pasar gelap ganja internasional. Hal ini sangat menggiurkan bagi sebagian orang yang berpikiran pendek untuk mau terlibat dalam transaksi ganja baik di dalam lebih-lebih jika dijual ke negara tetangga.

Mulai dari pelajar, ibu rumah tangga sampai pejabat pun mau

menjadi kurir ganja di dalam dan diluar negeri. Tekanan hidup dan ingin cepat kaya menjadi motivasi utama dalam kegiatan ilegal ini. Jakarta menjadi kota terbesar dalam pemasaran narkoba di Indonesia dan Malaysia sebagai tempat bertransaksi internasional. Ganja, hasish, shabu, putaw, heroin, kokain, exstasi, hingga acid akan mudah didapat bila sudah masuk dalam ruang lingkup narkoba.

Kondisi yang “menggiurkan” ini menjadi penyebab Aceh masuk dalam kategori rawan narkoba, hal ini didukung oleh pernyataan Sekertaris daerah provinsi Aceh T Setia Budi mengatakan, sesuai data dari pihak kepolisian, peredaran narkoba di Aceh kini sudah dalam batas meresahkan, karena berada di peringkat 8 secara nasional. Tingginya peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di Aceh, menurut Setia Budi, karena jaringan pemasoknya sudah menysasar hampir ke semua kelompok masyarakat. Kelompok pelajar, mahasiswa, orang tua, bahkan di kalangan birokrat. Data yang ada juga mengungkapkan, 52 sampai 75 persen penghuni lembaga pemasyarakatan di Aceh adalah terpidana kasus narkoba.

Tak dapat dipungkiri bahwa potensi ganja di Aceh mampu menutup defisit APBD di setiap kabupaten atau kota yang memiliki ladang ganja, namun secara hukum ganja tetap dilarang dan merupakan jenis narkotika yang berbahaya. Eksistensi ganja di Aceh tentu ada pengaruh kausalitas, tidak mungkin ganja tumbuh subur di Aceh jika tidak memiliki makna apa-apa.

Narkoba ini dapat menjadi awal musibah, karena berkaitan dengan transaksi-transaksi ilegal lainnya. Di Amerika Serikat menurut Menlu Hillary Clinton narkoba merupakan salah satu pemicu kriminalitas, sebagai bentuk kekerasan narkoba. Hal ini terjadi akibat bisnis narkoba memutar uang dalam jumlah besar, sehingga persaingan antar kelompok sering terjadi dalam memperebutkan pasar atau mengamankan jalur pengedaran dan penyelundupan.

Pada tahun 1970-an, berbagai gerakan separatisme di dunia menggunakan perdagangan narkoba sebagai sarana mendanai perjuangan separatisme. Belakangan muncul beberapa kasus adanya beberapa kelompok teroris yang memanfaatkan narkoba sebagai bagian dari kegiatan pengumpulan dana terorisme, seperti yang dilakukan kelompok Taliban di Afghanistan dan Pakistan. Berdasarkan hal inilah kemudian muncul istilah *narcoterrorism*.

Kasus di Indonesia, *narcoterrorism* sejauh ini terungkap seorang tersangka terorisme yang terlibat penjualan narkoba. Fadli Sadama, tersangka terorisme yang ditahan di Medan karena terlibat perampokan, diketahui memperdagangkan ganja untuk membeli senjata di Thailand, selanjutnya dibawa ke Indonesia untuk kegiatan terorisme. Gambaran kronologis, Fadli Sadama, kelahiran Pekanbaru 26 April 1982, pernah terlibat perampokan Bank Lippo di Medan tahun 2003, kemudian ditahan di Lapas Medan dan dibebaskan 2007. Begitu bebas, langsung merantau ke Malaysia dan bekerja sebagai penyadap karet. Melalui jalur narkoba di Aceh digunakan juga untuk menyeludupkan senjata yang banyak beredar di masyarakat sipil di Aceh.

Fenomena yang terjadi di Aceh saat ini sudah perlu dilakukan upaya yang tegas dan berkelanjutan dalam menjaga keamanan bangsa serta kewibawaannya. Selama ini sudah dilakukan berbagai macam kegiatan dalam menanggulangi distribusi serta peredaran narkoba di Aceh. Sangat ironis, di daerah Aceh sendiri tidak sedikit aparat keamanannya yang terlibat dalam kegiatan ini, baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen sekaligus *backing* di belakang kegiatan ini. Ini semua akan menyebabkan hilangnya kewibawaan dan kedaulatan bangsa pada umumnya dan bagi masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam yang merupakan daerah khusus yang menjalankan syariat Islam merupakan sebuah hal yang sangat kontradiktif.

Sudah saatnya kedua Negara untuk bertemu guna mencari solusi yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan komunikasi internasional antara Indonesia dan Malaysia. Sebagai Negara serumpun, seharusnya ini menjadi hal yang lebih mudah untuk dilaksanakan ataupun diselesaikan sehingga jalur transaksi ilegal ini dapat dihentikan.

## **Simpulan**

Peredaran Narkoba di Aceh, umumnya terjadi lewat laut seperti wilayah Aceh Timur dan Aceh Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia, sedangkan melalui darat masuk dari wilayah Aceh Singkil.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah baik dengan jalan Pre-emptif, sesuai dengan kondisi Aceh sebagai daerah “Serambi Mekkah” dan yang menjalankan syariat Islam maka pendekatan pre-emptif sangat ditanamkan sejak masih anak-anak untuk menyampaikan bahaya yang ditimbulkan dari Narkoba. Preventif, dengan tindakan:

a) Mencegah agar jumlah dan jenis yang tersedia hanya untuk dunia pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan; b) Menjaga ketepatan pemakaian sehingga tidak mengakibatkan ketergantungan; c) Mencegah agar kondisi geografi Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai jalur gelap dengan mengawasi pantai serta pintu-pintu masuk ke Indonesia; d) Mencegah secara langsung peredaran gelap Narkoba di dalam negeri di samping mencegah agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai perdagangan gelap baik tingkat nasional, regional, maupun internasional. Represif, bentuk kegiatan yang dilakukan dalam usaha Represif adalah a) memutuskan jalur peredaran gelap narkoba; b) mengungkap jaringan sindikat; c) mengungkap motivasi atau latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan narkoba.

Pendekatan Komunikasi Internasional antara dua Negara, Indonesia dan Malaysia belum dijalankan secara optimal baik secara diplomasi maupun kerjasama pertahanan keamanan antara dua negara.

## Daftar Pustaka

- Ardhana, I Ketut, et.al, 2007, *Dinamika Etnisitas dan Hubungan Ekonomi pada Wilayah Perbatasan di Kalimantan Timur – Sabah, studi kasus di wilayah Krayan dan Long Pasia*, Jakarta: Pusat Penelitian Sumber Daya Regional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Bambacas, M and Patrickson, M, 2008, *Interpersonal Communication Skills That Enhance Organisational Commitment. Journal of Communication Management Vol. 12 No 1, pp. 51-72.*
- Kurnia, Putra Mahendra, 2011, *Hukum Kewilayahan Indonesia; harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Kurnia, Putra Mahendra, 2011 *Keadilan di Tanah-Tanah Perbatasan, Jurnal Transisi Media Penguatan Demokrasi Lokal*, Edisi No.7. Malang: Penerbit Intrans Institute.
- Liliweri, Alo, 2003, *Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sastropoetro, R.A. Santoso, 1991, *Komunikasi Internasional*, Bandung: Alumni.

Shoelhi, Mohammad, 2009, *Komunikasi Internasional: Perspektif Jurnalistik*.  
Bandung: Penerbit Simbiosis Rekatama Media.

[www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id). *Narkotika Nasional Republik Indonesia*, Diakses pada  
tanggal 25 April 2012.



# PERANG CYBER DALAM DINAMIKA KOMUNIKASI INTERNASIONAL

M Badri

## Pendahuluan

*“Cyberspace is real. And so are the risks that come with it. From now on, our digital infrastructure, the networks and computers we depend on every day, will be treated as they should be, as a strategic national asset.” Barack Obama, the US President (Al Jazeera, 19/2/2012)*

Komunikasi antarnegara dalam konteks hubungan internasional tidak selamanya harmonis. Bahkan di balik keharmonisan eksplisit negara-negara di dunia seringkali terjadi perang implisit. Apalagi pada negara yang sedang berkonflik, niscaya potensi perang laten tersebut semakin tinggi. Di dunia modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, ranah teknologi juga dikembangkan menjadi metode baru dalam peperangan (*cyber warfare*). Dengan teknologi, aktivitas di ruang nyata (*real space*) dapat ditransformasikan ke dunia maya (*cyber space*). Perang modern ini kemudian dipandang sebagai ancaman baru terhadap keamanan dan ketertiban dunia.

Menurut Salahuddin (2011: 4), *cyberspaces* kini telah menjadi tempat potensial untuk menjadi medan pertempuran dan konflik tradisional maupun khusus. Bukan hanya pihak yang mewakili entitas suatu negara namun juga kelompok masyarakat lainnya yang saling berseteru. Mereka saling berhadapan melalui ajang perdebatan, adu argumentasi, penyebaran upaya dominasi informasi hingga kegiatan yang bersifat destruktif seperti *web defacing rally* sebagai cara propaganda dan intimidasi atau yang lebih berat lagi. Perseteruan ini tidak hanya melibatkan pelaku amatir tapi juga mereka yang punya keterampilan dan kemampuan khusus bahkan banyak kelompok profesional yang menawarkan jasa layaknya tentara bayaran.

Keterampilan yang dimiliki misalnya di bidang strategi keamanan dan pengamanan serta serangan informasi (*information security and*

*warfare*), ahli meretas (*hacking*), spionase (*espionage*), forensik digital (*digital forensic*) dan analisis keamanan jaringan (*network security analyst*). Alat bantu (*tools*) dan pengetahuan menggunakan sehingga dapat digunakan sebagai senjata untuk melakukan suatu serangan (*cyber attack*) yang mengawali suatu *cyberwar* juga dapat dengan mudah diperoleh di internet itu sendiri. Keahlian ini tidak bersifat eksklusif.

Salah satu perang *cyber* yang menarik perhatian dunia adalah serangan yang dilakukan Rusia terhadap Estonia pada 10 Mei 2007. Serangan *cyber* Rusia telah melumpuhkan jaringan keuangan, situs presiden, perdana menteri, parlemen, partai politik, perusahaan, hingga situs berita. Lembaga pemantau trafik mencatat, salah satu dari 10 jaringan internet Estonia yang diserang *hacker* Rusia, kebanjiran trafik data sebesar 90 megabit per detik selama satu jam. Perang *cyber* antara Rusia dan Estonia itu dilihat banyak pakar sebagai perang *cyber* pertama dengan efek dan kerugian terburuk. Estonia adalah negara dengan infrastruktur internet terbaik kedua setelah Korea Selatan (Vivanews.com, 18/11/2011).

Perang *cyber* Rusia-Estonia itu dipicu sengketa dan konflik politik di dunia nyata. Estonia yang belum lama merdeka dari Uni Soviet, ingin melepaskan diri dari segala atribut Soviet. Mereka berencana memindahkan patung perunggu tentara Soviet dari pusat kota Talinn. Hal itu ditentang banyak warga Estonia keturunan Rusia. Mereka protes di jalan-jalan, lalu berujung rusuh. Pemerintah Rusia berang dan konflik itu pun tak bisa dihindari, berlanjut ke dunia maya.

Perang *cyber* lainnya adalah antara Korea Utara (Korut) dengan Korea Selatan (Korsel), dua negara bertetangga yang lama bermusuhan. Pada 9 Juli 2009, sekitar 30 ribu sampai dengan 60 ribu komputer terinfeksi virus 'diperalat' menyerang situs-situs *web* perbankan, juga sebuah perusahaan keamanan internet Korsel. Pada hari berikutnya, Korut malah mengerahkan serangan lebih besar. Sekitar 166 ribu komputer *bot* berasal 74 negara diarahkan membombardir situs *web* pemerintah Korsel, dan bank-bank mereka (Vivanews.com, 5/8/2011).

Kasus yang diduga serangan *cyber* juga terjadi di pangkalan misil Alghadir di Bid Ganeh, barat Teheran, Iran pada 12 November 2011. Sebuah ledakan dahsyat yang terasa hingga 30 mil jauhnya menewaskan 17 anggota pasukan elit Iran. Sebab Iran adalah salah satu negara yang kerap menjadi sasaran serangan *cyber* Israel—yang mendapat

dukungan penuh Amerika Serikat (AS)—khususnya terkait upaya Iran memperkaya uranium, salah satu komponen utama nuklir. Pada tahun 2009 pernah terjadi serangan *malware* Stuxnet pada instalasi pengayaan nuklir Iran di Natanz. Stuxnet mampu merusak atau menghancurkan *sentrifuse* untuk memproduksi bahan bakar uranium. Hal itu diperkuat dengan pengakuan mantan kepala staf *Israel Defense Forces* (IDF) bahwa Stuxnet merupakan salah satu keberhasilan utama dia saat memimpin lembaga itu (Vivanews.com, 18/11/2011).

Melihat berbagai kasus di atas, sepertinya perang *cyber* sudah menjadi bagian penting dari perang modern. Akar permasalahannya, umumnya dipicu disharmonisasi komunikasi antarnegara. Seperti Rusia-Estonia, Korea Utara-Korea Selatan, Israel-Iran, bahkan ketika hubungan komunikasi Indonesia-Malaysia mengalami keretakan. Sengketa Pulau Ambalat menyulut ketegangan hubungan Indonesia-Malaysia, perang *cyber* terjadi meski sifatnya lebih individual *cracker* --istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang yang melakukan tindakan memasuki sistem keamanan komputer dan kemudian mengubah tampilan hingga melakukan perusakan. Di dunia nyata, armada perang kedua negara masih menahan diri dan berusaha mencari jalan damai.

Menurut Salahuddien (2011: 6) insiden klasik seperti *web defacement* (*vandalism*) serta DDOS (*Distributed Denial of Service*) masih mungkin terjadi meski tidak dapat diperkirakan jumlahnya mengingat pemicu aktivitas serangan ini amat bergantung pada *actual event* situasi geopolitik, ekonomi, sosial, dan budaya terutama di kawasan regional ASEAN dan Asia Pasifik. Situasi dalam negeri terkadang juga turut memicu terjadinya insiden klasik semacam ini akibat adanya rivalitas di tengah masyarakat itu sendiri yang juga berimbas di lingkungan *hacktivism*.

Dalam konteks yang lebih luas, penulis melihat bahwa saat ini perang *cyber* sudah menjadi ancaman serius di tengah upaya membangun dan mempertahankan tatanan dunia baru pasca Perang Dunia II. Banyak negara terus mengembangkan teknologi elektromagnetik dan teknologi informasi dan komunikasi, maka perangkat untuk melakukan perang *cyber* semakin mutakhir. Prediksi bahwa perang dunia maya sebagai ancaman terbesar di masa depan bukan khayalan belaka.

Belakangan ini mulai terjadi “perang” hegemoni antara Barat (AS dan NATO) dengan Timur (China, Rusia, Korut). Saat di belahan dunia

lain sibuk membicarakan langkah diplomasi dan kerja sama ekonomi sebagai pilar utama tata pergaulan dunia masa depan, Vladimir Putin (kembali terpilih sebagai Presiden Rusia) dengan tegas mengatakan, pendekatan diplomatik, dan ekonomi saja tidak cukup untuk menuntaskan berbagai konflik di dunia. Rusia harus mengandalkan kekuatan militer untuk memastikan posisinya dipahami kekuatan-kekuatan lain di dunia (*Kompas*, 26/2/2012: 10).

### **Definisi Perang Cyber**

Menurut Beidleman (2009:9) untuk mendefinisikan perang *cyber* harus didahului dengan definisi dunia maya. Dalam hal ini Departemen Pertahanan AS telah menyempurnakan definisinya dari waktu ke waktu. Terakhir pada Oktober 2008 pembaruan dari kamus militer resmi AS *Joint Publication (JP) 1-02*, mendefinisikan dunia maya: “*global domain within the information environment consisting of the interdependent network of information technology infrastructures, including the Internet, telecommunications networks, computer systems, and embedded processors and controllers*”.

Definisi pada *JP 1-02* memberikan dasar yang kokoh untuk mendefinisikan perang *cyber*. Selain mengidentifikasi sifat global dari dunia maya, definisi ini mereferensikan lingkungan informasi, menghubungkan dunia maya dan dunia fisik, infrastruktur kritical masyarakat, dunia informasi, dimana data dibuat dan disimpan, dan aspek kognitif di mana persepsi manusia dan keputusan dibuat. Keterkaitan ini membuat perang *cyber* menjadi bagian menarik dari perang konvensional dan menautkan dunia maya dengan keamanan nasional (Beidleman, 2009: 10).

Berdasarkan definisi tersebut dan implikasinya, orang bisa menyimpulkan bahwa perang *cyber* hanyalah perang dalam domain dunia maya. Penyederhanaan ini tidak cukup, karena dua alasan. *Pertama*, definisi “perang di dunia maya” terlalu luas. Menjatuhkan bom di sebuah pusat telekomunikasi bukan perang *cyber*. Perang *cyber* tidak sama dengan *information operations* (IO), tetapi bisa menjadi bagian dari IO. IO terdiri dari operasi psikologis, penipuan militer, operasi keamanan, peperangan elektronik, dan *computer network operations* (CNO). CNO merupakan tindakan penggunaan jaringan komputer untuk menyerang sistem informasi masyarakat atau jaringan komputer

mereka. Sedangkan perang *cyber* menggunakan dunia maya untuk menyerang personil, fasilitas, atau peralatan selain informasi dan komputer. *Kedua*, mendefinisikan perang *cyber* sebagai perang di dunia maya mengabaikan kompleksitas penerapan hukum perang yang lebih fundamental ke dunia maya (Beidleman, 2009: 11).

Menurut Salahuddien (2011: 3), *cyberwarfare* (*cyberwar*) adalah penggunaan teknologi komputer dan internet untuk melakukan perang di dunia maya. Pelaku *cyberwar* saling bersaing untuk menguasai dan memanfaatkan sumber daya teknologi serta informasi yang ada di dalamnya untuk menyerang, menghancurkan, menyesatkan, mempengaruhi, menyandera, mengurangi, menghilangkan, mengalihkan, mengganggu, menghentikan komunikasi, arus informasi, dan isinya serta berbagai tindakan lain yang mengakibatkan kerugian dan melemahkan lawan.

Ancaman perang *cyber* bukanlah hal baru. Pemerintah AS telah melaksanakan taktik perang *cyber* lebih dulu dari negara lain. Dua contoh keberhasilan taktik perang *cyber* AS adalah Operasi Badai Gurun dan operasi CIA untuk mengganggu jaringan pipa Uni Soviet. Pada tahun 1982, Presiden Reagan menyetujui rencana pengiriman perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan pompa pipa, turbin, dan katup ke Uni Soviet, yang memiliki fitur merusak kecepatan pompa dan pengaturan katup. "Hasilnya adalah ledakan non-nuklir paling monumental dan api yang pernah dilihat dari ruang angkasa", kata mantan Sekretaris Angkatan Udara Thomas C. Reed dalam bukunya, *At the Abyss: An Insider's History of the Cold War*. Taktik perang *cyber* digunakan lagi ketika menginvasi Irak pada tahun 1991. Pada Operasi Badai Gurun tahap pertama pihak AS melakukan kampanye udara strategis untuk menyerang pertahanan strategis udara Irak, lapangan udara atau pesawat, sistem komando dan kontrol, fasilitas telekomunikasi, dan elemen kunci infrastruktur nasional. AS juga menggunakan komunikasi yang ekstensif dan sistem satelit untuk mendukung aktivitas Badai Gurun (Westby, 2007: 2-3).

AS tidak sendirian dalam mengembangkan taktik dan strategi perang *cyber*. Pada awal 1996, pejabat Pemerintah AS memperkirakan bahwa lebih dari 120 negara melakukan atau mengembangkan kemampuan serangan komputer yang memungkinkan mereka mengambil alih sistem operasi Departemen Pertahanan AS (Westby, 2007). Fakta lain juga

terungkap dalam laporan tahunan 2006 yang disampaikan U.S.-China Economic and Security Review Commission (USCC) kepada Kongres pada bagian *Information and Cyber-Warfare*:

*Chinese military strategists write openly about exploiting the vulnerabilities created by the U.S. military's reliance on advanced technologies and an extensive C4ISR [Command Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance] infrastructure it uses to conduct operations. China's approach to exploiting the technological vulnerabilities of adversaries extends beyond destroying or crippling military targets. Chinese military writings refer to attacking key civilian targets such as financial systems....According to the Department of Defense, the PLA's [People's Liberation Army] cyber-warfare strategy has evolved from defending its own computer networks to attacking the networks of its adversaries and limiting their ability to obtain and process information....Such attacks would be intended to disable defense systems that facilitate command and control and intelligence communication and the delivery of precision weapons, primary instruments for the conduct of modern U.S. warfare (USCC, 2006: 137).*

Kemudian laporan tahunan USCC 2010 pada bagian *Trends in the Cybersecurity Environment* menyebutkan:

*Numerous computer systems around the world, including those owned by the U.S. government, continued to be the target of intrusions that appear to have originated within the [People's Republic of China]. These intrusions focused on exfiltrating information, some of which could be of strategic or military utility. The accesses and skills required for these intrusions are similar to those necessary to conduct computer network attacks. It remains unclear if these intrusions were conducted by, or with the endorsement of, the [People's Liberation Army] or other elements of the [People's Republic of China] government. However, developing capabilities for cyberwarfare is consistent with authoritative [People's Liberation Army] military writings (USCC, 2010: 236).*

Laporan USCC di atas dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan basis pertahanan *cyber* sudah menjadi bagian penting dari sistem pertahanan negara saat ini. Banyak negara sudah saling memata-matai strategi perangnya di dunia maya. Bila dicermati AS merupakan representasi kekuatan Barat dan China kekuatan Timur yang saat ini mulai diperhitungkan di kancah internasional. Ancaman serangan *cyber* bisa datang dari mana saja dan kapan saja dengan strategi tersembunyi maupun terang-terangan.

Sarah dan Gultom (2012: 2-3) dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Republik Indonesia memaparkan dalam konsep *cyber*

*warfare*, penggunaan teknologi sistem informasi dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan komunikasi antar prajurit atau jalur komando yang difasilitasi oleh satu sistem komando kendali militer modern, yaitu sistem NCW (*Network Centric Warfare*). NCW merupakan konsep siskodal operasi militer modern yang mengintegrasikan seluruh komponen atau elemen militer ke dalam satu jaringan komputer militer NCW berbasis teknologi satelit dan jaringan internet rahasia militer yang disebut SIPRNet (*Secret Internet Protocol Router Network*). Dengan adanya teknologi NCW yang didukung infrastruktur SIPRNet, berbagai komponen atau elemen militer di mandala operasi dapat saling terhubung (*get connected*) secara *on-line system* dan *real-time*, sehingga keberadaan lawan dan kawan dapat saling diketahui melalui visualisasi di layar komputer.

### **Komunikasi Internasional**

Komunikasi internasional adalah komunikasi yang ruang lingkungannya melintasi batas-batas wilayah negara dan menyangkut interaksi atau hubungan cukup luas dan intens dengan bangsa lain. Definisi lainnya adalah sebagai proses komunikasi yang berlangsung atau dilakukan antara komunikator yang mewakili suatu negara atau bangsa untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan negara atau masyarakat di negaranya kepada komunikan yang mewakili negara lain dengan tujuan untuk memberi tahu atau sebaliknya menanyakan (untuk mengetahui) sesuatu untuk mengarahkan (mempengaruhi) orang lain berbuat sesuatu (Rudy, 2005: 125).

Menurut Shoelhi (2011: 16-17) komunikasi internasional memiliki beberapa fungsi: (1) mendinamisasikan hubungan internasional yang terjalin antara dua atau beberapa negara serta hubungan di berbagai bidang antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda negara dan kebangsaan; (2) menunjang upaya-upaya pencapaian tujuan hubungan internasional dengan memelihara iklim perdamaian, menghindari kesalahpahaman, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antarpenduduk, menghindari dan menyelesaikan terjadinya konflik, serta meningkatkan kerjasama internasional; (3) mendukung pelaksanaan politik luar negeri bagi suatu negara dalam upaya memperjuangkan pencapaian kepentingan nasionalnya di negara lain atau di forum internasional.



Komunikasi internasional lebih banyak menekankan kajian pada realitas politik dengan fokus perhatian pada pesan yang bermuatan kebijakan dan kepentingan suatu negara dengan negara lain sebagai realitas politik yang terkait dengan masalah ekonomi, politik, pertahanan, dan lain-lain; dan lebih khusus lagi kajian strategi komunikasi internasional (Shoelhi, 2011: 4). Komunikasi internasional juga kerap dieksploitasi oleh negara-negara maju yang memiliki kepentingan politik untuk memperluas wilayah pengaruh politiknya dan atau untuk memenuhi kepentingan nasionalnya (Shoelhi, 2009: 28).

Menurut Hendratmo dan Oktavani (2009) kebijakan luar negeri suatu negara tidak luput dari adanya kepentingan nasional suatu negara. Tujuan dari kebijakan luar negeri itu sendiri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional. Tujuan tersebut memuat gambaran atas keadaan negara di masa mendatang dan kondisi masa depan yang diinginkan. Untuk mencapai kepentingan nasional tersebut, salah satunya menggunakan kebijakan diplomasi virtual.

Diplomasi virtual telah terbukti dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri sebuah negara. Dalam perkembangannya, dunia virtual bahkan dimanfaatkan secara maksimal oleh negara dalam rangka memperlancar aktivitas diplomasi yang tengah dilakukannya (Shoelhi, 2011: 165-166). Diplomasi virtual ini dalam arti luas menggambarkan suatu pengintegrasian dari teknologi komunikasi dan informasi, terutama media satelit seperti internet, dalam rangka tercapainya kepentingan terutama pada proses praktek diplomasi di berbagai tingkatan. Dalam arti sempit, diplomasi virtual merupakan penggunaan ataupun pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, terutama media satelit seperti internet, dan menjalankan fungsi dari diplomasi itu sendiri yaitu, presentasi, informasi, negosiasi, dan komunikasi (Hendratmo dan Oktavani, 2009).

Saat komunikasi internasional gagal mencapai tujuan, maka potensi perang dunia virtual juga akan semakin besar. Perang nyata yang selalu menimbulkan korban jiwa semakin dihindari pasca Perang Dunia II. Perang *cyber* menjadi alternatif untuk menunjukkan kekuatan sumber daya suatu negara, terutama pertahanan dan penguasaan teknologi informasi. Beberapa negara yang memiliki potensi perang tinggi seperti Amerika Serikat, Rusia, Israel, China, Korea Utara, Iran dan sebagainya memiliki ribuan serdadu *cyber* dan komando khusus



pasukan *cyber*. Sasaran serangan *cyber* umumnya adalah infrastruktur penting di suatu negara seperti pembangkit listrik, telekomunikasi, transportasi, pertahanan, perbankan, dan sarana negara lainnya yang dapat melumpuhkan suatu negara.

Pentingnya keamanan sistem internet juga diingatkan Salahuddin (2011:8) dalam “Tren Keamanan Internet Indonesia 2011” yang diterbitkan *Indonesia Security Incident Response Team On Internet Infrastructure (ID-SIRTII)*. Dalam paparan tentang Proyeksi 201 disebutkan bahwa *targetted attack* yang diduga dipicu oleh kepentingan politik dan ekonomi serta aktivitas intelejen atau spionase industri di tengah situasi krisis ekonomi dunia akan meningkat dalam bentuk praktek pencurian data dan kebocoran informasi terkait infrastruktur strategis milik negara. Menjadi sangat penting bagi suatu negara untuk meningkatkan upaya pengamanan informasi yang dimilikinya dan menyusun serta menerapkan berbagai regulasi terkait ketahanan informasi. Kegagalan upaya ini dapat mengakibatkan dikuasainya sumber daya milik negara oleh pihak lain dan turunnya daya saing serta tidak tercapainya kepentingan nasional di dalam pergaulan internasional.

### **Cyber: Matra Kelima Pertahanan Negara**

*“If you have a few smart people and a good computer, then you can do a lot. You don’t need an aircraft, you don’t need tanks, you don’t need an army. You can penetrate another country, create huge damage without even leaving your armchair.”* Alon Ben David, military analyst for Israel’s Channel 10 (Al Jazeera, 19/2/2012).

Melihat kekuatan dan ancaman yang dapat terjadi akibat kemajuan teknologi informasi, banyak negara mulai membangun kekuatan angkatan perang di dunia *cyber*. Perang *cyber* saat ini bukan lagi sekadar game virtual dan cerita fiksi, tapi sudah menjadi bagian dari percaturan dunia. Al Jazeera (19/2/2012) menyebutnya sebagai “*fifth dimension of warfare*” selain darat, laut, udara, dan ruang angkasa. Alasannya, inovasi teknologi sedang mengubah taktik perang modern, mengubah dunia *cyber* menjadi garis depan pertempuran.

*Cyberspace* sebagai matra perang kelima cukup beralasan, sebab semua negara pasti ingin meningkatkan kemampuan untuk mengamankan diri dari serangan musuh. Kydd dalam Emilia (2009) berpendapat pengetahuan tentang sifat anarki politik internasional

membuat setiap negara menjadi sangat terobsesi dengan kemampuan untuk mengamankan dirinya, yang melahirkan dilema keamanan, di mana suatu negara merasa harus menaikkan terus tingkat keamanannya karena melihat negara lain meningkat kemampuannya untuk mengamankan.

Menurut Araf (2011: 88) berubahnya strategi dan sistem keamanan sebuah negara merupakan sesuatu hal yang niscaya terjadi. Strategi dan sistem keamanan bukanlah sesuatu hal yang statis melainkan bersifat dinamis dimana perubahan sistem keamanan sangat di pengaruhi dari dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang dan terus berubah.

Aspek pertahanan juga harus memperhatikan teknologi bidang pertahanan atau militer. Perkembangan teknologi pertahanan tidak hanya memberi kekuatan yang lebih besar, melainkan yang paling penting adalah mengubah cara berperang dan bertahan, yang berarti pula membentuk sebuah strategi pertahanan. Negara-negara dengan teknologi tinggi cenderung mengembangkan kekuatan yang *mobile* dengan *man power* yang lebih efisien. Postur pertahanan juga menjadi lebih ramping dan berorientasi penangkalan ke luar. Strategi pertahanan cenderung bersifat *denial* dan preventif dengan memukul kekuatan musuh potensial di luar wilayah. Dengan perkembangan teknologi banyak negara mengubah strategi pertahanan ke arah *capability-based* atau *scenario-based defense strategy*. Pendekatan ini memberi keleluasaan dan mampu menghadapi masa depan. Strategi yang hanya didasarkan pada ancaman saat ini akan selalu ketinggalan dan tidak cukup waktu untuk melakukan perubahan atau penyesuaian tanpa risiko (Prasetyono, 2008).

Menurut Widodo (2011) kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini akan menjadi landasan penting bagi pengembangan doktrin militer di masa mendatang. Dengan demikian teknologi informasi dan komunikasi akan sangat mempengaruhi perubahan strategi militer. *Pertama*, dari sisi komando atas, teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu menyediakan informasi potensial lebih cepat melalui rantai komando, dan pengendalian untuk mempercepat pengambilan keputusan di tingkat komando atas. *Kedua*, teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan pasukan mendapatkan informasi pada waktu dan tempat yang tepat sehingga tidak akan ada lagi keragu-raguan tindakan di lapangan.

Toffler dalam Nugroho (2009) mengatakan bahwa kekuatan dan kemampuan negara di era informasi berasal dari tiga hal, yaitu kemampuan memengaruhi serta menekan negara lain (*power* atau *politics*) yang antara lain melalui penggunaan kekuatan angkatan bersenjata (*militer*); *wealth* (ekonomi); dan *knowledge* (ilmu pengetahuan dan teknologi). Saat ini menurut Adian (2011: 12) perang sudah memasuki fase baru yang biasa disebut generasi keempat (*fourth generation warfare*). Generasi pertama perang modern didominasi oleh tenaga manusia (*manpower*) dalam skala masif dan mencapai puncaknya pada perang Napoleon. Generasi kedua didominasi oleh persenjataan (*firepower*) dan berakhir pada perang dunia pertama. Generasi ketiga didominasi oleh manuver, siasat, dan taktik. Generasi keempat adalah bentuk perang baru yang berhadapan dengan fenomena insurgensi yang memanfaatkan kekuatan ekonomi, politik, sosial, dan militer untuk melemahkan legitimasi moral musuh.

Deputi Menteri Pertahanan AS William J. Lynn (2010) menyatakan bahwa Pentagon telah secara resmi mengakui dunia maya sebagai domain baru dalam perang. Domain tersebut sama pentingnya dengan darat, laut, udara, dan ruang angkasa dan dioperasikan secara doktrinal militer. Sebab skala ancaman *cyberwarfare* untuk keamanan nasional dan ekonomi AS sangat jelas terlihat, sehingga Pentagon membangun pertahanan berlapis dan kuat di sekitar jaringan militer dan meresmikan *U.S. Cyber Command* untuk mengintegrasikan operasi *cyberdefense* di militer.

Departemen Rahasia Musuh Korea Utara memiliki angkatan *cyber* yang mengkhususkan diri pada peperangan informasi lewat internet bernama Unit 204. Kekuatannya sekitar 100 *hacker*. Departemen Investigasi Pusat Partai juga memiliki satuan *cyber* lebih kecil tapi efektif bernama Unit 35. Di antara unit-unit tadi, Korut juga punya sebuah unit perang *cyber* gabungan yang terbesar dan terbaik, Unit 121. Unit itu bermarkas di wilayah Moonshin-dong dekat Sungai Taedong Pyongyang dan dibawah langsung oleh Biro Umum Pengintaian agen mata-mata Korut. Awalnya, unit ini diperkuat sekitar 600 *hacker*. Rekrutmen besar-besaran pun dilakukan, dan kini anggota skuadnya menjadi 3.000 orang. Mereka terlatih menyabot jaringan komando, kontrol, dan komunikasi militer musuh (Vivanews.com, 5/8/2011).

Menurut Richard A. Clarke dan Robert Knake penulis buku *Cyber War: The Next Threat to National Security and What to Do About It* (2010)

yang dikutip Vivanews.com (18/11/2011) kekuatan angkatan perang *cyber* ditentukan oleh kemampuan penyerangan, pertahanan, serta ketergantungan suatu negara terhadap internet. Dalam buku tersebut para pakar komputer asal AS itu memetakan kekuatan negara-negara dalam menghadapi perang *cyber*. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.2. Kekuatan Angkatan Perang *Cyber* Dunia**

No	Negara	Kemampuan Penyerangan (Skor 1-10)	Pertahanan (Skor 1-10)	Ketergantungan Internet (Skor 1-10)	Total Skor
1	Amerika Serikat	8	1	2	11
2	Rusia	7	4	5	16
3	China	5	6	4	15
4	Iran	4	3	5	12
5	Korea Utara	2	7	9	18

Sumber: Clarke dan Knake dalam buku *Cyber War: The Next Threat to National Security and What to Do About It* (2010), dikutip Vivanews.com (18/11/2011).

Berdasarkan tabel 1, dapat dijelaskan bahwa meski AS memiliki kemampuan penyerangan yang cukup baik tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memutus jaringan internet saat diserang, mengingat jaringan internet di negara itu dimiliki dan dioperasikan oleh swasta. Dibanding AS, China memiliki skor terbaik dalam hal pertahanan, sebab China memiliki kemampuan memutus seluruh jaringan internet negaranya bila suatu saat diserang. China juga mampu membatasi utilisasi trafik dengan memutus koneksi dari para pengguna yang tak terlalu berkepentingan. Korea Utara dapat memutus internetnya lebih mudah daripada China. Bisa dibilang negara ini tak memiliki kerugian akibat serangan *cyber* musuh, karena tak ada infrastruktur kritikal seperti listrik, jalur kereta, dan jalur pipa.

Salahuddien (2011b: 5) membenarkan bahwa kecenderungan saat ini dalam perang informasi terutama di Internet adalah untuk tujuan ekonomi, penguasaan sumber daya milik lawan secara tidak sah, persaingan, dan spionase industri. China dan Rusia adalah dua entitas yang dianggap memimpin serangan-serangan dengan motif ekonomi tidak sah tersebut ke seluruh dunia. Para pelaku konon mendapatkan dukungan tidak resmi dan terselubung atau difasilitasi secara tidak langsung oleh pemerintah. AS yang menjadi target utama sampai harus membentuk *Task Force* khusus untuk menanggulangi bahaya spionase

industri dan perang informasi dari China dan Rusia. Sudah banyak sekali terjadi kasus pembajakan, pencurian atau kebocoran data, dan informasi bisnis, sumber daya ekonomi strategis serta kekayaan intelektual jatuh ke pihak kriminal dan tersebar pada “*underground market*” yang kebanyakan memang telah dideteksi dijalankan dari pedalaman China dan Rusia.

Banyaknya negara yang mulai memperkuat basis pertahanan dan angkatan perang *cyber* memang cukup beralasan. Sebab berdasarkan data Internet World Stats per 31 Desember 2011 menunjukkan jumlah penduduk negeri *cyber* sudah mencapai 2.267.233.742 atau 32,7 % dari populasi penduduk dunia. Tabel 2 yang menunjukkan data terbaru populasi pengguna internet dunia.

**Tabel 1.3. World Internet Usage and Population Statistics  
(31 Desember 2011)**

World Regions	Population (2011 Est.)	Internet Users Dec.31, 2000	Internet Users Latest Data	Penetration (Population)	Growth 2000-2011	Users % of Table
Africa	1,037,524,058	4,514,400	139,875,242	13.5 %	2,988.4 %	6.2 %
Asia	3,879,740,877	114,304,000	1,016,799,076	26.2 %	789.6 %	44.8 %
Europe	816,426,346	105,096,093	500,723,686	61.3 %	376.4 %	22.1 %
M i d d l e East	216,258,843	3,284,800	77,020,995	35.6 %	2,244.8 %	3.4 %
N o r t h America	347,394,870	108,096,800	273,067,546	78.6 %	152.6 %	12.0 %
L a t i n America/Carib.	597,283,165	18,068,919	235,819,740	39.5 %	1,205.1 %	10.4 %
Oceania/Australia	35,426,995	7,620,480	23,927,457	67.5 %	214.0 %	1.1 %
<b>W O R L D TOTAL</b>	6,930,055,154	360,985,492	2,267,233,742	32.7 %	528.1 %	100 %

Sumber: <http://www.internetworldstats.com/stats.htm> (Diakses 24 April 2012)

Jumlah pengguna internet yang bermiliaran tersebut tentunya tidak semua penduduk *cyber* berperilaku baik. *Cyberspace* merupakan cermin dari realitas dunia nyata, sehingga di jagad *cyber* juga terdapat bermacam perilaku manusia dan perilaku negara. Berdasarkan data ID-SIRTII tahun 2011, rata-rata jumlah insiden per hari pada tahun 2010 mencapai 1,1 juta insiden dan aktivitas ini cenderung akan semakin meningkat. Terutama pada situasi geopolitik tertentu dan 50% diantara insiden tersebut tergolong *high priority alert*.

Banyak negara kini telah membangun inisiatif *National Cyber Security* yang bertugas untuk menyusun aturan dan kebijakan nasional menyangkut upaya pengamanan sumber daya informasi, perlindungan infrastruktur strategis, dan mengembangkan kemampuan respon serta koordinasi lintas sektoral. Tim respon insiden yang disebut dengan CERT (*Computer Emergency Response Team*) atau CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) serta sekaligus berfungsi sebagai CC (*Coordination Center*) untuk berkolaborasi dengan inisiatif sejenis di sektor lokal maupun regional dan dunia internasional. CC juga bertugas untuk konsolidasi semua potensi kekuatan pengamanan dan pertahanan di semua sektor strategis (Salahuddien, 2011: 7).

### **Indonesia dalam Perang Cyber**

Pengamatan penulis dari berbagai sumber di dunia nyata maupun dunia virtual, tidak banyak informasi yang dapat dijadikan referensi untuk mengukur kekuatan pertahanan *cyber* Indonesia. Menurut Salahuddien (2011: 7) Indonesia sudah mulai terlibat perang *cyber* sejak 1990-an lalu. Sebagai contoh antara Indonesia vs Malaysia, Indonesia vs Australia, Indonesia vs Timor Timur dan Portugal (pada tahun 1996 dan 1997 Indonesia menyerang sistem domain Pt milik Portugal sehingga terhapus dari Internet) pada periode acak yang bisa terjadi sepanjang tahun.

Krishnamurti (2009: 15) menyebutkan untuk kasus perang internet antara Indonesia-Malaysia konteksnya menunjukkan nasionalisme. Nasionalisme di internet umumnya merupakan bentuk pembelaan kepentingan bangsa. Perang *cyber* tersebut tidak dilancarkan di jaringan *World Wide Web*, serangan dilakukan ke situs *Web* musuh. Perang *cyber* jauh lebih anarkis karena tak ada kepemimpinan atau sanksi resmi-baik pemerintah Indonesia maupun Malaysia sepetinya sengaja memobilisasi warga negaranya untuk melakukan perang virtual.

Mengenai infrastruktur *cyber* Indonesia, Salahuddien (2011: 7) mengungkapkan bahwa saat ini di Indonesia juga semakin banyak infrastruktur strategis dan layanan publik yang telah semakin bergantung pada sistem informasi, teknologi, dan jaringan internet sehingga rentan terhadap ancaman, gangguan, dan serangan. Sistem transmisi dan distribusi energi (listrik, pertambangan, dan energi atau minyak dan gas), sistem pertahanan udara, sistem transportasi (darat, laut, udara)

yang bergantung dengan teknologi navigasi serta pengendalian yang kini juga berbasis internet, layanan publik pemerintahan, dan sipil termasuk bea cukai dan pajak, pemantauan dan pengendalian lalu lintas, hingga industri jasa dan layanan keuangan, perbankan (*e-banking, phone banking, mobile banking*). Potensi *chaos* akibat kegagalan sistem dan *fraud* sangat tinggi dan sejumlah kasus telah terjadi dengan kecenderungan peningkatan signifikan.

Polen, dan kawan-kawan pada tahun 2010 pernah melakukan riset keamanan internet menggunakan data milik perusahaan keamanan jaringan dan pendeteksi *malware*, Quarantainenet, dan dipublikasikan dengan judul *Finding and Analyzing Evil Cities on the Internet* (2011). Hasil risetnya selama sepekan tersebut, ternyata Indonesia diketahui sebagai salah satu negara dengan predikat penyebar kejahatan dunia maya. Misalnya untuk kota yang bertanggung jawab terhadap sebagian besar insiden keamanan, Jakarta berada di ranking 4 kota teratas sumber penyerangan dengan jumlah mutlak, seperti terdapat pada Tabel 3.

**Tabel 1.4. Kota yang Bertanggung Jawab atas Sebagian Besar Insiden Keamanan**

No	Kota	Ngr	Jlh Serangan	No	Kota	Ngr	Jlh Serangan
1	Seoul	(KP)	735	11	Guangzhou	(CN)	219
2	Taipei	(TW)	618	12	Shanghai	(CN)	210
3	Beijing	(CN)	563	13	Ho Chi Minh City	(VN)	179
4	Jakarta	(ID)	362	14	Kuala Lumpur	(MY)	177
5	Buenos Aires	(AR)	351	15	Bogota	(CO)	162
6	Bangkok	(TH)	308	16	Saint Petersburg	(RU)	160
7	Moscow	(RU)	268	17	Rio De Janeiro	(BR)	152
8	Hanoi	(VN)	267	18	Caracas	(VE)	143
9	Santiago	(CL)	246	19	Bucharest	(RO)	139
10	Sao Paulo	(BR)	229	20	Chelyabinsk	(RU)	129

Sumber: Polen, M. and Moreira Moura, G.C. and Pras, A. (2011:5)

Tabel 3 menjelaskan, meskipun sebagian besar infrastruktur Quarantainenet berada di Eropa tapi hanya satu kota di Eropa (Bucharest) yang termasuk dalam daftar 20 kota sumber kejahatan. Selain itu 9 dari kota penyerang terbesar berada di Asia dan 6 lainnya di Amerika Selatan, dan tidak ada satu pun dari Amerika Utara. Dalam daftar negara sebagai sumber serangan paling banyak, Indonesia masuk dalam posisi 9. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.



**Tabel 1.5. Daftar Negara dengan Jumlah Penyerang Terbanyak**

No	Negara	Jumlah Penyerang	No	Negara	Jumlah Penyerang
1	China	2532	11	France	772
2	Brazil	1943	12	Germany	746
3	United States	1815	13	Ukraine	658
4	Russia	1733	14	Vietnam	622
5	Italy	1690	15	Malaysia	590
6	Spain	955	16	Japan	577
7	Republic of Korea	936	17	Thailand	454
8	Argentina	907	18	United Kingdom	448
9	Indonesia	870	19	Romania	431
10	Taiwan	832	20	Poland	413

Sumber: Polen, M. and Moreira Moura, G.C. and Pras, A. (2011:8)

Melihat posisi Indonesia sebagai salah satu negara sumber penyerangan dunia maya, maka dapat diambil tesis bahwa kesiapan “pasukan” *cyber* Indonesia tidak kalah dari negara-negara maju. Statistik pengguna internet Indonesia berdasarkan data *Internet World Stats* (<http://www.internetworldstats.com/stats3.htm#asia>) per 31 Desember 2011 mencapai 55 juta pengguna atau 22,4% dari populasi penduduk. Masalahnya, peperangan dunia maya yang melibatkan Indonesia selama ini banyak dilakukan individu-individu atau kelompok “*underground*”. Data kekuatan komando *cyber* dengan doktrinasi militer yang menjadi bagian angkatan perang Indonesia belum penulis dapatkan. Sampai saat ini pasukan *cyber* terorganisir yang mengemuka masih unit *Cyber Crime* Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri.

Analisis dari Lemhanas RI Sarah dan Gultom (2012: 10) menyebutkan, secara teori pada prinsipnya hal tersebut sangat dimungkinkan, apabila melihat berbagai potensi, kapabilitas, dan infrastruktur komunikasi serta jaringan komputer internet yang dimiliki TNI saat ini. Berbagai potensi di bidang *Air Power, Territory, Maritime, ISR (Intelligence, Surveillance & Reconaissance)*, Komnika, Pernika, Infolakta serta potensi kemampuan sumber daya personil militer, dan pasukan tempur yang dimiliki TNI, merupakan modal dasar yang kuat dan cukup signifikan. Suatu saat siskodal seperti NCW juga dapat diimplementasikan dalam operasi militer gabungan TNI dalam rangka menghadapi *cyber warfare*.

Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) seperti dipublikasikan di Website Kementerian Pertahanan (7/3/2012) juga sudah meluncurkan



buku “Kajian Strategis Keamanan *Cyber* Nasional”. Menurut Ketua Tim Perumus sekaligus Kepala Pusat Data dan Informasi Unhan Laksma TNI Iwan Kustiyawan, maksud dari kajian tersebut membuat landasan pikir dalam rangka membantu pimpinan negara dalam menyusun kebijakan yang akan mendukung penerapan keamanan *cyber* secara nasional dalam kerangka pertahanan negara. Lingkup pembahasannya meliputi: *pertama*, definisi dan konsep dasar keamanan *cyber* beserta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan secara nasional. *Kedua*, identifikasi atas bentuk dan sumber ancaman serta serangan *cyber* yang dihadapi saat ini, dan pembahasan kebutuhan kerjasama internasional serta regulasi yang telah diterapkan. *Ketiga*, kerangka konseptual dan strategi penerapan keamanan *cyber* secara nasional. *Keempat*, peta alur kelembagaan dan rencana penerapan dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang sebagai *road map* penerapan keamanan *cyber* nasional.

Untuk merealisasikan pertahanan berbasis *cyber* di Indonesia menurut Sarah dan Gultom (2012: 11) perlu melakukan beberapa kegiatan, seperti melakukan riset bidang militer secara intensif dan komprehensif. Tentunya didukung dana riset yang mencukupi, untuk membuat suatu terobosan siskodal TNI berbasis NCW, yang didesain khusus untuk keperluan militer. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan operasi militer gabungan TNI, seluruh matra TNI beserta elemen dan komponen yang terkait dapat berintegrasi, berinteraksi serta berinteroperasi (*interoperability*) dalam satu kodal (*unity of command*) berbasis teknologi sistem informasi, seperti pada siskodal berbasis NCW.

Kemudian Widodo (2011: 5) berpendapat dengan kemajuan teknologi komunikasi yang semakin mutakhir, keterangan atau data intelijen yang sangat penting dalam operasi militer dapat diperoleh dari kesatuan sendiri atau dari badan lain di luar kesatuan militer. Konsep (K3) mengalami perubahan menjadi Komando, Kendali, Komunikasi dan Intelijen (K3I). Kemajuan teknologi komputer menyempurnakan konsep ini menjadi Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, dan Intelijen (K4I). Para analis militer menyempurnakan konsep ini menjadi Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Intelijen, Pengamatan, dan Pengintaian (K4IPP).

Pentingnya Indonesia memperkuat infrastruktur pertahanan militer berbasis *cyber* sangat beralasan. Hasil analisa data sistem *monitoring traffic* ID-SIRTII menunjukkan bahwa serangan ke infrastruktur

internet Indonesia sebagian besar disebabkan oleh kelemahan sistem dan aplikasi yang telah diketahui (*common vulnerability*). Penyebabnya adalah masih rendahnya kesadaran (*awareness*) para pengelola sistem dan pengguna aplikasi. Banyaknya penggunaan aplikasi tidak legal yang mengakibatkan tidak dilakukannya *update* atau *patch* untuk menutup kelemahan (Salahuddien, 2011: 3).

ID-SIRTII telah mengadakan *survey random sampling* tentang kesiapan sistem dan prosedur terhadap sejumlah perusahaan serta instansi pemerintah di berbagai sektor yang bisa dianggap strategis dan kritikal. Hasilnya, meskipun sebagian besar telah memiliki instrumen pengamanan namun banyak sekali kelemahan akibat sistem yang diterapkan secara parsial, pengabaian oleh manajemen, kelalaian, dan masih rendahnya sikap perilaku pengamanan sendiri (*self protection*). Semua ini mengakibatkan tingginya angka insiden yang tidak disadari oleh pemilik sistem (Salahuddien, 2011: 4).

Pada tahun 2010 lalu terjadi revolusi di bidang *malware* dengan munculnya virus Stuxnet dan Zeus yang keduanya merupakan jenis *tools* untuk tujuan *targetted attack* (diarahkan untuk tujuan serangan yang sangat spesifik). Stuxnet dirancang untuk melakukan sabotase dalam jangka panjang secara bertahap dan efek merusaknya tidak terdeteksi langsung. Mengakibatkan kekhawatiran yang meluas bahwa virus ini merupakan petunjuk penting bahwa sejumlah negara telah menciptakan senjata untuk kepentingan *cyber war* dan mereka telah mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan. Virus Zeus menunjukkan adanya revolusi di bidang pembuatan Trojan horse dimana virus ini mampu menyebar melalui banyak cara dengan teknik *drive by*, *phising* melalui interaksi *social network* dan *e-mail* sekaligus melakukan serangan lain berupa pencurian data (Salahuddien, 2011: 5).

Guna membangun sistem pertahanan nasional Nugroho (2009) menyarankan perlu beberapa kebijakan yang perlu diprioritaskan untuk pertahanan negara. *Pertama*, melakukan improvisasi strategi jangka panjang dan perencanaan sumber daya untuk kepentingan pertahanan, serta melakukan improvisasi pemilihan sistem persenjataan. Hal ini sudah dapat dilakukan, peningkatan stabilitas dalam hal program, dan pendanaan di sektor pertahanan pasti dapat tercapai. *Kedua*, perlunya regulasi untuk menciptakan kualitas yang lebih tinggi dan biaya rendah dari industri pertahanan yang ada saat ini. *Ketiga*, menempuh langkah

nyata dalam membangun industri pertahanan dalam negeri yang sehat dan responsif. *Keempat*, mengembangkan efisiensi dan efektivitas pembiayaan personil dan fasilitas pertahanan.

## **Simpulan**

Perang *cyber* saat ini sudah menjadi dimensi baru dalam perang modern. Beberapa negara sudah menjadikannya sebagai matra kelima angkatan perang, setelah darat, laut, udara, dan ruang angkasa. Buktinya semakin banyak negara yang membentuk komando pasukan *cyber* dengan doktrinasi militer dan perangkat teknologi mutakhir. Pasukan *cyber* tersebut terlatih mampu menghancurkan infrastruktur kritikal musuh bahkan instalasi nuklir yang notabene memiliki fasilitas keamanan tingkat tinggi.

Dalam konteks komunikasi internasional, keharmonisan hubungan antarnegara tidak menjamin terlepas dari bahaya laten pertempuran dunia maya. Secara eksplisit negara-negara menjalin hubungan diplomatik yang baik, namun di balik itu kadang terjadi perang *cyber*. Hal tersebut tidak banyak diketahui publik, karena tidak semua negara mau merilis terjadinya pertempuran dunia maya dengan berbagai alasan, salah satunya menghindari provokasi perang konvensional.

Penulis menyimpulkan ketika logika perang mengalami perubahan dari konvensional menuju perang *cyber*, maka TNI pun dituntut kesiapannya mengimplementasikan teknologi perang modern guna menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ditambah lagi saat ini semakin banyak infrastruktur kritikal Indonesia yang bergantung pada teknologi elektromagnetik dan teknologi informasi dan komunikasi. Infrastruktur komando pasukan *cyber* tidak disiapkan dari sekarang, maka dikhawatirkan Indonesia berada di posisi inferior dan tidak memiliki posisi tawar dalam percaturan dunia global masa mendatang.

## Daftar Pustaka

- Adian, D. G, 2011, *Ancaman Baru, Perang Non Konvensional*, Jurnal Pertahanan Edisi 1, Februari 2011, Dokumen [http://idu.ac.id/index.php?option=com\\_docman&task=cat\\_view&gid=78&Itemid=351&limitstart=5](http://idu.ac.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=78&Itemid=351&limitstart=5) (Diakses 10 April 2012).
- Al Jazeera, 19/2/2012, *Fighting in the Fifth Dimension*, Dokumen <http://www.aljazeera.com/programmes/aljazeeraworld/2011/10/2011101916939402528.html> (Diakses 24 April 2012).
- Araf, A, 2011, *Konsepsi dan Operasionalisasi Keamanan Nasional*, Jurnal Pertahanan Edisi 1, Februari 2011, Dokumen [http://idu.ac.id/index.php?option=com\\_docman&task=cat\\_view&gid=78&Itemid=351](http://idu.ac.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=78&Itemid=351)(Diakses 10 April 2012).
- Beidleman, S.W, 2009, *Defining and Deterring Cyber War, Strategy Research Project of U.S. Army War College, The Homeland Security Digital Library (HSDL)* <http://www.hsdl.org/?view&did=28659> (Diakses 8 Maret 2012).
- Emilia, R, 2009, *Pemahaman Baru Globalisasi: Tantangan Politik Abad ke-21*, Jurnal Global & Strategis, Tahun 3. Nomor 2, Juli-Desember 2009.
- Hendratmo, R. A. & Oktavani, N. S, 2009, *Penggunaan Diplomasi Virtual dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat (Studi Kasus: Invasi AS ke Irak di tahun 2003)*, Jurnal Mondial Vol. III No. 1, September 2009.
- Krishnamurti, I, 2009, *Virtual Embassies, Virtual War and Networked Nationalist: The Internet and Indonesian Nationalism*, Jurnal Verity, Volume 1. No. 1, Januari-Juni 2009.
- Kompas, 26/2/2012, *Putin dan Keseimbangan Dunia*: Hal. 10
- Lynn, W. J, 2010, *Defending a New Domain: The Pentagon's Cyberstrategy* Dokumen, <http://www.foreignaffairs.com/articles/66552/william-j-lynn-iii/defending-a-new-domain> (Diakses 24 April 2012).
- Nugroho, W, 2009, *Pertahanan Negara Dikaitkan dengan Kemampuan Negara*, Jurnal Verity: Volume 1, No. 1, Januari – Juni 2009.
- Polen, M. and Moreira Moura, G.C. and Pras, A, 2011, *Finding and Analyzing Evil Cities on the Internet*. In: Proceedings of the 5th International Conference on Autonomous Infrastructure, Management and Security (AIMS), 13-17 Jun 2011, Nancy, France. pp. 38-48. Springer

- Verlag. ISBN 978-3-642-21483-, Dokumen <http://eprints.eemcs.utwente.nl/20081/01/paper.pdf> (Diakses 10 April 2012).
- Prasetyono, E, 2008, *Strategi Pertahanan Indonesia di Masa Depan*, Jurnal Analisis CSIS, Vol. 37, No. 3 September 2008.
- Rudy, T. M, 2005, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Internasional*, Bandung: Refika Aditama.
- Salahuddien, M, 2011a, *Tren Keamanan Internet Indonesia 2011*, Indonesia Security Incident Response Team On Internet Infrastructure (ID-SIRTII), Dokumen <http://idsirtii.or.id/content/files/artikel/TREN%20KEAMANAN%20INTERNET%20INDONESIA%202011.pdf> (Diakses 10 April 2012).
- Salahuddien, M, 2011b, *Pertahanan Keamanan Informasi Nasional*, Indonesia Security Incident Response Team On Internet Infrastructure (ID-SIRTII), Dokumen <http://idsirtii.or.id/artikel/> (Diakses 24 April 2012).
- Sarah, K. dan Gultom, R. A. G, 2012, *Cyber Warfare (Sudah Siapakah Kita Menghadapinya?)*, Dokumen <http://www.lemhannas.go.id/portal/in/daftar-artikel/1556.html> (Diakses 26 April 2012).
- Shoelhi, M, 2009, *Komunikasi Internasional: Perspektif Jurnalistik*, Bandung: Simbiosis.
- Shoelhi, M, 2011, *Diplomasi: Praktik Komunikasi Internasional*, Bandung: Simbiosis.
- Tjarsono, I, 2003, *Redefinisi Kedaulatan Nasional dan Konsep Keamanan*, Jurnal Antar Bangsa, Vol. 1 No. 2. Juli 2003.
- USCS, 2006, *2006, Report to Congress of The U.S.-China Economic and Security Rreview Commission*, Dokumen [http://www.uscc.gov/annual\\_report/2006/annual\\_report\\_full\\_06.pdf](http://www.uscc.gov/annual_report/2006/annual_report_full_06.pdf) (Diakses 23 April 2012).
- USCS, 2010, *Report to Congress of The U.S.-China Economic and Security Rreview Commission*, Dokumen [http://www.uscc.gov/annual\\_report/2010/annual\\_report\\_full\\_10.pdf](http://www.uscc.gov/annual_report/2010/annual_report_full_10.pdf) (Diakses 23 April 2012).
- Vivanews.com, 5/8/2011, *Hikayat Serdadu Cyber Korut*, Dokumen <http://sorot.vivanews.com/news/read/238559-hikayat-serdadu-cyber-korea-utara> (Diakses 24 April 2012).
- Vivanews.com, 18/11/2011a, *Bahaya Perang Cyber*, Dokumen <http://>

sorot.vivanews.com/news/read/265594-bahaya-perang-cyber (Diakses 24 April 2012).

Vivanews.com, 18/11/2011b, *Medan Tempur Dunia Cyber*, Dokumen <http://sorot.vivanews.com/news/read/265595-infografik--medan-tempur-dunia-cyber> (Diakses 24 April 2012).

Vivanews.com, 18/11/2011c, *Barak Serdadu Cyber di Estonia*, Dokumen <http://sorot.vivanews.com/news/read/265596-barak-serdadu-cyber-di-estonia> (Diakses 24 April 2012).

Website Kementerian Pertahanan 7/3/2012, *Unhan Luncurkan Buku Kajian Strategis Keamanan Cyber Nasional*, Dokumen [http://www.dmc.kemhan.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=929%3Aunhan-luncurkan-buku-kajian-strategis-keamanan-cyber-nasional&Itemid=137](http://www.dmc.kemhan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=929%3Aunhan-luncurkan-buku-kajian-strategis-keamanan-cyber-nasional&Itemid=137) (Diakses 24 April 2012).

Westby, J. R, 2007, *Homeland Security v. Homeland Defense: Gaps Galore*. Paper for St. Mary's University School of Law, Center for Terrorism Law State Open Government Law and Practice in a Post-9/11 World: Legal and Policy Analysis November 15-16, 2007. Washington, DC: National Press Club, Dokumen <http://www.globalcyberrisk.com/pdfs/St%20Marys%20-%20Homeland%20Defense%20Gap%20Paper%20v5.pdf> (Diakses 23 April 2012).

Widodo, T, 2011, *Pengaruh Kebijakan Pemerintah di Bidang Pertahanan Dan Kemajuan Teknologi Informasi Terhadap ROE (Rules of Engagement) di Masa Damai*, Jurnal Pertahanan Edisi 1, Februari 2011, Dokumen [http://idu.ac.id/index.php?option=com\\_docman&task=cat\\_view&gid=78&Itemid=351](http://idu.ac.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=78&Itemid=351) (Diakses 10 April 2012).

# MEMBANGUN KETAHANAN BANGSA MELALUI KOMUNIKASI KEBANGSAAN

**Teguh Ratmanto**

## **Pendahuluan**

Dunia telah berubah secara radikal setelah runtuhnya “Tembok Berlin” pada November 1989 yang disusul dengan pembubaran Uni Soviet pada 8 Desember 1991 yang ditandai dengan penurunan Bendera Uni Soviet yang langsung diikuti dengan pengibaran bendera Rusia. Perubahan ini menandai berakhirnya era ideologi yang telah memisahkan dunia ke dalam dua blok besar, Barat yang dipimpin Amerika dan Timur yang dipimpin Uni Soviet. Secara teoritis telah diramalkan Daniel Bell, dalam *The End of Ideology*, sedangkan Francis Fukuyama, menyebutnya dengan era *The End of History*. Perubahan-perubahan besar itu sering disebut dengan istilah Globalisasi.

Bagi Indonesia, globalisasi kini telah nyata dan ia telah hadir selama beberapa dasawarsa yang ditandai oleh arus informasi yang bebas keluar masuk melalui majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, di samping itu, globalisasi juga mewujud dalam bentuk perdagangan bebas dimana Indonesia tidak dapat menghindarinya. Masuknya produk-produk dan budaya asing ini tentu menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia agar dapat bertahan dari serbuan budaya dan produk-produk asing. Setiap produk dan budaya asing yang masuk ini, disadari atau tidak, diharapkan ataupun tidak, tentu mengandung muatan-muatan kultural yang sedikit banyak tentu akan membawa dampak bagi bangsa Indonesia. Tidak semua nilai-nilai budaya asing yang masuk itu tidak sesuai dengan budaya bangsa, pada kenyataannya tidak sedikit nilai-nilai budaya asing inilah yang secara tidak langsung dapat mengikis ketahanan budaya bangsa. Di sisi lain Era Globalisasi ini juga memiliki dampak positif yang berupa keterbukaan terhadap nilai-nilai baru.



Era globalisasi ini telah membawa akibat hilangnya batas-batas negara atau *borderless world* (Kenichi Ohmae). Kondisi ini menjadikan suatu negara tidak mungkin mengisolir diri dari pengaruh dunia luar sehingga sikap yang terbaik adalah dengan menghadapi dan mengatasinya, karena di dalamnya terdapat peluang dan juga sekaligus ancaman. Pada akhir era ideologi ini, Samuel Huntington, dengan teori *clash of civilization*, menyebutkan bahwa budayalah yang menjadi sumber konflik. Tesis Huntington ini tidak terlalu tepat karena pada kenyataannya kepentingan-kepentingan ekonomilah yang tampaknya lebih mengemuka, terlebih lagi setelah dunia dihantam oleh badai krisis ekonomi yang sampai sekarang masing berlangsung. Masing-masing Negara berusaha untuk menyelamatkan ekonominya masing-masing.

Perubahan-perubahan radikal ini telah memunculkan tantangan bagi doktrin pertahanan Tentara Nasional Indonesia karena potensi gangguan pertahanan dan keamanan yang mungkin terjadi tidak hanya bersifat fisik semata, tetapi juga ideologis dan bahkan fiskal. Faktor selain tantangan dari luar, tantangan dari dalam pun kini mulai muncul, seperti kekuatan Islam radikal yang mulai mengarahkan serangannya kepada kepentingan pemerintah dan Negara Indonesia. Perang ideologi ini akan memerlukan reposisi peran TNI sebagai kekuatan utama pertahanan Negara. Hal ini dilandasi karena sifat perang modern yg bersifat ideologis ini bersifat *subtle* dan tidak kasat mata. Kondisi sekarang ini menuntut perlunya perubahan doktrin TNI dengan meninjau kembali doktrin *Sishankamarata* dengan pendekatan yang baru yang melibatkan segenap komponen bangsa untuk berperan aktif sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Hal ini menjadi sangat penting, terutama dalam tindakan pencegahan (*pre-emptive*). Hal ini disebabkan karena sifat dan karakteristik tantangan yang ada sekarang, yang tidak mungkin masalah kemanan ini dapat diatasi hanya oleh TNI saja. Pendekatan terhadap masalah pertahanan dan keamanan nasional tidak lagi dapat didekati melalui *state-centric security paradigm* atau *traditional-security paradigm* yang lebih mengedepankan aspek kemanan sehingga cenderung melupakan aspek hak asasi manusia yang pada akhirnya sering memunculkan *state-violence* -kekerasan atas nama negara-. Disisi lain, tampaknya pemerintah harus mulai mempertimbangkan pendekatan *human-security paradigm* yang memberikan tempat bagi nilai-nilai kemanusiaan di dalam melakukan pendekatan terhadap masalah



pertahanan dan keamanan. Terlebih lagi bila kita mengingat pemikiran Benedict Anderson (2002) yang meyakini bahwa bangsa hanyalah sebuah komunitas yang dibayangkan dimana ikatan-ikatan kebangsaannya mungkin sangat rapuh. Tampaknya disini kita memerlukan suatu sistem komunikasi kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Nusantara untuk menyadarkan dan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam satu sistem komunikasi nasional yang bersifat suka rela dan terbuka dengan asas integral dan komprehensif. Dilandasi karena ancaman terhadap keamanan nasional dan kedaulatan bangsa sekarang ini tidak hanya terbatas pada ancaman militer semata, tetapi lebih kompleks yang mencakup bidang ancaman di bidang ekonomi, politik, dan budaya. Komunikasi kebangsaan yang diharapkan adalah bentuk komunikasi yang bersifat dinamis, mandiri, dan berwibawa.

Masalah komunikasi kebangsaan di Indonesia dapat dirumuskan sebagai proses komunikasi yang berusaha untuk memelihara nilai kebangsaan yang bersumber dari kesadaran kesejarahan sebagai basis bagi negara kesatuan RI.

## **Pembahasan**

Konsep negara-bangsa atau *nation-state* yang sekarang ini mendominasi tatanan global kontemporer dapat dilacak jauh ke dalam sejarah politik di Eropa. Menurut Opello dan Rosow (2004) kemunculan negara-bangsa dimulai setelah berakhirnya Perang Tiga Puluh Tahun (1618-1648) di Eropa yang dilatarbelakangi oleh konflik antara penguasa politik lokal dengan otoritas gereja. Konflik ini berakibat pada melemahnya kerajaan Romawi. Perang ini berakhir melalui Perjanjian Westphalia (1648). Hasil dari Perjanjian Westphalia ini adalah pengakuan terhadap kedaulatan (*sovereignty*) bentuk-bentuk penguasa politik lokal seperti monarki, kepangeranan, kebaronan, dan lain-lain sebagai penguasa teritorial politik independen. Sejak saat itu konsep kedaulatan menjadi prinsip utama dalam pembentukan sistem negara modern.

Sistem negara-bangsa yang berdasarkan kedaulatan ini kemudian tersebar ke berbagai penjuru bumi dan mencapai puncaknya seiring dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Berakhirnya Perang Dunia Kedua telah memunculkan negara-negara baru, baik di Asia maupun Afrika, dimana ide Negara-bangsa ini bertemu dengan prinsip *self-determination*. Negara-negara baru di Asia dan Afrika yang baru lepas

dari kolonialisme ini untuk hak untuk menentukan nasib dan masa depannya sendiri.

Sejarah Negara-bangsa Indonesia juga demikian halnya. Kebangsaan dapat dilihat sebagai rasa senasib yang bertolak dari kesadaran kesejarahan. Kebangsaan Indonesia adalah respon penduduk yang berada dalam wilayah Hindia Belanda terhadap penjajahan asing. Tanpa penjajahan asing yang berasal dari Barat, penduduk di wilayah ini hanyalah kumpulan komunitas yang memiliki kesadaran primordial etnisitas. Sulit membayangkan bahwa mitos kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sebagai suatu empirium di Nusantara dapat dijadikan dasar kenyataan adanya nilai kebangsaan Indonesia atau Nusantara (Siregar, 1995).

Dalam sejarahnya, setelah memperoleh kemerdekaan, bangsa ini beberapa kali harus menghadapi berbagai gerakan separatisme dan pemberontakan yang terkait dengan masalah *nation-building*. Kita mengenal separatisme lokal Hizbullah pada periode awal kemerdekaan, gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada periode 1950-an, serta Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan Republik Maluku Selatan (RMS), namun pada periode Orde Baru muncul berbagai oposisi yang mengambil bentuk penarikan diri dan pemisahan, seperti di provinsi Aceh, Irian Jaya, dan –setelah 1975– Timor Timur. Kasus-kasus tersebut diatas menggambarkan lunturnya kesadaran akan kesatuan identitas yang tampak pada sikap-sikap egois untuk mencari keuntungan sendiri, hilangnya imaji akan batas wilayah teritorial nasional yang terlihat pada meningkatnya semangat kedaerahan atau primordial atau kesukuan, surutnya semangat persaudaraan yang terlihat dalam konflik sosial berdasar sentimen agama-golongan sosial-etnik, dan lain-lain. Konflik-konflik ini dapat memarginalkan cita rasa persaudaraan dan kesadaran sebagai sebuah tubuh atau komunitas yang disebut nasion. Lunturnya semangat nasionalisme, bukan terjadi dengan sendirinya karena penjajah telah pergi, tetapi justru diproduksi penguasa yang mempunyai akses ke kebijakan publik. Hal ini disebabkan berbagai kebijakan represif Orde Baru, yang berhasil mencegah artikulasi terbuka berbagai agenda politik. Satu hal yang menarik adalah meskipun kita sudah memasuki era Reformasi yang ditandai oleh adanya kebebasan informasi, konflik-konflik sosial yang bernuansa SARA masih kerap terdengar, seperti kasus Ambon, Poso, dan kasus-kasus lainnya sehingga memerlukan munculnya Undang-undang Penanganan Konflik Sosial.

Studi antropologis Benedict Anderson tentang lahirnya *nation* (*imagined community*) di Indonesia menunjukkan bahwa konsep bangsa Indonesia lahir sebagai produk dan strategi sosial-budaya-politik guna menghadapi penjajah Belanda. Bangsa Indonesia tak pernah lahir dengan sendirinya atau secara natural, tetapi ia dilahirkan sebagai suatu strategi sosial-budaya-politik yang terwujud dalam tiap tindakan dan keputusan sosial-budaya-politik dari elit-elit yang punya akses kepada kebijakan publik, kekuasaan, dan pengaruh. Menurut Anderson, bangsa atau *nation* adalah, “komunitas politis dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan (Anderson, 2002: 8). Anderson menjelaskan bahwa, “bangsa adalah sesuatu yang terbayang karena para anggota bangsa terkecil sekalipun tidak bakal tahu dan takkan kenal sebagian besar anggota lain, tidak akan bertatap muka dengan mereka itu, bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar tentang mereka. Di benak setiap orang yang menjadi anggota bangsa itu hidup sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka” (Anderson, 2002: 8).

Sifatnya yang imajiner ini, maka komunikasi menjadi alat yang sangat penting dalam membangun rasa kebersamaan berbangsa dan bernegara. Komunikasi dapat dianggap sebagai suatu proses dialektik dalam pembentukan suatu kesadaran berbangsa dan bernegara, tetapi, komunikasi juga dapat menjadi alat penghancur bagi kesadaran berbangsa ini. Komunikasi tidak hanya menjadi sarana untuk pertukaran informasi, tetapi komunikasi telah menjadi alat untuk “*the creation of a shareable life-world*” (Dissanayake dalam Aphornsuvan, 2012). Komunikasi selalu melibatkan masalah nilai dan pemahaman manusia. Aphornsuvan (2012), dengan mengutip Habermas yang menyarankan bahwa, “*that through communicational activity, which is a venue for human interaction aiming at political and ethical goals, individuals as social subjects are able to emancipate themselves*”.

Pada masyarakat informasi ini peran komunikasi dapat disederhanakan menjadi, yaitu dominasi dan pembebasan. Dominasi adalah peran komunikasi dalam menciptakan dan melanggengkan penguasaan satu kelompok atas kelompok lainnya, sedangkan peran pembebasan adalah peran komunikasi dalam menciptakan ruang publik yang memberikan akses dan kesempatan kepada setiap individu untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Komunikasi adalah proses interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya dimana negara

merupakan salah satunya, oleh karena itu, proses komunikasi yang terjadi akan sangat dipengaruhi sifat dan karakteristik Negara. Kekuatan lain yang dapat mengganggu proses komunikasi adalah pasar.

“Privatisasi terhadap lembaga komunikasi di berbagai negara, utamanya di sebagian negara demokrasi liberal telah menjadi diskursus yang menarik karena dampak yang ditimbulkannya pada semakin terdistorsinya institusi komunikasi sebagai “*public sphere*”. Untuk kasus Indonesia dengan struktur masyarakat yang memperlihatkan ketimpangan yang tajam antara elit dan massa, privatisasi media komunikasi kiranya akan semakin menambah ketimpangan sosial yang ada”. (Putra, 2004: 135-136)

Komunikasi muncul dan berkembang dengan bantuan teknologi, maka pada gilirannya nanti ia akan diatur oleh negara dan kekuatan pasar dimana peran keduanya sangat penting. Pengaturan komunikasi tidak boleh hanya diserahkan kepada negara dan pasar semata, khalayak atau publik harus dilibatkan di dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan komunikasi. Terlebih lagi dalam situasi konflik, dimana peran komunikasi menjadi sangat vital. Komunikasi dapat menurunkan eskalasi konflik dengan menyebarkan informasi yang membawa kedamaian, tetapi sebaliknya bila tidak dikelola dengan benar, komunikasi bahkan dapat meningkatkan suhu konflik karena tersebarnya rasa tidak percaya di kalangan khalayak. Pengelolaan komunikasi tampaknya menjadi sarana yang penting dalam pengelolaan konflik.

“Dalam tiap tahapan dinamika konflik; mulai dari konflik yang masih bersifat potensial ... hingga muncul ke permukaan menjadi konflik terbuka ... komunikasi perang memainkan peran meningkatkan eskalasi konflik. Sebaliknya, ketika krisis berlalu, konflik menurun ... komunikasi damai bias menurunkan konflik. Dalam tiap tahapan itu, komunikasi bias memberbesar atau sebaliknya menurunkan eskalasi konflik”. (Trijono, 2002: 126-127)

Lebih lanjut,(Trijono,2002: 127) menyebutkan bahwa,

“Bagaimana komunikasi memainkan peran ganda ini sangat tergantung pada setidaknya tiga faktor utama: (1) bagaimana informasi tentang konflik tersedia; (2) bagaimana informasi itu disirkulasikan atau disebarluaskan dalam masyarakat; dan yang terakhir; (3) bagaimana informasi yang tersedia itu dipersepsi, dimaknai, dan digunakan oleh pihak-pihak berkonflik untuk tujuan dan kepentingan mereka”.

Permasalahan internal yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia, kita juga harus menghadapi permasalahan eksternal yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Sekarang ini telah terjadi pergeseran dan perubahan besar di dunia. Runtuhnya Tembok Berlin yang disusulnya dengan runtuhnya Uni Soviet, telah menandai berakhirnya era Perang Dingin yang menurut Fukuyama, dalam *The End of Ideology and The Last Man* (1992) telah menandai kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal. Kapitalisme dan Demokrasi Liberal terus menyebar ke seluruh dunia dan menyatukan seluruh dunia dalam dunia yang tak berbatas, seperti yang ditawarkan Kenichi Ohmae, dalam *The Borderless World* (2004). Kesemua perubahan besar itu telah menjadi satu arus besar globalisasi yang mencakup semua aspek kehidupan, dari ekonomi, politik, hingga budaya, dimana teknologi komunikasi dan informasi telah menjadi penggerak utamanya. Kekhawatiran utama terhadap globalisasi ini bagi negara-negara Dunia Ketiga seperti yang disampaikan oleh Hamelink, adalah, "*from the viewpoint of many Third World countries, the central issue is increasingly the threat to their cultural autonomy*" (Hamelink, 1983: 22) dimana otonomi budaya ini adalah, "*...the ability of people to respond according to their own best intuitions...*" (Hamelink, 1983: 22). Bahaya yang terbesar adalah adanya penyeragaman budaya (*cultural synchronization*) yang diartikan, "*... that the decisions regarding the cultural development in a given country are made in accordance the interests and needs of a powerful central nation and imposed with subtle but devastating effectiveness without regard for the adaptive necessities of the dependent nation*" (Hamelink, 1983: 22). Hamelink meyakini bahwa,

*"The awareness that transnational cultural synchronization is an instrument for securing metropolis-satellite relations was clearly brought to the fore in 1973 during a conference in Algiers on non-aligned countries: It is an established fact that the activity of imperialism is not limited to economic and political domains, but that it encompasses social and cultural areas as well, imposing thereby a foreign ideological domination on the peoples of the developing worlds".* (Hamelink, 1983: 26)

Mengatasi penyeragaman budaya ini, Gerakan Non Blok mengadakan Konferensi Menteri-Menteri Informasi Negara-Negara Non-Blok (Komminok) yang dilangsungkan pada tahun 1984 berhasil mengeluarkan *Deklarasi Jakarta*, yang intinya adalah rencana kerja dalam kerjasama media untuk mendukung Tata Informasi Dunia Baru, tetapi gemanya hingga sekarang ini semakin tidak terdengar.

Satu hal yang harus dipertimbangkan dengan hilangnya batas-batas negara yang selama ini kita pegang dan kita jaga, adalah semakin menguatnya keyakinan bahwa negara adalah hanya sebuah komunitas imajiner. Batas-batas negara yang pada awalnya hanya merupakan sebuah *soft-reality*, yaitu realitas yang hanya ada dalam pikiran; kini batas-batas imajiner itu pun semakin menghilang dimana pada akhirnya hal ini dapat berujung kepada menurunnya rasa memiliki masyarakat terhadap bangsa dan tanah airnya.

Kondisi yang seperti sekarang ini dimana ancaman bagi keutuhan berbangsa dan bernegara tidak lagi hanya berasal dari faktor-faktor internal, tetapi juga melibatkan faktor-faktor eksternal, maka perlu perubahan pada penanganan masalah keamanan dari *tradisional security approach* ke *human security approach*. Hal ini disebabkan karena telah terjadi perubahan dan pergeseran tantangan keamanan nasional. Pendekatan *tradisional security approach* yang selama ini dilakukan, terutama pada masa Orde Baru, meskipun telah memberikan stabilitas, tetapi ongkos sosialnya terlalu mahal. Paradigma baru penanganan masalah keamanan adalah *human-security approach*. Bagi Bangsa Indonesia sekarang ini, tampaknya pendekatan ini lebih menjanjikan dibandingkan *traditional-security approach*, di samping itu, *human-security approach* memerlukan keterlibatan seluruh komponen bangsa.

**Tabel 1.6. Bidang Kajian Kemanan menurut Roland Paris**

		What is the Source of the Security Threat?	
		Military	Military, Non-military, or Both
Security for Whom?	States	National security (conventional realist approach to security studies)	Redefined security (e.g., environmental and economic [cooperative or comprehensive] security)
	Societies, Groups, and Individuals	Intrastate security (e.g., civil war, ethnic conflict, and democide)	Human security (e.g., environmental and economic threats to the survival of societies, groups, and individuals)

**Tabel 1.7. Perbandingan antara Paradigma *Traditional Security* dan *Human Security***

	<b>Traditional Security</b>	<b>Human Security</b>
Referent	Traditional security policies are designed to promote demands ascribed to the state. Other interests are subordinated to those of the state. Traditional security protects a state's boundaries, people, institutions and values.	Human security is people-centered. Its focus shifts to protecting individuals. The important dimensions are to entail the well-being of individuals and respond to ordinary people's needs in dealing with sources of threats.
Scope	Traditional security seeks to defend states from external aggression. <i>Walter Lippmann</i> explained that state security is about a state's ability to deter or defeat an attack. It makes uses of deterrence strategies to maintain the integrity of the state and protect the territory from external threats.	In addition to protecting the state from external aggression, human security would expand the scope of protection to include a broader range of threats, including environmental pollution, infectious diseases, and economic deprivation.
Actor(s)	The state is the sole actor, to ensure its own survival. Decision making power is centralized in the government, and the execution of strategies rarely involves the public. Traditional security assumes that a sovereign state is operating in an anarchical international environment, in which there is no world governing body to enforce international rules of conduct.	The realization of human security involves not only governments, but a broader participation of different actors, viz. regional and international organizations, non-governmental organizations and local communities.
Means	Traditional security relies upon building up national power and military defense. The common forms it takes are armament races, alliances, strategic boundaries etc.	Human security not only protects, but also empowers people and societies as a means of security. People contribute by identifying and implementing solutions to insecurity.

Sumber: Wikipedia



**Tabel 1.8. Komponen-Komponen *Human Security* Berdasarkan Laporan *Human Development* 1994 UNDP**

Type of security	Definition	Threats
Economic security	An assured basic income	Poverty, unemployment, indebtedness, lack of income
Food security	Physical and economic access to basic food	Hunger, famines and the lack of physical and economic access to basic food
Health security	Protection from diseases and unhealthy lifestyles	Inadequate health care, new and recurrent diseases including epidemics and pandemics, poor nutrition and unsafe environment, unsafe lifestyles
Environmental security	Healthy physical environment	Environmental degradation, natural disasters, pollution and resource depletion
Personal security	Security from physical violence	From the state (torture), other states (war), groups of people (ethnic tension), individuals or gangs (crime), industrial, workplace or traffic accidents
Community security	Safe membership in a group	From the group (oppressive practices), between groups (ethnic violence), from dominant groups (e.g. indigenous people vulnerability)
Political security	Living in a society that honors basic human rights	Political or state repression, including torture, disappearance, human rights violations, detention and imprisonment

Sumber: Wikipedia

Pendekatan *human-security* dapat terselenggara, maka perlu adanya *social trust*, baik diantara anggota masyarakat dan antara masyarakat dan pemerintah. Pendekatan *human-security* harus dilandasi oleh suatu



sistem komunikasi yang terbuka dan berlandaskan *social trust* dan *social capital* yang didefinisikan sebagai “kemampuan orang untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama di dalam kelompok atau organisasi” (Fukuyama, 2002: 10). Fukuyama membagi *social capital* menjadi dua bidang, yaitu *familistic association* yang mengutamakan garis kekeluargaan dan *voluntary association* yang tidak terlalu mementingkan garis kekeluargaan. Negara atau masyarakat budaya yang memiliki *voluntary association* yang banyak akan dikategorikan sebagai negara atau masyarakat *high-trust* yang memiliki potensi untuk maju dan berkembang. Pada masyarakat yang menjalankan konsep seperti inilah muncul rasa percaya terhadap orang lain yang tidak didasari oleh pertimbangan kekeluargaan sehingga dalam iklim yang seperti itu dapat tumbuh pula suatu sistem komunikasi yang bebas yang pada gilirannya nanti dapat dikaitkan dengan ketersediaan ruang *public*, yaitu suatu sistem komunikasi yang bebas, baik *bebas untuk* maupun *bebas dari*.

Ruang publik secara prinsip terbuka bagi semua orang. Ruang publik merupakan sebuah tempat untuk debat dan berargumen secara bebas dan demokratis yang memediasi antara masyarakat sipil dengan negara di mana publik mengorganisir dirinya untuk membentuk sebuah pendapat umum untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan publik. Dalam ruang publik, individu dapat mengembangkan dirinya sendiri dan terlibat dalam debat tentang arah dan tujuan masyarakat. Ruang publik merupakan domain kehidupan sosial di mana pendapat publik dapat dibentuk dan akses untuk semua warga negara terjamin. Ruang publik ini digunakan oleh individu-individu pribadi untuk berkumpul, berbicara, dan membentuk sebuah badan publik yang di dalamnya tidak berperilaku sebagai pengusaha atau profesional yang sedang melakukan bisnis pribadinya dan juga tidak berperilaku sebagai pejabat dari birokrasi negara. Dalam badan publik semua individu dijamin untuk memiliki kebebasan berkumpul, berorganisasi, berekspresi atau mempublikasikan pandangannya tentang kepentingan umum. Dalam konteks ini dibutuhkan sebuah sarana komunikasi untuk mengirim informasi dan mempengaruhi masyarakat. Surat kabar, majalah, radio, dan televisi menjadi media yang efektif untuk ruang publik ini. Otoritas negara ini dianggap sebagai otoritas publik tetapi tugasnya adalah untuk memelihara kepentingan umum bagi seluruh warga negara, ruang publik sebagai mediator antara masyarakat dan negara.

Meningkatnya komodifikasi dalam kehidupan sehari-hari yang dibentuk oleh korporasi raksasa melalui pengembangan produk-produk industri yang sebetulnya tidak diperlukan melalui iklan-iklan pariwisata dan pengemasan citra lembaga yang dikembangkan oleh humas (PR). Kegiatan ini secara tidak sadar telah mengubah individu-individu yang merupakan warga negara yang rasional menjadi warga negara yang hanya menjadi sekedar konsumen produk-produk industri. Ruang publik harus menjadi tempat yang ideal dalam membentuk sebuah “situasi pembicaraan yang ideal” di mana klaim-klaim pertarungan kebenaran tunduk pada perdebatan dan argumen rasional sehingga ruang publik dipahami sebagai tempat untuk debat yang didasarkan pada kesetaraan dan melibatkan proses diskusi yang bebas, terbuka, tidak terinterupsi, tidak terbatas, tidak terdistorsi, dan secara total bebas dari setiap jenis dominasi, yaitu “debat kritis-rasional”, tidak dimanipulasi, tidak dikaburkan, tidak berprasangka, dan tidak dikendalikan oleh kepentingan pribadi.

Inti ruang publik adalah sebuah debat kritis-rasional yang terdiri dari argumen-argumen yang lahir menjadi konsensus tentang apa yang penting bagi semua orang. Sebuah “situasi pembicaraan yang ideal” beberapa hal yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa partisipan harus mengikuti aturan-aturan tertentu, seperti (1) mereka harus mengakui hak setiap orang dalam suatu wacana; (2), partisipan harus menaati prosedur yang telah ditentukan; dan (3) setiap individu harus dijamin dalam menggunakan hak-haknya, baik dari tekanan internal maupun eksternal. Cara itu dapat membuat, kesamaan partisipan yang bersifat fundamental dapat terjamin. Setiap orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam wacana yang berfungsi untuk mencapai sebuah persetujuan pada perihal yang didiskusikan. Efektifitas komunikasi diukur dengan konsensus yang dicapai. Pelaksanaan debat “kritis-rasional” merupakan sebuah tindakan pembentukan “opini-publik” yang kuat bagi masyarakat secara luas. Ruang publik, karenanya, merupakan sebuah dunia dari kehidupan sosial di mana suatu opini *public* atau sesuatu yang mendekati opini publik dapat dibentuk.

Satu sistem komunikasi yang menghargai kebebasan itu, maka dapat satu sistem disusun komunikasi kebangsaan yang berlandaskan Pancasila. Ideologi pancasila ini, pada gilirannya menurunkan Sistem Komunikasi Pancasila yang dilandasi oleh tiga pilar, yaitu, (1) Nilai-nilai

ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Nilai-nilai Kemanusiaan dan Persatuan Indonesia; dan (3) Nilai-nilai Kerakyatan dan Keadilan Sosial” (Arifin, 2011: 218-234).

Dalam sebuah sistem, komunikasi kebangsaan memiliki empat asumsi pokok, yaitu, (1) komunikasi adalah sebuah proses; (2) komunikasi adalah pertukaran pesan; (3) komunikasi adalah interaksi yang bersifat multi-dimensi; (4) komunikasi merupakan interaksi yang mempunyai tujuan-tujuan atau maksud-maksud ganda” (Cronkhite dalam Panuju,1997: 6-7). Kebebasan Berkomunikasi adalah hak dasar yang sudah dilindungi dalam UU Dasar 1945, sehingga setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan hak ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun karena sudah dilindungi oleh UUD 1945.

“Bahkan dalam Amandemen keempat UUD 1945 tahun 2002, diakui adanya hak berkomunikasi sebagai hak asasi manusia (HAM) Indonesia. Dalam pasal 28F dirumuskan, ‘Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” (Arifin, 2011: 6).

## **Simpulan**

Perubahan-perubahan yang telah terjadi, baik pada tataran internal maupun eksternal telah mengubah wajah dunia dan juga Bangsa Indonesia. Dunia kini telah menjadi lebih cair dan batas-batas antar negarapun semakin memudar. Seiring dengan semakin memudarnya batas-batas antar bangsa, penghargaan atas manusia individu semakin meningkat sehingga pendekatan tradisional atas masalah-masalah kemanan mulai dipertanyakan keabsahannya. Kedua faktor ini telah mendorong munculnya suatu sistem komunikasi baru yang berwawasan kebangsaan dalam rangka menumbuhkan dan mempertahankan kecintaan kepada Negara dan bangsa yang tampaknya semakin tergerus oleh derasnya arus globalisasi. Sisi lainnya Negara-bangsa Indonesia harus tetap dipertahankan. Komunikasi kebangsaan yang diharapkan dapat menjadi kekuatan pemersatu bangsa harus memiliki karakteristik sistem komunikasi berkomunikasi yang bebas dominasi dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan segenap potensi terbaik yang dimiliki masyarakat dan bangsa Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Arifin, Anwar, 2011, *Sistem Komunikasi Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Aphornsuvan, Thanet, 2012, *Communication and the Preservation of National Identity*, The World Association for Christian Communication, <http://www.waccglobal.org/en/19972-communication-and-national-identity/930-Communication-and-the-Preservation-of-National-Identity-.html> diakses 21-04-2012.
- Fukuyama, Francis, 2002, *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Yogyakarta: Qalam.
- Hamelink, Cees J, 1983, *Cultural Autonomy in Global Communication*, New York: Longmann.
- Panuju, Redi, 1997, *Sistem Komunikasi Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Paris, Roland, 2001, *Human Security: Paradigm Shift or Hot Air*. dalam *International Security*, Vol. 26, No. 2 (Fall 2001), pp. 87-102, <http://aix1.uottawa.ca/~rparis/Paris.2001.IS.Human%20Security.pdf> diakses 14-04-2012.
- Putra, I Gusti Ngurah, 2004, 'Privatisasi Komunikasi dan Demokrasi', dalam *Komunikasi, Negara, dan Masyarakat*, editor Nunung Prajarto, Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Siregar, Ashadi, 1995, *Komunikasi Massa dan Kebangsaan*, Makalah disampaikan pada Seminar Sehari *Komunikasi Massa yang Berwawasan Kebangsaan*, Pusat Studi Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Yogyakarta 28 September 1995.
- Trijono, Lambang, 2002, *Peran Komunikasi dalam Konflik dan untuk perdamaian: Kontribusi pemikiran alternatif*, dalam *Media-Militer-Politik. Crisis Communication: Perspektif Indonesia dan Internasional*, editors, Lukas Ispandriarno dkk, Yogyakarta: Friedrich Ebert Stiftung dan Galang Press.
- Opello, Walter C., Jr. and Stephen J. Rosow, 2004, *The Nation-state and global order: a historical Introduction to contemporary politics 2<sup>nd</sup> ed*, Lynne Rienner Publisher, Boulder, CO.

BAGIAN II

KONFLIK DAN KERENTANAN  
BANGSA



# DIPLOMASI PREVENTIF KONFLIK DI PAPUA: PERSPEKTIF PR INTERNASIONAL

Maya

## Pendahuluan

Definisi komunikasi memang sederhana, tetapi aplikasinya tak semudah yang dibayangkan. Berkaitan dengan komunikasi yang melibatkan negara lain, yang memiliki karakter yang berbeda dengan negara kita. Menghadapi pertentangan dengan negara lain atau pun untuk memperbaiki citra kita, komunikasi internasional jelas dibutuhkan.

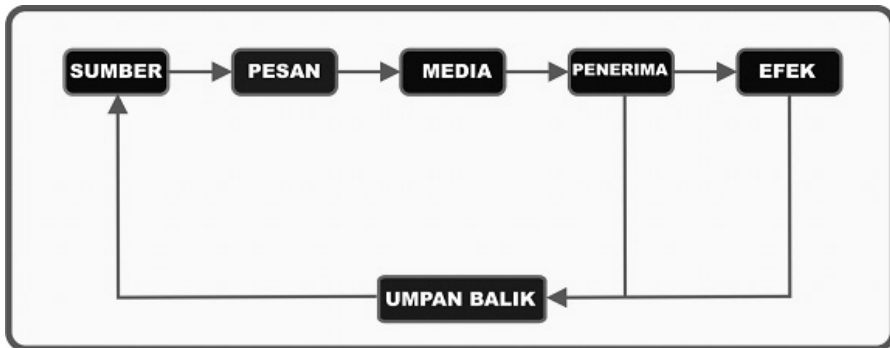
Fokus komunikasi internasional terutama pada tujuan diplomasi dan berbagai kepentingan yang terlibat dalam diplomasi tersebut. Keberhasilan diplomasi akan dicapai ketika mengemas pesan dengan pilihan kata yang tepat sesuai dengan karakter negara lain yang diajak dalam diplomasi.

Dalam perspektif diplomatik, komunikasi internasional adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah atau negara dengan pemerintah atau negara lain (Shoelhi, 2011: 8). Komunikasi internasional dalam perspektif diplomatik ini salah satunya digunakan untuk menghindari kesalahpahaman, memberikan keyakinan, dan menghindari konflik.

Berbagai definisi mengenai komunikasi sudah diungkapkan oleh para ahli. Definisi yang dibuat para pakar memiliki perspektif yang berbeda, pada dasarnya definisi-definisi tersebut tidak terlepas dari substansi komunikasi itu sendiri (Cangara, 2007: 18).

Steven mengajukan definisi yang lebih luas: "Komunikasi terjadi kapan saja suatu organisme memberi reaksi terhadap objek atau stimuli, apakah itu berasal dari seseorang atau lingkungan sekitarnya. Misalnya seorang berlindung pada suatu tempat karena diserang badai atau kedipan mata seseorang sebagai reaksi terhadap sinar lampu juga merupakan peristiwa komunikasi" (Steven dalam Cangara, 2007: 19).

Komunikasi hanya bisa dikatakan sebagai komunikasi jika memiliki unsur-unsur pendukung yang membangunnya sebagai *body of knowledge*, yakni sumber, pesan, media, penerima, pengaruh, umpan balik, dan lingkungan. Unsur-unsur ini juga sering disebut sebagai komponen atau elemen. Keterkaitan unsur-unsur satu sama lainnya dapat dilihat seperti berikut:



**Gambar 2.1. Unsur-Unsur yang Membentuk Proses Komunikasi**

Sumber: Cangara (2007)

1. Sumber: semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Dalam komunikasi antarmanusia, sumber bisa terdiri satu orang tetapi bisa juga dalam bentuk kelompok, misalnya partai, organisasi, lembaga atau negara. Sumber sering disebut sebagai pengirim, komunikator atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan, *source*, *sender*, atau *encoder*.
2. Pesan: dalam proses komunikasi adalah suatu yang disampaikan pengirim pada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka, atau media komunikasi. Isinya dapat berupa ilmu pengetahuan, informasi, nasehat, atau propaganda. Dalam bahasa Inggris pesan biasanya diterjemahkan *message*, *content*, atau *information*.
3. Media: adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Media komunikasi ada yang berbentuk saluran antarperibadi, media kelompok, dan ada pula dalam bentuk media massa. Istilah media banyak digunakan dengan sebutan berbeda misalnya saluran, alat, arena, sarana atau dalam bahasa Inggris disebut *channel* atau *medium*.



Definisi komunikasi internasional tidak berbeda dengan definisi komunikasi yang sudah ada. Perbedaannya terdapat pada pesan yang disampaikan, media yang digunakan dan banyak kepentingan negara-negara lain yang terlibat di dalamnya.

Menurut Gerhard Maletzke (dalam Shoelhi, 2011: 3), komunikasi internasional adalah proses komunikasi antara berbagai negara atau bangsa yang melintasi batas-batas negara Deddy Djamaluddin Malik (dalam Shoelhi, 2011: 3) menjelaskan bahwa komunikasi internasional adalah komunikasi yang dilakukan antara komunikator yang mewakili negara lain dengan tujuan untuk memperoleh dukungan yang luas.

Komunikasi internasional dalam perspektif diplomatik merupakan kegiatan atau upaya untuk membina rasa saling percaya atau memperteguh keyakinan terhadap suatu gagasan. Dengan menggunakan saluran-saluran diplomatik, komunikasi internasional lebih banyak digunakan untuk memperluas pengaruh, meningkatkan komitmen dan solidaritas, menanggulangi perbedaan pendapat dan salah paham serta menghindari pertentangan dalam masalah tujuan dan kepentingan yang dikehendaki sebuah negara.

Berlangsungnya komunikasi internasional dalam perspektif diplomatik ini merupakan upaya untuk membina rasa percaya atau memperteguh keyakinan (*confidence building*). Selain untuk menghindari konflik, tujuan komunikasi internasional adalah untuk mengembangkan kerja sama baik dalam hubungan bilateral maupun hubungan multilateral, memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) serta meningkatkan citra dan reputasi sebuah negara (Rudy, 2005: 127).

Komunikasi internasional dalam perspektif diplomatik lazim digolongkan ke dalam *first track diplomacy* (komunikasi ditujukan pada pemerintah negara) dan *second track diplomacy* (komunikasi berhubungan langsung dengan penduduk atau masyarakat setempat). Ditinjau dari dimensi komunikasi, untuk jangka waktu yang lama, komunikasi formal antarpemerintah dianggap lebih menentukan aktivitasnya (Shoelhi, 2009: 31-33). Kaitannya dengan diplomasi, komunikasi internasional dapat dijadikan sebagai sarana diplomasi. Dalam rangka pencapaian keberhasilan tujuan yang diinginkan maka pilihan kata dan kemasam pesan harus diperhatikan.

Diplomasi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah bentuk pendekatan yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain untuk

menyelesaikan suatu permasalahan. Diplomasi termasuk pengelolaan hubungan internasional melalui sarana negosiasi, diplomasi merupakan keterampilan untuk mengutarakan gagasan dalam pelaksanaan interaksi dan perundingan antarbangsa (Nicolson dalam Shoelhi, 2011: 77) Diplomasi melibatkan beberapa subyek, yang jika dikaitkan dengan cakupannya yang bersifat internasional, sudah tentu melibatkan individu, negara dan organisasi internasional.

Obyeknya pun luas meliputi perjanjian internasional, perlindungan atau suaka, dan lain-lain. Mekanisme yang dijalankan dalam suatu diplomasi juga mengikuti aturan-aturan yang ada dan berlaku universal, khususnya dalam hal ini adalah Konvensi Wina. Tujuan yang ingin dicapai pun jelas yakni tersampainya maksud individu, negara atau organisasi internasional kepada individu, negara atau organisasi internasional lainnya. Melaksanakan diplomasi harus menguasai, mengenal dan mengerti latar-belakang terjadinya perkembangan politik dunia berikut perspektifnya dan juga mampu mengungkap latar belakang dan sikap para aktor politik yang terlibat dalam percaturan politik internasional (Irsan, 2010: 85)

Beberapa bentuk diplomasi dilakukan oleh Departemen Luar Negeri untuk membina hubungan dengan negara atau pemerintah lain, antara lain:

1. Dialog, misalnya dialog antara Indonesia dan Malaysia untuk membicarakan capaian proyek kerjasama atau menyelesaikan masalah perbatasan. Dialog biasanya digelar untuk mengupayakan sebuah penilaian dan perkembangan tertentu;
2. Persidangan, seperti persidangan terjadwal yang kerap dilaksanakan dalam forum-forum diplomasi di PBB untuk menyampaikan pandangan-pandangan negara anggota atas berbagai isu internasional;
3. Konferensi internasional, contohnya konferensi internasional perdamaian Timur Tengah yang dihadiri para pihak bertikai, pihak berkepentingan serta organisasi-organisasi internasional yang peduli terhadap konflik Arab-Israel, dan sejumlah pengamat politik internasional. Konferensi Internasional biasanya bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan;
4. Kunjungan kenegaraan, misalnya kunjungan seorang kepala negara ke negara sahabat untuk mempererat hubungan persahabatan kedua negara;

5. Seminar internasional, misalnya seminar internasional tentang difusi dan inovasi teknologi dan implikasinya bagi kesejahteraan internasional;
6. Simposium, seperti simposium internasional untuk membahas kajian-kajian kebudayaan dan ilmu pengetahuan;
7. Negosiasi, bentuk diplomasi ini lazim digunakan untuk merundingkan masalah atau isu-isu bilateral, trilateral atau multilateral tertentu, dan bertujuan mencapai persetujuan atau perjanjian;
8. Lobby, adalah bentuk diplomasi tidak resmi yang lazim digunakan untuk memperlancar jalannya negosiasi (Shoelhi, 2011: 84).

Menurut Lord Strang (dalam Shoelhi, 2011:86), fungsi utama diplomasi adalah menyelesaikan berbagai perbedaan internasional melalui dialog atau perundingan, yang diperlancar oleh hubungan-hubungan pribadi yang baik dengan terciptanya saling pengertian. Fungsi diplomasi secara umum mencakup tiga hal.

*Pertama, reporting.* Fungsi pelaporan (*reporting*) untuk melaporkan perkembangan berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya yang terjadi di negara akreditasi dan mengkomunikasikan informasi penting lain yang perlu diketahui negara akreditasi. Dalam konteks ini seorang diplomat dituntut untuk bekeja sungguh-sungguh dalam memantau perkembangan yang terjadi, khususnya untuk menangkap peluang-peluang menguntungkan yang bisa dimanfaatkan.

*Kedua, representation.* Seorang diplomat mewakili negaranya dalam memeragakan keresmiannya di hadapan sesama untuk utusan diplomatik di negara akreditasi. Diplomat mewakili negaranya dalam upacara-upacara kenegaraan serta pertemuan-pertemuan resmi: penganugerahan bintang-bintang jasa atau kehormatan, dan acara-acara resmi kenegaraan lainnya, berpenampilan dengan pakaian-pakaian resmi serta perduli terhadap tata krama serta tatacara diplomatik.

*Ketiga, negotiation.* Dalam perundingan, diplomat berperan sebagai pembawa pesan (*messenger*), senantiasa bertindak sesuai instruksi yang diberikan oleh negaranya. Kendati demikian, ia harus mengerahkan kemampuannya, mempergunakan wewenang dan tanggungjawabnya untuk memenangkan negosiasi (Shoelhi, 2011: 86).

Sir Ernest Satow (Djelantik, 2008: 3-4) sejak 1992 telah mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelejen dan taktik untuk menjalankan hu-

bungan resmi antara pemerintahan yang berdaulat yang kadang-kadang diperluas dengan hubungan negara-negara jajahannya. Sejalan dengan Satow, Barston mendefinisikan diplomasi sebagai manajemen hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobi, kunjungan dan aktivitas lainnya yang terkait (Djelantik, 2008: 4).

Selain itu, sebenarnya diplomasi masih memiliki banyak fungsi yang lain. Salah satunya untuk mencegah peperangan. Salah satu ragam diplomasi yang dapat digunakan untuk mencegah peperangan adalah diplomasi preventif. Diplomasi preventif biasanya dilancarkan ketika masyarakat menghadapi suasana genting yang bakal memunculkan konflik besar atau pecah perang (Shoelhi, 2011: 80).

Definisi diplomasi preventif ini bermacam-macam. Menurut mantan Sekjen PBB, Boutros Ghali, diplomasi preventif secara umum mengandung tiga unsur seperti: (1) usaha untuk mencegah pertikaian yang muncul di antara para pihak; (2) usaha untuk mencegah adanya pertikaian yang meningkat menjadi konflik, dan (3) usaha untuk membatasi meluasnya konflik tersebut apabila hal itu terjadi (Shoelhi, 2011: 164). Keberhasilan diplomasi ini menyaratkan ijin dari negara yang diintervensi, dukungan dari negara besar karena diplomasi preventif biasanya dilaksanakan sesuai dengan sanksi ekonomi atau bantuan ekonomi sebagai alat untuk menyukseuskannya, dan tahu saat yang tepat untuk melaksanakannya.

Menteri Luar Negeri Bosnia, Sven Alkalaj, mengatakan pengalaman negaranya ketika dilanda perang akan menjadi aset penting baik bagi Dewan Keamanan sebagai salah satu sistem di PBB. Sejalan dengan terpilihnya lima anggota baru, Dewan Keamanan PBB yakni Nigeria, Brasil, Bosnia, Lebanon dan Gabon, Alkalaj mengatakan bahwa diplomasi preventif menjadi bahasan yang akan digarap secara serius, dengan tidak membiarkan krisis dan hilangnya nyawa terjadi lagi sebagaimana yang mereka alami di Bosnia (*Suara Pembaruan* 16/10/2009 hal.14).

Diplomasi ini merupakan penggabungan antara elemen-elemen diplomasi publik dan diplomasi diam-diam (Shoelhi, 2011: 165). Ins Claude Jr, menggambarkan diplomasi preventif sebagai penetral dan

penyeimbang hubungan internasional yang efektif. Idealnya sebuah diplomasi publik itu targetnya adalah audiens di dalam dan di luar, jadi posisi diplomasi publik itu seperti Public Relations (<http://www.tabloiddiplomasi.org>)

*Public Relations* internasional banyak diartikan sebagai usaha terencana dan terorganisasi dari sebuah perusahaan, lembaga, atau pemerintah guna membina hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat negara lain. Masyarakat tersebut, sebaliknya diartikan sebagai berbagai kelompok orang yang terkena pengaruh, atau yang dapat mempengaruhi operasi suatu perusahaan, lembaga atau pemerintah. Publik bersatu karena memiliki kepentingan yang sama menghadapi badan yang mencari ketersediaan untuk menerima produk atau programnya (Wilcox dalam Pramudhita, 2011: 62).

Selain meyakinkan dan mengevaluasi opini masyarakat dunia serta menggunakan berbagai strategi komunikasi untuk mempengaruhi opini publik dan membangun citra bangsa, para pelaku humas internasional juga berperan: (1) Memikirkan masalah-masalah internasional yang berkaitan dengan negaranya dan negara-negara lain yang relevan; (2) Memikirkan dan mencarikan jalan keluar terhadap masalah-masalah nasional yang berkaitan dengan pembentukan dan pemeliharaan citra guna membangun kerjasama dengan negara-negara lain. (3) Menyusun, merencanakan dan melaksanakan program-program kegiatan kehumasan dengan perencanaan komunikasi yang tepat, guna memecahkan atau mencari jalan atas masalah-masalah tersebut, seperti menjembatani ketegangan atau konflik antarpublik internal maupun eksternal; melakukan penyebaran informasi, edukasi dan sosialisasi; merencanakan dan melakukan kegiatan publisitas, *special event*, manajemen, dan lain-lain (Yuningsih dalam Pramuditya, 2011: 62).

Masalah-masalah dalam bidang *Public Relations* internasional pada dasarnya tidak sekedar berkaitan dengan publik secara khusus, namun juga berkaitan dengan aspek kehidupan lain dari publik yang berasal dari berbagai negara terutama seperti pembahasan dalam tulisan ini yaitu keamanan. Kegiatan *Public Relations* internasional, yaitu berusaha keras untuk mengembalikan citra bangsa yang ternoda akibat isu-isu politik sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dari berbagai negara terutama untuk penyelesaian konflik yang terjadi di suatu negara.

Sebagaimana tujuan *Public Relations* secara umum maka tujuan *Public Relations* internasional adalah menciptakan, memelihara, meningkatkan dan memperbaiki citra bangsa atau negara atau organisasi di mata publik yang berasal dari mancanegara. Faktor-faktor yang perlu diperhitungkan dalam pembentukan citra di mata publik internasional ini di antaranya: (a) Persamaan atau perbedaan nilai; (b) Aturan dan norma penerapannya; (c) Perasaan aman dan jaminan keamanan; (d) Pengalaman dalam berhubungan; (e) Kredibilitas serta reputasi bangsa atau masyarakat dari negara atau lembaga yang bersangkutan (Pramuditya, 2011: 62)

### **Diplomasi Preventif di Papua**

Masalah di Papua mengundang perhatian mata internasional karena banyak dari kelompok-kelompok anti NKRI memperoleh simpati dari negara-negara lain sehingga dukungan untuk memisahkan diri dari RI semakin kuat. Deplu mempunyai tugas untuk mengklarifikasi dan memperbaiki kredibilitas serta reputasi bangsa yang sudah dicoreng akibat pemberitaan yang buruk tentang Indonesia. Dengan demikian tugas yang sangat berat untuk pemerintah membentuk identitas, eksistensi, dan citra bangsa atau negara dalam berbagai sektor.

Isu di Papua saat ini merupakan pencitraan negatif bagi Indonesia. Masalah pelanggaran HAM yang terus mencuat, membuat dukungan dari beberapa negara terhenti. Dengan pendekatan berupa klarifikasi mengenai situasi yang terjadi, perlahan-lahan dukungan itu kembali diperoleh.

Pendekatan dalam menangani Papua, sebelumnya cenderung represif. Hal ini telah merugikan pemerintah dengan berkembangnya opini negatif baik di dalam maupun di luar negeri. Pemerintah mulai meninggalkan pendekatan tersebut dan menyikapi masalah di Papua dengan lebih menekankan pada pendekatan kesejahteraan. Pendekatan yang represif itu bisa menyebabkan konflik yang sudah terjadi makin meluas. Kegagalan mempertahankan Timor Leste akan terulang lagi pada Papua bila pemerintah tidak mengambil tindakan diplomasi yang cepat untuk menanganinya.

Beberapa ahli mengatakan, kasus Papua laksana bom waktu yang akan meledak apabila tidak ditangani secara efektif. Dukungan internasional dan pengakuan atas negara merupakan salah satu fondasi

dasar dalam hubungan diplomatik. Dukungan negara asing atas integrasi wilayah NKRI akan menjadi indikator yang penting dalam penyelesaian isu Papua secara internasional. Langkah ini harus diiringi dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan daerah Papua secara tepat dan nyata. "Pembangunan adalah faktor penunjang perdamaian" (McNamara dalam Djelantik, 2008: 169).

Lester B. Pearson mengatakan, hanya sebagian negara-negara kaya yang populasinya di dunia hanya sebagian kecil mendapatkan akses ke arah ilmu dan teknologi secara maksimal dibandingkan negara-negara lain yang hidup serba kekurangan.

Pemerintah RI kini berupaya untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan SDM di Papua. Pembangunan menjadi sorotan utama di Papua karena pembangunan yang belum merata mengakibatkan pandangan negatif rakyat Papua terhadap pemerintah pusat tentang konsep keadilan. Pembangunan ada kaitannya dengan perdamaian suatu negara. Hubungan sebab-akibat antara pembangunan dan perdamaian dapat ditunjukkan dalam dua tingkat: (1) Keterbelakangan adalah ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. (2) Pembangunan adalah faktor penunjang perdamaian (Djelantik, 2008: 170)

Diplomasi preventif dapat menetralkan sikap negara-negara lain untuk tidak memihak dan PBB dapat berperan sebagai penyeimbang hubungan internasional yang efektif. Australia, misalnya, selain sebagai negara besar (*major power*), keterkaitan Australia sebagai negara tetangga Indonesia juga harus dapat meyakinkan masyarakat di negara-negara Pasifik Selatan untuk tidak mendukung gerakan Papua Merdeka.

Antisipasi yang tepat adalah melakukan diplomasi preventif baik secara bilateral (antar negara ataupun lembaga internasional) dan secara multilateral melalui forum regional dan internasional. Hal ini sesuai dengan keinginan masyarakat Papua untuk diselenggarakannya dialog yang jujur dan damai seperti penyelesaian kasus Aceh. Dialog tersebut dimediasi oleh pihak ketiga yang netral dan yang diminta dan disetujui oleh orang asli Papua dan Pemerintah Indonesia (Yoman dan Wonda, 2009: 10)

Untuk memperkuat pembangunan kepercayaan dan diplomasi preventif perlu peningkatan dialog dan kerjasama antar organisasi regional di Asia dan Eropa, dalam hal ini *ASEAN Regional Forum* (ARF)



dan *Organization for Security and Cooperation in Europe* (OSCE). Partisipasi Uni Eropa (UE) sebagai anggota ARF merupakan uji coba tersendiri bagi UE, karena melalui ARF inilah UE harus menunjukkan kekompakan dan solidaritas dalam bekerjasama dengan organisasi regional lainnya. Dengan demikian, ini tantangan bagi UE untuk melakukan manajemen krisis dalam kerangka ARF. Keberhasilan kerjasama antara UE dan ASEAN dalam manajemen krisis telah ditunjukkan melalui kesuksesan Aceh Monitoring Mission (2006).

Diplomasi preventif dapat digunakan secara lebih efektif untuk meredakan ketegangan yang dapat memicu timbulnya konflik. Apabila konflik sudah terjadi maka diplomasi preventif akan berperan sebagai peredam konflik agar penyebarannya tidak meluas.

Pemerintah RI harus mengetahui secara jelas terlebih dahulu mengenai sumber permasalahan yang terjadi di Papua dan dapat mencari jalan keluar. Misalnya, dengan bertemu dengan pihak Freeport untuk membicarakan kepentingan rakyat Papua. Dengan lebih memahami keadaan politik dan ekonomi rakyat Papua, maka pemerintah Indonesia akan lebih meningkatkan kualitas diplomasinya di mata internasional. Bukan hal yang mudah bagi pemerintah Indonesia untuk meyakinkan negara-negara sahabat bahwa isu Papua tidak ada kaitannya dengan HAM seperti yang selama ini diungkapkan berbagai kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI.

Seorang peneliti senior pusat penelitian politik LIPI mengatakan, kehadiran Indonesia di Papua dalam bentuk pos-pos militer dan berbagai pelanggaran HAM. Indonesia secara dominan hadir dalam bentuk sekolah yang tidak terurus dan kekurangan guru, sebagai puskesmas yang hanya berupa gedung kosong, minus mantri dan obat, apalagi dokter.

Menurutnya, pemerintah masih menganggap masalah separatisme bisa diatasi dengan kesejahteraan dengan diam-diam tetap melakukan tindakan represif. Represif semakin membuat pencitraan pemerintah Indonesia semakin buruk. Pemerintah Indonesia dianggap melakukan pelanggaran HAM sehingga mengundang pihak internasional untuk mempersoalkan kondisi kemanusiaan di Papua. Pihak organisasi internasional memberikan banyak simpatinya pada Papua.

Penyelesaian masalah Papua perlu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dengan menyadarkan kelompok anti NKRI secara



damai, menghindarkan konflik horizontal, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi segenap komponen bangsa. Menyadarkan kaum separatis itu memang tidak mudah. Dari waktu ke waktu, ada gangguan dari sekelompok orang-orang bersenjata yang ingin memisahkan diri dari Papua.

Pembunuhan mulai dilakukan pada masyarakat sipil, misalnya dengan menembaki helikopter yang digunakan untuk mengangkut bahan makanan untuk masyarakat sipil atau melalui serangkaian peristiwa bersenjata di sekitar fasilitas Freeport dan kabupaten Puncak Jaya. Hal ini menimbulkan keresahan sehingga tugas pemerintah untuk melindungi rakyatnya. Tindakan operasi sosial ekonomi ataupun operasi militer yang dilakukan pemerintah Indonesia seringkali diputarbalikkan oleh mereka yang mendukung kemerdekaan Papua.

Pemerintah perlu menerapkan strategi kehumasan yang tepat untuk menepis isu yang negatif tentang Indonesia. Misalnya, ketika ditetapkannya operasi militer di Maluku (2001) dan operasi militer di Aceh (2003). Pemerintah harus bisa menjelaskannya pada dunia internasional agar informasinya tidak diputarbalikkan.

Tentu saja, upaya kehumasan ini perlu didukung oleh realita pelaksanaan operasi militer (opmil) secara selektif dan terkendali tanpa melakukan pelanggaran HAM terhadap penduduk sipil (*non combatant*) dan bentuk-bentuk penindasan yang menyengsarakan penduduk sipil secara pukul rata (Rudi, 2005: 166). Langkah ini juga harus dikoordinasikan dengan berbagai pihak terkait, misalnya dengan TNI dan Polri, untuk persamaan persepsi kebijakan. Menurut Rudi (2005: 167) upaya kehumasan yang dilakukan oleh pemerintah mencakup upaya koreksi ke dalam. Pada kasus Aceh, ia menekankan bahwa pemerintah harus benar-benar melaksanakan pembangunan di NAD dan mengupayakan peningkatan taraf hidup (kesejahteraan) bagi rakyat Aceh.

Pada hakikatnya, langkah-langkah yang dilakukan oleh Direktorat Keamanan Publik Departemen Luar Negeri tidak jauh berbeda dengan tugas humas internasional ketika konflik di Papua kembali mencuat, salah satunya dengan memikirkan jalan keluar yang tepat untuk meredam konflik ini. Dialog-dialog perlu dilakukan dengan publik yang terkait, misalnya pemerintah, LSM dengan rakyat Papua. Masukan-masukan dari rakyat Papua ditampung sebagai dasar kebijakan pemerintah untuk menangani masalah di Papua.

Berbagai pendekatan dilakukan oleh Kemlu pada semua kalangan yang memiliki perhatian besar terhadap isu Papua di dalam dan luar negeri, misalnya kalangan pemerintah, parlemen, tokoh politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, LSM dan lain sebagainya. Kemlu juga secara aktif juga menyampaikan informasi berbagai perkembangan terkini Papua kepada semua perwakilan RI di luar negeri agar masyarakat internasional mengetahui perkembangan Papua secara objektif.

Hambatan untuk melaksanakan hasil dialog antara pemerintah dan rakyat Papua, di antaranya pemerintah menganggap bahwa persoalan yang paling utama di Papua adalah masalah kesejahteraan sehingga solusi yang ditawarkan tidak pernah lepas dari peningkatan kesejahteraan. Menurut Muridan (*Kompas*, 8 April 2012), bukan lagi masalah kesejahteraan tapi masalah harga diri dan pengakuan keberadaan mereka, serta imajinasi relasi Indonesia dengan Papua. Pemikiran yang berbeda di antara keduanya mengakibatkan tidak adanya rumusan solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Konferensi Perdamaian di Tanah Papua dengan tema "*Mari kitong bikin Papua jadi tanah damai*" merupakan upaya awal agar terjadi dialog damai antara Papua dan Jakarta. Konferensi ini didukung oleh Humanitarian Dialog Center (HDC) yang berkantor di Singapura, Pemprov Papua dan Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopulhukam) (*Lampung Post.com*, 21 April 2012).

Menurut Ikrar Nusa Bhakti, Menkopulhukam Djoko Suyanto secara khusus datang ke Jayapura dengan menggunakan pesawat TNI-AU untuk menjadi pembicara kunci pada konferensi perdamaian Papua tersebut. Bagi Menkopulhukam, konferensi tersebut merupakan salah satu cara untuk menjalin hubungan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat di daerah tersebut.

Djoko Suyanto menambahkan, untuk membangun suatu daerah juga membutuhkan suasana yang aman dan damai. Dalam konferensi Perdamaian di Papua, pihaknya juga meminta agar ada sinergitas untuk tujuan yang diinginkan oleh semua pihak agar ada yang dapat tercapai.

Dari beberapa konferensi yang diadakan, semuanya mengalami jalan buntu. Penolakan datang dari tiga kelompok masyarakat Papua, di antaranya adalah Gerakan Merah Putih, Komite Nasional Papua Barat dan TPN/OPM.

Dua keinginan yang muncul dari Konferensi perdamaian di tanah Papua, yaitu penyelesaian konflik dilakukan seperti kasus Aceh (pemerintah RI dan GAM) di Helsinki pada 2005 dan penyelesaian konflik dengan cara referendum. Sama halnya dengan hasil yang didapat dari *West Papua-Road to Freedom Conference* di Oxford, Inggris, yang diadakan pada 2 Agustus 2011 dikoordinasi oleh The Free West Papua Campaign & International Lawyers for west Papua (*LampungPost.com*, 21 April 2012). Konferensi yang dihadiri oleh beberapa Negara yang mendukung kemerdekaan di Papua, menuntut dilakukannya referendum di Papua sebagai pengganti Pepera 1969 yang dianggap dilaksanakan tidak sesuai dengan cara-cara yang biasa dilakukan oleh PBB.

Terdapat pro dan kontra di kalangan parlemen di berbagai negara terhadap permasalahan yang terjadi di Papua. Beberapa anggota parlemen Inggris menyatakan dukungannya terhadap rakyat Papua (Wonda, 2009: 245). Sejauh ini parlemen Inggris, khususnya *House of Lords*, hanya mendukung dialog konstruktif antara pemerintah Indonesia dan wakil-wakil Papua dan Papua Barat yang *credible* untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan antara pemerintah RI dan rakyat Papua (*LampungPost.com*, 21 April 2012).

Salah satu teknik *Public Relations* dapat dilakukan dengan menyampaikan klarifikasi berupa penjelasan dan informasi sebagai upaya untuk mendapat dukungan dan kepercayaan. Selain dengan klarifikasi, Kemenlu dapat mengundang parlemen Inggris untuk berkunjung ke Indonesia dengan tujuan untuk melihat keadaan Papua yang sebenarnya.

Penyelesaian konflik di Papua tergantung dari kesepakatan ketika pemerintah RI dan perwakilan dari rakyat Papua bertemu. Persoalan Papua harus direview kembali dan dibawa kembali ke meja PBB untuk penyelesaian akhir (Wonda, 2009: 317). Apa yang dikatakan Marcus Kaisiepo, anggota Niuew Guinea Raad asal Biak pada 1 September 1945 masih relevan: "Sekarang adalah zaman kemerdekaan. Orang Indonesia dan orang Papua bersaudara. Orang Indonesia jangan memonopoli jabatan dan kekayaan. Ketika itu terjadi akan terus ada masalah antara orang Indonesia dan Papua". (*LampungPost.com*, 21 April 2012).

Peran diplomat sangat diperlukan di dalam pelaksanaan diplomasi preventif ini. Sejatinya seorang diplomat menjadi wakil negara dalam berbagai konferensi. Ia harus paham betul politik dan

berbagai permasalahan yang terjadi di negaranya di negaranya. Seorang diplomat memiliki tugas penting untuk melindungi, membela dan memperjuangkan tercapainya kepentingan nasional. Diplomat punya peran vital, ia tidak hanya mampu menyelesaikan masalah sekarang, tapi juga mengantisipasi masalah yang diperkirakan akan timbul di masa mendatang (Shoelhi, 2011: 106)

Fungsi diplomat boleh dikatakan banyak. Diperlukan seseorang yang berwawasan luas yang mengisi posisi tersebut. Seorang diplomat dituntut untuk mengerti politik luar negeri yang dianut negara asalnya. Ia harus menjadi mata, telinga dan mulut negara asalnya.

Diplomat akan banyak bermain dalam hal-hal yang menuntut kemampuan teknis seperti penyusunan *treaty* dan hal-hal lainnya. Pada dasarnya ia berperan besar untuk menjadi monitor, komunikator dan negosiator. Kemasan pesan yang tepat sasaran harus diperhatikan agar tujuannya tercapai. Tugas penting para diplomat untuk memfokuskan diri lebih dalam lagi untuk merumuskan kembali langkah-langkah diplomasi yang tepat dalam rangka mencegah perluasan konflik di Papua.

Peran diplomasi yang sangat penting diharapkan tidak berhenti sampai tahap dialog saja tapi ada tindak lanjut pasti dari pemerintah. Tidak lain kita menginginkan negara Indonesia menjadi satu negara yang solid dan menjunjung tinggi perdamaian.

## Daftar Pustaka

- Cangara, Hafied, 2003, *Pengantar ilmu komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Djelantik, Sukawarsini, 2008, *Diplomasi Antara Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Shoelhi, Mohammad, 2011, *Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Irsan, Abdul, 2010, *Peluang dan Tantangan Diplomasi Indonesia*, Jakarta: Himmah Media Utama
- May Rudy, Teuku, 2005, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Internasional*, Bandung: PT.Refika Aditama
- Wonda, Sendius, 2009, *Jeritan Bangsa Rakyat Papua Barat Mencari Keadilan*, Yogyakarta: Galangpress

Pramudhita, Reinaldy Agung, 2011, *Strategi Komunikasi Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Dalam Membangun International Relationship*, Bandung: Unisba

www. Tribun-timur.com

Suara Pembaruan, 16 Oktober 2009 hal.14

<http://www.tabloiddiplomasi.org> diakses pada tanggal 22 April 2012 pk. 09.20

<http://www.kemlu.go.id> diakses pada tanggal 21 April 2012 pk. 13.00

Jurnal Penelitian Politik Vol.3 No.1 tahun 2006, www. Politik.lipi.go.id

Lampung Post.com tanggal 21 April 2012, diakses tanggal 22 April 2012 pk.18.55



# MANAJEMEN KOMUNIKASI KONFLIK DALAM RANGKA MENGATASI POTENSI KONFLIK SUMBER DAYA ALAM UNTUK INTEGRASI SOSIAL

**Inda Fitryarini dan Hairunnisa**

## **Pendahuluan**

Dalam rangka menata upaya harmoni sosial dan keserasian sosial untuk integrasi bangsa, diperlukan kajian tentang situasi dan peristiwa konflik pada masa lalu beserta perkembangan dan upaya penanggulangannya. Kajian itu diperlukan guna mendapat masukan positif agar upaya pemeliharaan harmoni sosial dan integrasi sosial pada pasca konflik dapat lebih berhasil. Antisipasi yang dilakukan bukan hanya sekedar menghentikan konflik tetapi juga mampu mengeliminir potensi konflik, agar di kemudian hari dapat terwujud suasana harmoni sosial dan dapat mencegah timbulnya kembali perang akibat konflik. Studi yang dilakukan Inda dan Nisa dari Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman dimaksudkan untuk menemukan Manajemen Komunikasi Konflik dalam rangka mengatasi potensi konflik sumber daya alam untuk integrasi sosial pada masa eksplorasi perkebunan (mengikuti istilah yang biasa digunakan dalam praktik industri ini) atau jika menggunakan terminologi teori konflik industri sumber daya alam adalah masa praproduksi (eksplorasi), produksi (eksploitasi) maupun pascaproduksi (pascaeksploitasi). Identifikasi kebutuhan perangkat kelembagaan dalam manajemen konflik dilakukan untuk menciptakan pemahaman bersama antar *stakeholder* terkait.

Sampai saat ini, masih banyak daerah yang kurang tepat dalam mengelola kebijakan publik yang dapat menimbulkan kerawanan konflik. Konflik antara pemerintah dengan masyarakat maupun swasta secara tidak sadar telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam aktivitas perlindungan masyarakat selama ini. Hal yang perlu dikhawatirkan,

apabila konflik itu berkepanjangan dan dibiarkan berlarut-larut dapat mengganggu stabilitas nasional atau daerah. Untuk itulah diperlukan upaya penanganan yang terintegrasi antarsektor di daerah dalam rangka menciptakan perdamaian dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Salah satu konflik yang sering terjadi akhir-akhir ini adalah konflik pertanahan. Konflik pertanahan telah berlangsung sejak zaman kolonial hingga saat ini, khususnya dalam areal tanah perkebunan yang berasal dari konsensi yang diberikan Sultan kepada perusahaan perkebunan (*onderdeming*) di atas tanah ulayat. Hak konsensi berubah menjadi hak *erfpacht* dan kemudian berubah menjadi hak guna usaha. Peristiwa hukum ini telah menghilangkan kedudukan hak ulayat masyarakat adat sehingga menimbulkan konflik baik vertikal maupun horisontal. Laporan tentang data kekerasan dan konflik agraria yang dikeluarkan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) pada tahun 2011 menyebutkan ada 163 konflik agraria di seluruh Indonesia atau terjadi peningkatan drastis jika dibandingkan pada 2010 (106 konflik). Sebanyak 22 petani atau warga yang tewas di wilayah-wilayah sengketa dan konflik agraria. Konflik yang terjadi melibatkan lebih dari 69.975 keluarga, sementara luas areal konflik mencapai 472.048,44 hektare. Dari 163 kasus yang terjadi, 97 kasus terjadi di sektor perkebunan (60%), 36 kasus di sektor kehutanan (22%), 21 kasus terkait infrastruktur (13%), delapan kasus di sektor tambang (4%), dan satu kasus terjadi di wilayah tambak atau pesisir (1%) (sumber: <http://www.seputar-indonesia.com>).

Kasus konflik sosial berkaitan dengan sumber daya alam non migas juga menjadi potensi konflik di Kalimantan. Kalimantan merupakan pulau terluas kedua di Indonesia yang luasnya hampir dari wilayah Indonesia (dengan luas wilayah 743.330 km<sup>2</sup>), dan terletak di sebelah utara Pulau Jawa dan di sebelah barat Pulau Sulawesi. Secara keseluruhan pulau yang disebut Borneo ini terbagi atas 3 (tiga) wilayah, yaitu Brunei, Indonesia, dan Malaysia. Wilayah Kalimantan terbagi dalam 4 (empat) propinsi yaitu Kalteng, Kaltim, Kalsel, dan Kalbar. Secara demografi, Pulau Kalimantan dihuni berbagai suku bangsa baik asli maupun pendatang, seperti Suku Tidung dan Bugis (Kaltim), Suku Dayak Sampit dan Madura (Kalteng), Suku Melayu, Sambas, dan Jawa (Kalbar), serta Suku Dayak Meratus, dan Makasar (Kalsel). Adanya kemajemukan dalam tatanan masyarakat di Pulau Kalimantan dapat menimbulkan



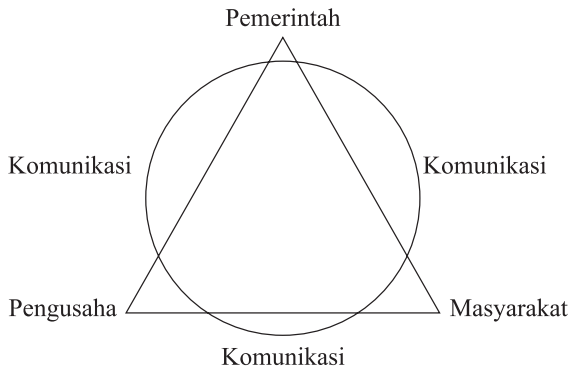
dampak negatif, salah satunya terjadinya potensi konflik yang dilakukan antara penduduk asli dengan kelompok pendatang, sesama pihak pendatang, atau konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Permasalahan hubungan antara pendatang dengan masyarakat setempat pada umumnya berpusat pada masalah persaingan untuk merebutkan sumber-sumber daya. Masyarakat setempat (penduduk asli) melihat dirinya sebagai tuan rumah serta pemilik atas sumber daya-sumber daya yang ada di dalam wilayahnya. Bagi para pendatang, keberadaannya hanya dilihat sebagai tamu.

Beberapa konflik yang terjadi di Kalimantan salah satunya adalah konflik sengketa lahan antara pihak perusahaan dan masyarakat. Tragedi Mesuji yang mencuat pada pertengahan Nopember 2011 lalu hanyalah bagian kecil dari bara konflik pertanahan Indonesia (sumber: Antara.com). Sebuah potret pilu kekerasan berbasis sengketa agraria terhadap masyarakat petani miskin pedesaan oleh suatu kolaborasi 'tangan-tangan' pemilik modal (perkebunan dan tambang) dan negara (beserta aparaturnya) yang memuncak pada kasus Mesuji dan Bima. Motif dari kasus konflik dengan petani ini hampir sama, yakni karena adanya perampasan lahan sawit warga oleh pengusaha dan sumber daya alam secara umum.

Keadaan tersebut juga dialami oleh Propinsi Kalimantan Timur yang selama ini dikenal kondusif. Potensi konflik di Kaltim masih sangat besar. Beberapa kasus yang terjadi mulai dari kasus Nunukan, Tarakan, Panajam Paser Utara (PPU) dan yang terbaru di Kutai Barat menunjukkan bahwa potensi konflik di daerah lain pun masih sangat terbuka. Konflik yang terjadi di Tarakan, Penajam Paser Utara, dan Balikpapan adalah contoh kejadian yang merusak integrasi sosial dan memunculkan ketidaktenangan masyarakat. Lebih-lebih, ketika maraknya pembebasan lahan masyarakat untuk industri perkebunan maupun pertambangan, potensi konflik semakin terbuka lebar. Hingga saat ini terdapat 742 kasus atau sengketa lahan akibat tumpang tindih lahan terkait pelaksanaan serta kesuksesan program pembangunan perkebunan di Kaltim. Kasus terakhir yang terjadi di wilayah Kalimantan Timur adalah konflik perebutan lahan perkebunan kelapa sawit yang terjadi di Muara Tae (28/10/11), sebuah kampung yang terletak di Jempang, Kutai Barat, Kalimantan Timur, terdesak dan terancam oleh aktivitas perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara. Kali ini melibatkan 2 (dua)

kelompok warga Dayak Benuaq dengan PT Munte Waniq Jaya Perkasa (<http://www.beritalingkungan.com>).

Banyak disinyalir terjadinya disharmoni sosial tersebut dikarenakan kurang efektifnya manajemen komunikasi antara pemimpin dengan masyarakat khususnya pihak pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Kehidupan harmoni di masyarakat akan sulit tercipta akibat munculnya ketegangan sosial yang melahirkan konflik intern. Berikut gambar hubungan segitiga antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat.



**Gambar 2.2. Hubungan Segitiga**

(Sumber: olahan penulis)

### **Konsep Manajemen Komunikasi Konflik**

Pengertian manajemen komunikasi konflik perlu didefinisikan secara utuh. Sebelum kita mendiskusikan konsep manajemen komunikasi konflik maka penulis perlu mendefinisikan secara terpisah lebih dahulu, yaitu: manajemen, komunikasi, dan konflik. Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan berpengaruh terhadap potensi timbulnya konflik. Dengan semakin marak dan meluasnya konflik akhir-akhir ini, merupakan suatu pertanda menurunnya rasa nasionalisme di dalam masyarakat.

Aman Saputra (2009:1) menjelaskan bahwa konflik timbul karena adanya ketidaksesuaian dalam hal proses-proses sosial. Secara teoritik, konflik sering didefinisikan sebagai sesuatu kondisi yang menunjukkan adanya pertentangan dua pihak atau lebih yang saling berbeda pandangan atau kepentingan. Konflik merupakan suatu bentuk perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas dan sebagainya. Konflik sering dipandang sebagai

sesuatu yang bersifat negatif, hal ini karena melihat dari dampak dari konflik yang bersifat kekerasan (seperti perang dan sebagainya) sering menunjukkan kerusakan dan kerugian yang bersifat materi dan non materi. Konflik sering dianggap seb, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain (Terry, 2005).

Menurut Lawrence A. Appley (Tommy, 2009: 122), "*management is the art getting things done through the effort of other people*". Menurut Oey Liang Lee, manajemen adalah seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengontrolan atas *human and national resources* untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu. Inti dari manajemen adalah suatu program yang dibuat secara terencana, terorganisir, dan terimplementasi secara efektif dan efisien, serta di evaluasi untuk mencapai tujuan tertentu melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.

Komunikasi adalah suatu proses interaksi yang mempunyai arti antara sesama manusia (Delton E, Mc Farland). Hovland, Janis dan Kelley (1953) dalam Tommy Suprpto (2009: 6) mendefinisikan komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimuli dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya (khalayak). Definisi ini memberikan penekanan bahwa kegiatan komunikasi yang dilakukan tersebut mempunyai tujuan yakni mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya yang menjadi sasaran komunikasi. Melalui komunikasi manusia membangun diri dan lingkungannya. Melalui komunikasi peradaban manusia bisa maju, sebaliknya melalui komunikasi peradaban manusia dapat mengalami kemunduran

Willem Nikson (2009: 14) kerusuhan atau konflik sosial adalah suatu kondisi di mana terjadi huru-hara atau kerusuhan atau perang atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun organisasi tertentu. Indonesia sebagai negara kesatuan pada dasarnya dapat mengandung potensi kerawanan akibat keanekaragaman suku bangsa, bahasa, agama, ras dan etnis golongan, hal tersebut merupakan faktor yang agak sesuatu yang bersifat traumatik dan mengganggu stabilitas atau keserasian yang menjadi cita-cita ideal masyarakat.

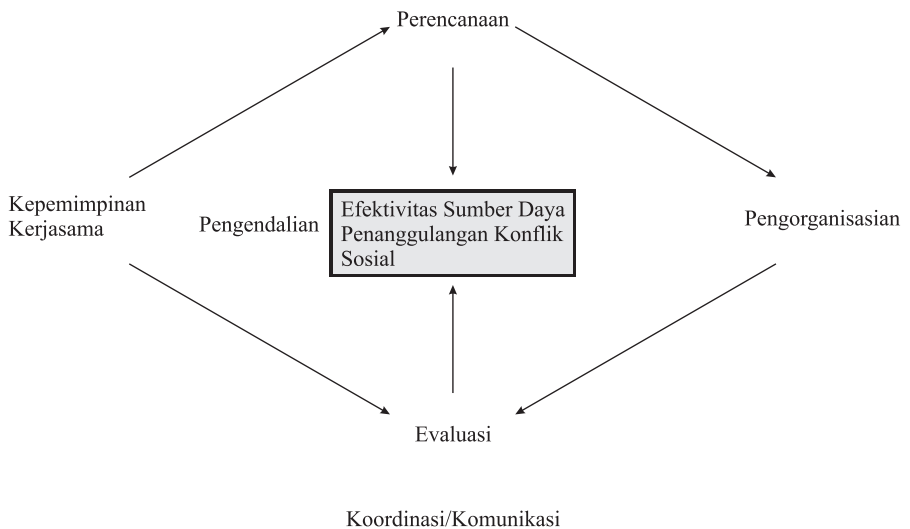
Wirawan dalam bukunya tentang Manajemen Konflik (2010) mendefinisikan konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik. Undang-undang No. 24 tahun 2007 mengategorikan konflik sosial sebagai bencana. Dalam UU tersebut, bencana dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: bencana alam, non alam, dan bencana sosial. Bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia seperti teror dan konflik sosial.

Dikatakan sebagai bencana sosial sebab konflik timbul sebagai akibat dialektika tesis - antitesis - sintesis dalam perspektif perkembangan (juga kemunduran) peradaban manusia. Peradaban dimaksud adalah aneka produk dari setiap jenis tindakan, kebijakan maupun intervensi yang dilakukan oleh tiga pilar utama penyangga tata dunia saat ini yaitu pilar politik [negara], pilar ekonomi (pasar) dan pilar sosial (masyarakat sipil) berikut perubahan sosial yang menyertainya sebagai konsekuensi langsung-logis atas tindakan, kebijakan serta intervensi itu sendiri. Dengan kata lain, konflik sebagai bencana sosial adalah suatu peristiwa yang dapat mengganggu stabilitas atau keserasian sosial yang menjadi cita-cita ideal masyarakat. Konflik yang kita ketahui mungkin hanya yang dapat dilihat secara kasat mata, ternyata banyak konflik yang terjadi namun tidak terlihat sebagai suatu konflik, maka dari itu diperlukan manajemen komunikasi konflik agar konflik mampu menghasilkan sesuatu yang positif.

Manajemen konflik, menurut Robinson dan Clifford (1974), merupakan tindakan konstruktif yang direncanakan, digerakkan, dan dievaluasi secara teratur atas semua usaha demi mengakhiri konflik. Manajemen komunikasi konflik merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (*interests*) dan interpretasi. Bagi pihak luar (di luar yang berkonflik) sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi efektif di antara pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga.

Inti dari manajemen komunikasi konflik dalam hal ini adalah merupakan pengaturan langkah-langkah penyelesaian konflik sosial yang melibatkan proses komunikasi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengendalian sampai dengan evaluasi yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Dalam manajemen komunikasi konflik tersebut diperlukan pula kepemimpinan yang solutif dan adaptif terhadap krisis konflik.

Pernyataan di atas dapat disederhanakan dalam model sebagai berikut:



**Gambar 2. 3. Model Manajemem Komunikasi Bencana**

Sumber: olahan peneliti diadaptasi dari model manajemen komunikasi bencana (Lestari,Puji:2009).

### **Teori Penyebab Konflik dan Sumber Konflik**

Dari mana sumber konflik? Konflik biasanya bersumber dari beberapa aspek seperti: adanya perubahan sosial, perbedaan kewenangan (otoritas), perbedaan kepentingan, dan perbedaan kultural. Dalam penelitian ini, terjadinya konflik lebih disebabkan oleh perubahan sosial dan konflik kepentingan.

Teori konflik yang dicetuskan Karl Marx memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Bermula dari pertikaian kelas antara kelompok yang menguasai modal atau pemerintahan dengan kelompok yang tertindas secara materiil, sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori ini berprinsip bahwa konflik sosial dan perubahan sosial selalu melekat pada struktur masyarakat. Teori ini menilai bahwa sesuatu yang konstan atau tetap adalah konflik sosial, bukan perubahan sosial. Perubahan hanyalah akibat dari adanya konflik, konflik berlangsung terus-menerus maka perubahan akan terus mengikutinya.

Gambaran Dahrendorf mengenai asumsi-asumsi utama dalam konflik berdasarkan teori konflik adalah:

1. Setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan, yang mana perubahan akan ada dimana saja;
2. Disensus dan konflik terdapat dimana-mana;
3. Setiap unsur masyarakat memberikan sumbangan pada disintegrasi dan perubahan masyarakat;
4. Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan beberapa orang anggota terhadap orang lain.

Konflik sosial berkaitan dengan perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotongroyongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang

pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi secara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada.

Teori *Human Relations* menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran teori ini adalah untuk meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok yang mengalami konflik, serta mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya. *Human relations* dalam arti luas, ialah interaksi antara seseorang dengan orang atau kelompok lain, yang menyangkut hubungan manusiawi, etika atau moral, aktivitas sehari-hari pada umumnya bertujuan untuk memperoleh kepuasan bagi kedua belah pihak. Hal ini lebih menyangkut aspek komunikasi sosial kemasyarakatan yang berlandaskan etika dan moral dalam berinteraksi sesamanya. Teori hubungan manusiawi (Elton Mayo dalam Littlejohn) mengemukakan bahwa suatu kelompok memiliki kehidupannya sendiri lengkap dengan segala adat kebiasaan, norma, dan kontak sosial yang efektif atas anggotanya.

Pearce dan Cronen menghadirkan Teori *Coordinated Management of Meaning* (CMM) sebagai sebuah teori yang ditujukan untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik. Mereka menyatakan bahwa "*quality of our personal lives and of our sosial worlds is directly related to the quality of communication in which we engage*". Asumsi ini dikembangkan berdasarkan pandangan mereka yang menganggap bahwa percakapan adalah *basic material* yang membentuk dunia sosial. Teori CMM umumnya banyak digunakan dalam konteks mediasi, terapi keluarga, dan konflik.

Untuk mencapai keseimbangan dalam hubungan antar manusia, Talcott Parson (1951) melalui pendekatan struktural fungsional menekankan keharmonisan, keserasian, kepatuhan, stabilitas, dan integrasi. Fungsionalisme struktural melihat masyarakat dan pranata sosial sebagai sistem di mana seluruh bagiannya saling tergantung satu sama lain dan bekerjasama guna menciptakan keseimbangan. Dalam hal

ini “keseimbangan” merupakan unsur kunci utama dengan menekankan pentingnya kesatuan masyarakat dan sesuatu yang dimiliki bersama oleh anggotanya. Gerakan sosial dianggap sebagai sesuatu yang “negatif” karena dapat menimbulkan konflik yang dapat mengganggu keharmonisan dalam masyarakat.

Guna mengetahui apakah yang terjadi adalah konflik atau bukan, kita harus mengetahui apa yang menjadi penyebab dari konflik. Sumber penyebab konflik, antara lain:

1. Konflik Data: Konflik data disebabkan masalah yang menyangkut keabsahan dan penggunaan metode analisis data yang dipergunakan untuk mengambil keputusan. Contoh dari konflik data adalah konflik mengenai hasil Pemilu (Pemilihan Umum). Penyebab konflik data adalah kurangnya informasi, salah informasi (*missinformation*), perbedaan pandangan mengenai apa yang relevan, perbedaan memaknai data, perbedaan prosedur penilaian.
2. Konflik Hubungan Sosial: Konflik ini terjadi dalam kerangka jalinan atau interaksi sosial antarpribadi, antarkomunitas, dan antar-kelompok. Konflik ini terjadi disebabkan oleh emosi-emosi yang kuat, salah persepsi atau stereotip, komunikasi yang buruk atau salah komunikasi, perilaku negatif yang berulang-ulang.
3. Konflik Nilai: Konflik terjadi akibat perbedaan sistem nilai atau keyakinan yang dianut oleh pihak-pihak terkait. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kriteria dalam mengevaluasi ide-ide atau perilaku, tujuan-tujuan nilai yang eksklusif secara intrinsik, perbedaan cara hidup, ideologi, dan Agama.
4. Konflik Kepentingan: Konflik kepentingan terjadi akibat persaingan kepentingan yang dirasakan menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi atau yang secara nyata memang tidak berkesesuaian. Konflik ini disebabkan oleh kompetisi yang dirasakan atau nyata, kepentingan Substantif, kepentingan Prosedural, kepentingan Psikologis.
5. Konflik Struktural: Terjadi ketika ada ketimpangan dalam melakukan akses kontrol terhadap sumberdaya, seperti: tanah, tambang, sumber air, dan hutan. Konflik struktural ini disebabkan karena adanya pola-pola perilaku atau interaksi yang destruktif, ketimpangan kontrol, kepemilikan, atau distribusi sumberdaya, faktor geografi, fisik, atau lingkungan yang menghalangi kerjasama, kendala waktu, ketimpangan kekuasaan, dan otoritas (Sumber: Liliweri, Alo: 2005).



Dari beberapa poin yang telah diuraikan terdahulu, maka diperlukan manajemen komunikasi konflik yang digunakan untuk mengatasi potensi konflik atau pertentangan di tengah masyarakat atau golongan sehingga tidak mengganggu situasi dan kondisi suatu masyarakat atau golongan yang dapat menimbulkan perpecahan (disintegrasi), kerusuhan, tindakan negatif yang dapat merugikan golongan atau individu tersebut.

Dalam sosiologi, integrasi sosial dikonsepsikan sebagai suatu proses ketika berbagai kelompok sosial yang ada dalam masyarakat saling menjaga keseimbangan untuk membentuk kedekatan hubungan, baik yang bersifat sosial, ekonomi maupun politik. Kelompok-kelompok sosial itu dapat terwujud atas dasar agama atau kepercayaan, suku, ras, dan kelas.

Kelompok-kelompok sosial yang terintegrasi dapat membentuk *sosial networks* (jaringan-jaringan hubungan) dalam sebuah unit sosial yang relatif akrab. Hubungan sosial yang berkaitan dengan sumber daya alam secara teoritis dapat membentuk dua model struktur sosial. Model yang pertama lebih bersifat elitis, dalam arti kelompok elit atau penguasa berada di puncak strata. Mereka sangat leluasa bahkan memonopoli penafsiran atas manfaat dan fungsi sumber daya alam, dan kurang memberi peluang pada kemungkinan berkembangnya keragaman pemahaman tentang manfaat dan fungsi sumber daya alam. Sebaliknya, model yang kedua lebih berstruktur horisontal, dalam arti membuka kesempatan berdialog, mengembangkan komunikasi dua arah dan menghargai kemungkinan terjadinya perbedaan pemahaman sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang melembaga dalam masyarakat.

Penyebab timbulnya disintegrasi bangsa juga dapat terjadi karena perlakuan yang tidak adil dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah khususnya pada daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya atau kekayaan alamnya berlimpah atau berlebih, sehingga daerah tersebut mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Kebijakan yang telah dirumuskan secara benar dan prosedural ada kalanya dihadapkan pada persoalan yang kurang tepat dalam pelaksanaannya.

## Manajemen Komunikasi Konflik dalam Rangka Penguatan Integrasi Sosial

Kabupaten Paser menjadi ikon Kalimantan Timur (Kaltim) dalam perkebunan kelapa sawit sejak tahun 1980-an. Kabupaten Paser menjadi kabupaten pertama di bumi Kaltim dalam pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan perkebunan milik negara (BUMN). Saat ini, sebagian perkebunan rakyat sedang siap untuk diremajakan karena kondisinya tidak produktif lagi atau sudah tua dan sebagiannya. Peremajaan (*replanting*) ini banyak menimbulkan masalah bagi petani kelapa sawit karena petani menganggur kurang lebih 3-5 tahun untuk bisa menanam kembali lahan kelapa sawitnya. Program *replanting* perkebunan kelapa sawit pertama kali diterapkan di Desa Sawit Jaya Kabupaten Paser.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Kalimantan Timur tidak memiliki desain pengelolaan perkebunan yang lebih baik. Perusahaan dan pemerintah hanya menginginkan pembukaan lahan perkebunan tetapi tidak pernah memikirkan persoalan petani kelapa sawit. Ada dua hal yang menjadi masalah dalam perkebunan kelapa sawit saat ini. Masalah pertama adalah persoalan konflik sengketa lahan perkebunan antara perusahaan dan masyarakat. Masalah yang kedua adalah tata kelola perkebunan yang sudah dibangun termasuk persoalan kesejahteraan petaninya. Kalimantan Timur belum selesai dalam dua masalah tersebut tetapi terus rakus membuka perkebunan kelapa sawit. Pemerintah dan juga perusahaan sebaiknya melakukan renegosiasi terhadap persoalan-persoalan petani dan masyarakat lokal. Perkebunan kelapa sawit tidak dinilai sebagai ambisi untuk mencapai Indonesia pengeksport CPO terbesar di dunia semata dan pemerintah sebagai pelayan kepentingan imperialisme.

Sejak awal pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Paser, telah muncul berbagai permasalahan dan dampak langsung terhadap masyarakat setempat khususnya petani plasma maupun petani swadaya, seperti:

1. Pengadaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit tidak memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan hak-hak masyarakat setempat;
2. Pembagian lahan untuk kebun plasma kelapa sawit tidak adil, tidak transparan, dan tidak sesuai dengan janji serta kesepakatan maupun aturan yang ada;

3. Penentuan beban besarnya kredit tanpa melibatkan petani plasma secara partisipatif;
4. Petani plasma tidak dilibatkan secara dalam proses penentuan harga Tandan Buah Segar (TBS) sehingga harga TBS tidak merupakan hasil musyawarah dan cenderung merugikan petani.
5. Masyarakat setempat tidak mendapat kesempatan untuk mengisi lapangan kerja yang tersedia di kebun inti dan pabrik pengolahan CPO;
6. Kondisi jalan sarana transportasi dan penghubung menuju kebun plasma dan kebun swadaya tidak mendapat perhatian pemeliharaan oleh perusahaan dan pemerintah;
7. Alokasi dan penempatan letak kebun plasma yang dibuat oleh perusahaan tidak sesuai dengan lahan yang diserahkan oleh masyarakat lokal;
8. Konflik sosial baik antara masyarakat dengan perusahaan maupun masyarakat dengan pemerintah, dan masyarakat dengan sesama anggota masyarakat lainnya, terjadi di semua tempat tidak mendapat perhatian dan penyelesaian yang serius dari pihak pemerintah maupun perusahaan;
9. Pencemaran lingkungan oleh limbah pabrik CPO dan bahan kimia yang digunakan dalam pemeliharaan kebun kelapa sawit terhadap air sungai, tanah dan udara. Hal ini dapat merugikan kehidupan masyarakat sekitar sungai, contoh kasus sungai Soi (Kampung Jangkar dan pesisir pantai);
10. Pihak perusahaan tidak menghormati dan melaksanakan hukum adat setempat maupun hukum negara.

Berikut disajikan data (diolah) konflik sosial sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Paser:

**Tabel 2.1. Konflik Perkebunan Kelapa Sawit Skala Besar Di Kabupaten Paser**

No	Desa	Tahun Masuk	Konflik
1	Desa Sandeley, Kecamatan Kuaro	1982	Tahun tanam 1983. Awal tahun 1999 masyarakat menuntut untuk pengembalian lahan.
2	Desa Bekoso Kecamatan Paser Balengkong	1983 awalnya pembibitan karet oleh Disbun) . tahun 1988 dialihkan ke PTPN VI untuk pembibitan sawit	Lahan masyarakat untuk pembibitan kelapa sawit oleh PTPN VI (sekarang PTPN XIII), tahun 1991 terjadi perubahan dari plasma menjadi inti, inilah yang menyebabkan adanya tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat untuk pengembalian lahan sejak akhir tahun 1999.
3	Desa Modang, Kecamatan Kuaro	1985	Tahun tanam 1986/1987. Akhir tahun 1999 masyarakat menuntut untuk pengembalian lahan
4.	Desa Paser Mayang, Kecamatan Kuaro	1985	Penjaluran tanpa salam Agustus 1985, awal tahun 1986 lahan masyarakat mulai digusur oleh PTPN VI melalui Sub Kontraktor CV. Anggi Utama dengan pengawalan dari aparat ABRI bernama POM Pratu Sardi dari Kodim Tanah Grogot. Kemudian janji kebun Plasma oleh Pemerintah tidak pernah dipenuhi, inilah yang menyebabkan adanya tuntutan masyarakat untuk pengembalian lahan sejak akhir tahun 1999.
5.	Kampung Sindet, Desa Lembok (sekarang Lombok) Kecamatan Long Ikis	1995	Tahun 1995 terjadi perebutan lahan masyarakat dengan PTPN VI (sekarang PTPN XIII), yang diadu dengan pendatang/buruh PTPN dari NTB/ NTT.  Tahun 2000 gabung dengan 8 desa lainnya untuk penuntutan.
6.	Sepan, Kecamatan Penajam (dulu) Kabupaten Paser, kini Kecamatan Penajam Kabupaten PPU	1996	Lahan Masyarakat vs Perusahaan (PT) Dwi Mekar Persada (DMP) kontraktor TKA yang dijadikan kebun sawit (inti) Tahun 2000 pernah terjadi pemortalan Tahun 2004 terjadi perundingan-perundingan antara masyarakat dengan pemerintah PPU Sampai saat (2006) ini kasus belum diketahui tuntas atau tidak (bisa kontak Jhony di Sepan)

7.	Desa Lempesu Kecamatan Paser Balengkong	(tdk terdata)	(tdk terdata)
8.	Desa Damit Kecamatan Paser Balengkong	(tdk terdata)	(tdk terdata)
9.	Desa Lolo, Kecamatan Kuaro	(tdk terdata)	(tdk terdata)
10.	Desa Suatang Bulu, Kecamatan Paser Balengkong	(tdk terdata)	(tdk terdata)
11.	Desa Pait Jaya (sekarang Sawit Jaya), Kecamatan Long Ikis	2000	Terjadi pemortalan Tahun 2000 gabung dengan 8 desa lainnya untuk penuntutan.
12.	Desa Muara Pias, Munggu, Mendig Bakti, Mendig Karya; Kecamatan Long Kali	2005	Penyalahgunaan HGU PTPN XIII seluas 300 ha, pada kenyataannya PTPN membuka seluas 788 ha. Masyarakat melakukan aksi pada Desember 2005 dan sampai saat ini belum selesai.
13.	Kecamatan Batu Enggau; Kerang		- Penyerobotan tanah masyarakat untuk perkebunan sawit oleh PTPN. - Kasus sampai saat ini belum selesai. - Masyarakat sempat melakukan aksi. - Muncul konflik horizontal baru (masyarakat vs masyarakat)

Sumber: PADI Indonesia, catatan pendampingan kasus sawit (tahun 1999 – 2005) yang telah diolah.

## Sejarah Eksploitasi Sumberdaya Alam di Kalimantan Timur

Kata negara, kata tanah air adalah kata yang secara jelas mencerminkan kondisi secara fisik geografis Indonesia. Ditinjau dari luas wilayah Indonesia, wilayah daratan saat ini terdiri dari beribu-ribu pulau lebih kurang 17.506 seluas 1,8 juta km persegi (sumber: <http://www.bakorkamla.go.id>). Wilayah Indonesia yang sangat luas tersebut, banyak mengandung beraneka ragam kekayaan sumberdaya alam. Sumber daya alam (biasa disingkat SDA) adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya. Kategori yang tergolong didalamnya tidak hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam,

air dan tanah. Inovasi teknologi, kemajuan peradaban dan populasi manusia, serta revolusi industri telah membawa manusia pada era eksploitasi sumber daya alam sehingga persediannya terus berkurang secara signifikan, terutama pada satu abad belakangan ini.

*Kalimantan* adalah nama bagian wilayah Indonesia di Pulau Borneo Besar; yaitu pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan Seluruh Pulau Irian. Kalimantan meliputi 73% massa daratan Borneo. Terdapat empat propinsi di Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, luas seluruhnya mencapai 549.032 km<sup>2</sup>. Luas ini merupakan 28% seluruh daratan Indonesia. Kalimantan Timur saja merupakan 10% dari wilayah Indonesia. Bagian utara P. Borneo meliputi negara bagian Malaysia yaitu Serawak dan Sabah, dan Kesultanan Brunei Darusallam. Batasan wilayah secara politik yang ada sekarang ini mencerminkan kepentingan penjajah masa lampau.

Potensi sumber daya alam di Kalimantan Timur, khususnya sangat besar. Pertambangan banyak terdapat di pegunungan dan perbukitan di bagaian tengah dan hulu sungai. Deposit pertambangan yang cukup potensial adalah emas, mangan, bauksit, pasir kwarsa, fosfat, mika, dan batubara. Tambang minyak dan gas alam cair terdapat di dataran rendah, pantai, dan lepas pantai. Kegiatan perkebunan pada umumnya berada pada wilayah di perbukitan dataran rendah. Perkebunan yang potensi dan berkembang adalah: sawit, kelapa, karet, tebu, dan perkebunan tanaman pangan. Usaha perkebunan ini sudah mulai berkembang. Banyak investor mulai datang dari negara jiran, karena keterbatasan lahan di negara Jiran untuk dikembangkan secara ekonomis dengan memanfaatkan lahan yang sesuai. Sekarang ini pengembangan perkebunan juga mengancam kawasan perbukitan dataran tinggi. Hutan dan tanah dusun juga dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Industri Perkebunan Besar di Kalimantan bermula di Kalimantan Barat sekitar awal tahun 1980-an, oleh PTPN, sebuah BUMN. Di Kalimantan Barat di pegang oleh PTP atau PTPN VII dengan kantor direksi di Pontianak. Dari sana muncul fenomena Sanggau sebagai Primadona Sawit. Lahan yang digunakan untuk kegiatan budidaya perkebunan ini dapat dikatakan sebagai APL (Area Penggunaan Lain) yang berasal dari kawasan hutan. Tahun 2006 di Kalimantan Tengah telah dialokasikan areal seluas 4,5 juta ha. untuk perkebunan Besar

Swasta. Saat ini terdapat 104 PBS operasional dengan seluas 1,7 juta ha dan 196 PBS belum operasional seluas 2,8 juta ha.

Kalimantan Selatan berencana membangun seluas 1,1 juta ha, di mana 400 ribu ha. sudah operasional dan peruntukan baru untuk perkebunan sawit seluas 700 ribu ha. Di Kalimantan Timur dilakukan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan seluas 2,6 juta ha (2005), di mana 4,09 juta ha. yang diperuntukkan bagi 186 perusahaan, namun yang aktif 34 perusahaan. Sementara Kalimantan Barat (Juli 2006) telah memberikan izin lokasi perkebunan kelapa sawit seluas 1.461.648 ha kepada 79 perusahaan. Dari jumlah itu seluas 127.100 ha. merupakan kawasan hutan yang dialihfungsikan atau konversi. Dengan demikian total di Kalimantan dibangun perkebunan tidak kurang dari ± 10 juta hectare (Sumber: Analisa Citra landsat, 2003).



**Gambar 2.4. Perkebunan Kelapa Sawit**

Hasil penelitian Inda dan Nisa (2012) di Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser tentang manajemen komunikasi konflik di daerah tersebut masih sangat kurang baik. Pembangunan perkebunan kelapa sawit sering tersandung permasalahan penggunaan dan alih fungsi lahan. Konflik antara perusahaan dengan masyarakat adat atau lokal lebih banyak karena hal ini. Konflik tersebut disebabkan karena pada awal masuknya perusahaan perkebunan (PTPN VI sekarang PTPN XIII), pihak PTP maupun pemerintah daerah tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu ke masyarakat lokal.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit makin massif sejak tahun 2006, ketika kebijakan tentang penggunaan dan produksi BBN (Bahan Bakar Nabati) dari kelapa sawit dikeluarkan oleh presiden RI melalui Inpres tahun 2006, yang kemudian diikuti dengan makin kencangnya program pemerintah mengenai energy terbarukan ini. Saat ini rencana tersebut tak berjalan mulus didalam negeri (minimnya kendaraan yang berbahan baku energi biofuel dan hampir tak adanya perusahaan yang memproduksi Biofuel di Indonesia), namun fakta membuktikan bahwa ekspansi kelapa sawit besar-besaran berlindung dibalik kebijakan ini. Akibatnya adalah ruang-ruang rakyat makin menyempit seiring makin membesarnya ruang-ruang korporasi skala besar dan skala international menguasai lahan-lahan subur hampir diberbagai pelosok negeri ini. Rakyat harus puas dengan hanya mengelola lahan seluas 2 Ha/KK di desa Sawit Jaya dan desa Lombok , harus rela jika lahan-lahan subur tak lagi tersisa dan tersimpan bagi mereka.

Dari sisi perencanaan komunikasi, pihak PTPN XII sebagai apalis, belum mempunyai *grand design* khusus dalam mengatasi potensi konflik yang suatu saat kemungkinan terjadi. Berkaca dari konflik yang pernah terjadi, pihak apalis sebenarnya menyadari adanya potensi konflik di kedua desa tersebut. Perusahaan perkebunan tersebut hanya mengandalkan strategi komunikasi interpersonal, melalui pendekatan personal dengan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pesan yang disampaikan komunikator (pihak perusahaan perkebunan PTPN XIII) banyak mengalami hambatan dan belum terinternalisasi sesuai tujuan. Hambatan proses penyampaian pesan ini bisa berasal dari penerima pesan tersebut (*receiver barrier*). Hal ini lebih disebabkan karena sulitnya komunikasi (masyarakat lokal atau adat) dalam memahami pesan itu dengan baik.

Keadaan tersebut lebih disebabkan oleh rendahnya tingkat penguasaan bahasa, pendidikan, intelektual dan sebagainya yang terdapat dalam diri komunikan. Tingkat pendidikan petani perkebunan di kedua desa tersebut hanya setingkat Sekolah Dasar. Sudah diadakan sosialisasi tentang, misalnya sistem pembagian plasma dan inti perkebunan kelapa sawit oleh pihak PTPN XIII, masyarakat desa Sawit Jaya dan desa Lombok masih banyak yang kurang memahami dan mengakibatkan kesalahpahaman. Penggunaan media massa belum ada bahkan pihak PTPN XIII bisa dikategorikan "gagap teknologi".



Kesalahpahaman itu mengakibatkan ketegangan hubungan antara pihak pengusaha dan masyarakat kedua desa tersebut. Tuntutan demi tuntutan masih terjadi hingga saat ini. Kurang jelasnya informasi tentang program peremajaan misalnya, juga menjadi masalah baru bagi masyarakat desa Sawit Jaya. Pendekatan lain yang dilakukan pihak apalis yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan menjajaki opini publik yang sedang berkembang melalui dialog antar masyarakat. Dialog ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 bulan. Penggunaan media massa untuk mengetahui opini publik yang sedang berkembang belum diaplikasikan.

Pihak pemerintah desa Sawit Jaya dan desa Lombok juga tidak memiliki perencanaan khusus untuk mengatasi potensi konflik. Pada saat kasus sengketa lahan terjadi beberapa tahun lalu, pemerintah kedua desa tersebut mengaku tidak bisa berbuat apapun dengan kebijakan dari pemerintah Kabupaten. Kebijakan pembukaan perkebunan kelapa sawit bersifat vertikal. Pemerintah desa hanya menerima *memo* dari pemerintah kabupaten yang berisi untuk melancarkan pembukaan perkebunan sawit oleh PTPN XIII yang telah mengantongi HGU (Hak Guna Usaha). Terjadi tumpang tindih antara lahan masyarakat lokal dengan izin pembukaan lahan oleh pihak PTP. Penggusuran lahanpun terjadi dan inilah puncak konflik masyarakat dengan PTP akibat tidak adanya perencanaan komunikasi sebelumnya.

Hartini dan Kertasapoetra (1992) menyebutkan, bahwa konflik adalah cara untuk mencapai tujuan dengan melemahkan pihak lawan tanpa menghiraukan nilai dan norma yang berlaku. Dalam pandangan keduanya, konflik tidak semata-mata menyangkut kepentingan fisik, materialistik maupun kebendaan, namun juga berkaitan dengan penghargaan yaitu martabat, harga diri dan gengsi. Konflik sengketa lahan yang terjadi pada tahun 1995 di desa Sawit Jaya dan desa Lombok sudah diselesaikan tahun 2004. Penyelesaian konflik kedua desa tersebut dengan cara membahas permasalahan sengketa lahan dengan cara tripartit, yaitu antara pemerintah (eksekutif dan legislatif), pengusaha, dan masyarakat. Pada tahun 2002, penyelesaian konflik sengketa lahan dilakukan melalui proses-proeses perundingan dari berbagai pihak (petani, pemerintah daerah, dan PTPN XIII) bahkan juga melibatkan unsur polisi dan tentara yang ditugaskan ke desa. Penyelesaian konflik sengketa lahan sempat dilakukan hingga ke pemerintah pusat dengan didampingi LSM Walhi dan PADI.

## Kondisi Harmoni Sosial Saat ini di Desa Sawit Jaya dan Desa Lombok

Kondisi harmoni sosial di desa Sawit Jaya dan Desa Lombok Kecamatan Long Ikis pada saat penelitian dilakukan pada bulan Maret 2012 dalam keadaan kondusif. Hal ini dapat diketahui dari hasil pengamatan atau *observasi* dengan partisipasi secara langsung kepada masyarakat, wawancara dengan pihak Polres Kecamatan Long Ikis, Kepala Desa Sawit Jaya dan desa Lombok serta beberapa tokoh masyarakat di kedua desa tersebut serta diskusi kelompok terfokus dengan petani perkebunan kelapa sawit. Pada saat penelitian ini dilakukan, sedang terjadi konflik sengketa lahan perkebunan kelapa sawit antara pihak PTPN XIII dan masyarakat Kecamatan Long Kali desa Mendig Kabupaten Paser hingga melibatkan pihak kepolisian untuk pencegahan konflik yang lebih besar.

Berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dan masyarakat yang pernah menimbulkan konflik sengketa lahan, pada prinsipnya pihak warga masyarakat di kedua desa lokasi penelitian menginginkan transparansi tentang pengelolaan kelapa sawit baik dari sisi pembagian inti dan plasma maupun kebijakan peremajaan (*replanting*). Tindak kekerasan antar warga desa Lombok dan pihak perusahaan perkebunan yang pernah terjadi, menurut mereka hal itu bukan atau tidak ada kaitannya dengan sikap masyarakat yang mengarah pada terjadinya konflik. Dengan kata lain, penyebab terjadinya konflik bukan merupakan faktor yang sifatnya ideologis dalam kehidupan masyarakat desa Lombok. Para informan berpendapat bahwa faktor pemicu adanya penuntutan kepada pihak PTPN XIII semata-mata karena faktor ketiakpuasan atas janji pihak perusahaan dan ketidakpastian dari janji pemerintah.

Berdasarkan hasil *observasi* peneliti, ternyata masih ada permasalahan terkait sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Paser, yaitu Desa Mendig Kecamatan Long Kali. Sengketa lahan tersebut terjadi pada tahun 2005 dan sampai penelitian ini berlangsung, permasalahan tersebut belum selesai. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa hingga sekarang masyarakat desa Mendig masih mempermasalahkan sengketa lahan perkebunan dengan pihak PTPN XIII? Apa peran pemerintah dalam menangani kasus sengketa lahan tersebut yang jika dibiarkan berlarut-larut akan mengarah pada disharmoni sosial? Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tersebut, kiranya perlu dilakukan penelitian lanjutan.

## Konflik dan Perubahan Sosial

Konflik yang terjadi pada masyarakat desa Sawit Jaya dan desa Lombok lebih disebabkan karena kedua masyarakat desa tersebut sedang mengalami proses pembangunan dimana dapat dikatakan sebagai masyarakat yang berada di persimpangan atau masyarakat transisi, yaitu transisi dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Dalam situasi yang serba marjinal tersebut maka berkembangnya konflik dalam masyarakat sangat memungkinkan terjadi.

Hasil penelitian Departemen Sosial RI yang dilakukan di empat propinsi (Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah) menunjukkan bahwa konflik (perubahan sosial) pada tingkat yang paling parah, mengendurkan pranata sosial. Konflik adalah suatu klimaks dari suatu proses panjang dimana masuk dan berkembangnya "virus-virus sosial" ke dalam masyarakat. Konflik berat dalam wujud perusakan harta benda hingga nyawa manusia sebenarnya adalah hasil akumulasi proses sosial yang keropos. Perlunya memberdayakan pranata sosial dalam kerangka mencegah dan mengantisipasi terulang kembalinya konflik sosial (Muttaqin, 2002: 1).

Teori Penyelesaian Konflik (*Transformation Management Conflict*) dalam Gardiner, P.D. dan Simmons, J.E.L. (1995), menyatakan bahwa penyelesaian konflik melalui forum dialog. Forum dialog lebih membuka kesempatan untuk mendengar penjelasan masing-masing pihak yang berkonflik maupun pihak yang memendam permasalahan. Kepala desa masing-masing desa dalam obyek penelitian menyadari akan pentingnya forum dialog antara masyarakat, pemerintah, dan pihak perusahaan. Forum dialog tersebut diadakan 2 (dua) minggu sekali di balai desa guna menyerap aspirasi dan keluhan masing-masing pihak.

Selain mengaktifkan pranata sosial, peran media massa juga tidak bisa dikesampingkan. Jurnalisme damai dalam situasi konflik, pasca konflik maupun pra konflik sangat berpengaruh besar. Pada saat di wawancarai mengenai pentingnya keberadaan media massa sebagai media katarsis (penyampai uneg-uneg), kepala desa Sawit Jaya berpendapat bahwa keberadaan media massa justru tidak diperlukan. Mereka mengemukakan, jika semakin di *blow-up* oleh media akan menjadi konsumsi terhadap pembentukan opini publik, baik publik dalam negeri maupun luar negeri. Akibatnya muncul campur tangan yang meluas, ditanggapi kepentingan politik yang akhirnya perjuangan masyarakat

menjadi tidak murni. Hal tersebut wajar karena keadaan masyarakat di kedua desa tersebut masih tergolong tradisional dan belum mengenal perkembangan media massa. Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam anatomi konflik. Sebuah potensi konflik bisa membesar atau mengecil karena pengaruh media massa.

Manajemen komunikasi konflik adalah untuk memfasilitasi komunikasi terbuka dan partisipasi konstruktif dari pihak-pihak *local* untuk mencari pemecahan dari konflik yang berlangsung, pra konflik, dan pasca konflik. Instansi terkait yang berwenang menangani konflik sosial yang termasuk kejadian bencana sosial adalah pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang terbentuk pada tahun 2008, dan POLRI. Peran pihak kepolisian di kecamatan Long Ikis bisa dikatakan kurang maksimal. Hal ini terungkap dari hasil wawancara. Pihak Polres Long Ikis menyatakan tidak ada tindakan khusus untuk mencegah konflik sosial. Kepolisian menganggap bahwa pihaknya hanya bertugas menangani saat konflik sudah terjadi. Alih-alih mencegah, dalam sejumlah kasus polisi sering kali melakukan pembiaran karena dianggap situasi dalam keadaan kondusif.

## **Simpulan**

Sampai saat ini belum ada Undang-undang penanganan konflik sosial sengketa agraria yang dapat dijadikan pijakan dalam menangani konflik sosial. Hal ini karena peran setiap instansi, baik itu di tingkat nasional maupun daerah, telah diatur sesuai fungsi, tugas, dan kewenangannya. Masalah kekerasan atas petani miskin pedesaan lebih banyak dipersepsikan pada sudut pandang 'sektoralisme-tematik'; HAM, keamanan, masyarakat adat, pengalihan isu politik nasional, dan pelanggaran-pelanggaran hukum negara lainnya. Persepsi ini cenderung membias dari akar masalahnya, yakni ketimpangan penguasaan, pemilikan, dan peruntukan sumber-sumber agraria nasional. Satu bentuk ketimpangan struktural agraria yang nyata-nyata mengingkari mandat konstitusional baik UUD 1945 (khususnya Pasal 33) maupun TAP MPR No IX/2001 yang mengatur pengelolaan dan pengurusan sumber-sumber agraria dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Penulis sependapat dengan Eko Cahyono, Peneliti di Sajogyo Institute (Sains) Bogor (2012), pada praktiknya kekayaan alam, aset nasional, dan sumber penghidupan rakyat hanya dimiliki

oleh segelintir penguasa modal (baik pribumi maupun asing). Hal yang penting adalah adanya sensitifitas terhadap setiap potensi konflik dan sejauh mana setiap instansi ini menjalankan regulasi yang telah ada secara sungguh-sungguh dan maksimal melalui kepemimpinan yang tangguh.

## **Rekomendasi**

Adapun kebijakan yang diperlukan guna memperkuat upaya integrasi nasional adalah sebagai berikut:

1. Maksimalisasi peraturan yang sudah ada dan memperbaiki kinerja dan koordinasi aparat dalam menyelesaikan persoalan konflik dan atau mencegah timbulnya ketegangan sosial politik atau konflik;
2. Pemerintah diharapkan memfasilitasi upaya-upaya penguatan institusi kemasyarakatan sebagai wadah solusi konflik dan peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat demi pemahaman persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Memberdayakan penguatan kohesi sosial masyarakat melalui kegiatan seni, budaya, dan olahraga;
4. Pengembangan penanganan konflik yang mengutamakan harmoni sosial melalui optimalisasi dan pemberdayaan fungsi pranata-pranata adat lokal yang berkedibilitas tinggi;
5. Pemerintah daerah diharapkan memfasilitasi pengembangan media komunitas serta menjalin hubungan baik dengan pers;
6. Pengadaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara lebih luas untuk membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi yang lebih luas secara cepat dan akurat;
7. Pemerintah daerah diharapkan memfasilitasi untuk mendorong terciptanya masyarakat yang sadar informasi;
8. Pemerintah juga harus membangun hubungan kemitraan yang sinergis dengan media. Seharusnya, pemerintah memiliki media sendiri sebagai sarana komunikasi publik yang dapat digunakan sebagai sumber informasi penyeimbang atas media-media publik lain;
9. Melakukan koordinasi intensif dalam penerbitan ijin yang dilakukan para kepala daerah;
10. Membangun kelembagaan (Pranata) di setiap desa yang berakarkan nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa.

## Daftar Pustaka

- Alwi, Afrizan, 2006, *Sengketa Pertanahan dan Alternatif Pemecahan: Studi Kasus di Sumatera Utara*, Medan: Cahaya Ilmu.
- Aspikom, 2011, *Komunikasi Bencana*, Yogyakarta: Mata Padi Pressindo.
- BAKORKAMLA, 2009, *Studi Kasus Penyelesaian Konflik Kewenangan Di Laut Dalam Penegakan Hukum, Keselamatan dan Keamanan Serta Perlindungan Laut/Maritim*.
- Eduard dan Colin MacAndrews, 1978, *Peranan Komunikasi Massa dalam Pembangunan*, Yogyakarta: Gadjah Madja University Press.
- Effendy, Onong U, 1981, *Komunikasi dan Modernisasi*, Bandung: Penerbit Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1984, *Ilmu Komunikasi (teori+praktek)*, Jakarta: PT. Remaja Karya.
- Emery, Edwin, 1968, *Introduction to Mass Communications*. Second Edition, New York: Toronto.
- Gardiner, P.D. dan Simmons, J.E.L, 1992, *The analysis of conflict and change in construction projects, Construction Management and Economics*, 10(4), m.s. 459 - 478.
- Gerungan, W.A, 1988, *Psikologi Sosial*, Bandung: Penerbit P.T. Eresco.
- Hadi, Sutrisno, 1980, *Metodologi Research*. Jilid 1, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Sosial UGM.
- Kreitner R, 1989, *Manajemen 4th Edition*, Boston: Houghton Mifflin Company.
- Kriyantono, Rachmat, 2009, *Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Lestari, Puji, 2007, *Manajemen Komunikasi Bencana di Daerah Rawan Bencana*, Jurnal Ilmu Komunikasi Terakreditasi UPN "Veteran", Yogyakarta. Volume 5 Nomor 3, September-Desember.
- Muhajir, H. Noeng, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.
- Mulyana, Deddy dan Jalaluddin Rakhmat, 1996, *Komunikasi Antar Budaya*, Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
- Nimo, Dan, 1993, *Komunikasi Politik*, Bandung: Penerbit PT Rosdakarya.

- Robbins, S.P, 1994, *Essential of Organizational Behavior*, New Jersey: Prentice Hall International, Inc.
- Ritzer, G. dan Goodman, DJ, 2003, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana.
- Santoso, Edi dan Mite Setiansah, 2010, *Teori Komunikasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, (Editor) 1995, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3S.
- Suprpto, Tommy, 2009, *Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi*, Jakarta: MedPress.
- Susanto, Astrid, 1988, *Komunikasi Sosial di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Swasta DH, Basu, 1996, *Asas-asas Manajemen Modern*, Yogyakarta: Liberty.
- Terry, R. George, Alih Bahasa Winardi, 2006, *Asas-asas Manajemen*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Venus, Antar, 2005, *Transactional Analysis Theory*, Jurnal Komunikasi dan Informasi, Vol. 4. No. 1. April.
- West, Richard and Lynn H. Turner, 2007, *Introducing Communication Theory*, New York: Mc Graw Hill Companies.
- Wirawan, 2012, *Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- <http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/462985/>
- <http://www.beritalingkungan.com/berita/2011-10/perusahaan-sawit-picu-konflik-lahan-di-muara-tae/>, diakses tanggal 6 November 2011.
- [walhikaltim.org/index.php?option=com\\_content](http://walhikaltim.org/index.php?option=com_content), diakses tanggal 7 November 2011.
- <http://perkebunan.kaltimprov.go.id/komoditi-3-kelapa-sawit.html>, diakses 09 Nopember 2011





# STRATEGI PENANGANAN KONFLIK BERBASIS KOMUNIKASI MENUJU PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL

Sarmiati

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara multikultural yang terdiri dari banyak budaya (Fadlillah, 2006: 75-76). Kita pernah mendengar sebuah anekdot tentang suku-suku bangsa di Indonesia, dalam anekdot tersebut dikatakan bahwa kalau malam hari diberikan sebuah koran kepada seorang Jawa, maka akan dijadikan alas tidur, ketika koran tersebut diberikan kepada seorang Batak, maka koran tersebut dikembangkan dan dipanggil teman-temannya untuk bernyanyi bersama di atas koran tersebut, kemudian ketika koran tersebut diberikan kepada orang Minang, maka koran tersebut disewakannya dan ketika sudah dapat duit, koran tersebut dikembalikannya. Dari anekdot tersebut terlihat bahwa satu suku bangsa dengan suku bangsa lainnya sangat berbeda dalam berperilaku dan berinteraksi, ketika perbedaan tersebut dijadikan sebuah pertentangan, maka Indonesia tidak akan pernah damai.

Dalam beberapa tahun terakhir, kehidupan bangsa Indonesia diwarnai oleh peristiwa konflik yang cenderung mengarah kepada disintegrasi bangsa. Sejumlah konflik pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia, antara lain konflik di Kalimantan Barat, Maluku, Poso, Aceh, Papua, dan Timor Timur. Konflik tersebut ada yang dipicu karena perbedaan dan kesenjangan etnis, agama, politik, dan persoalan-persoalan SARA lainnya. Konflik Aceh yang bersifat vertical selama 50 tahun yang dimotori oleh organisasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM), akarnya adalah ketidakadilan dalam bidang ekonomi dan politik. Konflik ini bisa diselesaikan melalui deklarasi Helsinki. Konflik vertical dan horizontal Timor-Timur dipicu masalah politik, ekonomi, dan agama yang menyebabkan provinsi itu lepas dari NKRI. Konflik

Ambon yang juga dipicu oleh kepentingan ekonomi, politik dan etnis, dapat diredakan melalui pendekatan Deklarasi Malino. Konflik antar etnis Dayak dengan Madura di Sambas dan Sampit dipicu oleh masalah budaya yang sudah mengakar selama 50 tahun, serta banyak lagi konflik lainnya yang dipicu oleh berbagai hal (Widiyanto, 2009: 116).

Konflik merupakan aspek yang tidak bisa dihindari dalam semua hubungan. Apabila tidak diatur dengan tepat, maka konflik dapat mengarah kepada keadaan yang tidak dapat diperbaiki, seperti perpisahan atau perceraian dalam tingkatan interpersonal bahkan bisa menjadi perang dalam skala nasional. Konflik sangat berpengaruh terhadap pertahanan dan keamanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional, melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh, berlandaskan Pancasila, UUD 45 dan wawasan nusantara (wasantara). Keamanan merupakan kemampuan bangsa Indonesia melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam. Konflik-konflik yang terjadi di Indonesia menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa sehingga berpengaruh terhadap pertahanan dan keamanan nasional. Masalah tersebut perlu dicari solusi terhadap penanganan konflik tersebut dengan menggunakan perspektif komunikasi.

### **Konflik di Indonesia**

Manusia dalam hidupnya selalu dihadapkan pada situasi yang diharuskan untuk menentukan pilihan-pilihan dari beberapa alternatif situasi dan harapan yang ada pada saat bersamaan. Situasi seperti itulah yang dikatakan dengan situasi konflik. Konflik hampir tidak mungkin dihindari oleh semua manusia dalam kehidupannya. Selama manusia berhubungan dengan orang lain, baik secara pribadi maupun secara kelompok, maka konflik tidak akan pernah bisa dihindari. Konflik tidak hanya terjadi antara seseorang dengan seseorang lainnya, antara sekelompok orang dengan sekelompok orang lainnya, tetapi konflik juga bisa terjadi di dalam diri seseorang seperti adanya pilihan-pilihan dalam hidup seseorang, sehingga menimbulkan depresi dalam diri seseorang yang juga akan mengganggu stabilitas Negara Indonesia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik didefinisikan sebagai percekocokan, perselisihan, atau pertentangan. Dengan demikian, secara sederhana konflik merujuk pada adanya dua hal atau lebih yang berseberangan, tidak selaras, dan bertentangan. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Soerjono Soekanto menyebut konflik sebagai suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan. Sementara Lewis A. Coser berpendapat bahwa konflik adalah sebuah perjuangan mengenai nilai atau tuntutan atas status, kekuasaan dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai atau melenyapkan lawan (Ahmadi, 2007: 281-282).

Secara garis besar berbagai konflik dalam masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk konflik, diantaranya:

1. Berdasarkan Sifatnya, terdiri dari *pertama* konflik destruktif, merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda. Contohnya konflik Ambon, Poso, Kupang, dan Sambas. *Kedua*, Konflik Konstruktif merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari perbedaan pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya, perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi. (Rohman, dkk, 2006: 38).
2. Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik, terdiri dari *pertama* Konflik vertikal merupakan konflik antar komponen di dalam suatu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor; *Kedua*, Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya ledakan konflik horizontal yang bernuansa suku, agama, ras dan golongan (SARA) yang terjadi di Ambon; *Ketiga*, Konflik diagonal merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan

alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya konflik Aceh (Rohman, dkk, 2006: 39).

3. Berdasarkan Konsentrasi Aktifitas Manusia di dalam Masyarakat, terdiri dari *pertama*, konflik sosial merupakan konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan sosial dari pihak yang berkonflik. Konflik sosial ini dapat dibedakan menjadi konflik sosial vertikal dan konflik sosial horizontal. Konflik ini seringkali terjadi karena adanya provokasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Konflik sosial vertikal, yaitu konflik yang terjadi antara masyarakat dan Negara. Contohnya, kemarahan massa yang berujung pada peristiwa Trisakti (12 Mei 1998). Konflik yang terjadi di Bima antara warga dengan pemerintah terkait dengan pertambangan. Konflik sosial horizontal, yaitu konflik yang terjadi antaretnis, suku, golongan, atau antarkelompok masyarakat. Contohnya konflik yang terjadi di Ambon; *Kedua*, konflik politik merupakan konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan. Contohnya konflik yang terjadi antar pengikut suatu parpol. Ketiga, konflik ekonomi merupakan konflik akibat adanya perebutan sumber daya ekonomi dari pihak yang berkonflik. Contohnya konflik antar pengusaha ketika melakukan tender. Keempat, konflik budaya merupakan konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan budaya dari pihak yang berkonflik. Kelima, konflik ideologi merupakan konflik akibat adanya perbedaan paham yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang. Contohnya konflik yang terjadi pada saat G-30-D/PKI. (Rohman, dkk, 2006: 40).
4. Berdasarkan Cara Pengelolaannya, terdiri dari *pertama* konflik interindividu merupakan tipe yang paling erat kaitannya dengan emosi individu hingga tingkat keresahan yang paling tinggi. Konflik dapat muncul dari dua penyebab, yaitu karena kelebihan beban (*role overloads*) atau karena ketidaksesuaian seseorang dalam melaksanakan peranan (*person-role incompatibilities*); *Kedua*, konflik antarindividu merupakan konflik yang terjadi antara seseorang dengan satu orang atau lebih, sifatnya substantive, menyangkut perbedaan gagasan, pendapat, kepentingan, atau bersifat emosional, menyangkut perbedaan selera, dan perasaan *like or dislike* (suka atau

tidak suka). Konflik tipe ini berbentuk konfrontasi dengan seseorang atau lebih, maka konflik antar individu juga merupakan target yang perlu dikelola secara baik; *Ketiga*, konflik antarkelompok merupakan konflik yang banyak dijumpai dalam kenyataan hidup manusia sebagai makhluk sosial, karena mereka hidup dalam kelompok-kelompok (Ahmadi, 2007: 286).

Terkait dengan konflik antar pribadi dikenal adanya jenis konflik semu, konflik fakta, konflik nilai, konflik kebijakan, dan konflik ego. Konflik semu merupakan konflik yang nyata atau jelas kelihatan tetapi bukan konflik yang sesungguhnya. Bentuknya seperti merengek-rengok, olok-olokan ringan, ejekan, dan perilaku menghina atau mengejek. Konflik fakta mengacu kepada konflik sederhana, terjadi apabila informasi yang seseorang sampaikan dibantah atau diperdebatkan oleh pihak lain. Konflik nilai terjadi karena adanya perbedaan keyakinan yang begitu mendalam, keyakinan tentang baik dan buruk, bermoral dan tidak atau berguna atau tidak. Pemecahan konflik ini hanya bisa dilakukan dengan cara saling menghargai dan menghormati perbedaan, serta mengakui perbedaan diantara mereka yang berkonflik. Konflik kebijakan merupakan konflik yang terjadi karena perbedaan kebijakan yang diterapkan dalam sebuah hubungan. Konflik ego merupakan konflik antara orang-orang yang memandang memenangkan konflik sebagai hal penting untuk memelihara citra diri mereka yang positif (Budyatna, 2011: 301-310).

### **Strategi Komunikasi Konflik Menuju Pertahanan dan Keamanan Nasional**

Bagaimana kita dapat mengatasi dan mengendalikan konflik pada dasarnya sangat tergantung pada bagaimana proses komunikasi yang terjadi di dalamnya. Konflik interpersonal dapat diselesaikan dengan dua pendekatan, pertama, cara yang tidak produktif terdiri dari *avoidance* atau menolak adanya konflik, dengan cara menghindar atau tidak mau menerima masalah apapun yang dihadapinya. Menggunakan kekuatan, seperti mengalahkan orang lain secara fisik atau dalam bentuk ancaman. *Minimization* atau mengabaikan adanya konflik, dengan cara menganggap konflik adalah masalah ringan atau bahkan menertawakan konflik tersebut. *Blame* atau menyalahkan orang lain dan *silencers* yaitu bersikap sedemikian rupa supaya orang lain diam, seperti dengan

menangis, atau mengungkapkan hal yang memalukan atau masalah pribadi dari lawannya. Cara-cara ini kemungkinan akan memunculkan konflik yang lebih besar bahkan bisa mengakibatkan perpisahan atau perceraian kalau dalam bubungan pernikahan. Kedua, cara yang produktif, terdiri dari *withdrawal* yaitu menunggu sambil memahami situasi, walaupun konflik adalah situasi yang tidak menyenangkan, tetapi orang berusaha untuk menyesuaikan diri dengan konflik tersebut, Asertif yaitu menyatakan perasaan yang benarnya secara baik, di mana individu berusaha menghadapi pihak yang berkonflik dengannya secara langsung dan berusaha membina hubungan yang dewasa dengan saling mengerti dan memahami. *Adjusting* atau menyesuaikan diri dengan pihak lain, dalam hal ini individu menyetujui syarat yang diminta oleh pihak yang berkonflik dengannya sampai batas tertentu (Wibowo, 1988: 8.17-8.21).

Dalam menyelesaikan konflik-konflik antarpribadi tersebut perlu kecakapan berkomunikasi untuk memrakarsai konflik, kecakapan berkomunikasi untuk merespons konflik, kemampuan berkomunikasi untuk menengahi konflik dan kemampuan memulihkan dari kegagalan pengelolaan konflik. Pengelolaan konflik yang efektif dapat terhalang oleh pola-pola komunikasi, di antaranya alasan-alasan yang diduga, balas menyalahkan, menuntut menarik diri, ketika pasangannya *mengomel*, mengkritik dan menyalahkan. Pada sebuah hubungan sering terjadi saling mengumpat, menuduh dengan kata-kata yang tidak enak di dengar sebagai akibat dari memburuknya pembicaraan yang dapat meracuni hubungan secara keseluruhan. Keras kepala juga menjadi penghalang pengelolaan konflik yang efektif (Budyatna, 2011: 301-310).

Kecakapan berkomunikasi untuk memprakarsai konflik dilakukan dengan cara mengakui dan menyatakan mempunyai masalah yang nyata, kemudian menjelaskan dasar dari konflik yang potensial dalam arti perilaku, konsekuensi, dan perasaan, menghindari menilai motif-motif orang lain, dan memastikan orang lain memahami masalah anda. Utarakan solusi yang dipilih sedikit banyak dapat memusatkan pada dasar yang sama. Mental harus dipersiapkan dulu mengenai apa yang anda akan katakan sebelum berhadapan dengan orang lain, sehingga permintaan anda akan singkat dan tepat, kemudian buatlah singkat dan jangan bertele-tele. (Budyatna, 2011: 310-314).

Kecakapan berkomunikasi untuk merespons konflik dapat dilakukan

dengan cara menggunakan tameng, memberikan respons yang empatik dengan kepentingan dan kepedulian yang sungguh-sungguh, kemudian uraikan dengan kata-kata sendiri pemahaman anda mengenai masalah itu dan ajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menjelaskan masalah. Cari persamaan dasar dengan menemukan aspek dakwaan yang disetujui, minta kepada pemrakarsa konflik untuk menyarankan solusi alternatif. (Budyatna, 2011: 316-317).

Kemampuan berkomunikasi untuk menengahi konflik dilakukan dengan cara memastikan bahwa orang yang terlibat konflik setuju bekerjasama dengan penengah, kemudian bantu orang-orang untuk mengidentifikasi konflik yang sebenarnya, kemudian pelihara netralitas, jaga supaya pembicaraan terfokus pada masalah bukan pada pribadi, mengusahakan waktu bicara yang sama, pusatkan pembicaraan dalam menolong kedua pihak mencari penyelesaian, gunakan persepsi untuk mengecek dan membuat uraian dengan kata-kata sendiri untuk memastikan kedua pihak benar-benar memahami dan mendukung penyelesaian yang telah disetujui, serta buatlah rencana kegiatan dan prosedur tindak lanjutnya. Memulihkan dari kegagalan pengelolaan konflik dengan cara memahami konflik yang tak terselesaikan dan memaafkan. (Budyatna, 2011: 317-321).

Konflik adalah ekspresi perjuangan antara setidaknya dua pihak yang interdependen yang memandang adanya tujuan-tujuan yang tidak cocok, kurangnya imbalan, dan intervensi dari pihak lain dalam rangka mencari tujuan mereka. Keterampilan untuk mengenali, terlibat, dan mengelola konflik adalah keterampilan penting bagi semua orang. Penyebab konflik adalah tujuan yang bertentangan diantara orang-orang yang terlibat konflik. Guna mengelola konflik secara efektif sehingga tercipta resolusi konflik yang sukses adalah dengan cara menentukan tujuan, faktor situasional, kompetensi komunikasi, dan manajemen kecemasan (Dan O'Hair dkk, 2009: 440-445).

Perbedaan atau perselisihan dalam hubungan sosial yang intim merupakan potensi konflik yang sewaktu-waktu dapat meledak dan lebih menghancurkan daripada konflik yang terjadi dalam hubungan sosial parsial. Coser menyatakan bahwa dalam hubungan yang intim umumnya orang berusaha menekan rasa permusuhan demi menghindari konflik. Hal itu akan menyebabkan akumulasi permusuhan yang sewaktu-waktu bisa meledak. (Ahmadi, 2007: 283).



Secara umum pengendalian konflik sosial dapat dilakukan dengan cara, pertama penghindaran (*avoidance*) atau penarikan diri (*withdrawal*) yaitu dengan cara tidak memperhatikan, pemisahan secara fisik, interaksi terbatas; Kedua, memecah dan menyebar (*difusion*) yaitu dengan cara melancarkan (*smoothing*) dan kompromi; Ketiga, akomodasi atau menyesuaikan diri; Keempat, birokrasi dan reorganisasi; Kelima perundingan (*bargaining*) yang terdiri dari teknik *dicting* atau pendiktean, teknik dominasi dan teknik persuasi; Keenam, bersaing atau kompetisi; Ketujuh, konfrontasi atau kolaborasi seperti saling menukar tenaga kerja, penekanan pada tujuan bersama dan pemecahan masalah; Kedelapan, intervensi pihak ketiga, jika pihak-pihak yang berkonflik menemukan kemacetan dalam mencari penyelesaian (Wibowo, 1988: 8.32-8.35). Menurut Abu Ahmadi (2007: 288-289) intervensi pihak ketiga dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu; *Pertama*, Konsiliasi merupakan bentuk pengendalian konflik sosial yang dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang dapat memberikan keputusan dengan adil. Dalam konsiliasi berbagai kelompok yang berkonflik duduk bersama mendiskusikan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan; *Kedua*, Arbitrasi merupakan bentuk pengendalian konflik sosial melalui pihak ketiga dan kedua belah pihak yang berkonflik menyetujuinya. Keputusan-keputusan yang diambil pihak ketiga harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkonflik; *Ketiga*, Mediasi, merupakan bentuk pengendalian konflik sosial di mana pihak-pihak yang berkonflik sepakat menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Berbeda dengan arbitrasi, keputusan-keputusan pihak ketiga tidak mengikat pihak manapun.

Perbedaan kultur menandakan bahwa kita memiliki diversitas atau keragaman, di diversitas ini menjadi sumber konflik. Menurut Dan O'Hair dkk (2009: 77-78), prasangka adalah pandangan negatif tentang orang, aktivitas atau tempat, merupakan stereotip negatif yang didasarkan pada pengalaman personal, kabar burung atau pengetahuan yang tidak lengkap. Prasangka menurut Rogers & Steinfat (1999: 55) adalah suatu sikap yang tak berdasar terhadap *out group*, berdasarkan pada suatu perbandingan dengan *ingroup*. Allport dalam Samovar & Porter (2010:204) mendefinisikan prasangka negatif etnis sebagai suatu antipati berdasarkan generalisasi kesalahan terhadap suatu kelompok, atau terhadap seorang individu karena dia adalah anggota kelompok tersebut. *Prejudice* diekspresikan dengan berbagai cara. *Pertama*, *Antilocution*.



*Prejudice* baru pada tingkat berbicara tentang anggota kelompok target dalam bentuk stereotipe negatif; *Kedua, Avoid/withdraw, prejudice* tidak hanya dalam bentuk pernyataan, tetapi dalam bentuk tindakan menghindar atau menarik diri dari hubungan dengan kelompok yang tidak disukai; *Ketiga, Discrimination*. Orang yang berprasangka berusaha mengeluarkan semua anggota kelompok yang dibicarakan dari bermacam-macam bentuk pekerjaan dan institusi sosial. *Keempat, physical attack atau serangan fisik*. Kadangkala bentuk *prejudice* membuat terciptanya permusuhan, jika dibiarkan terus menerus. Tindakan fisik ini terjadi ketika kaum minoritas merupakan target dari aktivitas *prejudice*. *Kelima, Ekstermination* atau *genocide* atau permusuhan. *Extermination* merupakan bentuk paling berbahaya dari *prejudice*.

Stereotip adalah cara yang esensial untuk memproses informasi, stereotip membantu kita untuk membuat generalisasi tentang orang lain, bahasa, perilaku dan situasi berdasarkan pengalaman kita. Konflik difersitas terutama berasal dari stereotip negatif, seperti konflik karena gender, usia, etnis, kemampuan fisik, agama dan orientasi seksual (O’Hair, dkk, 2009: 77-78).

Etnosentrisme menurut Everet M. Rogers, dan Thomas M. Steinfat (1999:56) merupakan tingkat dimana individu-individu menilai budaya lain lebih rendah dari pada budaya mereka sendiri. Etnosentrisme terjadi ketika bangsa kita terlihat sebagai pusat budaya. Dengan kata lain etnosentrisme mengacu pada kecenderungan kita mengidentifikasi *ingroup* kita dan mengevaluasi *outgroup* berdasarkan pada standard yang kita miliki. Mengingat kita etnosentrik, kita cenderung menggambarkan nilai budaya kita sendiri dan cara-cara kita melakukan sesuatu sebagai hal yang lebih nyata, atau sebagai nilai yang alami dan benar.

Kompetensi multikultural melibatkan perilaku tertentu yang mengarah pada kemampuan untuk menilai budaya, menghargai perbedaan, mengatur dinamika perbedaan, dan beradaptasi dalam keragaman. Ada 5 komponen kompetensi komunikasi antar budaya, yaitu; *Pertama*, motivasi. Sebagai komunikator yang penuh motivasi, orang menunjukkan ketertarikan, berusaha untuk berbicara serta mengerti dan menawarkan bantuan. Memiliki motivasi untuk berkomunikasi merupakan langkah pertama yang penting dalam mengatasi kekerasan dan konflik. *Kedua*, pengetahuan. Pengetahuan diperlukan dalam rangka menentukan strategi komunikasi yang tepat, protokol yang pantas

dan kebiasaan budaya apa yang perlu diamati. Ketiga, kemampuan mendengar, mengamati, menganalisis dan menginterpretasikan serta mengaplikasikan perilaku yang khusus untuk suatu tujuan tertentu. Keempat, sensitivitas, sifat fleksibel, sabar, empati, keingintahuan mengenai budaya yang lain, terbuka pada perbedaan dan merasa nyaman dengan yang lain. Kelima, Karakter. Sifat yang diasosiasikan dengan orang yang terpercaya adalah kejujuran, penghargaan, kewajaran, dan kemampuan untuk melakukan pilihan yang tepat, dan juga kehormatan, altruisme (sifat mementingkan kepentingan orang lain) ketulusan dan niat baik (Samovar & Porter, 2010: 460).

Guna mengatasi kesulitan dalam komunikasi antarbudaya, ada beberapa kiat yang dilakukan (Anugrah, 2008: 50) yaitu; (a) Bersikap terbuka untuk menerima perbedaan budaya. Sikap ini diiringi oleh sikap menerima dan menghormati budaya orang lain; (b) Mau berusaha mempelajari budaya lain yang berbeda; (c) Hindari dominasi anda dalam percakapan dengan orang lain; (d) Janganlah sekali-kali menganggap budaya kita yang paling tinggi, sementara budaya orang lain rendah (kampungan); (e) Kontrol emosi ketika berbicara dengan orang yang berbeda budaya. Berlakulah jujur, sopan, dan selalu memancarkan sikap responsif; (f) Pahami budaya sendiri sebagai jembatan untuk memahami budaya orang lain.

Saat kita mengalami konflik cultural karena orang lain berbeda pendapat dengan kita, ciri-ciri personalitas tertentu dapat membantu kita menjadi komunikator *intercultural* yang efektif. Kita semua punya ciri bawaan seperti fleksibilitas dan toleransi terhadap ambiguitas. Ciri bawaan ini membantu kita menghadapi perbedaan kultural dan jika kita mengembangkannya, kita dapat meningkatkan kompetensi komunikasi kita. Di samping itu sikap tak menilai, menghormati diri orang lain, menganalisis perspektif kita, dan kultur bahasa membantu kita menghadapi perbedaan cultural. (O'Hair,dkk, 2009: 89-96).

Pengendalian konflik sosial dengan menggunakan manajemen konflik dapat dilakukan dengan gaya pendekatan seseorang atau kelompok dalam menghadapi situasi konflik yang dinamakan dengan *cooperativeness* dan *assertiveness*. *Cooperativeness* adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan minat individu atau kelompok lain. *Assertiveness* adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan minat individu atau kelompok sendiri. Ada lima gaya manajemen konflik,

yaitu; *Pertama*, tindakan menghindari, yaitu bersikap tidak kooperatif dan tidak asertif, menarik diri dari situasi yang berkembang, dan atau bersikap netral dalam segala macam cuaca. *Kedua*, kompetisi atau komando otoritatif, yaitu bersikap tidak kooperatif, tetapi asertif, bekerja dengan cara menentang keinginan pihak lain, berjuang untuk mendominasi dalam situasi menang atau kalah, dan atau memaksakan segala sesuatu agar sesuai dengan kesimpulan tertentu, dengan menggunakan kekuasaan yang ada. *Ketiga*, akomodasi atau meratakan, yaitu bersikap kooperatif tetapi tidak asertif, membiarkan keinginan pihak lain menonjol, meratakan perbedaan-perbedaan guna mempertahankan harmoni yang diusahakan secara buatan. *Keempat*, kompromis, yaitu bersikap cukup kooperatif dan juga asertif dalam intensitas yang cukup. Bekerja menuju ke arah pemuasan pihak-pihak yang berkepentingan, mengupayakan tawar-menawar untuk mencapai pemecahan yang dapat diterima kedua belah pihak meskipun tidak sampai tingkat optimal, tak seorangpun merasa menang dan tak seorangpun merasa bahwa yang bersangkutan menang atau kalah secara mutlak. *Kelima*, kolaborasi (kerjasama) atau pemecahan masalah, yaitu bersikap kooperatif maupun asertif, berusaha untuk mencapai kepuasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan jalan bekerja melalui perbedaan-perbedaan yang ada, mencari dan memecahkan masalah hingga setiap individu atau kelompok mencapai keuntungan masing-masing sesuai dengan harapannya (Rohman dkk, 2006: 44-45).

Dari gaya manajemen konflik tersebut kemungkinan hasil yang didapat adalah sebagai berikut (Rohman, dkk, 2006: 45-46);

1. Konflik kalah-kalah, terjadi apabila tak seorangpun diantara pihak yang terlibat mencapai tujuan yang sebenarnya, dan alasan-alasan atau faktor-faktor penyebab konflik tidak mengalami perubahan. Hasil konflik kalah, seakan-akan terselesaikan atau memberi kesan lenyap untuk sementara waktu, ia mempunyai tendensi untuk muncul kembali pada masa mendatang. Hasil kalah-kalah biasanya terjadi apabila konflik dikelola dengan sikap menghindari, akomodasi, meratakan, dan atau melalui kompromis. Sikap menghindari merupakan sebuah bentuk ekstrim tiadanya perhatian (*non-attention*). Orang berpura-pura seakan-akan konflik tidak ada dan mereka hanya berharap bahwa konflik itu akan terselesaikan dengan sendirinya. Akomodasi atau meratakan, berusaha menekan perbedaan-

perbedaan antara pihak yang berkonflik dan menekankan pada persamaan-persamaan pada bidang-bidang kesepakatan. Koekstensi damai melalui diakuinya kepentingan bersama merupakan tujuan yang ditekankan. Tindakan meratakan (*smoothing*) mungkin sekali tidak menghiraukan dasar nyata dari konflik tertentu. Sebagai contoh di Indonesia kata musyawarah untuk mufakat sering muncul dalam berbagai situasi konflik. Kompromis akan terjadi apabila dibuat akomodasi sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak yang berkonflik mengorbankan hal tertentu yang dianggap mereka sebagai hal yang bernilai. Akibatnya adalah bahwa tidak ada satu pihak pun yang mencapai keinginan mereka dengan sepenuhnya, dan diciptakan kondisi-kondisi anteseden untuk konflik-konflik yang mungkin akan muncul pada masa yang akan datang.

2. Konflik menang-kalah, pada konflik menang-kalah salah satu pihak mencapai apa yang diinginkannya dengan mengorbankan keinginan pihak lain. Hal tersebut mungkin disebabkan karena adanya persaingan, di mana orang mencapai kemenangan melalui kekuatan, keterampilan yang superior, atau karena unsur dominasi. Ia juga dapat merupakan hasil dari komando otoritatif, ketika seorang otoriter mendikte sebuah pemecahan dan kemudian dispesifikasikan apa yang akan dicapai dan apa yang akan dikorbankan dan oleh siapa. Andai kata figur otoritas tersebut merupakan pihak aktif di dalam konflik yang berlangsung, maka kiranya mudah untuk meramalkan siapa yang akan menjadi pemenang dan siapa yang akan kalah. Mengingat bahwa strategi-strategi menang-kalah juga tidak memecahkan kausa pokok terjadi konflik, maka kiranya pada masa mendatang konflik-konflik akan muncul lagi.
3. Konflik menang-menang, dilaksanakan dengan jalan menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam konflik yang terjadi. Hal tersebut secara tipikal dicapai apabila dilakukan konfrontasi persoalan-persoalan yang ada dan digunakannya cara pemecahan masalah untuk mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan pandangan. Pendekatan positif tersebut terhadap konflik berkaitan dengan perasaan pada pihak-pihak yang sedang berkonflik bahwa ada sesuatu hal yang salah dan hal itu perlu mendapatkan perhatian. Kondisi menang-menang meniadakan alasan-alasan untuk melanjutkan atau menimbulkan kembali konflik yang ada karena tidak ada hal yang

dihindari ataupun ditekankan. Semua persoalan-persoalan yang relevan diperbincangkan dan dibahas secara terbuka. Batu uji akhir untuk menilai sesuatu pemecahan menang-menang adalah apakah pihak yang turut berpartisipasi di dalam konflik tersebut bersedia bercakap-cakap satu sama lain, sampai pada makan bersama dalam satu meja,

Pemecahan masalah dan kerjasama (kolaborasi) dapat dikatakan sebagai pendekatan yang paling potensial dalam pengelolaan suatu konflik. Bukan berarti pemecahan yang lain tidak memiliki nilai yang potensial dalam pengelolaan suatu konflik. Akan selalu ada konflik yang tidak dapat dikelola dengan berkolaborasi. Untuk hal-hal demikian kita pakai saja prinsip minus mullum (terbaik di antara yang kurang baik). Dalam menangani konflik, terutama yang sifatnya destruktif, kita harus menjunjung tinggi demokrasi, transparansi dan toleransi dalam segala aspek kehidupan (Rohman, dkk, 2006: 45-46).

Konflik-konflik vertikal yang terjadi antara pusat dan daerah karena penguasaan sumber daya yang tidak merata, juga *system* pembagian hasil yang tidak merata bermuara pada tuntutan terhadap hak-hak pemilikan sumber daya dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi oleh penduduk lokal. Hal ini mengakibatkan terjadinya disintegrasi nasional seperti bentrokan fisik antara penduduk lokal dan pemerintah di Aceh, Irian Jaya dan Bima Nusa Tenggara Barat dan lain-lain.

Integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Maurice Duverger memberikan definisi integrasi adalah dibangunnya interdependensi yang lebih rapat antara bagian-bagian dari organism hidup atau antara anggota-anggota di dalam masyarakat. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang ada dalam kehidupan sosial sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan (Ahmadi, 2007: 298).

Proses integrasi sosial dilakukan melalui fase-fase; *Pertama*, fase akomodasi, yaitu proses meredakan pertentangan atau konflik untuk mencapai kestabilan sosial. Akomodasi merupakan cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga pihak lawan tidak kehilangan kepribadiannya. *Kedua*, fase kerjasama, kerjasama timbul karena ketegangan masyarakat sebagai

akibat adanya unsur-unsur yang berbeda-beda setelah terjadi proses akomodasi. Kerjasama dapat lahir karena mereka yang terlibat konflik menyadari kepentingan yang sama. Mereka yang semula konflik akan melakukan penyesuaian diri. *Ketiga*, fase Koordinasi, proses koordinasi terlihat jelas apabila dalam suatu masyarakat terdapat kelompok-kelompok yang saling berbeda paham dalam bidang politik. Setiap kelompok ingin mendudukkan calonnya sebagai pemimpin tertinggi. Dalam kampanye terjadi persaingan yang sangat sengit. Setelah salah satu terpilih, yang kalah biasanya diajak kerjasama demi keutuhan dan integrasi sosial. *Keempat*, fase Asimilasi, apabila anggota masyarakat telah mengadakan asimilasi ke dalam suatu kelompok masyarakat, ia tidak lagi membedakan dirinya dengan kelompok tersebut. Dalam proses asimilasi mereka mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan-kepentingan serta tujuan-tujuan kelompok, sehingga batas antara kelompok itu akan hilang dan lebur menjadi satu kelompok (Ahmadi, 2007: 305-306).

Konflik memang sering berujung kekerasan, baik konflik intrapribadi, antar pribadi maupun konflik antar kelompok. Konflik intrapribadi biasanya berujung kepada depresi, konflik antar pribadi berujung kepada kekerasan fisik dan mental, apalagi konflik antar kelompok berujung kepada kerusakan massa seperti yang sering kita alami di Indonesia. Konflik tidak selalu berakibat negatif, tetapi ada juga keuntungan atau akibat positif dari konflik yang kita alami, misalnya bagi kelompok atau organisasi akan menimbulkan kohesifitas atau kekompakan dalam kelompok, bagi konflik antar pribadi akan menciptakan kedewasaan berfikir bagi pribadi yang berkonflik. Untuk itu peningkatan pengelolaan konflik perlu diperbaiki guna tercipta integrasi nasional menuju pertahanan dan keamanan nasional.

## **Simpulan**

Konflik merupakan proses atau keadaan di mana dua pihak berusaha menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing yang disebabkan adanya perbedaan pendapat, nilai-nilai ataupun tuntutan dari masing-masing pihak. Konflik terdiri dari konflik destruktif dan konstruktif, terbuka dan tertutup, vertikal, horizontal dan diagonal, sosial, politik, budaya, ekonomi dan ideologi, intrapersonal, interpersonal dan antar kelompok. Konflik dapat menimbulkan disintegrasi bangsa sehingga mengancam pertahanan dan keamanan nasional, untuk itu perlu diatasi

dengan konsiliasi, arbitrase dan mediasi, kompetensi komunikasi antar budaya dan strategi komunikasi antar pribadi.

### **Daftar Pustaka**

- Ahmadi, A, 2007, *Psikologi Sosial*. Jakarta:Rineka Cipta
- Bambang, W , 2009, *Perspektif Budaya*, Jakarta:Rajawali Pers
- Dadan, A. Winny, K, 2008, *Komunikasi Antar Budaya Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Jala Permata.
- Fadlillah, 2006, *Kecerdasan Budaya*, Padang:Andalas University Press.
- O'Hair, D. Gustav W. Linda D, 2009, *Strategic Communication in Business and the Professions*, Jakarta:Kencana.
- Muhammad, B. Leila, M, 2011, *Teori Komunikasi Antar Pribadi*, Jakarta:Kencana.
- Istiqomah W. dkk, 1988, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Karunika Universitas Terbuka.
- Larry, A. Richard, E. Edwin. R, 2010, *Komunikasi Lintas Budaya*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Everet. M. Steinfat, T , 1999, *Intercultural Communication*, Waveland Press, Inc; US.





# PEMBERITAAN KONFLIK ACEH: SEBUAH KONTROL SOSIAL DI *NEWSROOM*

Tuti Widiastuti

## Pendahuluan

Sejarah Aceh terdiri dari lembaran perang, dari satu kancah pertempuran ke pertempuran lainnya. Dari melawan Portugis, Belanda, sampai dengan melawan saudara sebangsanya sendiri. Alasan utama terjadinya pemberontakan di Aceh tak lain dan tak bukan adalah rasa ketidak-adilan. Rasa kecewa terhadap apa yang berlaku dan kekecewaan yang berkepanjangan pula inilah yang sering hinggap di rakyat Aceh, mulai dari kecewa terhadap penjajahan Belanda, dan kecewa terhadap pemerintahan Indonesia itu sendiri (Kalla, 2009: 1).

Apa yang terjadi di tanah Aceh ini, kerap mewarnai pemberitaan media. Khususnya dalam pemberitaan mengenai konflik—seperti konflik Aceh—media tidak dapat dilepaskan dari berbagai ‘kepentingan’ ekonomi dan politik yang saling bersaing di balik konflik tersebut, yang menjadikan media tidak dapat netral, jujur, adil, dan obyektif (Piliang, 2002: 1). Kepentingan ekonomi dan politik yang mewarnai pemberitaan media, pada akhirnya akan menimbulkan persoalan obyektivitas pengetahuan, yaitu persoalan apakah informasi yang disampaikan di dalamnya mengandung kebenaran (*truth*) atau kebenaran palsu (*pseudo-truth*); bersifat netral atau berpihak; merepresentasikan fakta atau rekayasa fakta; menggambarkan realitas (*reality*) atau mensimulasi realitas (*simulation*) (Piliang, 2002:1).

Yasraf Amir Piliang (2002) menganalisis fenomena hiper-realitas dalam pemberitaan media pers atas konflik Aceh, dengan menafsirkan beberapa contoh pemberitaan oleh empat surat kabar Sumatera, yaitu surat kabar *Serambi Indonesia*, *Waspada*, *Analisa* dan *Radar Medan*. Hiper-realitas dalam pemberitaan mengenai konflik Aceh lebih berupa berbaurnya antara ‘tanda asli’, ‘tanda palsu’ dan ‘tanda menipu’, yaitu lewat tumpang-tindihnya kata-kata yang mengandung kebenaran

dalam realitas dengan kata atau tanda-tanda yang palsu, sehingga antara 'kebenaran' (*truth*) dan 'kepalsuan' (*false*) tidak dapat dibedakan lagi.

Penggunaan 'tanda daur ulang' atau 'tanda artifisial' tidak terdapat di dalam pemberitaan konflik Aceh, oleh karena tanda-tanda tersebut hanya tampak jelas pada tingkat citraan atau lewat bahasa visual (*visual language*) – seperti foto, ilustrasi, video, film, televisi, komputer. Di dalam media pers fenomena hiper-realitas semacam ini akan tampak pada penggunaan foto atau ilustrasi di dalam teks media yang bersangkutan.

Televisi sebagai salah satu dari bentuk media massa lainnya (surat kabar, majalah, radio, film, dan juga internet saat ini) merupakan media yang memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam mempengaruhi perilaku dan kepercayaan masyarakat penggunanya, termasuk dalam pemberitaan konflik. Hanya saja, yang kemudian menjadi masalah adalah apakah yang direpresentasikan dalam berita-beritanya itu merupakan realitas sosial yang ada. Bukankah realitas media hanyalah 'realitas semu' (*second-hand reality*) yang telah mengalami penyeleksian melalui proses 'gatekeeping' di dalam media itu sendiri (Shoemaker & Reese, 1996: 41).

Menurut Jean Baudrillard dalam *The Gulf War did not Take Place* (1995: 4, dalam Piliang, 2002), di dalam perang, tidak semua citraan yang ditampilkan oleh media merupakan representasi dari realitas kekejaman perang yang sesungguhnya. Citra kekejaman itu kini dapat diciptakan simulasinya di sebuah studio televisi atau di sebuah tempat palsu (*pseudo place*) lewat teknologi simulasi yang canggih. Gambar ladang minyak yang terbakar, orang-orang yang berdarah, gedung-gedung yang hancur, sandera yang ketakutan, teroris yang kejam – semuanya kini dapat disimulasikan di dalam sebuah studio televisi dengan lingkungan artifisial dan tokoh-tokoh palsu, yang ketika ditayangkan di sebuah layar televisi tampak seolah-olah sebuah 'realitas yang sesungguhnya'. Padahal, tidak seluruh citraan tersebut yang betul-betul merupakan representasi peristiwa perang. Perang itu sesungguhnya, tidak hanya terjadi di "medan perang", tetapi juga 'terjadi' di studio televisi tersebut dalam bentuk simulasinya.

Melihat perkembangan situasi dan kondisi di Indonesia saat ini, media massa khususnya televisi memang memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap pembentukan opini, sistem nilai dan cara pandang masyarakat terhadap realitas sosial. Ini amat bergantung pada segmen media mana yang dijadikan patokan dan pada periode mana dia terjadi.

Seperti dipaparkan dalam '*Mass Communication Theory*' (McQuail, 2000:417-421) bahwa telah terjadi pergeseran pendekatan dan cara pandang efek dari media. McQuail membagi perkembangan teori efek media ke dalam empat fase. Fase 1 yang disebut sebagai '*all-powerfull media*' yang berkembang antara 1920 sampai Perang Dunia II (PD II), dengan menggunakan metode kualitatif (observasi) dan kajiannya dilakukan pada media cetak, radio, dan film, dinyatakan bahwa bahwa media mempunyai kekuatan besar dalam mempengaruhi pemirsa atau masyarakat secara langsung dan kuat.

Dalam fase berikutnya (2) atau disebut '*theory of powerfull media put to the test*', sejak PD II sampai awal 1960-an, kebenaran bahwa media amat berpengaruh dipertanyakan kembali oleh para ahli komunikasi: apakah benar bahwa media mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini masyarakat? Pada periode ini para ahli komunikasi melakukan penelitian terhadap media cetak, radio, dan film dengan menggunakan metode kuantitatif (survey) menemukan bahwa media hanya memiliki kekuatan mempengaruhi yang kecil atau terbatas dan berfungsi sebagai perantara.

Penelitian-penelitian yang dilakukan antara tahun 60-an s/d 70, atau disebut sebagai fase '*powerfull media rediscover*', dengan menggunakan metode kuantitatif (*longitudinal survey*) terhadap televisi, ditarik kesimpulan bahwa media memang memiliki kekuatan pengaruh yang kuat terhadap pemirsanya, tapi tidak sedahsat yang diyakini dalam fase pertama.

Dalam fase 4 mulai tahun 70-an sampai sekarang disebut sebagai '*negotiated media influence*', dengan menggunakan metode kualitatif (paradigma konstruktivisme) dalam mengkaji televisi pada umumnya dinyatakan bahwa media mempunyai pengaruh, khususnya dalam membangun gambaran khalayak tentang realitas sosial.

Mengikuti pada fase perkembangan seperti dijelaskan di atas, rasanya sulit untuk menerima kebenaran-kebenarannya secara keseluruhan bahwa ini juga terjadi di Indonesia. Pertama bahwa penelitian dan kajian tersebut dilakukan terhadap masyarakat di negara maju yang perkembangan media komunikasi massanya sudah berlangsung ratusan tahun. Proses perkembangan media komunikasi tersebut juga sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi secara bersamaan. Hal ini dijelaskan untuk tidak secara semena-mena menerapkan hasil kajian tersebut untuk kondisi Indonesia.

Pada periode 1980 s/d pertengahan 1997 bahwa media memiliki pengaruh besar terhadap opini masyarakat diragukan kebenarannya. Pihak penguasa pada masa itu amat represif terhadap pemberitaan. Kasus pembredelan Majalah Tempo dan Tabloid Editor merupakan contoh kuatnya kekuasaan pemerintah terhadap media massa. Bila situasi itu mau diukur dalam kategori seperti diatas, akan terjadi bias terhadap tarikan kesimpulan. Kebebasan pers bukanlah sesuatu yang lazim di Indonesia. Intrik politik dan tekanan penguasa terhadap bagaimana dan apa isi suatu berita telah mengalami dua kali sensor, pertama oleh para penguasa dan kedua oleh pengelola media itu sendiri (*self censorship mechanism*) yang lebih didorong rasa takut dibredel oleh penguasa atau dituduh subversif.

Pergeseran dari pembicaraan dan kritik terhadap kekuasaan adalah tabu pada masa sebelumnya menjadi sesuatu yang lazim dibicarakan dan didengar oleh banyak orang di Indonesia sebagai manifestasi dari era kebebasan baru, televisi merupakan pilihan banyak orang. Sudah menjadi pengetahuan banyak orang bahwa pada periode tersebut banyak orang mendukung dan bersimpati kepada demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di Jakarta dan berbagai kota besar lain di Indonesia. Media memiliki pengaruh kuat (*powerful*) terhadap pemirsanya, khususnya pada pembentukan opini dan sikap politik masyarakat.

Preferensi masyarakat terhadap persoalan politik pada kenyataannya tidaklah selalu mengacu pada apa yang disampaikan oleh televisi. Pada periode 1999 s/d sekarang ini masyarakat secara kritis mulai mempertanyakan dan mencari bukti dari janji politik pada 'kelompok kritis dan reformis' tersebut. Saat terjadi kesenjangan antara *statement* politis melalui media massa dengan kenyataan hidup sehari-hari, maka media massa bukan lagi preferensi utama masyarakat dalam menentukan sikap politiknya.

Orang mulai mendengarkan berita politik dan kondisi sosial masyarakat dengan sikap sinis. Indikasinya amat sederhana, dengan melihat jumlah segementasi mata acara televisi dan jumlah jam tayangnya. Pada periode atau saat proses reformasi berlangsung, jumlah tayangan langsung (ragam dan jumlah waktu tayangnya) dan jam pemberitaan sangat tinggi. Setelah propaganda politik tersebut tidak memiliki kenyataan dalam kehidupan keseharian orang Indonesia, maka acara televisi pun mulai bergeser dengan semakin banyaknya tayangan

gosip, film kartun, film telenovela, dan film Asia yang ditonton oleh banyak orang.

Para pengguna media--khususnya para pemirsa televisi-- dalam kondisi yang sesungguhnya adalah mereka yang tidak dapat atau mungkin tidak sempat memeriksa kembali segala peristiwa yang disajikan. Segala sesuatu yang dilaporkan pada media tersebut kemudian oleh pemirsanya dijadikan sebagai sebuah 'realitas sosial' yang cenderung diyakini kebenarannya. Media dengan segala selektifitas dan kemampuan konstruksinya mampu mempengaruhi pembentukan ruang citra tentang lingkungan sosial yang relatif bisa menjadi timpang, bias bahkan dalam derajat tertentu tidak cermat.

Di luar sistem sosial yang ada, segala sesuatu yang termuat pada sejumlah berita utama bernuansa konflik itu tidak terlepas dari peran komunikator massa (para pekerja media) yang ada di media dalam hal ini televisi (seperti sikap, nilai, dan kepercayaan, serta etika profesional). Begitu pun dengan sejumlah peran (tekanan) dari luar media tersebut seperti sistem hukum yang berlaku, para pengiklan (pemodal), dan para pengguna media itu sendiri.

Shoemaker dan Reese (1996: 105) berpendapat bahwa untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang pekerja media (para komunikator massa), juga harus dilihat bagaimana rutinitas yang melingkupi kerja mereka.

Dengan uraian tersebut, maka permasalahan yang diangkat penulis dalam makalah ini adalah "Bagaimana kontrol sosial berperan dalam penempatan berita-berita bernuansa konflik di *newsroom*?"

### *Social Control in the Newsroom: A Functional Analysis*

Warren Breed telah mewawancarai 120 newsmen dalam upaya untuk memahami dan mendokumentasi bagaimana 'kebijakan' surat kabar dibawa oleh reporter ke *newsroom* (Reese, 2007: 2984). Artikel Breed merupakan suatu analisis fungsi bagaimana penerbit surat kabar dan pemiliknya berkomunikasi dan mempertahankan kebijakan mereka. Ia mendefinisikan kebijakan sebagai standar tak tertulis yang mengatur isi surat kabar. Secara umum kebijakan tidak ditentukan oleh kelayakan berita pada cerita tertentu, tapi oleh orientasi politik atau ekonomi dari pemilik atau penerbit. Breed menemukan bahwa para pekerja media tidak secara formal memperhatikan seperangkat aturan

atau pembatasan, tapi lebih mempelajari untaian implisit osmosis atau pesan secara lisan. Pekerja media cenderung mendukung kebijakan untuk berbagai alasan meliputi ketakutan pada sanksi lunak, aspirasi karir, atau paksaan waktu yang sederhana. Deviasi dari kebijakan adalah jarang, tapi biasanya terjadi ketika penerbit tidak sadar pada fakta yang ada atau reporter status '*star*' berusaha untuk lebih luasa bergerak.

Ditulis pada tahun 1955, artikel Breed merujuk hanya pada *newsmen* dan berbicara hanya pada surat kabar. Breed tidak dapat memimpikan keaneragaman jender dan rasial dapat memainkan peran dalam bisnis berita, atau bagaimana teknologi dapat merubah bidang ini secara drastis. Perubahan ini telah dibuktikan secara universal dalam teorinya. Minnis dan Pratt (McQuail, 2000) meletakkan sosialisasi *newsroom* dalam pertimbangan studinya pada humas. Manzingo memperlihatkan bagaimana societal luar seperti juga kerusuhan ras dan pembunuhan Martin Luther King Jr. tahun 1960-an telah mempengaruhi *newsroom*(McQuail, 2000). Tahun 1997, Liebler telah membedakan produksi berita antara reporter pria dan wanita pada sosialisasi *newsroom*(McQuail, 2000).

Sadar bahwa tidak ada berita dibuat dalam kevakuman, Breed fokus pada iklim politik dimana *newsroom* merujuk pada struktur kekuatan yang memengaruhi isi melalui pengaruh individual. Breed mengatakan bahwa imbalan sumber berita diletakkan tidak di antara pembaca, yang secara nyata kliennya, tapi antara kolega dan atasannya(Reese, 2007:2985). Dari hal ini, kita dapat berasumsi bahwa kesesuaian dalam iklim sosial dalam *newsroom* adalah perhatian khusus pada kinerja para pekerja media (sadar atau tidak) dan keinginan mempengaruhi isi dan melencengkan cerita yang dipublikasikan. Sebaliknya, entitas luar tertarik pada pengaruh jangkauan berita dapat disajikan sebaik mungkin dengan menggunakan tekanan pada penerbit, yang kebijakannya dapat pura-pura disampaikan pada para pekerja media melalui osmosis. Sementara reporter mungkin tidak berbagi kepentingan penerbit, atau mungkin faktanya menentang kepentingan tersebut.

Breed berkesimpulan bahwa kebanyakan para pekerja media melakukan hal-hal yang disebutkan di atas dalam berbagai cara, beberapa dari mereka bahkan tidak menyadarinya. Sibuk dengan permintaan yang kompetitif dari hari ke hari dalam menghasilkan berita dan keinginan untuk mencocokkan dalam rajutan kelompok terdekat, kebanyakan

reporter secepatnya dan sebisa mungkin berasimilasi ke dalam peran mendorong kebijakan.

Kunci kekuatan teori Breed ada pada kemampuannya menyeberangi bagian tipe media dan bertahan dari waktu ke waktu. Pendekatan *marketing* terkini untuk berita yang mendominasi industri televisi pada tahun 1970-an telah berubah dinamis pada banyak *newsroom*. Selain perhatian pada tanggung jawab sosial, pendekatan *marketing* khususnya ditujukan dengan volume dan pendapatan khalayak. Hal ini tidak menolak teori Breed, tapi lebih pada mendukung pernyataannya bahwa para pekerja media akan mengambil tujuan manajemen dan melakukan hal yang harus sesuai dalam garis tujuan tersebut. Konglomerasi media modern lebih disukai *businessmen* (yang performanya diuji dengan margin keuntungan) sebagai pimpinan mereka daripada jurnalis veteran. Setelah itu apa yang telah dilakukan 'star' atau reporter veteran, menurut Breed pendatang baru dan reporter baru biasanya ingin berusaha menyamai norma-norma status 'star' dan kerjanya.

Untuk beberapa reporter yang tidak mencari status *star*, ada petunjuk, syarat dan teguran untuk membuat mereka tetap di jalurnya. Menurut Breed, contoh modern bisa jadi seorang reporter yang telah berupaya untuk cerita tentang kepeduliannya pada rendahnya pendapatan lingkungannya hanya untuk mendapati lebih banyak cerita atau berupaya masuk pada kelas sub-urban menengah. Meski demikian, editor tidak sampai menghukum reporter yang memenuhi kebutuhannya. Mereka dapat membantu meningkatkannya dengan banyak cerita mengenai kepedulian pada survei pembaca yang lebih *powerful* untuk mengarahkan reporter liberal menuju kelas 'mainstream' dan isu kekuasaan.

Reporter dilatih untuk mengikuti editornya, sebagai atasan dan penjaga yang memberi imbalan dan sanksi di *newsroom*. Breed menemukan bahwa kebijakan media hampir tidak pernah didiskusikan atau didefinisikan. Hal ini dikumpulkan oleh reporter yang membaca isi dari publikasinya sendiri atau dalam hasil karya terbaru dengan melihat cerita atau isu apa yang menerima terpaan terbaik, contohnya halaman depan atau penempatan halaman depan dan bagian mana yang diedit dan dihilangkan tanpa seni atau foto yang membuat mereka tampak mencolok.



Breed menyebutkan beberapa contoh bagaimana dan kapan reporter dapat menumbangkan kebijakan surat kabar, seperti gaya reporter yang mengambil dan memilih sedikit kesalahan apa yang dia liput dari sekian banyak berita yang ditawarkan. Dia berkesimpulan bahwa ada sedikit perubahan dalam pengabdian kebijakan surat kabar tanpa lobby, studi dan permintaan dari organisasi profesional surat kabar, sekolah jurnalis, Serikat Kerja Surat Kabar, atau dengan peningkatan masukan dan permintaan dari pembaca surat kabar.

Sementara Breed menjelaskan teorinya, dia terlihat mengeneralisasikan dengan secara lebih luas pada aktivitas pers dan reporter surat kabar. Dalam kasus ini, lebih dari beberapa dekade sejak karyanya, teori-teori Breed telah dikonfirmasi dan dikembangkan. Riset-riset sekarang fokus tidak hanya pada kepemilikan dan kebijakannya yang membentuk dan mengendalikan pesan media. Rutinitas media mempengaruhi isi. Pamela Shoemaker dan Stephen Reese mengilustrasikan hal ini dalam bukunya *Mediating the Message* tahun 1996, yaitu bahwa semakin lama seseorang bekerja untuk organisasi media maka semakin terbiasa mereka pada kebijakan organisasi baik yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan.

Shoemaker dan Reese (1996; Keith, 2011: 1) mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa yang cocok dengan rutinitas media lebih disukai untuk diliput daripada yang tidak cocok. Contohnya, isu dan masalah yang tidak sesuai dengan '*beatnewsroom*' tidak akan diliput. Konferensi pers yang diselenggarakan setelah *deadline* pers atau TV tidak akan diliput. Kesimpulannya, semakin banyak liputan jurnalis pada peristiwa yang ada maka semakin sama cerita mereka, karena mereka cenderung mendiskusikan liputan mereka bersama-sama dan membaca satu sama lain cerita untuk validitasnya.

Sekarang dengan kelaziman yang besar, birokrasi organisasi berita, lebih pada level atas keputusan tentang berita dibuat berdasarkan kepentingan ekonomi daripada keberpihakan profesional reporter atau pada kepentingan tetap dari pemilik tunggal. Tidak hanya pemilik perusahaan, tapi juga manager tingkat atas lebih suka membuat keputusan berdasarkan ekonomi daripada pertimbangan profesional. Pemilik yang ada di tempat lain seperti biasanya masalah dalam rantai media, kurang disukai untuk mendorong agresifitas liputan dalam komunitas lokal.



Akhirnya, sepertinya sumber berita menjadi lebih dibatasi karena keinginan untuk membuat lebih dan lebih banyak lagi uang, maka rutinitas media sekarang ini lebih diikuti untuk memproduksi berita secepat mungkin dan se-efisien mungkin. Penciptaan rutinitas media membantu dalam mengawasi isi berita. Editor menerapkan kebijakan manajemen sampai pada level reporter untuk mengurangi beban kerjanya dalam mematok bentuk tulisan berita. Hal ini disadari atau tidak para pekerja media itu sendiri mengabadikan kebijakan manajemen (pemilik media) dengan dalil apa pun terutama ekonomi dalam membuat dan menyajikan informasi kepada masyarakat.

### **Rutinitas Media**

Pada dasarnya individu (para komunikator massa yang tergabung dalam sebuah media massa) merupakan makhluk sosial yang berpartisipasi dalam pola-pola tertentu yang mereka sendiri tidak ikut menciptakannya. Cara berbicara dan berpikir pun dalam bahasa dan pola pikir kelompok di mana mereka berada. Sebagai bagian dari group, individu mengembangkan *style* berpikir tertentu yang pada derajat tertentu merupakan respon dari situasi yang umum (*common situation*). Media rutinitas inilah yang menunjuk pada pola-pola tertentu, bentuk dan praktek yang secara terus-menerus terjadi dalam aktivitas pekerja media. Wajar jika dikatakan bahwa rutinitas media melekatkan (meniscayakan) standarisasi, yakni: kohesivitas seperangkat peraturan dan norma yang merupakan bagian integral dari profesional media (Shoemaker & Reese, 1996: 106; Keith, 2011: 1).

Rutinitas media sesungguhnya menunjukkan aktivitas keseharian (*the-day-to-day-activities*) para pekerja media yang lebih rendah (*lower-level*), seperti reporter, editor dan penulis. Hasil penelitian Tuchman (1977; Shoemaker & Reese, 1996: 108) menunjukkan bahwa reporter yang telah menguasai rutinitas model-model *processing* berita menunjukkan profesional dalam pekerjaan mereka (seperti bagaimana menyusun pertanyaan, bagaimana menangani *hard* atau *soft news*, dan bagaimana menentukan teknik penulisan bagi masing-masing berita). Dalam konteks inilah tampilan isi sebuah media dapat dipahami dengan mengkaji bagaimana memahami rutinitas media yang berjalan: "*to understand what becomes news we must understand the routines that go into its construction*". (Shoemaker & Reese, 1996: 108).

Rutinitas media pada suatu saat lebih berorientasi pada suatu kutub namun pada saat lain pada kutub yang lain pula, tergantung kebutuhan media itu sendiri. Rutinitas penulisan berita dengan pola piramida terbalik (*inverted pyramid*) misalnya lebih berorientasi pada pembaca (konsumen) dan organisasi media (produsen atau pemilik atau pengelola media), namun tidak kepada sumber beritanya (*supplier*).

Seiring dengan peran media sebagai *profit-making enterprise*, media berusaha untuk membuat produk yang menghasilkan keuntungan. Karenanya organisasi media massa banyak digambarkan sama dengan organisasi bisnis lainnya, yang selalu mengembangkan pasar bagi produk mereka.

Guna memprediksi produk media seperti apa yang dianggap menarik dan penting bagi *audiences* (khalayaknya), rutinitas media pun membentuk serangkaian asumsi yang lazim dikenal dengan "*news values*" atau nilai berita. Dalam hal ini Shoemaker dan Reese mengatakan bahwa nilai berita berasal dari perhatian dan minat khalayak yang tertentu (*limited*). Bahkan jika media dapat menceritakan segala sesuatu yang terjadi dalam satu hari, maka yang demikian menjadi tidak menarik lagi. Bahkan, terkadang berita yang paling penting (baik) adalah sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan atau sesuatu yang secara langsung berpengaruh pada kehidupan keseharian (Shoemaker & Reese, 1996: 111-112).

Tuchman (1973; Shoemaker & Reese, 1996: 120) menemukan bahwa para pekerja media "menggambarkan" kejadian yang tak diharapkan berdasar pada bagaimana organisasi media berkompromi dengan kejadian-kejadian yang ada. Dengan mengarahkan pekerja media untuk mencari fakta dan kejadian di luar dari sebuah konteks dan menyusun kembali mereka ke dalam bentuk yang sudah ditetapkan, rutinitas menghasilkan bahan berita (*news stories*) yang mudah diterima. Proses inilah yang pada gilirannya akan mereduksi kejadian yang sesungguhnya (Shoemaker & Reese, 1996: 120).

Di luar rutinitas media tersebut, media massa sesungguhnya memiliki peran sosial yang penting dalam masyarakat, yang membedakannya dengan sejumlah institusi lainnya seperti seni, keluarga, sekolah (pendidikan), ilmu pengetahuan, agama, dan lainnya. Secara umum, sebagaimana yang diungkapkan Dennis McQuail (2000: 51), beberapa segi media massa yang berbeda tersebut antara lain adalah:

Media massa memiliki fungsi pengantar (pembawa) bagi segenap macam pengetahuan. Jadi, media massa juga memainkan peran institusi lainnya.

1. Media massa menyelenggarakan kegiatannya dalam lingkungan publik. Pada dasarnya media massa dapat dijangkau oleh segenap anggota masyarakat secara bebas, sukarela, umum, dan murah;
2. Pada dasarnya hubungan antara pengirim dan penerima seimbang dan sama;
3. Media massa menjangkau lebih banyak orang daripada institusi lainnya dan sudah sejak dulu “mengambil alih” peranan sekolah, orang tua, agama, dan lain-lain.

Menurut asumsi tersebut, lingkungan simbolik di sekitar (informasi, gagasan, kepercayaan dan lain-lain) seringkali diketahui melalui media massa. Media massa juga yang dapat mengaitkan semua unsur lingkungan simbolik yang berbeda. Lingkungan simbolik itu semakin dimiliki bersama oleh masyarakat jika semakin berorientasi pada sumber media yang sama (tentu saja dalam lingkungan yang sama pula) (Shoemaker & Reese, 1996:52).

Setiap individu atau kelompok memiliki dunia persepsi dan pengalaman yang unik, namun mereka memerlukan kadar persepsi yang sama terhadap realitas tertentu sebagai prasyarat kehidupan sosial yang baik. Sumbangan media massa dalam menciptakan persepsi demikian selain lebih besar dibanding institusi lainnya, pada dasarnya diberikan dari hari ke hari secara berkesinambungan dan dampaknya muncul secara lambat laun dan tanpa disadari masyarakat penggunanya.

Asumsi lainnya adalah bahwa media massa memiliki peran mediasi (penengah atau penghubung) antara realitas sosial yang objektif dengan pengalaman pribadi. Dalam perannya ini, media massa berperan sebagai penengah dan penghubung dalam pengertian bahwa: media massa seringkali berada di antara masyarakat (penggunanya) dengan bagian pengalaman yang lain yang berada di luar persepsi dan kontak langsung; media massa dapat saja berada di antara masyarakat dengan institusi lainnya seperti hukum, industri, pemerintahan, dan lain-lain; media massa dapat menyediakan saluran penghubung bagi pelbagai institusi yang berbeda; media massa seringkali menyediakan bahan untuk membentuk persepsi kita (masyarakat) terhadap kelompok dan institusi

(organisasi) lainnya serta peristiwa tertentu. Bahkan, pengetahuan kita tentang masyarakat pun banyak bersumber dari media massa.

Mediasi sebagaimana yang dimaksud sebelumnya, dapat berlangsung dalam pelbagai bentuk, tergantung pada tingkat dan bentuk kegiatan, tujuan, interaktivitas dan efektifitas. Mediasi mengandung banyak manifestasi kegiatan, mulai dari hubungan langsung antara satu dengan lainnya melalui negosiasi, sampai dengan pengendalian oleh seseorang terhadap lainnya. Variasi manifestasi kegiatan tersebut dapat dipahami dengan memperhatikan citra komunikasi yang menunjukkan pelbagai aspek cara media menghubungkan kita dengan "realitas", di mana peran mediasi tergambarkan sebagai berikut: (Shoemaker & Reese, 1996: 52-53)

*Jendela* pengalaman yang meluaskan pandangan kita dan memungkinkan kita mampu memahami apa yang terjadi di sekitar, tanpa campur tangan pihak lain atau sikap yang memihak.

*Juru bahasa* yang menjelaskan dan memberi makna terhadap peristiwa atau hal yang terpisah dan kurang jelas.

1. *Pembawa atau pengantar* informasi dan pendapat.
2. *Jaringan interaktif* yang menghubungkan pengirim dan penerima melalui pelbagai macam umpan balik.
3. *Papan penunjuk jalan* yang secara aktif menunjukkan arah, memberikan bimbingan dan instruksi.
4. *Penyaring* yang memilih bagian pengalaman yang perlu diberi perhatian khusus dan menyisihkan aspek pengalaman lainnya, baik secara sadar dan sistematis maupun tidak.
5. *Cermin* yang memantulkan citra masyarakat terhadap masyarakat itu sendiri; biasanya pantulan citra itu mengalami perubahan (distorsi) karena adanya penonjolan terhadap segi yang ingin dilihat oleh para anggota masyarakat, atau seringkali pula sebagai segi yang ingin mereka hakimi atau cela.
6. *Tirai atau penutup* yang menutupi kebenaran demi mencapai tujuan propaganda atau pelarian dari suatu kenyataan (*escapism*).

Beberapa citra tersebut lahir dari analisis eksternal terhadap kegiatan media massa, namun kebanyakan citra tersebut juga berasal dari defenisi diri para pelaku media massa itu sendiri. Dalam derajat tertentu

bahkan media massa seringkali menilai dirinya sebagai refleksi dari masyarakat, yang menampilkan gambaran masyarakat secara lebih jelas dan memungkinkan unsur-unsur dalam masyarakat mengekspresikan dirinya ke segenap anggota masyarakat.

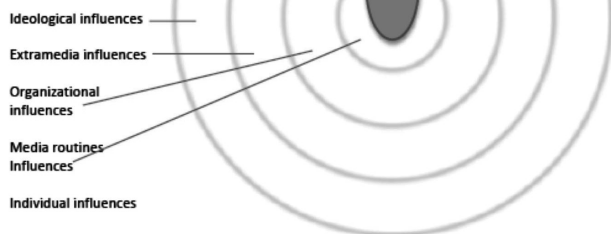
Konsep media massa sebagai penyaring pun (proses *gatekeeping*) pada dasarnya telah diakui masyarakat, karena media massa seringkali melakukan seleksi dan penafsiran terhadap sesuatu hal (masalah) yang dipandang justru membingungkan. Tidaklah mengherankan jika para pelaku media (komunikator massa) tidak mau menerima konotasi negatif kata penyaring atau kontrol. Di sinilah kemudian terdapat perbedaan pendapat yang tajam di kalangan media mengenai hal sejauh mana kegiatan media massa harus bersifat netral, reflektif, partisipatif atau menggerakkan.

Berdasarkan hasil dari studi-studi komunikasi yang fokus pada posisi *newsroom*, maka Shoemaker yang telah menulis buku tentang *gatekeeping* yang sangat berpengaruh pada tahun 1991, memperbaharui konsepnya pada tahun 2009. Dalam buku terbaru mengenai *Gatekeeping Theory*, Shoemaker and Vos memahami bahwa proses *gatekeeping* terdiri atas lima level (Keith, 2011:1):

1. *Individual, in which selection of content is influenced by individual communicators, such as Mr. Gates.*
2. *Communication routines, where content selection is influenced by "norms of selection that have evolved over the history of mass communication".*
3. *Organizational, where group decision-making in specific settings affects content.*
4. *Social institution, where content is influenced by such factors as markets, audiences, advertisers, and interest groups.*
5. *Social system, in which content is influenced by the social systems or ideologies of societies.*

Figure 1

**Revision 1 of model  
of a hierarchy  
of influences  
on media content  
by Shoemaker  
and Reese**



**This reconceptualization of the visual used with Shoemaker and Reese's theoretical model of a hierarchy of influences on media content depicts a situation in which strong media routines have not yet developed. In this situation—common in the early 21<sup>st</sup> century in convergence/multimedia journalism and newer-media journalism—the individual can breach the thin or non-existent layer of constraints from media routines and have a greater-than-normal influence on media content.**

Gambar. 2.5 ????????????????

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kirk dan Miller (Moleong, 2001: 3) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pekerja media di TV One.

## Peran Kontrol Sosial dalam Penempatan Berita Bernuansa Konflik di *Newsroom*

Dalam konteks pemberitaan konflik Aceh, semangat kebangsaan dan patriotisme dari pers Indonesia menurut berbagai studi dapat dikategorikan menurun atau bahkan tidak nampak sama sekali. Ada kesan bahwa media membentuk hiper-realitas apabila di dalam media tanda sebenarnya, tanda palsu, tanda menipu atau tanda ekstrim hadir secara sinkronik, tumpang-tindih dan saling silang-menyilang. Hal ini diperparah dengan ketiadaan suatu analisis, kritik atau penjelasan yang menyertainya, sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara benar dan salah, asli, dan palsu.

Penggunaan tanda palsu, tanda menipu, tanda artifisial atau tanda ekstrim di dalam konteks konflik atau perang biasanya dilakukan oleh kedua belah pihak yang terlibat konflik. Di samping perang yang terjadi di lapangan, terjadi perebutan kekuasaan pengetahuan atas tanda dan makna. Perang tanda dan makna pada tingkat yang melampaui realitas perang itu sendiri dan pada akhirnya menjelma menjadi sebuah realitas media yang lepas dari realitas yang sesungguhnya.

Dalam pembentukan opini publik untuk kepentingan semangat kebangsaan dan patriotisme, TNI tentu saja berharap bahwa hanya 'realitas' yang telah didefinisikan mereka yang boleh beredar di masyarakat. Sulit bagi mereka untuk memperolehnya dalam era reformasi sekarang ini. Bila terjadi, hal ini memiliki dan akan memberi keuntungan besar bagi TNI dalam memenangkan konflik di Aceh. Pertama, bahwa kebenaran atas realitas yang terjadi di Aceh dipahami dan diyakini sebagai benar oleh masyarakat seperti diinginkan TNI.

Kedua, pihak GAM kehilangan akses dalam perang informasi dan pembentukan opini tersebut, hal ini akan berdampak pada dukungan politis dari dalam dan luar negeri. Bila ini bisa terjadi maka TNI bisa dianggap telah memenangkan perang wacana, mengingat masih banyak saluran komunikasi lainnya. Preferensi utama TNI dalam hal ini ialah kalimat yang umum beredar di kalangan pembaca buku-buku Marxisme bahwa 'jika satu dosa dinyatakan beribu-ribu kali sebagai pahala, maka suatu kali dosa itu berubah menjadi pahala'. Maka tidaklah mengherankan kalau TNI menginginkan '*both cover side*' itu tidak terjadi.

Gagasan sosialisasi mencakup unsur pengendalian sosial dan paling tidak beberapa kecenderungan penentuan realitas yang menguntungkan tatanan sosial yang telah ada. Salah satu pandangan *social control in newsroom*, menyatakan bahwa umumnya tindakan media mendukung nilai-nilai dominan dalam masyarakat atau bangsa melalui gabungan pilihan pribadi dan lembaga, tekanan dari luar, dan antisipasi tentang apa yang diharapkan pemirsa yang heterogen.

Dalam pandangan *social control in newsroom* pada pemberitaan media, berdasarkan 'analisis isi terbalik' yang membandingkan isi media dengan studi komunitas, menemukan bahwa media berusaha secara konsisten untuk meniadakan berita yang diperkirakan akan mengganggu nilai-nilai agama, keluarga, komunitas, bisnis, dan patriotisme. Dapat dikatakan bahwa kekuasaan dan kelas dilindungi oleh aktivitas media.



Aktivitas media yang tercermin dalam rutinitas media tergantung pada kebutuhan media itu sendiri. Rutinitas penulisan berita dengan pola piramida terbalik lebih berorientasi pada pembaca atau konsumen dan organisasi media atau produsen atau pemilik atau pengelola media. Dalam hal hilangnya dimensi kekuasaan dan proses sosial dalam berita televisi mencirikan ketidakseimbangan perhatian media terhadap dunia, pemusatan perhatian yang ditujukan pada individu ketimbang lembaga secara keseluruhan, pemisahan pilihan kebijakan dari hubungan yang mendasari kekuasaan ekonomi dan politik.

Hasilnya adalah sejenis ideologi yang menunjukkan dunia sebagai sesuatu yang tidak berubah dan tidak dapat dirubah, dan orang cenderung menghindari berkembangnya cara pandang yang memungkinkan perdebatan distribusi kekuasaan pengendalian yang berlaku. Hal ini dapat dikatakan bahwa proses ideologi dalam media sebagai suatu penyembunyian dan pengalihan, fragmentasi dan pertalian khayalan. Penyembunyian dan pengalihan mengacu pada kegagalan mengakui fakta dan konflik kelas. Fragmentasi mengacu pada kecenderungan menyangkal atau mengabaikan kepentingan umum kelas pekerja dan cenderung memberi penekanan pada pluralitas, pemenggalan, dan individualitas kehidupan sosial. Pertalian khayalan mengacu pada konsensus nasional tentang itikad baik dan akal sehat yang diterima sebagai kebenaran yang lazim bagi semua golongan.

Unsur tambahan dalam teori pembentukan ideologi konservatif oleh media terletak pada asumsi bahwa media menetapkan jenis perilaku dan kelompok yang menyimpang yang berbahaya bagi masyarakat. Perhatian media seringkali secara demonstratif melebih-lebihkan bahaya dan signifikansi kelompok berdasarkan aktivitasnya dan cenderung berupaya menciptakan kepanikan moral. Dampaknya adalah penyediaan 'kambing hitam' dan obyek pelampiasan kemarahan bagi masyarakat, pengalihan perhatian dari masalah yang sebenarnya yang bersumber dari lembaga di masyarakat, dan berlomba-lomba mendukung prinsip-prinsip ketertiban umum.

Dalam 'tipe aktivitas pers populer tertentu' sukar membedakan penjahat dari ekstrimis politik. Dalam proses pelabelan (pemberian cap) kepada suatu institusi atau individu tertentu amat bergantung pada pihak yang memaknainya. Bagi pendukung GAM tentu saja TNI adalah penjahat yang tengah mencoba terus menjajah mereka dan tentara GAM



merupakan pahlawan. Begitu juga sebaliknya. Hal yang menarik adalah mempertanyakan kelompok masyarakat Indonesia yang tidak berpihak pada keduanya.

Bukan tidak mungkin banyak juga kelas menengah di Indonesia yang berpikiran bahwa baik TNI maupun GAM sama-sama menimbulkan kesengsaraan di kalangan rakyat banyak di Aceh hanya demi kepentingan kelas penguasa dan bisnis semata. Dalam kategori unsur anti sosial, seringkali orang-orang yang mendambakan kesejahteraan dapat diberi label 'pendamba kesejahteraan'. Perlu diingat bahwa media utamanya dimiliki dan dikendalikan oleh pihak yang berkepentingan seperti pemilik modal atau negara yang berkepentingan memiliki dan mempertahankan kekuasaan ekonomi dan politik. Berdasarkan ideologinya sendiri media terikat untuk berfungsi sebagai pembawa pesan yang mendorong timbulnya perubahan sosial yang mendasar. Besarnya kekuasaan pengendalian media seringkali dipandang lebih berharga secara ekonomi dan politik.

Kuatnya keinginan dan tindakan pers Indonesia untuk menerapkan prinsip '*cover both side*' atau berita dua sisi atau dalam prinsip jurnalistik bahwa proses pengumpulan dan analisis serta penulisan berita harus mencakup kedua belah pihak atau berbagai pihak yang terkait dengan isi pemberitaan secara seimbang dan *fair*, maka akan amat sulit bagi TNI untuk memaksakan kehendaknya tersebut kepada kalangan praktisi media di Indonesia. Kecuali TNI atau militer berhasil menerapkan kembali pola dan model kekuasaan 'Orde Baru' dimana militer dan presiden merupakan kelompok kepentingan yang paling berhak menentukan mana yang baik dan mana yang benar bagi rakyat Indonesia atau 'rezim kebenaran yang berkuasa'.

Kalangan pers Indonesia tentu juga tidak ingin 'kalah' dalam pertarungan kepentingan kekuasaan tersebut. Bila mana pemegang kekuasaan dan politik tersebut diartikan sebagai kelompok kepentingan yang paling mampu menentukan mana yang benar dan salah, mana yang baik dan buruk, mana yang bermoral dan tidak bermoral. Dalam hal ini yang nampak adalah suatu kenyataan bahwa salah-benar, baik-buruk itu ditentukan oleh suatu rezim dominan dalam suatu masyarakat.

Logisnya tentu saja pers Indonesia tidak mau didominasi dan dihegemoni oleh TNI dalam proses pemberitaan konflik Aceh ini. Ada prinsip perimbangan berita yang harus dijalani, ada keharusan

untuk memberikan informasi secara benar dan berimbang kepada para pemirsanya, ada kepentingan bisnis dalam dunia pers dimana pers amat mementingkan apa yang ingin diketahui oleh masyarakat. Bila tidak demikian maka terbuka peluang bagi media tersebut untuk ditinggalkan oleh pemirsanya.

## **Simpulan**

Dalam perbincangan mengenai media dan realitas, ada relasi yang tidak dapat dipisahkan antara fakta yang direpresentasikan di dalam media, tanda dan makna yang digunakan di dalamnya, serta kepentingan yang beroperasi di baliknya. Media sering dikatakan sebagai cerminan realitas sosial, yakni representasi obyektif dari realitas. Alih-alih media merupakan refleksi dari realitas, justru media membungkus realitas yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan fakta yang ada. Dalam kondisi yang demikian, yang nampak adalah media menjadi cermin kepentingan berdasarkan struktur sosial di balik kepentingan media itu sendiri.

Aspek yang berperan cukup besar pada isi dan tampilan berita bernuansa konflik di media adalah terkait dengan 'selera pasar' atau peluang pada munculnya pemirsa baru potensial (*new potensial audience*) yang menyukai kehadiran media yang menyajikan sejumlah informasi pada persoalan politik, ekonomi dan konflik di tanah air atau masalah ketahanan nasional seputar isu disintegrasi bangsa yang berkembang saat ini.

Di samping aspek bisnis dan selera pasar, berdasarkan temuan dan hasil peneliti ini, faktor ideologi atau manajemen media yang diberlakukan – termasuk termasuk arahan, keinginan atau 'tekanan' dari pemilik modal/*owner* – adalah adalah faktor berikutnya yang dipandang memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam menempatkan peristiwa atau berita yang bernuansa konflik sebagai berita utama di media.

Berdasarkan kesimpulan di atas, studi berikutnya yang dapat dilakukan adalah kajian tentang pertarungan kelas sosial yang meliputi berbagai unsur lembaga atau organisasi yang ada dalam suatu masyarakat atau bahkan negara. Hal ini perlu dilakukan dalam upaya untuk lebih mendapatkan gambaran yang lebih luas dan mendalam mengenai pertarungan wacana dalam memenangkan perang tanda dan makna yang pada akhirnya tampil di media.

Rekomendasi praktis yang dapat diusulkan dari hasil penelitian singkat ini adalah peluang bagi setiap pihak yang mampu menyediakan

informasi yang aktual, faktual, dan tercepat. Hal ini diperlukan sebagai upaya untuk memfasilitasi media dengan informasi yang memadai guna menyeimbangkan irama kerja mereka yang kian hari kian dituntut kecepatannya.

## Daftar Pustaka

- Kalla, Jusuf, 2009, *Sejarah Konflik Aceh Berawal dari Ketidak-adilan...*  
Diakses 15 April 2012 dari [www.http://umum.kompasiana.com/](http://umum.kompasiana.com/).
- Keith, Susan, 2011, *Shifting Circles: Reconceptualizing Shoemaker and Reese's Theory of a Hierarchy of Influences on Media Content for a Newer Media Era*. WJMCR Vol. 29, 29 Februari , 2011, Diakses 15 April 2012 dari <http://www.scripps.ohiou.edu/>.
- McQuail, Dennis, & Windahl, Sven, 2000, *McQuail's Mass Communication Theory 4<sup>th</sup> Edition*. London: Sage Publications Ltd.
- \_\_\_\_\_, 2005, *McQuail's Mass Communication Theory 5<sup>rd</sup> Edition*, London: Sage Publications Ltd.
- Moleong, Lexy , 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Piliang, Yasraf Amir, 2002, *Hiper-realitas Pemberitaan Konflik Aceh: Ketika Realitas Berbaur dengan Fantasi*. [Kajian Informasi, Pendidikan dan Penerbitan Sumatra \(KIPPAS\)](http://kippas.wordpress.com/). Diakses 5 April 2012 dari <http://kippas.wordpress.com/>.
- Reese, Stephen D., 2007, *Media Production and Content*. Journal of Communication. Diakses 15 April 2012 dari <http://journalism.utexas.edu>.
- Shoemaker, Pamela J., & Rees, Stephen D., 1996, *Mediating The Message: Theories of Influences on Mass Media Content*, Second Edition, USA: Longman Publisher.
- TVOne, 2012, *Polda Aceh Sita 9 Senjata Api Milik Warga*. Diakses 15 April 2012 dari <http://nusantara.tvonenews.tv/berita/>.
- TVOne, 2012, *Pemerintah Telusuri Beredarnya Senjata Bekas Konflik*. Diakses 15 April 2012 dari [www.tvone.co.id](http://www.tvone.co.id).



# KONFLIK DALAM BERITA OBJEKTIVITAS DALAM PEMBERITAAN KONFLIK

**Lisa Lindawati**

## **Pendahuluan**

Konflik adalah salah satu nilai berita yang kuat. Tak heran jika media “hobi” memberitakan konflik. Tak heran pula jika konflik menjadi salah satu “favorit” media untuk dijadikan headline. Ada keresahan ketika media memberitakan konflik secara dramatis. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana media memberi judul pada berita-berita konflik. Selain itu, rasa dramatis juga direpresentasikan dari cuplikan kejadian yang diliput, baik dalam bentuk foto maupun audio visual. Belum lagi ditambah dengan narasi yang menambah kengerian audiens.

Apakah konflik-konflik tersebut benar-benar terjadi? Sungguh sebuah penodaan besar bagi media jika jawabannya tidak. Sebab, hal tersebut memang benar-benar terjadi. Pembakaran, perkelahian, pengeboman, kerusuhan, penjarahan, dan lain-lain memang sedang terjadi di banyak tempat di negara ini. Apakah harus seperti itu menyajikan kebenaran konflik?

Objektivitas menjadi isu sentral dalam kode etik jurnalistik, yakni bagaimana media menyajikan sebuah fakta apa adanya. Melihat berbagai pemberitaan konflik, sepertinya objektivitas tersebut perlu dikaji ulang. Tulisan ini mencoba menelusuri konsep objektivitas dalam jurnalisme. Apakah objektivitas yang diterapkan dalam pemberitaan konflik, khususnya di Indonesia, sudah tepat? Ataukah perlu ada pendefinisian ulang terhadap konsep tersebut? Bagaimana bentuk objektivitas yang sesuai dalam pemberitaan konflik?

Kepentingan untuk mengkaji ulang objektivitas dalam berita konflik tidak dapat dilepaskan dari peran media sebagai pendukung ketahanan nasional. Dalam pengertian luas, ketahanan nasional dapat didefinisikan

sebagai kekuatan yang menjaga eksistensi dan kedaulatan suatu negara. Di sinilah peran semua elemen dalam menciptakan pertahanan tersebut menjadi penting, termasuk media. Ketersediaan informasi yang benar menjadi penting untuk menjadi bekal pengambilan keputusan yang tepat dalam menjaga eksistensi dan kedaulatan. Kebenaran informasi itulah yang akan dikejar dalam memahami prinsip objektivitas dalam berita konflik.

## Memahami Objektivitas dalam Jurnalisme

Objektivitas adalah pusat dari etika media. *Objectivity is the media's natural and ideal public ethic* (Kaplan, 2010). Menyajikan peristiwa berdasarkan fakta di lapangan, begitu kiranya pemahaman sederhana dari *term* tersebut. Setidaknya itulah pemahaman mengenai objektivitas dari paham realisme, yang mencita-citakan bahwa media bisa menjadi sebuah cermin kebenaran (*truth*). Kebenaran ditekankan pada akurasi observasi terhadap suatu kejadian. *"True beliefs fit with or correspond to the world as it really is"* (Ward, 2009). Dalam praktik jurnalistik, media tidak seharusnya menambahi atau mengurangi apa pun dari sebuah fakta atau peristiwa yang terjadi. Ward (2009) memaparkan, *"A report is objective if and only if it is a factual, accurate recording event. It reports only the facts, and eliminates comment, interpretation, and speculation by the reporter. The report is neutral between rival views on an issue"*.

Media tidak diperbolehkan, bahkan untuk sekedar memberikan interpretasi dan analisis dari sebuah peristiwa. *"It is the mission of the reporter to reproduce facts and the opinion of others, not to express his own"* (Ward, 2009). Itulah pandangan "konvensional" dari makna objektivitas jurnalisme.

Setidaknya ada enam standar objektivitas dalam berita (Ward, 2009): (1) faktual, sesuai dengan fakta yang sudah diverifikasi; (2) seimbang dan fair (*balance and fairness*); (3) *non-bias*; (4) independen; (5) *non interpretation*; (6) netral.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Denis McQuail (2010). Dalam konsep McQuail, objektivitas dapat dilihat dari dua hal: (1) *Factuality*, dimana di dalamnya harus mengandung kebenaran, informatif, dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat; (2) *Impartiality*, yaitu memberitakan dengan seimbang dan netral.

Lebih lanjut, McQuail menjelaskan setidaknya ada tiga poin krusial yang harus dipahami mengenai objektivitas dalam praktik jurnalisme. *Pertama*, media harus menyediakan informasi yang memadai dan relevan mengenai peristiwa dalam masyarakat dan dunia global. *Kedua*, informasi harus objektif dalam pengertian faktual, akurat, jujur, cukup lengkap, dan sesuai dengan kenyataan, dan reliabel dalam pengertian sudah melalui proses kroscek dan terhindar dari opini. *Ketiga*, informasi seharusnya seimbang dan tidak terpotong (*impartial*), memberikan perspektif alternatif dan interpretasi dalam bahasa yang tidak sensasional, tidak bias. Upaya ini dilakukan seoptimal mungkin.

Di bawah sebuah objektivitas, jurnalis mengadopsi metode para ilmuwan alam dan “berjanji” untuk mengurangi nilai kepercayaan mereka sendiri dan juga nilai yang mengarahkan, mengurangi, atau pun menambahkan apa yang sudah dikatakan dan dilakukan. Tujuannya untuk menghindari penilaian subjektif dan analisis. Jurnalis harus berjuang untuk memberitakan secara holistik. Jurnalis harus menjadi seorang kolektor informasi yang profesional. Disampaikan oleh pendiri Fox (Ward, 2009), *“We report, you decide”*. Jurnalis hanya bertugas untuk melaporkan dan tugas masyarakatlah untuk memutuskan apa yang harus dilakukan ataupun bagaimana menilai sebuah berita.

Seorang reporter yang objektif sudah seharusnya terpisah dari peristiwa. Mereka harus mengeliminasi semua opini. Mereka hanya sekedar melaporkan fakta. Objektivitas dianggap sebuah metode untuk memproduksi dengan akurat, pelaporan kebenaran, dan menunjukkan independensi seorang jurnalis profesional. Ternyata pemahaman ini tidak diterima secara utuh oleh semua kalangan jurnalis. *“Today, the pillar of truth and objectivity show serious wear and tear”* (Ward, 2009). Ada yang “keberatan” dengan pemahaman konvensional atas objektivitas. Pandangan ini mendapat banyak kritik karena mengabaikan fungsi lain dari jurnalisme itu sendiri.

Untuk memahami ulang mengenai objektivitas, perlu kiranya kembali memahami peran pers di tengah masyarakat. Istilah yang paling sering digunakan untuk menjelaskan peran pers dalam masyarakat adalah *“the fourth estate”*. Istilah ini tidak berdefinisi tunggal tetapi merujuk pada pengertian yang sama yaitu mengenai relasinya dengan masyarakat dan demokrasi. *“The idea of the fourth estate, and therefore the meaning of news and journalism and their relationship with democracy and society”* (Berry, 2005).

Hampton (2010) menjelaskan dua model peran pers terkait dengan kekuatannya sebagai pilar keempat. *Pertama*, pers adalah jembatan antara masyarakat dengan negara. Dalam konteks ini, tugas pers hanyalah meyakinkan semua warga dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lain, termasuk dengan negara. *Kedua*, *representative model*, di mana pers tidak hanya sekedar penghubung tetapi juga mampu menjadi “wakil” dari masyarakat. *The press reflected readers interest*.

Kedua model ini mempunyai pengaruh signifikan terhadap pemahaman atas objektivitas. Dalam pandangan pertama, tidak berbeda dengan pandangan konvensional, bahwa seorang jurnalis sudah cukup sekedar melaporkan fakta saja. Hal ini cukup memenuhi fungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan negara. Dalam pandangan *kedua*, pemahaman konvensional tidak cukup mewakili fungsi pers yang sebenarnya. Sebagai representasi dari masyarakat, media tidak dapat hanya berhenti pada menyampaikan fakta. Ada fungsi lebih “dalam” yang harus dipenuhi oleh pers.

Secara ideologis, ada beberapa alasan keberatan terhadap objektivitas “konvensional” (Ward, 2009). *Pertama*, objektivitas dianggap hanya sebuah mitos yang tidak akan dapat benar-benar dicapai. *Kedua*, membuat jurnalis harus menggunakan format baku. Hal ini menyebabkan tulisan tersebut miskin akan analisis dan interpretasi. Objektivitas mengabaikan fungsi lain dari pers itu sendiri, seperti komentar, kampanye, maupun berperan sebagai “anjing penjaga”. *Ketiga*, membatasi kebebasan pers. Demokrasi lebih baik diwarnai dengan beragam opini sehingga muncul “*marketplace of ideas*”.

Selain faktor ideologis, Ward (2009) juga menjelaskan beberapa faktor eksternal yang menyebabkan objektivitas maupun kebenaran “konvensional” mulai disangsikan. *Pertama*, *post modern scepticism* mengenai kebenaran objektif. Henry Luce (Ward, 2009) mengatakan, “*Show me a man who thinks he is objective and I’ll show you a liar*”. Dia berpendapat bahwa dalam dunia yang kompleks perlu ada penjelasan dan interpretasi. *Kedua*, kesinisan terhadap kode etik yang dikalahkan oleh motif pencarian keuntungan industri media. *Ketiga*, jurnalisme “*non-objective*” adalah terbaik untuk pembentukan wacana yang interaktif.

Terkait faktor eksternal kedua yang dipaparkan oleh Ward, Kaplan (2010) berpendapat bahwa keberadaan pers sebagai *fourth estate* diganggu oleh komersialisasi. Ada beberapa hal yang mendorong terjadinya



komersialisasi: (1) perkembangan teknologi menimbulkan konglomerasi media, mengingat biaya produksi tinggi; (2) sebagian besar media merupakan konglomerasi dari industri non media; (3) pergeseran nilai berita menjadi hal-hal yang cenderung menarik pengiklan; (4) orientasi terhadap profit menyebabkan penekanan besar-besaran terhadap biaya perolehan berita (*newsgathering*).

Penjelasan lain yang dapat membantu memahami kondisi ini disampaikan oleh Alan McKee dalam *The Public Sphere: An Introduction* (2005). Menurunkan dari konsep Jurgen Habermas, media dipahami sebagai sebuah *public sphere* (ruang publik), di mana di dalamnya dibentuk wacana yang berguna bagi kepentingan bersama. *Public interest* menjadi sebuah istilah yang mencerminkan tujuan dari keberadaan ruang publik tersebut.

Keberadaan ruang publik saat ini sudah teracuni setidaknya oleh lima hal. *Pertama, trivialization*, di mana ruang publik dipenuhi dengan hal “remeh temeh”. Implikasinya adalah pada wacana yang dihasilkan oleh keberadaan ruang publik, termasuk di dalamnya media. *Kedua, commercialization*, seperti yang telah dipaparkan oleh Ward, bahwa media sudah dikooptasi oleh kepentingan bisnis. Orientasi terhadap keuntungan mematahkan semangat menjunjung kepentingan bersama. *Ketiga, spectacle*, ruang publik kita dipenuhi oleh “masyarakat penonton”. Kecenderungan hanya menikmati dan menonton sebuah peristiwa menurunkan secara drastis *real engagement* masing-masing individu dalam mengupayakan pemenuhan kepentingan bersama. *Keempat, fragmentation*, dimana ruang publik sudah terpecah sedemikian rupa yang meminimalisir kesatuan ide dan wacana. *Kelima, apathy*, yaitu terdiri dari individu-individu yang apatis terhadap kepentingan bersama.

Keadaan ini membuat objektivitas yang dicita-citakan kaum realis semakin terdistorsi. Hanya saja hal ini tidak boleh kemudian membuat seorang jurnalis mengorbankan “objektivitas” dan menyerah kepada keadaan menyulitkan. Mendefinisikan kembali objektivitas tersebut adalah hal yang harus dilakukan.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan kembali pada hakikat awal keberadaan pers itu sendiri. Bila kemudian kita masih percaya dengan peran pers sebagai “*the fourth estate*”, sudah sepatutnya kita kembali pada komitmen untuk menjunjung tinggi kepentingan publik, dalam kaitannya dengan demokrasi. Pers, dalam keadaan

bagaimana pun, harus tetap mampu berkontribusi dalam menumbuhkan iklim demokrasi yang sehat, dengan menjunjung kepentingan publik. Lippman (Ward, 2009) mengatakan, “*only served democracy if it provided objective information about the world, not ‘stereotypes’*”.

Selalu ada konflik kepentingan yang muncul dalam aktivitas keseharian seorang jurnalis. Konflik tersebut dapat muncul di antara berbagai pilihan moral, tentang kebutuhan public dan apa yang ingin diketahui, dan juga motif keuntungan, individu reporter itu sendiri, politik, agama, dan bias lainnya. Konflik ini memunculkan ketegangan mengenai refleksi pilihan moral tentang bagaimana melaporkan fakta. Meskipun demikian, ada sebuah komitmen yang harus senantiasa dipegang. “*Journalist are morally committed to maximally relevant truth-telling in the public interest and force the public good*” (Jacquette, 2010).

Untuk menjawab tantangan ini, Ward (2009) memberikan alternatif teori untuk melihat *truth and objectivity*. Ward menawarkan sebuah konsep “*pragmatic objectivity*”. Ward menjelaskan bahwa “*objectivity is valued, pragmatically, as a means to the goals of truth, fair judgement and ethical action*”. Ada lima tahap yang ditawarkan (1) *journalism as Active, Truth Seeking Inquiry*; (2) *Journalism as an Interpretive Exercise*; (3) *Objectivity as Holistic Testing Interpretation*; (4) *Testing as Based in generic and domain specific standard*; (5) *Objectivity not opposed to passion*. Memang masih parsial, tapi setidaknya alternatif ini menjadi kajian awal untuk mendefinisikan kembali prinsip objektivitas dan kebenaran dalam jurnalisme. Ada kebutuhan nyata untuk memahami objektivitas tidak sekedar menyajikan fakta tetapi juga memperhatikan beberapa elemen lain agar tidak “menyakiti” kepentingan publik. Elemen-elemen inilah yang akan dielaborasi lebih lanjut.

## **Memahami Konflik**

Konflik merupakan keadaan anomali, keadaan yang bertolak belakang dari suatu kondisi stabil. Dalam Teori Struktural Fungsional, konflik dianggap sebagai suatu masalah yang mengancam stabilitas suatu sistem. Salah satu pemikir di bawah bendera kelompok teori ini adalah Talcott Parson. Dalam teorinya, setidaknya ada empat elemen yang saling mendukung kestabilan sistem, yaitu *Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*.

Teori ini dikembangkan oleh Robert Merton yang menyangsikan teori Talcott Parson. Merton tidak sependapat bahwa setiap sistem selalu menuju pada stabilitas. Ada kalanya sistem tersebut lari ke arah negatif, yaitu ketidakstabilan. Konsep disfungsi sistem menjadi penyempurnaan dari Teori Talcott Parson. Selain itu, ada beberapa pemikir lain yang mencoba untuk memberikan sumbangan perspektif Struktural Fungsional.

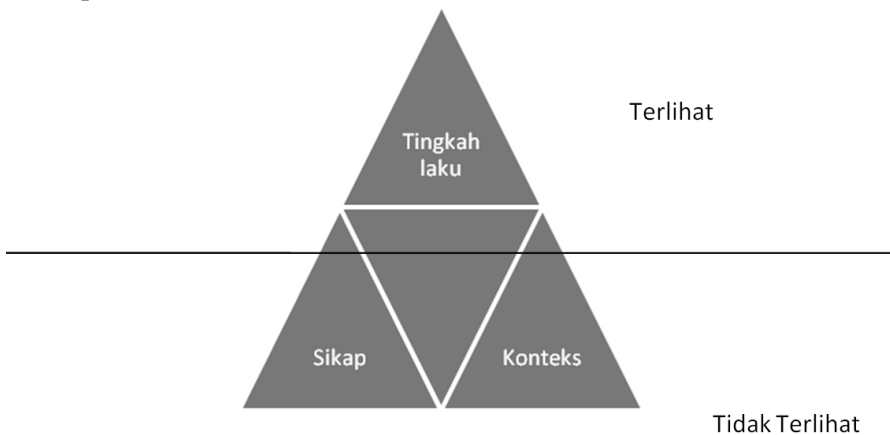
Meskipun sudah mengalami pergeseran sedemikian jauh, Teori Struktural Fungsional tidak cukup mampu menjelaskan kondisi riil masyarakat. Teori di bawah perspektif ini cenderung abai terhadap pergerakan masyarakat yang menimbulkan konflik. Seperti telah disebutkan sebelumnya, konflik dianggap sebagai masalah dalam sebuah sistem. Konflik adalah sesuatu yang “pasti” ada dalam masyarakat. Kelemahan ini kemudian mendorong lahirnya teori berbasis konflik. Sebagai “kebalikan” dari Teori Struktural Fungsional, teori konflik meletakkan basis analisisnya pada konflik.

Salah satu yang mengembangkan teori ini adalah Lewis Coser (Ritzer dan Goodman, 2003). Dalam pengertian sederhana, konflik dapat didefinisikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang berpikir memiliki tujuan tidak sejalan. Ada beberapa situasi yang melibatkan atau dapat menciptakan konflik (Pecojon, 2011) yaitu: (1) Sumberdaya terbatas; (2) Komunikasi yang kurang atau tidak ada sama sekali antara pihak yang terlibat; (3) Pihak terlibat mempunyai persepsi yang salah satu sama lain; (4) Terdapat kurangnya rasa percaya; (5) Sengketa yang tidak terselesaikan di antara mereka; (6) Para pihak tidak menghargai hubungan diantara mereka; dan juga; (7) kekuatan tidak tersebar secara merata.

Coser (Ritzer dan Goodman, 2003) mengembangkan apa yang disebut dengan “*The Function of Social Conflict*”. Konflik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika masyarakat. Konflik tidak sepenuhnya negatif. Konflik mempunyai beberapa fungsi yaitu: (1) Konflik mampu membantu mempererat ikatan kelompok yang terstruktur secara longgar; (2) Konflik dengan satu kelompok dapat membantu menciptakan kohesi melalui aliansi dengan kelompok lain; (3) Konflik dapat mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi; (4) Konflik juga membantu fungsi komunikasi. Konflik memungkinkan kedua pihak yang bertikai menemukan ide yang lebih baik mengenai

kekuatan relatif masing-masing kelompok dan meningkatkan kemungkinan untuk saling mendekati atau saling berdamai.

Untuk memahami konflik, ada beberapa elemen yang perlu dilihat dengan jelas. Segitiga Konflik menjadi alat bantu untuk melihatnya (Pecojon, 2011). *Pertama*, tingkah laku. Dalam konflik, tingkah laku adalah hal yang paling kentara untuk dilihat. Apa dan bagaimana yang dilakukan oleh pihak berkonflik dapat dengan jelas dilihat dari perilaku. Tingkah laku tidak dapat merepresentasikan posisi sebenarnya dari kepentingan pihak berkonflik. Alasan tersebut menyebabkan harus diperhatikan juga elemen *kedua*, yaitu Sikap. Sikap lebih tidak kentara daripada tingkah laku. Sikap ada dalam level kognisi masing-masing individu atau kelompok. *Ketiga*, konteks, yaitu latar belakang dan segala faktor yang menyebabkan, mendukung, ataupun dipengaruhi oleh konflik. Ketiga elemen tersebut menjadi pisau analisis untuk memahami suatu peristiwa konflik.



**Gambar 2.6. Segitiga Konflik**

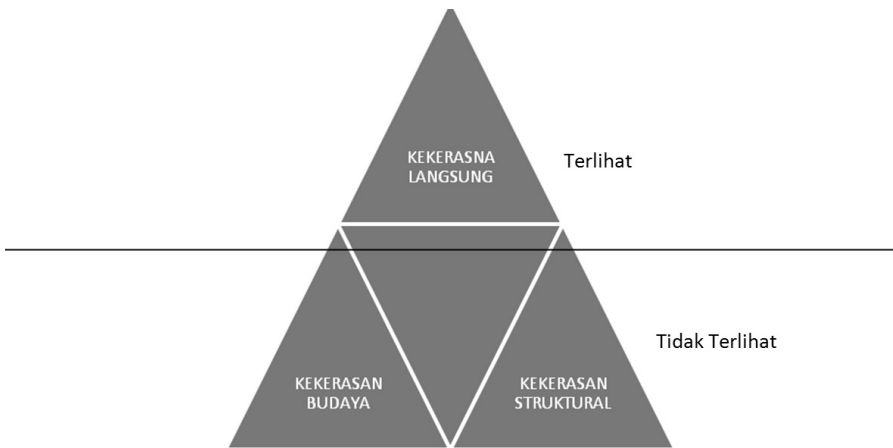
Ada beberapa tipe konflik jika dilihat dari tujuan dan manifestasi (tingkah laku) dari pihak yang berkonflik (lihat tabel 1). *Pertama*, Konflik Laten. Konflik ini dapat terjadi ketika ada dua individu atau kelompok atau lebih mempunyai perbedaan tujuan tetapi mempunyai tingkah laku atau cara yang sama untuk mencapai tujuan (yang berbeda) tersebut. Konflik ini tidak terlihat secara kasat mata karena memang seakan-akan sejalan. Faktanya, tujuan dari masing-masing kelompok berbeda. Meskipun tidak kasat mata, konflik seperti ini sulit untuk didamaikan karena tidak ada titik temunya. *Kedua*, Konflik Terbuka, terjadi ketika

ada tujuan berbeda dan ditempuh dengan tingkah laku yang berbeda. Konflik terjadi secara kasat mata dan biasanya diakhiri dengan menentukan jalan masing-masing tanpa mengganggu tujuan satu dengan lainnya. *Ketiga*, Konflik permukaan, terjadi ketika ada kesamaan tujuan tetapi ditempuh dengan cara berbeda. Konflik ini mudah untuk ditemukan karena adanya persamaan tujuan.

**Tabel 2.2. Tipe Konflik**

TUJUAN ATAU TINGKAH LAKU	SEJALAN	TIDAK SEJALAN
TIDAK SEJALAN	KONFLIK LATEN	KONFLIK TERBUKA
SEJALAN	TIDAK ADA KONFLIK	KONFLIK DIPERMUKAAN

Konflik diidentikan dengan kekerasan. Inilah mengapa pemahaman mengenai bentuk kekerasan menjadi penting. Berikut segitiga kekerasan yang menunjukkan beberapa tipe kekerasan (lihat figur 2). *Pertama*, kekerasan langsung yang biasanya dapat diketahui oleh semua pihak. Kekerasan langsung menimbulkan kerusakan yang sifatnya fisik, baik individu maupun infrastruktur. Contoh kekerasan langsung antara lain perkelahian, tembak menembak, pengeboman, pembakaran, dan lain-lain. *Kedua*, kekerasan budaya. Jenis kekerasan ini tidak kasat mata karena menyentuh aspek afeksi dari individu atau kelompok. Budaya sifatnya tidak manifest karena terdiri dari *norms*, *values*, dan lain-lain. Contoh kekerasan budaya antara lain diskriminasi. *Ketiga*, kekerasan struktural. Kekerasan ini disebabkan oleh ketidakadilan dalam struktur sosial. Biasanya terkait dengan sistem politik maupun ekonomi. Ketidakadilan yang disebabkan oleh struktur masuk dalam kategori kekerasan struktural. Kemiskinan menjadi salah satu dampak nyata dari kekerasan ini.



**Gambar 2.7. Segitiga Kekerasan**

### **Objektivitas dalam Pemberitaan Konflik**

Kesepakatan dalam tulisan ini, objektivitas tidak berhenti hanya pada penyajian fakta yang sebenar-benarnya terjadi. Ada sebuah nilai yang harus dijunjung tinggi bersama oleh jurnalisisme. *The fourth estate* menjadi pegangan kuat bagi para profesional untuk selalu berpihak pada kepentingan publik. Demokrasi menjadi hal yang harus diupayakan dalam praktik jurnalisisme. Nilai-nilai jurnalisisme itu sendiri tidak boleh menyakiti apa yang seharusnya dijunjung, yaitu kebaikan untuk bersama.

Sudah banyak disinggung pada sebelumnya bahwa makna objektivitas merujuk pada spirit untuk mencapai kebenaran. Kebenaran tidak cukup diperoleh dengan menyajikan fakta apa adanya. Perlu ada upaya analisis dan interpretasi untuk mewujudkan perannya sebagai representasi dari masyarakat.

Jurnalisisme tidak boleh hanya berhenti pada penyajian fakta tetapi juga diikuti dengan tanggung jawab mencerdaskan publiknya dan memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan iklim demokrasi. Dalam konteks ini, kita harus mengingat peran media sebagai sebuah ruang publik. Ruang pertukaran ide yang mampu membentuk sebuah wacana tertentu. Sudah selayaknya media, dalam konteks ini adalah pers, berhati-hati dalam menjalankan perannya.

Dalam memberitakan konflik, media harus berhati-hati memahami

prinsip objektivitas yang menjadi pusat dari etika jurnalistik. Harus ada pemahaman mendalam mengenai konflik sebagai objek berita. Pemahaman ini mampu menjadi dasar untuk menentukan langkah strategis dalam memberitakan konflik tanpa harus melukai kepentingan publik, yang notabene adalah hal yang dijunjung tinggi oleh jurnalisisme itu sendiri.

Konflik adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam dinamika kemasyarakatan. Bertolak dari teori konflik, keberadaan konflik mempunyai fungsi tersendiri bagi perubahan masyarakat. Konflik tidak selalu berimbas negatif dan mengarah pada kerugian. Seandainya mampu diarahkan dengan sedemikian rupa maka akan mampu memperbaiki kondisi masyarakat itu sendiri.

Terkait dengan Jurnalisme, Lee (2010) memaparkan,

*“As people, groups, countries, and groups of countries seem to stand in each other’s way (that is what conflict is about) there is a clear danger of violence. But in conflict there is also a clear opportunity for human progress, using the conflict to find new ways, transforming the conflict creatively so that the opportunities take the upper hand-without violence”*

Setidaknya itulah acuan yang menjadikan konflik penting untuk dipahami lebih jauh. Termasuk di dalamnya mengenai elemen yang menyusun sebuah konflik, bentuk konflik, dan juga berbagai bentuk kekerasan yang identik dengan konflik. Pemahaman ini menjadi acuan untuk merumuskan objektivitas dalam pemberitaan konflik dengan lebih bijak dan tidak menyakiti kepentingan publik.

Membahas mengenai pemberitaan konflik, tidak dapat dilepaskan dari tokoh bernama Johan Galtung, seorang aktivis perdamaian yang mengembangkan sebuah konsep *“Peace Journalism”*. Johan Galtung (Lynch, 2010) melihat bahwa dalam proses seleksi berita (*gatekeeping*), ada sesuatu yang berjalan sistematis dan simultan dalam memberitakan konflik.

Ada lima kriteria yang selama ini cenderung menjadi *“panduan”* bagi media: (1) *Threshold*, di mana cerita besar yang mempunyai efek bagi orang dalam jumlah banyak; (2) *Frequency*, peristiwa yang memang sudah dijadwalkan oleh media bersangkutan; (3) *Negativity*, dimana berita buruk mampu menarik lebih banyak perhatian dibandingkan dengan berita baik; (4) *Unexpectedness*, peristiwa tidak terduga dan mempengaruhi banyak orang; (5) *Unambiguity*, yaitu sesuatu yang sudah jelas.

Kecenderungan tersebut mendorong lahirnya jurnalisme yang “berat” pada situasi perang. Galtung menyebutnya dengan “*war journalism*”. Praktik jurnalisme ini mempunyai beberapa kecenderungan. *Pertama, violence*, di mana konflik merupakan *dualistic term*, dua kelompok berkompetisi untuk mencapai tujuan tunggal, yaitu kemenangan. *Kedua, elites*, di mana narasumber cenderung diambil dari “*official sources*”. *Ketiga, propaganda*, kecenderungan untuk mengekspos ketidakbenaran “mereka” dan menolak “kita”. *Keempat, kemenangan*, media cenderung berhenti memberitakan ketika senjata sudah diletakkan, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai pra dan pasca konflik.

Johan Galtung merasakan keresahan terhadap kecenderungan pemberitaan tersebut. Perlu ada *alternative perspective* yang berpihak pada “perdamaian”, “*peace journalism*”. Beberapa ciri dari *peace journalism* antara lain, *pertama, Conflict or Peace Oriented*, mencoba untuk melewati batas waktu dan ruang untuk menyajikan kronologi peristiwa, bukan hanya dua kelompok yang bertikai tetapi juga aktor lain yang mungkin terlibat, untuk memberikan atau merekomendasikan berbagai alternatif tujuan dan kemungkinan intervensi. *Kedua, People Oriented*, mempertimbangkan isu konflik dari sudut pandang berbeda, seperti suara akar rumput. *Ketiga, Truth Oriented*, menghindari mengekspos pengumuman salah satu pihak saja tetapi juga mengakomodasi semua sisi. *Keempat, Solution Oriented*, menyiapkan atau mencari solusi yang mungkin dapat ditempuh.

Melengkapi perspektif Galtung, Lee (2010) memaparkan,

*By taking the advocacy, interpretive approach, the peace journalist concentrates on stories that highlight peace initiatives, tone down ethnic and religious differences; prevent further conflict; focus on the structure of society; and promote conflict resolution, reconstruction, and reconciliation*

Perbedaan antara *war journalism* dan *peace journalism* yang dikembangkan oleh Johan Galtung (dalam Lee, 2010):



**Tabel 2.3. Perbedaan *Peace Journalism* dan *War Journalism***

No	War Journalism Approach	Peace Journalism Approach
1	Reactive	Proactive
2	Reports mainly on visible effects of war	Report on the invisible effect of war
3	Elite oriented	People oriented
4	Focused mainly on differences that led the conflict	Reports the area of agreement that might led to a solution to the conflict
5	Focused mainly on the here and now	Report causes and consequences of the conflict
6	Dichotomizes between the good guys and bad guys, the victims and villains	Avoid labeling of good guys and bad guys
7	Two-party oriented	Multiparty oriented
8	Partisan	Non partisan (neutral)
9	Zero-sum orientation	Win-win orientation
10	Stops reporting with the peace treaty signing and ceasefire, and heads for another war elsewhere	Stays on reports aftermath of war
<b>Language</b>		
11	Uses victimizing language	Avoids victimizing language
12	Uses demonizing language	Avoids demonizing language
13	Uses emotive words	Objective and moderate

*Peace Journalism* merupakan salah satu konsep yang mencerahkan bagi pemberitaan konflik, di mana media diarahkan bukan sebagai “provokasi” konflik tetapi lebih berperan sebagai seorang “pejuang” perdamaian. Dalam perkembangannya, konsep ini tidak sepenuhnya diterima oleh semua kalangan jurnalis profesional.

Pendapat yang banyak menyeruak mengenai konsep ini adalah, ketika pers menjalankan fungsinya sebagai pejuang perdamaian, pers tidak lagi independen. Pers sudah berpihak pada “perdamaian”. Inilah yang kemudian mendorong lahirnya konsep “*Conflict Sensitive Journalism*” (CSJ). Pada wawancara langsung dengan Marlon (2011), seorang aktivis CSJ dari Pecojon (*The Peace and Conflict Journalism Network*) mengatakan bahwa “CSJ” is about journalism but *Peace Journalism* is about peace.

Dalam pengertian lebih jauh dapat dikatakan bahwa konsep *peace journalism* mengarah pada fungsi advokasi dan meninggalkan fungsi jurnalisisme itu sendiri. Selain itu, *peace journalism* juga menekankan pada peristiwa perang, bukan konflik secara lebih luas. Perlu dicatat dari sini adalah, tidak perlu memperdebatkan antara *peace journalism* dengan CSJ. Keduanya sama-sama ingin memperbaiki kondisi jurnalisisme yang saat ini cenderung “bersenang-senang” di atas peperangan.

Pecojon (2011) mengembangkan 19 elemen yang dapat membedakan antara jurnalisme berorientasi konflik dan jurnalisme sensitif konflik. Elemen ini juga berbasis pada pemikiran Johan Galtung, Jake Lynch, Annabel McGodrick, Antonio Koop dan berbagai hasil riset di beberapa negara seperti Filipina, Indonesia, Timor Timur, Kamboja, dan Jerman. Perbedaannya adalah:

**Tabel 2.4. Perbedaan Jurnalisme Berorientasi Konflik dan Jurnalisme Sensitif Konflik**

No	Elemen Inti	Jurnalisme Konflik	Jurnalisme Sensitif Konflik
1	Peran Jurnalis	Sebagai Bisnis	Jalur komunikasi dalam masyarakat
2	Bentuk Konflik	2 pihak saja	Multi-pihak
3	Framing dan Konteks	Orientasi kejadian	Orientasi proses
4	Strategi menghadapi kerumitan	Menyederhanakan	Menjelajah kompleksitas atau menjelaskan
5	Tujuan Pelaporan atau pelayanan kepada pembaca	Sebagai hiburan	Untuk memberikan pemahaman
6	Strategi melaporkan kekerasan	Hanya kekerasan langsung saja	Mempertimbangkan kekerasan budaya dan structural, bukan hanya kekerasan langsung
7	Analisa tujuan dan motivasi para pihak yang terlibat dalam konflik	Fokus pada posisi yang diinginkan	Mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan yang menjadi basis dari masing-masing kelompok
8	Jurnalis dan kaca mata pembaca	Menyalahkan	Konflik sebagai tantangan bersama
9	Strategi menghadapi propaganda	Reseptor propaganda	Tahan terhadap propaganda
10	Strategi menghadapi perang	Membenarkan perang	Menunjukkan dampak perang dengan akurat
11	identifikasi sumber dan pelaku dalam berita	Orientasi pada elit	Orientasi pada masyarakat
12	Nilai Berita	Hiburan	Relevansi
13	Strategi melaporkan korban dari kekerasan langsung	Fokus pada korban kekerasan langsung saja	Mepertimbangkan korban konflik secara keseluruhan

14	menghadapi upaya provokasi menghadapi jurnalisme	Memprovokasi dengan menyalahkan, kritis terhadap orang tertentu	Tidak menyalahkan individu, menunjukkan masalah, mengeksplorasi kekerasan structural, kondisi dan lain-lain
15	Penggunaan bahasa	Stereotype, generalisasi, label	Khusus, netral
16	Menciptakan keseimbangan	Keseimbangan kuantitatif	Keseimbangan kualitatif
17	orientasi reaksi emosional dari pembaca	Emosi	Empati
18	dampak laporan terhadap pembaca	Ketidakterdayaan	Pemberdayaan
19	Anggapan jurnalis terhadap pembaca dan pemirsa.	Pembaca pasif	Pembaca aktif

Sumber: Pecojon (2011).

Pemaparan tersebut lebih mengarah pada aspek teknis bagaimana seharusnya seorang reporter dalam memberitakan konflik. *Pertama*, harus ada pemahaman bahwa pers berperan melayani masyarakat. *Kedua*, dalam pencarian informasi, seorang jurnalis tidak boleh terjebak dalam pemahaman hitam putih ataupun dua pihak saja. Perlu ada kreatifitas untuk menangkap aktor-aktor lain yang mungkin terlibat dalam konflik tersebut. Jurnalis juga harus peka terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang mungkin terjadi. Dalam konteks ini, segitiga kekerasan dapat membantu untuk memetakan bentuk kekerasan tersebut. Apakah hanya kekerasan langsung atau ada kekerasan budaya ataupun struktural yang terjadi. Selain itu, kepekaan terhadap kepentingan masing-masing pihak juga penting untuk menangkap kesamaan ataupun perbedaannya. Kedua hal tersebut harus mampu dilaporkan secara proporsional.

*Ketiga*, dalam pelaporan sebaiknya tidak menyederhanakan masalah. Bila keadaan memang kompleks harus dilaporkan demikian adanya. Bila disederhanakan akan dapat menimbulkan bias pemahaman dalam masyarakat. Penyajiannya juga harus menghindari penggunaan bahasa yang hiperbolis. Netral menjadi pilihan bahasa yang harus diupayakan sedemikian rupa. Pemberitaan tersebut tidak menimbulkan ketidakberdayaan masyarakat dalam menghadapi konflik tetapi justru menimbulkan semangat untuk bersama menyelesaikannya. Dalam titik

ini, terlihat jelas perbedaan antara *peace journalism* dengan CSJ, dimana perdamaian bukanlah tujuan akhir dari CSJ, melainkan *clear information to make the audiences understand about the problems*.

Inilah pemahaman objektivitas yang penulis sampaikan terkait dengan berita konflik. Perlu ada pemahaman yang mendalam mengenai konflik itu sendiri untuk dapat meletakkan prinsip objektivitas dengan tepat. Praktik jurnalisme perang dapat dikatakan objektif dalam makna “konvensional”. Mereka memberitakan apa yang sesungguhnya terjadi. Tetapi ada perbedaan frame yang diberikan antara “*war journalism*” dengan “*peace journalism*” ataupun “*conflict sensitive journalism*”. Hal yang menjadi pertimbangan utama adalah kebaikan bersama, *public interest*. Bukan kepentingan golongan ataupun kelompok tertentu, bahkan bukan pula kepentingan media itu sendiri. Menjunjung nilai-nilai jurnalisme dengan benar adalah kunci untuk melahirkan pemberitaan yang berkualitas.

## Simpulan

Objektivitas tidak dapat diterima begitu saja dengan mempresentasikan fakta apa adanya. Perlu ada pemahaman mengenai konteks dan esensi dari jurnalisme itu sendiri. Khusus dalam pemberitaan konflik, jurnalis tidak bisa serta merta memberitakannya dengan “telanjang”. Perlu ada interpretasi dan analisis yang tajam agar tidak memperkeruh keadaan.

*Conflict sensitive journalism* menjadi salah satu strategi untuk melahirkan jurnalisme berkualitas. Terlebih dalam konteks Indonesia yang rawan terjadi konflik. Media tidak boleh sembarang mengambil posisi. Kebenaran informasi yang diragukan maka akan dapat mengancam ketahanan nasional. Taat pada asas jurnalisme menjadi keharusan untuk menghindari konflik yang lebih hebat. Bila itu terjadi, minimal bukan media yang menjadi biang keladinya.

## Daftar Pustaka

- Berry, David, 2008, *Journalism, Ethics and Society*, England: Ashgate Publishing Limited.
- Hampton, Mark, 2010, *The Fourth Estate Ideal in Journalism History* dalam Stuart Allan (ed). *The Routledge Companion to News and Journalism*, New York: Routledge.

- Jacquette, Dale, 2010, *Journalism Ethics as Truth-Telling in the Public Interest* dalam Stuart Allan (ed). *The Routledge Companion to News and Journalism*, New York: Routledge.
- Kaplan, Richard, 2010, *The Origins of Objectivity in American Journalism* dalam Stuart Allan (ed). *The Routledge Companion to News and Journalism*, New York: Routledge.
- Lee, Seow Ting Lee, 2010, *Peace Journalism* dalam Lee Wilkins dan Clifford G. Christian (Ed), *The Hand Book of Mass Media Ethics*, New York: Routledge.
- Lynch, Jake, 2010, *Peace Journalism* dalam Stuart Allan (ed). *The Routledge Companion to News and Journalism*, New York: Routledge.
- McKee, Alan, 2005, *The Public Sphere: An Introduction*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Ritzer, George, Goodman, Douglas J, 2003, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- McQuail, Denis, 2010, *McQuail's Mass Communication Theory*, London: Sage Publications.
- Ward, Stephen J.A, 2009, *Truth and Objectivity* dalam Lee Wilkins dan Clifford G. Christian (Ed), *The Hand Book of Mass Media Ethics*, New York: Routledge.
- Modul Pelatihan Pecojon Indonesia (2011).



BAGIAN III  
MILITER DAN MANAJEMEN  
KOMUNIKASI





# STRATEGI DAN TAKTIK *PUBLIC RELATIONS* SEBAGAI TULANG PUNGGUNG KOMUNIKASI MILITER DALAM MASA PERANG DAN DAMAI

Elvinaro Ardianto

## Pendahuluan

Perspektif historis lahirnya militer di Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) berbeda dengan negara maju di Eropa dan Amerika. *Tag line* atau slogan yang selalu dikumandangkan adalah “TNI adalah anak kandung rakyat,” sementara di negara maju, militer dibentuk adalah profesionalisme militer.

Perjalanan berikutnya, terutama dalam pemerintahan Orde Baru, di bawah kepemimpinan H. Muhammad Soeharto, yang memerintah Republik Indonesia selama 32 tahun, setelah lengsernya Presiden sebelumnya, Soekarno, maka perjalanan TNI menjadi lain, karena suasana negara bukan dalam kondisi peperangan, tetapi damai, maka TNI sebagai anak kandung rakyat juga berperan tidak hanya dalam dunia kemiliteran, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan politik, yang dikenal dengan istilah “Dwifungsi ABRI.”

Perkembangan fungsi militer atau ABRI, kini TNI mengalami beberapa fase tertentu: masa perang kemerdekaan, terbentuknya pejuang prajurit dan prajurit pejuang (1945-1949), masa demokrasi liberal, peranan politik ABRI, dari kelompok kepentingan menjadi Golongan Karya ABRI (1949-1959), Masa Demokrasi terpimpin (1959-1966), Masa Orde Baru (1966-1998), Kini Masa Reformasi (1998-sekarang). Di masa Orde Baru muncul peran militer Indonesia sebagai dwifungsi ABRI, selain di bidang militer (pertahanan, keamanan dan perang), institusi dan anggotanya bisa berkiprah di bidang sosial dan politik (lihat buku Dwifungsi ABRI oleh Soebijono, dkk, 1992).

ABRI dengan Dwifungsinya yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan maupun sebagai kekuatan sosial politik bergerak secara bersamaan dalam dua lingkungan kehidupan politik, yaitu dalam kehidupan politik di lingkungan pemerintahan (supra struktur politik) dan kehidupan politik di lingkungan masyarakat (infra struktur politik). Hal demikian sudah berlangsung sejak kelahirannya pada tahun 1945, di mana Dwifungsi ABRI telah memberi saham yang tidak kecil dalam menanggulangi krisis-krisis nasional (Soebijono, dkk. 1992: 56).

Peran ganda TNI dalam kehidupan sosial dan politik di Tanah Air ini, membawa implikasi beberapa posisi sipil dijabat oleh orang-orang yang berasal dari institusi TNI, sebut saja seorang perwira berpangkat jenderal atau di atas kolonel, ternyata di era Orde Baru bisa menjadi direktur utama BUMN (Badan Usaha Milik Negara), menteri di luar bidang militer, gubernur, bupati, walikota, bahkan sampai lurah atau kepala desa dijabat oleh anggota TNI, termasuk ketua partai politik, waktu itu Golkar atau Golongan Karya (tidak mau disebut sebagai partai), tetapi menjadi kendaraan politik untuk menguasai jabatan di pemerintah dan legislatif atau parlemen. Zaman Orde Baru itu organisasi sosial politik hanya tiga, yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan), PDI (Partai Demokrasi Indonesia), dan Golkar (Golongan Karya). Golkar ini oleh Presiden Soeharto tidak mau disebut partai politik, tetapi ikut aktif dalam pemilihan umum (pemilu) dan Golkar selalu memenangkan perolehan suara mayoritas untuk anggota DPR (dewan perwakilan rakyat).

Beberapa pengamat kehidupan bernegara atau politik, seringkali berseloroh TNI menjadi "warganegara nomor satu" di Indonesia, karena institusi TNI, selain anggotanya dapat menduduki jabatan sosial dan politik di Indonesia, juga TNI bukan sebagai organisasi sosial politik peserta pemilu, ternyata TNI dan Polri mendapat jatah atau kuota menjadi anggota DPR, di mana waktu itu anggota DPR bergabung dengan utusan golongan dan daerah menjadi anggota MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Di era ini pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR, dan gubernur, walikota, bupati oleh DPRD (Dewan Perwakilan Daerah).

Sebagai penulis, mengapa di zaman Orde Baru militer bisa menduduki jabatan dan posisi kehidupan negara, karena militer adalah anak kandung rakyat (profesional, tetapi tidak penuh). Lain halnya militer di

negara maju, kalau ingin terjun ke dalam kehidupan sosial dan politik, maka orang itu harus membuka baju militernya atau mengundurkan diri dari kedinasan sebagai anggota institusi militer. Di Amerika, setelah, menjadi mantan militer baru terjun ke dunia sosial dan politik.

Perkembangan militer, setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru, dan memasuki era Reformasi saat ini, maka militer dikembalikan lagi ke barak atau militer tidak diperkenankan lagi berkiperah dalam jabatan sosial politik, kecuali sudah pensiun atau mengundurkan diri baru boleh menjadi anggota dan pengurus partai atau bidang lainnya. TNI dan Polri di era Reformasi ini tidak lagi memperoleh kuota untuk menjadi anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD).

Kehidupan sosial dan politik di era Reformasi mengalami beberapa perubahan mendasar antara lain; adanya amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (yang dulu tidak boleh diamandemen, karena dinilai sakral atau suci oleh pemerintah Orde Baru). Kini, UUD 1945 sudah mengalami empat kali amandemen (perubahan). Hasil amandemen itu sendiri melahirkan sistem parlemen bikameral atau dua kamar (DPR dan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah), dan anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Pemilihan presiden wakil presiden tidak lagi oleh MPR, tetapi langsung oleh rakyat yang dikenal dengan istilah pilpres. Termasuk gubernur, walikota, bupati tidak lagi dipilih oleh DPRD, tetapi melalui pemilihan langsung oleh rakyat, yang dikenal dengan istilah pemilukada.

Amandemen UUD 1945, tentunya sangat berpengaruh kepada TNI dan Polri untuk berkiperah menjadi militer profesional (bidang pertahanan, keamanan dan perang). Bilamana masih berfungsi ganda antara tugas militer dan sosial-politik, maka ketika jaman Orde Baru muncul seloroh pula dari para pengamat politik “kalau TNI dan Polri sibuk politik, nanti lupa strategi dan taktik perang menghadapi ancaman musuh dari negara lain”.

### **Profesionalisme Militer**

Profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan latihan dan pendidikan yang sempurna dalam suatu bidang terspesialisasi. Tingkat profesionalisme suatu pekerjaan tertentu diukur lewat pelaksanaan, metode dan karakter, status, dan standar orang-orang yang berkecimpung di dalamnya. Status khusus ini, kaum profesional yang sejati

memperoleh wewenang yang menentukan dalam hubungannya dengan para klien (Perlmutter, 2000: 1).

Militer adalah sebuah organisasi yang paling sering melayani kepentingan umum tanpa menyertakan orang-orang yang menjadi sasaran usaha-usaha organisasi itu. Militer adalah suatu profesi sukarela karena setiap individu bebas memilih suatu pekerjaan di dalamnya, namun ia juga bersifat memaksa karena para anggotanya tidak bebas untuk membentuk suatu perkumpulan sukarela melainkan terbatas kepada situasi hirarki birokrasi. Dua variabel, pengubah, konstruk atau dimensi penting dari profesionalisme militer adalah pengawasan dan kecakapan (*control and skill*) (Perlmutter, 2000: 1).

Jenis orientasi militer yang timbul di dalam negara bangsa yang modern, masing-masing bertindak sebagai reaksi terhadap jenis kekuasaan sipil yang dilembagakan: (1) prajurit profesional klasik, menonjol di dalam system politik yang stabil, (2) prajurit praetorian, berkembang subur dalam lingkungan ketidakstabilan politik, (3) prajurit revolusioner, manunggal dengan suatu orde politik yang stabil, yang kebetulan sedang mengalami kemunduran atau baru (Perlmutter, 2000: 14).

Korps perwira modern adalah suatu organisasi profesional dan perwira militer modern adalah seorang prajurit profesional. Dari sudut perbandingan sejarah, militer dewasa ini telah berkembang ke arah lima tahap: timbulnya angkatan bersenjata massa yang merupakan penemuan baru ala Napoleon, revolusi profesional, pembubaran tentara misal oleh kaum profesional, penggabungan tentara profesional dan pelembagaan profesionalisme lewat dogma-dogma akademis yang disebut "*grand strategy*", yang menjadi ideologi perwira profesional (Huntington, dalam Perlmutter, 2000: 42).

### **Strategi Public Relations**

*Public Relations* (PR) menekankan adanya komunikasi timbal balik menunjukkan bahwa PR memiliki ciri demokrasi, yang memberi penghargaan kepada masyarakat. Dalam hal ini tidak dipandang sebagai objek semata, tetapi juga sebagai subjek. PR berbeda dengan kegiatan propaganda dan agitasi, karena menggunakan komunikasi dua arah. Akhirnya PR tidak hanya mempengaruhi opini publik yang menguntungkan, tetapi juga memupuk opini publik, dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Arifin, 2003: 80).

Kegiatan PR harus mengemban fungsi yang dikemukakan Canfield, dalam Arifin (2003), yaitu; (1) mengabdikan kepada kepentingan umum (*it should server the public's interest*), (2) memelihara komunikasi yang baik (*maintain a good communication*), (3) menitikberatkan pada moral dan tingkah laku yang baik (*to stress a good morals and manners*).

Kegiatan PR harus benar-benar dicurahkan untuk kepentingan umum, sehingga seorang pejabat PR atau *Public Relations Officer (PRO)* sebuah lembaga atau pemerintahan harus mampu menciptakan, membina, serta memelihara hubungan ke dalam dan ke luar. PRO adalah seorang profesional, dalam komunikasi politik atau komunikator profesional, ia diangkat dan diberi upah dengan tugas melayani publik dan memenuhi kepentingan umum.

Seorang *PRO* profesional adalah perantara antara institusi tempatnya bekerja dengan publik, baik ke dalam maupun ke luar. Ia harus mampu menjelaskan rencana, kebijakan dan kegiatan lembaga atau pemerintahan, dan sebaliknya harus mampu mengetahui keinginan dan kepentingan publik yang kemudian akan menyampaikan kepada pimpinan lembaganya.

*PRO* dalam menjalankan tugasnya sebagai “jembatan” harus memiliki moral dan tingkah laku yang baik agar ia dapat memperoleh kredibilitas dan menjadi teladan bagi publik. Hal ini sangat penting dalam upaya bekerja dan bertindak tegas, cermat dan akurat dalam menjalankan tugas lembaga atau pemerintahan secara profesional.

Langkah-langkah Model Strategi PR, penulis mengacu kepada pendapat Nager dan Allen, dalam Wilcox, et al (2003) tentang *Management by Objective (MBO)*:

1. *Client* atau *employer objectives* (tujuan klien atau atasan). Apa tujuan komunikasi dilakukan, dan bagaimana mencapai tujuan organisasi tersebut? Tujuan khususnya seperti membuat kesadaran konsumen pada tingginya kualitas produk (dalam hal ini kesadaran akan masyarakat tentang kualitas pemerintah) atau lebih meningkatkan kesadaran publik atau masyarakat tersebut;
2. *Audience* atau *publics* (Khalayak atau publik). Publik mana yang menjadi sasaran penyampaian pesan, dan bagaimana publik dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi (Pemerintah)? Bagaimana mengetahui karakteristik khalayak, dan bagaimana informasi demografik digunakan untuk membuat struktur pesan?;

3. *Audience objectives* (Tujuan khalayak). Apa yang khalayak ingin ketahui dan bagaimana menyampaikan pesan kepada khalayak yang sesuai keinginan mereka?;
4. *Media channel* (Saluran media). Media apa yang dapat mencapai khalayak, bagaimana dapat menggunakan multi saluran (media berita, brosur, peristiwa khusus, surat langsung) yang dapat memperkuat pesan di antara publik-publik kunci;
5. *Media channel objectives* (sasaran saluran media). Apakah setiap *gatekeeper* (redaktur media) mencari sudut pandang berita, dan mengapa publikasi tertentu menjadi informasi yang memiklikli daya tarik;
6. *Source and questions* (Sumber dan pertanyaan). Siapa yang menjadi sumber informasi utama dan sekunder? Siapa pakar yang akan diwawancarai?;
7. *Communication strategies* (Strategi Komunikasi). Apakah faktor-faktor lingkungan akan mempengaruhi penyebaran dan penerimaan pesan. Apakah suatu peristiwa dan sejumlah informasi lain akan mengurangi atau memperkuat bobot pesan?;
8. *Essence of the message* (Esensi pesan). Apakah komunikasi yang direncanakan mempengaruhi khalayak? Apakah pesan dirancang dengan baik? Atau dirancang untuk mengubah sikap dan perilaku;
9. *Nonverbal support* (Dukugan nonverbal). Bagaimana tentang fotografi, grafis, film *artwork* (bentuk ilustrasi lainnya) dapat memperjelas dan memperindah visualisasi pesan tertulis? (Wilcox, et al, 2003: 145-146).

Unsur perencanaan program PR terdiri dari situasi, tujuan, khalayak, strategi, taktik, kalender kegiatan, anggaran dan evaluasi (diadaptasi dari Wilcox, et al, 2003: 148).

**Situasi.** Terdiri dari tiga bentuk yang sering dilihat untuk melakukan program PR, yakni; (1) organisasi harus melakukan program *remedial* untuk mengatasi masalah atau situasi yang secara negatif mempengaruhi organisasi, (2) organisasi memerlukan suatu proyek kegiatan tertentu dalam suatu waktu, (3) organisasi berkehendak memperkuat upaya yang sudah berjalan untuk mempertahankan reputasi dan dukungan publik.

**Tujuan.** Suatu situasi atau masalah harus dipahami, sebagai langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan untuk sebuah program.

Penetapan tujuan ini dievaluasi dengan mempertanyakan; (1) Apakah situasi itu berlangsung sesuai kenyataan? (2) apakah realistis dan memahaminya, (3) berhasilkah diukur dalam memahami terminologi itu? Persentasi terbesar perencanaan PR adalah pentingnya perancangan untuk mengekspos informasi kepada khalayak dalam meningkatkan kesadaran mereka mengenai suatu isu, peristiwa atau produk.

**Khalayak.** Program PR harus spesifik dan jelas batasan khalayak atau publiknya. Meski pun sejumlah kampanye diperuntukkan untuk *general public* (publik umum). Dengan perkataan lain PR targetnya publik yang spesifik yang termasuk ke dalam suatu publik umum (masyarakat). Melalui penelitian dapat mengidentifikasi publik-publik kunci yang dilihat dari aspek demografis, seperti usia, penghasilan, strata sosial, pendidikan, kepemilikan atau mengkonsumsi produk-produk khusus, dan tempat tinggal di daerah elit atau biasa.

**Strategi.** Sebuah pernyataan strategi menggambarkan bagaimana, dalam sebuah konsep, suatu tujuan yang hendak dicapai, memberikan panduan dan tema-tema untuk semua program. Sebuah strategi umum harus dibuat garis besarnya atau suatu program dipecah menjadi beberapa strategi, tergantung pada tujuan dan perencanaan khalayak.

**Taktik.** Isu sebuah taktik bagaikan bagian mur dan baut dari suatu perencanaan yang menggambarkan suatu rangkaian aktivitas khusus yang menempatkan strategis ke dalam kegiatan operasional dan membantu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Taktik-taktik itu melibatkan penggunaan instrumen atau alat komunikasi untuk mencapai khalayak utama dan sekunder dengan pesan-pesan kunci.

Kalender atau Jadwal kegiatan. *Calender* atau *Timetable* menyangkut tiga aspek waktu dalam perencanaan program; (1) keputusan kapan suatu kampanye dilakukan, (2) penentuan kepastian rangkaian aktivitas, (3) menyusun sebuah daftar tentang langkah-langkah yang harus dilengkapai untuk menghasilkan suatu produk akhir. Ketiga aspek sangat penting dalam mencapai keberhasilan secara maksimal.

**Anggaran.** Tidak ada suatu program tanpa dilengkapi sebuah anggaran. Klien dan atasan menanyakan "Berapa biaya yang dibutuhkan untuk program ini?" Organisasi atau perusahaan mengusahakan anggaran ini, kemudian staf PR membuat perencanaan program dan alokasi anggarannya.



**Evaluasi.** Elemen dari suatu perencanaan yang berkaitan secara langsung ke belakang terhadap tujuan-tujuan yang telah ditetapkan bagi sebuah program. Sebelumnya sudah dibahas, tujuan harus dapat diukur dengan sejumlah cara untuk memperlihatkan pada klien atau atasan bahwa pencapaian program sesuai dengan yang diinginkan. Kriteria evaluasi harus realistis, dapat dipercaya, spesifik, dan sejalan dengan harapan klien atau atasan. Evaluasi bagian dari sebuah perencanaan program yang dapat mengukur tujuan, kemudian menentukan metode evaluasi yang digunakan.

### **Strategi dan Taktik *Public Relations* Militer di Era Perang dan Damai**

Menurut Scott M. Cutlip, Allen H. Center dan Glen M. Broom (2000), dalam bukunya berjudul *Effective Public Relations*, buku ini sudah terbit sejak tahun 1952 dan revisi terakhir tahun 2000, bahwa strategi terdiri dari *planning* and *programming* (perencanaan dan program).

Sebuah strategi adalah untuk mengatasi masalah atau memperbesar peluang, dalam bentuk perencanaan dan pemograman, dan membuat keputusan strategis mendasar tentang apa yang akan dilakukan, dan dengan langkah apa, dalam rangka mengantisipasi masalah atau peluang. Efektivitas taktik yang digunakan dalam langkah selanjutnya (mengambil tindakan dan komunikasi) akan bergantung kepada perencanaan yang baik (Cutlip, Center, dan Broom, 2006: 351-352).

Pemikiran strategis adalah memprediksikan atau menentukan tujuan masa depan yang diharapkan menentukan kekuatan apa yang akan membantu atau menghalangi upaya mengejar tujuan dan merumuskan rencana untuk mencapai keadaan yang diharapkan tersebut. Rencana adalah segalanya, ketika merencanakan sebuah program, organisasi berarti membuat keputusan untuk besok hari pada hari ini. Kurang memperhatikan langkah perencanaan strategis dalam proses PR mungkin menghasilkan program yang justru menimbulkan kontroversi ketimbang memecahkan masalah, membuang-buang atau justru menimbulkan kesalahpahaman dan kebingungan ketimbang kejelasan dan pemahaman (Cutlip, Center, dan Broom, 2006: 352).

Definisi strategi, yang memuat esensi pemikiran strategis dan ekspektasi manajemen adalah strategi dapat didefinisikan sebagai penentuan tujuan dan sasaran usaha jangka panjang, dan adopsi upaya pelaksanaan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai



tujuan tersebut (Cutlip, Center, dan Broom, 2006: 353).

Dalam mode perencanaan, strategi berbentuk perencanaan sistematis dan pedoman untuk menjalankan strategi dalam level korporat atau institusi dan level bisnis.. Dalam mode evolusioner, strategi berkembang dari waktu ke waktu, mempresentasikan pola keputusan yang merespon kesempatan dan ancaman dalam lingkungan. Mode perencanaan merupakan model yang lebih disukai , namun mode evolusioner kini makin diterima sebagai pendekatan yang lebih pas atau tepat untuk menangani organisasi dan lingkungan yang berubah cepat. Rencana membuat tujuan dan strategi (Cutlip, Center dan Broom 2006: 353).

Perencanaan strategis dalam PR melibatkan pembuatan keputusan tentang tujuan dan sasaran program, mengidentifikasi publik kunci, menentukan kebijakan atau aturan untuk memandu pemilihan strategi, dan menentukan strategi. Harus ada kaitan erat antara tujuan program keseluruhan, sasaran yang ditentukan untuk masing-masing publik, dan strategi yang dipilih (Cutlip, Center dan Broom 2006: 356).

Cutlip, Center dan Broom (2000) menyebutkan bahwa taktik adalah *taking action and communicating* (tindakan dan komunikasi) atau *implementation* (implementasi). Istilah strategi dan taktik sering kali dikacaukan . Strategi yang dipinjam dari istilah militer adalah keputusan penting pada masa perang, seperti apakah akan menggunakan misi atau pemboman udara. Strategi merepresentasikan rencana permainan secara keseluruhan. Taktik adalah keputusan yang dibuat selama jalannya perang. Taktik merepresentasikan keputusan di lapangan yang dibutuhkan karena perkembangan setelah rencana strategis diimplementasikan. Taktik adalah keputusan atau tindakan yang dilakukan agar strategi sesuai dengan kenyataan dalam situasi medan perang. Dalam praktik PR, strategi biasanya mengacu kepada konsep, pendekatan atau rencana umum untuk program yang dirancang guna mencapai tujuan. Taktik mengacu kepada level operasional: kejadian actual, media, dan metode yang dipakai untuk mengimplementasikan strategi (Cutlip, Center dan Broom 2006: 360).

### **Strategi dan Taktik *Public Relations* Militer di Era Perang**

Di masa perang merebut kemerdekaan, militer Indonesia menerapkan strategi perang dengan istilah perang gerilya, dan taktik perangnya adalah *hit and run* (serang dan lari). Strategi dan Taktik perang,

yang konsepnya disampaikan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution, bisa dilakukan di Indonesia, karena alam mendukung, sehingga perang militer Indonesia, disebut pula perang alam semesta.

Strategi dan taktik peperangan militer Indonesia ketika itu, dengan menyingkir ke hutan dan penjajah Belanda berada di kota-kota dan desa-desa. Sewaktu menyerang seringkali di luar dugaan, sehingga militer Belanda kewalahan, setelah menyerang militer Indonesia kembali ke hutan belantara, yang secara geografis medan sulit dicari. Saat konflik di negara Vietnam, ternyata kalahnya militer Amerika Serikat di negeri itu, karena tentara Vietnam melakukan strategi perang gerilya dan taktik serang dan lari. Akibat kekalahan ini banyak militer Amerika Serikat yang hilang.

Paparan di atas adalah strategi dan taktik yang dipraktikkan dalam peperangan. Bahasan berikut adalah bagaimana strategi dan taktik *Public Relations* (PR) dalam militer di era perang fisik.

Strategi PR di era perang, salah satunya adalah membuat perencanaan dan program melakukan pencegahan perang itu sendiri, dengan mempraktikkan berbagai kegiatan PR yang lebih berorientasi kepada diplomasi perdamaian. Artinya seorang pejabat PR negara harus bisa menjadi *conselor*, *advisor*, dan *interpreter* (konsultan, penasihat dan penerjemah) bagi pimpinan negara dan pemerintahan untuk meyakinkan betapa pentingnya diplomasi perdamaian. Begitupun ke negara musuh usaha-usaha *approaching* (pendekatan) atau *lobby* (lobi) terus dilakukan.

Bilamana perang antarnegara tidak terelakan lagi, maka strategi dan taktik PR yang harus dilakukan adalah berdasarkan tahap-tahap berikut ini: *asking* (menggali informasi tentang kelemahan musuh), *telling* (menyampaikan pesan untuk membuat secara psikologis mental musuh menjadi lemah), *listening* (mau menerima masukan dan kritik untuk perbaikan strategi dan taktik dalam militer di era perang), *understanding* (muncul pemahaman yang akurat, sehingga dapat memenangkan peperangan).

Strategi dan taktik PR dalam militer di era perang, terkait pula dengan fasilitas senjata yang dimiliki militer Indonesia, semakin canggih peralatan perang, semakin efektif strategi dan taktik PR dalam mendukung militer dalam peperangan.

Strategi dan taktik PR itupun harus ditunjang dengan penguasaan media massa dan media kontemporer (*media online*), yang sekarang berkembang, sehingga berita tentang peperangan lebih banyak menyajikan kehebatan Indonesia dalam peperangan. Seperti halnya Amerika Serikat menyerang negara Irak di Timur Tengah, ternyata serangan militernya ditunjang dengan pemberitaan media yang dikuasainya untuk selalu mengedepankan sikap bijak dan kemenangan perang Amerika atas Irak. Mengingat hampir semua media Barat dikuasai oleh negara maju, sehingga waktu menyerang Irak itu, Presiden Amerika Serikat George W. Bush, sempat mengumpulkan seluruh pemimpin redaksi media massa yang ada di Amerika, dan media massa negara Paman Sam ini sudah menguasai dunia, terutama instruksi presiden yang melarang media massa Amerika *me-relay* liputan televisi Al Jazeera di Timur Tengah yang sangat bertolak belakang antara pemberitaan media massa Barat.

Media massa Barat, dalam pemberitaannya, sempat menyebutkan bahwa Presiden negara Irak Saddam Husein adalah orang gila, dan dengan alasan Irak memiliki persenjataan teknologi nuklir pembunuh missal, maka Amerika Serikat yang bersekutu dengan negara Inggris, akhirnya menyerang negara Irak, dan Saddam Husein ditangkap, diadili serta di vonis hukuman mati di negaranya sendiri.

Kendati, kini yang menguasai media massa di dunia adalah negara Amerika Serikat dan negara maju lainnya, Indonesia dalam strategi dan taktik PR dalam militer Indonesia di era peperangan, sebaiknya membuat media seperti televisi Al Jazeera, yang dapat menyeimbangkan pemberitaan dengan media massa Barat dalam membentuk opini publik dunia.

Kendati, propaganda, agitasi atau *psywar* (perang urat syaraf) itu lebih tendensius (tidak netral lagi, seperti PR), dan dalam keadaan terpaksa bisa dijadikan metode oleh PR dalam militer Indonesia di era perang, sehingga perang urat syaraf dapat melemahkan mental musuh untuk menyerang, sehingga bisa balik menyerang dan akhirnya memenangkan peperangan.

Propaganda adalah kegiatan penyampaian pesan-pesan politik untuk kepentingan komunikator politik (politisi), dan seringkali mengabaikan kepentingan komunikan atau khalayak. Mengingat terjadi pula beberapa kegiatan yang disebut black propaganda politik,

walau masih juga adanya pemakaian *white* propaganda. Umumnya ada pergeseran nilai proganda yang sifatnya netral dan mengajak secara persuasif, sering disalahartikan “ah itu hanya propaganda saja” artinya hanya janji-janji kosong dan tidak ada bukti.

Propaganda yang berasal dari kata latin *propagare* (menyemaikan tunas suatu tanaman) adalah salah satu bentuk kegiatan yang sudah lama dikenal penggunaannya dalam bidang politik, meskipun pada awalnya (1622) digunakan sebagai bentuk kegiatan keagamaan (agama Katolik). Pada tahun 1622, Paus Gregorius XV membentuk suatu komisi cardinal yang bernama *congregatio de propaganda fide* untuk menumbuhkan keimanan kristiani di antara bangsa-bangsa. Secara khas para misionaris ditugaskan untuk menyebarkan doktrin kristiani tersebut, yaitu seorang misionaris harus mampu menggalang beberapa ribu pemeluk yang diharapkan. Dari situlah istilah propaganda dan karakteristik utama kegiatannya, satu-kepada-banyak (satu orang propagandis menggalang banyak pengikut) (Arifin. 2003: 72-73).

Agitasi adalah seorang komunikator (agitator politik) merangsang emosi komunikan atau khalayak untuk mengikuti pesan yang disampaikannya, dan komunikasi ini menjadi terpengaruh untuk mengikutinya, padahal pesan dalam agitasi politik lebih kepada kepentingan agitator bukan khalayak. Agitasi itu bisa terjadi misalnya dalam berbagai slogan atau unjuk rasa yang disebut dengan pasukan berani mati, komunitas jempol darah, dan lainnya.

Agitasi yang berasal dari bahasa latin yaitu *agitare* (bergerak, menggerakkan) atau bahasa Inggris yaitu *agitation*, menurut Herbert Blumer (1969), propaganda adalah beroperasi untuk membangkitkan rakyat kepada suatu gerakan terutama gerakan politik. Dengan kata lain agitasi adalah suatu upaya untuk menggerakkan massa dengan lisan atau tulisan, dengan cara merangsang dan membangkitkan emosi khalayak. Agitasi banyak digunakan sebagai salah satu bentuk atau metode komunikasi politik. Bahkan di negara komunis, agitasi bersama propaganda mendapat tempat yang istimewa. Sebaliknya agitasi sebagai bentuk atau metode komunikasi politik di negara demokrasi (Amerika dan sekutunya, termasuk Indonesia) sangat tercela bahkan ditolak (Arifin. 2003: 70-71).

Perang urat syaraf (*psywar*) politik adalah penyampaian pesan-pesan yang dapat menjatuhkan mental lawan-lawan politik sebagai

komunikasikan politik, terutama lawan-lawan politik itu diketahui memiliki rekam jejak (*track record*) atau reputasi kurang baik, dan ini diketahui lawan politiknya, sehingga dalam kampanye politiknya, yang cenderung menjadi kampanye hitam (*black campaign*) dapat saling menjatuhkan mental lawan, apa lagi rekam jejak itu benar adanya, menjadi suatu kesempatan dalam kesempatan untuk menjatuhkan mental lawan politik.

Perang urat syaraf dalam arti sempit adalah penggunaan propaganda terhadap musuh beserta tindakan-tindakan operasional lainnya yang bersifat militer, ekonomis atau politis sebagaimana disyaratkan untuk melengkapinya propaganda. Perang urat dalam arti luas adalah penerapan bagian-bagian dari ilmu psikologi guna melanjutkan kegiatan-kegiatan politik, ekonomi atau militer. Perang urat syaraf tidak saja merupakan kegiatan dalam bidang militer, tetapi juga dalam bidang-bidang lainnya, antara lain politik dan ekonomi, sehingga dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa perang urat syaraf meliputi hal-hal: (1) ruang lingkup; bidang-bidang politik, ekonomi, dan militer; (2) sasaran: (a) orang-orang yang bersangkutan dengan kegiatan politik, ekonomi dan militer, (b) orang-orang yang ada hubungannya dengan gerakan militer: pihak musuh, pihak netral, pihak sahabat; (3) tujuan: mencapai kemenangan, mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku; (4) Cara: menerapkan aspek ilmu psikologi, merencanakan propaganda, merancang kegiatan-kegiatan lain (Effendy. 2001: 161-162).

Strategi dan taktik PR dalam militer di era peperangan, dengan sangat terpaksa berkolaborasi dengan metode komunikasi lainnya: propaganda, agitasi, dan *psywar* (perang urat syaraf), dan tidak menutup kemungkinan sebuah negara dalam propogandanya melakukan *black propaganda* (propaganda hitam), seperti yang dilakukan Amerika Serikat dengan menyebut Saddam Husein itu “orang gila.”

### **Strategi dan Taktik *Public Relations* Militer di Era Damai**

Strategi dan taktik *Public Relations* militer di era damai, sebetulnya tugasnya lebih berat, yaitu harus memelihara publik internal (rakyat sendiri) dan publik eksternal (negara tetangga atau mancanegara).

Publik internal harus dipelihara oleh militer Indonesia di era adalah bagi rakyat yang berada di teritorial atau perbatasan dengan negara lain atau rakyat yang menghuni pulau-pulau terpencil. Strategi PR yang harus dilakukan itu bahwa rakyat tetap memiliki nasionalisme

tinggi untuk tetap bersedia membela negara, bilamana ada ancaman serangan dari negara lain., dan taktik yang harus dilakukan untuk memelihara nasionalisme rakyat melalui komunikasi dan interaksi serta memperhatikan aspek kesejahteraan rakyat.

Publik eksternal, yang harus dilakukan sebagai strategi dan taktik PR militer di era damai: memelihara jalur diplomasi antarnegara, ikut aktif dalam pertemuan di forum-forum dunia (konferensi tingkat internasional, himpunan organisasi regional dan internasional, dan sejenisnya), juga berupaya untuk menjadi mediator bagi sebuah negara yang di dalamnya terjadi konflik atau konflik antar negara, membuat *events, campaigns* dan *program* PR untuk membentuk, meningkatkan dan memelihara citra dan reputasi militer Indonesia di dunia internasional.

Indonesia pernah menjadi juru damai konflik di negara Kamboja, juga mediator konflik di negara Filipina. Kegiatan forum-forum internasional membuat Indonesia semakin dikenal sehingga dapat membentuk citra dan reputasi Indonesia menjadi negara yang cinta damai. Pengiriman militer Indonesia sebagai pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di negara yang terlibat konflik peperangan.

Kendati, TNI kini tidak menjadi lagi terdepan dalam kehidupan sosial politik di era damai ini, tidak seperti di era orde baru menempati berbagai jabatan strategis sosial dan politik yang sebetulnya untuk jabatan sipil bukan militer. Tetap saja TNI di era damai ini memiliki pengaruh untuk utuhnya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), betul saat ini Indonesia ada dalam era damai, dengan pengertian tidak ada negara asing yang konflik dengan Indonesia yang sifatnya gangguan eksternal negara lain terhadap Indonesia. Era damai internal negara ini sebetulnya tidak damai mutlak, karena letupan-letupan disintegrasi bangsa masih terjadi, seperti di kawasan Papua (dulu Irian Jaya) daerah ini ingin memisahkan diri dengan identitas diri Papua Merdeka. Aceh sebelum perdamaian di kota Helsinki. Di Eropa ternyata muncul gerakan separatis seperti di Papua, dengan nama GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan sebetulnya secara *silent* (tersembunyi) masih banyak daerah yang tidak puas dengan pemerintah Indonesia untuk memisahkan diri atau mendirikan negara sendiri keluar Indonesia.

Contoh lain, ketika 1976 Timor Leste lepas dari jajahan Portugis ternyata terjadi perang saudara, maka atas dukungan negara Amerika Serikat, sebagai salah satu negara adi kuasa (adikuasa lainnya adalah

Uni Soviet, sekarang negara ini pecah menjadi beberapa negara, yang terbesar dari pecahan negara ini adalah Rusia), maka Indonesia mengambil alih Timor Leste. Daerah ini menjadi salah satu propinsi di Indonesia, tetapi perkembangan lebih lanjut, yakni di era pemerintahan Habibie 1997-1998, ternyata propinsi Timor Leste harus memisahkan diri dari Indonesia menjadi negara sendiri, setelah dilakukan referendum, yang mana referendum ini masih dipertanyakan kejujurannya, karena referendum di daerah ini sangat dipengaruhi oleh peranan negara Australia, yang menginginkan Timor Leste lepas dari Indonesia, sehingga Australia bisa “menjajah” negara baru ini dalam bidang ekonomi setidaknya, untuk mengeksploitasi celah Timor, yang konon berisi tambang emas dan uranium.

Konflik antaretnik, konflik antarkampung, konflik antaragama, tawuran pelajar, ulah kekerasan geng sepeda motor, dan jenis kekerasan lainnya kini marak di tanah air, kendati dari peperangan antar negara (eksternal) Indonesia ada dalam situasi kondisi damai, tetapi dalam kehidupan internal atau dalam negara sebetulnya tidak damai, tetapi terjadi perang antar rakyat sendiri.

Situasi dan kondisi era damai Indonesia, sebetulnya masih sangat memerlukan peranan TNI dalam mereduksi atau mengurangi konflik dan lainnya yang mengganggu dan menjadi penyakit sosial masyarakat, walau yang menjadi garda terdepan dalam mengatasi masalah sosial dan budaya ini adalah instansi kepolisian, tetapi peran TNI di belakang kepolisian sangat perlu memberikan penanganan yang lebih komprehensif lagi.

## **Simpulan**

Penulis mengemukakan beberapa kesimpulan; (1) tulang punggung komunikasi militer Indonesia di era perang dan damai adalah strategi dan taktik *Public Relations* (PR) agar komunikasi institusi yang lebih mengena dan tercapainya citra dan reputasi TNI, termasuk negara Indonesia di mata publik internal (rakyat sendiri) atau eksternal (publik dunia atau mancanegara); (2) profesionalisme militer di Indonesia masih perlu ditingkatkan dan dipertahankan, kendati militer Indonesia lahir dari idealisme sebagai anak kandung rakyat, sementara di negara maju militer lahir karena budaya profesionalisme bukan budaya idealisme (tentara lahir karena berjuang untuk merebut kemerdekaan); (3) peran dan fungsi



*Public Relations* dalam komunikasi militer Indonesia adalah *counselor* (konsultan), *advisor* (penasihat), *interpreter* (penerjemah) bagi manajemen puncak instansi militer di Indonesia; (4) berdasarkan perspektif ilmu, *Public Relations* adalah metode Ilmu Komunikasi, di mana metode komunikasi lainnya adalah jurnalisme, propaganda, agitasi, periklanan, kampanye, *psywar*, dan lainnya; (5) strategi terdiri dari perencanaan dan pemograman, sedangkan taktik adalah implementasi dari strategi dalam bentuk tindakan dan komunikasi; (6) Strategi dan taktik komunikasi militer Indonesia di era damai lebih berat dibanding era perang.

### **Daftar Pustaka**

- Ardianto, Elvinaro, 2011, *Handbook of Public Relations: Pengantar Komprehensif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Ardianto, Elvinaro, 2010, *Metodologi Untuk Public Relations: Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Ardianto, Elvinaro dan Dindin M. Machfudz, 2011, *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Arifin, Anwar, 2003, *Komunikasi Politik*, Jakarta: Penerbit Pustaka Indonesia.
- Cutlip, Scot M. Center, Allen H.; Broom, Glen M., 2000, *Effective Public Relations*, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall International Inc.
- Cutlip, Scot M. Center, Allen H., Broom, Glen M., 2006, *Effective Public Relations*, Alih Bahasa: Tri Wibowo, Jakarta: Prenada Media Group.
- Effendy, Onong Uchajana, 2001, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Harun, Rochajat dan Elvinaro Ardianto, 2011, *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Rajawali Press.
- Said, Salim, 2001, *Wawancara Tentang Tentara dan Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soebijo, dkk, 1992, *Dwifungsi ABRI*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wilcox, Dennis L Ault, Philip; Agee, Warren K., 2003, *Public Relations: Strategies and Tactics*, New York: Allyn and Bacon.



# STRATEGI RE *IMAGING* TNI-POLRI DI TENGAH KEBEBASAN INFORMASI

Edwi Arief Sosiawan

## Pendahuluan

“Satunya-satunya hak milik nasional republik yang masih utuh tidak berubah-ubah, adalah hanya Angkatan Perang Republik Indonesia. Tentara akan tetap hidup sampai akhir zaman, jangan menjadi alat oleh suatu badan atau orang, tentara akan timbul dan tenggelam bersama-sama negara. Kamu sekalian harus insyaf dan senantiasa ingat, bahwa tentara kita bukan aparat yang mati, tetapi aparat yang hidup” (Pangsar Jenderal Soedirman).

Semasa rezim Orde Baru, keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam berbagai aspek kehidupan bangsa sangat menonjol. Hal ini dapat terjadi karena TNI khususnya TNI Angkatan Darat (AD) merupakan salah satu tonggak berdirinya orde baru pasca Gerakan 30 September (G30S) PKI. Melalui legalisasi stabilitas keamanan negara, penguasa, dan militer berhak melakukan tindakan apa pun yang menyebabkan beberapa tragedi kemanusiaan melalui operasi militer dan operasi keamanan. Kekerasan oleh TNI memang menjadi problem politik besar pada masa Orde Baru. Kultur kekerasan telah dikembangkan militer dalam upaya menyokong pemerintahan orde baru. Motifnya sangat beragam, mulai dari kekerasan sebagai alat represi politik, kekerasan sebagai pengaman bagi praktik bisnis militer, kekerasan sebagai alat monopoli ideologi tunggal kekuasaan, atau kekerasan sebagai alat untuk mendisiplinkan publik atas nama pembangunan, serta kepentingan-kepentingan lain yang kerap bertumpang tindih. Sangat jelas terlihat apabila TNI dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) sangat represif dalam tindak kebijakannya yang memang dominan dari *supporting* penguasa.

Sorotan miring tersebut semakin diperparah dengan kiprah TNI - POLRI di bidang sosial kemasyarakatan. Pada masa Orde Baru, TNI difungsikan dan dikreasikan sebagai kekuatan sosial politik (Dwi Fungsi ABRI). Pengejawantahan dari fungsi tersebut adalah dengan menugaskan

para anggota TNI dalam lembaga pemerintah di luar militer. Pada masa orde baru di setiap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif banyak ditemukan tentara yang menduduki jabatan penting. Anggota TNI yang menduduki suatu jabatan penting bukan otomatis sebagai *decision maker* karena mereka masih terikat doktrin untuk selalu berkoordinasi dengan pimpinan TNI. Segala lini dalam hal regulasi, manajemen, kontrak, dan sistem administrasi lainnya harus melalui jalur birokrasi di tubuh TNI.

Fenomena tersebut menjadikan kiprah TNI dianggap telah merampas peran sosial politik yang seharusnya dikuasai oleh kalangan sipil. Pada zaman itu, praktik, mulai dari pemerintahan provinsi yaitu jabatan gubernur, bupati, duta besar, menteri, dan jabatan-jabatan puncak di banyak departemen banyak diisi oleh perwira TNI (yang lebih dominan pada satu angkatan saja). Peran sipil hanya diposisikan sebagai pendukung sehingga ada pameo pada waktu itu yang mengatakan kalau ingin menjadi kepala pemerintahan jangan masuk universitas atau masuk APDN (sekarang STPDN), tetapi masuk saja AKABRI (sekarang berubah AKMIL, AAU, AAL, dan AKPOL) supaya bisa menjabat gubernur, bupati, walikota, dan jabatan lainnya.

Hegemoni militer dan Polisi yang begitu kuat diperkuat oleh ketatnya seleksi informasi di ranah publik, sehingga walau begitu kuat informasi yang bersifat negatif namun tidak akan menjadi informasi yang dikonsumsi oleh publik secara luas. Media dan pers yang dibatasi dengan alasan pers yang bertanggung jawab (Pers Pancasila) memang menghilangkan bias informasi negatif bagi citra Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) waktu itu dihadapan publik. Media justru menjadi penyokong utama penguatan pencitraan ABRI di mata masyarakat luas.

Pada pasca reformasi, fenomena hegemoni TNI Polisi Republik Indonesia (POLRI) pada masa orde baru tersebut sering menjadi sandungan bagi perubahan TNI POLRI. Terbukti, begitu kekuasaan rezim Orde Baru runtuh, sorotan tajam, cercaan, bahkan hujatan, banyak dialamatkan kepada TNI POLRI. Bukan hanya di tataran elite politik, di mata masyarakat pun gugatan terhadap peran TNI POLRI terus-menerus dipersoalkan. Hasil jajak pendapat yang dilakukan Kompas pada akhir september 1998 selepas reformasi menunjukkan bahwa citra buruk (62%) lebih melekat daripada citra positif (38%). Citra ini meningkat kembali di ujung tahun 2010 seiring berbagai kemelut elite politik dan hukum,

ketimpangan kondisi ekonomi, dan ancaman teror, citra TNI dinyatakan baik oleh 69 persen responden dan hanya 23,4 persen yang menyatakan buruk (<http://www.unisosdem.org/article> tanggal 2 Maret 2012).

Pencitraan merupakan sesuatu yang bersifat relative atau tidak tetap, karena seiring dengan euforia kebebasan informasi, gambaran serta informasi tentang TNI dan POLRI selalu ada di benak masyarakat. Pada saat ini perilaku dan peristiwa yang melibatkan oknum TNI POLRI yang berbenturan dengan nilai sosial dan kemasyarakatan akan mudah menjadi konsumsi umum yang menggugurkan kredibilitas TNI POLRI di mata masyarakat, sebagai contoh; peristiwa Mesuji, penembakan *richocet* di Situbondo, salah tembak, dan sebagainya ikut mendingkai citra TNI POLRI. Pada sisi lain pemberitaan masalah internal di tubuh TNI POLRI seperti anggaran pengadaan dan kepemilikan peralatan TNI POLRI ikut meramaikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kedigdayaan TNI POLRI. Exposure pemberitaan dan informasi tentang sepak terjang TNI POLRI akan mudah dilacak dan diterima oleh masyarakat luas mengingat kebijakan politik terhadap media sangat berbeda dengan masa orde baru. Kebebasan pers pada media massa klasik ditambah media internet dengan berbagai aplikasinya menjadikan TNI POLRI disorot sama seperti institusi non militer lainnya.

Memang tidak selamanya media massa dan media internet sebagai jendela informasi publik menjadi *momok* bagi citra TNI dan POLRI namun juga banyak memberikan kontribusi positif bagi citra TNI POLRI. Sebagai contoh; Siaran *live* penangkapan teroris di Temanggung waktu lalu, operasi pengamanan di Nangroe Aceh Darussalam, Pelepasan sandera KM Sinar Kudus di Somalia, atau pencitraan melalui popularitas personil TNI POLRI seperti fenomena Briptu Norman dan Bripda Saiful Bahri. Secara langsung maupun tidak peristiwa yang di *blow up* oleh media massa dan media internet tersebut ikut meningkatkan pencitraan TNI dan POLRI.

Beranjak dari persoalan fenomena di atas maka dalam kajian analisis ilmiah ini menguraikan jawaban dari persoalan tentang bagaimana strategi *re-imaging* TNI POLRI di tengah kebebasan informasi?

## **Pembahasan**

Tidaklah mudah untuk membangun sesuatu citra yang pernah runtuh, untuk memugarnya kembali menjadi sesuatu yang kokoh kuat

dan didambakan oleh rakyatnya, setidaknya pernah ada 'luka' yang begitu membekas di sebagian masyarakat tertentu dan apa yang pernah dilakukan oleh oknum TNI POLRI. Menurut penulis, tidaklah adil apabila semua itu sekonyong-konyong kesalahan ditumpahkan hanya kepada TNI POLRI, karena seperti diketahui TNI POLRI adalah hanya sebagian kecil dari sebuah sistem yang saat itu sedang berkuasa. Apapun yang terjadi masyarakat dan negara ini membutuhkan TNI POLRI sebagai alat pertahanan negara serta melindungi stabilitas bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masyarakat dan negara membutuhkan TNI POLRI yang profesional yang mampu menjamin keamanan stabilitas Negara Indonesia. Semua itu telah dimiliki oleh TNI POLRI yaitu senantiasa bersikap tegas, disiplin tinggi, kerja keras, serta senantiasa bersikap sigap.

Guna menjawab berbagai kendala serta memanfaatkan peluang yang ada, maka sejumlah upaya membangun citra yang positif bagi TNI POLRI harus dilakukan. TNI POLRI yang sudah nyata melaksanakan tugas pokok, peran, dan fungsinya, perlu didukung oleh penguatan citra guna menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat, sehingga diharapkan terbentuknya opini yang positif di mata masyarakat yang ujungnya akan menggiatkan upaya sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (HANKAMRATA). Pada sisi yang global, pembentukan citra TNI POLRI menjadi penting untuk menunjukkan kepada dunia internasional mengenai realitas TNI POLRI dalam melaksanakan tugasnya menjaga keutuhan nasional NKRI. Negara dengan bangsa Indonesia tidak dianggap remeh oleh negara-negara lain seperti yang pernah terjadi pada masa lalu.

Adapun metoda yang mendasari sebagai strategi *re-imaging* TNI POLRI yaitu:

*Pertama*, Revitalisasi ulang lembaga dan aktivitas *Public Relations* (PR) dalam tubuh TNI POLRI. Selama ini fungsi dari aktivitas PR memang telah dilaksanakan namun aktivitas PR dalam tubuh TNI POLRI lebih banyak berorientasi pada pemberian informasi dan klarifikasi. Artinya fungsi dinas penerangan dan humas dalam tubuh TNI POLRI lebih banyak mengedepankan aktivitas yang bersifat konferensi pers manakala ada suatu masalah yang menyinggung atau berkaitan dengan institusi TNI POLRI, sementara masih banyak lagi aktivitas PR yang bukan hanya sekedar itu saja. Artinya kepedulian

secara sosial institusi TNI POLRI di luar fungsinya sebagai lembaga pertahanan dan kemanan belum optimal dijalankan. Suatu perusahaan bisa meningkatkan citranya melalui program CSR, maka TNI POLRI seharusnya juga mampu, meskipun dengan program yang berbeda. Sebagai contoh adalah TNI POLRI sering berbenturan dengan *civitas academica* yaitu mahasiswa pada saat demo atau peristiwa lainnya. Kasus buruk yang melibatkan bentrokan antara TNI POLRI sejak tahun 2008 mengakibatkan “dendam” tersendiri di antara kedua belah pihak dan kasus tersebut hanya berhenti pada tataran pemberian sanksi hukum kepada oknum anggota TNI POLRI yang bersalah. Upaya pencitraan melalui aktivitas PR seperti upaya merangkul dan membuat program yang bisa mendekatkan serta menjembatani antara TNI POLRI dengan kampus beserta *civitas akademikanya* dan perguruan tinggi jarang atau tidak pernah dilakukan secara nyata.

Pada tataran lain pejabat yang berwenang dalam fungsi kehumasan seperti dinas penerangan dan humas TNI POLRI lebih banyak mengedepankan penyangkalan terhadap fakta yang bukti otentiknya ada. Sebaliknya mereka sering mengakui fakta yang buktinya sebenarnya lemah, sebagaimana contoh kasus video “Koboi Palmerah” yang diunggah di *youtube* dan diberitakan di media massa. Sudut pandang pemberitaan tersebut lebih banyak menyalahkan oknum TNI, dan itu diakui oleh pihak TNI padahal seharusnya ada pembelaan dari pelaku anggota TNI tersebut mengingat ada etika pers berupa *cover both side*, dan itu tidak dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang fungsi, makna, dan hakiki aktivitas PR sesungguhnya belum dikenal dalam tubuh TNI POLRI. Berdasarkan hal tersebut, TNI POLRI perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya revitalisasi aktivitas dan lembaga PR sebagai berikut:

- a. Melakukan upaya pembinaan dan pola rekrutmen personel yang berkompentensi. Hal ini menjadi penting mengingat personel yang direkrut harus memiliki kemampuan suatu disiplin ilmu, khususnya ilmu komunikasi dan *Public relations* yang tentunya juga penting merekrut personil yang cakap dalam spesialisasi media dengan berbagai jenisnya baik cetak, elektronik, maupun *cyber*. Bahkan sudah menjadi kelayakan bila TNI POLRI memiliki *task force* khusus bidang aktivitas PR yang dalam pembinaannya diselenggarakan secara sistimatis dan terukur dengan pola yang konsisten serta

terintegrasi melalui pelatihan guna meningkatkan profesionalisme. *Task force* khusus tersebut dapat berdiri *independent* atau masuk *include* di bawah lembaga yang sudah ada seperti dinas *informasi* dan humas dalam TNI POLRI. Guna menambah kemampuan profesional personil PR TNI POLRI maka perlu adanya keterbukaan antara TNI POLRI dengan dunia PR seperti membuka kerjasama dengan konsultan-konsultan PR dan organisasi Kehumasan lainnya serta keterjalinan dengan lembaga pers serta lembaga penyiaran dalam menambah kemampuan pembuatan program pencitraan yang positif. Masih dalam poin ini sudah saatnya juga TNI POLRI membuat *Crisis Centre* yang menampung dan menjawab semua persoalan dan peristiwa yang melibatkan lembaga TNI POLRI ataupun oknum yang berbenturan kepentingan dan masalah dengan masyarakat luas.

- b. TNI POLRI perlu melakukan upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang digunakan untuk penyebaran informasi kepada khalayak yang sejajar dengan kualitas produk-produk media massa baik cetak maupun elektronik serta *cyber*. Sarana dan prasarana ini digunakan sebagai salah satu cara melakukan publikasi dan dokumentasi setiap aktivitas dalam lingkungan TNI POLRI baik yang bersifat *ceremonial* ataupun operasional di lapangan. Ketersediaan dokumentasi dengan kualitas yang setara dengan kualitas dokumentasi media massa, akan memberikan citra tentang profesionalnya PR dan Insitusi TNI POLRI.

*Kedua*, membina pola hubungan kerjasama dengan media massa guna menjaga kesinambungan dalam pembentukan citra positif bagi TNI POLRI melalui berbagai kegiatan dan informasi baik formal maupun informal agar mampu diketahui oleh masyarakat baik secara nasional maupun internasional. Pola kerjasama seperti ini ini memang sudah dilaksanakan dengan pihak Televisi Republik Indonesia (TVRI) pada acara Kamera Ria dan Halo Polisi (Indosiar). Menurut penullis, kedua acara tersebut belum bisa memasyarakat karena polesan acara tersebut masih sangat kaku dan kurang luwes. Lebih-lebih acara Kamera Ria yang merupakan warisan orde baru. TVRI yang saat ini sebagai media penyiaran publik sudah mulai ditinggalkan oleh audiens sehingga pemanfaatan acara ini masih belum optimal dalam pencitraan TNI POLRI. Kasus Halo Polisi juga masih sangat terkesan merupakan program acara pesanan dan tidak “*cair*” karena *talk show* antara mantan

polisi dan polisi yang masih aktif, apalagi penayangan acara tersebut pada jam menjelang ibadah sholat Jum'at di hari kerja.

Melihat beberapa kelemahan dalam pemanfaatan media massa yang pernah dilakukan, maka TNI POLRI perlu melakukan strategi baru dalam pemanfaatan media massa melalui dua cara yaitu:

- a. Keterlibatan dan partisipasi dalam pemanfaatan media massa bukan hanya pada penayangan berupa berita-berita kegiatan TNI POLRI maupun program berbentuk wawancara melainkan optimalisasi keterlibatan TNI POLRI pada program acara yang berada pada waktu *prime time* seperti *reality show*, sinetron yang berlatar belakang TNI POLRI, film pendek atau FTV. Langkah TVRI yang pernah memproduksi acara yang pernah digemari pada era 70'an adalah Metro 77 yang berkisah tentang kepahlawanan polisi dalam memberantas kejahatan layak untuk dilanjutkan dan diapresiasi dengan berbagai macam program acara yang sesuai dengan saat ini.
- b. Optimalisasi penggunaan media maya, yaitu lembaga di tingkat pusat TNI POLRI hingga lembaga di wilayah teritorial terendah perlu membuat dan mengoptimalkan *unofficial web* selain *official web* yang sudah ada, sehingga mampu digunakan untuk berinteraksi dengan para peminat informasi militer dan kepolisian di dunia virtual (maya). Perlu diketahui bahwa justru informasi tentang seluk-beluk TNI POLRI, justru lebih banyak dan mudah didapatkan dari *web* asing. Pengayaan informasi melalui *web* resmi TNI POLRI akan menjadikan modus yang berkembang menjadi suatu bentuk kecintaan terhadap TNI POLRI, mengingat segala informasi didapatkan dari situs resmi dan non resmi lembaga TNI POLRI sendiri. Pada sisi lain adanya situs resmi TNI POLRI yang menggunakan bahasa asing juga akan menambah wawasan dan wacana bagi pengguna internet yang tertarik dunia militer di seluruh dunia akan eksistensi TNI POLRI yang tidak kalah dengan serta mampu menanggulangi informasi miring yang negatif. Masih dalam pemanfaatan media *cyber* atau *online*, dalam poin ini tentunya keterlibatan TNI POLRI dalam situs media sosial atau jejaring sosial juga dapat dioptimalkan dalam konteks menjembatani sekat antara dunia *barak* dengan dunia masyarakat sipil. Pemanfaatan situs jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter* dan *blog* akan memudahkan komunikasi secara personal antara TNI POLRI baik secara perseorangan atau lembaga dengan masyarakat



luas, karena dengan fasilitas situs jejaring sosial komunikasi dapat dijalankan secara interaktif dan sesuai dengan aktualisasi pengguna internet.

*Ketiga*, Seiring dengan dijadikannya dunia militer menjadi *lifestyle* maka fenomena ini bisa dimanfaatkan untuk pencitraan positif TNI dan POLRI melalui beberapa cara yaitu:

- a. Membangun radio atau televisi komunitas yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi seputar aktivitas serta mengakomodasi gaya hidup militer pada masyarakat. Melalui radio atau televisi komunitas maka TNI POLRI akan bisa memberikan sebagian informasi tentang pengalaman, gaya hidup, dan filosofi dunia militer. Selain itu sebagai institusi pertahanan dan keamanan melalui media komunitas tersebut dapat disosialisasikan semangat jiwa kebangsaan serta kesadaran bela negara.
- b. Seiring dengan berkembangnya minat akan *military lifestyle* seperti komunitas-komunitas pecinta *air softgun*, *paint ball*, terjun payung dan dunia perualang lainnya, maka TNI POLRI dalam konteks institusi teritorial dapat menawarkan atau menjadi pendamping komunitas-komunitas tersebut. Kedekatan melalui komunitas ini akan mudah dilakukan mengingat para *military life styler* tersebut telah memiliki minat dalam dunia militer, sehingga aktivitas ini dapat digunakan sebagai kegiatan PR yang efektif untuk mendekatkan TNI POLRI dengan masyarakat.
- c. Membuat dan mem-*branding* kedigdayaan TNI POLRI dalam format satuan-satuan yang populer seperti *special forces* atau kesatuan khusus lainnya dalam bentuk *merchandise*, *ambiens media*, serta media non konvensional seperti *sticker*, kaos, dan sebagainya. *Merchandise* sudah dikenal sebagai alat atau media promosi dan branding yang ampuh dan handal dalam dunia bisnis. Tidaklah salah jika institusi TNI POLRI juga memproduksi berbagai *merchandise* serta *ambient media* dalam meningkatkan citra. Biarkan masyarakat merasa gagah ketika mereka mengenakan kaos yang berlogo satuan-satuan tempur elit TNI POLRI, biarkan mereka merasa memiliki TNI POLRI dengan memiliki pernak-perniknya seperti jaket, *sticker*, *notebook*, dan sebagainya. Sayang sekali sampai sekarang strategi ini belum pernah dilakukan padahal banyak masyarakat yang justru bangga dengan



pernak-pernik dari angkatan bersenjata lain, karena pernak-pernik dari angkatan bersenjata sendiri sulit dilakukan dan ditemukan bahkan cenderung dilarang bagi mereka warga sipil. Salah satu contoh yang penulis sesalkan adalah pernah Panglima TNI waktu itu Marsekal Djoko Suyono membuat aturan bahwa atribut militer walaupun hanya *sticker* tidak diperkenankan dimiliki atau dipasang pada kendaraan atau tempat lain oleh warga sipil. Peraturan ini memang baik pada satu sisi agar warga sipil tidak menyalahgunakan atribut militer untuk kejahatan dan sebagainya. Peraturan ini cukup gegabah, mengingat pada akhirnya yang digunakan sebagai simbol kegagahan dan kebanggaan justru atribut militer dari negara lain. Perlu ada semacam peraturan yang mengeksplicitkan mana atribut militer yang boleh dikonsumsi publik dan mana yang tidak boleh.

*Keempat*, saat ini ancaman pola hidup yang mengedepankan ideologi hedonis seiring dengan kemajuan perekonomian negara juga menjadi ancaman sendiri. Hal ini juga terlihat pada berkurangnya minat masyarakat untuk mengabdikan dirinya menjadi anggota TNI POLRI (sementara untuk melakukan wajib militer anggaran masih belum memungkinkan). Guna menarik minat masyarakat khususnya golongan muda, intitusi TNI POLRI perlu membuat pos-pos *recruitment* anggota tetap TNI POLRI yang lebih dekat dengan masyarakat. Selama ini proses *recruitment* dilakukan melalui pos-pos seperti Komando Daerah Militer (KODAM), Polisi Daerah (POLDA), Komando Rayon Militer (KOREM) dan sebagainya yang cenderung eksklusif sehingga terkesan jauh dari masyarakat, bahkan terkesan *angker* dan menakutkan. Pendirian pos-pos *recruitment* pada wilayah publik akan memberikan kemudahan dan kedekatan masyarakat dengan TNI POLRI. Pos-pos *recruitment* tersebut dapat didirikan di Mall, pusat perbelanjaan, atau wilayah strategis lainnya yang berada pada wilayah publik. Strategi ini dilaksanakan juga untuk tetap menjaga hubungan baik antara pihak TNI dengan masyarakat umum. Hal tersebut sebagai upaya pencitraan ulang agar TNI POLRI tidak terkesan *sangar* namun juga manusiawi.

## Simpulan

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil suatu simpulan, bahwa pembentukan ulang pencitraan TNI POLRI harus dilakukan untuk saat ini dan masa yang akan datang karena adanya peningkatan ekskalasi

keterbukaan informasi seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi. Pencitraan ulang TNI POLRI menjadi harga mati yang menjadi upaya berkelanjutan dan berkesinambungan dalam keutuhan NKRI. Pencitraan ulang ini juga sebagai amanah reformasi yang memosisikan TNI POLRI sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, bukan kekuatan sosial bahkan politik.

Melalui pemanfaatan media massa dan media *online* diharapkan dapat memberikan efek pembentukan citra, baik individu maupun kelompok dan lembaga TNI POLRI. Suatu citra akan terbentuk berdasarkan informasi yang diterima oleh masyarakat. Media massa dan media *online* bekerja untuk menyampaikan informasi kepada khalayak. Informasi dapat membentuk, mempertahankan, atau mendefinisikan citra. Peranan citra menjadi penting bagi TNI POLRI mengingat dalam situasi tertentu opini publik merupakan kekuatan dahsyat yang dapat mempengaruhi baik atau buruknya sebuah citra.

Optimalisasi dan peningkatan profesionalisme lembaga dan aktivitas PR di tubuh TNI POLRI perlu dibentuk dan diprogramkan, mengingat selama ini tidak banyak program yang menggunakan pendekatan PR dalam pembentukan citra. TNI POLRI dalam melaksanakan tugas pokok, peran dan fungsinya perlu didukung oleh publikasi guna menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat, sehingga berbagai kegiatannya dapat diketahui dan lebih dari itu diharapkan terbentuknya opini yang positif baik di lingkungan TNI POLRI beserta keluarga besarnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pembentukan citra bagi TNI menjadi penting mengingat untuk menunjukkan kepada dunia internasional mengenai gambaran tentang realitas TNI melaksanakan tugasnya dalam menjaga keutuhan nasional. Upaya maksimal memublikasikan seluas-luasnya tentang keberhasilan TNI dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas-tugas lainnya, diharapkan berdampak pada semakin meningkatnya citra positif TNI di seluruh lapisan masyarakat termasuk dunia internasional.

## **Daftar Pustaka**

Anggoro, Kusnanto, 1999, "Gagasan Militer Mengenai Demokrasi, Masyarakat Madani dan Transisi Demokratik dalam Rizal Sukma dan J. Kristiadi (ed), *Hubungan Sipil-Militer dan Transisi Demokrasi di Indoneisa: Perspektif Sipil dan Militer*, Jakarta: CSIS.

- Allan Millett, 2001, *Semper Fidelis - The History of the United States Marine Corps*.
- Barbara Schading, 2011, *A Civilian's Guide to the U.S. Military: A comprehensive reference to the customs, language and structure of the Armed Forces*.
- Beckett, IFW, 1999, *Discovering British Regimental Traditions*, Shire Publications Ltd.
- Bellis, MA, 1997, *British Regiments 1945 - 1995*. Malcolm A Bellis, Impressive research text giving dates, unit titles and lineage.
- Said, Salim, 2002, *Tumbuh dan Tumbuhnya Dwifungsi: Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia 1958-2000*, Jakarta: Aksara Karunia.
- Muna, Riefqi M, 1999, *Persepsi Militer dan Sipil Tentang Dwifungsi: Mengukur Dua Kategori Ganda*, Jakarta: CSIS.
- Windrow and Greene, 1997, *Windrow & Greene's Militaria Directory & Sourcebook 1998*, Compendium Publishing.



# WAJAH MILITER DI DUNIA MAYA: STUDI KASUS TINJAUAN PEMANFAATAN SITUS INTERNET OLEH TNI

**Doddy Salman**

## **Pendahuluan**

Terdapat satu organisasi dalam sejarah Indonesia modern yang posisinya paling penting dibandingkan organisasi lain maka jawabannya adalah angkatan bersenjata (Vatikiotis, 1998: 60). Kalimat Kepala Biro majalah *Far Eastern Economic Review* (FEER) Michael R.J. Vatikiotis tidaklah berlebihan. Tentara Nasional Indonesia (TNI) memang tercatat dalam sejarah Republik Indonesia memainkan peranan sangat penting sejak awal berdirinya negara ini. TNI secara resmi lahir 5 Oktober 1945 menyusul Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945 dua hari setelah tentara Jepang angkat kaki menyerah kalah kepada sekutu.

Asal muasal tentara Indonesia sendiri adalah milisi pro kemerdekaan yang didukung nasionalis Indonesia (Rabasa, 2002: 7). Menurut Undang-undang No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik politik negara (pasal 5). Sedangkan TNI adalah sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai (pasal 6):

- (1) a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan, c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Pelaksanaan peran dan fungsi TNI ini tentunya harus disesuaikan dengan perkembangan jaman, khususnya perkembangan politik. TNI pernah melakukan fungsi sebagai tentara pejuang bersama rakyat melawan agresi militer yang mengancam kemerdekaan bangsa. Di zaman orde baru TNI melaksanakan fungsinya dengan jargon Dwi Fungsi ABRI dengan dipelopori oleh Jendral A.H. Nasution (Rabasa, 2002: 10). Di masa setelah Presiden Suharto lengser TNI diminta untuk menjadi tentara profesional yang lepas dari arena politik.

TNI diharapkan tetap dapat mengikuti perkembangan zaman maka paradigma dan doktrin TNI pun harus berubah. Paradigma awal yang menekankan Pertahanan Rakyat Semesta diganti dengan paradigma baru. Paradigma baru yang diusung Letnan Jendral (purnawirawan) Susilo Bambang Yudhoyono (kini presiden RI masa jabatan ke-2) adalah bertujuan mengubah fokus tradisional TNI menjaga keamanan ke dalam menjadi orientasi melakukan pertahanan dari serangan luar (Rabasa, 2002: 26). Pengubahan fokus tersebut sering diistilahkan juga sebagai reformasi TNI.

Marcus Mietzner membagi reformasi TNI ke dalam dua tahap yaitu reformasi angkatan pertama dan reformasi TNI angkatan kedua (Mietzner, 2006: vii). Reformasi TNI angkatan pertama terjadi di masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie (1998-1999). Pada masa kepemimpinan Jendral Wiranto ini TNI melakukan reformasi ke dalam (self-reform). Tahapan selanjutnya diistilahkan Mietzner sebagai reformasi radikal (radical-reform) yaitu melakukan supremasi sipil terhadap militer. Tindakan ini terjadi di era Presiden Abdurrahman Wahid. Penempatan Juwono Sudarsono sebagai Menteri Pertahanan adalah simbol keinginan Presiden Wahid melakukan supremasi sipil atas militer. Posisi Panglima TNI yang di masa orde baru dipegang oleh angkatan darat diubah dengan diangkatnya Laksamana Widodo sebagai Panglima TNI (Mietzner, 2006: 20).

Di era Presiden Megawati maka TNI melakukan konsolidasi atas perubahan politik yang terjadi. Reformasi TNI di era Megawati dinilai banyak pengamat militer sebagai jalan di tempat (Mietzner, 2006: 33). Kondisi ini memang sulit dihindari mengingat munculnya terorisme internasional yang juga menimpa Indonesia dengan peristiwa bom Bali 2002.

TNI secara resmi tidak ikut dalam politik praktis namun demikian TNI tetap memiliki pengaruh yang signifikan langsung maupun tidak

langsung jika kondisi memang mengharuskan TNI untuk memilih (Kingsbury, 2003: 7). Purnawirawan TNI setelah reformasi 1998 banyak yang menjadi Menteri di kabinet, anggota DPR, DPD, bahkan anggota MPR. Sejak tahun 2004 maka perwakilan TNI di DPR dan MPR secara resmi dihapus. Sejak 2004 purnawirawan TNI dapat menjadi anggota DPR atau DPD jika mendapatkan suara di pemilihan umum legislatif. Upaya supremasi sipil atas militer memang berjalan terus. Walau, menurut Kingsbury, di dalam unsur TNI sudah lama dipercaya pemerintahan sipil tidak memiliki kemampuan menjalankan roda pemerintahan. Pemerintahan sipil diyakini oleh unsur TNI mudah jatuh ke dalam kepentingan kelompoknya (2006: 7).

Tekanan atas TNI untuk kembali ke barak dan menjauhi politik tetap muncul dari dunia internasional dan masyarakat Indonesia sendiri. Menurut Jun Honna, sepuluh tahun setelah Suharto lengser, proses pelepasan TNI dari dunia politik tidaklah lengkap dan mengakibatkan terjadinya demokrasi yang tidak sempurna (Bunte, 2009: 226). Masyarakat sipil dan militer membagi kekuatan politik dalam sistem demokrasi.

Menurut Angel Rabasa dan John Haseman, agar reformasi militer mencapai tujuannya maka TNI harus didorong untuk berani dan sepakat secara konstruktif membangun model baru hubungan sipil-militer berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Model baru ini sebagian besar bergantung kepada kepemimpinan masyarakat sipil. Sektor sipil harus mengembangkan kedalaman pemahaman masalah pertahanan yang mampu dihargai oleh para prajurit (2002: 134).

Dorongan agar TNI dan pemimpin sipil mampu saling sepakat secara konstruktif membangun model hubungannya tentunya bergantung pada kemampuan kedua belah pihak berkomunikasi. Bukan saja menyampaikan pesan-pesan namun memanfaatkan semua medium pesan yang ada. Pada posisi inilah pemanfaatan situs internet, sebagai medium baru, menjadi relevan untuk dimanfaatkan pihak TNI maupun sipil. Upaya konstruktif membangun model hubungan dapat segera terwujud karena pemahaman berdasarkan komunikasi interaktif.

## **Militer dan Internet**

Internet (*interconnection networking*) dan militer bukanlah sesuatu yang asing. DARPA (*Defense Advanced Research Project Agency*) sebagai bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang melakukan riset

internet. Proyek militer pemerintah Amerika ini mencoba menghubungkan *Stanford Research Institute* dengan Universitas California di tahun 1967 (Sterling, 2008: 109). DARPA sendiri adalah proyek yang diluncurkan sebagai reaksi atas peluncuran satelit Sputnik milik Uni Soviet di tahun 1958. DARPA adalah “mesin teknologi” untuk pengembangan senjata baru dan sistem komunikasi baru (Sterling, 2008: 115).

Dalam praktiknya kini internet juga menjadi senjata ekonomi. Hingga 2009 diperkirakan pemerintah Inggris ingin mencapai nilai industri komunikasi digital hingga 50 milyar pondsterling. Menurut Jansson-Boyd penggunaan internet pada dasarnya adalah aktivitas konsumtif. Partisipasi secara online secara konstan menunjukkan secara demonstratif meluasnya daya tarik internet (2010:147). Situs *www.internetworldstats.com* menyebutkan hingga 31 Desember 2011 dari 6,9 milyar penduduk dunia maka 2,26 milyar menggunakan internet. Jumlah pengguna terbesar adalah Asia dengan lebih 1 milyar pengguna internet. Riset tahun 2010 menunjukkan dari pengguna bahasa maka Bahasa Inggris menempati urutan pertama disusul oleh bahasa Cina. Di Asia negara terbanyak yang penduduknya mengakses internet terhitung hingga 31 Desember 2011 adalah Cina, disusul India, Jepang, dan Indonesia ditempat keempat dengan akses hingga 55 juta atau 25 kali lipat dibandingkan akses tahun 2000. Untuk akses media sosial Indonesia terhitung nomor dua setelah India dengan 43 juta lebih akses Facebook.

Sebagai sebuah medium, internet memiliki ciri khas yang berbeda dengan medium massa lainnya. Penggunaan internet sebagai media komunikasi canggih yang bisa menjangkau seluruh strata sosial masyarakat memiliki keefektifan dalam menyebarluaskan pesan-pesan komunikasi (Setiawan, 2004: 2). Ide penyebaran ini bermula dari tulisan Vannevar Bush di *1945 Atlantic Monthly*. Ia membayangkan sebuah sistem penyebaran (diseminasi) dan terorganisir informasi ilmiah secara seketika dapat dirasakan semua orang. Bush menamakan sistem tersebut “*the memex*”. “*The memex*” berupa mesin rol transparan yang memungkinkan buku, gambar, surat kabar, foto, hingga catatan panjang tersedia bagi siapa saja yang bisa mengakses dan mengetahui sistem indeks mesin tersebut. Setengah abad kemudian mimpi Vannevar Bush menjelma ke dalam sistem bernama *World Wide Web* dan berkaitan dengan teknologi internet (Bidgoli, 2004: 114).



Signifikansi internet tidak terletak pada kekuatannya menyebarkan informasi, namun justru pada potensinya menyediakan kemungkinan perubahan politik dan sosial melalui pemantapan dan perluasan jaringan aktivis, suatu hal yang tidak mungkin difasilitasi media lain yang umumnya dimonopoli oleh korporasi dan negara (Marmura,2008: 11).

Antonio Gramsci menyebutkan bahwa setiap kelompok yang ingin mendapatkan dan mempertahankan kepemimpinan politik atau budaya harus menunjukkan kemampuan lebih dari sekedar komitmen program yang dimilikinya. Gramsci juga menegaskan bahwa sekali ada di bilik kekuasaan maka kelompok berkuasa atau koalisinya tidak dapat berharap meraih posisi dominan begitu saja. Melainkan harus terus berjuang menghadapi tantangan, kelompok dan kepentingan lain, membuat nilai-nilai dan program sendiri dengan nilai, ekspresi budaya serta kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Marmura,2008: 5). Hadirnya situs *www.tni.mil.id* adalah upaya militer Indonesia, sebagaimana tesis Gramsci, membuat nilai-nilai dan program sendiri dengan nilai, ekspresi budaya serta kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Melalui situs *www.tni.mil.id* TNI berkomunikasi menyampaikan pesan-pesannya kepada para pembaca di mana saja yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai TNI. Komunikasi menghasilkan pengertian dan pemahaman jika pesan yang disampaikan ditafsirkan atau dimaknai orang yang menerima pesan (komunikatif) sesuai dengan maksud penyampai pesan (komunikator). Komunikasi haruslah menghilangkan ketidakpastian (*uncertainty reduction of theory*). Pertanyaan yang timbul adalah apakah situs *www.tni.mil.id* mampu dimaknai oleh pembaca pesan sesuai dengan maksud pembuat pesan (TNI)?

Lebih jelasnya pertanyaan mendasar yang patut diajukan adalah:

1. Seperti apakah elemen pesan, organisasi pesan, dan struktur penulisan dari situs web TNI selama ini?
2. Apakah makna dibalik penulisan elemen pesan, organisasi pesan dan struktur pesan dari situs TNI?

## **Metode Penelitian**

Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut maka penulis melakukan riset dengan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat analisis deskriptif. Dengan pendekatan analisis kualitatif deskriptif,

seperti disebutkan oleh Masri Singarimbun yang dikutip oleh Setiawan (2004: 33) diharapkan dapat mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu; dan mendeskripsikan secara rinci fenomena sosial tertentu cara studi kasus.

Penelitian kualitatif deskriptif dilakukan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Secara rinci penelitian deskriptif ditujukan untuk: 1) mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada; 2) mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku; 3) membuat pandangan atau evaluasi; 4) menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang (Setiawan, 2004: 31).

Pendekatan analisis deskriptif kualitatif dipilih berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, subjek dan objek penelitian. Tujuan akhir penelitian ini adalah memperoleh gambaran tentang penulisan situs TNI dengan mencoba menguak makna agar mendapatkan pemahaman terhadapnya dan mengetahui bagaimana interaktivitas diterapkan dalam situs tersebut dan serta bagaimana pola pembaruan (*updating*) pesan.

Guna menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini maka perlu dijelaskan konsep dasar mengenai objek penelitian yaitu elemen pesan, organisasi pesan, dan struktur penulisan pesan. Makna elemen pesan adalah setiap kategori muatan pesan terkecil yang ada atau ditampilkan pada halaman-halaman situs. Organisasi pesan adalah bentuk pengelompokan elemen-elemen pesan yang ada pada situs. Struktur pesan adalah bentuk hubungan antar elemen yang satu dengan elemen yang lainnya atau antara organisasi pesan yang satu dengan organisasi pesan yang lainnya (Setiawan, 2004: 34).

Situs yang diteliti adalah situs resmi milik Tentara Nasional Indonesia (TNI). Alasan utamanya adalah situs ini merupakan situs resmi TNI yang hadir dalam internet. Situs ini menjadi wajah militer yang dapat diakses oleh semua orang yang berselancar di dunia maya. Situs ini merupakan media TNI mengkomunikasikan pesan-pesannya.

Jelasnya situs resmi TNI diambil sebagai sebuah studi kasus. Riset studi kasus dilakukan ketika peneliti ingin memahami atau atau menjelaskan fenomena (Dominick, 2011: 141)

Teknik penelitian ini adalah melakukan pendokumentasian semua data atas fitur yang diperlukan dan ditemukan pada halaman situs TNI. Data tersebut dicatat dan dikategorisasikan berdasarkan fungsi atau manfaatnya. Data merupakan semua unsur kata dan gambar, bukan angka-angka dalam pengertian statistik. Setelah pengategorisasian dilakukan dicari hubungan yang ada. Fungsi manfaat atas fitur yang dikategorisasikan tersebut menjadi elemen pesan yang menjadi organisasi pesan dan struktur pesan yang diteliti.

Waktu penelitian ini dilakukan 27 Maret 2012 dan 22 April 2012. Pada kedua tanggal tersebut halaman situs diunduh. Situs kembali dikunjungi pada tanggal 27 April 2012. Kunjungan dilakukan untuk mendapatkan sampel halaman yang mencukupi untuk dapat di analisis. Dengan melakukan pengamatan terstruktur elemen pesan, struktur pesan dan organisasi pesan pada situs TNI dicatat. Fasilitas atau fitur lain diluar permasalahan penelitian ini yang ditemukan dalam situs juga menjadi bahan penelitian. Sesuai tujuan penelitian hasil penelitian tidak diukur dengan alat atau metode statistik. Data yang diperoleh lalu dikategorisasikan untuk dianalisis berdasarkan tujuan penelitian.

Kekurangan dan kelemahan penelitian ini adalah terbatasnya situs militer yang dianalisis yaitu hanya situs TNI saja. Masih ada situs militer resmi dari angkatan darat, laut, dan udara yang memungkinkan lebih komprehensif hasil penelitian. Selain itu terbatasnya waktu pengambilan data yaitu satu bulan saja. Data yang dianalisis hanya yang diperoleh di dalam situs tersebut. Kelemahan lain penelitian ini karena tidak ada data tambahan yang dapat diperoleh dari wawancara dengan pengelola situs. Penelitian ini hanya memfokuskan pada elemen-elemen pesan, organisasi pesan, dan struktur pesan yang ada di situs *www.tni.mil.id*. Pertimbangan estetis, warna, gambar, tata letak, efek situs tidak dikaji dalam penelitian ini.

### **Gambaran Umum Situs TNI**

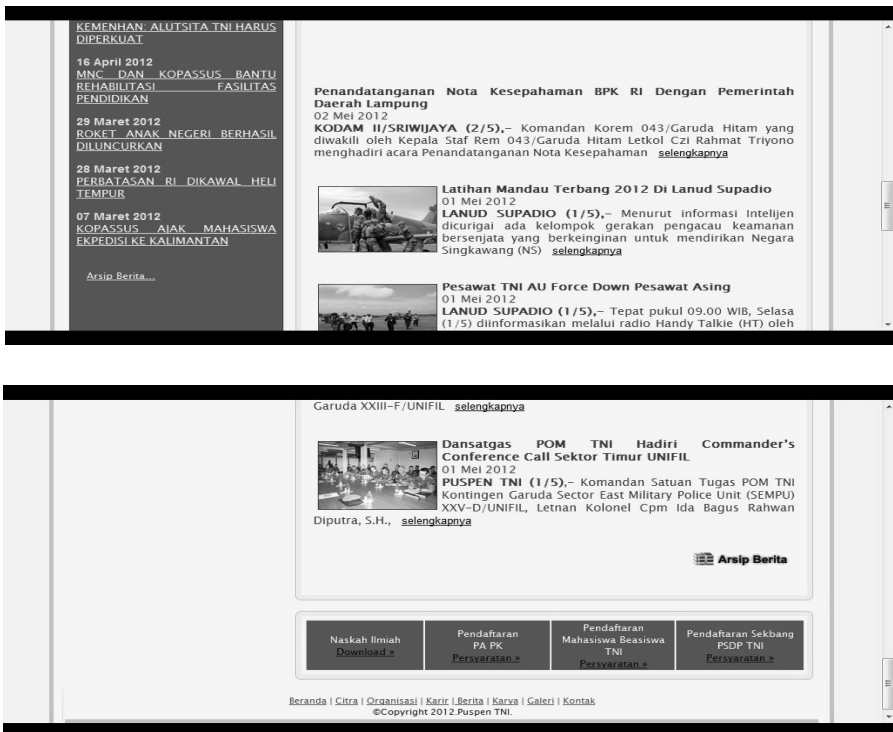
Situs beralamat *www.tni.mil.id* merupakan situs resmi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dikelola oleh Pusat Penerangan (Puspen TNI). Situs ini memuat berbagai informasi khususnya informasi kegiatan

TNI baik dari matra darat (AD), matra laut (AL) dan matra udara (AU). Situs ini juga memuat perintah harian Panglima TNI yang kini dijabat Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E. Berikut ini contoh halaman muka situs [www.tni.mil.id](http://www.tni.mil.id):

The screenshot shows the top section of the TNI website. At the top is a banner image of soldiers in a field with the text "Tentara Nasional Indonesia" and the website URL "www.tni.mil.id". Below the banner is a navigation menu with links: BERANDA, CITRA, ORGANISASI, KARIR, BERITA, PENPAS, LINK, and KONTAK. The main content area features a date "Rabu, 2 Mei 2012" and a search bar. Below that is a "BERITA TERKINI" section with a sub-header "Ketahanan Pangan Di Kodim 0505 /Jakarta Timur" dated "02 Mei 2012". The article text mentions "KODAM JAYA (2/5),- Dandim 0505 /Jakarta Timur Letnan Kolonel Inf Yustinus Nono Yulianto melaksanakan kegiatan penaburan benih ikan Lele sebanyak 2.000 ekor di kolam Lele yang terletak di depan h" and includes a link "selengkapnya". A "Menu" button is visible on the left side of the article.

This screenshot shows the sidebar and main content area of the TNI website. The sidebar on the left contains several menu categories: "KARYA" (with sub-links: DALAM NEGERI, LUAR NEGERI), "GALERI" (with sub-links: FILM, FOTO, GIAT KASIM TNI, GIAT HUT TNI KE-66, GIAT OPS LAT TNI, GIAT PANGLIAMA TNI, LAGU, LAIN-LAIN, PERATURAN), and "Pengumuman". A "Pengumuman" section is also visible, dated "18 April 2012", with a small image of a karate match and text: "Kepada para Atlet Karate Seluruh Indonesia TNI-Polri dan Umum yang berminat untuk mengikuti pertandingan karate memperebutkan Piala Panglima TNI Tahun 2012." The main content area shows a date "02 Mei 2012" and an article titled "LANTAMAL V (2/5),- KRI Teluk Sampit-515 beberapa hari yang lalu merapat di dermaga Umum Tanjungwangi, Banyuwangi" with a link "selengkapnya". Other articles include "Kopaska TNI AL Dan NDU RSN Akrab Dalam Ex Pandu 12/12" dated "02 Mei 2012", "ARMATIM (2/5),- Di hari pertama pelaksanaan Latihan Bersama (Latma) Exercise Pandu 12/12 antara Komando Pasukan Katak TNI AL dengan Naval Diving Unit (NDU) Republic Of Singapore Navy" with a link "selengkapnya", "Guskamlatim Laksanakan Lomba Kebersihan Dan Rumah Sehat" dated "02 Mei 2012", "ARMATIM (2/5),- Pada hari Selasa 01 Mei 2012, bertempat di lapangan Olahraga Mako Guskamlatim, Biak, Papua, Komandan Guskamlatim Laksamana Pertama TNI Siwi Sukma Adji menyerahkan hadiah kepada" with a link "selengkapnya", "Kodim 0111/Bireuen Laksanakan Persami" dated "02 Mei 2012", "KODAM ISKANDAR MUDA (2/5),- Jajaran kodim 0111/Bireuen melaksanakan kegiatan perkemahan Sabtu-Minggu (Persami) yang diikuti oleh perwakilan pelajar dari 17 Kecamatan, di bawah binaan Koramil ja" with a link "selengkapnya", and "Korem 042/Gapu Gelar Pembinaan Jasmani" dated "02 Mei 2012".

This screenshot shows the sidebar and main content area of the TNI website. The sidebar on the left contains a "Pengumuman" section dated "18 April 2012" with a small image of a karate match and text: "Kepada para Atlet Karate Seluruh Indonesia TNI-Polri dan Umum yang berminat untuk mengikuti pertandingan karate memperebutkan Piala Panglima TNI Tahun 2012." Below this is another "Pengumuman" section dated "05 Oktober 2011" with a small image of a TNI emblem and text: "PERINTAH HARIAN PANGLIAMA TNI SEBAGAI PEDOMAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS, SEBAGAI BERIKUT:" with a link "selengkapnya >>". The main content area shows a date "02 Mei 2012" and an article titled "Kodim 0111/Bireuen Laksanakan Persami" dated "02 Mei 2012", "KODAM ISKANDAR MUDA (2/5),- Jajaran kodim 0111/Bireuen melaksanakan kegiatan perkemahan Sabtu-Minggu (Persami) yang diikuti oleh perwakilan pelajar dari 17 Kecamatan, di bawah binaan Koramil ja" with a link "selengkapnya". Other articles include "Korem 042/Gapu Gelar Pembinaan Jasmani" dated "02 Mei 2012", "KODAM II/SRIWIJAYA (2/5),- Korem 042/Gapu laksanakan pembinaan jasmani bagi para Pamen, bertempat di lapangan Makorem 042/Gapu, Selasa, (1/5). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka upaya memin" with a link "selengkapnya". At the bottom of the page, there is a banner with the text "JAGALAH KELESTARIAN HUTAN KARENA HUTAN ADALAH JANTUNG KEHIDUPAN DUNIA" and three logos: "PATRIOT", "PENDAFTARAN ONLINE CALON PRADIKSI TNI", and "PPID TNI".



Gambar 3.1. contoh halaman muka situs *www.tni.mil.id*.

Situs ini mencatat bahwa informasi paling “tua” di situs ini adalah rencana upacara serah terima jabatan (sertijab) Panglima TNI tertanggal 16 Juni 2002. Sedangkan informasi paling “muda” di situs tersebut selalu ditampilkan di halaman depan.

### Fitur dan Fungsi Manfaat

Hasil penelitian ditemukan bahwa halaman muka situs *www.tni.mil.id* memiliki beberapa fasilitas yang mengelompokkan informasi yang tersedia. Berikut ini fasilitas yang tersedia di situs TNI dengan urutan berdasarkan kemudahan memberi penjelasan:

- A-1. Nama dan gambar situs. Memberi fungsi penjelasan identitas situs.
- A-2. BERANDA. Merupakan halaman depan situs. Halaman yang paling awal tampil setiap peselancar internet mengakses situs *www.tni.mil.id*. Beranda juga memuat foto panglima TNI. Berita terkini yang menampilkan 10-12 berita kegiatan di lingkungan TNI. *Banner* bertuliskan “Jauhi Narkoba Sekarang Juga Jangan Sentuh Narkoba

Sedikitpun". Tautan majalah Patriot, pendaftaran online prajurit TNI serta situs PPID (Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi TNI). Ada pula fitur Arsip Berita yang memungkinkan pengunjung mencari informasi yang pernah tayang di situs *www.tni.mil.id*. Di bagian bawah halaman terdapat fitur Naskah Ilmiah (yang dapat diunduh), Pendaftaran PAPH (dengan persyaratan), Pendaftaran Mahasiswa Beasiswa TNI (dengan persyaratan) serta Pendaftaran Sekbang PSDP TNI (dengan persyaratan). Di bagian kiri situs ke arah bawah setelah foto Panglima TNI terdapat halaman dengan Karya (terdiri dua tautan yaitu Dalam negeri dan Luar negeri). Karya memuat informasi kegiatan TNI dalam bentuk yang singkat. Galeri (memuat fitur film, foto, giat (kegiatan) kasum TNI, giat Hut TNI ke-66, giat Ops latihan TNI, giat Panglima TNI, lagu, lain-lain, dan peraturan. Di bawah fitur galeri terdapat *short cut* kutipan berita dari berbagai media cetak dengan judul Berita Media. Di bagian bawah Berita Media terdapat *short cut* yang menampilkan berita atau informasi yang dianggap menarik. Setiap berita ditandai dengan tanggal pemuatan. Di bagian akhir terdapat arsip berita film dokumentasi kegiatan TNI.

A-3.Kolom pencari. Memberi kemudahan mencari informasi yang ada dalam situs.Kolom pencari selalu ada di setiap halaman situs.

A-4.Kolom pencarian berdasarkan Tanggal. Memberi kemudahan pencarian informasi berdasarkan tanggal.

A-5.Tanggal situs.Memberi informasi tanggal situs. Menandakan kebaruan situs. Setiap halaman situs selalu muncul tanggal dengan urutan nama hari, tanggal, bulan dan tahun.

Dijejoran kolom BERANDA ke arah kanan ada 7 (tujuh) fitur yang tersedia di antaranya:

A-6.Citra. Adalah halaman yang memuat tautan dengan judul-judul Visi Misi TNI (berisikan visi misi TNI); Peran, Fungsi, dan Tugas; Jati Diri TNI, Pembukaan UUD 1945; Sapta Marga; Sumpah Prajurit; Delapan Wajib TNI; 11 Asas Kepemimpinan; Sumpah Perwira; Sejarah TNI; Undang-Undang TNI; Doktrin TNI.

A-7. Organisasi. Memuat tautan yang berisikan struktur organisasi di lingkungan TNI yaitu Mabes TNI; TNI Angkatan Darat; TNI Angkatan Laut; TNI Angkatan Udara; Terminologi; Daftar Singkatan Umum; TNI AD;TNI AL;TNI AU; Kepangkatan

- A-8. Karir. Berisikan halaman informasi yang berkaitan dengan karir. Informasi dibedakan dari sumber informasi yaitu Diklat; Sesko TNI; Perwira Karir; Kepangkatan; Pangkat Upacara; Harian AD; Harian AL; Harian AU; Pangkat Lapangan; Tanda Kehormatan.
- A-9 Berita. Berisikan berita-berita kegiatan di lingkungan TNI dengan pembagian topik berita Latihan Gabungan TNI; Diklat; Komisi I DPR RI; Opini; Duka Cita; Regional; Kegiatan Sosial; Internasional; Diklat Bilateral; Berita Media; Amanat; Politik; Politik; Prestasi; Berita Operasional.
- A-10 Penpas. Halaman dengan judul Penpas (lengkapnya lembar penerangan pasukan) berisikan informasi berkaitan dengan penerangan kepada pasukan atas suatu peristiwa atau kegiatan untuk menjadi pedoman pelaksanaan anggota TNI. Penerangan Pasukan diberikan menanggapi suatu peristiwa yang dianggap penting.
- A-11 Link. Halaman yang berisikan tautan dengan lembaga lain di lingkungan militer serta situs lembaga militer negara lain. Terbagi atas Dephan; Sesko TNI; Pusjarah; Mabes AD; Mabes AL; Mabes AU; Mabes Polri; Dephan; Negara lain (Inggris, Malaysia, Singapura); Tentara Negara Lain (India, Amerika, Australia, Singapura, Thailand); Lain-lain (Depkominfo, Bakorkamla).
- A-12 Kontak. Halaman yang disediakan oleh Puspen TNI kepada pengunjung situs yang ingin memperoleh informasi lebih jauh. Pada halaman ini terdapat isian Nama; Alamat; Kota; Pekerjaan; Email; Telephone (sic); Pesan; serta fasilitas Kirim dan Batal.
- A-13 Karya. Halaman bertajuk Karya terbagi dua: Dalam Negeri; Luar Negeri. Isinya adalah berita-berita kegiatan TNI dari dalam maupun luar negeri yang ditampilkan secara singkat
- A-14 Galeri. Adalah halaman yang berisikan kumpulan gambar dan film dokumentasi kegiatan di lingkup TNI. Terdiri atas halaman bertajuk Film; Foto; Giat Kasum TNI; Giat Hut TNI ke-66; Giat Ops Lat TNI; Giat Panglima TNI; Lagu; Lain-lain; dan Peraturan.
- A-15 Pengumuman. Adalah halaman yang memuat pengumuman kegiatan TNI dan Perintah Harian Panglima TNI
- A-16 Berita Media. Adalah halaman yang memuat tulisan kegiatan di lingkungan TNI yang ditulis oleh surat kabar Nasional.



A-17 Arsip Media. Berisikan halaman yang menyediakan arsip berita berupa film dokumentasi kegiatan TNI

Guna mendapat pemahaman yang lebih menyeluruh maka fitur-fitur tersebut diberi kategorisasi dan sub kategorisasi. Sesuai tujuan akhir penelitian ini adalah memperoleh gambaran tentang penulisan situs TNI dengan mencoba menguak makna agar mendapatkan pemahaman terhadapnya dan mengetahui bagaimana interaktivitas diterapkan dalam situs tersebut dan serta bagaimana pola pembaruan (*updating*) pesan. Berdasarkan fungsi manfaat maka bisa dibuat kategori utama yaitu; (1) Fitur yang menyediakan interaktivitas, (2) Fitur yang tidak menyediakan interaktivitas, (3) Fitur penunjang. Guna memudahkan kategorisasi dan sub kategori dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 3.1. Kategorisasi dan Sub Kategorisasi Fitur dan Fungsi Manfaat Pesan Situs *www.tni.mil.i***

Kategori 1 Fitur yang menyediakan interaktivitas		
Sub-Kategori	Penamaan fitur pada situs tni.mil.id	Fungsi Manfaat
K o m u n i k a s i dengan TNI	Kontak	Menyediakan halaman untuk pengunjung situs yang ingin bertanya pada pengelola situs
P e n d a f t a r a n anggota TNI & Beasiswa TNI	Pendaftaran Online Calon Prajurit TNI	Menyediakan halaman untuk pendaftaran calon prajurit TNI & permohonan penerimaan beasiswa

**Tabel 3. 2. Kategori Dua Fitur yang tidak menyediakan interaktivitas**

Sub-Kategori	Penamaan fitur pada situs tni.mil.id	Fungsi Manfaat
Berita	Berita;Galeri;Berita Media;	Menyediakan halaman berisi berita-berita kegiatan di lingkup TNI baik berita teks maupun gambar (audio visual)
Bukan berita	Organisasi; Citra; Karir; Penpas;	Menyediakan halaman yang berisi informasi struktur organisasi, konsep-konsep TNI,jalur pendidikan TNI



**Tabel 3.3 Kategori 3 Kategori Penunjang**

Sub-kategori	Penamaan fitur pada situs tni.mil.id	Fungsi Manfaat
Pencarian informasi	Cari;tanggal, arsip berita	Fasilitas yang digunakan untuk mencari informasi yang berada dalam situs secara cepat melalui kata kunci Sebagai pencatatan updating informasi yang diunggah.
Kategori 3 Kategori Penunjang		
Sub-kategori	Penamaan fitur pada situs tni.mil.id	Fungsi Manfaat
Tautan	Link	Fasilitas yang disediakan untuk loncat ke alamat situs lain yang berhubungan dengan TNI

### **Penafsiran dan Pemaknaan Fitur dan Fungsi Manfaat**

Dengan berpatokan pada tabel hingga tabel 3 maka dapat ditafsirkan dan dilakukan pemaknaan sebagai berikut:

**Kategori 1:** Fitur-fitur yang berfungsi melakukan interaktif dengan pengelola situs masih sangat minim. Interaktif, timbal balik pesan, sebagai ciri khas internet tidaklah disediakan terlalu banyak. Kemudahan pendaftaran anggota TNI dan beasiswa TNI merupakan fasilitas yang sesuai perkembangan zaman yang dipedulikan oleh TNI. Generasi muda yang akrab dengan internet (dibandingkan generasi sebelumnya) dapat dengan mudah terfasilitasi dengan fitur pendaftaran calon anggota tni online tersebut. Ketika terjadi hubungan interaktif antara pembuat pesan (komunikator) dengan penerima pesan (komunikasikan) maka terjadi hubungan *relationship* (Setiawan, 2004: 83). Dalam konteks hubungan sipil militer maka fasilitas interaktif membuka *relationship* antara pihak militer dengan siapapun (anggota militer sendiri atau masyarakat sipil). Pola komunikasi dua arah inilah yang memungkinkan terjadinya saling pengaruh mempengaruhi secara suka rela melalui komunikasi dua arah. Fasilitas interaktif memungkinkan TNI membuka diri menghadapi perkembangan zaman.

**Kategori 2:** Fitur-fitur yang tidak melakukan interaktif masih dominan dalam situs TNI. Pola komunikasi satu arah yang menjadi ciri khas media tradisional muncul justru di media baru bernama situs internet. Pengunjung halaman situs TNI tidak diberi kesempatan memberi komentar bahkan menyatakan suka atau tidak suka dengan berita yang tayang. Penyediaan berita berupa teks dan berita gambar (audio visual) sangat membantu pengunjung memahami pesan dari situs ini. Pemberian hari, tanggal dan tahun juga menunjukkan upaya *updating* pesan juga dilakukan.

Pola komunikasi satu arah ini, dari dominannya situs tidak interaktif, dapat menyiratkan bahwa TNI masih belum menjadi lembaga yang mau mereformasi dirinya. TNI masih galau menghadapi perkembangan zaman yang menuntut keterbukaan dan transparansi. Tak heran situs ini masih dikelola oleh Pusat Penerangan (Puspen) TNI, bukan oleh lembaga Pusat Informasi TNI yang terdengar lebih egaliter di zaman demokrasi sekarang.

**Kategori 3:** Fitur penunjang di dalam situs ini masih minim. Sekalipun fasilitas pencari disediakan melalui pencarian kata kunci dan tanggal peristiwa disediakan. Fasilitas arsip berita juga mendukung pengunjung situs mendapatkan informasi yang diperlukan secara mudah. Tidak adanya fasilitas yang menghitung pengunjung yang datang (*hits*) menyebabkan pengunjung tidak mengetahui kuantitas pengunjung situs ini. Penggunaan hanya bahasa Indonesia dalam situs ini juga menyebabkan hanya pengunjung yang mampu berbahasa Indonesia saja yang mampu memahami informasi.

## Simpulan

Wajah militer Indonesia di dunia maya, melalui situs *www.tni.mil.id* , menjadi bukti empiris bahwa reformasi TNI belumlah seperti yang dicita-citakan semangat reformasi 14 tahun lalu. Dalam konteks pertahanan Indonesia maka militer (baca TNI) yang memiliki komunikasi interaktif dengan siapapun masih perlu dibumikan dengan tindakan nyata. Membangun situs militer yang lebih interaktif dengan fasilitas mampu memunculkan komentar pengunjung, menampilkan fasilitas jumlah pengunjung, terkait dengan media sosial (*facebook, twitter*, dan lain-lain) serta fasilitas untuk pengunjung berbahasa Inggris adalah bagian membangun komunikasi yang berujung pada *relationship*. Doktrin

bahwa pertahanan rakyat dari serangan luar disandarkan kepada TNI, yang menjadi tulang punggung pertahanan Republik Indonesia dapat terealisasi dengan mudah sekaligus menjalankan amanat reformasi militer yaitu terciptanya supremasi sipil atas militer. Membangun wajah militer di dunia maya adalah bagian kecil upaya tersebut.

### **Daftar Pustaka**

- Bidgoli, Hossein (Ed), 2004, *The Internet Encyclopedia: Volume 2*, New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.
- Bunte, Marco and Andreas Ufen. (Eds), 2009, *Democratization in Post-Suharto Indonesia*. Oxon: Routledge.
- Dominick, Joseph R. and Roger D. Wimmer, 2011, *Mass Media Research: An Introduction*, Ninth Edition, Boston: Wadsworth.
- Felder, Lynda, 2012, *Writing for the Web: Creating Compelling Web Content Using Words Picture and Sound*, Berkeley: New Riders.
- Frey, Lawrence R. and Kenneth N. Cissna, 2009, *Routledge Handbook of Applied Communication Research*, New York: Routledge.
- Hunsinger, Jeremy et al (Eds), 2010, *International Handbook of Internet Research*, London: Springer.
- Jansson-Boyd, Cathrine V, 2010, *Consumer Psychology*, London: Open University Press.
- Kingsbury, Damien, 2003, *Power Politics & the Indonesian Military*, London: Routledge.
- Lee, T-W, 2009, *Military Technologies of the World. Vol. 1 & 2*, Westport: Praeger.
- Marmura, Stephen M.E, 2008, *Hegemony in Digital Age: The Arab Israel Conflict Online*. Lanham: Lexington Books.
- Mietzner, Marcus, 2006, *The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance*, Washington: East-West Center.
- Poynter, Ray, 2010, *The Handbook of Online and Social Media Research: Tools and Techniques for Market Researchers*, West Sussex UK: John Wiley & Sons Ltd.

Rabasa, Angel & John Haseman, 2002, *The Military and Democracy in Indonesia: Challenges, Politics and Power*, Santa Monica: RAND.

Setiawan, Judhie A, 2004, *Pemanfaatan Internet Sebagai Sarana Publikasi Aktor Politik-Studi Kasus pada Situs Web m-amienrais.com*, Jakarta: UI (Tesis).

Sterling, Christopher H. (Ed), 2008, *Military Communications: From Ancient Times to The 21st Century*. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, Inc.

Tippe, Syarifudin, tanpa tahun, *Strategi Pengembangan TNI AD 25 tahun ke depan: Ditinjau dari Perspektif Pendidikan*, ([www.tni.mil.id](http://www.tni.mil.id)).

Vatikiotis, Michael R.J, 1998, *Indonesian Politics Under Suharto: The Rise and Fall of The New Order*, 3rd edition, London: Routledge.

Wimmer, Roger D and Joseph R. Dominick, 2011, *Mass Media Research: An Introduction*, 9th edition, Boston, USA: Wadsworth.

[www.tni.mil.id](http://www.tni.mil.id)

[www.internetworldstats.com](http://www.internetworldstats.com)

# PERANG OPINI TENTANG CITRA MILITER INDONESIA DI MATA PUBLIK

Aat Ruchiat Nugraha,

## Pendahuluan

Upaya pertahanan keamanan negara Indonesia dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata) yang terdiri atas komponen dasar yaitu Rakyat Terlatih, komponen utama yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI), komponen khusus yaitu Perlindungan Masyarakat, dan komponen pendukungnya adalah Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Buatan dan Prasarana Nasional secara menyeluruh terpadu dan terarah. Militer adalah suatu organisasi yang diberi otoritas oleh organisasi di atasnya (negara) untuk menggunakan kekuatan yang mematikan (*lethal force*) untuk membela atau mempertahankan negara dari ancaman yang serius ataupun hal-hal yang dianggap sebagai ancaman serangan terhadap ideologi dan wilayah kenegaraan. Bila berbicara militer, maka akan selalu berkaitan dengan negara dan sistem pemerintahannya.

Militer seringkali berfungsi dan bekerja sebagai sebuah masyarakat dalam masyarakat (*societies within societies*) yang memiliki komoditas ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum, dan lain-lainnya secara mandiri. Pada komoditas ekonomi, sektor militer memiliki unit bisnis yang cukup vital seperti PT. Pindad, PT. Dirgantara Indonesia, PT. PAL, dan sebagainya. Di komoditas pendidikan, memiliki sekolah militer seperti SECABA, SECAPA, dan SESKO TNI atau POLRI, serta perguruan tinggi (Universitas Pertahanan, Universitas Lang Lang Bhuana, dan Universitas Bhayangkara). Di komoditas kesehatan memiliki unit Rumah Sakit Militer seperti RSPAD Gatot Subroto (DKI Jakarta), RS Bhayangkara (di setiap Ibu Kota Propinsi), RS. Dustira dan RS. Sariningsih yang berada di Jawa Barat, sedangkan di sektor hukum, militer memiliki pengadilan tersendiri yaitu Pengadilan Militer yang setingkat dengan Pengadilan Tinggi pada sistem hukum masyarakat sipil.

Menurut perspektif politik pragmatis, militer adalah alat negara untuk mencapai tujuan negara, baik lokal, nasional maupun internasional. Militer adalah salah satu perangkat negara yang diberi legalitas untuk melakukan penindakan melalui kekerasan, bahkan kepada penduduk sipilnya sendiri yang dianggap pemerintah dapat membahayakan eksistensi negara. Sebaliknya dalam sudut pandang politik ideal dan pemerintahan yang berbasis pada kepentingan publik (republik), militer adalah sebuah kekuatan publik (*public force*) untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara dari suatu kepentingan tertentu atas dasar partisipasi masyarakat (publik) dengan pihak militer. Aksi dan reaksi yang dilakukan militer didasarkan pada opini publik yang bersifat *mainstream* dalam menyingkahkan dan melenyapkan ancaman terhadap negara yang berupa ancaman dari dalam (keamanan negara) ataupun luar negeri (pertahanan negara).

Di era tahun 1960-an, kekuatan militer Indonesia cukup diperhitungkan sehingga dalam berbagai kesempatan berani untuk menginvasi negara tetangga Diraja Malaysia serta keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai bukti memiliki kekuatan yang memang tiada tanding di Asia waktu itu. Seiring perjalanan waktu, militer Indonesia bukannya berkembang, melainkan menjadi terpinggirkan walaupun Indonesia mempunyai industri persenjataan yang cukup strategis (PT. Pindad Persero) serta dari sisi kekuatan militer negara kita masih di bawah rata-rata dari negara tetangga yang begitu cepat perkembangannya. Saat ini anggaran militer Indonesia berkisar di angka Rp.40-an triliun atau hanya sekitar 4% dari APBN. Angka tersebut sebagian besar masih digunakan untuk membayar gaji anggota TNI atau POLRI, sisanya untuk biaya operasi, latihan dan pengadaan alutsista (alat utama sistem pertahanan). Sebagai studi perbandingan akan anggaran pertahanan keamanan negara (militer) yang dimiliki dalam APBN beberapa negara adalah sebagai berikut: Singapura 30,47% (2004) Kamboja 23,12% (2005), Iran 21,74% (2005), USA 19,26% (2005), Rusia 18,76% (2005), China 18,22 (2005), Israel 16,99% (2005), Malaysia 13,8% (2003), Australia 7,16% (2005).

Terlepas dari isu alokasi anggaran pertahanan keamanan negara yang begitu minim, Indonesia masih tetap memiliki kekuatan yang "maha dahsyat" dari segi lingkungan politis dan nonpolitis yang tetap menjaga agar TNI atau POLRI menjadi garda terdepan dalam

mengemban amanah untuk mengharumkan *Ibu Pertiwi* melalui kegiatan-kegiatan militer dan nonmiliternya yang bersifat “bebas aktif” di dunia Internasional. Sebagai negara besar yang masuk dalam jajaran 20 negara dengan perekonomian terbesar di dunia, idealnya Indonesia memiliki sistem pertahanan keamanan yang mumpuni untuk melindungi wilayah beserta isinya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan berkedaulatan berdasarkan Piagam Djuanda tentang Wawasan Nusantara yang harus tetap dipertahankan.

### **Kebijakan Militer Indonesia**

Pembangunan kekuatan militer bukan hanya melalui pembangunan perlengkapan dan kecanggihan senjata saja. Harus diupayakan pembangunan mental para personil, aparat atau petugas dan pejabat militer agar terjadi interaksi keseimbangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengemban pertahanan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh dalam sistem pendidikan, pendidikan militer lebih menekankan pada sistem pembelajaran konsep bela negara dan indoktrinasi nasionalisme. Tujuan penyelenggaraan indoktrinasi nasionalisme tersebut menunjukkan lembaga TNI atau POLRI merupakan alat pemersatu dan pembela bangsa untuk tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari rongrongan aksi teror, radikalisme, separatisme, dan gerakan-gerakan daerah yang mengarah pada pemisahan wilayah dan proses makar pada pemerintahan yang sah seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM), Republik Maluku Selatan (RMS) dan kelompok-kelompok lainnya serta campur tangan pihak asing yang menghendaki perpecahan bangsa (SARA).

Pendidikan militer merupakan pendidikan yang diciptakan sedemikian keras sampai dapat “menggadaikan” hak asasi sang personil atau aparat atau petugas dan pejabat militer khususnya prajurit, karena ingin mengetahui dan menguji sejauhmana kesetiaan para prajurit TNI atau POLRI terhadap Tanah Airnya melalui tradisi mencium bendera Merah Putih dan menyusuri permukaan tanah di lapangan terbuka di saat upacara kemiliteran. Dalam pendidikan masyarakat sipil terdapat keanekaragaman (*diversitas*) unsur masyarakat yang terbentuk dan adanya kebebasan dalam memilih paham tertentu ketika menempuh suatu jenjang pendidikan menengah, tinggi maupun ikatan dinas,

seperti demokrasi, sosial religius dan liberal. Praktisnya, pendidikan pada masyarakat sipil berdasarkan atas heterogenisme masyarakat yang mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda-beda sebagai idiologi hidupnya pada masing-masing individu, sedangkan pada masyarakat pendidikan militer, yaitu bentuk masyarakat yang sengaja diciptakan untuk memahami strategi dan taktik berperang melawan musuh dan berwatakan keras dalam menempuh pilihan hidupnya (merdeka atau mati). Mengonstruksi masyarakat berpendidikan militer yang diciptakan ini tentunya membutuhkan suatu tingkat kedisiplinan ekstrim yang melebihi tingkat kedisiplinan masyarakat sipil biasa. Akibatnya profesi militer sering dimaknai oleh masyarakat sipil sebagai profesi yang selalu berperilaku arogan, bengis, otoriter, dan keras (egois) serta loyal pada pimpinan.

Secara struktural dan fungsional, organisasi TNI atau POLRI sudah begitu mapan, diawali dari jenjang kepangkatan dan senioritas yang masih tetap dijunjung tinggi sehingga setelah sampai purnabakti (pensiun) ikatan emosional TNI atau POLRI tetap terjaga dengan terbentuknya organisasi seperti Legiun Veteran dan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) dan Ormas PPM (Putra atau Putri Panca Marga) yang secara implisit berafiliasi dengan kesatuan lembaga pertahanan keamanan negara. Dengan organisasi tersebut diharapkan nilai-nilai aktivitas “kemiliteran” tetap terjaga, terpelihara dan bahkan bisa berkembang dengan pesat pada sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya mewarnai dalam percaturan perpolitikan lokal maupun nasional, yang dimana para purnawirawan TNI atau POLRI masih menjadi rujukan masyarakat untuk menjadi calon pemimpin bangsa (Presiden dan Kepala Daerah) yang dianggap kredibel bisa menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara.

Kebijakan lainnya, dalam pengembangan kekuatan militer Indonesia tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa. Menurut Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Presiden sebagai pimpinan tertinggi TNI atau POLRI, pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI atau POLRI dilakukan oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Saat ini pengembangan posisi militer menjadi sangat politis dan dapat dikendalikan oleh kekuatan elite sipil. Dengan terpilihnya Panglima TNI atau POLRI ternyata sering disinyalir sebagai bentuk upaya pemerintah



dalam mensinergikan kekuatan militer untuk dijadikan sebagai alat kepentingan kekuasaan sesaat dan bukan untuk membangun kekuatan yang melindungi bangsa dari ancaman pertahanan dan keamanan. Selama kurang lebih 14 tahun (2012) reformasi Indonesia berjalan, pengembangan militer Indonesia justru didominasi oleh elite sipil yang mengakibatkan sulitnya merumuskan pembangunan kekuatan pertahanan dan keamanan negara secara kemiliteran dikarenakan banyaknya kepentingan-kepentingan politik yang menungganginya. Dengan demikian, ruang militer tidak eksklusif lagi dan sering menjadi ajang pertarungan kepentingan dan kekuasaan serta permainan para elite politik. Secara konstitusional peran dan fungsi TNI atau POLRI harus lebih netral dan tidak terlibat dalam politik praktis serta hanya fokus mengurus permasalahan pertahanan dan keamanan negara.

### **Opini Publik dan Citra Lembaga Militer**

Pengertian dan bentuk opini publik itu telah berkembang sejak abad 18 dari istilah opini umum. Dalam pengertian bebas pada abad 18 dan 19, opini publik itu masih berhubungan dengan perbedaan publik umum dan yang bersifat pribadi. Artinya, opini publik membatasi diri terhadap sesuatu yang bersifat umum. Adanya pendekatan dari bidang sosial dalam komunikasi massa, khususnya komunikasi interpersonal. Guna menyebarkan opini publik tentunya dibutuhkan seorang "*opinion leader*", yaitu pribadi yang berkemampuan memengaruhi dan menciptakan opini publik, pemikir, elite politik, dan tokoh masyarakat atau agama yang memiliki kemampuan memimpin, pandai, dan terampil dalam membawakan pembicaraan secara pribadi maupun pendapat umum untuk tujuan-tujuan tertentu. Di samping mempunyai waktu khusus untuk mendiskusikannya bersama, sehingga mampu membangun masyarakat heterogen menjadi masyarakat homogen (Saputra dan Nasrullah, 2011: 63-64).

Bagi suatu organisasi atau instansi atau lembaga apa pun yang menginginkan untuk berkembang dan mempunyai citra dan reputasi yang baik, tentunya akan secara berkesinambungan menciptakan opini yang memang tak bisa dihindari, khususnya di dunia *online* atau digital. Memang opini publik merupakan salah satu aspek *Public Relations* yang ditekankan oleh Ivy Ledbetter Lee lewat komunikasi yang dilaksanakan secara tepat, etis, dan opini publik sebagai efek yang nantinya akan diolah

dan kemudian diintegrasikan dengan peraturan, *policy* organisasi demi keuntungan kedua belah pihak. Opini publik erat sekali hubungannya dengan perilaku massa. Berkualitas atau tidaknya opini publik tersebut tentu juga sesuai dengan mentalitas massa yang bersangkutan.

Sekarang ini, opini publik yang terjadi di masyarakat mengenai keberadaan instansi militer yang selama ini posesif telah berubah haluan menjadi lebih terbuka dengan tetap memegang nilai-nilai ke-Sapta Marga-an TNI dan ke-Tribrata-an POLRI sebagai instansi pertahanan keamanan yang dapat meningkatkan citra lembaga dan negara dalam konteks “perang opini” antar lembaga pemerintahan dalam memperoleh simpati publik yang positif. Bentuk opini militer yang terjadi di masyarakat sekarang ini, baik lewat informasi yang ditayangkan oleh media massa maupun media jejaring sosial internet (*Facebook, Youtube* dan *Twitter*) merupakan sebagai langkah diplomasi militer yang terbentuk oleh TNI atau POLRI. Itulah sebabnya, begitu terjadi opini militer yang meledak di masyarakat, yang pertama harus dilakukan oleh TNI atau POLRI yaitu membuat peta persepsi yang berkembang di publik opini yang telah berkembang secara cepat. Pada tahap ini, opini tidak lagi bisa dibentuk dengan model satu arah, maka solusinya pengembangan opini harus didasarkan pada opini yang berkembang dalam wacana publik, kemudian disesuaikan dengan tujuan penyelesaian masalah (Wasesa, 2010: 85).

Sebagai contoh adalah diuploadnya video berdurasi beberapa menit yang menampilkan prajurit Brimob dari Gorontalo bernama Norman Kamaru (sebelum diberhentikan oleh pihak POLRI), berpangkat Brigadir Polisi Satu, di situs internet *Youtube*, tiba-tiba nama Norman Kamaru melejit (pertengahan tahun 2011). Dengan wajah lugu dan lucunya, ia menyanyi dan menarikan *lipsing* sebuah lagu India “*Chaiyya-chaiyya*” dengan amat sempurna dari awal sampai akhir di tempat jaga kerjanya, sekaligus masih memakai pakaian dinas kerjanya. Setelah video tersebut *booming*, yang menarik dan menjadi perhatian adalah komentar dari berbagai pihak, ada yang pro dan ada yang kontra. Pihak yang pro beranggapan bahwa hal itu merupakan hal yang sangat menarik dan kreatif serta dapat memperlihatkan sisi humanis dari seorang anggota POLRI, sementara pihak yang kontra berpendapat bahwa hal itu sangat tidak patut dilakukan karena melanggar kode etik dan mengurangi “kegagahan dan kesangaran” seorang polisi. Pro dan kontra tak habis-

habisnya, sampai-sampai akhirnya Briptu Norman mendapat 'teguran' karena ulahnya, disamping juga mendapat 'acungan jempol' bahkan 'dorongan semangat' dari mulai komandan, Kapolda Gorontalo sampai petinggi di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

Fenomena selanjutnya, Polisi Ganteng alias Polteng yang bernama Saeful Bahri, kini (awal 2012) menjadi pusat pemberitaan media massa, banyak orang yang penasaran ingin melihat sosok atau foto polisi ganteng Saeful Bahri. Alhasil dalam beberapa waktu tersebut banyak media massa cetak maupun media *online* semakin gencar memberitakannya bahkan wartawan dari negeri Jiran turut mengirimkan reporternya untuk meliput fenomena polisi ganteng Saeful Bahri yang hasil "karbitan" media jejaring sosial *twitter*. Berawal dari foto Polisi ganteng Saeful Bahri yang telah diunggah oleh seseorang melalui *twitter*, yang waktu itu Bripda Saeful Bahri sedang melaksanakan kegiatan pengamanan Imlek di Bandung difoto oleh seseorang yang kemudian diunggah ke media *online twitter*. Dari situlah muncul beragam komentar tentang kegantengan dari anggota Dalmas Polrestabes Bandung yang dapat meningkatkan citra lembaga Kepolisian.

Selain itu, media massa televisi swasta nasional pun telah ikut-ikutan "mengagendakan" pencitraan lembaga kepolisian, melalui tayangan *National Traffic Management Center (NTMC) live* yang terintegrasikan pada program *News* yang menginformasikan situasi lalu lintas di beberapa kota dengan presenternya para Polisi Wanita (Polwan) yang "Cantik dan *Smart*". Acara lainnya yang sudah lebih dulu tayang di televisi swasta lainnya yaitu penayangan acara dialog interaktif "Halo Polisi" yang mana isi acaranya membahas seputar pelayanan Kepolisian di masyarakat, seperti masalah lalu lintas, kriminal, pembuatan kelakuan baik, sampai pada penegakan hukum yang bekerjasama dengan lembaga hukum lainnya yaitu Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari beberapa contoh kasus diatas tentunya merupakan suatu keuntungan bagi lembaga Kepolisian yang secara sengaja maupun tidak, telah memiliki "selebiritis dadakan" dari anggota korpsnya guna memperkuat pencitraan lembaga kepada publiknya bahwa Korps Polisi itu memang bertugas untuk mengayomi, melindungi dan membantu masyarakat dimana pun dan kapan pun. Hal ini semoga memang menjadi tugas dan pokok jajaran Kepolisian di dalam melaksanakan reformasi birokrasi yang sudah diagung-agungkan oleh Pemerintah Era Reformasi.

Di instansi TNI, opini publik yang terbentuk di masyarakat terjadi pada dekade 1980-an, yang lebih akrab dikenal dengan istilah ABRI Masuk Desa (AMD). Kegiatan AMD merupakan program di mana anggota TNI—disebut ABRI ketika itu bersama warga masyarakat bekerja sama memperbaiki jalan atau membangun jembatan atau pembangunan yang bersifat fisik. AMD pada era Orde Baru merupakan salah satu program di bidang sosial TNI yang cukup sukses, yang memungkinkan prajurit dapat berinteraksi dengan masyarakat dan membantu menjalankan program-program di tingkat desa, seperti program kebersihan, infrastruktur, kesehatan, dan lain-lain. Seiring dengan berjalannya dinasti pemerintahan yang memimpin republik ini istilah AMD sempat tenggelam setelah Soeharto jatuh dan Dwifungsi ABRI pun dihujat-hujat.

Sekarang, AMD muncul kembali dengan wajah baru bernama Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), yaitu program lintas sektoral yang melibatkan TNI, Kementerian dan lembaga Pemerintah Daerah, serta segenap komponen masyarakat sebagai upaya membantu pemerintah dalam memberdayakan wilayah pertahanan dan membantu tugas pemerintah di daerah dengan anggarannya berasal dari APBN, APBD, dana hibah, maupun dari dana swadaya masyarakat. TMMD ini merupakan imbangan yang dilaksanakan secara terpadu dan pelaksanaannya secara serentak dilakukan di beberapa jajaran Kodam dan Kodim di seluruh Indonesia. Sasaran yang dilaksanakan dalam program TMMD di antaranya, pembuatan badan jalan, pengaspalan jalan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, rehabilitasi tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Dengan kegiatan TMMD diharapkan menggugah dan memupuk komitmen persatuan dan kesatuan diantara sesama masyarakat, membangun budaya saling tolong menolong atas dasar kesetiakawanan sosial dan jiwa gotong royong yang tumbuh dari hati, tidak saling menyalahkan, tetapi saling menghormati, dan selalu bahu membahu untuk membangun negara dan bangsa.

Selain kegiatan di atas, TNI juga melakukan Ekspedisi Khatulistiwa 2012 yang diselenggarakan oleh Kopassus TNI AD pada tanggal 5 April-15 Juli 2012 dalam upaya mendukung pendidikan berkarakter bagi generasi muda. Kegiatan ini meliputi penyusuran area perbatasan pulau Kalimantan yang meliputi penjelajahan (gunung, pegunungan, dan patok perbatasan), penelitian (mitigasi bencana dan sosial budaya),

serta komunikasi sosial dan bakti sosial yang melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, di antaranya mahasiswa Universitas Padjadjaran terdaftar menjadi peserta yang terbanyak dalam ekspedisi pada kesempatan kali ini selain peserta dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Ekspedisi Khatulistiwa ini terdiri atas rombongan Kopassus sebanyak 212 orang, 45 orang Kostrad, 96 orang Raider, 39 orang Marinir TNI AL, 50 orang Paskhas TNI AU, 10 orang Dittopad, 8 orang Penerbad, 11 orang Disjarahad, 1 orang Dispenad, 1 orang Pusjarah TNI, 8 orang Menwa, 3 orang Wanadri, dan 2 orang wartawan. Seluruh Tim disebar di 8 sub korwil di wilayah perbatasan Kalimantan yaitu Sambas, Sanggau, Putusibau, Murung Raya, Barabay, Malinau, Kutai Barat dan Nunukan. Seluruh tim mahasiswa bergabung dalam tim peneliti flora dan fauna, geologi dan mitigasi bencana, kerusakan hutan serta sosial budaya. Tujuan Ekspedisi Khatulistiwa 2012 ialah untuk membangkitkan kesadaran teritorial, mendata serta meneliti segala potensi kekayaan di perbatasan gunung, pegunungan, dan ralasantai (rawa, laut, sungai, dan pantai), serta memberikan keteladanan kepada masyarakat dalam menjaga lingkungan khususnya generasi muda mengenai besarnya potensi kekayaan alam Indonesia. Rencananya untuk ke depan, kegiatan ekspedisi ini dilakukan ke wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara dan Irian.

Guna memperkuat proses pembentukan opini publik dan citra instansi TNI yang positif di mata dunia internasional, pihak TNI terlibat melakukan operasi pembebasan sandera pembajakan Kapal MV Sinar Kudus dan penyelamatan kapal tangker milik Uni Emirat Arab dari tangan perompak Somalia pada bulan Mei 2011 di perairan Teluk Aden, Timur Tengah. Dalam operasi militer ini pasukan TNI menerjunkan dua jenis Kapal Perusak, KRI Yos Sudarso 353 dan KRI Halim Perdana Kusuma 355, jenis Kapal LPD, dan KRI Banjarmasin, Helikopter, tank, dan kapal Sea Raider. Termasuk didalamnya Satuan khusus angkatan laut (Denjaka Korps Marinir), satuan khusus angkatan darat (Sandi Yudha Kopasus dan Kostrad) dan elemen khusus udara (Kopaska) yang berjumlah 480 personel terdiri atas para ABK dari dua KRI.<sup>5)</sup> Lebih jauhnya lagi, program kegiatan TNI dalam upaya membentuk opini yang *fovaorable* di dunia internasional, melalui pengiriman pasukan Garuda yang telah memiliki reputasi baik sejak tahun 1970-an dalam menyelesaikan misi perdamaian di bawah komando pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) ke negara-negara yang sedang mengalami konflik sosial maupun militer yang terjadi secara internal dan eksternal di negara tersebut. Selain itu, Indonesia memiliki tempat pelatihan misi perdamaian dan antiteror yang canggih di Bogor, Jawa Barat yang bertaraf internasional.

TNI dapat memanfaatkan reputasi pasukan Garuda ketika bertugas di suatu negara dalam upaya pembentukan opini publik dan pencitraan yang baik bagi lembaga dan negara, yaitu melalui sosialisasi mengenai paham ekonomi dan sosial demokrasi Pancasila “ala Indonesia” yang diintegrasikan pada program-program nonmiliternya yang bergerak di bidang ekonomi bisnis. Hal seperti inilah yang telah dilakukan oleh negara Malaysia dan China. Malaysia terlibat dalam misi perdamaian di Liberia dan Afrika Barat maka, setelah damai terwujud di negara tersebut, perusahaan Sawit Malaysia melakukan ekspansi ekonomi bisnisnya dengan membuka kantor cabang atau perwakilan dan memperkerjakan warga negara pribumi di negara tersebut. Demikian pula, China yang terlibat dalam misi perdamaian di Sudan, perusahaan minyak dan gas China pun membuka bisnis besar-besaran di sektor “*Black Gold*” yaitu Perusahaan Pertambangan Minyak China melakukan eksplorasi lahan tambang minyak di wilayah tersebut setelah terjadi kedamaian.

Pada media massa, upaya TNI dalam membentuk opini publik dan citra lembaga yang *favourable* yaitu melalui pembuatan program acara “*base camp*” sebagai serial acara pendidikan dan pelatihan mental bagi remaja, khususnya siswa-siswi SMU atau SMK atau Sederajat yang mempunyai perilaku “agak nakal” agar kembali menjadi anak yang baik, berguna, dan membanggakan bagi orangtua (keluarga), sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam program acara ini dimunculkan berbagai aktivitas pembentukan karakter peserta ala militer yang humanistik, yang dimana pihak TNI sebagai instruktornya memberikan pendidikan, pengarahan dan pembinaan mengenai trik dan tips cara hidup berdisiplin militer-sipil.

Kegiatan TNI lainnya yang sering menjadi agenda media massa, yaitu setiap penyambutan dan penyelenggaraan kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps TNI atau POLRI seperti HUT TNI, HUT Kostrad, HUT Paskhas AU, HUT Marinir, HUT Kodam, dan HUT Bhayangkara selalu mendapatkan peliputan berita dalam bentuk *news* ataupun *special blocking program* di televisi penyiaran publik (TVRI) dan televisi swasta nasional. Dengan diliputnya HUT TNI atau POLRI menunjukkan

adanya upaya kampanye publik yang memanfaatkan media massa yang dilakukan instansi TNI atau POLRI dalam mewujudkan falsafah TNI sebagai Garda Terdepan Pertahanan Nasional Republik Indonesia dan falsafah POLRI sebagai Pengayom, Pelindung dan Pembinaan terhadap Masyarakat yang ramah dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat sipil.

Berkenaan dengan paparan di atas mengenai aktivitas TNI atau POLRI, maka opini publik itu identik dengan pengertian kebebasan, keterbukaan dalam mengungkapkan ide-ide, pendapat, keinginan, kebutuhan, keluhan, kritik yang membangun, dan kebebasan di dalam penulisan dan peliputan di media massa (diadaptasi dari Wahidin Saputra dan Rulli Nasrullah, 2011: 64). Dalam prosesnya opini publik merupakan alat kontrol yang ampuh terhadap demokrasi. Karena semua dilaksanakan demi kepentingan bersama atau umum. Kalau itu yang benar-benar terjadi negara dan antarnegara bisa hidup damai (Herimanto, dkk, 2007: 132). Secara Sosiologi opini publik dapat dinyatakan sebagai dasar dari hukum dengan kekuatan hukum bergantung dari dukungan yang diberikan oleh opini publik dan apabila opini publik mempunyai opini atau sikap tertentu terhadap suatu masalah, maka sikap itu mempunyai kekuatan hukum, tertulis ataupun tidak tertulis sebagai bentuk dukungan sosial (*social support*) terhadap suatu masalah atau isu tertentu yang (akan) terjadi. Dalam perspektif Ilmu Komunikasi, opini publik merupakan bagian dari efek komunikasi yang ditimbulkan oleh orang-orang tertentu mengenai suatu masalah dengan diinterpretasikan pada pernyataan-pernyataan tertentu (Olii, 2007: 22-23).

Menurut Nurudin (2001) opini publik adalah suatu bentuk kelompok yang terorganisasi serta menyebar di berbagai tempat dengan disatukan oleh suatu isu tertentu dengan saling mengadakan kontak satu sama lain dan biasanya melalui media massa (Nurudin, 2008:55). Dengan demikian, opini publik itu akan berkembang dan menjadi kuat apabila opini publik itu didukung oleh beberapa opini kelompok (*group opinion*) sehingga opini publik itu sendiri akan lebih mudah digerakkan (Sunarjo, 1984:27). Ferdinand Tonnies mengatakan, seperti dikutip Sunarjo (dalam Soemirat dan Ardianto, 2002: 104) menerangkan ada tiga tahapan opini publik dalam perkembangannya yang meliputi *die luftartige*, *die flussige* dan *die feste*. Opini publik *luftartig* adalah opini publik laksana uap di mana tahap perkembangannya masih terombang-ambing mencari



bentuk yang nyata. Opini publik *flussig* mempunyai sifat-sifat seperti air, opini publik ini sudah mempunyai bentuk yang nyata akan tetapi masih dapat dialirkan menurut saluran yang kita kehendaki, sedangkan opini publik *festig* adalah opini publik yang sudah kuat, tidak mudah berubah.

Pada akhirnya, opini publik terjadi akibat persepsi-persepsi yang timbul dan kemudian berkembang secara lambat namun pasti. Opini publik bukan organisasi dan tidak ada pemimpinnya maka opini publik tidak bisa dikendalikan, pasti selalu akan terjadi pro dan kontra. Beberapa kegiatan opini yang dilakukan oleh TNI atau POLRI baik di media massa maupun media internet merupakan suatu strategi dan taktik sosialisasi yang dilakukan oleh instansi tersebut dalam rangka memperoleh persepsi yang positif dari publiknya (masyarakat sipil).

Pengertian citra dalam kajian Ilmu Komunikasi (Hubungan Masyarakat) adalah suatu kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan dan pengertiannya tentang fakta-fakta atau kenyataan. Untuk mengetahui citra seseorang terhadap suatu objek, dapat diketahui dari sikapnya terhadap objek tersebut. Solomon, dalam Rahmat, menyatakan semua sikap bersumber pada organisasi kognitif pada informasi dan pengetahuan yang seseorang miliki. Efek kognitif dari komunikasi sangat mempengaruhi proses pembentukan citra seseorang. Citra terbentuk berdasarkan pengetahuan dan informasi-informasi yang diterima seseorang. Komunikasi tidak secara langsung menimbulkan perilaku tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi cara seseorang mengorganisasikan citra seseorang tentang lingkungan (Danasaputra, dalam Soemirat dan Ardianto, 2002: 114).

Dalam studi Hubungan Masyarakat, citra sering dianggap sebagai titik antara hubungan atau pengaruh pesan terhadap perilaku. Roberts (1997:363) dalam Nina W. Syam (1994) mengemukakan, pesan komunikasi pertama-tama berpengaruh pada citra. Pesan, yang kemudian menjadi informasi, dapat memperteguh atau mengubah bahkan membentuk citra. Pengaruh ini tidak dapat diamati secara inderawi, sebab berlangsung dalam *Black Box*. Pada akhirnya, citra terbentuk atas komponen persepsi, kognisi, motivasi, dan sikap. Dalam proses pembentukannya, citra selalu mengalami perubahan dan dipengaruhi oleh banyak hal. Citra terbentuk melalui pengalaman. Semakin banyak informasi atau peristiwa yang dialami seseorang akan objek tertentu, maka semakin banyak pula gambaran yang diterima seseorang itu mengenai objek tersebut. Hal



ini tentu dapat mempengaruhi formasi citra seseorang pada objek yang menjadi perhatiannya. Proses pembentukan citra akan menghasilkan sikap, pendapat, tanggapan, atau perilaku tertentu terhadap suatu objek.

Dalam proses pembentukan opini dan citra positif bagi suatu lembaga dari sisi media massa dapat ditempuh melalui konstruksi opini dan citra lembaga pada sebuah pemberitaan (*framing*). Konstruksi opini dan citra pemberitaan lembaga ini melibatkan orang-orang yang bertugas di dalam redaksi media massa, mulai wartawan, editor, dan pimpinan redaksi yang berkomunikasi dengan pimpinan suatu lembaga tersebut untuk menentukan layak atau tidaknya isi pemberitaan tersebut untuk dimuat dan diinformasikan ke publik. Konstruksi opini dan citra pada suatu lembaga biasanya disiapkan oleh Bagian atau Divisi yang menangani tentang komunikasi lembaga, misalnya Divisi *Public Relations* atau Bagian Penerangan Umum Publik. Pembentukan konstruksi opini dan citra yang dibangun oleh media massa ini terbentuk dalam dua model, yakni model *good news* dan model *bad news*. Model *good news* adalah sebuah konstruksi yang cenderung mengkonstruksi suatu pemberitaan sebagai pemberitaan yang baik bagi lembaga ataupun orang. Model *bad news* adalah sebuah konstruksi yang cenderung mengkonstruksi kejelekan atau memberi citra buruk pada objek pemberitaan.

Berkenaan dengan pembentukan opini dan citra positif bagi lembaga, maka ada beberapa teknik komunikasi yang dilakukan instansi pertahanan keamanan negara (TNI atau POLRI) dalam upaya menguasai opini publik dan citra yang positif dari publiknya; *Pertama*, teknik *Trust Building*, artinya teknik komunikasi yang dikembangkan melalui penanaman nilai-nilai kebenaran dan kejujuran (kredibilitas) yang dipresentasikan anggota TNI atau POLRI di masyarakat seperti prajurit TNI atau POLRI dalam menyampaikan pesan informasi yang sesuai dengan tuntutan Undang-undang Kebebasan Informasi Publik, apabila publik membutuhkan suatu informasi peran, fungsi dan kedudukan mengenai instansi TNI atau POLRI dalam melayani publiknya. Teknik komunikasi selanjutnya adalah teknik *Partnership Building*, yaitu pengembangan pemahaman pola pikir dan kinerja (*performance*) prajurit TNI atau POLRI yang bekerja sama dengan rakyat dalam membangun segala sektor kehidupan di masyarakat dengan tujuan agar tidak terjadi jarak antara rakyat disaat berinteraksi dimana dan kapan pun serta tetap menjunjung nilai-nilai “kemanusiaan” (*humanities*), seperti kegiatan amal

sosial, program penghijauan, gotong royong, dan sebagainya. Terakhir dari teknik komunikasi yang dikembangkan TNI atau POLRI dalam menyongsong era keterbukaan informasi dan pencitraan lembaga adalah teknik *Image Building*, yaitu personil TNI atau POLRI merepresentasikan budaya dan identitas organisasi ketika berinteraksi di masyarakat, melalui jalinan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi panutan sosial dan mengadakan aktivitas bersama dengan institusi lain yang mempunyai reputasi baik, sehingga dapat menciptakan kesan tertentu yang positif bagi lembaga.

### **Tipe Gaya Komunikasi Militer**

Dalam kegiatan organisasi selalu ada hubungannya dengan gaya komunikasi yang dipakai oleh setiap orang yang terlibat di dalamnya. Gaya komunikasi adalah seperangkat perilaku antarpribadi yang terspesialisasi yang digunakan dalam suatu situasi tertentu. Masing-masing gaya komunikasi terdiri dari sekumpulan perilaku komunikasi yang dipakai untuk mendapatkan respon atau tanggapan tertentu dalam situasi yang tertentu pula. Kesesuaian dari satu gaya komunikasi yang digunakan, bergantung pada maksud dari pengirim (*sender*) dan harapan dari penerima (*receiver*).

Mengutip dari Soemirat, Hidayat Satari, dan Asep Suryana (2007), beberapa gaya komunikasi yang biasa dilakukan oleh semua publik dalam suatu organisasi yaitu meliputi:

#### **1. *The Controlling Style***

Gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan ini, ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa dan mengatur perilaku, pikiran dan tanggapan orang lain. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah atau *one-way communications*. Pihak-pihak yang memakai *controlling style of communication* ini, lebih memusatkan perhatian kepada pengiriman pesan dibanding upaya mereka untuk berharap pesan. Mereka tidak mempunyai rasa ketertarikan dan perhatian untuk berbagi pesan. Mereka tidak mempunyai rasa ketertarikan dan perhatian pada umpan balik, kecuali jika umpan balik tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Para komunikator satu arah tersebut tidak khawatir dengan pandangan negatif orang lain, tetapi justru berusaha

menggunakan kewenangan dan kekuasaan untuk memaksa orang lain mematuhi pandangan-pandangannya. Pesan-pesan yang berasal dari komunikator satu arah ini, tidak berusaha 'menjual' gagasan agar dibicarakan bersama namun lebih pada usaha menjelaskan kepada orang lain apa yang dilakukannya. *The controlling style of communication* ini sering dipakai untuk mempersuasi orang lain supaya bekerja dan bertindak secara efektif dan teliti, dan pada umumnya dalam bentuk kritik. Gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan ini, tidak jarang bernada negatif sehingga menyebabkan orang lain memberi respons atau tanggapan yang negatif pula. Contohnya komunikasi yang terjadi di lembaga militer seperti TNI yang bersifat komando dan taat terhadap asas dan pimpinan karena dalam rangka melaksanakan sumpah prajurit.

## 2. *The Equalitarian Style*

Aspek penting gaya komunikasi ini ialah adanya landasan kesamaan. *The equalitarian style of communication* ini ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah (*two way traffic of communication*). Dalam gaya komunikasi ini, tindak komunikasi dilakukan secara terbuka. Artinya, setiap anggota organisasi dapat mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang rileks, santai, dan informal. Dalam suasana yang demikian, memungkinkan setiap anggota organisasi mencapai kesepakatan dan pengertian bersama. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi yang bermakna kesamaan ini, adalah orang-orang yang memiliki sikap kepedulian yang tinggi serta kemampuan membina hubungan yang baik dengan orang lain baik dalam konteks pribadi maupun dalam lingkup hubungan kerja. *The equalitarian style* ini akan memudahkan tindak komunikasi dalam organisasi, sebab gaya ini efektif dalam memelihara empati dan kerja sama, khususnya dalam situasi untuk mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan yang kompleks. Gaya komunikasi ini pula yang menjamin berlangsungnya tindak berbagi informasi di antara para anggota dalam suatu organisasi. Contohnya adalah komunikasi yang terjadi di lembaga kemasyarakatan atau pemerintahan yang paling rendah yaitu suasana rapat musyawarah yang dipimpin oleh Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dalam memutuskan suatu masalah.

### 3. *The Structuring Style*

Gaya komunikasi yang berstruktur ini, memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan serta struktur organisasi. Pengirim pesan (*sender*) lebih memberi perhatian kepada keinginan untuk mempengaruhi orang lain dengan jalan berbagi informasi tentang tujuan organisasi, jadwal kerja, aturan dan prosedur yang berlaku dalam organisasi tersebut. *Stogdill dan Coons* dari *The Bureau of Business Research of Ohio State University*, menemukan dimensi dari kepemimpinan yang efektif, yang mereka beri nama Struktur Inisiasi atau *Initiating Structure*. *Stogdill dan Coons* menjelaskan bahwa pemrakarsa (*initiator*) struktur yang efisien adalah orang-orang yang mampu merencanakan pesan-pesan verbal guna lebih memantapkan tujuan organisasi, kerangka penugasan dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Gaya komunikasi ini biasanya dianut oleh para pimpinan atau manajer yang ada di suatu perusahaan atau instansi pemerintahan yang menghendaki suatu perintah itu dalam bentuk disposisi atau memo terhadap bagian di bawahnya.

### 4. *The Dynamic style*

Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif, karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan (*action-oriented*). *The dynamic style of communication* ini sering dipakai oleh para juru kampanye ataupun *supervisor* yang membawa para wiraniaga (*salesmen atau saleswomen*). Tujuan utama gaya komunikasi yang agresif ini adalah mestimulasi atau merangsang pekerja atau karyawan untuk bekerja dengan lebih cepat dan lebih baik. Gaya komunikasi ini cukup efektif digunakan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang bersifat kritis, namun dengan persyaratan bahwa karyawan atau bawahan mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengatasi masalah yang kritis tersebut.

### 5. *The Relinquishing Style*

Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat ataupun gagasan orang lain, daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan (*sender*) mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Pesan-pesan dalam gaya komunikasi ini akan efektif ketika pengirim pesan sedang bekerja sama dengan orang-orang yang berpengetahuan

luas, berpengalaman, teliti serta bersedia untuk bertanggung jawab atas semua tugas atau pekerjaan yang dibebankannya. Gaya komunikasi ini akan lebih cocok di dunia pendidikan dan penelitian yang bersifat kepemimpinannya kolektif-kolega, yang dibutuhkan kerjasama antaranggota dalam mewujudkan visi dan misi lembaga, sehingga setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin.

## 6. *The Withdrawal Style*

Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi, artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antarpribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Dalam deskripsi yang kongkrit adalah ketika seseorang mengatakan: "Saya tidak ingin dilibatkan dalam persoalan ini". Pernyataan ini bermakna bahwa ia mencoba melepaskan diri dari tanggung jawab, tetapi juga mengindikasikan suatu keinginan untuk menghindari berkomunikasi dengan orang lain. Gaya ini tidak layak dipakai dalam konteks komunikasi organisasi.

Secara ringkas gaya komunikasi dapat dilihat dalam bentuk tabel berikut ini:

**Tabel 3.4. Bentuk Gaya Komunikasi**

<b>Gaya Komunikasi</b>	<b>Komunikator</b>	<b>Maksud</b>	<b>Tujuan</b>
<i>The Controlling Style</i>	Memberi perintah, butuh perhatian orang lain.	Mempersuasi orang lain.	Menggunakan kekuasaan dan wewenang.
<i>The Equalitarian Style</i>	Akrab, hangat.	Mestimulasi orang lain.	Menekankan pengertian bersama.
<i>The Structuring Style</i>	Objektif, tidak memihak.	Mensistemsasi lingkungan kerja, memantapkan struktur	Menegaskan ukuran, prosedur, aturan yang dipakai.
<i>The Dynamic Style</i>	Mengendalikan, agresif.	Menumbuhkan sikap untuk bertindak.	Ringkas dan singkat.
<i>The Relinquishing Style</i>	Bersedia menerima gagasan orang lain.	Mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain.	Mendukung pandangan orang lain.
<i>The Withdrawal Style</i>	Independen / berdiri sendiri.	Menghindari komunikasi.	Mengalihkan persoalan.

Gaya komunikasi yang cocok bagi orang-orang yang bekerja di instansi militer adalah gaya komunikasi *The Controlling Style*, dalam arti gaya komunikasi yang bersifat diam (tidak terlalu aktif atau banyak tanya), memiliki daya analisis yang cermat, dan mempunyai argumentasi berdasarkan data dan fakta. Dari hasil pengamatan secara teoretis biologis maka yang banyak berperan dalam kegiatan komunikasi ala militer adalah bagian otak kiri. Mengingat otak kiri berfungsi sebagai pengendali IQ (*Intelligence Quotient*) yang bersifat kuantitatif seperti perbedaan, angka, urutan, tulisan, bahasa, hitungan, dan logika. Daya ingat otak kiri bersifat jangka pendek (*short term memory*) dan mempunyai sifat serius, rumit, membosankan, hemat, lebih percaya fakta, rapi-terorganisir, ide sama dengan *profitabilitas*, lebih memilih keilmuan, hati-hati, berpengetahuan umum, pendukung diam, pembuat aturan, konservatif, mudah ditebak. Sebaliknya otak kanan berfungsi dalam perkembangan EQ (*Emotional Quotient*), yang bersifat kualitatif seperti persamaan, khayalan, kreativitas, bentuk atau ruang, emosi, musik, dan warna. Daya ingat otak kanan bersifat panjang (*long term memory*) dan mempunyai sifat humoris, *simple*, menyenangkan, boros, lebih percaya intuisi, berantakan-kacau, ekspresi diri, lebih memilih perasaan sebagai solusi masalah, suka berpetualang, bermimpi besar, tukang sorak, “pelanggar aturan”, bebas, dan spontan.

### **Komunikasi Kepimpinan Militer Humanistik**

Komunikasi merupakan bagian terpenting yang perlu mendapat perhatian ekstra bagi pemimpin ketika ingin memengaruhi orang lain untuk mau mengerjakan perintahnya ataupun dalam proses pengambilan keputusan. Keberhasilan pemimpin sangatlah ditentukan dalam keterampilan berkomunikasi. Komunikasi kepemimpinan sebagai faktor pendukung dalam kegiatan militer dapat didefinisikan sebagai aktifitas penyampaian pesan, informasi dan tugas (secara verbal ataupun nonverbal) melalui media tertentu yang dilakukan oleh seorang pimpinan kepada bawahannya, dengan tujuan tertentu (Masmuh, 2010: 279). Teori lainnya yang menunjang pada komunikasi militer era sekarang yaitu psikologi humanistik, suatu aliran dalam psikologi yang muncul tahun 1950-an sebagai reaksi terhadap behaviorisme dan psikoanalisis. Aliran ini menurut Maslow & Rogers, manusia memiliki kemampuan untuk mengontrol hidupnya dan tidak dimanipulasi oleh lingkungan. Manusia memiliki potensi yang sangat besar untuk

memahami diri secara sadar dan juga dapat membantu orang lain untuk mencapai pemahaman diri melalui keramahan, perhatian, dan sportivitas (Syam, 2011: 99). Humanistik menekankan manusia sebagai suatu ketunggalan yang mengalami, menghayati dan aktif, mempunyai tujuan serta harga diri. Manusia harus dikembalikan dalam kesatuan yang utuh sebagai pandangan yang holistik terhadap sosok manusia yang harus dipandang dengan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri, perkembangan pribadi, perbedaan-perbedaan individu dan dari sudut kemanusiaanya itu sendiri.

Dalam pandangan humanistik yang lebih khusus, manusia bertanggung jawab terhadap hidup dan perbuatannya serta mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk mengubah sikap dan perilaku mereka. Maslow menunjukkan tahapan tertinggi dalam tangga hierarki motivasi manusia adalah kebutuhan aktualisasi diri. Manusia berusaha keras untuk mendapatkan aktualisasi diri mereka, atau realisasi dari potensi diri manusia seutuhnya, ketika mereka telah meraih kepuasan dari kebutuhan yang lebih mendasarnya. Dalam pandangan Rogers, konsep diri merupakan hal terpenting dalam kepribadian, dan konsep diri ini juga yang mencakup ke semua aspek pemikiran, perasaan, serta keyakinan yang disadari oleh manusia dalam konsep dirinya. Teori Humanistik juga bisa dikatakan sebagai Teori Hubungan Antarmanusia; yang artinya mengusahakan keseimbangan antara kebutuhan atau kepentingan perseorangan dan kebutuhan atau kepentingan umum organisasi (Masmuh, 2010: 263).

Hubungannya dengan konsep komunikasi kepemimpinan militer yang humanistik, yaitu bentuk praktik komunikasi militer TNI atau POLRI yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dalam menyampaikan isi pesan terhadap publiknya (pimpinan pada prajurit atau pimpinan atau prajurit pada masyarakat sipil) melalui media tertentu (verbal dan nonverbal) secara persuasif untuk dapat dilakukan secara sadar tanpa ada paksaan dalam melakukan tugas dan kewajibannya secara teliti berdasarkan data dan fakta yang jelas serta dapat mengangkat harkat, derajat, dan martabat seorang aparat militer yang dihargai dan dihormati di masyarakat militer maupun sipil.



## Simpulan

Sebagai lembaga yang berwenang dalam mengupayakan ketertiban, keamanan, ketentraman, dan perdamaian, serta kenyamanan di dalam hidup berbangsa dan bernegara, maka TNI atau POLRI merasa perlu untuk mengubah paradigma perilaku komunikasinya menjadi lebih humanis sehingga semua kalangan (masyarakat sipil) dapat menerimanya dengan baik, ramah namun tetap tegas memegang teguh janji seorang Prajurit.

Dalam upaya meningkatkan profesionalisme militer TNI atau POLRI, sebaiknya berdayakan kembali industri militer nasional seperti PT. PAL, PT. PINDAD dan PT. Dirgantara Indonesia dalam menyokong aktivitas militer agar kembali mempunyai kekuatan peratahan dan keamanan yang dapat disegani oleh kekuatan militer negara-negara asing lainnya. Melalui reformasi militer ini, diharapkan kegiatan pembentukan opini dan citra TNI atau POLRI yang berwibawa dan bermitra dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik. Sebagai mitra, yaitu sebagai partner yang berkedudukan sama dan sejajar, sehingga tidak perlu ada eksklusivitas di dalam melaksanakan kegiatannya, namun yang perlu adalah saling memahami dan menghormati tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pihak antara TNI atau POLRI dan masyarakat sipil.

Dengan bereksplorasi berbagai jenis kegiatan TNI atau POLRI di lingkungan masyarakat sipil menunjukkan, pada dasarnya lembaga ketahanan dan keamanan negara mempunyai keinginan untuk dapat membantu rakyatnya, karena secara historis pun lahirnya TNI atau POLRI berasal dari rakyat, maka secara naruliah juga ingin kembali mengabdikan pada rakyat. Pada masa damai seperti ini, prajurit TNI atau POLRI diharapkan lebih banyak berperan melakukan kegiatan dan program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat seperti program penanggulangan bencana, pengentasan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, dan lain-lain.



## Daftar Pustaka

- Herimanto, Bambang, Assumpta Rumanti, dan FX. Indrojiono, 2007, *Public Relations dalam Organisasi*, Yogyakarta: Santusta.
- Masmuh, Abdullah, 2010, *Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Teori dan Praktik*, Malang: UMM Press.
- Nurudin, 2001, *Komunikasi Propaganda*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Olii, Helena, 2007, *Opini Publik*, Jakarta: PT. Indeks.
- Saputra, Wahidin dan Rulli Nasrullah, 2001, *Public Relations 2.0*: Jakarta, Gramata.
- Soemirat, Soleh dan Ardianto, Elvinaro, 2002, *Dasar-Dasar Public Relations*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soemirat, Soleh, H. Hidayat Satari, dan Asep Suryana, 2007, *Komunikasi Persuasif*, Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Sunarjo, Djoenasih S, 1984, *Opini Publik*, Yogyakarta: Liberty.
- Syam, Nina W, 2011, *Psikologi Komunikasi sebagai Akar Ilmu Komunikasi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Wasesa, Silih Agung dan Jim Macmanara, 2010, *Strategi Public Relations*, Jakarta: PT. ramedia Pustaka Utama.
- <http://adeltuslolok.wordpress.com/2010/09/01/kekuatan-militer-indonesia/> diakses pada 5 April 2012.
- <http://hankam.kompasiana.com/2011/04/04/militer-dan-hak-asasi-manusia/> diakses pada 5 April 2012.
- <http://fokus.vivanews.com/news/read/236279-tni-manunggal-masuk-desa--hanya-beda-kemasan-> diakses pada 10 April 2012.
- <http://hankam.kompasiana.com/2011/04/11/tni-masuk-desa/> diakses pada 10 April 2012.
- <http://id.berita.yahoo.com/kisah-pembebasan-mv-sinar-kudus-versi-presiden-sby-130050163.html> diakses pada 10 April 2012.
- <http://www.kodam-slw.mil.id/detailbrt.php?id=1250&kd=B> diakses pada 11 April 2012.
- <http://www.kodam-slw.mil.id/detailbrt.php?id=263&jenis=09> diakses pada 11 April 2012.
- <http://www.fikom.unpad.ac.id/?page=detailberita&id=239> diakses pada 12 April 2012.
- <http://www.unpad.ac.id/archives/53613> diakses pada 12 April 2012.



# **“THE POWER OF STORY TELLING” DALAM PENCITRAAN MILITER**

**Ani Yuningsih**

## **Pendahuluan**

Peran militer dalam percaturan politik dan kepemimpinan di sepanjang perjalanan sejarah bangsa ini sangat menonjol, selain peran serta posisi utamanya sebagai pengawal pertahanan dan keamanan negara. Kondisi ini diperkuat dengan munculnya tokoh dan negarawan bangsa yang berasal dari kalangan militer. Bagaimana sesungguhnya citra militer di tengah masyarakat, berdasarkan peran dan posisi strategisnya tersebut? Tentunya diperlukan suatu penelitian tersendiri untuk mengetahui citra militer saat ini, yang bisa saja hasilnya positif, netral, atau negatif.

Perlu diakui bahwa kepemimpinan militer memang mempunyai ciri khas dalam kedisiplinan dan struktur birokrasinya yang relatif lebih mapan, sehingga pada beberapa situasi dan kondisi tertentu di negara ini sangat dibutuhkan. Beberapa figur pimpinan militer memiliki kharisma dan kredibilitas yang tinggi di kalangan masyarakat, berkat kiprahnya di pemerintahan. Beberapa yang lainnya menorehkan citra yang negatif bagi korps militer, karena sepak terjangnya yang berbau korupsi, kolusi, dan nepotisme selama berkiprah di dunia politik.

Citra merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kerjasama antara lembaga atau organisasi dengan mitra kerjanya. Dalam menghayati atau memersepsi suatu realitas, setiap publik memiliki kepentingan dan cara pandang yang berbeda. Citra tersebut bisa positif dan bisa negatif, tergantung pada apa yang diberikan, diperlihatkan, serta dipersepsi oleh publiknya. Suatu tindakan dari anggota atau pimpinan sebagai duta organisasi yang positif akan menimbulkan efek penilaian yang positif sehingga citra pun akan baik, begitu pun sebaliknya, jika suatu tindakan dari anggota sebagai duta organisasi negatif, maka akan menimbulkan citra yang negatif atau penilaian yang buruk. Citra

(*image*) menurut Robberts (1997) adalah “*representing the totality of all information about the world any individual has processed, organized, and stored*” (menunjukkan keseluruhan informasi tentang dunia ini yang telah diolah, diorganisasikan, dan disimpan individu) (Rakhmat, 1999: 223).

Citra negatif militer sering disebabkan karena pimpinan mengabaikan pentingnya komunikasi eksternal untuk membangun pencitraan di masyarakat. Proyeksi kebutuhan bangsa di masa depan diasumsikan seakan dapat memberikan identitas baru dan citra yang lebih baik bagi organisasi militer. Pengalaman masa lalu sangat berarti bagi organisasi, dan perilaku individu ditentukan oleh masa lalunya daripada oleh apa yang ada dihadapannya. Pesan tentang peran militer sebagai pahlawan penyelamat bangsa di masa lalu, kini, dan yang akan datang hendaknya dikemas dengan publisitas yang *apik* melalui berbagai media komunikasi di tengah masyarakat, sehingga citra militer tetap disegani karena kewibawaan dan kepahlawanannya. Pengemasan pesan publisitas militer, antara lain dapat berupa cerita atau *story telling* memiliki kekuatan luar biasa untuk membangun pengertian, pendidikan dan dukungan dari masyarakat bagi militer. Cerita secara alamiah merupakan suatu bentuk komunikasi publik. Bercerita adalah cara menyampaikan pelajaran dari generasi ke generasi, kultur ke kultur. Cerita-cerita tidak dimaksudkan untuk disimpan sendiri, tapi dimaksudkan untuk diceritakan kembali. Cerita hakikatnya hadir di seluruh organisasi. Cerita, merupakan sebuah bagian integral dalam upaya mendefinisikan arti organisasi. Secara internal *story telling* menamakan apa arti bekerja untuk organisasi, sedangkan secara eksternal memberikan informasi dan edukasi tentang identitas dan aktivitas organisasi tersebut kepada publiknya.

Bagaimana *story telling* sebagai sebuah teknik publisitas dan sebagai salah satu strategi pencitraan, saat ini dibutuhkan oleh organisasi militer? Bagaimana seorang penutur cerita organisasi militer yang kreatif mampu mengonstruksi realitas identitas dan reputasi militer? Jawaban atas pertanyaan tersebut jelas merupakan suatu kajian yang menarik untuk dieksplorasi lebih jauh dalam tulisan ini. Dengan menggunakan perspektif komunikasi eksternal dan internal organisasi, tulisan ini akan mencoba memaparkan optimalisasi berbagai tindakan komunikasi untuk membangun citra militer di masyarakat, agar mendapat dukungan dan

posisi yang selayaknya, karena selain untuk membangun pencitraan, *story telling* atau cerita memiliki kekuatan untuk mengajarkan, memobilisasi, dan memotivasi.

## **Komunikasi Organisasi**

Menurut Pace dan Faules (terj Mulyana, 1998): “komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai proses pertunjukkan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian suatu organisasi tertentu”. Pace dan Faules, dalam hal ini mencoba memberikan deskripsi bahwa organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkhis antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi organisasi juga dapat diartikan sebagai proses pengiriman dan pemaknaan pesan di antara para anggota organisasi atau antara organisasi dengan publik eksternalnya.

Terlepas dari naik turunnya citra dan opini masyarakat terhadap militer, pada dasarnya suatu organisasi tetap memerlukan pengelolaan dan manajemen komunikasi. Organisasi dapat berjalan efektif jika komunikasi yang berlangsung di dalamnya berjalan secara efektif pula. Beberapa kegiatan organisasi yang terkait langsung dengan tindakan komunikasi, antara lain adalah: a) menetapkan tujuan organisasi; b) membuat dan melaksanakan keputusan organisasi; c) mengukur prestasi kerja; d) merekrut dan mengembangkan staf; e) pelayanan publik; f) negosiasi dengan pemasok; g) kegiatan produksi; h) berinteraksi dengan peraturan yang berlaku (Robbin, 2003).

Fungsi pesan dalam organisasi dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis fungsi, yaitu: a) Pesan Tugas, pesan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan anggota dalam suatu organisasi; b) Pesan Pemeliharaan, pesan yang berkenaan dengan kebijakan dan pengaturan organisasi; c) Pesan Kemanusiaan, pesan yang diarahkan langsung kepada anggota dengan mempertimbangkan aspek kepuasan atau kebutuhan; d) Pesan Pembaruan, pesan yang mengandung rencana atau strategi baru agar organisasi mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan (Robbin, 2003).

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa komunikasi merupakan instrumen penting dalam suatu organisasi, termasuk organisasi militer. Pelaksanaan tugas-tugas yang lebih bersifat komando hirarkis

pada organisasi militer, pengaturan, dan sosialisasi kebijakan militer, membangun semangat dan daya juang melalui persuasi dan motivasi anggota militer, serta rencana pembaharuan atau inovasi di bidang militer, semuanya hanya dapat dilakukan dengan aktivitas komunikasi organisasi. Pola komunikasi yang terarah, teratur dan strategis perlu dimiliki oleh organisasi militer, agar dapat mencapai tingkat efektivitas dan produktivitas yang optimal.

### **Strategi Komunikasi**

Bennet menggambarkan strategi sebagai “arah yang dipilih organisasi untuk diikuti dalam mencapai misinya”. Penentuan tujuan jangka panjang organisasi atau perusahaan dan memutuskan arah tindakan serta mendapatkan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan (dalam Morrisson 2010: 152). Strategi menurut Ahmad S. Adnan Putra yaitu bagian terpadu dari suatu rencana (*plan*), sedangkan rencana merupakan produk dari suatu perencanaan (*planning*), yang pada akhirnya perencanaan adalah fungsi dasar dari proses manajemen (Ruslan, 2010: 133).

Mintzberg (dalam Oliver, 2006: 2) menawarkan lima kegunaan dari kata strategi, yaitu:

- a. Sebuah rencana – suatu arah tindakan yang diinginkan secara sadar;
- b. Sebuah cara – suatu manuver spesifik yang dimaksudkan untuk mengecoh lawan atau kompetitor;
- c. Sebuah pola – dalam suatu rangkaian tindakan;
- d. Sebuah posisi – dalam suatu cara menempatkan organisasi dalam sebuah lingkungan;
- e. Sebuah perspektif – suatu cara yang terintegrasi dalam memandang dunia.

Organisasi militer sebagaimana organisasi lainnya, perlu menyusun strategi komunikasi yang akan disampaikan kepada khalayak sasarannya. Menurut Wilcox et al.(2006: 43):

“Penasihat Pemerintah pada Masa Perang, pada kedua perang dunia menyaksikan peningkatan luar biasa dari peran strategi komunikasi organisasi militer oleh *public relations* atas nama pemerintah, terutama Komite Creel selama Perang Dunia I dan Kantor Informasi Perang selama Perang Dunia II. Komite Creel. Dalam bukunya *Words that Won the War* James O. Mock dan Cedric

Larson menggambarkan anggota Komite Informasi Masyarakat sebagai “Penasihat *public relations* yang tidak diragukan bagi Pemerintah Amerika Serikat selama Perang Dunia I”.

Ditambahkan pula oleh Wilcox et al (2006: 45), bahwa:

“Di antara berbagai kegiatan komunikasi lain, komite ini mengimbu surat kabar dan majalah agar menyumbangkan volume ruang berita dan periklanan untuk mendorong rakyat Amerika supaya menghemat makanan dan banyak menanam modal di Liberty Bonds, yang dibeli oleh lebih dari 10 juta orang “ selama masa perang, sebagai bentuk kontribusi kepada negara.

“ Wilson juga menerima saran Creel bahwa kebencian orang Jerman harus diredam dan kesetiaan serta kepercayaan pada pemerintah harus ditekankan. Komite memublikasikan tujuan perang dan cita-cita Woodrow Wilson - membuat dunia aman demi demokrasi dan membuat Perang Dunia I menjadi perang untuk mengakhiri segala perang. Palang Merah Amerika, yang bekerja melalui kerja sama dengan komite tersebut, menerima lebih dari 19 juta orang baru dan menerima lebih dari \$400 juta sumbangan sepanjang masa itu” (Wilcox, 2006: 44).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa strategi komunikasi militer sejak dulu sudah dilaksanakan, baik ketika masa perang maupun ketika masa damai, dengan harapan tujuan pemerintah suatu negara atas keterlibatannya dalam perang tersebut tercapai. Salah satu strategi komunikasi yang sering dijalankan oleh militer adalah strategi publisitas.

## **Publisitas**

Publisitas adalah salah satu program atau bentuk produk dari *public relations*. Publisitas merupakan istilah yang populer bukan saja dalam dunia *public relations*, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia publisitas, praktisi-praktisi *public relations* ditantang untuk mengembangkan daya kreatifitasnya, agar seorang tokoh atau sebuah organisasi dapat mengontruksi identitas dan eksistensi dirinya di masyarakat. Sebagian besar berita dan informasi di media berasal dari sumber-sumber *public relations*. Sebuah organisasi dapat menyebarkan informasi dan memetik pemberitaan di berbagai media dengan tidak membayar. Memang komunikator organisasi hanya sedikit atau bahkan tidak punya kontrol tentang bagaimana informasi tersebut digunakan atau disalahgunakan, dan kapan informasi itu dipakai oleh media. Sumber-sumber *public relations* menyediakan informasi yang mereka

anggap pantas untuk diberitakan yang disebut publisitas. Dengan harapan editor dan reporter akan menggunakan informasi tersebut. Pembuat keputusan di media, memanfaatkan atau tidak memanfaatkan informasi tersebut berdasarkan penilaian mereka atas nilai dan kepentingan informasi tersebut bagi audiens mereka.

Para ahli mendefinisikan publisitas sebagai berikut: “publisitas adalah penyebaran pesan yang direncanakan dan dilakukan untuk mencapai tujuan lewat media tertentu untuk kepentingan tertentu pada media” (Dalam Iriantara, 2005: 190). Adapun menurut Cutlip dan Center: “publisitas adalah penyebaran informasi secara sistematis tentang lembaga atau perorangan” (Dalam Iriantara, 2005: 190).

Dalam Iriantara (2005) prinsip-prinsip dasar publisitas adalah sebagai berikut:

1. Kreativitas, yang berarti mendorong antusiasme dan perhatian khalayak melalui metode kegiatan yang cerdas, unik dan segar;
2. Beragam, yang berarti bila publisitas hanya menggunakan satu media saja dipandang belum memadai, maka harus dipergunakan berbagai media;
3. Kuantitas, pada dasarnya dipergunakan prinsip repetisi untuk menyampaikan pesan secara berulang-ulang pada publik;
4. Visibilitas, yang berarti materi tersebut dapat dengan mudah dilihat oleh khalayak atau perhatian khalayak bisa tertuju pada publisitas itu;
5. Legibilitas, yang berarti bentuk tulisan yang dibuat menyampaikan pesan enak dan cukup jelas diikuti oleh khalayak untuk publisitas dalam bentuk cetak dan jelas didengar dan dilihat untuk media audio visual;
6. Mudah dipahami, yang berarti rangkaian pesannya sangat mudah dipahami maksudnya oleh khalayak (Iriantara 2005: 195).

Berkaitan dengan prinsip kreativitas, visibilitas, dan legibilitas, maka organisasi militer perlu mencari serta menemukan teknik-teknik sederhana dalam mengemas dan menyebarkan informasi seputar identitas diri, serta aktivitas dan kebijakan militer kepada masyarakat. Masyarakat cerdas dan kritis, pada dasarnya tidak senang diintimidasi dan diberondong dengan pesan yang bersifat instruktif, apalagi koersif.



Kini teknik “*story telling*” banyak digunakan oleh para pimpinan organisasi dalam upaya mengedukasi dan mempersuasi khalayak internal maupun eksternal agar memberikan dukungannya. Demikian halnya dengan pimpinan organisasi militer, dapat mengadopsi teknik “*story telling*” ini secara berkelanjutan untuk mengonstruksi pemahaman, pengertian, dukungan dan kerjasama dari para *stakeholder*.

### **Citra dan Pencitraan**

Citra (*image*) menurut Robberts (1997) adalah “*representing the totality of all information about the word any individual has processed, organised, and stored*” (menunjukkan keseluruhan informasi tentang dunia ini yang telah diolah, diorganisasikan, dan disimpan individu) (Rakmat, 1994: 223).

Keinginan sebuah organisasi untuk mempunyai citra positif yang baik merupakan tujuan utama dari berbagai strategi komunikasi perusahaan atau *public relations* yang dijalkannya. Ketepatan terbentuknya citra lembaga atau organisasi sesuai dengan tujuan, berkaitan dengan kinerja seluruh elemen lembaga atau organisasi. Strategi komunikasi organisasi yang efektif, tidak hanya dapat mengandalkan penyebaran informasi atau berbagai jenis publisitas di media, namun harus dilandasi kinerja yang optimal sebagai ekspresi nyata dari kualitas produk lembaga atau organisasi.

Citra dapat terbentuk dengan memproses informasi, tetapi proses dari informasi tersebut tidak menutup kemungkinan perubahan citra terhadap suatu obyek dari penerimaan informasi setiap waktu. Besarnya kepercayaan obyek terhadap sumber informasi memberikan dasar penerimaan dan penolakan informasi, informasi ini berasal dari perusahaan langsung atau dari pihak-pihak lain secara tidak langsung.

Pencitraan adalah proses pembentukan citra. Pembentukan citra yang positif oleh organisasi pada *stakeholders* merupakan hal yang harus secara *continue* diupayakan, karena citra dapat membangun kepercayaan dan dukungan bagi organisasi. Terbentuknya kepercayaan publik terhadap organisasi dapat meningkatkan profibilitas dan eksistensi organisasi. Tujuan dari pembentukan citra ini adalah untuk menghindari kesalahpahaman, mengevaluasi kebijaksanaan, dan meningkatkan daya tarik khalayak atau publik.

Proses terbentuknya citra menurut Hawkins et All dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 3.2. Proses Terbentuknya citra**

Sumber: Sutisna, 2001

### *Story Telling*

Bercerita atau *story telling* memiliki kekuatan luar biasa untuk membangun pengertian, pendidikan dan dukungan dari masyarakat bagi militer. Cerita secara alamiah merupakan suatu bentuk komunikasi publik. Bercerita adalah cara menyampaikan pelajaran dari generasi ke generasi, kultur ke kultur. Cerita-cerita tidak dimaksudkan untuk disimpan sendiri, tetapi dimaksudkan untuk diceritakan kembali. Cerita hadir di seluruh organisasi. Cerita, merupakan sebuah bagian integral dalam upaya mendefinisikan arti organisasi, serta arti bekerja untuk organisasi tersebut. Strategi pencitraan saat ini dibutuhkan seorang penutur cerita organisasi militer yang kreatif untuk menceritakan berbagai kisah tokoh-tokoh militer: “kisah untuk membuat orang berani dan bijaksana”, “kisah mengenai nilai-nilai dasar”, serta “kisah untuk menginspirasi inovasi”. Setiap kisah dikemas dalam bentuk artikel, film atau publisitas di media massa atau ditayangkan dan dituturkan pada berbagai *event* yang strategis di masyarakat.

Selain untuk membangun pencitraan, *story telling* atau cerita memiliki kekuatan untuk mengajarkan, memobilisasi, dan memotivasi. Cerita mengantarkan manusia pada kesuksesan. Cerita mengisahkan bahwa seseorang dapat mewujudkan sesuatu. Cerita menciptakan tokoh panutan organisasi yang dapat dirasakan keterkaitannya pada diri setiap orang. Cerita juga meletakkan perilaku dalam konteks nyata. Cerita membuat standar menjadi lebih dari sekedar aneka statistik, melainkan membuat standar menjadi hidup. Dengan menceritakan sebuah kisah secara detil, para pemimpin mengilustrasikan hal yang perlu dilakukan setiap orang untuk mengikuti standar organisasi. Dengan mempublikasikan sebuah cerita di dalam *in-house magazine*, mengadakan resepsi untuk mempersembahkan penghargaan, atau membuat video dan menyiarkannya dalam jaringan televisi internal organisasi militer,

menunjukkan bahwa pemimpin memusatkan perhatiannya kepada seseorang yang telah menjalankan apa yang menjadi nilai organisasi dan memberikan keteladanan yang dapat dijadikan panutan oleh anggota lain dalam organisasi. Tindakan-tindakan tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa semua orang melihat bagaimana upaya untuk menjangkau pekerjaan ekstra, melakukan lebih dari yang diharapkan, akan diapresiasi dan dihargai.

Informasi benar-benar diingat dengan lebih cepat dan akurat jika pada awalnya dipresentasikan dalam bentuk contoh atau cerita. Bercerita memberikan kerangka kerja bagi usaha berbagi informasi, arti, dan pengetahuan. Para peneliti telah menemukan bahwa ketika buku-buku teks sejarah Amerika diterjemahkan ke dalam gaya cerita ala Time dan Newsweek, para siswa mampu mengingat kembali informasi yang tertera hingga tiga kali lebih cepat dibandingkan ketika mereka membaca teks buku pada umumnya. Bercerita lebih menarik dibandingkan memberikan peraturan, bimbingan, dan kebijakan. Bercerita merupakan sebuah contoh aktual yang dapat diingat orang secara lebih baik. Bercerita dapat dikaitkan kepada orang dan nama-nama serta kejadian-kejadian yang jauh lebih relevan. Menceritakan sebuah kisah amat membantu dalam memberikan inspirasi bagi tiap individu yang sedang menghadapi situasi penuh tantangan. Sebuah cerita tidak hanya lebih mudah diingat dan diceritakan kembali dibandingkan sekelompok fakta, namun juga dapat diterjemahkan lebih cepat ke dalam tindakan. Dalam membahas risetnya, Klein mengatakan, "metode paling kuat yang kami temukan agar orang dapat dengan mudah memahami pengetahuan adalah dengan menggunakan cerita". Klein percaya bahwa bercerita adalah keahlian yang penting untuk meneruskan pelajaran yang didapatkan dari situasi yang amat kompleks dan penuh tantangan (Posner, 2002: 379).

### **Pengelolaan Komunikasi Eksternal dan Internal Organisasi Militer**

Organisasi militer pada umumnya memiliki kepemimpinan yang kuat, khas, dan menonjol dibandingkan organisasi lainnya di Indonesia. Kepemimpinan yang kuat dalam suatu organisasi, tidak dibangun dalam sekejap tetapi melalui berbagai mekanisme dan pola komunikasi organisasi yang dirancang sedemikian rupa oleh para pendirinya. Setiap organisasi bertanggung jawab untuk mengembangkan suatu perilaku organisasi yang mencerminkan kejujuran, etika yang dikomunikasikan

secara tertulis, dan dapat dijadikan pegangan oleh seluruh anggota atau korpsnya. Budaya tersebut tentunya memiliki akar dan memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi dasar bagi etika pengelolaan suatu organisasi, yaitu: profesionalisme, kerjasama, keserasian, keselarasan, keseimbangan, dan kesejahteraan. Implementasi nilai-nilai yang terdapat dalam budaya organisasi tersebut dalam suatu organisasi sangat erat hubungannya dengan kemauan manajemen untuk membangun etika perilaku dan budaya organisasi yang anti kecurangan, sehingga dapat mengurangi atau menghindari terjadinya 3 kecurangan pokok, seperti: kecurangan dalam laporan keuangan, kecurangan penggelapan aset, dan kecurangan tindak pidana korupsi.

Organisasi yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kecerdasan dan keterampilan yang tinggi (*smart*), senantiasa terdorong untuk melakukan berbagai upaya yang optimal untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Pemimpin organisasi yang efektif adalah pemimpin yang membangun pola dan strategi komunikasi organisasinya secara efektif. Targetnya adalah membangun dukungan dari seluruh *stakeholders*, sampai pada suatu titik dimana organisasi berubah menjadi sangat efektif.

Pengelolaan komunikasi organisasi yang efektif dipadu dengan gaya kepemimpinan yang efektif pula di kalangan militer, tentunya akan melahirkan peningkatan produktivitas dan kemapanan organisasi militer, meskipun terjadi berbagai perubahan situasi dan kondisi akibat belum mapannya sistem politik dan pemerintahan.

Khusus pada kasus organisasi militer, perlu disadari bahwa stabilitas meskipun penting, kadang-kadang dapat menjadi perangkap (paradoks) sehingga organisasi perlu melakukan loncatan-loncatan khususnya dalam hal gaya komunikasi organisasi baik secara internal maupun eksternal. Loncatan atau terobosan itu untuk menjembatani kekakuan mekanisme kerja di lingkungan organisasi militer.

Instansi militer mempunyai jaringan kerja jasa informasi umum yang luas. Fungsi utamanya adalah (1) menyediakan informasi mengenai kebijakan dan operasi militer; (2) menarik minat untuk menjadi militer; (3) mempertahankan hubungan baik antara instalasi militer dengan masyarakat lingkungan mereka; dan (4) menyebarkan berita mengenai orang-orang tertentu dari instansi bersangkutan.

Kinerja serta pengelolaan komunikasi organisasi militer tersebut dapat terlaksana dengan lebih optimal jika didukung oleh berbagai jenis dan taktik persuasi dan edukasi, yang lebih luwes atau fleksibel. Terutama di tengah karakter masyarakat yang telah semakin kritis dalam menyikapi berbagai pesan dari kalangan pemerintahan termasuk dari kalangan militer. Masyarakat kini tidak lagi “pasrah” atau “*nrimo*”, tetapi kini sadar akan “hak untuk berbicara” serta untuk mendapat informasi yang jujur dan akurat. Alasan tersebut membuat berbagai pesan komunikasi eksternal maupun internal, antara lain dapat dikemas dengan menggunakan strategi publisitas.

### **Pencitraan Militer Melalui Publistas**

Citra negatif militer sering disebabkan karena pimpinan mengabaikan pentingnya komunikasi eksternal untuk membangun pencitraan di masyarakat. Proyeksi kebutuhan bangsa di masa depan diasumsikan seakan dapat memberikan identitas baru dan citra yang lebih baik bagi organisasi militer. Pengalaman masa lalu sangat berarti bagi organisasi, dan perilaku individu ditentukan oleh masa lalunya dari pada oleh apa yang ada dihadapannya. Dengan mempelajari masa lalu, maka dapat dimengerti hal-hal yang kurang baik dan dapat melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan, sehingga tidak sampai terulang lagi di masa yang akan datang.

Pesan tentang peran militer sebagai pahlawan penyelamat bangsa di masa lalu, kini dan yang akan datang hendaknya dikemas dengan publisitas yang *apik* melalui berbagai media komunikasi di tengah masyarakat, sehingga citra militer tetap disegani karena kewibawaan dan kepahlawanannya. Beberapa pengamatan menunjukkan secara konsisten bahwa dukungan sosial semacam ini terhadap suatu organisasi dapat meningkatkan produktivitas, kesehatan psikologis, dan kesehatan fisik bagi para anggotanya.

Sebagai contoh, Suara Amerika, didirikan oleh *Departement of State* pada tahun 1942, membawa berita mengenai perang ke segala penjuru dunia. Industri film memberikan dukungannya melalui saran seperti film dokumenter buatan Frank Capra untuk U.S. Signal Corps, yang dirancang untuk membentuk patriotisme, tur penjualan surat obligasi perang oleh para bintang film, dan produksi film-film komersial yang mengagungkan angkatan perang Amerika (Willcox et al, 2006: 44).

Contoh lainnya, Korps Marinir dan Angkatan Laut AS memperoleh publisitas dan tanggapan baik melalui pertunjukkan yang dilakukan oleh tim penerbang indah Blue Angels pada berbagai acara pertunjukan negara di seluruh negeri. Misi dan tujuan Blue Angels dijelaskan pihak Angkatan Laut, pada tahun 1987 sebagai berikut: “dengan menyajikan pertunjukkan tanpa kesalahan penuh rangkaian gaya seni di depan mata penonton sejumlah lebih dari 201 juta orang, Blue Angels berusaha menarik perhatian pemuda berbakat dan berkemampuan untuk bergabung dengan Korps Marinir dan Angkatan Laut AS “sebagai duta besar penggerak rasa simpati”, Blue Angels memamerkan pesawat Angkatan Lautnya kepada *public* sebagai sarana untuk menunjukkan kualitas *personal* dan peralatan yang memperkaya Angkatan Laut AS.

Pada *event* tersebut, penerbang-penerbang Blue Angels menciptakan simpati masyarakat dengan mengunjungi rumah sakit dan organisasi-organisasi pemuda dan berbicara di hadapan klub-klub masyarakat. Mereka juga menghadiri acara-acara khusus yang diselenggarakan oleh perekrut A.L. setempat dan mewawancarai nama-nama calon. Penerbang diatur untuk mendapat kesempatan diwawancarai oleh media massa. Liputan luas dihasilkan dengan menawarkan kesempatan terbang bagi para wartawan sehingga mereka dapat menjelaskan pengalaman mereka terbang dengan kecepatan 1000 kilometer per jam di sebuah pesawat jet tempur.

Usaha besar-besaran ini telah membawa dampak luar biasa bagi terbentunya citra positif militer di Amerika. Konsultan *public relations* memberikan nasihat yang luar biasa dalam melakukan publisitas dengan mendemonstrasikan keberhasilan teknik yang tidak setengah-setengah. Usaha ini juga membangkitkan kesadaran rakyat Amerika terhadap kekuatan pendekatan persuasif, yang dibarengi dengan analisis pasca perang oleh perangkat propaganda dan publisitas militer.

Beberapa contoh tersebut membuktikan bahwa citra militer perlu dibangun dan dikelola secara serius, agar pada gilirannya militer mendapat dukungan dari para *stakeholder*.

### **Kekuatan *Story Telling* dalam Strategi Publisitas sebagai Pencitraan Militer**

Organisasi yang efektif seharusnya tidak menghindari perubahan, sebaliknya, mereka harus mengantisipasi dan menyesuaikan kegiatan operasional sehari-hari dalam upaya untuk menyelaraskan dengan

perubahan yang sangat cepat. Menurut Larry E Griner (1998), dalam perkembangan organisasi ada sejumlah fase yang akan dilalui oleh organisasi, setiap fase didahului evolusi dan diakhiri oleh suatu revolusi. Perubahan paradigma organisasi militer juga merupakan suatu keniscayaan. Pada abad ke-20 organisasi cenderung stabil, dapat diprediksi, kepemimpinan bersifat *top down*, birokrasi kaku, dikontrol dengan aturan dan jenjang, reaktif dan tidak mau menanggung resiko serta informasi terbatas dan tertutup. Pada abad ke-21 ini paradigma bergeser menjadi berorientasi pada kecepatan dan kemampuan merespon, organisasi permanen yang fleksibel, dikontrol dengan visi dan misi, kreatif dan intuitif, toleran serta informasi transparan dan terbagi.

Perubahan dalam hal transparansi dan berbagi informasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik bercerita atau *story telling*, yang melalui berbagai penelitian telah terbukti memiliki kekuatan dalam mengedukasi, memotivasi dan mengubah sikap, termasuk mengubah citra militer di masyarakat. Strategi pencitraan militer dapat dilakukan melalui kekuatan bercerita atau *the power of story telling*.

Kekuatan *story telling* akan semakin meningkat apabila dibarengi dengan berbagai prinsip dan teknik publisitas lainnya, yakni menetapkan tujuan, menetapkan skala prioritas, dan menetapkan khalayak sasaran strategisnya secara akurat.

## **Simpulan**

Pengelolaan komunikasi organisasi yang efektif dipadu dengan gaya kepemimpinan yang efektif pula di kalangan militer, tentunya akan melahirkan peningkatan produktivitas dan kemapanaan organisasi militer, meskipun terjadi berbagai perubahan situasi dan kondisi akibat belum mapannya sistem politik dan pemerintahan. Kinerja serta pengelolaan komunikasi organisasi militer tersebut dapat terlaksana dengan lebih optimal jika didukung oleh berbagai jenis dan taktik persuasi dan edukasi, yang lebih luwes atau fleksibel. Berbagai pesan komunikasi eksternal maupun internal, antara lain dapat dikemas dengan menggunakan strategi publisitas.

Pesan tentang peran militer sebagai pahlawan penyelamat bangsa di masa lalu, kini dan yang akan datang hendaknya dikemas dengan publisitas yang *apik* melalui berbagai media komunikasi di tengah

masyarakat, sehingga citra militer tetap disegani karena kewibawaan dan kepahlawanannya. Beberapa pengamatan menunjukkan secara konsisten bahwa dukungan sosial semacam ini terhadap suatu organisasi dapat meningkatkan produktivitas, kesehatan psikologis, dan kesehatan fisik bagi para anggotanya.

Perubahan dalam hal transparansi dan berbagi informasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik bercerita atau *story telling*, yang melalui berbagai penelitian telah terbukti memiliki kekuatan dalam mengedukasi, memotivasi dan mengubah sikap, termasuk mengubah citra militer di masyarakat. Dengan demikian strategi pencitraan militer dapat dilakukan melalui kekuatan bercerita atau *the power of story telling*.

### **Daftar Pustaka**

- L. Wilcox, Dennis; Phillip H. Ault dan Warren K Agee, 2006, *Public Relations Strategi dan Taktik Jilid I, Alih Bahasa: Rosa Kristiawati*, Jakarta: Interaksara.
- Pace.R.Wayne dan Faules. F, 1998, *Komunikasi Organisasional, Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*, Terjemahan Deddy Mulyana, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Posner, Kouzes, 2004, *The Leadership Challenge*, Alih bahasa Revyani Sjahrial, Jakarta: Erlangga.
- Rakhmat, Jalaluddin, 1999, *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Robbins, Stephen P, 2000, *Perilaku Organisasi*, Jilid 2 (terj). Edisi 9, Jakarta: Indeks PT.Gramedia.
- Ruslan, Rosadi, 2010, *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sutisna, 2001, *Perilaku Konsumen dan Konsumen Pemasaran*, Bandung: PT. Remajan Rosdakarya.



# **PENGEMBANGAN KOMUNIKASI PERSUASIF TNI DALAM SISTEM PERTAHANAN SEMESTA**

**Ike Junita Triwardhani**

## **Pendahuluan**

Guna mempertahankan kedaulatan wilayahnya, Indonesia mengembangkan sistem pertahanan semesta, di mana Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi kekuatan utama, dan rakyat menjadi kekuatan pendukung (UUD 1945 Pasal 30: 2, amandemen kedua tahun 2000).

Sistem pertahanan semesta bersifat melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.

Ada tiga sifat dalam sistem pertahanan semesta yaitu kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Sifat kerakyatan berarti adanya keikutseertaan seluruh warga negara sesuai dengan kemampuan dan keahlian dalam sistem pertahanan negara. Sifat kesemestaan artinya seluruh daya bangsa dan negara mampu memobilisasi sumber daya yang dipunyai. Sifat kewilayahan artinya seluruh wilayah negara merupakan tumpuan perlawanan agar dapat didayagunakan untuk mendukung setiap bentuk perlawanan secara berlanjut. Sebagai negara kepulauan dengan luas terbesar di dunia dan adanya jumlah penduduk kelima terbesar di dunia, sistem pertahanan yang bersifat kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan menjadi keharusan bagi Indonesia dalam melindungi keutuhan wilayahnya.

Salah satu upaya TNI dalam melaksanakan sistem pertahanan semesta adalah dengan melaksanakan konsep teritorial, artinya konsep pertahanan dan keamanan berdasarkan kewilayahan tertentu. Pada masa lalu, konsep teritorial ini dijalankan dengan paradigma “pengawasan”, yaitu menggunakan instrumen yang mengawasi dan memetakan berbagai kelompok-kelompok masyarakat, khususnya yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Di masa reformasi, fungsi teritorial TNI sudah berubah menjadi *center of gravity*, kekuatan pertahanan, sekaligus merupakan fungsi untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menyatakan, ada lima konsep teritorial TNI pada masa reformasi ini, yaitu (1) soliditas dan sinergitas fungsi dan tugas pembinaan teritorial oleh TNI Angkatan Darat, pembinaan potensi maritim oleh TNI AL serta pembinaan potensi dirgantara oleh TNI AU; (2) penyesuaian TNI terhadap pergeseran pemikiran tentang teritorial di era reformasi; (3) pengembangan sistem dan metode pembinaan teritorial TNI dihadapkan kepada perkembangan bidang-bidang kehidupan masyarakat; (4) sinergitas dan integrasi dari aspek anggaran dihadapkan kepada perkembangan sistem politik, pemerintahan, dan otonomi daerah; (5) penentuan sasaran Binter TNI secara tepat sesuai kebutuhan daerah dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat (*Investor Daily Indonesia*, 2012).

Tuntutan demokrasi di masa reformasi ini, konsep teritorial TNI perlu dikembangkan dengan melibatkan masyarakat dalam upaya pertahanan dan keamanan sedini mungkin. Di sini, paradigma yang berorientasi pada upaya preventif (pencegahan) perlu dikedepankan daripada paradigma yang bersifat represif (penanggulangan). Dalam paradigma preventif tersebut, partisipasi masyarakat menjadi penting, karena ini menjadi dukungan dari efektivitas upaya pertahanan dan keamanan yang dilaksanakan. TNI sebagai inti atau “*center of gravity*” perlu melakukan upaya untuk mengambil hati dan membangun rasa memiliki (*sense of belonging*) dari masyarakat, untuk kemudian bersama-sama menjadi elemen penting dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Dalam kerangka partisipasi tersebut, komunikasi memegang peran penting. Lewat komunikasi, kepercayaan masyarakat bisa diraih. Modal kepercayaan ini yang akan menjamin keterlibatan aktif masyarakat dalam

upaya pertahanan dan keamanan nasional. Keterlibatan yang didasarkan pada kesadaran dan bukan karena paksaan atau ketakutan. Kesadaran ini adalah kesadaran bahwa masyarakat menjadi elemen penting dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dengan kesadaran ini, maka masyarakat akan mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dalam menghadapi ancaman yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Peran Komunikasi dalam Konsep Teritorial TNI untuk Sistem Pertahanan Semesta**

Pembinaan teritorial bagi TNI Angkatan Darat adalah upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan secara bersama dengan aparat terkait dan komponen bangsa lainnya untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan kekuatan pertahanan matra darat yang meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya. Pembinaan teritorial ini sekaligus upaya untuk mewujudkan kemandirian TNI-AD dan Rakyat, sesuai kewenangan dalam rangka tercapainya tugas pokok TNI Angkatan Darat (Kepala Staf TNI Angkatan Darat, 2002).

Aparat teritorial TNI yang menjadi ujung tombak di lapangan adalah Bintara Teritorial (Binter). Binter diharapkan berperan dalam pemberdayaan wilayah pertahanan di darat dan mewujudkan kemandirian TNI dan rakyat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat dalam sistem pertahanan negara. Penugasan Binter ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu menyiapkan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini dalam rangka memenangkan peperangan, membantu mengatasi kesulitan masyarakat, serta mendukung tercapainya tugas pokok TNI Angkatan Darat (Kepala Staf TNI Angkatan Darat, 2002).

Dalam menjalankan tugasnya, Binter perlu mempunyai lima kemampuan teknis, yaitu kemampuan mendapatkan informasi dan melaporkan dengan cepat, kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, kemampuan mendata geografi, demografi dan kondisi sosial terkait pertahanan negara, kemampuan meningkatkan kesadaran bela negara masyarakat sekitar, dan kemampuan penguasaan medan sekitar. Kemampuan ini terus diasah dengan berbagai metode pembinaan, yaitu metode komunikasi sosial melalui kegiatan penyampaian pikiran dan pandangan aparat TNI Angkatan Darat dalam

forum-forum masyarakat, metode bakti TNI melalui kegiatan bantuan pada permasalahan masyarakat dan metode pembinaan perlawanan wilayah (binwanwil) melalui kegiatan pelatihan teknis pertahanan wilayah kepada masyarakat (Kepala Staf TNI Angkatan Darat, 2003).

Tugas binter yang berhadapan langsung dengan masyarakat salah satunya dalam bentuk Bintara Pembina Desa (Babinsa). Babinsa ini merupakan unit terkecil dari struktur komando kewilayahan TNI Angkatan Darat, mulai dari Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Resort Militer (Korem), Komando Distrik Militer (Kodim), dan Komando Rayon Militer (Koramil). Babinsa adalah anggota koramil yang ditugaskan sebagai pembina desa dengan tanggung jawab sebagai pengumpul informasi di wilayah pedesaan.

Babinsa merupakan unsur terdepan TNI Angkatan Darat yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Seorang Babinsa perlu mempunyai pengetahuan dasar geografi, demografi, dan kondisi sosial yang dibutuhkan sebagai seorang pembina desa. Dengan pengetahuan yang dimilikinya, diharapkan Babinsa dapat membangun hubungan yang baik dengan masyarakat setempat.

### **Pembinaan Potensi Maritim TNI Angkatan Laut**

Pembinaan potensi maritim merupakan konsep teritorial TNI Angkatan Laut dalam menjalankan sistem pertahanan semesta. Melalui pemberdayaan potensi maritim nasional TNI Angkatan Laut harus menjadi kekuatan inti yang mampu mengelola kekuatan komponen pendukung dan komponen cadangan. Dengan konsep ini, maka TNI Angkatan Laut berperan untuk membantu pemerintah dalam memberdayakan masyarakat maritim sebagai kekuatan pendukung pertahanan negara di laut. Diharapkan, pemberdayaan ini dapat menyinergikan peran instansi maritim dalam membina sumber daya manusia, alam, dan budaya, sarana dan prasarana, nilai-nilai, ilmu pengetahuan, dan teknologi (Markas Besar Angkatan Laut, Dinas Pembinaan Potensi Maritim, 2008).

Ada beberapa azas dalam pemberdayaan wilayah laut, yaitu asas semesta, kesatuan komando, manfaat, terus-menerus, prioritas, keterpaduan, tanggap, dan kewenangan dan tanggung jawab. Asas semesta berarti persiapan pertahanan harus dilaksanakan dengan melibatkan semua sumber daya nasional yang ada di wilayah masing-

masing komando wilayah. Asas kesatuan komando berarti pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan laut harus berada pada satu komando sehingga mencapai sasarannya. Asas manfaat berarti penyelenggaraan pemberdayaan wilayah pertahanan laut harus memberikan manfaat untuk kepentingan rakyat dan TNI. Asas terus-menerus berarti penyelenggaraan pemberdayaan wilayah pertahanan laut harus dilaksanakan terus-menerus untuk menjaga kesinambungan penyiapan pertahanan negara dan pertahanan yang dilakukan oleh TNI. Asas prioritas berarti penyelenggaraan pemberdayaan wilayah pertahanan laut harus dilihat dari keterbatasan anggaran, sarana, dan prasarana yang ada pada negara dan di TNI sehingga dapat ditentukan prioritasnya. Asas keterpaduan berarti penyelenggaraan pemberdayaan wilayah pertahanan laut dilaksanakan secara terpadu dengan mengikutsertakan semua unsur organisasi yang mendukung kebutuhan kekuatan komponen utama. Asas tanggap berarti penyelenggaraan pemberdayaan wilayah pertahanan laut harus memiliki ketanggapsegeraan terhadap perkembangan lingkungan strategis untuk kepentingan pertahanan negara secara menyeluruh. Asas kewenangan dan tanggung jawab, penyelenggaraan pemberdayaan wilayah pertahanan laut harus memberikan kewenangan dan tanggungjawab yang jelas sesuai dengan bidang masing-masing, sehingga dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku (Markas Besar Angkatan Laut, Dinas Pembinaan Potensi Maritim, 2008).

Beberapa metode dalam pemberdayaan wilayah pertahanan laut sangat menentukan hasil kegiatan, meliputi: (1) Operasi Bakti TNI, seperti Operasi Bakti Surya Bhaskara Jaya, Bakti Sosial Kesehatan atau Pengobatan Masal, Mobile Market, dan Pembinaan Desa Pesisir (Bindesir) dan pemberdayaan masyarakatnya melalui pemberian bahan kontak; (2) Penyuluhan antara lain adalah penyuluhan pendidikan pendahuluan bela negara, penyuluhan cinta tanah air, penyuluhan cinta bahari, penyuluhan kesehatan, penyuluhan hukum, penyuluhan ketrampilan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa pesisir; (3) pendidikan dan pelatihan antara lain pembudidayaan mutiara, pembudidayaan rumput laut, pembudidayaan perikanan air laut dan payau, dan pelestarian Lingkungan hidup (Markas Besar Angkatan Laut, Dinas Pembinaan Potensi Maritim, 2008).

Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksmana Achmad Sutjipto menyebutkan, dalam pandangan TNI-AL, ketahanan wilayah laut dan pesisir yang tangguh, dapat terwujud apabila kondisi kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa pesisir dan pulau-pulau terpencil meningkat. Karena itu, TNI-AL berupaya untuk ikut berpartisipasi aktif bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya, utamanya yang terkait erat dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah-masalah kelautan. Untuk itu, TNI-AL telah mengembangkan tiga konsep upaya yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan di lapangan, yaitu: (1) menumbuhkembangkan dan memasyarakatkan kembali jiwa dan semangat bahari bangsa khususnya di kalangan generasi muda sebagai basis pembentukan SDM kelautan; (2) mendorong peningkatan peran sektor swasta dan pemerintah dalam pendinamisasian pembangunan kelautan, melalui kegiatan penyelenggaraan program kelautan bagi masyarakat yang berlokasi di daerah pesisir antara lain dengan menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia perikanan dalam rangka meningkatkan kualitas mereka di bidang usaha perikanan laut; (3) menunjang program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan desa pesisir (Sutjipto, 2007: 7).

### **Pembinaan Potensi Dirgantara oleh TNI Angkatan Udara**

Pembinaan Potensi Dirgantara (Binpotdirga) merupakan upaya membina potensi di udara, oleh TNI Angkatan Udara pembinaan ini disosialisasikan kepada masyarakat luas untuk mengenalkan potensi-potensi wilayah udara nasional yang ada dan dimiliki NKRI. Kawasan dirgantara nasional dinilai memiliki keunggulan strategis, karena letaknya berada tepat di atas garis katulistiwa, yang dapat menjadi ruang hidup, sekaligus sebagai ruang gerak, media, dan sumber daya alam. Kawasan dirgantara suatu negara dapat diperuntukkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat serta pertahanan nasional (Pudiarto, 2012: 1).

Dalam pembinaan potensi dirgantara, TNI Angkatan Udara merupakan inti dan dapat melibatkan masyarakat sebagai komponen pendukung. Untuk lebih memberdayakan seluruh masyarakat Indonesia, ke depan diperlukan adanya struktur organisasi besar di tingkat nasional. Keterlibatan instansi TNI Angkatan Udara, pemerintah, dan rakyat sangat dibutuhkan guna membentuk suatu organisasi yang valid dan benar-benar efektif dalam pelaksanaan tugas (Pudiarto, 2012: 2).

Di lapangan, fungsi pembinaan potensi dirgantara ini dapat dilakukan oleh komando landasan udara (Lanud). Prajurit Lanud perlu memahami nilai penting dalam membangun potensi dirgantara. Pemahaman ini perlu disebarluaskan kepada masyarakat sekitar Lanud sebagai upaya pembinaan teritorial yang berciri khas matra udara, sehingga apabila suatu saat memerlukan mobilisasi massa dengan cepat dapat dibentuk.

### **Komunikasi Persuasif dalam Konsep Teritorial TNI**

Komunikasi persuasif berarti komunikasi yang menggunakan tanda-tanda dan bahasa sebagai hasil penyesuaian antara sumber dengan penerima komunikasi. Persuasi diartikan sebagai proses yang mengubah sikap, kepercayaan, opini, atau perilaku dari orang yang diajak berkomunikasi. Persuasi terjadi jika terjadi kerja sama antara sumber dan penerima. Komunikasi persuasif didasarkan pada prinsip-prinsip empati, keterbukaan, kesetaraan, dan saling menghargai.

Dalam konteks hubungan TNI dan masyarakat, dengan komunikasi persuasif TNI perlu memahami dan memperhatikan konteks masyarakat, dan begitu pula sebaliknya. Untuk meningkatkan keterlibatan dan kesadaran masyarakat ini, maka pendekatan komunikasi persuasif lebih perlu diutamakan oleh TNI daripada komunikasi instruksional (pendekatan komando) seperti yang banyak diterapkan dalam internal organisasi TNI.

Dalam komunikasi instruksional, standar-standar yang bersifat baku dan doktrinal sudah ditentukan, dan kemudian menjadi instruksi (perintah atau komando) yang harus dijalankan oleh setiap prajurit TNI. Pendekatan komunikasi instruksional memang cocok diterapkan untuk kondisi perang, karena adanya kejelasan sistem komando akan menjamin koordinasi yang solid dan cepat dalam menangkal adanya ancaman terhadap pertahanan dan keamanan. Dalam kondisi damai, komunikasi instruksional berpotensi untuk membuat jarak antara TNI dengan masyarakat.

Komunikasi yang bersifat persuasif, diharapkan TNI dapat lebih menyatu dengan masyarakat. Di sini, komunikasi yang dikembangkan bersifat lunak, empatik, dan lebih mengutamakan upaya untuk memahami masyarakat secara lebih dalam.



Ada tiga premis dalam komunikasi persuasif yaitu: proses, isi, dan kultural. Premis proses menyangkut motivasi yang meliputi aspek emosional dari sumber dan penerima. Premis isi menyangkut bagaimana informasi bisa menjadi alat bukti (*evidence*) untuk menjelaskan fakta dan bahan argumentasi komunikasi. Premis kultural menyangkut bagaimana konteks sosio-kultural dari sumber dan penerima komunikasi, meliputi tata nilai, kebiasaan, dan hubungan sosial di dalamnya (Larson, 1986).

Dalam beberapa penelitian kecil terungkap, bahwa komunikasi persuasif ini sudah diterapkan oleh aparat teritorial TNI di lapangan, namun masih bersifat personal. Hal ini terutama dilakukan oleh aparat TNI yang mempunyai kemampuan sosial yang baik. Latar belakang budaya bangsa Indonesia menjadikan orang Indonesia secara umum, termasuk aparat TNI, cenderung mengedepankan nilai persahabatan. Nilai-nilai persahabatan ini, misalnya, juga menjadi kunci keberhasilan operasi teritorial TNI di mancanegara di dalam pasukan perdamaian PBB. Pada operasi teritorial di beberapa wilayah lain di Indonesia, muncul kesan bahwa anggota TNI cukup mahir dalam bersosialisasi dengan warga setempat, antara lain melalui berbagai kegiatan sosial yang diselenggarakan bersama antara anggota TNI dan masyarakat setempat.

Diakui bahwa pendekatan komunikasi persuasif ini belum sepenuhnya bersifat institusional dan sistemik. Keberhasilan pendekatan persuasif masih banyak ditentukan oleh kapasitas personal dari anggota TNI. Beberapa cerita menyebutkan, bahwa banyak anggota TNI berhasil menyatu dengan masyarakat, bahkan menjadi tokoh masyarakat, karena dia adalah putra kelahiran daerah tersebut. Beberapa cerita lain menyebutkan, ada resistensi masyarakat terhadap TNI yang berada di wilayahnya, karena terciptanya jarak antara anggota TNI dan masyarakat dan munculnya kesan arogan pada aparat TNI yang bertugas.

Penulis menyajikan gagasan mengenai pengembangan komunikasi persuasif dalam konsep teritorial TNI. Merujuk pada teori Larson di atas, ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu: proses, isi, dan kultural. Aspek proses menyangkut bagaimana bagaimana aspek emosional aparat TNI dan masyarakat diangkat sebagai sumber motivasi, terutama kesadaran akan tanggung jawab akan pertahanan dan keamanan nasional sebagai kepentingan bersama. Aspek isi menyangkut bagaimana konsep teritorial TNI dalam sistem Pertahanan semesta, bagaimana masyarakat bisa terlibat sejak dini sebagai upaya preventif, dan bagaimana prosedur



keterlibatan masyarakat dalam sistem komando TNI jika terjadi kondisi bahaya dan represif. Aspek kultural menyangkut bagaimana aspek lokalitas dan sosio-kultural masyarakat menjadi pertimbangan dalam penerapan konsep teritorial TNI di lapangan.

### **Permasalahan Komunikasi Persuasif dalam Pelibatan Masyarakat untuk Penerapan Sistem Pertahanan Semesta**

Pada bagian ini, disajikan dua kasus lapangan bagaimana aparat TNI melibatkan masyarakat dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Kasus yang disajikan dipilih secara purposif yaitu satu kasus mewakili proses *top-down* dalam pembinaan teritorial di mana aparat teritorial ditugaskan untuk membina wilayah, dan kasus lainnya mewakili proses *bottom-up* di mana aparat TNI membina masyarakat terlebih dahulu untuk kemudian mendapatkan pengakuan secara institusional. Masing-masing kasus akan ditelaah komunikasi persuasif yang dilaksanakan baik aspek proses, isi, maupun kultural.

#### **Kasus 1: Bintara Teritorial sebagai Unsur Terdepan Desk Antiteror**

Kasus ini diambil dari penelitian Agus Eko Suryantoro (2010) terhadap peran Babinsa sebagai unsur terdepan desk antiteror di desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Di desa ini pernah terjadi sebuah ledakan bom di sebuah rumah dan ditengarai ini merupakan satu simpul dari rangkaian aksi terorisme di Indonesia. Fokus penelitian adalah bagaimana peran Babinsa dalam mencegah dan mengantisipasi indikasi aksi terorisme yang ada di wilayahnya.

Tugas Babinsa sebagai unsur terdepan desk antiteror di Desa Tanimulya adalah memberikan pencatatan, evaluasi, dan analisis cepat tentang segala informasi yang berkaitan dengan terorisme sehingga ancaman bisa diprediksi secara lebih tajam. Ada beberapa tanggung jawab Babinsa di sini, yaitu temu cepat dan lapor cepat, manajemen teritorial, pembinaan perlawanan masyarakat, penguasaan wilayah, pengenalan potensi, karakteristik, dan perkembangan gejala aksi terorisme di masyarakat, dan komunikasi sosial. Babinsa melakukan tugasnya dan memberikan informasi kepada instansi kepolisian untuk penanganan lebih lanjut.

Dalam pelaksanaan di lapangan, ternyata masih ditemukan indikasi kelemahan fungsi Babinsa sebagai unsur terdepan Desk

Antiteror. Kelemahan tersebut adalah keterlambatan memperoleh informasi, karena kurangnya koordinasi terhadap masyarakat akibat kurang terbinanya hubungan baik dengan elemen-elemen masyarakat akibat cara komunikasi yang kurang tepat terhadap tokoh masyarakat; keterlambatan dalam mendeteksi terorisme, karena kurangnya pengetahuan, dan keengganan masyarakat untuk melaporkan indikasi aksi terorisme, keraguan Babinsa dalam bertindak menanggulangi terorisme karena kurangnya dukungan substansi, dan prosedur lapangan, dan kurang sinergisnya koordinasi dalam mendeteksi penanggulangan terorisme, baik antara instansi TNI, instansi Kepolisian RI, dan masyarakat (Suryantoro, 2010: 55-56).

Ada banyak hal positif dari keberadaan Babinsa sebagai unsur terdepan Desk Antiteror di desa Tanimulya. Keberadaan Babinsa di tengah masyarakat dalam membantu menciptakan rasa aman dan kondusif masih dibutuhkan masyarakat. Babinsa secara personal relatif diterima baik oleh masyarakat karena terlibat aktif dalam kegiatan sosial, seperti kerja bakti, siskamling, atau pembersihan lingkungan pada hari minggu atau jumat bersih. Babinsa juga melakukan pembinaan organisasi dengan memberdayakan masyarakat usia produktif sebagai mitra dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif (Suryantoro, 2010: 57-59).

Terlihat komunikasi persuasif memegang peran penting bagi Babinsa sebagai unsur terdepan Desk Antiteror di Desa Tanimulya, baik yang sudah berhasil maupun belum. Dalam aspek proses, hal positif yang ditemukan adalah keterlibatan aktif Babinsa dalam aktivitas sosial masyarakat dan ini berperan dalam mendekatkan Babinsa dengan masyarakat, sedangkan hal negatif yang ditemukan adalah lemahnya prosedur komunikasi yang melibatkan instansi yang lebih luas dan lebih tinggi dari Babinsa. Dari aspek isi, lebih banyak aspek negatif yang ditemukan, misalnya masih belum tersampainya pemahaman terorisme kepada masyarakat dan masih lemah teknik berkomunikasi Babinsa dengan tokoh masyarakat. Dari aspek kultural, ada hal positif yang ditemukan, yaitu bahwa meskipun sudah menjadi aparat TNI, Babinsa tidak melupakan bahwa dirinya adalah anggota masyarakat juga, dan ini memudahkan dia untuk berbaur dengan lingkungan. Hal negatif dari aspek kultural adalah lemahnya koordinasi antar instansi saat harus bertindak cepat, antara lain karena masih kuatnya pengaruh ego personal dan kelompok.

## **Kasus 2: Bintara Pelestari Benih Padi**

Kasus kedua merupakan usaha pembudidayaan padi di lahan sekitar Mabes TNI AD di Cilangkap yang dilakukan oleh Sersan Kepala Sucipto (Kompas, 26 Maret 2012). Serka Sucipto sehari-hari bertugas di bagian dapur Satuan Pengamanan dan Pengawalan (Satpamwal) Detasemen Markas, Markas Besar TNI. Bintara “Makanan” ini mengembangkan varietas padi yang didapatkan dari kampung halamannya di Jawa Tengah pada lahan di sekitar Mabes TNI AD, dan menjadikannya padi yang unggul. Saat ini ada 19 kelompok tani yang memanfaatkan benih padi kreasi Serka Sucipto di lahan sawah mereka.

Diawali inisiatif pribadi, kegiatan pengembangan padi ini mendapatkan dukungan dari atasannya. Komandan menganggap bahwa apa yang dilakukan bintara ini bisa mendekatkan TNI dengan masyarakat. Kegiatan pertanian oleh aparat TNI ini juga dikaitkan dengan ketahanan nasional dari sektor pangan. Panglima TNI Laksmana Agus Suhartono ikut melakukan panen perdana di kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor.

Aspek proses komunikasi persuasif, usaha yang dilakukan oleh Serka Sucipto dalam mendekatkan ke masyarakat adalah melalui media pertanian. Karena masyarakat di sekitar mabes TNI mayoritas petani, maka komunikasi melalui benih padi unggul menjadi efektif. Padi kreasi Sucipto dinilai lebih kokoh, lebih tahan hama, dan lebih menghasilkan bulir padi lebih banyak dari padi kebanyakan. Padi kreasi Serka Sucipto menjadi media untuk mengkomunikasikan dirinya sebagai aparat TNI dengan masyarakat sekitar. Prestasinya dianggap banyak membantu petani setempat yang mendekatkan bintara dengan masyarakat.

Aspek isi komunikasi, bahwa Markas Besar TNI tempat pelaksanaan budidaya benih padi mampu mengaitkan prestasi pertanian aparatnya dengan isu pertahanan semesta. Pertanian dianggap bagian dari ketahanan pangan dan keterlibatan aparat TNI sekaligus sebagai upaya untuk mendekatkan TNI dengan masyarakat dalam hal ini petani. Meskipun bermula dari inisiatif, apa yang dilakukan Serka Sucipto tidak dianggap pelanggaran dan justru didukung secara prosedural.

Aspek kultural dari komunikasi persuasif yang terjadi terutama karena latar belakang Serka Sucipto yang berasal dari masyarakat Samin yang masih kuat memelihara tradisi pertanian. Di masyarakat ini, kehidupan bertani masih menjadi tradisi yang sakral dan menjadi simbol hubungan kehidupan antara manusia dengan alam. Aspek kultural ini

yang mendorong Serka Sucipto untuk meneruskan tradisi luhurnya di lingkungan yang baru.

## **Pengembangan Komunikasi Persuasif Militer dalam Sistem Pertahanan Semesta**

Bagian ini akan menyajikan beberapa prinsip yang bisa dikembangkan untuk komunikasi persuasif bagi aparat teritorial TNI dalam mendukung sistem pertahanan semesta. Prinsip ini dapat dikembangkan untuk kemudian diturunkan ke dalam pembekalan terhadap aparat teritorial TNI sebelum ditugaskan. Pembekalan ini bertujuan untuk mendapatkan penerimaan dan mencegah terjadinya resistensi dari masyarakat.

Pembekalan yang bersifat substantif bisa meliputi materi konsep pertahanan semesta, konsep teritorial TNI dan keanekaragaman sosio-kultural dalam masyarakat Indonesia. Pembekalan teknik bisa meliputi teknik untuk memahami nilai, perilaku, dan kebiasaan masyarakat setempat, teknik komunikasi empatik, dan teknik pelibatan masyarakat dalam kegiatan preventif untuk pertahanan dan keamanan. Pembekalan ini perlu bersifat berkelanjutan, antara lain melalui berbagai kegiatan penyegaran, agar aparat TNI bisa selalu *up to date* dalam mengembangkan kegiatan kemasyarakatannya.

Pembekalan yang bersifat taktis, pengembangan komunikasi ini juga perlu menyentuh level strategis. Artinya, perlu adanya sistem yang integratif bagaimana komunikasi persuasif diterapkan dan dikembangkan dalam skema pengambilan keputusan dalam organisasi TNI. Lebih dari sekadar teknik, pengembangan komunikasi persuasif bagi TNI perlu menyentuh aspek paradigma, substansi, dan metodologi.

Beberapa prinsip komunikasi persuasif yang dapat diterapkan dan dikembangkan oleh TNI dalam pelaksanaan konsep teritorial untuk sistem pertahanan semesta adalah:

### **1) Mendengar dan Mengamati untuk Memahami**

Tujuan paling awal saat aparat teritorial TNI diterjunkan ke masyarakat adalah bagaimana karakter masyarakat setempat dapat dipahami dengan baik. Pemahaman ini dapat diawali dengan aktivitas mendengar saat berkomunikasi. Artinya, saat melaksanakan percakapan dengan masyarakat, aparat TNI tidak boleh terlalu mendominasi, namun

lebih banyak mendengarkan. Di sini, meskipun dianggap mempunyai derajat lebih tinggi, aparat TNI harus bersikap setara dengan masyarakat. Sikap setara ini akan menjadikan masyarakat nyaman berkomunikasi dengan aparat TNI, dan dari sinilah informasi mengenai karakter masyarakat mulai dapat diketahui dan dipetakan.

Aparat TNI juga perlu mengamati kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat. Perlu ada teknik khusus agar pengamatan ini tidak dinilai berlebihan dan mencurigakan. Melalui aktivitas sosial, aparat TNI bisa berbaur dengan masyarakat, dan dari sinilah proses pengamatan ini bisa berlangsung.

Dengan mendengarkan dan mengamati, diharapkan tujuan pemahaman karakter masyarakat bisa tercapai. Semakin intensif aparat TNI mendengar dan mengamati, maka semakin efektif dan cepat tujuan ini tercapai. Ini merupakan langkah awal terpenting bagaimana TNI bisa dekat dengan masyarakat.

## **2) Empati**

Empati berarti merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dalam komunikasi, empati berarti turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang diajak berbicara. Empati merupakan tahap lanjut dari memahami. Empati ini sering dinyatakan dengan ungkapan “berdiri di atas sepatu orang yang diajak bicara”.

Aparat teritorial TNI perlu untuk mengembangkan empati dalam berkomunikasi dalam masyarakat. Informasi yang didapatkan dari mendengar dan mengamati akan memberikan kesimpulan yang keliru jika hanya dipersepsi dari kacamata egonya sendiri. Dengan empati, karakter masyarakat yang didapatkan adalah sesuai dengan pemahaman masyarakat itu sendiri. Lebih dari karakter yang bersifat permukaan, di sini aparat TNI bisa memahami cara berpikir dari masyarakat.

Empati adalah prasyarat untuk menghilangkan jarak antara TNI dan masyarakat. Hanya dengan empati, sikap saling curiga bisa dihapuskan. Kedekatan ini nantinya akan bermanfaat jika ada informasi penting tentang pertahanan harus diberikan kepada masyarakat. Atau suatu saat jika diperlukan, masyarakat sebagai komponen pendukung bisa langsung menyatu dengan TNI dalam suatu sistem pertahanan semesta.

### **3) Keterlibatan dan Interaksi**

Keterlibatan dan interaksi merupakan bentuk komunikasi persuasif yang bersifat tindakan. Dengan melibatkan diri dan berinteraksi sosial dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan, aparat TNI secara akan tetap dikenal dan mengenal masyarakat secara berkesinambungan. Ini adalah upaya untuk memelihara hubungan antara aparat TNI dan masyarakat. Hal ini menjadi perlu, karena pemahaman terhadap karakter masyarakat perlu terus di-*update*. Ini menjadi penting, karena karakter masyarakat tidaklah bersifat statis, tetapi dinamis, dan bergerak sepanjang waktu. Keterlibatan aparat TNI melalui interaksi sosial adalah untuk mengetahui perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

### **4) Keterpercayaan**

Kepercayaan adalah buah dari kedekatan hubungan antara TNI dari masyarakat. Kepercayaan tidak bisa diperoleh dari kegiatan yang bersifat instan, tetapi dari aktivitas yang terus menerus. Hubungan aparat TNI dan masyarakat tidak selalu berlangsung mulus dan selalu ada masalah. Lebih penting adalah bagaimana masalah ini bisa diselesaikan dan hubungan bisa diperbaiki. Dari sinilah keterpercayaan akan terbangun. Keterpercayaan merupakan prasyarat dari efektivitas komunikasi.

Kepercayaan antara aparat TNI dan masyarakat merupakan landasan kuat bagi efektivitas pelaksanaan sistem pertahanan semesta. Berbagai kebijakan strategis bisa dilaksanakan di lapangan, karena ketiadaan resistensi dari masyarakat dari suatu wilayah. Dengan landasan yang kuat, maka dapat dikembangkan program yang lebih strategis dan berskala luas yang melibatkan masyarakat dalam sistem pertahanan semesta.

### **5) Pelatihan Pertahanan untuk Masyarakat**

Pelatihan masyarakat untuk pertahanan negara sudah merupakan wilayah yang lebih strategis dari pelaksanaan sistem pertahanan semesta. Dalam pelatihan tentang pertahanan, komunikasi yang bersifat instruksional bisa lebih dominan, terutama untuk menyangkut hal-hal yang bersifat teknis dan taktis pertahanan semesta. Dalam pelatihan ini mekanisme seleksi terhadap elemen masyarakat sudah dijalankan. Mereka yang terpilih mengikuti telah mempunyai pengetahuan awal dan siap untuk menjadi elemen penting dalam sistem pertahanan semesta.

Komunikasi persuasif memegang peran penting dalam menyiapkan pelatihan. Dengan komunikasi persuasif, masyarakat akan merasa siap dan menjadi bagian dalam sistem pertahanan semesta bersama TNI sebagai inti. Kesiapan masyarakat ini menjadi kunci efektivitas komunikasi dalam pelaksanaan pelatihan ini.

## **6) Sistem Strategi Keterlibatan Masyarakat**

Selain hal-hal yang bersifat taktis, pengembangan komunikasi persuasif perlu mendapatkan ruang pada kebijakan TNI yang bersifat strategis. Artinya, dalam konsep teritorial TNI, perlu dibangun sistem tentang bagaimana komunikasi efektif kepada masyarakat. Artinya komunikasi persuasif bukan sekadar menjadi domain bagi aparat TNI yang ditugaskan di lapangan, tetapi juga dalam pengambilan keputusan strategis.

Diperlukan riset komunikasi yang bertujuan untuk membangun dan memperbaiki sistem secara berkesinambungan. Riset ini bertujuan memberikan masukan substantif mengenai efektivitas pelaksanaan komunikasi dalam penerapan konsep teritorial di lapangan. Dengan adanya riset, sistem ini akan senantiasa mampu memperbaiki dan menyempurnakan dirinya sendiri, sehingga menjadi berkesinambungan.

Selain itu riset komunikasi ini juga berperan dalam membangun paradigma yang kokoh bagi TNI dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Paradigma ini akan memandu bagaimana komunikasi bisa berlangsung secara efektif. Dalam banyak kasus ditemukan bahwa meskipun masih secara personal dan tidak sistematis, personal-personal TNI telah berhasil mengembangkan komunikasi persuasifnya kepada masyarakat secara efektif. Bila ini bisa digali secara serius, maka paradigma komunikasi persuasif TNI ini akan kokoh dan berakar, karena digali dari "prestasi-prestasi kecil" yang ada di dalam organisasi TNI itu sendiri.

## **Simpulan**

Paparan di atas dapat disimpulkan, bahwa komunikasi persuasif diperlukan oleh TNI saat melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti dalam kegiatan teritorial. Komunikasi persuasif ini perlu untuk menjadikan TNI dekat dengan masyarakat. Kedekatan ini akan sulit terbangun jika hanya mengandalkan komunikasi instruksional

seperti umumnya dilakukan dalam skema komando TNI.

Dalam banyak kasus, ditemukan bahwa penerapan komunikasi oleh aparat TNI di lapangan belum berlangsung secara efektif. Permasalahan komunikasi ini sering berakibat pada miskoordinasinya tindakan pertahanan semesta oleh TNI yang harus melibatkan masyarakat atau instansi lain. Di sini, pembekalan tentang hakikat dan prosedur komunikasi persuasif menjadi perlu bagi aparat TNI yang bertugas di lapangan terutama saat harus melibatkan masyarakat.

Banyak ditemukan aparat TNI yang berhasil mengembangkan komunikasi persuasif secara efektif saat bersama masyarakat. Hal ini terutama didorong oleh latar belakang budaya aparat tersebut dan adanya kesadaran bahwa dia adalah bagian dari masyarakat. Hal ini masih lebih bersifat personal dan kurang institusional. Perlu dukungan sistemis dan prosedural agar “prestasi-prestasi kecil” ini bisa diperluas pengaruhnya ke dalam organisasi TNI.

Upaya komunikasi persuasif ini tetap diletakkan dalam sistem komando yang melekat dalam karakter militer. Perlu disadari, bahwa dalam upaya pertahanan dan keamanan nasional TNI merupakan inti, dan partisipasi masyarakat ini bersifat mendukung dan tidak bersifat kontra-produktif. Perlu ada sistem komando yang menyatakan kapan kondisi damai dan kapan kondisi ada ancaman bahaya (perang). Dalam kondisi damai, maka upaya preventif lebih dikedepankan, dan komunikasi persuasif menjadi lebih diutamakan. Sebaiknya dalam kondisi perang, di mana upaya represif menjadi mendesak, komunikasi instruksional ala komando militer tetap menjadi acuan. Dengan pendekatan partisipatif dan komunikasi persuasif yang telah dilakukan sebelumnya, komunikasi antara militer bisa terjalin dengan baik dengan baik saat militer memimpin masyarakat dalam menghadapi ancaman bahaya yang terjadi.



## Daftar Pustaka

- DeVito, Joseph A, 1996, *Komunikasi Antarmanusia*, Terjemahan oleh Agus Maulana, Jakarta: Professional Books.
- Kepala Staf Angkatan Darat, 2002, *Buku Petunjuk Induk Teritorial*, Jakarta: Markas Besar TNI Angkatan Darat.
- Kepala Staf Angkatan Darat, 2003, *Buku Petunjuk Teknik Lima Kemampuan Teritorial*, Jakarta: Markas Besar TNI Angkatan Darat.
- Larson, Charles U, 1983, *Persuasion: Reception and Responsibility*, Wadsworth Publishing Company, Belmont CA.
- Markas Besar Angkatan Laut, Dinas Pembinaan Potensi Maritim, 2008, *Materi Buku Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut*. <http://dispotmar.blogspot.com/>.
- Pudiarto, F, 2012, "Mengenal Pembinaan Potensi Dirgantara". [http://www.tni.mil.id/index2.php?page=detailopini.html&nw\\_code=113012006114829](http://www.tni.mil.id/index2.php?page=detailopini.html&nw_code=113012006114829).
- Suryantoro, Eko Agus, 2010, *Kajian tentang Peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai Unsur Terdepan Desk Antiteror TNI AD dalam Upaya Deteksi dan Cegah Dini Aksi Terorisme di Indonesia*, Tesis. Institut Teknologi Bandung: Program Magister Berorientasi Terapan Studi Pertahanan.
- Sutjipto, Achmad, 2007, "Peran TNI AL dalam Mendukung Industri Kelautan dan Perikanan", <http://ikanmania.wordpress.com/2007/12/30/peran-tni-al-dalam-mendukung-industri-kelautan-dan-perikanan>, 30 Desember 2007.
- Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- "Bintara Makanan Lestarkan Benih Padi", Kompas 26 Maret 2012.
- "Panglima TNI: Fungsi Teritorial TNI Telah Berubah", Buletininfo 28 Februari 2012, <http://www.buletininfo.com/?menu=news&cid=&id=18295>.

- “Panglima TNI: Fungsi Teritorial Sudah Berubah” Investor Daily Indonesia, 27 Februari 2012, <http://www.investor.co.id/home/panglima-tni-fungsi-teritorial-sudah-berubah/30833>.
- “Pembinaan Potensi Dirgantara Dan Implikasinya Terhadap Sistem Pertahanan Negara”, <http://ayiek2000.blogspot.com/2011/08/pembinaan-potensi-dirgantara-dan.html>, 24 Agustus 2011.
- “Sosialisasi Potensi Kedirgantaraan”, Harian Umum Pelita, 4 Mei 2012, <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=49821>.

# MANAJEMEN KOMUNIKASI MILITER

Dewi K. Soedarsono

## Pendahuluan

Berbicara mengenai dunia militer, citra yang ada di benak individu adalah seragam (*uniform*) loreng-loreng, topi baja dan senjata, wajah tanpa senyum terkesan angker dan lain-lain. Tidak terbayangkan, bagaimana aktivitas pengelolaan organisasi (manajemen) maupun kegiatan komunikasi yang terjadi di ranah militer tersebut.

Menurut Mendiarto Djugorahardjo (2012), dunia militer memiliki pola kerja yang cukup baik, solid, dan berhasil. Misalnya di Angkatan Darat, satu wilayah dibagi ke dalam beberapa daerah yang lebih kecil dan di tiap daerah tersebut ditugaskan seorang perwira. Sebagai contoh, Indonesia dibagi ke dalam beberapa daerah militer yaitu provinsi dipimpin Pangdam, resort dipimpin Danrem, distrik dipimpin Dandim, kecamatan dipimpin Danramil, dan kelurahan dipimpin Babinsa. Masing-masing pejabat militer harus mengikuti suatu pola yang telah tersusun dan dibakukan dimana pun daerah tugasnya.

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono pada upacara pembukaan Pendidikan Reguler (Dikreg) XXXIX Sesko TNI 2012 di Bandung, (20/2/2012) mengatakan, Sesko TNI memikul tanggung jawab amat besar untuk melahirkan kader pimpinan TNI yang mampu melaksanakan tugas jabatan komando dan staf yang bersifat strategis gabungan antarangkatan, yang lebih berkualitas dan profesional, dengan tiga cara. *Pertama*, memiliki integritas dan jatidiri sebagai kader pimpinan TNI pada level strategis di masa mendatang yang bermoral, berwawasan kebangsaan dan memiliki kesehatan jasmani yang baik.

*Kedua*, memiliki kemampuan manajerial berbasis penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama kemampuan manajemen nasional, manajemen pertahanan negara, dan manajemen militer yang bersifat strategis. Kemampuan manajerial menempati peran penting dalam

perencanaan militer yang komprehensif dan manajemen pertahanan yang kuat serta disegani dalam rangka menjamin kepentingan nasional, demi tercapainya tujuan nasional. Hal ini menjadi penting dilakukan untuk menghadapi fenomena *revolution in military affairs* yang mengubah paradigma militer, dari militer klasik yang berbasis perang berhadapan yang simetris dan linear, menjadi pertempuran yang berbasiskan teknologi, doktrin, strategi, dan postur militer terkini dalam perang modern yang asimetris dan non-linear.

*Ketiga*, dihadapkan kepada perkembangan lingkungan global, regional, dan nasional, maka lulusan Sesko TNI diharapkan memiliki dan menguasai strategi dan Operasi Militer Gabungan TNI, untuk mendukung keberhasilan tugas pokok TNI melalui Operasi Militer Untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) (Republika, 20/02/2012).

Mindiarto Djugorahardjo menegaskan bahwa dalam lingkungan militer pun dikenal pembagian pekerjaan, yang diaplikasikan dalam pembagian wilayah pekerjaan berdasarkan daerah berikut pimpinan yang bertanggung jawab melaksanakan aktivitas di wilayah masing-masing. Agus Suhartono sebagai salah satu pimpinan di lingkungan TNI juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam proses kepemimpinan.

Untuk mencapai tingkat integritas yang tinggi dari personil (anggota) militer maka kebijakan-kebijakan di lingkungan organisasi militer didelegasikan dengan efisien dan efektif oleh pimpinan maupun komandan. Kegiatan tersebut merupakan salah satu dari rangkaian aktivitas manajemen komunikasi di lingkungan organisasi militer yang menjadi fokus utama untuk mencapai kinerja para anggota (kader) militer. Aktivitas tersebut dalam dunia kemiliteran, implementasinya dengan memegang teguh semua anggota (kader) militer melalui sistem garis komando dengan tingkat kedisiplinan dan kepatuhan yang tinggi, sehingga aktivitas manajemen dan aktivitas komunikasi di lingkungan militer dapat tercapai dengan optimal.

Sejalan dengan pemaparan tersebut, Peter F. Drucker, pakar dan konsultan manajemen bisnis, menganggap bahwa para pebisnis yang ada di dunia ini, harus mempelajari manajemen militer untuk dapat sukses dalam bisnis dan perkembangan perusahaan. Adapun tiga bidang yang harus dipelajari oleh para pebisnis dan manajemen untuk

mengadopsi manajemen militer adalah pelatihan dengan sistem militer. Peter Drucker sangat menghormati filosofi dalam pelatihan militer. Asumsi pertama, semakin giat kita berlatih, semakin mudah melakukan tindakan militer yang sesungguhnya, maka semakin baik kinerja kita. Asumsi kedua, serdadu berpangkat rendah pun, mampu memiliki kemampuan meraih level tanggung jawab dan komando tertinggi. Hal ini mengingatkan pepatah, "Dalam setiap ransel prajurit, terdapat tongkat marsekal". Dalam kemiliteran, keharusan setiap prajurit bisa membawa tongkat kepemimpinan, terutama pada saat berperang, jadi siapa saja diharuskan bisa untuk memimpin (Nainggolan, 2011).

Dengan ilustrasi tersebut, nyata bahwa wacana mengenai manajemen komunikasi di lingkungan organisasi militer bukanlah suatu aktivitas yang berbeda seperti yang dilakukan di lingkungan usaha atau bisnis. Ini menunjukkan bagaimana implementasi aktivitas manajemen di lingkungan organisasi militer dapat menginspirasi para pelaku manajemen agar dapat diadopsi ke dalam lingkungan perusahaan atau organisasi bisnis, salah satunya sistem manajemen strategi militer yang banyak dipergunakan di medan perang dan dalam ranah bisnis sistem tersebut dipergunakan untuk strategi meningkatkan penjualan.

### **Perspektif Manajemen Komunikasi**

Aktivitas kehidupan sebuah organisasi apapun bentuk dan jenisnya, tidak terlepas dari aktivitas para pelaku atau anggota organisasi yang saling berinteraksi mengelola organisasi agar mencapai tujuan dan sasaran. Demikian pula dengan organisasi di lingkungan militer. Menurut Koesnadi Kardi (2009), organisasi TNI sebagaimana organisasi militer lainnya biasanya mengacu pada doktrin militer yang dimiliki, yaitu doktrin TNI AD, doktrin TNI AL, dan doktrin TNI AU yang sudah disahkan oleh Kepala Staf Angkatan masing-masing dan dijadikan acuan untuk melaksanakan validasi organisasi angkatan.

Koesnadi Kardi menjelaskan bahwa doktrin TNI memiliki tiga strata. *Pertama*, Doktrin Strategis atau Doktrin Dasar TNI adalah yang tertinggi di militer (baik di TNI AD, TNI AL, maupun dan TNI AU), yang disahkan oleh Kepala Staf Angkatan. Doktrin ini berisi pengetahuan (*understanding*) dan bukan instruksi (*not instruction*). Doktrin ini sebenarnya merupakan penjabaran kebijakan pemerintah yang tertuang pada Buku Putih. Doktrin Strategis atau Doktrin Dasar ini dimiliki dan

digunakan oleh masing-masing angkatan sebagai dasar untuk membina kemampuan angkatan sesuai dengan kekhasan atau cirinya masing-masing. Sifatnya “bukan rahasia” (*unclassified*), berisikan pengetahuan tentang ilmu perang, kekhasan angkatan, dan pengetahuan tentang dasar-dasar penggunaan kekuatan angkatan. Doktrin pada strata ini pada dasarnya harus menjawab “mengapa kita harus memiliki Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara”. Doktrin ini juga menguraikan tentang sifat dasar operasi angkatan masing-masing serta menjelaskan secara garis besar bagaimana memenangkan perang.

*Kedua*, Doktrin Operasional berisi prinsip-prinsip bagaimana melaksanakan operasi militer pada saat konflik militer. Doktrin tersebut berisi pengetahuan dan instruksi bagaimana melaksanakan operasi militer, meskipun demikian penekanan dasarnya masih pada pengetahuan. Sifat doktrin ini adalah terbatas (*limited*). ABRI sebenarnya telah memiliki doktrin yang bersifat operasional yang disebut dengan Doktrin Operasi Gabungan-265 atau Petunjuk Operasi Gabungan-265. Isinya masih perlu direvisi kembali untuk dipilah-pilah mengingat bahwa isi doktrin tersebut lebih banyak yang bersifat taktis, yaitu bagaimana menggunakan kekuatan militer untuk menang dalam pertempuran.

*Ketiga*, Doktrin Taktis adalah petunjuk-petunjuk bagaimana menggunakan kekuatan militer dalam rangka mendukung tujuan taktisnya. Doktrin ini banyak sekali, dari yang bersifat prosedur teknis di *home-base* sampai dengan petunjuk operasional taktis yang akan digunakan didaerah pertempuran. Umumnya petunjuk tersebut berisi instruksi-instruksi tentang bagaimana melaksanakan latihan operasi sampai dengan penggunaan kekuatan militer di daerah operasi. Doktrin ini harus meyakinkan para komandan, apapun spesialisasinya sehingga mereka memiliki dasar-dasar tentang rencana dalam memenangkan suatu pertempuran. Biasanya doktrin ini bersifat rahasia.

Secara umum, keberadaan sebuah organisasi diperlukan untuk tujuan tertentu dan hanya dapat dicapai dengan tindakan yang dilakukan bersama-sama oleh anggota organisasi tersebut. Menurut James L. Gibson (1997: 3) organisasi apapun bentuknya adalah untuk mengejar tujuan dan sasaran yang dapat dicapai secara lebih efisien dan efektif dengan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama. Organisasi adalah alat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku anggotanya.

Pengejawantahan hakikat organisasi dalam kehidupan militer adalah implementasi ketiga strata dalam doktrin TNI tersebut yang menjelaskan tata cara perilaku anggota militer dalam melaksanakan kegiatan kemiliteran. Untuk lebih memahami implikasinya dalam perspektif pengelolaan perusahaan (organisasi militer), Agus Suhartono kembali menekankan pentingnya fungsi manajerial di lingkungan militer, agar integritas dan profesionalisme para anggota militer terjaga.

Paparan tersebut mempertegas bahwa organisasi militer pun mempunyai "*pakem*" yang menyiratkan pengelolaan organisasi dan proses pelaksanaan dari aktivitas organisasi. Proses pengelolaan organisasi dapat disebut sebagai sebuah proses manajemen.

Mary Parker Follet (Stonner, 1982: 7) secara umum mendefinisikan manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kegiatan manajer untuk mencapai pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan, dilakukan dengan mengatur orang lain untuk melaksanakan tugas apa saja yang mungkin diperlukan dalam mencapai tujuan perusahaan—bukan dengan cara melaksanakan sendiri pekerjaan itu. Fungsi manajerial adalah fungsi-fungsi yang terdapat dalam pengertian manajemen yaitu proses perencanaan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi (Hanafi, 1997: 6).

Aktivitas para anggota organisasi dalam melaksanakan kegiatan organisasi secara bersama-sama—yang disebut manajemen—tidaklah dapat tercapai bilamana antara anggota organisasi tersebut tidak saling berkoordinasi satu sama lain maupun berwenang melaksanakan fungsinya di organisasi; sehingga selain aktivitas manajemen, organisasi juga memerlukan aktivitas komunikasi yang dapat mensinergikan antaranggota untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan organisasi.

Aktivitas para anggota organisasi dalam mengoptimalkan sumber dayanya ke dalam aspek pengelolaan manajemen dan kegiatan komunikasi di organisasi militer dengan lebih efisien dan efektif merupakan implikasi dari aktivitas manajemen dan komunikasi sehingga bila dipergunakan sebagai sebuah proses yang sistematis merupakan sebuah aktivitas manajemen komunikasi.

Untuk mempertegas pandangan tersebut Harry Irwin (1994: 10), mendefinisikan manajemen komunikasi sebagai "*the process of using*

*human, financial and technical resources in understanding and performing the communication function within corporations and between those and their publics*”, (proses yang menggunakan manusia, keuangan, dan sumber teknik yang berfungsi membentuk komunikasi antarperusahaan dan perusahaan dengan publiknya). Michael Kaye (1991: 8) memberikan pengertian, “*Communication management, implies the optimal use human and technological resources to promote dialogue between people*”. (Manajemen komunikasi menyiratkan penggunaan sumber daya manusia dan teknologi secara optimal untuk menjalin hubungan antarmanusia).

Uraian tersebut menjelaskan, proses manajemen komunikasi dapat dipahami sebagai sebuah proses koordinasi interpretasi atau pengertian yang dibangun melalui interaksi antarmanusia atau sebagai proses yang sistematis antara anggota organisasi dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen guna menyelesaikan suatu pekerjaan melalui proses negosiasi pengertian atau pemahaman antara satu individu maupun lebih yang bertujuan mencapai keinginan dan kepuasan bersama.

Sejalan dengan konsep umum manajemen “*as the process of getting done through and with people*” (Liebler, 1995: 35), dan komunikasi “*as a process of interrelated elements working together to achieve a desired outcome or goal*” (Barker, 1987: 5), maka manajemen komunikasi dipahami sebagai proses yang sistematis antara anggota organisasi dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam menyelesaikan suatu pekerjaan melalui proses negosiasi pengertian atau pemahaman antara satu individu maupun lebih yang bertujuan mencapai keinginan dan kepuasan bersama (Soedarsono, 2007: 47-48).

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka Robert E. Simmons (1990: 10), menjelaskan implementasi manajemen komunikasi ke dalam sistem kegiatan di organisasi melalui empat tahapan yang disebut *managerial planning*, yaitu:

1. *Reorganize large masses of information into simpler yet more meaningful categories.*

Tahap ini memudahkan para anggota organisasi dalam memahami dan melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan kebijakan dan arahan pimpinan;

2. *Differentiate important information and eliminate non essential information.*

Dalam melaksanakan kegiatan organisasi semua informasi yang



diperoleh perlu dipilah-pilah sedemikian rupa, agar pelaksana pekerjaan dapat membuat prioritas pekerjaan berdasarkan tingkatan informasinya;

3. *View problem-connected events, phenomena, and concepts in an integrated context that makes it easier to make sense of, or explain what is occurring.* Manajer membutuhkan tahapan ini sebagai upaya untuk membuat spesifikasi pekerjaan dan mendistribusikannya kepada karyawan yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dan mampu mengantisipasi kemungkinan yang terjadi;
4. *Formulate strategy that can serve as the basis for plans and their implementation.* Merupakan tahapan yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Rumusan strategi yang tepat dan mudah diimplementasikan akan menciptakan suasana kerja yang kondusif dan mendorong terciptanya kinerja yang memuaskan karyawan dan organisasi.

Penjelasan tersebut menunjukkan adanya hubungan timbal balik sesama anggota perusahaan (sumber daya manusia) dalam rangka melaksanakan kegiatan organisasi, sehingga target maupun sasaran organisasi tercapai dengan efektif. Dalam hal ini, pendekatan manajemen komunikasi di organisasi merupakan dasar untuk menetapkan hubungan antara kemampuan berkomunikasi masing-masing anggota organisasi dengan sistem yang menggerakkan aktivitas organisasi tersebut dan dapat diinterpretasikan dengan pemahaman (*knowledge management*) yang sama antara pimpinan dengan bawahan maupun sebaliknya.

Aktivitas manajemen komunikasi, diperlukan untuk menjembatani perbedaan interpretasi maupun pandangan terhadap kebijakan organisasi melalui pendekatan manajemen sebagai dasar pengelolaan organisasi dan pemahaman komunikasi sebagai landasan interaksi antara anggota organisasi.

Irwin (1994: 10) menambahkan bahwa kemampuan antarpersonal diperoleh dari besar kecilnya hubungan yang terjadi dari waktu ke waktu. Demikian pula dengan kegiatan manajemen komunikasi. Aktivasnya dalam organisasi, diantaranya mengaplikasikan fungsi manajemen ke dalam aktivitas komunikasi yang berlangsung di organisasi dan bertujuan untuk saling mengingatkan serta memberi perhatian terhadap sasaran. Termasuk di antaranya kegiatan dan strategi

komunikasi, memberikan pendapat, memutuskan, dan mengevaluasi aktivitas komunikasi yang telah direncanakan.

### **Implementasi Manajemen Komunikasi di Organisasi Militer**

Menindak lanjuti pernyataan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono bahwa para kader TNI sebaiknya memiliki kemampuan manajerial berbasis penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama kemampuan manajemen nasional, manajemen pertahanan negara, dan manajemen militer yang bersifat strategis. Galibnya, para kader TNI di dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia (kader TNI) diberikan pengetahuan dan pemahaman manajemen komunikasi (*management communication knowledge*), yang bertujuan untuk lebih meningkatkan motivasi dan pemahaman para kader TNI, sebagai anggota organisasi TNI yang mempunyai integritas tinggi dan profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Sejalan dengan paparan tersebut, para anggota organisasi militer penting mengetahui pelaksanaan dari fungsi-fungsi manajerial, yaitu:

1. *Planning* (perencanaan), menentukan tujuan dan sasaran utama organisasi militer agar berhasil, termasuk diantaranya: mengembangkan strategi, menetapkan kebijakan, merencanakan anggaran, dan petunjuk-petunjuk umum untuk menggiatkan jalannya perusahaan;
2. *Organizing* (organisasi), menentukan secara spesifik aktivitas maupun kebutuhan untuk mencapai sasaran maupun hasil yang akan dicapai organisasi militer;
3. *Directing* (pengarahan), mengarahkan perilaku anggota organisasi militer sesuai dengan apa yang telah ditetapkan organisasi militer dan sesuai kebutuhan, rencana maupun desain;
4. *Controlling* (pengawasan), kegiatan yang dilakukan oleh komandan kesatuan untuk mengetahui apakah aktivitas organisasi dijalankan sesuai dengan yang telah direncanakan dan dilakukan oleh anggota organisasi militer sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

Dalam prakteknya, aktivitas manajemen yang dilakukan oleh para anggota organisasi militer tidak cukup dengan memahami fungsi-fungsi manajemen tersebut. Kemampuan para anggota organisasi militer untuk mengkomunikasikannya antar anggota lainnya juga penting dilakukan

agar tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan komandan kesatuan. Kemampuan berkomunikasi para anggota organisasi militer adalah proses pemahaman terhadap sudut pandang pengalaman (*field of experience*) maupun kerangka berpikir (*frame of reference*) masing-masing anggota.

Pengejawantahan dari kemampuan berkomunikasi terutama bagi komandan kesatuan. Hal yang penting dilakukan agar kebijakan-kebijakan dapat didelegasikan, dikoordinasikan, dan dilaksanakan sesuai tujuan dan sasaran. Hans Johnsson (1990: 383) menegaskan bahwa komunikasi berfungsi membantu *top-management* (komandan kesatuan) untuk menjalankan strategi kegiatan, sehingga sebelum melaksanakan kegiatan komunikasi manajemen, para anggota organisasi perlu memastikan bahwa:

1. Strategi dibuat sesuai tujuan dan identitas organisasi;
2. Menyadari relevansi hubungan antar kelompok dan mempunyai visi dan misi yang sama dalam menciptakan citra organisasi;
3. Memahami bagaimana citra organisasi dapat mempengaruhi keberhasilan dan perkembangan organisasi.

Ketiga hal tersebut dapat ditindak-lanjuti jika komandan kesatuan (*top-management*) proaktif dan berinisiatif, bersama-sama saling memberikan dorongan, perhatian, dan memfasilitasi kegiatan manajemen komunikasi sebagai sebuah sistem yang terencana dan terarah. Di samping itu peran pimpinan puncak sebagai komunikator yang kredibilitas dan responsibilitasnya teruji.

Kemampuan berkomunikasi penting dimiliki oleh masing-masing anggota yang terlibat dalam aktivitas organisasi militer. Menurut Irwin (1994: 23-25), ada 10 hal yang perlu dimiliki oleh individu agar memiliki kemampuan berkomunikasi, yaitu:

1. *Competence in listening and responding* secara aktif yang bertujuan untuk mengerti, mengevaluasi, dan mempertegas pengambilan keputusan;
2. *Competence in overcoming reticence (shyness)*. Hal ini dapat terjadi dimana saja pada saat kegiatan komunikasi berlangsung, sehingga diperlukan peran komunikator mampu mengatasi rasa malu atau sulit berbicara antara peserta komunikasi;

3. *Competence in being open and frank*. Pengungkapan ide maupun perasaan secara terbuka dalam kegiatan komunikasi diperlukan agar proses komunikasi berjalan efektif dan berhasil;
4. *Competence in establishing and sustaining a smooth pattern of interaction*. Interaksi yang menyenangkan dapat membantu satu dan lainnya untuk saling menyukai. Kenyamanan atau suasana yang menyenangkan dibutuhkan untuk membangun kesadaran bagaimana individu berinteraksi;
5. *Competence in being assertive (not aggressive)*, merupakan kemampuan berkomunikasi secara positif maupun negatif – dari gagasan maupun perasaan yang nyata untuk meraih partisipasi individu dalam berinteraksi;
6. *Competence in questioning*. Kemampuan bertanya penting terutama dalam konteks wawancara secara formal. Pertanyaan-pertanyaan dipergunakan secara langsung untuk mencari informasi dan menegaskan gagasan, pendapat maupun perasaan. Bertanya merupakan salah satu kemampuan dalam membahas interaksi yang berkaitan dengan individu, informasi, ide, dan perasaan dalam satu hubungan;
7. *Competence in understanding people from the "stories" they tell*. Seluruh interaksi dipengaruhi oleh nilai-nilai dan keyakinan dari masing-masing peserta komunikasi, yang membuat masing-masing peserta memahami maupun tidak memahami pengaruh komunikasi bagi lingkungannya. Mengidentifikasi nilai dan keyakinan sebagai dasar untuk memudahkan interaksi atau hubungan antara individu. Dengan demikian aktivitas interaksi antara individu dapat terjadi dimana masing-masing peserta komunikasi saling memahami makna dari ide atau gagasan berdasarkan nilai-nilai maupun keyakinannya;
8. *Competence in negotiating and resolving conflict*. Bagi perusahaan-perusahaan besar kegiatan negosiasi penting dilakukan, diantaranya untuk memperjelas posisi pekerjaan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas maupun tanggung jawab pekerjaan antara anggota perusahaan;
9. *Competence in interpreting nonverbal behaviour*. Banyak sekali pertukaran informasi maupun pengertian antara individu dilakukan dengan komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh. Para ahli memperkirakan bahwa dalam setiap aktivitas komunikasi, kesamaan

menginterpretasikan pesan sebagian besar dipertegas oleh perilaku nonverbal antarindividu sekitar 60 – 70 % melalui *gestures*, gerakan badan, ekspresi muka, kontak mata, dan intonasi suara;

10. *Competence in adapting communication behaviour to suit the circumstances.* Kemampuan beradaptasi di dalam perilaku komunikasi yang beragam. Perbedaan sosial budaya merupakan salah satu hal yang menyebabkan individu perlu melakukan adaptasi dalam setiap aktivitas komunikasi agar diperoleh pengertian maupun pemahaman yang sama.

Kesepuluh kemampuan berkomunikasi tersebut adalah kemampuan yang penting dimiliki oleh para anggota organisasi militer terutama dalam mengimplementasikan tiga strata dalam doktrin TNI yang meliputi Doktrin Strategis, Doktrin Operasional, dan Doktrin Taktis. Untuk melaksanakan ketiga strata tersebut bukanlah hal mudah karena menyangkut stratejik yang berkaitan dengan fungsi dan peran militer dalam menjaga keamanan bangsa Indonesia. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan komandan kesatuan atau pimpinan sebagai komunikator (penyampai informasi atau kebijakan) yang mempunyai kemampuan menjalankan fungsi-fungsi manajerial dengan komitmen dan integritas yang tinggi.

Onong Uchjana Effendi (1986: 20-27) menyatakan bahwa kemampuan komunikator dipengaruhi oleh etos dan sikap komunikator.

1. Etos Komunikator: etos adalah nilai diri seseorang yang merupakan paduan dan kognisi (*cognition*) yaitu proses memahami sesuatu objek dengan pikiran, afeksi (*affection*) yaitu perasaan yang ditimbulkan oleh perangsang dari luar dan konasi (*conation*), adalah aspek psikologis yang ditunjukkan dalam bentuk perilaku. Etos dapat tumbuh dalam diri individu melalui faktor-faktor berikut:
  - a. Kesiapan (*preparedness*), sebelum komunikator tampil atau melakukan kegiatan komunikasi, selayaknya mempersiapkan diri sedemikian rupa dengan data-data maupun bahan-bahan yang berhubungan dengan objek maupun topik yang akan disampaikan;
  - b. Kesungguhan (*seriousness*), saat menyampaikan pesan ditunjukkan dengan cara yang dapat menumbuhkan kepercayaan komunikan, misalnya: menjelaskan sesuatu dengan sungguh-

sebenarnya, perhatian terfokus pada pendengar dan lain-lain;

- c. Ketulusan (*sincerity*), seorang komunikator harus menunjukkan kesan kepada khalayak ketulusan dalam niat dan perbuatannya. Misalnya, memberikan pendapat yang tepat tidak menyinggung, menampilkan senyum tulus untuk menunjukkan keramahan dan lain-lain;
  - d. Kepercayaan (*confidence*), seorang komunikator selayaknya menampilkan kesan meyakinkan dengan penguasaan diri yang kuat, dapat menguasai situasi, dan kondisi yang beragam;
  - e. Ketenangan (*poise*), seorang komunikator selayaknya tenang, dalam penyampaian kata maupun penampilan. Ketenangan yang ditampilkan komunikator akan menimbulkan kesan bahwa komunikator seorang yang berpengalaman dan dapat dipercaya;
  - f. Keramahan (*friendship*), keramahan yang ditampilkan komunikator sangat penting untuk mengurangi perbedaan antara komunikator dengan komunikan. Dalam forum yang mengandung perdebatan, keramahan dapat menurunkan emosional dengan cara yang etis;
  - g. Kesederhanaan (*moderation*), kesederhanaan tidak hanya menyangkur hal-hal yang bersifat fisik (misalnya cara berpakaian, penampilan, dan lain-lain), tetapi juga dalam penggunaan bahasa sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaan dan gaya mengkomunikasikannya.
2. Sikap Komunikator: sikap (*attitude*) adalah suatu kesiapan kegiatan (*preparatory activity*), kecenderungan pada diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan menuju atau menjauhi nilai-nilai sosial. Dalam hubungannya dengan kegiatan komunikasi, terdapat lima jenis sikap yang perlu ditampilkan komunikator, yaitu:
- a. Reseptif (*receptive*), adalah kesediaan untuk menerima gagasan, pendapat, dan pikiran orang lain, misalnya dari pimpinan, karyawan, teman, keluarga dan lain-lain;
  - b. Selektif (*selective*), dalam proses komunikasi tidak dipungkiri bahwa individu saling beralih peran sebagai komunikator dan komunikan. Sikap selektif diperlukan agar dalam proses penyampaian (komunikator) dan penerimaan pesan atau informasi (komunikan) dapat dipahami sama;

- c. Dijestif (*digestive*), adalah kemampuan komunikator dalam mencerna gagasan atau informasi dari orang lain sebagai bahan bagi pesan yang akan ia komunikasikan;
- d. Transmisif (*transmissive*), adalah kemampuan komunikator dalam mentransmisikan gagasan atau informasi yang telah diformulasikan secara kognitif, efektif, dan konatif kepada orang lain. Dalam proses komunikasi, disebut proses mengkode dan membaca kode pesan (*decode-encode*).

Menyitir pernyataan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono bahwa Sesko TNI memikul tanggung jawab amat besar untuk melahirkan kader pimpinan TNI yang mampu melaksanakan tugas jabatan komando dan staf yang bersifat strategis gabungan antar angkatan, yang lebih berkualitas dan profesional, maka agar mempunyai kemampuan manajerial dan kemampuan berkomunikasi, para anggota (kader) TNI kiranya bukan hanya diberikan pengetahuan mengenai manajemen pengelolaan organisasi militer saja, tapi pengetahuan mengenai kepemimpinan.

Mamduh (1997: 362-362) menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan memengaruhi aktivitas-aktivitas tugas dari karyawan atau bawahan yang dipimpinnya. Pemimpin biasanya dikaitkan dengan orang yang mempunyai semangat tinggi, kharisma tinggi, dan kemampuan motivasi orang lain yang sangat tinggi sedangkan manajer biasanya dikaitkan dengan orang yang menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam kapasitasnya sebagai seorang pemimpin. Menjadi seorang manajer yang berjiwa pemimpin tidak mudah karena tidak semua manajer bertindak sebagai seorang pemimpin, tapi seorang pemimpin bisa menjadi seorang manajer

William F. Whyte (Abu Ahmadi, 1999: 129-130) menjelaskan ada empat faktor yang menentukan seseorang bisa jadi pemimpin, yaitu:

1. *Operational leadership*, yaitu orang yang mempunyai inisiatif tinggi, menarik, dan dinamis, menunjukkan pengabdian yang tulus dan kinerjanya baik;
2. *Popularity*, biasanya orang yang banyak dikenal mempunyai banyak kesempatan yang lebih banyak menjadi pemimpin;
3. *The assumed representative*, seseorang yang selalu tampil mewakili kelompoknya mempunyai kesempatan besar untuk menjadi pemimpin;



4. *The prominent talent*, seseorang yang memiliki bakat atau kecakapan yang menonjol dalam kelompoknya memunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin.

Peran dan fungsi dari komandan kesatuan sebagai pemimpin adalah mampu mengerahkan dan mempengaruhi anggota organisasi agar melaksanakan aktivitas-aktivitas manajemen sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dengan menjalankan fungsi manajerial dan fungsi komunikasi dengan efisien dan efektif.

Krech, Crutchfield & Ballachey (1962: 422-424) mengatakan bahwa fungsi pimpinan bagi organisasi sebagai berikut:

1. *The leader as executive*. Dalam segala hal, seorang pemimpin berperan sebagai koordinator dari keseluruhan aktivitas organisasi, dengan menugaskan kepada kelompoknya atau kelompok lainnya untuk mengerjakan pekerjaan yang sesuai yang sesuai dengan kebijakan maupun tanggung jawabnya;
2. *The leader as planner*. Seorang pemimpin berperan sebagai perencana maupun membuat keputusan bagaimana cara untuk mencapai keberhasilan bagi kelompoknya dan bersama-sama menentukan langkah-langkah yang diperlukan melalui perencanaan jangka pendek, jangka panjang, dan masa yang akan datang;
3. *The leader as policy maker*. Fungsi utama pemimpin adalah menetapkan tujuan dan kebijakan bagi kelompoknya, melalui otoritas paling atas (manajer), ke otoritas menengah (penyelia), sampai ke bawah (staf). Dalam hal ini, pemimpin juga bertanggung jawab memimpin dan terlibat secara aktif dalam diskusi yang dilakukan anggotanya dalam menindaklanjuti kebijakan organisasi agar tujuan tercapai;
4. *The leader as expert, the leader is often distinguished as a source of readily available information and skills*. Seorang pemimpin juga sebagai sumber informasi dan memunyai keterampilan yang lebih tinggi dari anggota lainnya. Dengan demikian fungsi pemimpin adalah sebagai penasihat baik secara teknis maupun nonteknis bagi anggota organisasi;
5. *The leader as external group representative*. Bagi perusahaan besar dimana anggota kelompoknya juga besar mustahil untuk berinteraksi dengan pihak luar semuanya, sehingga tugas tersebut dilakukan oleh pemimpin sebagai perwakilan dari kelompok. Pemimpin juga bertindak sebagai juru bicara (sumber informasi) dan penjaga



- gawang (*gate keeper*) dalam menjalin komunikasi dengan pihak luar;
6. *The leader as controller of internal relations*. Pemimpin menjalin hubungan dengan kelompok pekerja di dalam organisasi atau perusahaan agar aktivitas kelompok dapat terpantau sesuai dengan struktur dan fungsinya di organisasi;
  7. *The leader as purveyor of rewards and punishments*. Pemimpin juga bertindak memberikan penghargaan maupun hukuman kepada anggota organisasi yang sesuai dengan kinerjanya. Penghargaan diberikan kepada anggota perusahaan yang berkerja dengan kinerja baik dan hukuman diberikan apabila anggota perusahaan melakukan kesalahan maupun kelalaian;
  8. *The leader as arbitrator and mediator*. Kadang pemimpin bertindak sebagai mediator ataupun penengah dalam menghadapi konflik antar anggota organisasi. Dalam hal ini pemimpin dituntut dapat bertindak adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan untuk mengatasi konflik tersebut;
  9. *The leader as exemplar*. Tingkah laku maupun sepak terjang seorang pemimpin sebaiknya dapat dijadikan contoh baik atau teladan bagi anggota organisasi. Dengan demikian, seorang pemimpin dituntut memunyai mental dan moral yang baik menurut etika umum;
  10. *The leader as symbol of the group*. Perannya yang menonjol, secara tidak langsung seorang pemimpin merupakan simbol bagi kelompoknya. Gaya kepemimpinan, tata cara menetapkan kebijakan merupakan ciri khas tersendiri, sehingga memberikan warna yang berbeda bagi kelompoknya;
  11. *The leader as substitute for individual responsibility*. Seorang pemimpin berperan penting dalam menetapkan setiap kebijakan dan memunyai tanggung jawab yang besar atas sepak terjang anggotanya;
  12. *The leader as ideologist*. Dalam organisasi yang beragam latar belakang anggota kelompoknya, pemimpin merupakan sumber ideologi yang akan mempersatukan perbedaan tersebut dengan menjaga nilai-nilai, kepercayaan, dan keyakinan anggota kelompoknya, dan membentuk budaya organisasi yang solid;
  13. *The leader as father figure*. Pemimpin juga berperan sebagai ayah atau orang tua bagi anggota kelompoknya agar secara emosional menciptakan rasa aman bagi anggota kelompoknya;

14. *The leader as scapegoat*. Sebagai pemimpin yang ideal maka kadang pemimpin bersikap kebabakan dalam melakukan pendekatan emosional kepada anggotanya dan sebaliknya bersikap tegas tanpa kompromi dalam menetapkan kebijakan organisasi.

Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin yang ideal harus mempunyai kemampuan sebagai berikut:

- a) *Organisator (managerial)*. Seorang pemimpin harus memahami dan dapat menjalankan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggiatan, dan pengontrolan, sebagai kunci utama untuk memprediksi sejauhmana kegagalan maupun keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan;
- b) *Delegator*. Kemampuan pimpinan dalam menjalankan aktivitas organisasi dilakukan dengan cara mendelegasikan pekerjaan kepada para anggotanya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga setiap anggota dapat menjalankan aktivitas organisasi dengan efisien dan efektif sehingga kinerja individual dan organisasi akan tercapai dengan memuaskan;
- c) *Communicator*, pendelegasian pekerjaan dapat dengan mudah dilakukan oleh pimpinan, bilamana iklim komunikasi antara para anggota organisasi terjalin kondusif. Hal ini dapat terlaksana bergantung pada sejauhmana pimpinan dapat mengomunikasikan kebijakan tersebut kepada anggotanya dengan efektif, sehingga tujuan organisasi tercapai;
- d) *Supporter*. Untuk mengatasi penurunan motivasi maupun yang dapat berakibat pada menurunnya kinerja SDM, maka pimpinan kadang perlu memberikan semangat kepada mereka agar motivasinya kembali meningkat dan mengurangi kebosanan diantara karyawan karena rutinitas kerja. Kegiatan tersebut dapat dilakukan misalnya dengan mengadakan pelatihan, wisata bersama, pemberian insentif, dan kegiatan di luar organisasi yang intinya menjalin kebersamaan dan kegembiraan sesama anggota organisasi;
- e) *Conselor*. Kebijakan organisasi kadang menghadapi kendala akibat ketidakpahaman anggotanya terhadap tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mengakibatkan kesalahan dan hasil pekerjaan tidak sesuai rencana. Dalam hal ini, peran seorang pemimpin sangat

dibutuhkan untuk memberikan pengarahan, konsultasi, dan nasihat kepada anggotanya bagaimana seharusnya melaksanakan pekerjaan tersebut agar sesuai dengan rencana;

- f) *Negotiator* adalah suatu usaha yang perlu dimiliki seorang pemimpin guna tercapainya kesepakatan atau pengertian yang memuaskan kedua belah pihak. Hal ini dibutuhkan untuk mengatasi perbedaan pendapat, ide maupun persepsi yang terjadi antara anggotanya saat melaksanakan pekerjaan atau perbedaan yang terjadi antara organisasi dengan pihak luar.

## Simpulan

Implementasi manajemen komunikasi di ranah organisasi militer secara umum menjelaskan bahwa aspek-aspek yang terkandung di dalam pengelolaan organisasi tidak berbeda dengan organisasi-organisasi pada umumnya di mana pendekatan operasional organisasi yang diaplikasikan ke dalam fungsi-fungsi manajemen dan komunikasi bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja para anggota organisasi militer.

Peran komandan kesatuan sebagai pimpinan tertinggi merupakan motivator bagi anggota maupun kader-kader dalam organisasi militer, untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kemampuan komunikasi. Dengan pendekatan operasional yang sistematis dalam melaksanakan aktivitas manajemen komunikasi dilingkungan organisasi militer, diharapkan integritas dan profesionalisme para anggota maupun kader-kader militer dapat tercapai dengan optimal.

Menyitir pernyataan Ki Hajar Dewantoro mengenai pengelolaan organisasi, bila organisasi ingin berkembang maju, maka semua anggota organisasi harus mempunyai tiga N (*niteni, niroke, dan nambahi*). Kemampuan *niteni* adalah kemampuan untuk menemukan hal-hal yang paling penting dan mengutamakan hal paling penting tersebut. Dalam manajemen modern hal tersebut dikenal sebagai *information scanning*, termasuk *technological information*. *Niroke* adalah kemampuan menemukan hal yang terbaik untuk ditiru, yang dikenal dengan *Benchmarking*. *Nambahi* adalah kemampuan untuk selalu melakukan tambahan agar organisasi tidak berada di belakang, tidak terjebak dalam *flying geese formation* tetapi selalu menjadi organisasi yang unggul di depan (Sabardi, 2001: 2).

## Daftar Pustaka

- Ahmadi, Abu, 1999, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Barker, Larry L, 1987, *Communication*, United State of America: Prentice Hall.
- Diwan, Parag, 1999, *Communication Managing*, Kuala Lumpur: Golden Books Centre SDN BHD.
- Djamin, Awaloedin, 2011, *Sistem Administrasi Kepolisian Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Djugorahardjo, Mindiarto, 2012, *Menata organisasi penjualan gaya militer*, elqorni Wordpress. From: <http://elqorni.wordpress.com/2011/12/30>.
- Drucker, Peter F, 1999, *Management Challenges for the 21st Century*, NewYork: First HarperCollins.
- Effendy, Onong Uchjana, 1997, *Ilmu Komunikasi Teori & Praktek*, Bandung: Remaja Karya.
- Gibson, James L, 1997, *Organisasi & Manajemen*, terjemahan, Jakarta: Erlangga.
- Hanafi, Mamduh M, 1997, *Manajemen*, Yogyakarta: UPPAMPYKPM.
- Irwin, Harry, 1994, *Managing Corporate Communication*, Malaysia: Allen & Unwin Business and Management.
- Johnsson Hans, 1990, *Professional Communications for a change*, Prentice Hall, UK.
- Krech, David, Richard S.Crutchfield, E.L.Ballachey, 1962, *Individual in Society*, Japan: MCGraw-Hill Kogakusha.
- Kaye, Michael, 1994, *Communication Management*, Sydney: Prentice Hall.
- Kardi, Koesnadi, 2009, *Struktur Organisasi & Doktrin TNI*, budhiachmadi. Wordpress.com From: <http://budhiachmadi.wordpress.com/2009/09/05/>
- Liebler, Joan Gratto, 1999, *Management Priciples for Health Professionals*, An Aspen Publication, Maryland.
- Nainggolan, Parlin, 2011, *Peter F.Drucker: Adopsilah manajemen militer dan praktekkanlah di manajemen bisnis*.Kompasiana sharing connecting, from <http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen/2011/07/03/>

- Republica , 2012, Panglima: Sesko TNI Harus Lahirkan Pimpinan Andal, Republica.co.id. from: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/02/20>.
- Robbins, Stephen P, 2003, *Prilaku Organisasi*, Jilid I, alih bahasa: Tim Indeks, Indeks Kelompok Jakarta: Gramedia.
- Sabardi, Agus, 2001, *Manajemen Pengantar*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- Soedarsono, Dewi K, 2007, *Sistem Manajemen Komunikasi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Simmons, Robbert E, 1990, *Communication Campaign Management, A System Approach*, New York: Longman.
- Stoner , James A.F, 1989, *Manajemen* , alih bahasa: Al Fonsus Sirait, Jakarta: Erlangga.



BAGIAN IV  
SINEMA, BUDAYA POP DAN  
“KEMILITERAN”





# REMAJA DALAM PEPERANGAN FILM BARAT DAN FILM INDONESIA

Rita Gani

## Latar belakang

*“Apakah Kelemahan kita: Kelemahan kita ialah, kita kurang percaya diri kita sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang mempercayai satu sama lain, padahal kita ini asalnya adalah Rakyat Gotong Royong”.* (Pidato HUT Proklamasi, 1966 Bung Karno).

Kiranya apa yang disampaikan Bung Karno pada pidato peringatan HUT Proklamasi RI yang ke 21 tahun 1966 kembali “menyata” di bangsa ini. Tahun ini kita sudah memasuki usia kemerdekaan yang ke 67 tahun, namun persoalan semangat nasionalisme masih menjadi sesuatu yang sulit untuk diwujudkan oleh anak negeri ini. Salah satu bentuk yang dimaksud oleh Soekarno pada pidato kenegaraan tersebut adalah pada kalangan generasi muda Indonesia. Apakah dalam persoalan gaya hidup yang semakin terwesternisasi, perilaku, pola pikir, atau bentuk kreatifitas yang salah satunya di tuangkan dalam bentuk film. Film merupakan tontonan yang dicari karena fungsinya yang menghibur, ia adalah bagian kehidupan sehari-hari kita dalam banyak hal, bahkan menurut Vivian (2008: 160) cara kita bicara sangat dipengaruhi oleh metafora dalam film. Terlihat pada saat film *Ada Apa dengan Cinta* (AADC) sukses pada tahun 2002 lalu, metafora tokoh Rangga dan Cinta beserta anggota gengnya memenuhi gaya hidup para remaja, baik dari cara berpakaian, cara berbicara, tingkah laku dan sebagainya. Masyarakat diakrabkan dengan istilah “apa kata dunia” yang berasal dari Film *Naga Bonar Jadi 2*. Tentunya hingga saat ini sangat banyak metafora dalam film yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, apakah yang berasal dari film Barat maupun film Indonesia. Hal terbaru tentu saja bagaimana semangat *man jadda wajada* nya film *Negeri 5 Menara*. Film yang diangkat dari novel berjudul sama karya Ahmad Fuadi, sejak tayang perdananya tanggal 1 Maret 2012, telah mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat.

Perkembangan film di tanah air mengalami masa pasang surut silih berganti, satu dekade terakhir, wajah film Indonesia sangat beragam. Setelah lama mati suri, dan hanya ada 4 sampai 5 film yang diproduksi per tahun, perfilman nasional kembali menggeliat melalui film *Petualangan Sherina* (2000) dan *Ada Apa Dengan Cinta* (2002). Sangat banyak film Indonesia yang tayang di layar bioskop dengan berbagai genre. Dalam Festival Film Bandung yang di gelar tanggal 6 Mei 2011 lalu, beberapa film pilihan didaulat menjadi nominasi peraih penghargaan FFB di antaranya film *3 Hati 2 Dunia 1 Cinta*, *Tanah Air Beta*, *Sang Pencerah*, *Rindu Purnama*, dan *Alangkah Lucunya (Negeri Ini)*. Sepengamatan penulis, film-film tersebut juga menjadi nominasi di FFI (Festival Film Indonesia) dan RCTI Movie Award. Sisi lain, wajah perfilman tanah air juga di ramaikan dengan film-film bertema horor dan komedi horor, yang pada kenyataannya “sangat” digemari penonton. Hal ini terlihat pada data penonton film berikut, film *Arwah Goyang Karawang* masih berada posisi teratas, dengan jumlah penonton 709.737. Diikuti film *Pocong Ngesot* dengan 361.191, kemudian *Virgin 3: Satu Malam Mengubah Segalanya* yang mendapatkan 299.635. Posisi keempat adalah film *Kalung Jelangkung* dengan 286.878, *Love Story* dengan 285.059, dan *Pelukan Janda Hantu Gerondong* yang berhasil mendapatkan 251.361. Film “?” atau *Tanda Tanya* hanya mendapatkan 249.167 dan diikuti film *Dedemit Gunung Kidul* dengan 175.039, dan *Jenglot Pantai Selatan* yang mendapatkan 157.292. Posisi buncit adalah film *Skandal* yang mendapatkan 106.242 penonton. (<http://suaramerdeka.com> diakses 30 Mei 2011). Tidak mampu menyaingi jumlah penonton film *Laskar Pelangi* yang menembus angka 3.9 juta penonton atau film *Ayat-Ayat Cinta* yang ditonton sekitar 3.8 juta penonton, namun dari paparan angka-angka di atas, film-film bertema horor, sedikit berbau seks dengan judul yang “menyeramkan”, tetap ada peminatnya. Hal ini dibenarkan oleh Ari Sihasale, produser dari Alenia Production, ketika berbincang dengan Penulis di Fikom Unisba tanggal 19 April 2011 lalu. Ia mengatakan bahwa “film-film bertema horor seperti yang banyak beredar di bioskop itu tetap dibuat karena masyarakat menyukainya, dan masih menontonnya. Tapi kan tidak semuanya jelek ya, justru ini menjadi perbandingan bagi kami ketika akan membuat sebuah film, meskipun hingga saat ini belum tertarik untuk membuatnya”.

Kabar seputar film di tanah air sempat menghangat ketika akan

diberlakukannya larangan bagi film asing tayang di Indonesia. Tak pelak lagi, hal ini menimbulkan pro dan kontra, baik di kalangan insan perfilman maupun masyarakat luas. Tentunya pada tataran masyarakat tidak bisa dilepaskan dari selera terhadap film tersebut. Beberapa berkeluh kesah di jejaring sosial seperti twitter atau facebook, menginginkan kembali agar film Barat kembali ditayangkan di bioskop Indonesia. Bicara soal selera dan pilihan, banyak masyarakat yang menggandrungi film barat dibanding dengan film produksi negeri sendiri. Terkait dengan wawancara dalam FGD (*focus group discussion*) yang penulis lakukan seputar minat kalangan muda terhadap film Indonesia, maka secara umum, partisipan lebih memilih film Barat daripada film Indonesia. Tentu saja ada alasan di balik pemilihan tersebut.

Menarik kiranya mengkaji hal ini, terutama bagaimana tanggapan generasi muda terhadap perfilman Indonesia. Apakah mereka masih “mencintai” film lokal atau tidak? dan apa alasan mereka menonton film Indonesia. Dalam proses penelusuran ini, pada tanggal 5 Mei 2010 lalu, penulis melakukan FGD terhadap sejumlah remaja di Jakarta, yang beberapa hasilnya penulis gunakan untuk tulisan ini, terutama untuk menjelaskan konstruk derajat kedua tentang perfilman Indonesia saat ini. Partisipan diskusi yang dipilih merepresentasikan target sasaran dari berbagai latar belakang. Sebanyak 13 undangan hadir, terdiri dari remaja laki-laki dan perempuan, dengan tingkat pendidikan SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Peserta tidak sepenuhnya saling mengenal satu sama lain dan tidak berasal dari komunitas yang sama. Perbedaan ini perlu untuk menjamin keragaman pendapat. Dalam tulisan ini, penulis hanya mengambil beberapa nara sumber dari kalangan pelajar SMA dan mahasiswa, mereka adalah partisipan yang aktif selama diskusi berlangsung. Merekalah pada akhirnya diperoleh berbagai kesimpulan tentang perfilman Indonesia. Sebenarnya, semangat nasionalisme yang ditunjukkan pada kecintaan film Indonesia kadang menjadi kabur oleh berbagai kondisi yang ditampilkan dari film-film asing.

### **Metode dan Kajian Pustaka**

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan tradisi fenomenologi sebagai pisau bedahnya. Secara sederhana, fenomenologi juga disebut sebagai ilmu tentang kesadaran manusia, karena ia berkaitan dengan fakta yang disadari dan masuk

ke dalam pemahaman manusia. Secara tegas, Kuswarno (2009: 1) mengatakan bahwa fenomenologi merefleksikan pengalaman langsung manusia, sejauh pengalaman itu secara intensif berhubungan dengan suatu objek. Mulyana (2006: 48) mengatakan bahwa fenomenologi memandang manusia sebagai bertujuan mengarahkan energi psikis dan pengalamannya untuk membentuk dunia yang bermakna dan bertujuan. Melalui studi fenomenologis, periset berupaya menemukan makna-makna pengalaman yang esensial, sentral, terstruktur mendalam dalam ruang batin manusia. Fokus studi fenomenologi adalah fenomena dalam kehidupan sehari-hari (*everyday life*): emosi (kesepian, kecemburuan, kemarahan), hubungan (pernikahan, kontrak kerja, ketetanggaan), program (rencana kerja, organisasi, bahkan budaya). Pendek kata, apapun fenomena yang memasuki kesadaran manusia, dan diyakini memiliki struktur ketika esensinya memasuki arus batin manusia. Beragam varian mengenai fenomenologi, pada dasarnya, terdapat kesamaan fokus di antara mereka yaitu fokus pada eksplorasi mengenai bagaimana manusia memahami pengalaman dan mentransformasi pengalaman menjadi kesadaran, baik pada level individu atau level sosial di mana kesadaran itu menjadi suatu *shared meanings*—makna bersama. Dibutuhkan suatu cara kerja yang metodologis, hati-hati, dan menyeluruh guna menangkap dan menggambarkan bagaimana orang-orang mengalami sejumlah fenomena—bagaimana mereka mempersepsi, menggambarkannya, merasakannya, menilainya, mengingatnya, memahaminya, dan membicarakannya dengan orang lain. Diperlukan teknik pengumpulan data berupa wawancara panjang dan mendalam (*long interview*) kepada 5 hingga 25 responden yang memiliki pengalaman langsung bersentuhan dengan fenomena tersebut (bukan *secondhand experience*). Data terkumpul kemudian akan dianalisis (dikembangkan bersama refleksi diri peneliti), dibagi-bagi menjadi protokol-protokol kelompok makna, kemudian dicari kesamaan struktur (*essential, invariant structure*) yang mendasari pengalaman-pengalaman tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengurai berbagai pengalaman sembilan orang anak muda tentang perfilman Indonesia (film sebagai objeknya). Film yang di jadikan objek penelitian adalah berupa film teatrical yaitu film yang diproduksi secara khusus untuk dipertunjukan di gedung-gedung pertunjukan atau gedung bioskop atau sinema (Effendi, 1993: 201). Sesuai dengan fenomenologi, maka sepanjang wawancara

yang berlangsung santai tentang berbagai film teatrical ini, penulis mendapatkan berbagai pandangan yang dimaksudkan untuk menjangkau sebanyak mungkin pengalaman dan pendapat partisipan tentang film Indonesia. Apa yang mereka rasakan selama menonton film Indonesia, bagaimana tanggapan mereka terhadap film-film Indonesia yang saat ini marak dengan tema horor, komedi bahkan sedikit mengandung unsur vulgar, dan sebagainya. Sejalan dengan temuan ini, kiranya sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Max Weber dalam teorinya Tindakan Sosial. Menurut Weber, tidak semua tindakan manusia di sebut sebagai tindakan sosial. Tindakan sosial merupakan perilaku manusia yang mempunyai makna subjektif bagi perilakunya (Kuswarno, 2009: 109). Lebih jauh uraian Weber ini diuraikan Mulyana (2006: 61), bahwa tindakan manusia pada dasarnya bermakna, melibatkan penafsiran, berpikir, dan kesengajaan. Apa yang disampaikan oleh para partisipan di atas mewakili semua yang diuraikan oleh Weber. Mereka menjelaskan alasan demi alasan atas pertanyaan tentang film yang penulis ajukan, maka pada saat itu berbagai penafsiran dan subjektifitas makna dikembangkan. Ada juga beberapa pendapat yang spontan seperti:

*"...Ga kayak film di Indosiar yang burung-burung gitu. Hahaha..."*  
(pendapat Topan tentang animasi di film)

*"... kalau kata saya tu perfilman Indonesia nggak berani banyak keluar modal"* (pendapat Sarah tentang sinematografi film Indonesia)

Talcott Parsons yang mengembangkan teori dari Weber beranggapan bahwa yang utama bukanlah tindakan individu melainkan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang menuntut dan mengatur perilaku itu. Kondisi objektif disatukan dengan komitmen kolektif terhadap suatu nilai akan mengembangkan suatu bentuk tindakan sosial tertentu. Ia juga beranggapan bahwa tindakan individu dan kelompok itu dipengaruhi oleh sistem sosial, sistem budaya, dan sistem kepribadian dari masing-masing individu tersebut. Hal ini menjadi jelas terlihat dari berbagai jawaban yang disampaikan oleh para partisipan. Tak bisa dipungkiri, bahwa sistem budaya (dalam makna yang beragam) sangat mempengaruhi variasi jawaban. Bahasa tubuh dan cara mengungkapkan jawaban tersebut. Sepengamatan penulis, partisipan dari kalangan mahasiswa lebih percaya diri dan santai ketika menyampaikan jawabannya di bandingkan siswa SMA, yang cenderung malu-malu dan "terlalu" memikirkan jawabannya.

## Pembahasan

Dalam perkembangan sejarahnya, film merupakan sebuah media massa yang dalam prakteknya mencangkok berbagai unsur dari teknologi dan unsur-unsur kesenian. Ada perbaduan antara teknologi fotografi dan rekaman suara juga komunal berbagai kesenian baik seni rupa, teater, sastra, arsitektur hingga musik. Kemampuan bertumbuh film sangatlah bergantung pada tradisi bagaimana unsur-unsur cangkokan teknologi dan unsur seni dari film yang dalam masyarakat masing-masing berkembang pesat- dicangkok dan dihimpun. Tidak tertinggal dan mampu bersaing dengan teknologi media, dan seni lainnya.

Sepanjang lima tahun terakhir, film-film yang sukses di Indonesia pada umumnya di angkat dari sebuah novel yang terlebih dulu sukses di pasaran. Sebut saja film dari novel *Laskar Pelangi*, *Sang Pemimpi*, *Ayat-Ayat Cinta*, *3 Hati, 2 Cinta, 1 Dunia*, dan *Negeri 5 Menara*. Ratusan halaman novel tersebut biasanya di tayangkan di sebuah film dalam durasi 90 menit hingga 120 menit. Seringkali banyak penonton yang tidak puas dengan film yang di sadur dari sebuah novel. Tentu saja ini disebabkan karena media keduanya berbeda, jika **Novel memiliki aspek detail yang lebih kompleks** dalam cerita karena diceritakan secara runtut melalui kata-kata hingga 400-an halaman. Film yang durasinya dibatasi belumlah bisa mencukupi mewadahi semua detail cerita yang ada di Novel. Hal ini tidak saja berlaku di tanah air, tapi juga pada film asing. Misalnya *Harry Potter*, *Twilight Saga*, *Breaking Down*, *Eat Pray Love* dan lainnya.

Kepopuleran cerita film dari sebuah novel ternyata menjadi alasan bagi para penonton film (terutama di Indonesia) untuk menontonnya. Kuantitasnya yang tidak banyak menyebabkan masyarakat juga kerap menonton berbagai tema film lainnya yang kadang sering penulis sebut dengan “film yang tidak penting”. Secara pribadi tentunya alasan ini muncul karena berbagai faktor, bisa ceritanya yang terlalu mengada-ngada, tidak rasional, pemerannya yang sengaja di pakai untuk dimanfaatkan ketenarannya sesaat, dan alasan lainnya. Dalam festival Film Bandung (FFB), film-film dengan tema yang “film yang tidak penting” menurut penulis tersebut ternyata juga menjadi bagian dari penilaian, seperti disampaikan oleh Eddy D Iskandar, penulis novel yang menjadi ketua panitia FFB 2011 ini:

*“Kami para juri cukup pusing menentukan film-film yang masuk kategori terpuji di FFB tahun ini, saking banyaknya film yang beredar di bioskop*

*kita. Semua film harus ditonton, termasuk film-film dengan judul yang “mengerikan” tersebut, karena FFB pada dasarnya menilai semua film yang tayang di gedung bioskop. Toh beberapa film dengan kategori terpuji muncul setelah dipilih dari berbagai film yang kami nilai kurang tersebut” (ngobrol dengan Eddy D Iskandar di Fikom Unisba, 19 April 2011).*

Alexandra Gutardo, pemeran utama di Film Tanah Beta yang juga mendapat penghargaan sebagai pemeran utama wanita terpuji di Forum Film Bandung, mengatakan bahwa *“meskipun sekarang film-film bertema horor komedi tersebut sedang marak, namun hingga saat ini belum berminat tuh untuk memerankannya, ga tahu nanti yaaa haha”* (berbincang-bincang Alexandra di Fikom Unisba, 19 April 2011).

Menarik kiranya mengkaji hal ini, terutama bagaimana tanggapan generasi muda terhadap perfilman Indonesia. Apakah mereka masih “mencintai” film lokal atau tidak?, dan apa alasan mereka menonton film Indonesia. Dalam proses penelusuran ini, pada tanggal 5 Mei 2010 lalu, penulis melakukan FGD terhadap sejumlah remaja di Jakarta, yang beberapa hasilnya penulis gunakan dalam makalah ini, terutama untuk menjelaskan konstruk derajat kedua tentang perfilman Indonesia saat ini. Partisipan diskusi yang dipilih merepresentasikan target sasaran dari berbagai latar belakang. Sebanyak 13 undangan hadir, terdiri dari remaja laki-laki dan perempuan, dengan tingkat pendidikan SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Peserta tidak sepenuhnya saling mengenal satu sama lain dan tidak berasal dari komunitas yang sama. Perbedaan ini perlu untuk menjamin keragaman pendapat. Dalam makalah ini, penulis hanya mengambil beberapa nara sumber dari kalangan pelajar SMA dan mahasiswa, mereka adalah yang aktif selama diskusi berlangsung. Selama wawancara berlangsung dengan para partisipan, Penulis memakai media perekam seperti tape recorder, kamera video, dan catatan, hasil rekaman akan ditranskripsi kata demi kata.

### **Makna Utama Preferensi Film**

Film merupakan tontonan yang dicari karena fungsinya yang menghibur, ia adalah bagian kehidupan sehari-hari kita dalam banyak hal, bahkan menurut Vivian (2008: 160) cara kita bicara sangat dipengaruhi oleh metafora dalam film. Kabar seputar film di tanah air sempat menghangat ketika akan diberlakukannya larangan bagi film asing tayang di Indonesia. Tak pelak lagi, hal ini menimbulkan pro dan kontra, baik di kalangan insan perfilman maupun masyarakat luas.



Tentunya pada tataran masyarakat tidak bisa dilepaskan dari selera terhadap film tersebut. Bicara soal selera dan pilihan, banyak masyarakat yang menggandrungi film barat dibanding dengan film produksi negeri sendiri. Terkait dengan wawancara dalam FGD yang penulis lakukan seputar minat kalangan muda terhadap film Indonesia, maka secara umum, partisipan lebih memilih film Barat daripada film Indonesia. Tentu saja ada alasan di balik pemilihan tersebut. Topan misalnya, ia menjelaskan jawabannya mengapa lebih suka film barat:

*“Mungkin jalan ceritanya ya, kalau film barat tu sedikit menarik. Kalau film Indonesia kadang-kadang di tengah-tengah aja pasti tahu endingnya kaya gimana gitu. Mungkin jadinya film Indonesia belakangan di banding film barat dipilihnya”* (transkrip FGD 5 Mei 2010)

Imam, mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta ini memilih film Barat dengan alasan yang tidak berbeda jauh dengan Topan:

*“Sama dengan Topan, dari judulnya juga sudah ketahuan ceritanya kalau film Indonesia. Kaya waktu tu, saya ma teman-teman lihat Koran Kompas, ada film yang judulnya “Di kejar setan”. Nahhh dari judulnya aja udah ketauan itu film pasti ceritanya di kejar setan. Kalau film barat kan macam-macam, kaya Up, waktu di putarnya juga, misalnya di tengah-tengah orang juga masih penasaran, ini endingnya gimana sih?. Kalau film Indonesia kan kebayang kan ya, apalagi yang sekarang-sekarang ini”* (transkrip FGD 5 Mei 2010)

Azmi, siswa SMA memilih menyukai film Barat karena jalan ceritanya lebih kompleks, misalnya film keluarga untuk anak-anak, jalan ceritanya juga kompleks serta banyak intrik-intrik di dalamnya. Pendapat serupa juga disampaikan Fadhil yang lebih suka film Barat karena ceritanya

Gita, meskipun masih memilih film Barat, namun alasan yang diberikan agak berbeda. Menurutnya:

*“Kalau film Barat tu ada adegan dewasanya tapi dia tu ga fulgar. Kalau film Indonesia nyerempet-nyerempet ke sana pasti jorok, gimana sih.. yaaa itulah. Tapi jalan ceritanya juga menarik kalau film barat. Kalau film Indonesia tu serem. Dikit-dikit pasti ke arah itu, terkesan jorok. Kalau film barat meski ceritanya begitu, tapi dikemasnya lebih bermutulah...”* (transkrip FGD 5 Mei 2010)

Jawaban yang sedikit berimbang di sampaikan oleh Adit,

*“Kalau saya sih bukannya ngebagus-bagusin film Barat, tapi kalau Indonesia tu bukan berarti film Indonesia tu jelek. Ada beberapa yang bagus, misalnya yang baru-baru ini. Contohnya nih film merantau. Itu*



saya pernah nonton kalau film itu bagus. Walaupun secara keseluruhan film Indonesia tu kurang menarik. Karena dia tu ngejar pasar bukan ngejar kreativitasnya. Kalau di film barat dia melihat nihh pasar lagi booming filmnya. Film-film cinta gitu tapi ada aja difilm barat nontonnya, dia nampilin film hantu ato juga film yang temanya yang beragamlah. Jadi dia tu ga peduli dengan wahhh pasarnya nih lagi ini, gw berarti bikin film kaya begini. Kalau Indonesia tu misalnya lagi musim film hantu, hantunya yang begitulah.. nahh.. kayanya semua. Yang mungkin kalau ya itu tadi tu, horror cabul jadi semua film bahkan kalau dilihat setiap minggu tu pasti ga jauh dari itu. Hantu puncak datang bulan, trus suster keramas, trus apa lagi. Suster ngesot 1..2..3 ada lo haha... Ya ada, karena mereka mengejar pasar.. rating, yaa rating, nahhh itu rating, jadi gitu deh. (transkrip FGD 5 Mei 2010)

Agung yang mengidolakan film-film garapan Rudi Sudjarwo memberikan jawaban lain “yahhh kalau saya sih tergantung. Film Indonesia juga banyak yang baik. Tapi lebih suka film Barat karena kalau film luar negeri ada sesuatu yang baru yang bisa diambil. Tapi kalau film Indonesia .....” (ia tidak meneruskan jawabannya dan hanya mengangkat kedua bahunya sambil tersenyum). Selengkapnya, alasan partisipan memilih film barat dari tabel berikut ini.

**Tabel 4.1. Film Barat vs. Film Indonesia**

Film Barat	Film Indonesia
Jalan ceritanya kompleks	Jalan ceritanya cenderung ringan
Ending cerita tidak mudah ditebak	Ending ceritanya SANGAT mudah ditebak
Judulnya singkat, tapi menarik, menjual. Contoh: Transformer.	Judulnya jelek, tidak memberi “misteri”, gampang ketebak. Contoh: Dikejar Setan.
Penggarapannya “serius”, berani mengeluarkan modal gede	Terkesan digarap tidak serius, asal murah aja.
Akting pemain film-nya tidak asal-asalan	Akting pemain film asal-asalan
Pesan moralnya jelas, memotivasi	Pesan moralnya nggak jelas, ngeselin
Kreatif dalam cerita dan visualisasi	Kurang kreatif, ceritanya banyak yang sama. Contohnya ya film hantu-porno tadi.
Teknologinya hebat, secara artistik keren	Teknologinya nanggung, kampungan
Unik, tema ceritanya bervariasi. Kalaupun itu-itu saja, tetap kemasannya beda.	Hampir sama satu sama lain. Suka mengekor.
Tidak vulgar, walaupun adegannya dewasa.	Vulgar, baik adegan dewasa maupun tidak. Contohnya ya film hantu, yang kerap porno
Realistis	Terlalu hedonis

Banyak hal bisa digali dari data tabel ini seputar film Indonesia dan film Barat, yang lebih menjanjikan kesenangan untuk ditonton. Secara keseluruhan, partisipan yang hadir dalam FGD ini, berapapun rentang usia dan apapun latar belakang pendidikannya, tampak sudah mampu memberikan pendapat yang kritis. Mereka mampu memberi penilaian pada aspek-aspek film seperti tema, plot, maupun sinematografinya. Film Barat yang pada umumnya lebih mengena di hati partisipan, adakah film Indonesia yang mereka anggap bagus? Jawabannya dapat dilihat pada tabel berikutnya.

**Tabel 4.2. Film Indonesia yang Dikategorikan Bagus**

Judul Film	Alasan
Mengejar Matahari	Bagus jalan ceritanya, tidak berlebihan, tidak hedonis.
	Rudi Sujarwo sutradaranya.
Laskar Pelangi	Jalan cerita diangkat dari kehidupan sehari-hari. Judul dan jalan cerita beda dengan tema film Indonesia pada umumnya.
	Menceritakan pendidikan di pelosok Indonesia.
	Memotivasi
Petualangan Sherina	Temanya disukai, yaitu petualangan anak-anak.
Joshua oh Joshua	Seru, rame
Sang Pemimpi	Memotivasi diri
Cinta Fitri	Akting pemainnya bagus, nangisnya beneran.
Emak Ingin Naik Haji	Memotivasi diri

Inilah ragam pendapat partisipan mengenai film-film Indonesia yang dikategorikan bagus, begitu berkesan, dan tidak terlupakan. Sebagian merupakan film yang ditonton ketika kecil, misalnya Petualangan Sherina maupun Joshua oh Joshua. Lainnya kebanyakan adalah film-film sekarang. Sebagian besar partisipan sudah memiliki visi tentang film yang baik, dan tampak konsisten pilihannya pada film yang berkualitas, seorang peserta menyebut sinetron “Cinta Fitri” sebagai film atau sinetron yang bagus karena akting pemainnya yang berkualitas. “*Kalau nangis, nangis beneran sampai berurai air mata, tidak sekedar netes-netes*”, kata partisipan ini, merujuk pada akting salah satu pemeran utama CF, Shireen Sungkar.

Merujuk pada berbagai pendapat di atas, maka sebenarnya ada beberapa aspek yang menunjang suatu film sehingga bisa dikategorikan sebagai film yang berkualitas. Effendi (1993: 226) menguraikan beberapa kriteria antara adalah:

1. Memenuhi tri fungsi film, yaitu hiburan, pendidikan, dan penerangan;
2. Konstruktif, terdapat muatan positif dalam cerita;
3. Artistik, etis, logis;
4. Persuasif, terutama untuk membangun *national and character building*.

Apabila keempat unsur di atas terdapat dalam sebuah film, maka menurut Effendi film tersebut sudah dikategorikan dalam film yang bermutu dan layak untuk di tonton. Permasalahan yang muncul di balik maraknya film-film yang tidak bermutu tentu saja terkait pada kepentingan bisnis. Laku atau tidaknya sebuah film sering menjadi pertimbangan lain alih-alih untuk tidak mengeluarkan film-film yang bermutu.

### Makna Penyerta

Mendukung makna utama di atas, maka penulis melengkapi dengan makna penyerta yang muncul sebagai turunan atau akibat adanya makna utama. Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara selama FGD berlangsung, maka ada beberapa motif yang menjadi alasan menonton film Indonesia. Beberapa faktor menonton film Indonesia bergantung ada hal-hal semacam ini.

**Tabel 4.3. Faktor Menonton Film Indonesia**

No	Alasan menonton film Indonesia	Motif Penyerta
1	Jalan ceritanya. Nggak seperti TV, cinta-cintaan melulu	<i>Content</i>
2	Ada pesan moral. Memotivasi.	<i>Content</i>
3	Aspek sinematografi secara keseluruhan	<i>Packaging</i>

Tabel di atas memperlihatkan, secara umum faktor-faktor yang memengaruhi partisipan untuk menonton film Indonesia terdiri dari dua aspek: *content* dan *packaging*. Untuk *content*, jalan cerita dan pesan moral yang terselip menjadi pertimbangannya. Untuk *packaging*, maka semua unsur sinematografi secara keseluruhan sangat berpengaruh. Jika ditanya mana di antara kedua unsur tersebut yang tampak paling dominan, maka jawabannya adalah *content*.

Film Laskar Pelangi atau Negeri 5 Menara misalnya adalah film sukses yang didasarkan pada *content*. Beberapa tokoh utama yang ada di film tersebut merupakan hasil casting dan bukan memakai aktor atau

aktris terkenal, namun film ini tetap diminati oleh masyarakat. Ada Apa dengan Cinta merupakan salah satu contoh film yang sukses karena *packaging*. Jalan ceritanya biasa saja sebagaimana cerita anak-anak SMA pada umumnya, namun ada Nicholas Saputra dan Dian Sastro yang dikemas menarik dalam alur cerita sehingga memberikan nilai lebih pada *content*. Pengemasan yang baik tersebut pada akhirnya juga akan mengangkat nilai sebuah film dan diminati oleh masyarakat.

### **Motif Content**

*At first place*, jalan ceritalah yang menentukan mengapa partisipan menonton film Indonesia, terutama untuk film-film yang juga sarat dengan nilai-nilai motivasi. Disampaikan oleh Azmi “Kalo bagi saya film Indonesia yang bagus itu adalah kalo ada pesan moralnya, trus ada motivasinya juga”. (transkrip FGD 5 Mei 2010).

Imam, penyuka film Mengejar Matahari ini mengatakan:

“ Film yang bagus tu kalau pesan moralnya bagus. Menurut saya Laskar Pelangi, tapi Sang Pemimpi kurang bagus karena digarapnya salah satunya. Saya sudah baca bukunya jadi begitu lihatnya kurang. Begitu dilihat wahhh ini digarapnya kurang, kecewa juga sih... (transkrip FGD 5 Mei 2010)

Di sisi lain, Gita menyukai film Indonesia yang bisa memotivasi, “saya menyukai film yang memotivasi, hmmm yang..., pokoknya yang mengejar impian kita, pokoknya yang bisa memberikan motivasilah, bikin semangat “. Hal serupa juga disampaikan oleh Sarah “kalau buat saya sih.. film yang memberi motivasi aja membuat kita semangat, suka sih film yang cinta-cintaan gitu suka, cuman gimana sih yaa lebih beda aja ya.. yang bikin kita semangat aja deh...”

Alasan menonton film Indonesia karena berbagai nilai dan keindahan cinta dalam ceritanya dipaparkan oleh Imam sebagai berikut:

“ Kalau menurut saya, film yang bagus itu yang temanya tentang kehidupan, tentang bagaimana dia menjalani hidup. Nanti di dalam tema kehidupan itu dikemas dengan selingan cinta. Ya karena kalau ga ada cintanya, ga ada unsur cintanya itu menurut saya kurang menarik. Kurang... ya kaya bumbu lah istilahnya hehe”. (transkrip FGD 5 Mei 2010)

## **Motif Packaging**

Tak bisa dipungkiri, bahwa unsur sinematografi menjadi pertimbangan penonton sebelum menentukan pilihan menonton atau tidak suatu film. Dalam penelitian ini, penilaian terhadap unsur sinematografi hanya dikeluarkan oleh partisipan mahasiswa, itu pun karena sang partisipan berlatar belakang DKV yang memang mempelajari hal-hal semacam itu, salah satunya adalah Agung yang menjelaskan:

“Kalau menurut saya secara keseluruhan dari sinematografinya, karena kalau sinematografinya enak maka akan mempengaruhinya. Yaaa mulai dari pengambilan gambarnya, sekalipun pesannya bagus tapi kalau sinematografinya ga bagus tetap ga bagus, harus mendukung semuanya”. (transkrip FGD 5 Mei 2010)

Topan yang menggemari animasi, mendukung pendapat Agung, menurutnya jaminan untuk bikin daya tarik penontonnya tersebut adalah kalau misalnya visualisasinya bagus, orang bakalan tertarik untuk menonton film. Topan mencontohkan beberapa film yang secara visual menurutnya bagus, diantaranya adalah film Harry Potter, Lord of The Ring, Transformer, Mission Impossible dan lainnya (tak ada satupun film Indonesia yang disebutkan menyimpulkan kecintaan Topan pada film Barat).

Dalam bahasa yang berbeda, Panji seorang siswa SMA kelas XII, yang mengidolakan Jacki Chan menguraikan makna sinematografinya berdasarkan pemahamannya:

“ Kalau saya sih suka film action, itu filmnya lebih menantang, kaya loncat dari gedung, naik motor yang ngebut tiba-tiba nabrak, nah itu tu membuat berkhayal gimana ya kalau gw disitu” (transkrip FGD 5 Mei 2010)

Pada umumnya, apapun filmnya, yang dikehendaki adalah peningkatan kualitas secara menyeluruh. Baik itu jalan ceritanya, maupun penggarapan aspek sinematografinya.

## **Simpulan**

Berdasarkan penelusuran data yang diekstraksi dari wawancara dalam FGD yang Penulis lakukan, maka dihasilkan kesimpulan berikut ini.

1. Berkenaan dengan film, apapun jenis film yang disukainya, tema film diharapkan lebih bervariasi dari yang sudah ada sekarang ini;
2. Partisipan lebih memilih untuk menonton film Barat;
3. Unsur romantis diharapkan ada dalam film remaja, apapun genre filmnya, namun film yang dinilai baik adalah film yang mempunyai nilai-nilai motivasi dan makna kehidupan;
4. Tingkat apresiasi terhadap film sudah cukup baik;
5. Ada dua motif besar yang menyertai makna utama, yaitu motif *content* (cerita dan motivasi) dan motif *packaging* (unsur sinematografi).

Hasil kesimpulan ini didasarkan pada FGD kelompok partisipan yang merepresentasikan atau mewakili keragaman populasi target sasaran. Generalisasi yang dihasilkan dari kesimpulan ini jelas tidak memenuhi klaim generalisasi statistik untuk populasi yang lebih besar. Kesimpulan ini dapat memberikan dasar bagi perusahaan untuk mengambil generalisasi kontekstual. Artinya, temuan FGD ini memberikan dasar atau landasan pengambilan keputusan yang lebih peka menyangkut target sasaran.

### **Daftar Pustaka**

- Effendi, Onong U, 1993, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kuswarno, Engkus, 2009, *Fenomenologi*, Bandung: Widya Padjadjaran.
- Mulyana, Deddy, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Vivian, John, 2008, *Teori Komunikasi Massa*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Transkrip FGD film remaja, Jakarta 5 Mei 2010.
- Wawancara dengan Ari Sihasale, Eddi D Iskandar, Alexandra Gutardo, Nia Zulkarnaen dan Azrul, Unisba 19 April 2011.

# **IDENTITAS PLURALISME MILITER DALAM SINEMA INDONESIA:**

## **Studi Terhadap Ethnographic Eksistensialisme Sejarah dan Makna Nasionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Film Trilogi “Merah Putih”**

**Ahmad Toni dan Rocky Prasetyo Jati**

### **Pendahuluan**

Sinema Indonesia dalam sejarahnya merepresentasikan nilai-nilai bangsa yang terkandung melalui pesan intrinsik maupun pesan ekstrinsik, sinema Indonesia berkaitan erat dengan sistem politik dan kekuasaan yang membentuk proses keterikatan sinema dengan sistem sosial dan budaya yang menyertainya. Proses ini menyurutkan segenap film-film yang diproduksi sebagai film yang menunjukkan nilai-nilai entertainment semata, namun sebagian lagi kemudian mampu mengusung nilai-nilai dan semangat kemajemukan berbangsa dan bernegara.

Saat ini sinema Indonesia masih didominasi oleh generasi teknologi digital sebagai *instrument* produksi untuk menghadirkan gambar gerak bersuara, detail antropologi bangsa ini terapresiasi lewat segenap karya mumpuni para sineas. Film-film yang diproduksi berdasarkan cerita nun jauh dari keramaian dan pertarungan politik justru menjadi film yang mampu berbicara banyak di kancah sinema internasional, seperti sederet film yang ditampilkan sutradara kenamaan Garin Nugroho dalam setiap produksinya: “Surat Untuk Bidadari”, “Cinta Dalam Sepotong Roti”, “Bulan Tertusuk Ilalang”, “Daun Diatas Bantal”, Puisi Tak Terkuburkan”, “Dan Bulan Pun Menari”, “Aku Ingin Menciummu Sekali Saja”, “Rindu Kami Padamu”, “Opera Jawa”, “Dibawah Pohon”, “Mata Tertutup”, dan segenap judul lainnya.

Garin dan karyanya disebut sebagai tokoh yang mampu menjembatani teknologi sinema Indonesia dalam dua zaman, zaman teknologi konvensional dengan segenap *instrument* teknologi perfilman yang masih konvensional dengan *instrument* produksi digital, kemampuan Garin dalam berkomunikasi lewat sinema telah diakui oleh dunia sebagai sutradara yang genius dan kritis melihat gejala sosial yang terjadi di Indonesia. Generasi digital melahirkan sineas-sineas muda yang mampu menghadirkan detail-detail sosial dan antropologi kebudayaan Indonesia dengan sisi yang lebih modern. Sutradara Riri Reza yang terkenal dengan karya-karyanya mampu menjadikan Indonesia sebagai bagian dari industri film yang sarat dengan nilai-nilai keindonesiaan. Sederet judul film yang dihasilkan Riri Reza ialah: "Petualangan Sherina", "Eliana", "Gie", "Untuk Rheina", "Tiga Hari Untuk Selamanya", "Laskar Pelangi", "Sang Pemimpi", dan lain-lain.

Sinema Indonesia dalam dimensi nasionalisme masih berada pada level yang sangat memprihatinkan, makna nasionalisme yang riil diusung dalam bentuk penyerahan jiwa dan raga untuk keutuhan bangsa dan negara. Konteks nasionalisme ini ialah nilai-nilai luhur bangsa dalam sejarah perjuangan bangsa. Nasionalisme dalam lingkung kesejarahan bangsa yang terjajah selama tiga abad lebih, sebuah bangsa yang tangguh untuk menentukan sendiri sejarah dan kehidupan rakyatnya, bukan bangsa yang mendompleng keinginan dan hegemoni bangsa penjajah. Nilai nasionalisme inilah yang jarang dan hampir terlupakan oleh sineas-sineas perfilman Indonesia, sebuah makna nasionalisme yang terlupakan oleh generasi saat ini untuk dihadirkan dan wujudkan dalam beerkesenian audio visual.

Sineas saat ini lebih mementingkan unsur hiburan daripada unsur kesejarahan kebangsaan yang begitu panjang dan berliku sebagai modal dalam produksi-produksi karyanya, hampir setiap saat dan setiap minggu para sineas menghadirkan film horror, hantu, sesualitas perempuan, pergaulan remaja, dan sejenisnya. Perkembangan film yang menghadirkan unsur sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang berabad seakan hanya sebagai memoriam dalam segenap benak insan bangsa yang berjumlah ratusan juta, sebuah kontras sejarah yang telah hadir dalam kehidupan nyata untuk melupakan akar rumput sejarah yang membentuk dan membesarkan negeri ini.



Ditengah gempuran kehadiran film-film tersebut seorang sutradara dalam produksinya mampu dan berani tampil dengan karya yang memukau, seorang sineas yang diberikan kesempatan dalam berkarya untuk mengaktualisasikan ide dan gagasannya diantara serbuan nilai-nilai kapitalisme perfilman Indonesia. Konsekuensi dan perdebatan pro dan kontra Yadi Sugandhi menghadirkan detail-detail sejarah bangsa dalam membangun nilai-nilai persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara dalam bingkai mata kamera sinema Indonesia lewat trilogi film yang diproduksi: “Merah Putih” yang mengusung nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme untuk mewujudkan kehadiran sejarah dan keberadaan militer sebagai bagian dari ketahanan nasional yang berafiliasi dengan berbagai konteks kehidupan.

### Film Sebagai Media Massa

Sejumlah teori komunikasi massa menempatkan film sebagai salah satu media yang dipergunakan dalam berbagai kajian dan ojek jenisnya, film bahkan dengan karakteristiknya yang bernuansa seni tinggi ditempatkan pada kerangka teori komunikasi massa yang tidak dibahas secara mendalam, berbeda dengan media radio dan televisi. Hal ini dikarenakan film jarang dihadirkan pada ruang *private audience* dan hanya diputar ditempat-tempat yang telah ditentukan, sejarah yang demikian menempatkan film sebagai sisi media massa yang jarang diulas secara detail dan menyeluruh dalam bingkai teori komunikasi, terutama komunikasi massa yang menonjolkan peran *audience* sebagai khalayak massa.

Keberadaan film justru lebih banyak dibahas sebagai sebuah bidang keilmuan seni, mengingat film menghadirkan sistem dramaturgi yang meliputi: *curiosity*, *suspense*, konflik, dan *surprise*. Sistem dramatisir ini dilakukan berkaitan dengan produksi film yang lebih menonjolkan unsur *dramatic* cerita dalam alur narasi yang dihadirkan. Film dijadikan sebagai wahana untuk memadukan dan proses harmonisasi bidang-bidang seni, seperti sastra, seni peran (*acting*), penyutradaraan, tata cahaya, audio, kamera (sinematografi), busana, dan lain-lain. Hal ini memunculkan proses ambiguitas film sebagai komunikasi massa dengan seni.

McQuail (2002: 33) menyatakan bahwa teori komunikasi massa ialah “karakteristik film sebagai usaha bisnis pertunjukan (*show business*) dalam pasar yang kian berkembang mencakup segenap permasalahan

film. Tema film dimanfaatkan sebagai alat propaganda. Pentingnya pemanfaatan film dalam dunia pendidikan didasari oleh pertimbangan bahwa film memiliki kemampuan untuk menarik perhatian orang (massa) dengan kemampuan film mengantar pesan secara “unik”. Winarso (2005: 40) “menggunakan konsep masyarakat massa memberikan ciri khalayak massa *heterogen* dalam komposisi, anggota-anggotanya berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, kelompok individu yang tidak mengenal satu sama lain, yang terpisah berdasarkan kekhususan, yang tidak dapat berinteraksi satu sama lain, tidak mempunyai kepemimpinan atau organisasi formal”. Terdapat semacam sinkronitas antara film dengan khalayak massa yang disebutkan diantara kedua pendapat diatas, secara konsep media massa diakses dan dinikmati oleh massa yang heterogen dalam konsepsi keberadaan dan fungsi media untuk mengantarkan dan distribusikan pesan.

McQuail (2000: 35-36) “film merupakan salah satu dari media massa, film berperan sebagai sarana komunikasi yang digunakan untuk penyebaran hiburan, menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama, dan sajian teknis lainnya kepada masyarakat”. Karakteristik film sebagai usaha bisnis pertunjukan dalam pasar sebenarnya belum mampu mencakup segenap permasalahannya. Dalam sejarahnya film mempunyai tiga elemen besar diantaranya:

1. Pemanfaatan film sebagai alat propaganda. Film ialah sebagai upaya pencapaian tujuan nasional dan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan pandangan yang menilai bahwa film memiliki jangkauan, realism, pengaruh emosional, dan popularitas. Bauran pengembangan unsur pesan dengan hiburan sebenarnya sudah lama diterapkan dalam kesusastraan dan drama (teater) namun unsur film jauh lebih sempurna dibandingkan dengan teater dari segi jangkauan penonton tanpa harus kehilangan kredibilitasnya;
2. Munculnya beberapa aliran film diantaranya drama, dokumenter, dokudrama dan lain-lain;
3. Memunculkan aliran dokumentasi sosial. Terdapat unsur-unsur ideologi dan propaganda yang terselubung dalam suatu film yang berasal dari fenomena yang tampaknya tidak tergantung pada ada atau tidaknya kebebasan masyarakat. Fenomena ini berakar dari keinginan untuk merefleksikan kondisi masyarakat.

Media film terdiri dari berbagai unsur di dalamnya, unsur-unsur tersebut seperti:

1. Bentuk, konsep ini berlandaskan pada cara media film membentuk produk-produk genre (jenis berdasarkan tema dan ceritanya). Film berpegang pada cara konstruksi berbagai kualitas seperti realis;
2. Narasi, konsep ini menempatkan diri pada aspek bentuk yang berkaitan dengan konstruksi cerita dan drama atau proses dramatisir. Narasi membentuk makna yang ada dalam suatu konflik yang dibangun atas tokoh-tokoh dan penokohan (perwatakan), adanya deprivasi sosial suatu rangkaian atau jalinan alur cerita dengan berbagai konflik yang menuju klimaks tanpa adanya pencopotan atas konflik yang terjadi;
3. Teks, konsep teks berhaluan pada semua produk media yang menenpatkan diri seakan-akan semua produk yang ada dalam frame kamera adalah sebuah buku yang sedang dibaca untuk dicari makna-maknanya;
4. Genre, genre termasuk konsep yang mengacu pada fakta atas sebagian besar produk media film yang terbagi ke dalam berbagai kategori atau tipenya;
5. Representasi, konsep media film untuk menunjukkan presentasi terhadap berbagai kelompok sosial yang dikategorikan dengan cara gender, umur, kelas sosial dan lain-lain;
6. *Audience*, konsep ini menaruh perhatian pada sejauh persepsi dan pengalaman sosial seseorang terhadap pembacaan materi yang diusung di film tersebut bergantung dengan tingkat pendidikan yang ditempuh oleh masing-masing;
7. Efek, efek meproporsi tentang bagaimana dan mengapa produk media mempengaruhi para *audience* baik secara aktif maupun pasif;
8. Institusi, ialah pada organisasi yang menjalankan dan mengontrol media sehingga institusi bisa memelihara kepentingan pemodal.

Nugroho (2001: 13) menyatakan bahwa “durasi film cerita (fiksi) pendek di bawah 60 menit. Film cerita pendek dijadikan laboratorium eksperimen dan batu loncatan bagi seorang dan atau sekelompok orang untuk kemudian memproduksi film panjang. Film dengan durasi lebih dari 60 menit disebut film panjang”. Film pertama kali lahir di paruh

kedua abad ke-19, dibuat dengan bahan dasar seluloid yang sangat mudah terbakar, bahkan oleh percikan abu rokok sekalipun. Sesuai perjalanan waktu, para ahli berlomba-lomba untuk menyempurnakan film agar lebih aman dan mudah diproduksi". Nugroho (2001: 30-39) menyatakan bahwa "dalam proses produksi kebutuhan shooting dengan melakukan perencanaan, sebagai berikut:

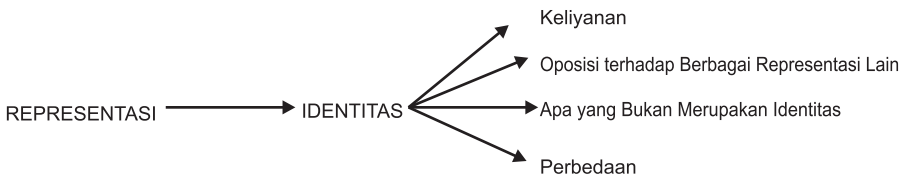
1. *Script Breakdown*, yakni berisi informasi tentang setiap adegan yang ada dalam film. Isinya meliputi; *date, script version date, production company, breakdown page no, title, page count, location on set, scene no, int or ext, day or night, description, cast, wadrobe, extras or atmosphere, make up or hair do, stunt, vehicles or animal, props, set dressing, sound effect, musik, special equipment, production notes*, dan lain-lain;
2. Jadwal shooting, yakni kumpulan adegan dan lokasi yang direncanakan berdasarkan waktunya.

Tim inti dalam film menurut Nugroho (2001: 60-65) dalam pembuatan film ialah sebagai berikut: produser, kepala departemen produksi sebagai penggerak produksi film, terdiri atas; *executive producer, Associate producer, producers, line producer*. *Director* (sutradara), yakni menentukan konsep kreatif tentang arahan gaya pengambilan gambar. Manajer produksi, yakni sebagai *coordinator* harian yang mengatur kerja dan memaksimalkan potensi yang ada di seluruh departemen. Desainer produksi (*art*), yakni mendesain dan membuat sketsa untuk memvisualisasikan setiap *shot*. *Director of Photography*, yakni merancang tata cahaya dan kamera berdasarkan atas arahan sutradara dan bagian lain.

### **Konsep Identitas dan Pluralisme dalam Militer**

Identitas menurut Briggs dan Copley dalam Burton (2008: 30) "adalah pemahaman tentang diri sebagai direpresentasikan oleh kontras dengan pihak-pihak lain dikaitkan dengan kekuasaan atau kekurangan kekuasaan". Burton (2008: 32) "Identitas adalah bagian dari makna-makna yang dimunculkan dengan merepresentasikan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dengan cara-cara tertentu. representasi tersebut, pada gilirannya, berasal dari ideologi, dari caranya memahami dunia, dan hubungan-hubungan kekuasaan". "Argumen identitas yang merupakan bagian suatu subkultur terpisah

yang dapat dikenali harus memproduksi hubungan yang bersifat perjuangan, jika bukan merupakan benar-benar oposisi terhadap budaya dominan tersebut” (Burton, 2008: 40).



**Gambar 4.1. Identitas**

Sumber: Burton (2008)

Representasi menyangkut persoalan dan pembuatan atas makna, dimana cara mengamati keadaan, individual melalui sistem berbagai konvensi sehingga cara pembuatan makna dibenarkan berdasarkan hasil konvensi tersebut. Berkaitan dengan konsep teori representasi ini sebagaimana dinyatakan Burton (2008: 41).“Berbagai pandangan (perspektif) tentang umur, ras, dan seterusnya yang berasal dari artikel tertulis, gambar-gambar dari komik dan film. Lebih bermanfaat untuk berpikir tentang representasi dalam pengertian verbal dan aktif”. Pandangan tentang representasi meliputi:

1. Sudut pandang, pada tahap ini representasi ditunjukkan oleh sudut pandang yang ditempatkan oleh kamera (*eyeline*) dan tahap mengintip (*voyeuristic*);
2. Hall (1997) mendeskripsikan representasi atas; reflektif dalam ranah kehidupan sosial masyarakat, intensional dalam ranah sudut pandang kreativitas seorang *creator*, konstruksionis dalam ranah bahasa kode visual;
3. Tatapan dan objektivikasi, jenis konstruksi mental, dan tindakan tatapan menyangkut gambar film;
4. Ideologi dan wacana, dalam hal ini merujuk kepada siapa yang berkuasa, bagaimana kekuasaan diterapkan dan nilai-nilai dominasinya;
5. Determinasi ekonomi, dilihat dari pemasaran secara khusus;
6. Posmodernisme, mencoba untuk merefleksikan realitas sosial terhadap ukuran mutlak representasi.

## **Konsep Pluralisme (Multikultural) Militer**

Agger (2009: 140) menyatakan bahwa “multikulturalisme adalah varian teori perbedaan, perbedaan manusia secara analitis lebih penting ketimbang kesamaan, multikulturalisme merayakan perbedaan sebagai suatu kerangka kerja yang ada didalamnya untuk menghargai banyak kelompok dan narasi khas mereka tentang pengalaman mereka”. Agger (2009: 141) “multikulturalisme memperbaiki politik identitas dengan mendorong setiap kelompok tertindas untuk mengisahkan pengalaman ketertindasan yang dialami kelompok lain. Multikulturalisme menjadikan pribadi sebagai agenda politik utama”. Hal inilah yang mencoba menjadi wilayah utama multikulturalisme melihat masyarakat yang baik dalam hal nostalgia citra plural. Pluralitas disini ialah mencoba memberdayakan kelompok minoritas dan melakukan penempatan identitas sama layaknya dengan kaum lain.

Pluralisme memperlakukan ras, kelas, dan semua kelompok anggota komunitas sebagai sebuah struktur penindasan yang bermakna besar daripada yang dilakukan atas dasar individual yang mempengaruhi dan mengubah pengalaman dan sejarahnya. Tingkat individu yang berusaha memproduksi aspek identitas sebagai bentuk representasi diri sebagai individu yang kuat diantara individu lain yang teropresikan. Pendekatan ini menunjukkan dan memperlakukan fenomena sosial sebagai nilai dan yang terkandung dalam karakteristik sosial tersebut yang meliputi ras, jender, agama, pendidikan, dan sebagainya. Dalam citra identitasnya, pluralism menekankan tentang politik identitas yang menunjukkan narativitas sebagai bentuk pengejawantahan dirinya, identitas tidak bisa dibentuk sebagai karakteristik perbedaan namun identitas lebih jauh mencoba untuk menghadirkan keragaman.

Keragaman (plural) adalah “sumber keragaman budaya, kehadiran lebih dari satu bangsa di dalam suatu negara tertentu, dimana ‘bangsa’ berarti komunitas historis, secara institusional menduduki suatu wilayah atau tanah tertentu, mempunyai bahasa, dan kebudayaannya sendiri” (Kymlicka, 2002: 14-15). Secara sosiologis masyarakat yang dibangun atas kebudayaan ialah dipertukarkan dengan masyarakat lain yang sama tertopang dengan kebudayaan yang dimilikinya, suatu pandangan tentang kaum minoritas, dan mayoritas yang sinergi dalam historisitas pembentukan bangsa. Pluralisme berusaha untuk menggabungkan secara bersama-sama historisitas kelompok-kelompok bangsa untuk

membentuk institusi sebagai tujuan dari identitas baru yang dibentuk berdasarkan makna-makna keberagaman yang dihadirkan lewat aspirasi secara bersama-sama. Historisitas suatu bangsa menjadi bangsa yang multi-bangsa diakibatkan oleh proses penjajahan yang panjang, penaklukan, imigrasi perorangan atau kelompok yang kemudian menghadirkan kompleksitas budaya, perspektif, etos, dan lain-lain.

Dalam sejarahnya militer Indonesia (TNI) terbentuk atas kesamaan nasib, berbagai suku dan bangsa di tanah air terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Belanda, Portugis, Jepang selama berabad-abad. Penderitaan yang melatarbelakangi sejarah penjajahan ini memunculkan rasa patriotism dan cinta tanah air, sehingga mempertahankan sejenkal tanah menjadi harga mati demi mewujudkan kemerdekaan. Militer di Indonesia berdiri sebagai pasukan dalam ekistensi bangsa merebut kemerdekaan dan persamaan hak dengan bangsa-bangsa lain.

### **Eksistensialisme Sejarah dan Makna Nasionalisme**

Sejumlah narasi permulaan munculnya suatu bangsa diberbagai belahan dunia dalam makna yang terkandung dalam sebuah cerita menunjukkan banyaknya perspektif dan konteks sosial masing-masing wilayah untuk menunjukkan jati dirinya sebagai bangsa yang tangguh dan besar pada masanya. Grosby (2011: 78-79) bahwa “legenda berkontribusi pada pembentukan gambaran hubungan wilayah yang memiliki batas teritorial dan durasi waktu, memformulasikan hubungan antara komunitas sejarah aktual ke tatanan persepsi dari alam semesta. Pembentukan bangsa-bangsa dalam sejarah ialah ekistensi legenda yang bersifat mitologi”. Grosby (2011: 80) menyatakan “eksistensialisme melalui sejarah secara luas dipahami mengikutkan legenda yang sedemikian rupa hingga mengaburkan perbedaan antara fakta dengan khayalan. Suatu bangsa dapat mengerti dan membentuk dirinya sendiri dan dengan demikian ialah berproses membentuk dirinya”.

Sejarah berusaha untuk menunjukkan diri sebagai daya tarik yang selektif pada aspek selektif di masa lalu untuk mempromosikan pemahaman tertentu dari masa kini dan tujuan utamanya ialah masa depan, sejarah tetap akan membawa kerumitan berupa pro dan kontra sebagai pemahaman di masa depan. Sejarah akan selalu menjadi sebuah ajang terjadinya ekistensi ketegangan dengan masanya, ketegangan yang dilakukan oleh sebuah tradisi dengan tradisi lain, oleh sebuah



orde dengan orde yang lain. Ketegangan yang ditopang oleh rasionalitas manusia yang tidak pernah terpuaskan dengan satu kesimpulan tertentu, dimana ketegangan muncul yang diakibatkan oleh suatu problematikan sebagai sebuah tuntutan baru dalam pelurusan sejarah, tuntutan yang diberikan kepada komunitas yang berkuasa secara sosial politik dan dominasi ideologi tertentu.

### **Makna Nasionalisme**

Beragam pemaknaan tentang nasionalisme dalam berbagai sumber dan literature dalam kesejarahan bangsa Indonesia. Anthony Smith dalam Corby (2011: 18-19) “lokasi kelahiran bangsa di dalam sesuatu yang berkelanjutan dari kelompok-kelompok kekerabatan. Elemen kekerabatan ini dimana ahli bangsa dan nasionalisme yang sangat produktif. Bangsa adalah komunitas kekerabatan, berbatasan secara spesifik, secara territorial luas, komunitas kelahiran yang erat untuk sementara waktu”. Nasionalisme juga sering diidentikan dengan patriotism, dimana patriotism apa yang dipahami sebagai milik seseorang merupakan bentuk pertanggung jawaban dan elemen konsekuensi dari obsesi dan keinginan diri secara berkesinambungan terikat dengan wilayah, baik secara fisik maupun kecintaan yang dimilikinya. Sebuah bentuk kecintaan seseorang terhadap bangsa yang telah membesarkannya.

“Istilah cinta yang dipakai secara meluas merupakan ekspresi kemelekatan dimana individu memilikinya terhadap bangsanya, kemelekatan ini menggambarkan sesuatu yang dipunyainya seperti kekasih, anak, teman dan Tuhan” (Corby, 2011: 21). Artinya, ada bentuk-bentuk ekspresi secara psikologis yang dimiliki oleh seseorang kepada tanah airnya, kewilayahan ini memberikan ikatan jiwa individu dengan nilai-nilai bangsanya. Nilai patriotism dan nasionalisme tidak mengenal adanya kompromi dalam hal bernegara dan berbangsa, dimana kompromi adalah politik yang mengubah pendirian nilai-nilai kecintaan terhadap tanah air dan antusiasme patriotik.

Tanah air ialah referensi yang ditujukan kepada bentuk image wilayah yang memiliki sebatas-batas yang telah diperjuangkan, yang kemudian menjadi identitas asal seseorang dilahirkan, dibesarkan oleh teritorial tersebut, penduduk asli tanah, rumah nenek moyang, secara nyata kata ‘tanah air’ merupakan representasi atas sumber kehidupan yang telah memberi seseorang kehidupan yang dilaluinya,



sebuah bentuk perwujudan pengakuan diri dan keterikatan diri seseorang dengan bumi yang telah diijakinya sejak dilahirkan yang harus dibela “elemen dari kedalaman waktu dalam hubungan territorial suatu tanah air nasional, dimana bagian dari diri diletakan ke dalam tanah air yang dipersepsikan sebagai nenek moyang”(Corby, 2011: 73).

## Metode Penelitian

Studi analisis isi bergantung atas beberapa validasi data atau dokumentasi yang dikategorikan. Sebagaimana dinyatakan oleh Deutschmann) “kategori-kategori; perang, pertahanan dan diplomasi, politik dan pemerintahan, kegiatan ekonomi, kejahatan, masalah moral masyarakat, kesehatan dan kesejahteraan, kecelakaan dan bencana, ilmu serta penemuan, pendidikan dan seni klasik, hiburan rakyat dan *human interest*” (Flournoy, 1986: 25-26). Edelman dalam Eriyanto (2004: 156-157) menyatakan bahwa “mensejajarkan framing dengan kategorisasi, kategorisasi merupakan abstraksi dan fungsi pikiran. Kategori, membantu manusia memahami realitas yang beragam dan tidak beraturan menjadi realitas yang memahami makna. Khalayak tidak sadar bahwa alam pikiran mereka dan kesadaran mereka telah didikte dalam sudut pandang tertentu sehingga tidak berpikir pada dimensi yang lain”. ECA Kriyantono (2010: 250) menyatakan bahwa “peneliti dihadapkan pada beberapa hal yang menyangkut sistematis analisis isi sebagai guide kategorisasinya antara lain: isi (*content*), *process* (pengemasan bentuk media), *emergency*, yakni tahapan pembentukan secara bertahap dari sebuah pesan melalui interpretasi”. Bungin (2010: 203) menyatakan dengan jelas bahwa “apapun jenis teks gambar, termasuk gambar bergerak (*moving image*), haruslah memperhatikan beberapa hal, antara lain: *context*, atau situasi sosial di seputar dokumen atau text yang diteliti, *procces*, produksi media atau isi pesan dikreasi secara aktual dan diorganisasikan, *emergency*, tahapan makna sebuah pesan melalui pemahaman dan interpretasinya.

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap objek penelitiannya yaitu teks (wicara), baik dialog maupun audio-visual film. Analisis isi konvensional yang secara tipikal difokuskan pada muatan isi teks film yang manifest, analisis yang dimaksudkan ialah menekankan semua isi pesan (teks), termasuk cara pengambilan gambar (*frame*), pencahayaan, tata artistik, tata suara, skenario maupun

istilah-istilah yang digunakannya dalam produksi film. Macam dan jenis analisis isi banyak dipakai untuk metode penelitian yang difokuskan pada penelitian surat kabar untuk melihat berbagai persoalan isi media, baik dalam bentuk kewacanaan, politik, sosial, religious, konflik, pluralism dan sebagainya. Sebagaimana dinyatakan oleh Burhan Bungin (2010: 203) “analisis isi media kualitatif lebih banyak dipakai untuk meneliti dokumen yang dapat berupa teks, gambar, simbol, dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu”.

Persoalan teks media, baik berupa teks tertulis, gambar, simbol dan sebagainya termasuk dalam perkembangan teks audio-visual, televisi maupun film yang terekam dalam bingkai kamera audio-visual. Bungin (2010: 203) menjelaskan bahwa “dokumen dalam analisis isi kualitatif adalah wujud dari representasi simbolik yang dapat direkam atau didokumentasikan, analisis isi untuk memahmai makna, signifikansi dan revelansinya”. David L. Altheide dalam Bungin (2010: 204) lebih suka menggunakan istilah *ethnographic content analysis* “untuk menjelaskan model penelitian analisis isi kualitatif. Istilah ECA (*ethnographic content analysis*) sebenarnya adalah perpaduan (*blend*) antara metode analisis isi objektif (*traditional notion of objective content analysis*) dengan observasi partisipan”. Kriyantono (2008: 249) “dalam ECA periset (peneliti) berinteraksi dengan material-material dokumentasi atau bahkan melakukan wawancara mendalam untuk mendapatkan konteksnya”.

### **Tinjauan Teks Sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia Dalam Film**

Film trilogi Merah Putih terdiri atas: “Merah Putih”, “Darah Garuda”, “Hati Merdeka”, sebagai tiga bentuk film panjang yang diaktori oleh Lukman Sardi, Donny Alamsyah, Darius Sinathrya, T. Rifnu Wikana, Zumi Zola, Astri Nurdin, Rahayu Saraswati, Atiqah Hasiholan, Alex Komang, disutradarai oleh Yadi Sugandhi. Film ini diproduksi oleh media desa yang diproduseri oleh Hashim Djojohadikusumo, Bob Allyn dan Jeremy Stewart sehingga film yang menampilkan detail antropologi sejarah penjajahan bangsa Eropa kepada bangsa Indonesia berabad-abad lamanya ini tidak diakui sebagai film produksi Indonesia dalam FFI, Festival Film Indonesia. Film ini menceritakan seluk beluk berbagai suku, ras dan tempat yang pernah menjadi sejarah kekejaman para penjajah yang dilatarbelakangi dengan perjuangan Jenderal Soedirman dan sejarah terbentuknya Tentara Nasional Indonesia.

Film ini diproduksi untuk menegenang wafatnya R.M. Subianto Djojohadikusmo (21-tahun) dan Kadet R.M. Sujono Djojohadikusumo (16-tahun) dan semua pahlawan yang telah berjuang sebagai tentara republik Indonesia yang gugur di medan perang. Film ini berusaha untuk memberikan stimulus kepada rakyat Indonesia untuk kembali merenungkan kembali niat dan nilai-nilai kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa yang besar ini. Film ini mencoba untuk menyegarkan kembali ingatan generasi muda yang sudah mengubah paradigmanya untuk hidup berbangsa dan bernegara. Sebuah tinjauan ulang makna nasionalisme yang diberikan oleh sejarah pahlawan pembela bangsa dan negara, tinjauan ulang dimana negara kini hanya dijadikan sebagai jembatan untuk menumpuk kekayaan dengan jalan korupsi, kekerasan kelompok dan arogansi-arogansi lain untuk menindas sesama anak bangsa. Negara yang besar ini dibangun bukan hanya untuk kelompok atau golongan tertentu semata, melainkan negara yang besar ini dibangun dan diberikan kepada segenap anak bangsa.

Eksistensi perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan menjadi rujukan dan referensi generasi muda untuk bisa belajar dan mengimplementasikan bilai-nilai luhur kemerdekaan untuk bisa hidup secara damai dengan suku, ras dan agama yang berbeda. Indonesia sebagai eksistensi sejarah ialah Indonesia yang majemuk atas nama kebhinekaan yang ika merupakan falsafah luhur yang diwariskan nenek moyang dari zama ke zaman untuk menghadirkan kebersahajaan hidup saling member, menghormati dan menunjung tinggi persamaan hak dan kewajiban. Sejarah bangsa yang telah memberikan konsep-konsep multikulturalisme bangsa ini.

### **Tinjauan Proses Sejarah TNI**

Film ini dimulai dengan sebuah adegan (*scene*) yang menggambarkan sebuah sekolah tentara rakyat ketika pertama kali dibuka di wilayah Jawa Tengah pada Juni 1947 atau dua tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Dalam tinjauan ini sejarah TNI terbentuk berdasarkan multikulturalisme, dimana ribuan golongan, ratusan suku, berbagai agama dan kepercayaan mencita-citakan suatu sistem kenegaraan yang mandiri yang diperoleh dengan perjuangan sendiri tanpa meminta kepada pihak yang dominan sebagai bangsa yang merdeka. Nilai-nilai kebersamaan ini menjadikan kekuatan yang besar dan tidak tergoyahkan

oleh kekuatan manapun, hal ini membuktikan bahwa, kemajemukan suatu bangsa bila dikekola dengan baik menjadi sebuah kekuatan yang dinamis untuk mewujudkan kemakmuran bangsa.

### **Identitas Bangsa Jawa dan Islam**

Sosok Kapten Amir ialah seorang guru sekolah yang religious dan dihormati oleh murid-muridnya. Ia seorang Jawa yang menjunjung nilai-nilai budayanya untuk bisa memberikan motivasi perjuangan kepada para muridnya. Wejangan motivasi yang ia berikan kepada para muridnya menjadi wujud nyata jiwa nasionalismenya untuk mempertahankan negara ini dari tangan penjajah. Ia berisiterikan seorang perempuan religious yang menjunjung nilai-nilai ajaran agama Islam. Kapten Amir tertantang hatinya ketika suatu ketika ditanya oleh mantan murid disekolahnya untuk kemudian terjun langsung di medan perang untuk merebut kemerdekaan bangsa sebagai modal untuk memajukan sekolah dan generasi mudanya.

### **Identitas Bangsa Bali dan Hindu**

Dayan seorang Bali yang datang ke sekolah tentara rakyat Indonesia untuk bergabung dengan pemuda-pemuda lain untuk mempertahankan bangsa ini. Dayan yang beragama Hindu mencoba menjadi seorang tentara yang selalu sabar dengan membawa nilai-nilai agamanya dalam kehidupannya. Dayan merupakan sosok religious sekaligus sosok keterwakilan suku yang mempunyai tekad untuk mempertahankan Indonesia melalui perjuangan sebagai prajurit. Sebuah bentuk representasi agama sekaligus suku Bali dalam kiprahnya untuk membela bangsa.

### **Identitas Bangsa (Sulawesi Utara) atau Bugis dan Kristen**

Thomas Lalamente seorang pemuda yang berasal dari Sulawesi yang berangkat ke Jawa untuk bergabung menjadi tentara rakyat Indonesia setelah keluarganya dibantai oleh Belanda di depan matanya, Thomas seorang Kristen yang sejati. Sosok Thomas menjadi perwujudan kritikan dan Indonesia Timur yang bergabung dengan Tentara Rakyat Indonesia menjadikan persoalan di dalamnya.

## **Identitas Priyayi Jawa**

Identitas priyayi Jawa yang direpresentasikan sebagai bentuk eksistensi keterwakilan kaum bangsawanan Jawa dinyatakan dengan tokoh Marius. Marius adalah sosok yang dilahirkan atas perkawinan campuran antara kaum bangsawanan Jawa dengan seorang berbangsa eropa sehingga menghantarkan mereka untuk melanggengkan kelas sosialnya. Marius yang diperlakukan oleh keluarganya dengan budaya eropa bangkit melawan untuk menjadi seorang pribumi asli. Sebuah pencarian jati diri sebagai seorang pribumi dengan belajar dari ketertindasan saudara-saudaranya dalam berbagai bidang, ekonomi, pendidikan, perlakuan, dan sebagainya.

## **Identitas Peranakan**

Surono (Zumi Zola) dan adiknya yang bernama Senja, merupakan generasi kedua dari sebuah pernikahan antara pribumi dengan bangsa eropa. Sebuah hasil perkawinan antar negara dan sebuah kelahiran sikap sosial yang menyudutkan keberadaan keluarga peranakan ini pada level kesinisan sosial yang terprovokasi oleh hasutan orang-orang yang iri melihat kemapanan yang dimiliki oleh keluarga ini, baik dari segi ekonomi, kelas sosial, pendidikan, dan lain-lain dibandingkan dengan pribumi. Surono dan yang berusaha untuk menjadi pribumi sesungguhnya kemudian mendaftarkan diri atau bergabung dengan sekolah tentara rakyat. Nasib memaksakan Surono harus tewas oleh sebuah serangan di malam kelulusannya sebagai tentara rakyat Indonesia. Nasib inilah yang membawa Senja untuk menjadi bagian tentara rakyat Indonesia.

## **Konstruksi Diri dan Pluralisme TNI**

Kekontrasan yang disajikan dalam pemahaman proses kekuasaan sebagai bentuk dari representasi yang dinyatakan bagi pihak-pihak terkait untuk membentuk jati diri pada pola-pola kekuasaan dan ataupun bentuk dari kekurangan kekuasaan. Kekuasaan dalam lingkup penanaman ideologi, perspektif, objektifikasi, dan konstruk mentalitas berbangsa dan bernegara sebagai identifikasi ketahanan nasional dalam mempertahankan kemerdekaan negara. Negara sebagai bentuk diri dalam proses kelahirannya menjadi bangsa yang merdeka, sejajar, dan mempunyai karakter diri terhadap pergaulan antar negara. Kekontrasan

pihak-pihak terkait dalam sistem bernegara merupakan identitas makna-makna yang ditopang oleh berbagai sendi-sendi kehidupan rakyat dan kelas sosialnya.

Makna yang dimunculkan oleh sistem kelas-kelas sosial, ras, agama, suku, golongan serta berbagai konstruksi nilai-nilai lain yang tumbuh dalam sistem, konstruksi yang melahirkan persamaan nasib, persamaan perjuangan, dan persamaan keinginan untuk merdeka melupakan segenap kepentingan diri, golongan, dan sukunya, nilai-nilai perjuangan mampu meruntuhkan egoism diri untuk menjadi yang terbaik, menjadi yang terkuat dan menjadi yang dominan. Cara-cara yang ditempuh dalam memperjuangkan nilai-nilai kebebasan dari keterjajahan oleh bangsa lain pada gilirannya berasal dari dasar-dasar nilai bernegara, yakni bhineka tunggal ika. Sebuah slogan dan sekaligus falsafah berbangsa Indonesia yang berlandaskan kepada berbagai lingkup antropologi budaya yang beragam. Keragaman yang menjadi nilai kekayaan yang tidak ternilai harganya, sebuah bentuk detail bahasa, adat, sosial, dan suku-suku yang tersebar di nusantara.

Masyarakat Indonesia dengan landasan pancasila dan bhineka tunggal ikanya ialah manifestasi diri dalam persatuan dan kesatuan negara, dengan cara masing-masing suku, ras dan golongan yang berbeda untuk sebuah wujud nyata realitas kemerdekaan. Identitas diri yang dimanifestasikan lewat perjuangan dengan segenap kekuatannya ialah suatu subkultural yang dimiliki oleh semua elemen bangsa, subkultural yang masing-masing terpisah dengan cara dan instrument yang berbeda pula, dan masing-masing memproduksi hubungan-hubungan yang bersifat perjuangan. Perjuangan untuk terbebas dari kekuatan asing untuk mewujudkan semangat nasionalisme bersatu padu menegakan diri sebagai bangsa yang besar yang tidak bisa diintervensi oleh negara lain dalam menentukan nahkoda kenegaraan dan berjuang mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan. Suku, ras dan agama merupakan elemen yang bukan merupakan oposisi, tetapi merupakan keragaman bentuk nilai dan budaya yang mampu memproduksi pluralisme dalam konsep-konsep perjuangan. Representasi pluralism merupakan reflektif elemen bangsa dalam ranah berkehidupan sosial yang matang, bermasyarakat yang majemuk dan bertujuan yang sama menghargai kemerdekaan sebagai hak setiap orang dan setiap bangsa.

TNI, dalam masa pembentukannya menjadi referensi sejarah multikulturalisme bangsa Indonesia yang dibangun berdasarkan nilai-nilai keragaman, kehadiran tentara rakyat Indonesia ditopang oleh kekuatan yang berbeda yang mampu bersatu, antara rakyat jelata, priyayi, peranakan, Islam, Kritten, Hindu, Jawa, Bali, Sulawesi, dan lain sebagainya sebagai representasi kemajemukan bangsa ini. Konstruks negara berdiri dengan TNI sebagai alat negara dalam rangka menegakkan kekuasaannya, TNI sebagai aparatus negara berusaha untuk mendekatkan diri dengan berbagai kelompok, golongan yang berjuang mempertahankan negara dengan cara yang berbeda, ada sejumlah adegan dalam film yang mencoba untuk menggabungkan beberapa perjuangan kelompok-kelompok masyarakat untuk mengusir penjajah dengan cara dan jalannya sendiri.

Film Trilogi Merah Putih ialah sebuah konstruks identitas TNI dalam merepresentasikan sejarah terbentuknya pertahanan negara yang dirintis oleh kekuatan sipil dan rakyat, sebuah eksistensi diri sejarah dan makna-makna nasionalisme. Pertahanan dan keamanan Indonesia menjadi sebuah terminology konsep diri TNI dalam mencari format-format nasionalisme di era reformasi yang telah berubah. Adanya serangkaian kasus bentrokan, di beberapa daerah di Indonesia seperti Sampit, Papua, Aceh, Mesuji, Ahmadiyah, Pemboman rumah Ibadah, perusakan masjid, gereja, menjadi tamparan bagi pihak-pihak terkait, yakni negara. TNI sebagai alat kekuasaan negara seharusnya menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap persoalan tersebut, di beberapa kasus, TNI dituding sebagai pihak yang hanya membantengi pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan, sementara rakyat diposisikan sebagai pihak lawan dan sekaligus musuh yang harus dilumpuhkan, diberantas dan dimusnahkan.

Ambiguitas TNI dalam mengkonstruks diri dalam misinya sebagai tentara yang manunggal dan sekaligus sebagai pihak yang bengis, haus akan darah rakyat. Ada semacam perspektif TNI yang mulai berpolitik terhadap persoalan oposisi golongan, kaum beruang yang harus dilindungi berdasarkan undang-undang dan kaum yang lemah sebagai mitra dan musuh yang harus diawasi, yakni rakyat. Sejarah TNI dibentuk ialah untuk mempertahankan kemerdekaan akibat ambisius Belanda untuk kembali menjajah Indonesia melalui kekerasan persenjataan. Sebagai bangsa yang bermartabat, melalui BKR (Badan



Keamanan Rakyat) yang selanjutnya menjadi Tentara Keamanan Rakyat menjadi tulang punggung alat negara untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dari pihak-pihak musuh.

Maka pada Juni 1947 film Trilogy dimulai dengan narasi alur penceritaan untuk mengenang berdirinya TNI sebagai manifestasi kekuasaan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat. Kemanggulangan TNI dengan rakyat pun mulai muncul ketika keberdaan TNI mulai diusik oleh pihak politik komunis, dalam kemanggunlangannya dengan rakyat, TNI pada tahun 1945-1949 menyatakan sebagai tahun perang rakyat semesta, dimana TNI dan Rakyat mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer dengan tujuan integritas wilayah kesatuan republik Indonesia dan eksistensi NKRI sebagai kekuatan bersama. Film Trilogy Merah Putih merupakan identitas dan sekaligus pernyataan patriotik TNI sebagai patner rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan negara, dimana detail identitas itu diwujudkan dalam bentuk-bentuk aksi dalam narasi ceritanya, TNI dalam peranannya ialah sebagai penegak kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, yang berdasarkan pada falsafah kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman dan rongrongan dari bangsa lain.

### **Eksistensi Nasionalisme Dan Makna Keluarga**

Eksistensi keluarga Djojohadikusumo ialah bentuk nyata representasi identitas keluarga dalam ranah mempertahankan kemerdekaan republic ini. Gugurnya R.M. Subianto Djojohadikusumo (21-tahun) dan Kadet R.M. Sujono Djojohadikusumo (16-tahun) merupakan bentuk gagalnya negara memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada segenap pahlawan bangsa, baik yang dihargai secara formalitas seremonial kenegaraan maupun bagi pahlawan-pahlawan yang sampai saat ini belum dan tidak dikenang jasanya. Ada semacam pembongkaran sejarah sebagai eksistensi nasionalisme, pembongkaran sejarah yang mencoba mengkritik Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi, serta mekanime negara yang terlalu berbelit-belit untuk mengakui jasa seseorang yang telah memberikan segenap kehidupannya untuk bangsa.

Media desa sebagai *production house* film Trilogy Merah Putih mencoba untuk menawarkan dua pernyataan lewat karya monumental tersebut. *Pertama*, pernyataan sebagai bentuk diferensial sejarah dalam



perspektif imajinatif semangat nasionalisme, sebuah historisitas bangsa yang mulai ditinggalkan oleh generasi mudanya, film ini membuktikan diri sebagai sebuah kritik, sekaligus tamparan bagi pemerintah, lembaga film dan semua elemen bangsa yang sudah melupakan sejarah bangsanya sendiri. *Kedua*, pernyataan sebagai bentuk eksistensi diri keluarga Djojohadikusumo sebagai bagian dari sejarah perjuangan bangsa dan sejarah lahir, dan perjuangan tentara rakyat Indonesia di awal berdirinya negara kesatuan ini. Terdapat semacam maksud pembuktian diri keluarga Djojohadikusumo sebagai keluarga pahlawan, sebagai keluarga patriotik, sebagai keluarga yang telah berjasa bagi negeri ini. Pengakuan ini ialah bentuk identitas keluarga, bentuk citra, bentuk orientasi diri dalam bermasyarakat dewasa ini, atau sebagai propaganda eksistensi keluarga Djojohadikusumo dalam percaturan kekuasaan dan politik Indonesia dewasa ini, bentuk propaganda media untuk melawan dan menjatuhkan lawan politiknya.

Persoalan politik identitas yang diusung oleh keluarga Djojohadikusumo di tengah perwujudan makna pahlawan yang ditekankan dan dibuat mekanisme bakunya oleh departemen sosial, dimana mekanisme seseorang dinyatakan sebagai pahlawan ialah dengan mekanisme politik undang-undang dan peraturan pemerintah yang tidak dan kurang menyentuh realitas makna pahlawan dan nasionalisme itu sendiri. Bentuk pangajuan seseorang oleh golongan menjadi pahlawan nasional, didukung oleh mekanisme forum dan tulisan ilmiah, menjadi sebuah mekanisme kepahlawanan berada pada ujung tinta para penguasa, bukan pengakuan dari realitasnya.

Eksistensi diri TNI dalam perspektif nasionalisme ialah: anggota TNI direkrut dari dan berasal dari warga negara Indonesia, hal ini direpresentasikan dalam beberapa adegan film yang digambarkan sebagai wujud nyata kebanggaan dan kebesaran pemuda-pemuda bangsa di era kemerdekaan. Sebagai tentara pejuang, maka perjuangan para pemuda bangsa yang tergabung dalam TNI pada jaman kemerdekaan selayaknya ditempatkan pada posisi terhormat dalam percaturan sejarah bangsa, termasuk pihak-pihak yang gugur dalam medan perang untuk dikenang jasa-jasanya. Eksistensi ini muncul ketika dua keluarga Djojohadikusumo berada pada pihak yang tersisihkan oleh sistem politik dan identitas kebangsaan.

Dalam terminologi kepentingan negara, TNI menjadi sumber utama kekuatan dalam pertahanan dan keamanan, ras, suku, golongan, agama, daerah, dan dinamikanya, karena TNI ditopang oleh kekuatan-kekuatan tersebut dalam mewujudkan kekuatan internalnya, TNI diwujudkan berdasarkan atas kepentingan-kepentingan ras, suku, golongan dan agama yang mempunyai misi sama, yakni mempertahankan kemerdekaan yang telah diraihinya, hal ini terwujud dalam kronologis alur penceritaan film *Trilogy Merah Putih*. Kosnep tersebut ialah menilik pada persamaan hak asasi yang menjadi cita-cita semua agama, semua golongan dan semua etnis manapun di dunia ini.

## **Simpulan**

Komunikasi militer dalam sistem sinema *Trilogy Merah Putih* mewujudkan eksistensi sejarah dan makna nasionalisme yang direpresentasikan sebagai identitas:

1. Perjuangan dan keberhasilan TNI dalam mengusir para penjajah dalam mempertahankan kemerdekaan pada saat Belanda melakukan agresi militernya;
2. Sinema dijadikan sebagai eksistensi sejarah gugurnya pejuang yang berasal dari keluarga Dojohadikusumo di wilayah Tangerang. Dimana negara tidak pernah memberikan apresiasi terhadap keduanya;
3. TNI pada dasarnya dibentuk atas dasar pluralism suku, ras, agama dan golongan yang menghuni bumi Indonesia;
4. Pluralism dalam media adalah bentuk manifestasi yang diproyeksikan sebagai bentuk kampanye kepada generasi muda untuk menghargai dan memahami nilai nasionalisme.

## **Daftar Pustaka**

- Agger, Ben, 2009, *Teori Sosial Kritis, Kritik Penerapan dan Implikasinya*, Kreasi Wacana: Yogyakarta.
- Bungin, Burhan, Ed, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.
- Effendy, Heru, 2002, *Mari Membuat Film, Panduan Menjadi Produser*, Yogyakarta: Jalasutera.

- Eriyanto, 2000, *Analisis Framing: Konstruksi Ideologi dan Politik Media*, Yogyakarta: LKis.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Tek Media*, Yogyakarta: LKis.
- Graeme, Burton, 2008, *Media dan Budaya Populer*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Grosby, Steven, 2009, *Sejarah Nasionalisme, Asal Usul Bangsa dan Tanah Air*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kriyantono, Rachmat, 2008, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kymlicka, Will, 2011, *Kewargaan Multikultural*, Jakarta: LP3ES
- McQuail, Denis, 2007, *Mass Communication Theory, An Introduction*, 3<sup>rd</sup> Edition, London: Thousand Oaks-New Delhi: Sage Publication.
- Nugroho, Heru, 2001, *Produksi Film*, Jakarta: Grasindo.
- Katalog Film Indonesia 2000-2006, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.
- Katalog International Women Film Festival 2010, Goethe Haus, Kineforum, Komunitas Salihara.
- Katalog Film Indonesia, 2009, Festival Film Indonesia.



# IMPERIALISME BUDAYA POPULAR K-POP DI KALANGAN REMAJA INDONESIA

Rahmi Surya Dewi dan Anggi Ayudia Arifano

## Pendahuluan

K-Pop adalah singkatan dari Korean Pop merupakan jenis musik populer yang berasal dari Korea Selatan yang berkembang pesat dalam negeri dan saat ini sudah merambah ke mancanegara, tidak heran Indonesia membuat hal yang serupa diberi nama I-Pop (Indonesia Pop). Ketertarikan terhadap musik K-Pop merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Demam Korea (*Korean wave*) di berbagai negara termasuk Indonesia. Aliran musik ini biasanya merupakan kelompok pemusik yang terdiri dari lima sampai sembilan vokalis yang diikuti dengan *dance* mereka. Ketenaran K-Pop ini membuat segala gaya atau model dari *fashion*, mulai dari gaya rambut, gaya berpakaian sampai aksesoris yang dipakai menjadi referensi bagi kalangan remaja atau anak muda yang terkena *Korean Wave* ini. Kelompok anak muda yang mudah terserang *Culture Wave* merupakan suatu fenomena yang menarik. Ada beberapa persoalan serius yang dapat dikaji. Apakah kelompok anak muda yang mudah terserang *culture wave* ini merupakan pertanda semakin tipisnya pengenalan dan pemahaman anak muda dengan budaya leluhurnya sendiri atau semakin tipisnya rasa kecintaan terhadap budayanya sendiri?

Begitu banyak remaja Indonesia yang mengidolakan *boyband* dan *girlband* termasuk film drama asal Korea. Di industri musik, Super Junior adalah pemimpin lahirnya *Korean Wave*, sehingga popularitas K-Pop menyebar hingga ke Eropa dan Amerika. "Demam" Korea ini juga membawa gaya hidup baru bagi kalangan muda seperti permak

tubuh dengan meniru habis orang yang diidolakannya. Fenomena ini sebenarnya hanya berlangsung dalam kurun waktu tertentu, Menurut pendapat Henni Norita dari Lembaga Psikologi Hikari, “budaya pop tersebut bersifat sementara yang datang silih berganti mengikuti perkembangan zaman”. Fenomena ini mengingatkan kita pada tren-tren sebelumnya yang juga melanda Indonesia seperti budaya pop China dan Jepang. Jadi sama seperti tren-tren sebelumnya, fenomena *Korean Wave* pun hanya berlangsung dalam kurun waktu tertentu” (beritasatu.com).

Persoalan ini menimbulkan suatu pertanyaan mendasar bagi kita, akankah Indonesia hanya menjadi *follower* saja, kapan saatnya Indonesia menjadi *trendsetter*. Kelompok-kelompok yang menjadi *follower* ini jika diamati secara mendalam, inilah kelompok yang resesif yang gampang terpengaruh bahkan meniru habis gaya dari orang yang diidolakannya. Mereka menerima secara penuh hal-hal baru yang disajikan oleh budaya pop tersebut. Kelompok inilah yang mungkin tidak memahami dan mencintai kebudayaan sendiri bahkan tidak mengenal identitas dirinya sebagai warga Negara Indonesia sehingga menjadi kelompok yang resesif, mudah mengikuti arus *trend* tanpa mampu membendungnya. Akibatnya, tidak muncul kreativitas untuk mengangkat citra budaya leluhur yang lebih dikenal dan dicintai orang di mancanegara. Contohnya kerajinan batik, salah satu identitas budaya Indonesia. Setelah adanya klaim dari Malaysia terhadap kerajinan dan kesenian Indonesia, barulah bangsa Indonesia mulai memperhatikan keberadaan warisan leluhur ini dengan mendaftarkan hak cipta Indonesia terhadap batik ke UNICEF. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran penerus bangsa Indonesia untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya leluhur masih minim.

Ketenaran budaya pop ternyata masih mengungguli keberadaan budaya asli Indonesia. Saat ini terdapat banyak *boysband* dan *girlsband* Indonesia seperti Smash, Max 5, Cherybelle, 7 Icons dan MR. Bee yang terinspirasi dari *boysband* dan *girlsband* Korea. Tidak hanya itu, acara-acara televisi pun mulai mengemas program acara serta penampilan pengisi acaranya yang sengaja menyerupai bintang Korea. Iklan-iklan yang ditayangkan di televisi saat ini pun mulai memasukkan unsur Korean Pop. Perubahan budaya ini tentu tidak terlepas dari pengaruh komunikasi massa. Korean Pop ini disampaikan melalui media massa televisi, internet, maupun media cetak. Dalam beberapa studi terdahulu yang menyangkut khalayak tampaknya cocok dengan interpretasi

media sebagai kekuatan pencipta integrasi. Hal ini membenarkan bahwa media merupakan alat untuk memperkuat nilai-nilai mereka sendiri, untuk melakukan kontak dengan orang lain dan kehidupan masyarakat. Media mendorong dan membantu menyebarkan sistem nilai pribadi yang menguntungkan bagi inovasi, mobilitas, pencapaian dan konsumsi (dalam McQuail, 1994:93-94).

Meminjam istilah Schiller dalam Dennis McQuail ( 1994: 99), fenomena *Korean Wave* ini lebih terlihat seperti “imperialisme kultural atau budaya”. Gagasan imperialisme “budaya” atau “media” adalah sederhana sekaligus rumit. Rumit dalam arti kata masih banyak perdebatan di seputar imperialisme budaya ini dan sulit menentukan apakah yang terjadi benar-benar imperialisme budaya, atau imperialisme media, karena tanpa media masyarakat tidak akan dapat mengakses atau melihat budaya-budaya asing yang masuk ke negaranya. Media memberikan dampak yang sangat besar dalam memperkenalkan budaya-budaya asing. Menurut John Tomlinson (Tomlinson, 1991: 20-28) ada empat cara melihat perdebatan masalah mengenai imperialisme kultural (budaya), yaitu:

1. Imperialisme kultural sebagai imperialisme media. Dalam pandangan ini media merupakan alat utama yang membentuk kondisi imperialisme budaya, namun Tomlinson mengkritik pandangan ini bahwa media bukan saja penghasil imperialisme budaya namun media pun bagian dari kebudayaan. Kenyataannya media yang berperan besar dalam penyebaran informasi tentang budaya K-Pop di seluruh dunia.
2. Imperialisme kultural sebagai diskursus tentang nasionalisme. Pandangan ini melihat adanya suatu “serangan” yang dilakukan oleh budaya asing secara terus menerus pada kebudayaan lokal di mana di dalamnya terjadi suatu proses untuk mempengaruhi kebudayaan lokal tersebut. Akibatnya pengikisan budaya lokal yang digantikan oleh budaya asing tersebut. Tomlinson juga mengkritik pandangan ini dengan mengatakan bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang dinamis dan berproses secara terus menerus dan tidak ada kebudayaan yang bisa menganggap dirinya paling natural dan lepas dari pengaruh pihak lain. Pendapat Tomlinson ini dapat diterima hanya saja proses akulturasi ditengah-tengah masyarakat berproses dalam kurun waktu yang cukup lama dan biasanya

akulturasi tersebut terjadi ketika adanya kontak person secara langsung. Sebaliknya Budaya populer yang terjadi saat ini hampir tidak ada kontak langsung dengan negara asal budaya populer dan berlangsung dalam kurun waktu yang sangat cepat.

3. Imperialisme kultural sebagai kritik terhadap perkembangan kapitalisme global. Pandangan ini berasal dari Marxis yang memusatkan perhatian pada kepemilikan industri media atau kebudayaan global, siapa yang mengontrol, dan mendistribusikan produk kebudayaan tersebut dalam pasar internasional.
4. Imperialisme kultural sebagai kritik terhadap modernitas. Pandangan ini melihat bahwa modernisasi sebagai arah utama perkembangan kebudayaan secara global menuju suatu keseragaman budaya ini merupakan hasil dari perkembangan kapitalisme, urbanisasi, komunikasi massa, ideologi dominan dari teknologi atau sains atau rasional, perkembangan budaya, bangsa, dan lain-lain.

Gagasan imperialisme budaya ini berasal dari teori dan bukti awal tentang peran media dalam pembangunan nasional (misalnya Lerner, 1958; Schramm, 1964) dan dalam perumusan ulang, secara kritis dilakukan oleh para penulis seperti Sciller, wells dan lainnya. Korelasi pandangan bahwa media dapat membantu “modernisasi” dengan memperkenalkan nilai-nilai “barat” dilakukan dengan mengorbankan nilai-nilai tradisional dan hilangnya keaslian budaya lokal. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa nilai-nilai yang diperkenalkan itu adalah nilai-nilai kapitalisme dan karenanya prosesnya “*imperialism*” serta dilakukan secara sengaja, atau disadari dan sistematis, yang menempatkan negara yang sedang berkembang dan lebih kecil di bawah kepentingan kekuasaan kapitalis yang lebih dominan (McQuail, 1994: 99).

Teori ini melihat bahwa orang-orang di negara dunia ketiga yang melihat media massa tersebut akan menikmati sajian-sajian yang berasal dari gaya hidup, kepercayaan dan pemikiran orang-orang Barat. Disamping itu, negara dunia ketiga tanpa sadar meniru apa yang disajikan media massa yang sudah banyak diisi oleh kebudayaan Barat tersebut. Saat itulah terjadi penghancuran budaya asli negaranya untuk kemudian mengganti dan disesuaikan dengan budaya Barat. Teori ini juga menerangkan bahwa sepanjang negara dunia ketiga terus menerus



menyiarkan atau mengisi media massanya berasal dari negara Barat, orang-orang tersebut akan selalu mempercayai apa yang seharusnya mereka kerjakan, pikir dan rasakan dan hal tersebut sama persis dengan apa yang dikerjakan, dipikirkan, serta dirasakan oleh orang Barat.

## **Budaya Pop**

Saat ini, budaya pop tampaknya tidak hanya menjadi dominasi negara Barat, namun Asia pun mulai menunjukkan kebolehnya dengan menjadi pengeksport budaya pop. Selain Jepang, Korea pun mulai tampil sebagai negara pengeksport budaya pop melalui tayangan hiburannya. Korea memanfaatkan dengan baik penyebaran budaya pop Korea sebagai media untuk peningkatan pemahaman budaya antar negara dan alat diplomasi. Korea menyebarkan pengaruh budayanya melalui drama, film, maupun musik Korea. Hal ini sejalan dengan kemajuan industri hiburan Korea dan kestabilan ekonomi mereka.

Merebaknya penyebaran budaya pop Korea di berbagai negara atau yang lebih dikenal dengan istilah *Korean Wave* ini berawal sejak tahun 1997 di Cina ketika drama televisi Korea, *What is Love All About* membuat hit besar setelah siarannya di *China Central Television Station* (CCTV). Tayangan ini tercatat menjadi peringkat kedua tertinggi yang pernah ada dalam sejarah televisi Cina. Semenjak itu, drama televisi Korea banyak diminati dan mendapatkan waktu pemutaran khusus di saluran televisi di negara-negara seperti Taiwan, Singapura, Thailand, Vietnam dan Indonesia yang terlihat mulai diliberalisasi pada 1990-an. Selain itu, krisis ekonomi Asia pada akhir 1990-an membawa sebuah situasi di mana pembeli Asia lebih menyukai pemrograman Korea yang lebih murah dibandingkan harga program televisi Jepang maupun Hong Kong sendiri. Angka ekspor program televisi Korea meningkat secara dramatis, pada tahun 2007 mencapai US \$ 150.950.000, dari US \$ 12,7 juta pada tahun 1999 (<http://www.kyotoreviewsea.org> diunduh pada 26 Maret 2012 pukul 20.50 WIB).

Musik pop Korea atau yang lebih dikenal dengan K-Pop juga merupakan bagian tak terpisahkan dari *Korean Wave* di berbagai Negara. Musik pop Korea pra-modern pertama kali muncul pada tahun 1930-an akibat masuknya musik pop Jepang yang turut mempengaruhi unsur-unsur awal musik pop di Korea. Penjajahan Jepang atas Korea juga membuat genre musik Korea tidak bisa berkembang dan hanya

mengikuti perkembangan budaya pop Jepang pada saat itu. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, pengaruh musik pop barat mulai masuk dengan banyaknya pertunjukkan musik yang diadakan oleh pangkalan militer Amerika Serikat di Korea Selatan.

Musik Pop Korea awalnya terbagi menjadi genre yang berbeda-beda, pertama adalah genre “*oldies*” yang dipengaruhi musik barat dan populer di era 1960-an. Pada tahun 1970-an, Genre lain yang cukup digemari adalah musik Trot yang dipengaruhi gaya musik enka dari Jepang. Selanjutnya musik rock di Korea diperkenalkan dengan pionirnya adalah Cho Yong-pil pada tahun 1970-an.

Era Cho Yong-Pil, kelompok musik Seo Taiji and Boys menandakan awal kemunculan era musik pop modern di Korea pada tahun 1992 memberi sentuhan berbeda yang menggabungkan musik rap, techno dan rock Amerika yang kemudian menjadi K-pop saat ini. Kesuksesan kelompok musik Seo Taiji and Boys juga menginspirasi grup musik seperti Panic dan Deux yang pada akhirnya juga mendulang kesuksesan dengan musik K-pop.

Pada tahun 1990-an musik pop yang berkembang cenderung terpengaruh oleh musik *dance* dan hip hop. Sasaran utama musik pop pada era itu adalah anak muda, sehingga dekade ini banyak grup “teen idol” yang bermunculan dan paling digandrungi seperti H.O.T, CLON, S.E.S, Sechs Kies, g.o.d. Banyak dari grup musik ini pada akhirnya bubar dan personilnya pun bersolo karir untuk mencari kesuksesan masing-masing.

Di tahun 2000-an pendatang-pendatang baru berbakat mulai bermunculan. Aliran musik R&B serta Hip-Hop yang berkiblat ke Amerika mencetak artis-artis semacam MC Mong, 1TYM, Rain, Big Bang yang sukses di Korea dan luar negeri. Berkat kepopuleran musik pop Korea atau K-pop di mata dunia, banyak artis dan kelompok musik korea yang menikmati kesuksesan di ranah musik internasional, seperti BoA yang mampu menembus pasar musik Jepang dan negara lainnya. Mereka berpacu dan bersaing untuk mememangkan pasar musik jepang dan Rain adalah artis Asia pertama yang sukses mengadakan konser internasional di Madison Square Garden pada tahun 2005 yang bertajuk Rainy Day (<http://www.google.co.id/> diunduh pada 26 maret 2012 pukul 21.00 WIB).

Banyak penggemar musik K-pop dari berbagai belahan dunia seperti

Amerika, Eropa, bahkan di negara Arab sekali pun membuat video amatir dengan melakukan lipping lagu-lagu K-Pop dan mengunduhnya di Youtube. K-pop di masa sekarang, lebih banyak didominasi *boyband* dan *girlband*. Sebut saja *Super Junior* dan *Wonder Girls* yang menjadi *icon* dan paling banyak diminati di dalam maupun di luar Korea. Ciri khas *boyband* dan *girlband* K-pop adalah memadukan unsur menyanyi dengan *dance*. Tarian *dance* ala Korea pun banyak ditiru oleh para penggemarnya.

Selain perpaduan musik, tari, dan suara yang keren, wajah tampan dan cantik ikut menunjang kepopuleran *boyband* dan *girlband* Korea. Menjadi seorang artis di Korea tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak hal yang harus mereka korbankan. Motto mereka “penggemar adalah segalanya”. Mereka berusaha menampilkan yang terbaik dan bahkan rela mematuhi kontrak untuk tidak pacaran atau bahkan menikah selama masih terikat kontrak demi menjaga perasaan para *fans*-nya. Artis Korea dituntut tidak hanya memiliki satu skill. Mereka juga dilatih untuk memiliki kemampuan akting plus nyanyi agar bisa bersaing di pasaran. Dari segi skill saja tidak cukup, mereka juga wajib memiliki nilai rapor di atas rata-rata bagi yang masih menempuh pendidikan dan menjaga agar nilai mereka tidak anjlok selama menjadi artis. Saat nilai sekolah anjlok, maka mereka harus bersiap-siap untuk dikeluarkan dari manajemen artis yang menaunginya. Inilah salah satu faktor yang membuat para remaja di seluruh dunia terutama Asia sangat suka dengan penyanyi Korea tersebut.

### **Demam K-Pop di Indonesia**

Demam K-Pop berawal dari masuknya pengaruh yang luar biasa dari budaya Korea. Ada yang mengistilahkan dengan sebutan *Hallyu* atau *Korean wave* (“Gelombang Korea”) yang bisa dimaknai menyebarnya budaya Pop Korea di seluruh dunia. Biasanya *Hallyu* atau *Korean wave* ini memicu seseorang untuk mempelajari bahasa Korea dan kebudayaannya, bahkan tidak hanya sekedar mempelajari tetapi sampai mencintai dan memakai produk-produk dari Korea. Hal ini juga terjadi di kalangan remaja Indonesia. Di Indonesia sendiri, fenomena K-Pop ini dirasakan sejak tahun 2000-an. Sebelum diterjang oleh gelombang Korea, Indonesia juga sudah diterjang lebih dahulu oleh gelombang India, Jepang, Eropa, dan tentu saja Amerika. Masyarakat Indonesia pun menerima hal tersebut dengan tangan terbuka, bukan hanya dramanya

saja yang dikenal di Indonesia, melainkan juga bahasa, produk, bahkan perusahaan-perusahaan Korea menjamur di Indonesia sehingga berbagai respon pun bermunculan menanggapi terjangan budaya asing di negeri kita.

Saat ini, bukan hal yang sulit untuk menemukan lagu-lagu maupun foto-foto bintang Korea di ponsel maupun komputer jinjing remaja Indonesia. K-Pop ini telah menggeser selera musik anak muda Indonesia dari musik pop khas barat maupun pop melayu yang sempat *booming*. Kefanatikan remaja Indonesia ini dibuktikan dengan banyaknya *fanclub* pecinta K-Pop di beberapa daerah yang terdiri dari remaja yang menyukai *boyband* atau *girlband* Korea tertentu. Mereka secara rutin saling bertemu dan berkomunikasi, saling tukar menukar informasi. Bahkan mengganti nama-nama panggilan mereka dengan nama-nama Korea. Cara bicara mereka juga unik, yaitu dengan menyelipkan istilah-istilah dalam bahasa Korea. Tidak hanya itu saja, mereka juga terobsesi untuk mempelajari bahasa Korea. Tak ketinggalan pula, segala atribut yang berlabel Korea menarik minat mereka, mulai dari produk-produk elektronik, alat *make-up*, *fashion*, restoran makanan khas Korea, festival budaya Korea menjadi incaran penggemar K-Pop tersebut. Mereka berusaha untuk menunjukkan identitas ke-Korea-an mereka lewat produk-produk yang mereka gunakan. Hasil pengamatan secara global dan wawancara dari beberapa orang remaja Indonesia yang terjangkau *Korean Wave*; berikut kutipannya:

Remaja pertama mengaku bahwa “.... saya mengenal tentang Korea pada tahun 2008, awalnya kenal video Gee nya SNSD, langsung suka sama Seohyun. Awalnya tertarik sama lagunya tapi setelah itu, penasaran sama Koreanya itu sendiri. akhirnya emang suka sama koreanya itu, mulai dari dancinya, lagu, makanan, tulisan, bahasa, stylenya, musik tradisionalnya, semuanya..sampai saya meniru dancinya SNSD (So Nyeo Shi Dae) sama 2PM, energik banget, lumayan untuk olahraga. Mengenai makanan Korea ada Kimbap (saya tau dari filmnya), sampai saya penasaran bagaimana rasanya dan mencari tau bagaimana membuatnya dan apa bahannya..”

Remaja ke dua, mengatakan bahwa mulai suka K-pop “.... sejak tahun 2010, mulai tahunya dari majalah. Pertamakali saya tertarik dengan Dance-nya, bermutu, berkualitas trus nyambung sama lagunya. Drama dan film Koreanya saya juga suka nonton, karena ceritanya ringkas,

jelas, mudah dimengerti, nggak bertele-tele, tidak seperti sinetron kita yang lebay, ceritanya bertele-tele dan sangat panjang..”

Dari pengamatan dan wawancara dengan beberapa orang remaja, rata-rata mereka mengaku suka dengan musik, *dance*, film bahkan makanan Korea, tidak hanya itu mereka ikut bergaya dan berpakaian seperti layaknya artis-artis Korea. Tak jarang dijumpai terkadang di layar komputer dan hp mereka sering memajang foto-foto artis Korea yang mereka idolakan. Terkadang yang membuat hati miris sebagian dari kalangan remaja kita tidak faham dengan budaya leluhurnya sendiri. Seandainya kenal dan tahu hanya sebatas yang umum saja tapi ketika ditanya secara mendalam, mereka tidak tahu. Wabah Hallyu atau Korean Wave ini akan memberikan dampak positif terhadap sektor lain seperti pariwisata, *fashion*, kuliner dan lain-lain yang akan dapat meningkatkan perekonomian dan bertambahnya devisa negara tersebut. Dunia akan tahu tempat-tempat pariwisata yang indah di Korea, melalui lokasi-lokasi syuting film-film mereka yang ditonton oleh khalayak, sehingga akan menarik perhatian para pelancong untuk mengujungnya. selain itu secara emosional ada muncul suatu kedekatan antara Korea dan turis yang pada akhirnya memunculkan rasa *sense of belonging*. Terkadang sering terdengar celotehan anak-anak remaja, kalau dulu mereka berkata akun ingin ke Amerika atau Jepang tapi sekarang aku ingin sekali ke Korea.

### **Imperealisme, Hegomoni melalui Musik Pop kepada Remaja**

Menurut Collen Roach, dalam sebuah artikelnya menyebutkan bahwa istilah *imperealisme cultural* banyak muncul tahun 1960-an terutama di negara Amerika Latin, dengan tulisan-tulisan dari Antonio Paquali, Luis Ramiro Beltran, Fernando Reyes Matta da Mario Kaplun. Belakangan sejumlah tokoh dari Eropa dan Amerika juga menggunakan istilah ini, misalnya Armand Mattelart, Herbert Schiller dan Dallas W. Smythe. Para penulis ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang dibawakan oleh Louis Althusser, Antonio Gramsci dan para pemikir dari kalangan Frankfurt School atau juga Mao Za Dong (dalam kasus Dallas W.Smythe). Roach mengatakan bahwa munculnya pemikiran-pemikiran ini berkaitan erat dengan fenomena ekspansi modal yang dilakukan oleh Amerika, ekspor besar-besaran dari produk industri kebudayaan dan industri budaya serta perkembangan komunikasi. Menurut Roach

(Roach, 1997:47-66) ada tiga pemikiran para tokoh penganut "*imperialism cultural*": pertama, perusahaan-perusahaan komunikasi dan industri kebudayaan ini mendukung ekspansi dari perusahaan transnasional secara umum; kedua, perusahaan-perusahaan ini memang merupakan perusahaan penting di dunia; ketiga, perusahaan-perusahaan yang sama ini adalah merupakan bagian dari *a military-industrial-cummunication complex*. (Sutrisno,dkk (ed), 2007:56). Singkatnya, struktur ekonomi kapitalisme juga dilengkapi dengan insudtri-industri kebudayaan dan struktur komunikasi.

Pada tahun 1973 Herbert Schiller melalui tulisannya yaitu *Communication and Cultural Domination*. Teori imperialisme budaya menyatakan bahwa negara Barat mendominasi media di seluruh dunia, termasuk Negara dunia ketiga. Pihak Barat hendak menguasai jiwa dari suatu negara lain. Jiwa suatu bangsa terletak pada kebudayaannya. Jika kebudayaannya dapat diubah, berubah pula jiwa dari bangsa itu. Pihak *imperialis* hendak melenyapkan kebudayaan dari suatu bangsa dan menggantikannya dengan kebudayaan Barat, hingga jiwa bangsa jajahan itu menjadi sama atau menjadi satu dengan jiwa si penjajah (<http://www.nurudin-umm.blogspot.com/> diunduh pada 26 Maret 2012 pukul 20.42 WIB). Menguasai jiwa suatu bangsa berarti menguasai segala-galanya dari bangsa itu. Imperialisme budaya ini sangat berbahaya karena masuknya gampang, tidak terasa oleh yang akan dijajah dan jika berhasil sukar sekali bangsa yang dijajah dapat membebaskan diri kembali, bahkan mungkin tidak sanggup lagi membebaskan diri.

Pada dasarnya K-Pop sendiri tidak terlepas dari pengaruh budaya Barat. Hal tersebut terlihat dari musik yang diusung beraliran R&B dan Hip Hop yang berasal dari Amerika Serikat, gaya berpakaian yang cenderung minim serta *dance* yang berkiblat ke Barat merupakan produk budaya Barat yang tidak mencerminkan adat ketimuran dan Korea itu sendiri. Budaya Barat ini kemudian dikemas dalam konsep yang baru dengan menggunakan unsur-unsur Korea seperti penyanyi dan bahasa asli Korea.

K-Pop kemudian menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Musik yang dinamis dan penampilan fisik serta *dance* yang atraktif menjadi daya tarik K-Pop di kalangan remaja. Banyak remaja Indonesia yang akhirnya menirukan *dance* Korea tersebut, serta berpakaian ala selebritis Korea. K-Pop ini secara tidak langsung juga

membawa suatu pemikiran yang mempengaruhi remaja Indonesia, salah satunya mengenai tipe pria ideal. Dulunya tipe pria ideal adalah seperti bintang Hollywood yang tampan, tinggi, hidung mancung, kekar, dan bermata biru, maka sekarang yang menjadi tipe pria ideal para remaja Indonesia adalah bintang-bintang Korea yang oriental, putih dan imut. Selain itu, *girlband* Korea juga mengindikasikan bahwa wanita ideal adalah wanita yang bertubuh langsing, berkulit putih, kaki jenjang dan berwajah tirus.

Keberhasilan Korea membentuk budaya K-Pop serta menyebarkannya ke seluruh dunia dipengaruhi oleh dua faktor; *Pertama*, faktor modal. Korea telah menjadi negara maju dan sejak tahun 1996 resmi menjadi anggota OECD. Kesuksesan industrialisasinya membawa pengaruh yang besar di Asia. Cina, Vietnam dan Indonesia adalah penerima investasi asing Korea dan pasar bagi produk-produk industri Korea. Ekspansi budaya umumnya mengawali atau mengikuti ekspansi ekonomi suatu negara dan menjadi salah satu strategi perluasan pasar; *Kedua*, Kemampuan teknologi yang tinggi. Dengan teknologi modern yang mereka miliki memungkinkan sajian budaya populer Korea diproduksi secara lebih baik dan meyakinkan. Hal tersebut dapat kita lihat pada kualitas video musik yang disajikan.

Seperti yang dijelaskan Rosselson (dalam Storey, 2008:121) bahwa industri musik menentukan nilai guna produk-produk yang dihasilkan. Lebih jauh, khalayak secara pasif mengonsumsi apa yang ditawarkan oleh industri musik. Hal yang paling buruk, mereka menjadi korban budaya yang secara ideologis dimanipulasi melalui musik yang mereka konsumsi. Inilah yang sedang menimpa remaja Indonesia. Korea berhasil mencuri perhatian remaja Indonesia dan melalui musik pop tersebut, negara ini secara tidak langsung memasuki jiwa remaja Indonesia dengan menawarkan budaya konsumtif. Betapa tidak, penampilan *boyband* dan *girlband* yang glamour dengan pakaian *full colour* dan menampilkan sisi remaja yang ceria menginspirasi remaja Indonesia untuk mengenakan hal serupa. Dampaknya, seperti yang kita lihat saat ini makin banyak remaja yang bergaya ala bintang Korea. Fenomena ini juga memicu banyaknya orang yang menjual pakaian khas Korea baik di dunia maya maupun nyata. Banyaknya toko-toko yang menjual pakaian tersebut tentu dipengaruhi banyaknya permintaan yang datang. Remaja berlomba-lomba menyerupai gaya bintang Korea yang diidolakannya,



meskipun terkadang gaya tersebut tidak sesuai dengan fisik dan kepribadiannya.

Storey (2008:126) menambahkan bahwa musik jenis pop mempertontonkan 'realisme emosional', lelaki dan perempuan muda mengidentifikasi diri mereka sendiri dengan representasi kolektif ini dan menggunakannya sebagai fiksi penuntun. Hall dan Whannel juga mengidentifikasi suatu cara yang dengan itu para anak usia belasan tahun menggunakan cara berbicara tertentu, tempat nongkrong tertentu, cara menari tertentu, cara berbusana tertentu untuk memperlihatkan jarak dengan dunia orang dewasa. Melalui sajian musik korea serta program televisi yang menayangkan informasi seputar *boyband* maupun *girlband* Korea, para remaja mengimitasi sikap maupun perilaku idola mereka. Di samping itu, para remaja juga mengidentifikasi nilai-nilai yang dibawa para idola. Di Korea nilai-nilai hidup seperti disiplin, kerja keras, serta sopan santun ditampilkan melalui tayangan program yang membahas seputar bintang Korea tersebut. Contohnya, yang menjadi *leader* pada *boy band Super Junior* adalah Leeteuk yang usianya paling tua dibanding personil yang lain. Para personil Super Junior lainnya sangat menghormati Leeteuk dan berbicara dalam bahasa yang formal. Bagi kebanyakan remaja Indonesia, sopan santun yang dimiliki orang Korea menginspirasi mereka untuk meyakini hal serupa dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Padahal sesungguhnya nilai-nilai tersebut juga merupakan nilai-nilai dasar yang dimiliki bangsa Indonesia. Semenjak di bangku sekolah dasar, kita sudah diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua serta menyayangi yang lebih muda. Bangsa kita juga dikenal dengan keramahannya, namun nilai-nilai tersebut kurang tertanam dalam diri masyarakat Indonesia, terutama remaja.

Meluasnya demam K-Pop ini tidak bisa dilepaskan dari peran media massa, baik secara sadar maupun tidak, telah membantu terjadinya aliran budaya ini. Bahkan bisa dikatakan bahwa dengan media massa-lah K-Pop memasuki semua sudut negara-negara Asia termasuk Indonesia. Media jejaring sosial yang sedang berkembang seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Youtube* merupakan media yang berperan besar dalam penyebaran demam K-pop. Hal ini membuat para idola semakin dekat dengan penggemar mereka yang berada di luar Korea. Agensi musik mereka pun juga membenarkan dengan adanya *Youtube* sangat membantu menyebarkan kiprah sang idola ke berbagai negara.



Kepopuleran Youtube di dunia dapat menyebarkan video klip musik terbaru dari idola mereka. Dengan adanya Youtube, idola K-Pop banyak yang memiliki penggemar dari seluruh dunia.

Selain media jejaring sosial, televisi, radio maupun media cetak juga memegang peranan penting dalam mengarahkan minat remaja terhadap K-Pop. Saat ini, stasiun TV Indosiar mulai menayangkan siaran ulang Music Bank dari Korea yang merupakan acara musik yang menampilkan *boy band* dan *girl band* Korea. Disamping itu, program musik di radio juga mulai memutar lagu-lagu Korea, karena permintaan lagu-lagu K-Pop mulai meningkat.

Peran media massa dalam menyebarkan demam K-Pop ini sesuai dengan teori imperialisme budaya dimana media dapat membantu 'modernisasi' dengan memperkenalkan nilai-nilai 'barat' dengan mengorbankan nilai-nilai tradisional dan hilangnya 'keaslian' budaya lokal (McQuail, 1997: 99). Media dilihat sebagai kendaraan bagi pemasaran korporat, memanipulasi penonton dan menjadikan mereka sebagai pemasang iklan (Barker, 2009: 299). Pada fenomena K-Pop, media menjadi sarana utama bagi penghasil K-Pop untuk memperkenalkan budaya populer Korea tersebut dan sekaligus menyebarkan nilai-nilai budaya Korea ke seluruh dunia. Melalui video musik maupun video *variety show* yang menampilkan bintang Korea yang diunggah di media jejaring sosial, remaja menjadi tahu lebih banyak tentang idolanya. Dari sanalah mereka mengetahui kegiatan maupun karakteristik idolanya. Beberapa hal yang tidak lazim di Indonesia secara terbuka diinformasikan di dunia maya, seperti adanya bintang Korea yang mengoperasi plastik wajahnya hingga penyanyi yang tidak mempunyai kepercayaan atau Atheis. Dua hal tersebut jelas tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Di Indonesia, salah satu isi dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti masyarakat mengakui adanya Tuhan dan dalam salah satu agama yaitu Islam melarang kegiatan operasi plastik. Bisa dibayangkan bagaimana jika remaja Indonesia terus menerus mendapatkan informasi seperti ini terutama dari idolanya, tentu dua hal diatas menjadi suatu yang lazim dan mengubah cara pandangnya.

Efek budaya K-Pop yang kuat sangat mengesankan bagi media di Indonesia. Sehingga mereka ingin meniru budaya yang muncul lewat media tersebut. Hal ini terlihat dari mulai menjamurnya *boy band* dan *girl band* di Indonesia yang terinspirasi dari K-Pop seperti Smash, Seven

Icon, Cherrybelle, S9B, Hitz, dan masih banyak lagi. Kehadiran *boyband* dan *girlband* di Indonesia ini mengesankan bahwa bangsa kita tidak bisa menciptakan hal yang baru, melainkan hanya menjadi *follower*. Hal ini sungguh menyedihkan mengingat bangsa kita sebenarnya sangat kaya akan keanekaragaman budaya terutama jenis music yang bisa dieksplorasi sehingga menjadi ikon bangsa Indonesia di mata dunia. Namun keunggulan budaya K-Pop ternyata lebih menarik hati penikmat musik di Indonesia terutama remaja.

Dalam perspektif teori ini, ketika terjadi proses peniruan media negara berkembang dari negara maju, saat itulah terjadi penghancuran budaya asli di negara ketiga, dalam hal ini Indonesia. Dampak selanjutnya, masyarakat Indonesia akan menikmati sajian-sajian yang berasal dari gaya hidup, kepercayaan dan pemikiran yang berasal dari budaya Korea tersebut. Bangsa Indonesia tanpa sadar meniru apa yang disajikan media massa yang sudah banyak diisi oleh budaya populer Korea tersebut.

Imperialisme budaya ini menjadikan 'korbannya' tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan bagaimana mereka berpikir, apa yang dirasakan dan bagaimana mereka hidup. Umumnya, mereka cenderung mereaksi apa saja yang dilihatnya dari media. Akibatnya, remaja-remaja itu lebih senang meniru apa yang disajikan televisi. Tentu kita tidak ingin bangsa yang kaya akan potensi budaya ini harus tergerus oleh kehadiran budaya luar.

Media dalam hal ini sedang melakukan proses yang disebut Gramsci dengan hegemoni kultural, yaitu proses penciptaan, pemeliharaan, dan reproduksi serangkaian makna dan praktik otoritatif terhadap remaja (Barker, 2009: 278). Media yang menyajikan budaya K-Pop tengah menyajikan pandangan baru bagi para remaja tentang gaya hidup dan konsep diri. Korea menekankan ideologinya tersebut untuk mempertahankan serta mengembangkan keberadaannya melalui kepatuhan anak muda sehingga upaya tersebut berhasil mempengaruhi dan membentuk alam pikiran mereka. Gaya hidup yang ditawarkan oleh budaya K-Pop ini sendiri antara lain operasi plastik. Tidak sedikit penyanyi Korea yang mengoperasi beberapa bagian wajahnya untuk mendapatkan bentuk wajah sempurna. Di Korea sendiri, ternyata penampilan merupakan salah satu faktor utama seseorang meraih kesuksesan dalam karirnya, tidak hanya di dunia hiburan saja. Banyak

wanita muda yang berbondong-bondong memperbaiki bentuk wajahnya dengan operasi plastik. Dampaknya, saat ini Korea menjadi pusat operasi plastik terbesar di Asia. Disamping itu, tipikal remaja yang menarik yang ditanamkan oleh budaya K-Pop adalah remaja yang berwajah imut, kulit putih, langsing, pandai menyanyi dan menari, pekerja keras, serta menghargai yang lebih tua. Bintang idola yang memenuhi kriteria itulah yang dijadikan panutan para remaja dalam mengidentifikasi diri. Identifikasi diri terjadi ketika seorang remaja mengambil perilaku yang berasal dari sosok idolanya karena perilaku itu berkaitan dengan hubungan yang mendefinisikan diri secara memuaskan dengan idolanya tersebut.

Sosok idola hanya memegang sebagian kecil pengaruh dalam proses pembentukan identitas sosial seorang remaja. Suatu identitas sosial seseorang remaja terbentuk dari sumber daya seperti bahasa dan praktik kultural, serta karakter sosial, sehingga terciptalah suatu ciri khas yang membedakan seseorang dari budaya yang satu dengan budaya lainnya, seorang remaja Indonesia dengan remaja Korea.

Pertanyaannya sekarang adalah, sudah jelaskah perbedaan identitas sosial seorang remaja Indonesia dengan remaja Korea? Hendaknya ini menjadi pemikiran kita, bahwa imperialisme budaya di era globalisasi ini benar-benar telah mematikan kesadaran budaya anak bangsa. Para generasi muda yang nantinya diharapkan dapat menjadi pejuang bangsa ternyata lebih menyenangi budaya populer buatan luar negeri. Bagaimana kita dapat memperjuangkan masa depan bangsa jika anak bangsa sendiri lebih mencintai budaya orang lain. Bisa kita lihat, bagaimana membludaknya remaja yang hendak menyaksikan konser *boy band* atau *girl band* Korea yang harga tiketnya mencapai jutaan rupiah daripada menyaksikan pagelaran seni budaya di panggung teater yang bahkan tidak memungut biaya. Para remaja lebih banyak tahu dengan lagu Korea daripada lagu daerahnya sendiri. Begitu mudahnya imperialisme budaya berkembang di Indonesia melalui budaya populer yang cepat sekali menarik perhatian.

Imperialisme budaya bukanlah suatu yang main-main, karena ini menyangkut jati diri bangsa yang dimatikan melalui budaya populer yang diusungnya. Lambat laun, remaja yang sedang berproses mencari jati diri dapat kehilangan identitas sosialnya sebagai anak bangsa Indonesia. Penanaman rasa cinta terhadap budaya sendiri merupakan

pekerjaan rumah yang utama bagi orang tua dan keluarga. Sebab, melalui keluarganya, seorang remaja menginternalisasi nilai dan peran sosialnya. Pengenalan jati diri bangsa melalui budaya kepada anak akan membentuk konsep dirinya, bagaimana seorang anak memandang hidup berdasarkan nilai-nilai yang ditanamkan oleh lingkungan sosial budaya anak tersebut. Seorang anak mendapatkan pemahaman mengenai budaya bangsanya, maka ia akan memiliki prinsip hidup yang tidak akan goyah meskipun diterpa budaya populer yang datang dari manapun karena ia percaya pada nilai-nilai luhur yang ditanamkan oleh keluarga. Dalam hal kegiatan-kegiatan mahasiswa atau ekstrakurikuler dapat menjalin kerjasama dalam mengangkat acara kesenian dan kebudayaan antara dua Negara (katakanlah Indonesia dan Korea). Dalam acara tersebut masing-masing bisa memperlihatkan kesenian dan kebudayaan masing-masing Negara. Masing-masing Negara juga punya kesempatan untuk mengenalkan budaya dan seni negaranya sekaligus menyaksikan seni dan budaya Negara lain.

Di samping itu, agen sosialisasi yang memegang peranan penting bagi seorang remaja dalam membentuk identitas sosialnya adalah guru. Hampir setiap hari guru berkomunikasi dengan muridnya. Intensitas komunikasi tersebut memungkinkan nilai-nilai yang ditanamkan guru dapat memasuki diri muridnya sehingga berperan besar dalam pembentukan identitas sosial seorang remaja. Pendidikan yang diberikan guru seharusnya menjadi sarana penyiapan kader bangsa dan salah satu pusat kebudayaan. Disamping itu, kesenian juga harus menjadi media pengekspresian jati diri dan falsafati. Jangan sampai pendidikan dan kesenian hanya menjadi ladang komersialisasi. Jika terjadi komersialisasi pendidikan dan kesenian, maka pendidikan dan kesenian hanya akan menjadi milik orang kaya, sedangkan mayoritas rakyat yang sangat membutuhkan perbaikan hidup, tegaknya keberdayaan dan kedaulatan serta keadilan, akan semakin tercampak pada kesengsaraan, kebodohan, dan kenestapaan (<http://web.budaya-tionghoa.net/> diunduh pada 26 maret 2012 pukul 20.54 WIB).

Kesimpulannya, untuk melawan dan menghadapi serangan-serangan imperialisme budaya terhadap keyakinan dan semangat nasionalisme remaja Indonesia maka terlebih dahulu remaja harus mengenali dengan baik budaya dan nilai-nilai bangsa yang telah mengakar. Penanaman rasa cinta terhadap budaya lokal semestinya dimulai dari

keluarga dulu, dalam hal ini orangtua sebagai agen sosialisasi pertama. Setelah itu baru dari kalangan pendidik dalam hal ini guru sangat berperan penting dalam pembentukan jati diri anak remaja dan tentu saja peran teman sebaya sebagai agen sosialisasi dimana seseorang mendapatkan nilai-nilai baru melalui pergaulannya. Dengan demikian mereka mengetahui bahwa identitas mereka yang sebenarnya berada dalam penjagaan nilai-nilai yang penuh makna dan peradaban asli mereka. Di tahap selanjutnya, seorang remaja harus mulai mengenali tipu daya dan propaganda menyesatkan kaum kapitalis tersebut dalam memerangi kebudayaan negara-negara berkembang. Remaja Indonesia seharusnya tidak dengan mudah terbawa oleh budaya populer yang masuk. Remaja dengan kreativitasnya diharapkan dapat membawa nama bangsa ke kancah dunia untuk mengenalkan budaya Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

- Barker, Chris, 2009, *Cultural Studies*, Bantul: Kreasi Wacana
- Ibrahim, Idi Subandy, 2007, *Budaya Populer Sebagai Komunikasi: Dinamika Popscape dan Mediascape di Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Jalasutra.
- McQuail, Denis, 1987, *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga.
- Rakhmat, Jalaluddin, 2005, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Roach, Collen, 1997, *Cultural Imperialism and Resistance in Media Theory and Literary Theory*. Dalam *Media, Culture dan Society* Vol.19.no.1, 1997.
- Storey, John, 2008, *Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop: Pengantar Komprehensif Teori dan Metode*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Sutrisno, Mudji, dkk (ed), 2007, *Cultural Studies, Tantangan bagi Teori-teori Besar Kebudayaan*. Depok: Koekoesan.
- Tomlinson, John. 1991. *Cultural Imperialism: Critical Introduction*. London: Pinter Publisher.
- <http://www.nurudin-umm.blogspot.com/> (diunduh pada 26 Maret 2012 pukul 20.42 WIB).
- <http://www.kyotoreviewsea.org> (diunduh pada 26 Maret 2012 pukul 20.50 WIB).

[http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=budaya+populer+korea+makasar&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Frepository.unhas.ac.id%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F160%2Fskripsi\\_rtf%3Fsequence%3D5&ei=IUWE T8bGArDBiQeuu63GBw&usg=AFQjCNEpOpEP3UJgGFaCw\\_VL6mLnUJqDw&cad=rja](http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=budaya+populer+korea+makasar&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Frepository.unhas.ac.id%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F160%2Fskripsi_rtf%3Fsequence%3D5&ei=IUWE T8bGArDBiQeuu63GBw&usg=AFQjCNEpOpEP3UJgGFaCw_VL6mLnUJqDw&cad=rja) diunduh pada 26 maret 2012 pukul 21.00 WIB).

<http://web.budaya-tionghoa.net/home/1363-kebudayaan-indonesia-sebagai-jati-diri-bangsa-indonesiat> diunduh pada 26 maret 2012 pukul 20.54 WIB).

# MEDIA DAN INDUSTRI MESIN PERANG (PERSPEKTIF POLITIK EKONOMI DALAM INDUSTRI PERANG)

Anastasia Yuni Widyaningrum

## Pendahuluan

Bagaimanakah masyarakat di belahan dunia lain dapat mengetahui bahkan bisa menyaksikan kehebatan, kekejaman, bahkan tragisnya perang di belahan dunia yang lain jika hanya jika melalui media? Berbagai jenis media mampu menggambarkan bagaimana situasi perang termasuk di dalamnya kehebatan operasional mesin-mesin perang. Meski menggunakan fungsi indera yang berbeda, namun media mampu menghadirkan-meminjam istilah yang dikemukakan Walter Lippman (1922)-, *pictures in our heads*. Lipmann (1922: 4-5) menuliskan bagaimana menjelaskan tentang *pictures in our heads*:

*“Looking back we can see how indirectly we know the environment in which nevertheless we live. We can see that the news of it comes to us now fast, now slowly; but that whatever we believe to be a true picture, we treat as if it were the environment itself. It is harder to remember that about the beliefs upon which we are now acting, but in respect to other peoples and other ages we flatter ourselves that it is easy to see when they were in deadly earnest about ludicrous pictures of the world. We insist, because of our superior hindsight, that the world as they needed to know it, and the world as they did know it, were often two quite contradictory things. We can see, too, that while they governed and fought, traded and reformed in the world as they imagined it to be, they produced results, or failed to produce any, in the world as it was. They started for the Indies and found America. They diagnosed evil and hanged old women. They thought they could grow rich by always selling and never buying. A caliph, obeying what he conceived to be the Will of Allah, burned the library at Alexandria.”*

*Pictures in Our Heads* ini pada dasarnya sedang menjelaskan mengenai opini publik di mana media menjadi alat bantu untuk dapat menggalang pengertian dan pemahaman mengenai opini publik. Media

membantu masyarakat untuk dapat menjangkau apa yang terjadi di 'luar sana', di luar jangkauan panca indera masyarakat yang secara ruang dan waktu berjarak dari tempat terjadinya peristiwa.

Melalui studi *literature* penelitian ini mencoba menelisik bagaimana media, melalui pemberitaan dan film sebagai media hiburan dipakai sebagai alat *display* mesin-mesin perang oleh negara penghasil mesin perang. Perspektif politik ekonomi media dipakai oleh peneliti untuk melihat ketidaknetralan media dalam era ideologi kapitalisme. Amerika (dengan industri perangnya) dikaitkan dengan industri media (termasuk Hollywood dengan *Movie Industry*) dipakai sebagai bahan kajian penelitian ini. Termasuk juga bagaimana Indonesia menyikapi hal ini? Indonesia sebagai negara produsen atau konsumen mesin perang?

Akhir-akhir ini ramai diberitakan mengenai penolakan PPI-Jerman dan PPI Berlin beserta NU cabang Jerman terhadap kunjungan para wakil rakyat dari Jakarta. Penolakan itu kabarnya karena para anggota DPR membawa rombongan keluarganya dan konon menghabiskan dana tidak kurang dari 3,1 miliar rupiah. Angka yang luar biasa di tengah deraan maju mundurnya kenaikan BBM di negeri Indonesia. Menurut berita yang dirilis oleh [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) pada 26 April 2012, para wakil rakyat ke Jerman dalam rangka untuk melihat langsung pembuatan tank Leopard. Tank Leopard merupakan mesin perang produksi Jerman. Menjadi bahan diskusi, jika Indonesia ingin melihat-lihat barang dagangan alat utama system senjata, apakah harus ke lokasi pembuatannya terlebih dulu? Bukankah di internet dan berbagai media sudah dapat disaksikan bentuk, volume hingga cara kerja dari kendaraan berat tersebut. Di sinilah media berfungsi sebagai alat *display* berbagai produk termasuk juga produk mesin mesin perang. Sebagai alat *display* tidak selalu dalam bentuk *hard selling* seperti berbagai *website* yang komoditasnya adalah jualan mesin-mesin perang seperti [www.dailydefenseindustry.com](http://www.dailydefenseindustry.com) tetapi juga dalam bentuk *soft selling* seperti kemunculan berbagai senjata itu dalam berbagai publikasi media pada saat perang berlangsung atau pasca perang, bisa juga melalui film bertemakan atau berlatarbelakang situasi perang.

Dalam ingatan publik saat ini, perang terbesar dalam abad 20 adalah Perang Dunia I dan II. Perang Dunia I dan II sudah lebih setengah abad lalu dan pendudukan Irak atas Kuwait juga sudah lama hilang dari agenda media atau perang terbuka antar negara hampir tidak ada lagi



(setidaknya saat ini), namun kenangan akan perang tetap menggema hingga sekarang. Konflik senjata masih tetap ada di berbagai penjuru dunia. Sebut saja konflik etnis di Darfur di Afrika, menurut berita yang dirilis *www.kompas.com* pada 21 Mei 2010 (judul berita: 200 Orang Tewas akibat Konflik Darfur), perang suku ini yang melibatkan militer ini kabarnya menelan korban jiwa 10.000 sejak etnis mengangkat senjata pada tahun 2003. Mari kita lihat pemberitaan akhir-akhir ini mengenai konflik di Libya. Memang tidak disebut-sebut sebagai perang, namun revolusi di Libya dalam rangka menumbangkan pemimpin mereka yang otoriter Mohammat Khadafi, menelan korban 25.000 orang meninggal dalam konflik ini, dan lebih dari 50.000 orang terluka (*www.kompas.com* 21 September 2011, 25.000 Orang Tewas dalam Konflik Libya). Rakyat melawan senjata, bersenjata, dipersenjatai atau bagaimana?

Perang Dunia I (1914-1918) berkecamuk di Eropa yang berlanjut pada Perang Dunia II dironai dengan perang ideologi oleh pihak-pihak yang merasa mempunyai ideologi yang lebih baik diantara yang lainnya kepada pihak yang lebih inferior. Nazi memegang peran yang cukup signifikan dalam meronai Perang Dunia II. Mesin perang muncul dalam berbagai medan. Kecanggihan alat perang pada saat itu mampu menggetarkan pihak-pihak yang tidak mempunyai akses terhadap kepemilikan alat perang tersebut. Perang Dunia II tidak terelakkan setelah invasi Jerman atas Polandia pada September 1939. Perang tersebut ditengarai sebagai perang terbesar dalam sejarah, karena melibatkan hampir semua negara di 3 benua Asia-Afrika dan Eropa. Perang yang terjadi melibatkan seluruh elemen kehidupan baik secara ekonomi, industri, sosial, politik, budaya.

### **Media dan Representasi Kecanggihan Mesin Perang dari Masa ke Masa**

Pada Film "Life Is Beautiful" (1997) digambarkan bagaimana seorang anak kecil yang diberi harapan akan mendapatkan hadiah berupa tank (*Main Battle Tank-MBT*) jika berhasil melewati masa kamp konsentrasi. Di akhir cerita, si anak begitu terkagum akan tank yang mendekat padanya. Film yang diproduksi pada tahun 1997 ini berhasil memenangi film asing terbaik dalam ajang piala Oscar di tahun yang sama yang mampu menyedot perhatian warga dunia. Melalui kisah satir, film ini menggambarkan perjuangan Suku Yahudi di kamp

konsentrasi Nazi Jerman pada masa perang dunia pertama. Menurut sejarah, tank pertama muncul selama perang dunia pertama. Kendaraan lapis baja dengan roda berupa rantai ini dibuat di Inggris. Tank pertama terlihat melintasi Perancis pada tahun 1917 dengan jenis FT-17 ([www.wwiivehicles.com](http://www.wwiivehicles.com)).

Pertempuran tank terbesar tampak dalam tulisan Iwan Santosa dan Marcus Suprihadi (*Kompas.com*, Selasa, 7 Februari 2012, 17:40 WIB), berikut ini:

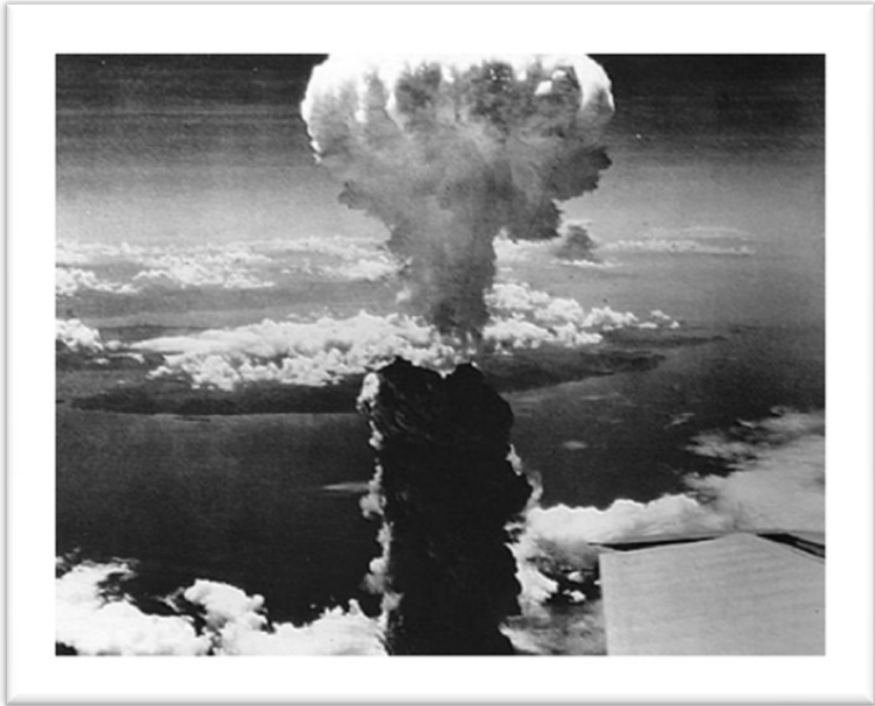
“Pengamat militer Andi Widjoyanto yang dihubungi, Selasa (31/1) lalu mengakui, pertempuran besar terakhir yang melibatkan perang sesama MBT terjadi semasa Perang Dunia II di Kursk (450 kilometer selatan Moskow). Ketika itu, 2.928 tank Jerman berhadapan dengan 5.128 tank Uni Soviet. Satuan tank tersebut di pihak Jerman Nazi didukung 2.110 pesawat, 9.966 meriam dan mortir, 780.900 prajurit. Sedangkan di pihak Uni Soviet, didukung 2.792 pesawat, 25.013 meriam dan mortir, serta 1.910.361 prajurit. Pertempuran terjadi dalam dua babak, yakni serangan Jerman pada tanggal 5-16 Juli 1943 dan serangan balik Uni Soviet tanggal 12 Juli hingga 23 Agustus 1943. Akhirnya Jerman dikalahkan Uni Soviet. Andi Widjoyanto menjelaskan, itulah kali terakhir terjadi perang besar tank melawan tank di medan benua daratan. Sejarah belum pernah mencatat terjadi perang tank melawan tank di negara kepulauan. Ada pun tank yang digunakan militer Jepang di bawah pimpinan Jenderal Tomoyuki Yamashita dalam serangan ke Malaya dan Singapura pada tahun 1941-1942 adalah tank ringan yang mampu melintasi jalan raya biasa dan hutan tropis.”

Gambar 1 yaitu salah satu jenis tank yaitu tank Leopard. Soal tank Leopard ini, baru baru ini rombongan DPR ditolak kedatangannya oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Jerman, PPI Berlin dan NU Jerman, kedatangan mereka ke Jerman dalam rangka melihat langsung ke pabrik pembuat tank Leopard (<http://www.tempo.co/>):



**Gambar 4.2. Tank Leopard** (<http://www.defenseindustrydaily.com/>)

Pada masa Perang Dunia II yang dimulai tidak lama setelah Perang Dunia I berakhir dironai dengan peran Amerika yang penuh kekuatan. Amerika dengan gagahnya menunjukkan kedigdayaannya. Mesin-mesin perang ala Amerika berparade di tengah desing peluru dan jerit tangis masyarakat sipil. Amerika bersama dengan sekutunya menunjukkan kekuatan puncak melalui peristiwa bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Luluh lantaknya kedua kota di Jepang ini sekaligus penanda berakhirnya era Perang Dunia II. Hingga sekarang kenangan akan bom atom di kedua kota itu diabadikan melalui berbagai ragam cara. Termasuk diantaranya adalah foto-foto wisatawan yang berkunjung ke reruntuhan sisa-sisa kedahsyatan bom atom tersebut. Di internet masih dengan mudahnya ditemukan berbagai cerita baik berupa tulisan maupun gambar mengenai cendawan besar yang mematikan tersebut.



**Gambar 4.3. Peristiwa Bom Atom Hiroshima-Nagasaki**

Pada masa perang Teluk (*The Gulf War*) yang dipicu invasi Irak atas Kuwait, masyarakat di seluruh penjuru dunia dimanja dengan berbagai kecanggihan mesin perang dalam melakukan aksinya serta bagaimana dampak yang ditimbulkan olehnya. Parade pesawat tempur Amerika yang berkelebat di langit Kota Baghdad menjadi tontonan yang mengundang decak kagum, terutama bagi negara-negara yang tidak mempunyai mesin-mesin perang secanggih itu. Pesawat tempur Siluman (F117 Stealth) mengundang decak kagum dan menggetarkan bagi Negara-negara lain. Berbagai sumber mengatakan bahwa pesawat ini tidak dapat terbaca oleh radar sehingga disebut sebagai pesawat siluman. Pesawat tersebut mampu terbang rendah, mengintai, manuver tempur tanpa terdeteksi oleh radar lawan. Berikut gambar dari pesawat siluman yang terkenal pada masa perang teluk (invasi Irak atas Kuwait pada tahun 1991):



**Gambar 4.4. F117 Stealth**

Gambaran kedahsyatan perang berikut dengan peralatan mesin perangnya juga tampak dalam tulisan wartawan senior Kompas Ninok Leksono di [www.kompas.com](http://www.kompas.com) dengan judul Pengebom Siluman Di lawan Rudal Kuno yang diunggah pada 22 Maret 2011(<http://internasional.kompas.com/read/2011/03/22/08021195/Pengebom.Siluman.Dilawan.Rudal.Kuno>) berikut ini:

“Minggu (20/3) dini hari itu Libya benar-benar hujan bom. Meski tak dikonfirmasi oleh Washington, stasiun televisi CBS memberitakan ada pembom siluman (*stealth*) B-2 Spirit Amerika yang ambil bagian dalam pemboman Libya. Lalu di Laut Tengah yang berbatasan dengan Libya di utara ada sejumlah kapal perusak AS berpeluru kendali kelas Arleigh Burke yang bersama dengan kapal perang Inggris HMS Triumph melontarkan 124 rudal jelajah Tomahawk.

Tidak kalah aksinya adalah jet penyerang darat Tornado GR4 Inggris dan Mirage 2000 Perancis yang juga ikut menghantam sasaran-sasaran di Libya.

Dengan itu, perang Libya telah dimulai. Kekuatan sekutu Eropa ditambah AS, beberapa negara seperti Denmark, dan perlawanan Libya berhadapan dengan Pemerintah Libya di bawah pimpinan Kolonel Moammar Khadafy yang dinilai sudah tidak lagi punya legitimasi.

Setelah Dewan Keamanan PBB menyetujui penegakan zona larangan terbang Kamis silam, seperti disinggung oleh George Friedman dari Stratfor, Senin, ada sejumlah strategi yang dipikirkan oleh sekutu. Yang pertama sekadar menegakkan zona larangan terbang. Yang kedua, penegakan zona disertai dengan serangan

terhadap pusat-pusat komando-dan-kontrol. Yang ketiga, bisa juga kedua hal tersebut ditambah dengan serangan darat langsung ke kekuatan Khadafy. Yang terakhir itu sudah dekat dengan pilihan yang paling luas, yakni invasi dan pendudukan Libya.

Ketika di permukaan pembicaraan politik berlangsung, baik di New York maupun di Paris, hingga Sabtu lalu, persiapan untuk menggempur telah dilakukan. Kontak dengan kelompok perlawanan untuk menyiapkan mereka terhadap apa yang bakal terjadi, pembangunan saluran komunikasi dan logistik, masuk dalam aktivitas praserangan. Termasuk di sini adalah juga penetapan sasaran serangan serta rekonaisans sasaran untuk memberi informasi paling mutakhir. Landasan bagi perang juga ditopang oleh rekonaisans dari udara dan antariksa.

Menurut Friedman, perang dilancarkan dengan serangan pertama berupa serangan melumpuhkan untuk menghancurkan dan mengisolasi struktur komando. Serangan ini juga dimaksudkan untuk membunuh para pemimpin, seperti Khadafy, dan anak-anaknya dan pemimpin senior lain.

### **Menyisakan kehancuran**

Ketika mesin perang sekutu itu digunakan, Khadafy yang sebelum ini berhasil menekan balik kekuatan pemberontak dengan keunggulan di udara mengalami kesulitan untuk menghadapinya.

Rudal jelajah Tomahawk datang bak palu godam yang menghancurkan pusat-pusat komando Khadafy, selain juga pangkalan dan konsentrasi kekuatan Khadafy. Tomahawk yang sudah diciri sebagai senjata pembuka serangan semenjak Perang Teluk 1991 terbang mengikuti kontur permukaan Bumi.

Deretan sistem pertahanan udara Libya didukung oleh peralatan buatan Rusia, yakni SA-6 Gainful/SA-8 Gecko. Ada juga brigade dengan SA-3 Goa dan SA-2 Guideline. Namun, yang disebut-sebut sebagai ancaman adalah sistem rudal antipesawat SA-5A Gammon (*The Military Balance*, IISS, 2010).

Gammon adalah rudal antipesawat yang bisa mencapai ketinggian sekitar 40 km dan jangkauan mendekati 300 km.

Untuk pesawat yang terbang rendah, pertahanan udara Libya juga mengoperasikan SA-7 Grail yang mampu melesat dengan kecepatan maksimum sekitar 2.000 km per jam dengan jangkauan 5 km. Televisi Libya menayangkan sebuah pesawat Perancis yang diklaim ditembak jatuh oleh pertahanan udara Libya meski Perancis menyangkal berita tersebut.

Guna memperkuat serangan penghancuran terhadap pertahanan udara Libya, jet Tornado GR4 Inggris dipersenjatai dengan rudal Storm Shadow. Rudal seberat 1,3 ton dan berjelajah sekitar 250 km ini menuju sasaran dengan dipandu sinyal GPS.

IISS juga menyebutkan, Angkatan Udara Libya mengoperasikan 374 pesawat yang layak tempur, antara lain, terdiri dari jet tempur

Mirage F-1E, MiG-25 Foxbat, MiG-23 Flogger, dan MiG-21 Fishbed yang lebih tua lagi. Pangkalan-pangkalan udara ini pula yang diperkirakan menjadi sasaran rudal Tomahawk, dan juga bom yang diangkut oleh pengebom B-2 bila benar pengebom ini ikut dalam serangan.

Bila radar dan sistem pertahanan udara lain telah dipatahkan, sasaran penting berikut pastilah kekuatan darat Khadafy. Hadirnya jet tempur Rafale dan Mirage Perancis dilaporkan juga untuk menghancurkan tank-tank Khadafy yang kemarin ini sudah memukul kekuatan perlawanan di sekitar Benghazi.

Serangan dengan Tomahawk diyakini telah menimbulkan kehancuran besar di pusat-pusat militer Libya. Namun, berikutnya muncul pertanyaan, sebagaimana juga telah muncul di Perang Teluk dan invasi AS ke Irak tahun 2003, apakah perang lalu otomatis dimenangi setelah pertahanan udara lumpuh?

Menyusul serangan sekutu, Kolonel Khadafy telah membuka gudang senjata dan mempersenjatai rakyat yang masih mendukungnya dengan senapan otomatis, mortir, dan bom untuk melawan sekutu dan menjadikan invasi Barat berkepanjangan.

Masih terbuka pertanyaan, apakah tipe perang akan seperti Kosovo di mana operasi udara berlangsung berkepanjangan, atau kemudian—seperti juga dikemukakan Friedman—berubah menjadi operasi darat.

Melihat pengalaman di Irak, tentara pendudukan dengan persenjataan mutakhir seperti AS dan Inggris pun masih harus menghabiskan waktu lama dan korban banyak untuk menuntaskan perang.

Kini, Tomahawk telah diluncurkan, kapal induk Charles de Gaulle yang didukung 20 pesawat dan helikopter telah dikerahkan. Libya secara militer bisa dilumpuhkan.

Namun, hasil akhirnya terpulang kepada Khadafy dan pendukungnya, apakah pilih bertarung sampai titik darah penghabisan atau menyerah.”

Dan inilah gambar peluncuran rudal tomahawk seperti yang dideskripsikan:





**Gambar 4.5. peluncuran rudal tomahawk**

Rudal tomahawk ini merupakan rudal jarak jauh yang dikendalikan oleh satelit dan mempunyai kekuatan masif untuk menghancurkan obyek sasaran. Kedahsyatannya telah digambarkan dengan baik oleh Ninok Leksono diatas. Sampai saat ini perang fisik secara terbuka masih ada, dan perang terbuka pada masa lampau tetap terbangun bahkan hidup melalui media yang menampilkan berbagai mesin perang seperti pesawat tempur, senjata tembak, tank, alat peledak, kapal perang, rudal, dan lain-lain. Setidaknya melalui berbagai tampilan alat perang di media cetak, elektronik khususnya televisi, film, dan bahkan media online, masyarakat setidaknya mahfum bahwa produksi alat perang tetap hidup dan menjadi salah satu sumber devisa dari Negara yang mengembangkan industry di bidang strategis tersebut.

Dalam judul berita "Rusia Jual Rudal ke Suriah dan Libya" diunggah pada 26 Desember 2008 (<http://nasional.kompas.com>) dipaparka dengan jelas bahwa perang berkaitan dengan industri dan hal ini berarti bernilai ekonomi tinggi dan masih merupakan komoditi strategis apalagi konflik bersenjata belum Nampak mereda di berbagai penjuru dunia dalam skala mikro maupun makro. Berikut cuplikan beritanya:



“**MOSKWA, JUMAT**-Rusia menjual rudal-rudal darat ke udara kepada tujuh negara termasuk Libya, Suriah dan Venezuela, kata surat kabar bisnis Vedomosti, Jumat (26/12). Penjualan itu senilai 250 juta dollar AS.

Rusia juga akan mengirim baterai-baterai rudal S-125 Pechora-2M kepada Mesir, Myanmar, Vietnam dan Turkmenistan sesuai kontrak itu, kata surat kabar tersebut, yang mengutip satu sumber di perusahaan Rusian Tehnologies milik pemerintah...”

Di Indonesia saat ini, penyelenggara industri pemutar film (terutama film asing) dimana masyarakat dapat menikmati film asing secara legal (jika atau hanya jika) melalui jaringan Grup 21 Cineplex. Dalam film bertema perang yang dipasarkan oleh jaringan Grup 21 Cineplex, masyarakat dapat melihat betapa canggihnya alat perang yang ditampilkan. Sebut saja *Life is Beautiful*, *Top Gun* yang dibintangi Tom Cruise, *Pearl Harbour*, *Iron Man*, dan lain-lain. Film-film tersebut menampilkan berbagai manuver-manuver kecanggihan mesin perang di zamannya.

Melalui representasi yang hanya sepenggal-sepenggal dan tentu saja sudah melalui editing tertentu mesin-mesin perang itu tampak gagah dan menggugah rasa decak kagum. Masyarakat dapat dengan mudah melihat kecanggihan mesin-mesin perang tersebut melalui representasi di film-film buatan (terutama) Hollywood. Pesawat tempur, tank, *bedhil*, mesin pengebom, dan lain-lain dapat dengan mudah disaksikan melalui demonstrasi dalam film tersebut, bahkan disebut-sebut Film *Iron Man* merupakan *prototype* baju perang Amerika di masa mendatang. Film sebagai salah satu media yang dapat merepresentasikan ‘dunia’ juga dipakai sebagai alat untuk memamerkan mesin perang. Tidak menutup kemungkinan juga sebagai media pemasaran bagi Negara-negara produsen mesin perang. Selain sebagai *display* juga dapat dipakai untuk mengukuhkan *kedigdayaan* sambil menggertak negara-negara yang coba-coba untuk menggodanya melalui *sentiment ideology*. Di mana lagi selain perang yang sesungguhnya, masyarakat dapat menyaksikan manuver-manuver senjata yang canggih dan hebat selain dalam media mulai dari cetak, televisi, internet hingga film fiksi?

## **Politik Ekonomi Media dan Propaganda Negara Penghasil Mesin Perang**

Bagaimana posisi industri komunikasi dalam peran strategis pertahanan dan keamanan Negara? Meski terlampau kompleks dan rumit

untuk dibicarakan dalam pemikiran sederhana ini, namun pemikiran mengenai hal ini semoga memberikan gambaran mengenai konstelasi industri komunikasi dalam industry militer. Ashadi Siregar (1992) menyatakan: membicarakan keberadaan institusi komunikasi dalam proses industrialisasi secara konvensional, adalah menempatkannya dalam peran sosiologis yang berkaitan dengan perubahan sosial. Industrialisasi sebagai sebutan lain dari proses perubahan dari tahap agraris ke tahap lainnya, dalam konteks pembangunan di dunia ketiga di satu sisi dilihat sebagai proses, pada pihak lain sering pula dipandang sebagai tujuan. Dalam *setting* semacam ini, institusi komunikasi (massa dan sosial) difungsionalisasikan untuk menjadi bagian dalam gerak pembangunan di suatu negara. Paparan Ashadi diatas, termasuk didalamnya industri komunikasi dalam ranah militer, hal ini diasumsikan bahwa militer adalah bagian dari gerak perubahan sosial dalam masyarakat.

Ashadi memaparkan mengenai ekonomi politik komunikasi dalam industrialisasi konteksnya lebih kepada peran serta hal tersebut dalam gerak perubahan pembangunan di Indonesia. Apalagi dalam kerangka wacana global, Indonesia ketinggalan dalam *starting point* di industri. Herman dan Chomsky dalam buku "*Manufacturing Consent, The Political Economy of The Mass Media*" (1988) seperti yang disalin oleh Ashadi (1992) menyebutkan bahwa kajian industri media massa dapat dilakukan pada satu sisi institusi media massa dan di sisi lain apa yang ditampilkan pada isinya. Karakteristik institusi media massa akan memformat pola-pola penyajian beritanya. Lebih lanjut dipaparkan kajian yang dilakukan di Amerika Latin dalam menganalisis kecenderungan media massa kapitalis dikatakan ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi pola pemberitaan yaitu: (1) ukuran, konsentrasi pemilikan, kekayaan pemilik dan orientasi kepada keuntungan perusahaan; (2) iklan sebagai sumber penghaslan utama; (3) keterikatan media massa terhadap informasi yang disediakan pemerintah, dunia usaha dan para ahli yang di danai oleh sumber-sumber utama dan agen kekuasaan; (4) perangkat penertib sebagai pendisiplinan media; (5) "anti-komunisme" sebagai kepercayaan nasional dan mekanisme kontrol.

Ashadi memaparkan mengenai keberadaan institusi media massa yang bertumbuh di Indonesia dalam kerangka politik ekonomi media. Paparan Ishadi menyitir penelitian Daniel Dhakidae dalam buku

*"The State, The Rise of Capital and The Fall of Political Journalism"* (1991). Dikatakan demikian, transformasi yang dialami dunia pers (cetak) di Indonesia melalui konteks ekonomi politik bahwa sifat industrial dari pers di Indonesia dilihat dari fungsinya yang berubah, dari jurnalistik politik, menjadi komoditi yang berdasarkan orientasi yang ditujukan kepada dua aspek yaitu pasar dan iklan. Paparan singkat diatas dapat memberi gambaran singkat bahwa media tidak serta merta mengusung fungsinya sebagai *agent of change* dalam kerangka kerja tanggungjawab sosial media terhadap masyarakat, namun jika ditelisik lebih mendalam lagi tendensi untuk kepentingan iklan dan pasar (yang notabene adalah target sasaran dari iklan) sangatlah kuat aromanya. Menurut catatan Herman dan Chomsky seperti yang dipaparkan Ashadi, Herman dan Chomsky memberikan analisis dengan menunjukkan komposisi permodalan perusahaan media massa; data penghasilan dari perolehan iklan; tipe dari sumber informasi yang digunakan oleh media massa, dan berbagai tekanan yang dialami media massa berupa surat, telegram, petisi yang datang dari kelompok-kelompok masyarakat; dan ideologi anti komunisme yang bertolak dari media massa utama di Amerika Serikat yang mempengaruhi orientasi isi dalam meliput peristiwa-peristiwa di Amerika Selatan. Menurut catatan Herman dan Chomsky, kecenderungan peliputan ini akan tampak melalui penempatan (berita), penulisan *headlines*, pemilihan kata dalam berita dan berbagai cara lain yang dimaksudkan untuk menyarankan kepentingan tertentu. Menurut catatan Ashadi Siregar, setiap kali ada lisensi penerbitan media massa dicabut, pernyataan keprihatinan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi jurnalistik dan penerbit bukan soal kebebasan pers, tetapi lebih ke masalah tenaga kerja yang menganggur akibat kehilangan tempat bekerja.

Larissa A. Grunig dan James E. Grunig (Grunig and Grunig, 2003: 23) mengutip dari Cutlip menyatakan bahwa *"The United States military's control of the news of the Gulf War with Iraq in 1991 was a perfect example [sic] how news sources, guided by public relations officials, can control and shape the news with the truth a casualty"*. Berangkat dari apa yang dikatakan oleh Cutlip di atas, tampak jelas bagaimana Amerika sebagai pelaku perang pada saat perang Teluk, mengatur media. Termasuk di dalamnya bagaimana berita diperoleh, bagaimana foto-foto perang dapat diperoleh, bagaimana demonstrasi pesawat militer di langit Irak menjadi santapan

kamera-kamera. Artinya, apa yang disaksikan oleh penduduk belahan bumi lainnya merupakan hasil dari editing dan melalui *gatekeeping* oleh subyek berita. Artinya pula, apa yang dikonsumsi penduduk belahan bumi lainnya tidak serta merta merupakan kejadian riil di lapangan.

Di sinilah media tidak lagi sebagai *agent* yang bebas nilai dan kepentingan. Pertarungan kepentingan antara modal dan idealisme rupanya membuat media untuk berpikir lebih keras untuk menempatkan antara idealism dan modal dalam proporsi yang tepat. Idealism media dapat dikatakan secara garis besar adalah menghadirkan informasi yang senetral mungkin, *cover both side*, independen, bebas nilai, dan menjalankan peran tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Modal dalam industri media memegang peran yang sangat penting untuk menghidupi industri tersebut. Media sebagai alat bagi berbagai industri untuk dapat menampilkan produk unggulannya. Melalui pembelian *space* di media, industri berusaha mengenalkan produknya dan berujung pada profit. Di titik itulah, media berbagi tempat antara informasi publik dan informasi niaga. Pertarungan *space* yang tidak akan ada ujungnya. Saling membutuhkan dan saling bekerjasama untuk dapat menghidupi media.

Politik ekonomi media (beberapa ahli mengatakan sebagai *politic economy communication*) merupakan kolaborasi dari dua konsep yaitu *political economy* dan *media communication*. Konsep pertama *political economy*, Vincent Mosco (Mosco, 2009: 22) menjelaskan bahwa

*“Political economy is the science of wealth and deals with efforts made by man [sic] to supply wants and satisfy desires. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa “it is important to stress that before political economy became a science, before it served as the intellectual description for a system of production, distribution, and exchange political economy meant the sosial custom, practice, and knowledge, about to manage, first, the household and later, the community”.*

*Political economy of communication* masih menurut Mosco (2009:81) politik ekonomi dalam industri media termasuk di dalamnya industri media sebagai bentuk bisnis bagian dari perusahaan transnasional. Dipertimbangkan pula perkembangan sebuah negara dan pemerintahan dalam rangkaian informasi dunia dan memperbaiki kesenjangan global di bidang komunikasi. Mosco menjelaskan bahwa politik ekonomi adalah ilmu mengenai kesejahteraan dan upaya apa yang dilakukan manusia untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan. Dalam bahasa awam, dapat pula dikatakan bahwa, manusia dengan akal budinya berusaha

sekuat tenaga sepenuh kemampuan untuk dapat memfasilitasi dirinya terhadap kebutuhan duniawinya yang hanya dapat dengan mudah difasilitasi dengan uang, sederhananya (mungkin) begitu. Bagaimana jika di level organisasi? Organisasi akan berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan dengan menggunakan sumberdaya yang ada untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dimana keuntungan inilah yang kemudian diasosiasikan dengan fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan serta keinginan tersebut.

Dalam penjabarannya lebih lanjut, Moscow (2009: 128-210) memaparkan ada tiga (3) pilar dalam politik ekonomi komunikasi yaitu; (1) komodifikasi, (2) spasialisasi, (3) strukturisasi. Komodifikasi, merupakan proses transformasi nilai guna menjadi nilai tukar, transformasi produk yang nilainya ditentukan oleh kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan individu dan sosial ke dalam produk-produk yang nilainya apa yang bisa mendatangkan pasar. Komodifikasi media antara lain terdiri dari komodifikasi isi, komodifikasi penonton atau pembaca atau pendengar (konsumen), komodifikasi iklan. Spasialisasi, yang berarti proses mengatasi kendala ruang dan waktu dalam kehidupan sosial. Dalam referensi ekonomi politik komunikasi, hal itu merujuk kepada kendala pada gerakan atau arus informasi barang dan jasa serta dampak komunikasi pada proses *differensiasi* operasi perusahaan dan reintegrasi berikutnya. Terakhir adalah strukturisasi, yaitu proses dimana struktur meliputi keluar dari agensi manusia, bahkan saat mereka menyediakan 'media' sebagai konstitusi. Strukturisasi terdiri dari kelas sosial, gender dan ras, dan gerakan sosial bahkan sampai soal hegemoni media.

Dalam catatan Robert W. McChesney (2008:99) dalam kondisi perang selalu terjadi dilemma bagi industri media. Di sisi pemerintah perlu untuk menggalang dukungan masyarakat terhadap perang yang sedang berlangsung, sementara di sisi lain kondisi perang juga merupakan daya tarik tersendiri bagi konsumen media. Detailnya seperti ini " *...the news media were placed in recurring dilemma in each of these war. The administration was pursuing aggressive propaganda campaigns to whip up popular support for war, and a key battleground was winning favorable press coverage...*". Hal ini berarti pemberitaan mengenai perang sama halnya dengan semakin mempopulerkan segala hal mengenai perang. Dan hal itu merupakan iklan gratis bagi negara-negara penghasil mesin perang seperti yang dipakai dalam perang yang diliput.

Bagaimana dengan Indonesia? Seperti yang dirilis oleh [www.kompas.com](http://www.kompas.com) dalam judul berita “Revitalisasi Industri Pertahanan Jadi Prioritas Program 100 Hari” yang diunggah pada 5 November 2009 (<http://nasional.kompas.com/>), dikatakan:

Salah satu program yang akan menjadi fokus pemerintahan SBY-Boediono dalam 100 hari pertama adalah revitalisasi industri pertahanan. Demikian dinyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/11). Lebih lanjut dikatakan: “Lima tahun mendatang akan kita lakukan revitalisasi. Dalam 100 hari harus dibikin rencana induk, *master plan*, dan *roadmap* untuk revitalisasi industri strategis,” ujar SBY.

Revitalisasi ini termasuk menentukan apa yang diproduksi, terutama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, keperluan pemesanan dari luar negeri, dan kontrak-kontrak yang sedang berjalan. Ia optimistis dengan revitalisasi ini karena industri pertahanan sudah dikembangkan cukup lama. Indonesia telah berinvestasi dalam penguasaan teknologi dan sumber daya manusia yang andal.

Presiden SBY mengatakan, industri pertahanan strategis yang akan dijadikan target, antara lain, industri yang memproduksi senjata, peralatan, dan perlengkapan pertahanan, militer, dan kepolisian. Misalnya, PT PAL di Surabaya, PTDI di Bandung, PT PINDAD di Bandung, dan industri strategis lainnya.

Menurut SBY, industri-industri tersebut sempat tidak mendapat perhatian karena krisis ekonomi. Lima tahun sebelumnya hal ini belum menjadi fokus karena pertumbuhan ekonomi belum cukup baik dan anggaran tidak cukup. Karenanya, dalam 100 hari ke depan akan dipastikan segi pembiayaannya apakah menggunakan sumber dalam negeri, *multiyears budgeting*, dan menentukan pola fasilitas pembiayaan perbankan dalam negeri.

Dalam pemberitaan yang lain dikatakan bahwa kemandirian industri senjata membutuhkan konsistensi dukungan terutama dukungan dana dari pemerintah (lihat dalam berita “Kemandirian Industri Senjata Butuh Konsistensi Dukungan” dalam (<http://nasional.kompas.com>) yang diunggah pada 5 Juni 2008. Dalam artikel tersebut dikatakan bahwa alokasi anggaran belum mampu memenuhi total kebutuhan riil yaitu Rp. 100 triliun dan baru dapat terpenuhi 36 triliun. Menurut catatan Adhi Priamarizki, dalam artikel “*Assessing our defense industry*” yang diunggah pada 9 Januari 2012 (<http://www.thejakartapost.com/>)

“...Recently the Indonesian Defense Ministry stated that they would implement a “defense support economy” principle in the country’s arms

*procurement business. The purpose of this principle is to synergize defense enforcement with improvements to the national economy. In other words, the Defense Ministry believes that defense and development have a positive relationship. This positive relationship occurs because arms procurement stimulates economic activities. The defense industry creates a lot of new job opportunities. Further, the defense industry absorbs products from other industries...".*

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, Indonesia melirik industri di bidang pertahanan keamanan daripada selalu menggantungkan pasokan dari luar negeri. Hal ini berarti industri pertahanan keamanan merupakan industri strategis karena menyerap ribuan tenaga kerja dan melibatkan berbagai elemen pendukung. Pada masa mendatang diharapkan Indonesia mengeksport berbagai senjata ini keluar. Apabila itu terjadi, maka berarti konflik senjata belum ada kabarnya mereda dari muka bumi ini.

## **Simpulan**

Film merupakan salah satu media yang sangat potensial yang dipakai sebagai propaganda bagi negara-negara penghasil mesin perang. Perang dijadikan sebagai komoditi. Uang yang beredar dalam masa perang sangat luar biasa. Media tidak ketinggalan *kecipratan kue renyah* dari situasi perang. Selain sebagai alat untuk memamerkan mesin-mesin perang yang mampu dibuat oleh negara penghasil mesin perang, film dipakai sebagai alat pemasaran yang cukup efektif. Sambil semakin memantapkan kehebatan industry pencetak mesin perang. Kapitalisme sangat kuat memberi pengaruh bagaimana media dipakai sebagai alat *display product* yang dijual ke negara lain yang tidak menghidupi industry perangnya.

Media televisi, melalui pemberitaan mengenai kondisi perang sekaligus alat display kecanggihan mesin-mesin perang. Masyarakat dengan kepentingannya masing-masing sebagai konsumen dalam industri ini. Negara dengan kepentingan terbatas dan rahasia juga sebagai konsumen dalam industri ini. Negara berkepentingan untuk menambah Alat Utama Sistem Senjata atau alutsista.

Media cetak dengan kekuatan narasinya dapat menggambarkan kedahsyatan perang. Tanpa gambar atau audio yang dapat menguatkan gambaran, namun narasi tulisan justru mampu menggiring dan menhadirkan gambaran perang. Begitu pula dengan internet, dengan



kecepatannya menjangkau masyarakat, internet seolah menyimpan data dalam bentuk *soft file* dan masyarakat dapat mengunjunginya sewaktu-waktu dan mendapatkan informasi yang mereka perlukan.

Media dengan kekuatannya untuk menghadirkan 'dunia yang tidak kita pijak' dan kemampuannya untuk menghadirkan *pictures in our heads* tidak lepas dari kegiatan politik ekonomi media. Politik ekonomi media merupakan tulang punggung terselenggaranya industri media tersebut di jaman serba komersial seperti ini.

Kondisi perang dan media rupanya dalam kaca mata bisnis baik dari segi industri militer juga dalam industri media sama-sama saling menguntungkan. Industri militer membutuhkan media untuk dapat meluaskan propaganda dan menggalang dukungan serta memamerkan kecanggihan mesin perangnya, disisi lain media melakukan ekspos besar terhadap perang karena *news value* yang terkandung didalamnya sangatlah tinggi. Komersialisasi terjadi dimana-mana bahkan dalam kondisi konflik bersenjata.

Kondisi yang miris dari kaca mata rakyat sipil, bahwa konflik bersenjata memuat berbagai kepentingan dan menjadi ajang komersial bagi pihak-pihak tertentu. Komunikasi beserta industri komunikasi ikut serta andil dalam setiap konflik bersenjata dalam porsinya. Saran bagi penelitian berikutnya, untuk lebih menggali peran strategis industri komunikasi dalam situasi konflik bersenjata dalam kerangka kerja ekonomi politik komunikasi.

## Daftar Pustaka

Grunig, L.A. and Grunig J.E, 2003, *Public Relations in the United States: A Generation of Maturation*. Dalam *The Global Public Relations Handbook Theory, Research, and Practice*, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey: Publishers Mahwah.

Lippmann, W, 1998, *Public Opinion, USA*: Transaction Publisher.

Mosco, V, 2009, *The Political Economy of Communication (Second Edition)*, California: Sage Publication.

McChesney, R.W, 2008, *The Political Economy Of Media (enduring issues, emerging dilemmas)*, New York: Monthly Review Press.



Siregar, A, 1992, Ekonomi Politik Komunikasi Dalam Industrialisasi di Indonesia, *Makalah* disampaikan pada Seminar Problem Pilihan Strategis Komunikasi Dalam Industrialisasi Dunia Ketiga, Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

<http://internasional.kompas.com/read/2011/03/22/08021195/Pengebom.Siluman.Dilawan.Rudal.Kuno>

<http://www.tempo.co/read/news/2012/04/27/078400087/Di-Bandara-Berlin-Rombongan-Anggota-DPR-Rumpi-Tempat-Belanja>

<http://www.defenseindustrydaily.com/>

<http://internasional.kompas.com/read/2010/05/21/20044830/200.Orang.Tewas.akibat.Konflik.Darfur>

<http://internasional.kompas.com/read/2011/09/21/05472910/25.000.Orang.Tewas.dalam.Konflik.Libya>

(<http://www.thejakartapost.com/news/2012/01/09/assessing-our-defense-industry.html>)



# **HOLLYWOOD DAN PERANG WACANA: MAKNA IDEOLOGIS DI BALIK FILM PERANG HOLLYWOOD**

**Hadi Purnama**

## **Pendahuluan**

Perang - apapun alasannya - sejatinya merupakan tragedi kemanusiaan, karena terjadi konflik fisik maupun nonfisik yang melibatkan dua atau lebih kelompok manusia. Sejarah perang menjadi bagian yang nyaris tidak terpisahkan dari peradaban manusia, sejak zaman purba hingga sekarang. Bahkan, kitab suci agama-agama besar dan berbagai ajaran yang masih diyakini para penganutnya memuat banyak kisah dan riwayat tentang peperangan. Termasuk juga karya sastra klasik karya para pujangga besar, diantaranya epos Mahabarata dan Ramayana.

Kitab suci Al-Qur'an juga mendokumentasikan sejumlah peristiwa bersejarah di masa lalu, termasuk peperangan di masa pra dan pasca kelahiran Muhammad SAW. Dari sekian banyak kisah peperangan besar yang diabadikan dalam Surat Al-Fil dalam Al-Qur'an diantaranya mengisahkan kegagalan penyerbuan kota Mekah oleh pasukan berkekuatan 60 ribu tentara dengan 13 ekor gajah yang dipimpin oleh raja Yaman, Abrahah. Masih banyak kisah peperangan yang dimuat dalam ayat suci umat Islam ini.

Epik klasik Mahabharata, karya pujangga asal India Begawan Byasa atau Vyasa, mengisahkan perang besar yang melibatkan perseteruan antara kelompok Pandawa dan dengan Kurawa. Kisah Mahabharata mengenai sengketa hak pemerintahan tanah negara Astina, berpuncak pada Perang Bharatayuddha yang berlangsung selama delapan hari di Padang Kurusetra.

Begitu pun dengan kisah kepahlawanan Ramayana- dalam bahasa Sanskerta berarti Perjalanan Rama - gubahan Walmiki juga menggambarkan peperangan besar antara Rama dengan penguasa lalim kerajaan Alengka, Rahwana.

Kisah peperangan yang termuat di dalam kitab suci maupun buku karya pujangga senantiasa menyiratkan pesan moral tentang pergulatan menegakkan kebenaran melawan kebatilan. Kisah peperangan juga senantiasa menjadi pembelajaran bagi kita betapa perang merupakan peristiwa konflik yang selalu berujung pada kebinasaan. Dampak peperangan kerap merengut ketenteraman, kebahagiaan, keteraturan, dan kemakmuran suatu bangsa. Lebih jauh peperangan juga berimbas pada runtuhnya bangunan sosial, ekonomi, politik, budaya dari pihak-pihak yang terlibat konflik.

### **Pengertian Perang**

Perang menurut penerima Nobel Richard E. Smalley (2003) merupakan salah satu dari sepuluh masalah krusial yang akan dihadapi umat manusia dalam lima puluh tahun ke depan. Terminologi perang seperti dijelaskan dalam Kamus Politik (1996) dapat dimaknai sebagai “perselisihan bersenjata antar golongan-golongan masyarakat dalam suatu negara (perang saudara, perang suku) atau antar Negara” (Marbun, 1996: 493).

Pengertian lain tentang perang adalah konflik yang terorganisasi, bersenjata dan kerap kali berlangsung lama, terjadi diantara pihak-pihak, baik yang melibatkan antara negara, bangsa atau kelompok (faksi). Perang merupakan aksi fisik dan nonfisik yang melibatkan pihak-pihak yang melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan (<http://en.wikipedia.org/wi-ki/War>)

Secara etimologis istilah yang merujuk pada kondisi peperangan telah dikenal di berbagai bangsa dan kebudayaan. Misalnya di kalangan bangsa Yunani Kuno dikenal kosakata *barbaros*, kata *varhara* digunakan oleh bangsa Persia Kuno, sedangkan kata *varvar* dan *barbara* digunakan oleh bahasa Sansakerta. Berbeda dengan bangsa Jerman yang menggunakan kata *Krieg*, dan kata *guerra* yang lazim digunakan oleh orang-orang Spanyol, Portugis serta Italia yang mengadopsinya dari kosakata bahasa Jerman, *werra* yang berarti pertempuran atau pergulatan. Begitu pun dengan bangsa Romawi yang kemudian mengadopsi kata *war*, alih-alih menggunakan kata *bellum* (Latin) yang berarti perang, namun tidak digunakan karena kerap disalahartikan dengan kata *bello* yang berarti indah.

Kosakata *war* kemudian diadopsi dan berkembang di sejumlah kawasan dan bangsa di Eropa sejak sekitar tahun 1050. Dalam bahasa Inggris Lama dikenal kosakata *wyrre* dan *were*. Di kawasan yang menggunakan bahasa pengantar Prancis terdapat dua kosa kata yang bermakna perang, yakni *were* dan *werra*. Di kawasan berbahasa Jerman terdapat kosa kata *werran* dan *verwirren* yang memiliki makna “menjadi kacau”, hingga “membawa kekacauan” (<http://en.wikipedia.org/wiki/War>).

Dalam bahasa Indonesia, kosakata perang - yang kemungkinan besar diserap dari kata *varoar* dalam bahasa Sansakerta, memiliki sejumlah arti, diantaranya: permusuhan antara dua Negara (bangsa, agama, suku); pertempuran besar bersenjata antara dua pasukan atau lebih (tentara, laskar, pemberontak); perkelahian, konflik; dan cara mengungkapkan permusuhan.

Pengertian perang terus berevolusi, karena kini tidak lagi dimaknai sebagai pertikaian bersenjata sebagaimana menjadi ciri sejak bangkitnya peradaban manusia, karena di era modern perang lebih mengarah pada superioritas teknologi dan industri.

## Jenis-jenis Perang

Perang dan peperangan dapat dibedakan berdasarkan jenisnya. Menurut hukum internasional perang dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya, yakni: perang agresi, perang preventif (untuk mendahului agresi, dan perang untuk membela diri (Marbun, 1996: 493).

Peperangan dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, diantaranya: (1) **Perang Dingin**, yakni perang yang tidak menggunakan kekerasan bersenjata secara terbuka, namun situasi dan kondisinya mirip perang fisik; (2) **Perang Umum**, merupakan perang yang mengejar tujuan luas, biasanya menggunakan seluruh kemampuan suatu negara dan dilakukan di seluruh dunia; (3) **Perang Terbatas**, terjadi antara dua bangsa atau perang yang tidak melibatkan banyak bangsa secara luas dilihat dari sudut tujuan, penggunaan kekuatan dan ruang lingkup wilayahnya.

Beberapa istilah yang kemudian populer dan menjadi perluasan (ekstensi) dari teminologi peperangan diantaranya: (1) Perang Dunia; (2) Perang Ekonomi; (3) Perang Politik; (4) Perang Agama; (5) Perang Nuklir; (6) Perang Saudara; (7) Perang Teluk; (8) Perang Suku; (9) Perang

Antar Negara; dan (10) Perang Ekspansi (<http://id.wikipedia.org/wiki/Perang>).

Marbun mengklasifikasikan jenis peperangan menjadi: (1) Perang Dingin; (2) Perang Ideologi; (3) Perang Ekonomi; (4) Perang Kimia; (5) Perang Psikologis; dan (6) Perang Saudara (Marbun,1996:494-495).

Ditinjau dari faktor penyebabnya, perang terjadi karena berbagai sebab. Salah satu faktor yang kerap menjadi penyebab terjadinya perang adalah perbedaan ideologi sebagaimana tampak pada Perang Dunia II, Perang Korea, Perang Vietnam, dan Perang Afghanistan. Faktor lain yang juga memicu timbulnya peperangan didorong oleh motif memperluas wilayah kekuasaan, perbedaan kepentingan, serta perampasan sumber daya alam.

### **Perang dari Masa ke Masa**

John Keegan, seorang sejarawan militer yang juga seorang dosen, penulis dan jurnalis secara intens melakukan penelitian tentang berbagai perang dan peperangan yang terentang antara abad ke-14 hingga abad ke-21. Dalam salah satu bukunya yang masyur bertajuk *History of Warfare*, Keegan menulis bahwa peperangan merupakan fenomena universal yang bentuk dan luas lingkupnya sangat ditentukan oleh masyarakat yang terlibat di dalamnya. (<http://en.wikipe-dia.org>).

Perang pada dasarnya selalu berujung pada kepedihan dan trauma panjang bagi mereka yang terlibat di dalamnya, seperti halnya dirasakan oleh masyarakat Jepang dan Jerman pasca menderita kekalahan di Perang Dunia Kedua. Diperlukan waktu yang tidak singkat bagi suatu negara dan bangsa agar bisa bangkit kembali setelah tercabik peperangan. Jepang dan Jerman merupakan contoh negara dan bangsa yang berhasil bangkit dari puing-puing kehancuran akibat perang. Dalam waktu kurang dari dua dekade, Jerman membuktikan diri sebagai negara yang cepat pulih selepas Perang Dunia Kedua. Begitu pun dengan Jepang, setelah luluh lantak menyusul dijatuhkannya bom atom di Negeri Sakura pada tahun 1945, kini menjadi negara terpandang di dunia. Begitupun dengan Vietnam yang tengah menata diri menjadi negara baru yang kian diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara setelah diporak-porandakan Perang Vietnam selama lebih dari satu dekade.

Tidak sedikit negara dan bangsa yang harus terseok-seok bangkit dari keterpurukan akibat perang, karena runtuhnya moral dan prasarana

sebagai modal utama membangun kembali negara. Lebanon di kawasan Timur Tengah, Afganistan di Asia Tengah, juga beberapa negara di kawasan Benua Afrika menjadi bukti panjangnya kesengsaraan yang diakibatkan oleh peperangan.

Dampak yang luar biasa dari peperangan ditunjukkan oleh data statistik berikut ini. Perang Dunia I yang berlangsung sekitar empat tahun (1914-1918) diperkirakan telah menelan korban jiwa antara 9 hingga 15 juta jiwa, baik dari kalangan militer maupun sipil. Perang Dunia II (1939-1945) disebut-sebut menjadi peperangan yang paling banyak menelan korban jiwa, karena diperkirakan menyebabkan tewasnya lebih dari 60 juta orang. Total, dari dua kali perang dunia di era moderen ini yang berlangsung sekitar 30 tahun saja telah menyebabkan hilangnya nyawa sekitar 75 juta orang di berbagai kawasan di dunia. ([http://en.wikipedia.org/wiki/World\\_War\\_I\\_casualties](http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I_casualties)).

Jumlah korban jiwa yang diakibatkan oleh peperangan akan bertambah banyak bila melibatkan data dari berbagai perang yang terjadi sebelum dan pasca era PD I dan PD II. Berikut ini catatan korban jiwa yang diakibatkan oleh peperangan yang terjadi di beberapa tempat dalam rentang sejarah manusia.

Peperangan yang meletus menyusul pemberontakan Jenderal An Lushan dimasa berkuasanya Dinasti Tang yang berlangsung di daratan Cina dari tahun 755 hingga 763. Pemberontakan yang bermula saat Jenderal An Lushan mendeklarasikan dirinya sebagai kaisar di kawasan Cina Utara, seka-ligus mengukuhkan berkuasanya Dinasti Yan, telah menyulut peperangan yang menewaskan lebih dari 30 juta orang.

Begitupun dengan peperangan yang diakibatkan oleh agresi pasukan Mongol yang berlangsung lebih dari dua abad (1207-1472) diperkirakan telah menewaskan sekitar 40 juta jiwa yang terentang dari kawasan Asia barat, Asia timur, hingga Eropa Timur. Peperangan yang menandai surutnya Dinasti Yan dan bangkitnya Dinasti Ming selama hampir tiga puluh tahun (1340-1368) diperkirakan telah menyebabkan hilangnya sekitar 30 juta jiwa di daratan Cina.

Berikutnya, menyusul surutnya pengaruh Dinasti Ming setelah peperangan panjang hampir setengah abad (1616-1662) dengan para pengikut Dinasti Qing, diperkirakan telah menelan korban jiwa sekitar 25 juta orang.

Beberapa perang besar lain yang dicatat dalam sejarah manusia sebelum era modern diantaranya perang bermotif agama yang melibatkan Gereja Katolik berlangsung selama 30 tahun (1618-1648) - sehingga disebut juga Perang Tiga Puluh Tahun, diperkirakan menewaskan hampir 11 juta jiwa. Disusul perang yang dipicu oleh agresi Napoleon Bonaparte ke wilayah di luar Perancis - lebih dikenal dengan Perang Napoleon (1804-1815) - yang berkobar bukan saja di daratan Eropa, melainkan sampai ke Samudera Atlantik, Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, dengan korban jiwa ditaksir hingga 7 juta jiwa.

Masih ada perang agama yang hingga kini akan tetap dikenang, yaitu Perang Salib (1095-1291). Perang yang melibatkan pasukan Nasrani dari Eropa dalam upayanya merebut kembali Jerusalem dari kekuasaan pasukan Muslim, dan berlangsung hampir tiga abad ini telah menewaskan sedikitnya 3 juta jiwa dari kalangan militer dan sipil, di daratan Eropa maupun Timur Tengah.

Telah dibahas sebelumnya, PD I dan PD II merupakan dua peristiwa peperangan besar di era modern yang berakhir dengan dijatuhkannya bom atom di Jepang. Ironisnya peperangan tidak pernah berhenti sejak berakhirnya PD II. Tercatat sejumlah peperangan di hampir seluruh penjuru dunia, baik yang skalanya kecil, menengah dan besar. Berikut beberapa peristiwa peperangan tersebut, diantaranya Perang Korea yang berlangsung di era Perang Dingin (antara blok Amerika Serikat dengan blok Uni Soviet) melibatkan Korea Utara yang dianggap pro komunis dengan Korea Selatan yang pro Barat (1950-1953) telah menewaskan sedikitnya 3 juta orang.

Perang Iran-Irak yang berlangsung sekitar 8 tahun (1980-1988) diperkirakan telah menelan korban jiwa hingga 2 juta orang dari kedua belah pihak. Begitu pun dengan Perang Afghanistan, menyusul pendudukan pasukan Soviet (1980-1988) ke negara berpenduduk mayoritas muslim ini. Perang yang kemudian dimenangkan oleh pasukan Taliban ini dilaporkan telah menewaskan hampir 3 juta jiwa, selepas ditariknya pasukan Negara Beruang Merah dari Afghanistan (<http://en.wikipedia.org>).

Korban jiwa masih berjatuhan di Afghanistan meski pasukan Uni Soviet sudah angkat kaki. Pasalnya, konflik bersenjata berlanjut saat pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat dan NATO masuk ke negeri kaum Taliban itu dengan dalih mengejar teroris selepas penyerangan teroris di AS yang kemudian dikenal sebagai tragedi 9/11.



## Hollywood

Perang yang sejatinya merupakan sebuah tragedi - justru menjadi inspirasi yang tidak pernah kering bagi para seniman yang dituangkan menjadi karya sastra, seni rupa, teater, hingga diangkat di layar lebar maupun layar kaca. Sejak dikenalnya teknologi sinematografi di akhir abad sembilan belas, disusul kemudian oleh kehadiran televisi di awal abad kedua puluh, perang dianggap menjadi salah satu tema yang kerap diangkat oleh para sineas dan kreator televisi.

Salah satu pusat perfilman barat yang hingga kini memiliki pengaruh besar bagi perkembangan sinematografi dan televisi di berbagai belahan dunia adalah Hollywood. Berdiri di atas hamparan kawasan tandus berhiaskan pepohonan kaktus, bagian kota yang dikemudian hari masyhur sebagai Hollywood mulai didirikan sejak tahun 1853. Terletak di sebelah barat laut kota Los Angeles, California, Hollywood bertransformasi dari padang tandus menjadi area pertanian, kemudian menjadi kawasan permukiman. Nama Hollywood sendiri yang diperkenalkan oleh H.J. Whitley, kemudian disebut sebagai "Bapak Hollywood", akhirnya berubah bukan saja menjadi salah satu pusat hiburan dan perfilman terkemuka di AS bahkan ke berbagai belahan dunia.

Studio film pertama di Hollywood dibangun oleh Selig Polyscope Company pada tahun 1909 (<http://en.wikipedia.org/wiki/Hollywood>). Film pertama yang diproduksi di Hollywood - *In Old California* - merupakan hasil arahan sutradara D. W. Griffith. Film berdurasi 17 menit ini diputar perdana pada 10 Maret 1910.

Sejak saat itu, Hollywood yang semula kota kecil yang sepi berubah menjadi pusat perfilman terkemuka. Bak jamur di musim penghujan, industri perfilman berkembang pesat di Hollywood. Banyak studio film lahir, namun ada empat studio besar yang namanya tetap diperhitungkan yaitu: Paramount, Vitagraph (cikal bakal Warner Bros.), RKO dan Columbia. Selain keempat studio film besar tadi, masih terdapat studio film seperti Metro and Goldwyn (cikal bakal studio MGM), Universal, 21st Century Fox (atau Fox), dan puluhan studio film menengah dan kecil serta studio film independen.

Selain menjadi pemasok film layar lebar yang diputar di bioskop, Hollywood pun mulai melebarkan sayap menjadi bagian tak terpisahkan dari industri televisi. Langkah ini telah dijajagi sejak akhir tahun 40-an, ketika Hollywood membuat tiga skenario besar:

pertama mengembangkan sistem TV berbayar dengan memasok film-film *box-office*; kedua, melakukan eksperimen TV teater, sebuah cara baru memproyeksikan televisi ke layar lebar di bioskop atau teater film; ketiga, memproduksi program televisi, baik dilakukan secara berjangkauan maupun sindikasi (<http://www.muse-um.tv>).

Kerjasama Hollywood dengan industri televisi dilakukan terutama dengan tiga stasiun televisi besar yang bersiaran secara nasional, yakni ABC, CBS dan NBC. Langkah ini dilakukan Hollywood sejak awal 50-an, dan mulai membuahkan hasil ketika studio film Disney dan ABC memproduksi Disneyland pada tahun 1954. Langkah ini diikuti Warner Brothers dan MCA atau universal yang menjalin kondolidasi dengan stasiun TV memproduksi program tayangan televisi. Sejak tahun 1960 sekitar 40 persen program tayangan televisi diproduksi oleh beberapa studio besar Hollywood. Kini proporsi program TV yang diproduksi Hollywood jumlahnya kian membesar.

## Hollywood dan Film Perang

Persentuhan Hollywood - sebagai pusat perfilman Amerika dan dunia - dengan peperangan memiliki sejarah cukup panjang. Para sineas Hollywood di era film bisu sudah tertarik mendokumentasikan tragedi berdarah peperangan Spanyol Amerika pada tahun 1898, meski pun hal ini tidak melibatkan pemerintah AS. Sejak itu, kamera film para sineas Hollywood menjadi saksi mata keberanian, kepahlawanan sekaligus ketakutan dan kesia-siaan yang ditimbulkan peperangan (<http://www.digital-history.uh.edu>).

Max Alvarez menulis dalam artikel bertajuk *Cinema as in Imperialist Wea-pon: Hollywood and World War I*, keterlibatan Hollywood untuk mengangkat tema peperangan dalam di atas pita seluloid tidak bisa dilepaskan dari "bujukan" para elit penguasa AS disaat dua kubu kekuatan dunia terlibat dalam Perang Dunia I (1914-1918). Saat itu pihak Gedung Putih menganggap tidak bisa berpangku tangan sebagai pihak yang berada di luar gelanggang peperangan. Perang besar yang melibatkan negara-negara *super power* se-perti Jerman, Austria-Hongaria dan Kerajaan Ottoman (sekarang Turki) di satu sisi, berhadapan dengan aliansi negara-negara Inggris, Perancis, Itali, dan Rusia.

Pemerintah AS saat itu merasa perlu meminta bantuan para pemilik studio besar di Hollywood untuk merumuskan strategi propaganda

melalui media film. Keterlibatan Gedung Putih dalam PD I tidak bisa dilepaskan dari ekspansi kapitalisme AS serta kian bergantungnya negara Paman Sam pada perekonomian global.

Pada saat bersamaan film sebagai media massa baru yang tengah naik daun mendapat artikulasi yang tepat dengan meletusnya PD I. Ini tidak bisa dilepaskan dari fungsi film bukan saja sebagai media hiburan, melainkan lebih sebagai media informasi dan bahkan propaganda. Peran film semakin menonjol di era PD II, dan kelebihan yang dimiliki media audio visual (selepas era film bisu) kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam peperangan, baik Jerman maupun Amerika Serikat.

Jerman - melalui partai Nazi yang dipimpin Adolf Hitler - sebagai negara yang dianggap memprovokasi meletusnya PD II memanfaatkan film sebagai media propaganda untuk menyulut sentimen perang rakyatnya. Kepiawaian ahli strategi propagandanya, Goebels, Hitler menjadikan film propa-ganda sebagai senjata utama membangkitkan sentimen anti Yahudi semasa PD II yang diputar berulang-ulang di bioskop. Melalui film pula Jerman berhasil memanipulasi kekalahan dari musuh-musuhnya di medan perang, salah satunya kealahannya dari Rusia.

Setali tiga uang, hal yang lebih kurang sama dilakukan oleh AS yang memanfaatkan film sebagai media propaganda. Seperti halnya saat berlangsungnya PD I (1914-1918) ditandai oleh keterlibatan Hollywood dalam membuat film yang bertujuan membakar sentimen perang rakyat negeri paman Sam. Dampaknya sangat luar biasa, selain mengukuhkan keberhasilan kapitalisme AS (dan Hollywood), sekaligus terjadinya tragedi kemanusiaan yang menewaskan sedikitnya 320 ribu orang di pihak AS, dan jutaan lagi korban tewas dari kalangan militer dan sipil di seluruh dunia.

Selepas PD I pemerintah dan rakyat AS berupaya mengambil sikap netral, bahkan cenderung menjadi isolasionis yang ditunjukkan dengan keengganannya untuk terlibat ke dalam konflik militer. Di saat perang di Eropa meletus di penghujung dasawarsa 40-an, sikap rakyat AS pada umumnya enggan terlibat dalam peperangan. Sikap itu hanya bertahan hingga tahun 1941, menyusul diserangnya pangkalan angkatan laut AS di Pearl Harbour, Hawaii, pada 7 Desember 1941 menjadi babak baru masuknya AS ke kancah PD II.

Salah satu faktor yang mengubah sikap pemerintah dan rakyat AS untuk terlibat (kembali) dalam konflik militer tidak lepas dari pengaruh kalangan industri perfilman di Hollywood. Dibentuknya Liga Anti-Nazi Hollywood di tahun 1936 merupakan sikap politik para seniman dan industriawan Hollywood menentang penindasan kaum Yahudi oleh beberapa Negara fasis di berbagai negara di Eropa.

Lewat liga ini komunitas Hollywood mulai berpolitik praktis melalui karya sinematografi, ketika studio film besar memproduksi film anti-Nazi selama periode 1939-1941. Hollywood sadar dengan keputusannya yang dapat berdampak pada anjloknya keuntungan dari penjualan film, khususnya dari pasar luar negeri. Film berjudul *Confessions of a Nazi Spy*, yang diproduksi studio Warner Bros di tahun 1939, dan film *The Mortal Storm* produksi studio MGM, merupakan contoh dua film yang sangat politis (<http://www.digital-history.uh.edu/mo-dules/ww2/wartimehollywood.html>).

Uniknya, perang juga hadir melalui film animasi. Salah seorang petinggi di industri film Hollywood yang digandeng pemerintah AS adalah Walt Disney. Dalam rentang waktu sekitar tiga tahun (1942-1945), studio film animasi ini dilibatkan dalam produksi film animasi propaganda atas pesanan pemerintah AS, baik dari kalangan sipil dan militer. Pihak pertama yang memesan film animasi Disney adalah Angkatan Laut AS (US Navy). Disusul kemudian Angkatan Darat, Angkatan Udara, Departemen Pertanian dan Departemen Keuangan. Mereka tertarik dengan pendekatan kreatif Disney dalam membuat film-film edukatif dan propaganda. Film animasi Disney selain dirancang untuk membentuk karakter juga memberikan pembekalan berupa instruksi dan pelatihan bagi para kelasi dan tentara.

Selama periode tersebut Disney telah memproduksi lebih dari 1,2 juta meter film propaganda perang, atau setara dengan 68 jam film panjang. Studio Disney tidak hanya memproduksi film-film animasi yang diperuntukan bagi kalangan terbatas, khususnya militer. Bekerjasama dengan Frank Capra, kolonel AD AS, Disney juga membuat film animasi serial yang diputar di bioskop. Dua film animasi Disney bertema propaganda perang yang ditujukan untuk membangkitkan dukungan terhadap perang yang cukup populer saat itu adalah *Prelude to War* dan *America Goes to War*. Salah satu meningkatnya dukungan rakyat AS terhadap kebijakan pro perang dari pemerintah, diantaranya melalui penayangan film, termasuk film animasi Disney.

## Hollywood dan Propaganda Perang

Bagi Hollywood, dan pemerintah Amerika Serikat, film bukan saja merupakan komoditas ekonomi yang mendatangkan pemasukan besar, juga menjadi media PR sekaligus alat kebudayaan dan media “propaganda’ paling ampuh untuk membangun opini publik dan citra negeri Paman Sam di mata dunia. Sejarah Hollywood tidak lepas dari kecenderungan menjadikan film sebagai media propanda.

Telah diulas sebelumnya, tumbuhnya kesadaran tentang keterlibatan Hollywood dalam politik dan konflik militer telah bersemi sejak awal. Periode 1917-1918 merupakan tonggak bersejarah bersamaan dengan politik intervensi AS dalam konflik bersenjata di berbagai belahan dunia. Sejak saat itu pula Hollywood menjadi bagian yang nyaris tidak terpisahkan dari sika politik pemerintah AS, diantaranya melancarkan kampanye kehumasan melalui film.

Hingga tahun 1916 Hollywood cenderung menunjukkan sikap anti perang, ini terlihat pada film *Intolerance* karya sutradara besar seperti D.W. Griffith dan film *The Hypocrites* karya Lois Weber. Tema yang diangkat para seneas di era film bisu diantaranya menyoroti isu kemiskinan dan sistem kelas. Charlie Chaplin, aktor merangkap sutradara, berhasil mengangkat kedua isu tersebut melalui film komedi hitam *Easy Street*, dan *The Immigrant*.

Angin perubahan berembus kencang di tahun 1916, saat sutradara pasi-fis D.W. Griffith berganti haluan membuat film bertema pro perang, *Hearts of the World*. Perubahan sikap Hollywood bersamaan dengan kerugian industri film di pasar ekspor, seiring meletusnya PD I di Eropa. Banyak negara di Eropa tidak menerima film-film Hollywood menyusul pecahnya perang, peraturan yang anti film AS, serta rusaknya berbagai teater akibat peperangan. Bagi para indutriawan Hollywood perang di Eropa menjadi ancaman serius bagi masa depan Hollywood. Sejak itu pula digalang opini pro perang yang melibatkan Hollywood dan Gedung Putih.

Aliansi antara Hollywood dengan pemerintah AS dideklarasikan oleh Presiden Woodrow Wilson pada 27 Januari 1916 di New York di depan sekitar 1000 undangan yang menghadiri perhelatan yang diselenggarakan Motion Picture Board of Trade (Alvarez dalam <http://www.wsws.or>) Hadir dalam acara tersebut para petinggi dari kalanga industri film seperti Goerge Eastman (Kodak), Adolph Zukor, dan

Samuel Goldfish (Paramount). J. Stuart Blackton dari Vitagraph yang menjadi juri bicara Hollywood mengutarakan pendapatnya tentang pentingnya kesiapsiagaan militer untuk menjaga kedaulatan wilayah AS. Pernyataan Blackton kemudian ditanggapi oleh Presiden Wilson dengan menyampaikan pandangannya tentang kebenaran dalam narasi film.

Dengan terbangunnya hubungan yang kian mesra diantara Hollywood dengan pemerintah AS terkait masa depan industri film, dilakukan berbagai langkah konkret diantaranya pembentukan Asosiasi Industri Film Nasional (National Association of Motion Picture Industry atau NAMPI). Ketua NAMPI William A. Brady ditunjuk langsung oleh Presiden Wilson pada 1917. NAMPI berada dibawah koordinasi langsung Komisi Informasi Publik (*Committee on Public Information* atau CBI) yang menjamin dukungan patriotik seluruh entitas industri perfilman AS, serta akan melayani pemerintah AS. Dengan kata lain, sejak saat itu Hollywood resmi menjadi mesin propaganda ampuh bagi pemerintah AS dalam persiapan menuju masa perang.

Sebagai tindak lanjutnya Universal Studio memproduksi film seri, film pendek, dan film panjang, diantaranya *Uncle Sam at Work*, *The War Wait*, *The Birth of Patriotism*, dan *Uncle Sam's Gun Shops*. Menyusul kemudian sejumlah film propaganda karya Rupert Julian yang dibuat tahun 1918, *The Kaiser*, *The Beast of Berlin*, dan *The Geezer of Berlin*, serta sederet film lain bertemakan propaganda perang diproduksi studio Hollywood.

Bukan saja film "manusia", propaganda juga dilakukan melalui film animasi. Salah satu studio film animasi yang membuat film propaganda dibuat oleh Walt Disney di era awal tahun 40-an. Film-film animasi bertema propaganda perang ini diputar di bioskop saat itu, tidak bertujuan menghibur anak-anak melalui petualangan lucu Donald Duck atau Mickey Mouse. Salah satunya yang kemudian menimbulkan kontroversi adalah film berjudul *Education for Death*.

Walt Disney pernah berkolaborasi dengan pemerintah AS membuat lusinan film propaganda animasi yang bertujuan "mengedukasi" penonton tentang kelaliman Adolf Hitler dan partai Nazi yang berkuasa di Jerman. Film itu dibuat untuk "membakar" sentimen anti Hitler dan poros Jerman yang bersekutu dengan sejumlah negara yang dicap fasis, seperti Italia dan Jepang. Upaya ini dianggap berhasil mempengaruhi anggota militer AS dan sekutunya, tetapi juga masyarakat sipil saat itu.

Bukan itu saja, banyak film yang bertema perang turut membangun opini masyarakat, diantaranya sekuel film Rambo. Film yang dibuat dan dibintangi oleh Sylvester Stallone tidak semata-mata mengangkat aksi jagoan veteran perang Vietnam bernama John Rambo. Film ini harus dimaknai sebagai upaya Amerika menghapus trauma atas kekalahannya pada Perang Vietnam. Penggambaran Rambo yang lebih realistik dan humanistik di serial pertamanya, berubah menjadi sosok superhero pada sekuel selanjutnya. Dengan penggambaran yang sangat dilebih-lebihkan, Rambo bukan saja berhasil mengubrak-abrik tentara di semenanjung Indochina, juga meluluhlantakan pasukan Uni Soviet di Afghanistan.

Hollywood sebagai representasi Amerika dalam film-filmnya hampir senantiasa berjaya di hampir setiap peperangan, baik yang berlatar belakang sejarah maupun fiktif. Selain piawai memunculkan sosok heroik yang menjadi sosok idola dunia, Hollywood mampu membangun stereotip musuh-musuhnya di layar lebar dan layar kaca, sebagai sosok yang jahat, kaku, bengis dan tanpa hati nurani. Penggambaran tentara Jerman dan Jepang di Era Perang Dunia II, sebagai misal, merupakan stereotip yang nyaris tidak berubah pada film perang Hollywood dari dulu hingga sekarang. Bahkan, film-film bergenre *western* yang mengangkat tema perang, Hollywood di era 40-an hingga 60-an, kerap menampilkan sosok orang Indian sebagai suku barbar yang haus darah.

### **Hollywood dan Wacana Superioritas AS**

Penggambaran *stereotype* Hollywood tentang musuh-musuh AS dan sekutunya di dalam film-film perang yang tidak hanya menampilkan PD II. Penggambaran secara hitam-putih ini terus berlanjut pada banyak film perang dengan mengambil *setting* pra dan pasca PD II. Tidak heran bila kemudian muncul sosok protagonis (sosok pahlawan) dan antagonis (sosok musuh atau pecundang) yang penggambarannya terkadang tidak proporsional atau bahkan manipulatif.

Sebaliknya, tokoh protagonis direpresentasikan sebagai sosok jagoan yang nyaris sempurna. Sebagai sosok pahlawan, tokoh protagonis hampir dipastikan merupakan anggota militer AS atau Negara Barat yang terlatih. Setidaknya merepresentasikan sosok pejuang cinta tanah air (patriotis), serta anti penjajahan. Banyak tokoh protagonis yang



melekat dengan citra AS, salah satunya adalah John Rambo sang veteran Perang Vietnam.

Penggambaran pahlawan dalam film-film Hollywood dapat dijelaskan melalui penjelasan Kathryn Kane - pakar perfilman - yang menegaskan adanya kesamaan antara *genre* film perang dengan film *western*. Kedua *genre* film sama-sama menggunakan konsep-konsep oposisi (*opposing concepts*) seperti: konsep perang-damai; konsep peradaban-perbudakan. Film-film perang Hollywood pada umumnya membingkai konflik antara pihak baik (*good*) dengan pihak jahat (*evil*), misalnya direpresentasikan lewat sosok Pasukan Sekutu (*good*) melawan Pasukan Nazi Jerman (*evil*). Labelisasi pasukan sekutu yang "beradab" dioposisikan dengan pasukan Nazi Jerman, Itali dan Jepang yang digambarkan sebagai orang-orang "kejam".

Film perang Hollywood selain kerap menjadi dan atau dijadikan media propaganda melalui penggambaran sosok protagonis dan antagonis secara *stereotype*, secara tidak langsung tengah membangun wacana superioritas AS. Terlebih ketika AS berhasil membangun citra barunya sebagai negara *super power* dan "polisi dunia" pasca PD II. Superioritas di bidang ekonomi dan politik yang kian menentukan politik dan perekonomian dunia, pada saat bersamaan menciptakan superioritas melalui kekuatan militer.

Superioritas AS dicitrakan secara audio dan visual bukan saja melalui penggambaran tokoh-tokoh pahlawan, juga mempertontonkan kemajuan teknologi militernya. Film Hollywood ibaratnya menjadi "etalase" teknologi persenjataan dan mesin perang mutakhir, seperti menampilkan kapal induk, kapal selam, pesawat tempur, hingga penggunaan *gadget* dalam peperangan. Untuk dapat menampilkan berbagai mesin perang di layar lebar dan layar kaca, Hollywood harus bekerjasama dengan Pentagon (baca: Departemen Pertahanan AS) sebagai pemegang otoritas tertinggi militer AS.

## Hollywood dan Narasi Perang

Terkait dengan postur film perang Hollywood, John Belton berupaya menjelaskannya dari perspektif elemen naratifnya. Menurut Bolton terdapat empat elemen naratif yang kerap hadir dalam film perang produksi Hollywood, yaitu: (1) penangguhan atas moralitas sipil selama perang berlangsung (*the suspension of civilian morality during times*



*of war*); (2) pengutamakan tujuan kolektif di atas motif individu (*primacy of collective goals over individual motivations*); (3) persaingan antara pria dalam kelompok yang didominasi laki-laki serta marginalisasi dan objektifikasi perempuan (*rivalry between men in predominantly male groups as well as marginalization and objectification of women*); (4) penggambaran reintegrasi veteran perang (*depiction of the reintegration of veterans*) (Belton dalam <http://en.wikipedia.org/>).

Merujuk pada tipologi film perang berdasarkan elemen naratif Bolton, wajar bila kita mendapati film-film perang Hollywood kemudian cenderung memberikan justifikasi kebijakan perang pemerintah AS. Bahkan, melalui film masyarakat sipil (terutama yang menonton) diminta menunda penilaian atas motif pemerintah AS melakukan peperangan, sekalipun itu merupakan invasi militer yang melanggar konvensi internasional.

Hollywood juga menyuarakan semangat patriotisme perang melalui film-filmnya. Ini terutama tampak pada film Hollywood pada saat berlangsungnya dan selepas PD II. Hal ini terus berlangsung hingga awal dasawarsa 70-an, ketika AS terlibat dalam Perang Vietnam. Selepas itu, sikap studio besar Hollywood dan studio film independen cenderung lebih kritis ketika mengangkat tema perang atau dampak perang. Film-film perang berikut ini memotret perang dan peperangan dari perspektif yang berbeda, dalam arti lebih kritis dan tidak hitam-putih, diantaranya *Apocalypse Now*, *First Blood*, *Saving Private Ryan*, *The Deer Hunter*, *Full Metal Jacket*, *Dances with Wolves*, *Kingdom of Heaven*, *Empire of the Sun*, *Schindler's List*, dan *Fahrenheit 9/11*.

Menurut hemat penulis film-film perang Hollywood dapat dikategorikan menjadi: (1) Film perang sebagai karya fiksi yang bersifat menghibur, tanpa berpretensi menjadi alat politik; (2) Menjadikan film perang sebagai alat untuk mendokumentasikan sejarah; (3) Film menjadi media untuk "mengobati" trauma yang diakibatkan oleh perang; (4) Film yang menggambarkan perang sebagai sebuah kesia-siaan sehingga dijadikan sebagai media untuk menentang politik perang pemerintah.

Dari sisi tema dan *setting* waktu berlangsungnya peperangan, maka film-film perang Hollywood memiliki corak yang cukup beragam, diantaranya: (1) Film yang mengangkat peperangan di masa lampau; (2) Film perang yang mengangkat setting waktu di masa kini; dan (3) Film perang dengan setting waktu dan tempat di masa depan.

## Film dan Konstruksi Sosial

Di era Perang Dingin, Hollywood menjadikan Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur serta kaum komunis sebagai musuh yang harus diperangi dalam film-filmnya. Zaman terus berubah, begitupun dengan musuh dalam film peperangan. Terakhir, Al-Qaeda dipilih menjadi musuh baru yang sangat berbahaya oleh para kreator film di Hollywood.

Menarik untuk disimak, kerap terjadi penggambaran kejadian dan pelaku dalam film-film perang Hollywood tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Film merupakan karya imajinatif dan fiktif, dalam beberapa kasus terjadi penyimpangan yang keluar dari konteks sejarah. Diantaranya adalah film perang yang berhasil menjadi *box office*, *Black Hawk Down*. Fakta sejarah menyebutkan pasukan Pakistan dan Malaysia sebagai pihak yang paling berperan dalam penyelamatan pasukan AS yang terjebak di tengah kepungan pasukan milisi di kota Mogadishu, Somalia. Dalam film besutan sutradara Ridley Scott itu, digambarkan kedigdayaan pasukan AS bertahan dari serangan pasukan yang loyal kepada Mohammed Farrah Aidid.

Hal lain yang juga patut dikritisi dari karya para sineas Hollywood adalah penggambaran perang bukan sebagai peristiwa tragedi kemanusiaan, melainkan sebuah lelucon yang layak ditertawakan. Ini biasanya tampak pada sejumlah film perang bergenre komedi.

Fenomena tentang pentingnya mengkritisi film perang bukan semata produk seni melainkan sebagai sebuah wacana budaya, politik dan ekonomi, merupakan telaah yang akan diangkat dalam makalah. Bahwa film-film perang produksi Hollywood memiliki implikasi sosial, politik, ekonomi dan budaya, hampir setiap orang mengetahuinya. Persoalannya tidak semuanya secara mudah mampu ditangkap secara kasatmata. Pesan naratif film perang harus didekati bukan saja dari aspek yang bersifat manifes, melainkan juga aspek yang laten. Intinya, film sebagai karya seni dan budaya bukan saja harus dilihat pesan moralnya, melainkan juga pesan ideologisnya.

Pesan atau isi media, dalam hal ini film perang, tidak sama persis dengan peristiwa peperangan itu sendiri. Ini terkait dengan sifat dan fakta bahwa pekerjaan media massa, termasuk film, hanya menceritakan (kembali) peristiwa-peristiwa. Untuk menjelaskan bagaimana media massa beroperasi, mengelola dan mengolah isi media, dapat dijelaskan

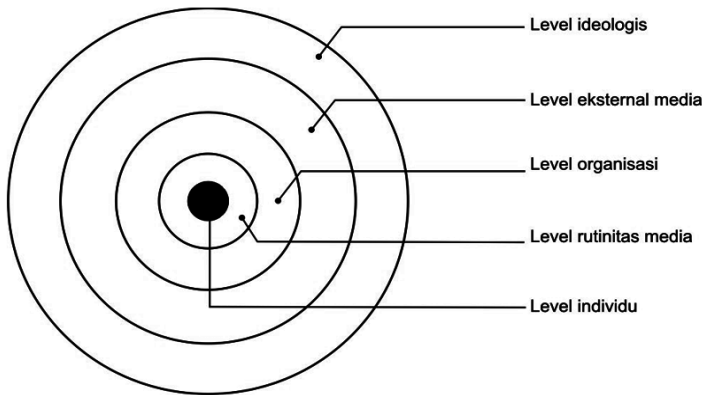
melalui sejumlah perspektif. Diantaranya melalui pendekatan konstruksi sosial dan kemudian dekonstruksi.

Film sebagai media massa dan film yang mengangkat tema perang sejatinya tidak lebih dari realitas yang telah dikonstruksikan (*constructed reality*). Ini sejalan dengan telaah Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam buku *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge*, yang menegaskan bahwa realitas sosial dikonstruksi melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Lebih jauh Berger dan Luckmann sepakat konstruksi sosial tidak berlangsung dalam ruang hampa, namun sarat dengan kepentingan-kepentingan (dalam Sobur, 2001: 89).

Telaah konstruksi sosial Berger dan Luckman dikoreksi oleh sejumlah ilmuwan, salah satunya oleh Jaques Derrida yang melontarkan gagasan tentang dekonstruksi (*deconstruction*) yang melakukan interpretasi terhadap teks, wacana, dan pengetahuan masyarakat. Dalam dekonstruksi lahir tesis-tesis tentang keterkaitan antara kepentingan (*interest*) dan metode penafsiran (*interpretation*) atas realitas sosial (Sobur, 2001: 91-92). Dalam dekonstruksi, menurut Derrida, kepentingan tertentu selalu mengarahkan kepada pemilihan metode penafsiran. Bahkan, interpretasi yang digunakan individu terhadap realitas bersifat sewenang-wenang.

Pemikiran Derrida sejalan dengan gagasan Jurgen Habermas yang menjelaskan tentang adanya hubungan strategis antara pengetahuan manusia - baik dalam bentuk empiris, analitis, historis hermeneutik, maupun kritis - dengan kepentingan (teknis, praktis, atau yang bersifat emansipatoris). Tidak dapat disangkal bahwa yang terjadi juga bisa sebaliknya, ketika pengetahuan adalah produk kepentingan (Bungin dalam Sobur, 2001: 92).

Telaah lain yang dapat menjelaskan fenomena ini adalah model Hirarki yang diperkenalkan oleh Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese. Model ini menjelaskan berbagai faktor (level) yang turut mempengaruhi isi media, yaitu: (1) level individu pekerja media; (2) level rutinitas media; (3) level organisasi; (4) level eksternal media; (5) level ideologis (lihat gambar berikut).



**Gambar 4.6. Model Hirarki (Shoemaker dan Reese, 1991:54).**

Dalam kasus film perang yang diproduksi Hollywood, setiap faktor atau level tersebut berkelindan mempengaruhi keluaran pusat perfilman Barat ini. Mulai dari level individu (investor, produser, sutradara dan para pendukung film) hingga level ideologi ikut mewarnai pesan yang tersurat dan tersirat dalam berbagai film yang mengangkat tema peperangan. Tanpa bermaksud menjustifikasi, wajar bila film-film Hollywood kemudian memiliki cara pandang dan pendekatan yang sangat “Amerika”. Artinya, bangunan narasinya sudah sangat disesuaikan dengan konteks dan kepentingan Amerika.

Pendekatan yang dilakukan oleh Shoemaker dan Reese senafas dengan pendekatan budaya atau kulturalis (*culturalist approach*). Dalam pendekatan ini memandang media menghasilkan pesan yang dipengaruhi faktor internal media (seperti rutinitas media) sekaligus oleh faktor eksternal media (Sudibyo, 2001: 4). Artinya Hollywood sekalipun sebagai “pabrik” film tidak dapat dilepaskan dari kekuatan-kekuatan ekonomi politik di luar media.

Perlu diketahui, beberapa jaringan televisi dan studio film di Hollywood dimiliki sejumlah perusahaan terbesar di dunia yang berafiliasi secara tidak langsung dengan industri pertahanan dan militer AS. Stasiun NBC, CBS, ABC, Fox, dan CNN dimiliki masing-masing oleh General Electric, Viacom, Disney, News Corporation, dan Time Warner. Para anggota dewan direksinya juga menjadi anggota dewan direksi beberapa perusahaan yang menghasilkan senjata dan memasok peralatan militer, diantaranya Boeing, General Electric, Honeywell, Xerox, Chrysler dan Rocwell Automation (Andreas, 2004: 58).

Persoalannya, manakala realitas media - yang ditampilkan melalui film perang-berbeda atau bersimpangan dengan realitas, maka hakikatnya telah terjadi kekerasan simbolik. Menurut Alex Sobur, kekerasan simbolik yang muncul dalam media mewujudkan melalui penggunaan bahasa penghalusan, pengaburan, atau bahkan pengasaran fakta (Sobur, 2001: 89). Kekerasan simbolik ini, sayangnya kerap muncul di layar lebar dan layar kaca melalui film-film perang yang dibuat oleh Hollywood.

### **Daftar Pustaka**

- Andreas, Joel, 2004, *Nafsu Perang: Sejarah Militerisme Amerika di Dunia*. (Terjemahan), Jakarta: Profetik.
- Rodman, George, 2010, *Mass Media in a Changing World*, Third Edition. New York, McGraw Hill.
- Marbun, B.N, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Shoemaker, Pamea J., Reese, Stephen D. , 1991, *Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content*. London: Longman Publishing Group.
- Tunstall, Jeremy, 1977, *The Media are American: Anglo-American Media in the World*. London: Constable.
- Sobur, Alex, 2003, *Semiotika Komunikasi*, Bandung: Rosda Karya.
- Sudibyo, Agus, 2001, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKiS.
- <http://en.wikipedia.org/wiki/War> (diakses 20/4/2012, pkl 10:30)
- [http://en.wikipedia.org/wiki/John\\_Keegan](http://en.wikipedia.org/wiki/John_Keegan) (diakses 23/4/2012, pkl 09:30)
- [http://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_wars\\_and\\_anthropogenic\\_disasters\\_by\\_death\\_toll](http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_and_anthropogenic_disasters_by_death_toll) (diakses 24/4/2012, pkl 15:58)
- <http://www.museum.tv/eotvsection.php?entrycode=hollywoodand> (diakses 23/4/2012, pkl. 20/23)
- <http://www.digitalhistory.uh.edu/modules/ww2/wartimehollywood.html>(diakses, 17/4/20-12, pkl 09:21)
- [http://en.wikipedia.org/wiki/War\\_film](http://en.wikipedia.org/wiki/War_film), 24/4/2012, pkl 16:50)



# REPRESENTASI ATRIBUT MILITER INDONESIA DALAM FASHION KOMUNIKASI

**Aprilani**

## **Pendahuluan**

Di beberapa negara yang memiliki tradisi pemerintahan militer, seperti Indonesia, hubungan antara militer dengan warga negara sipil menampilkan perbedaan identitas sosial dalam kehidupannya. Pada masa Orde Baru militer terlanjur terbiasa berada dalam aktivitas urusan sipil sehingga menempatkan militer berperanan penting terhadap kebijakan dan keputusan pemerintah Indonesia. Era reformasi pada tahun 1998 telah merubah posisi militer dengan adanya penghapusan dwifungsi ABRI dan terpisahnya Polri dari ABRI sehingga TNI berdiri sendiri sebagai kekuatan pertahanan negara. Mundurnya dominasi militer dari pemerintahan merupakan langkah konsolidasi internal maupun eksternal dalam upaya memperbaiki citra militer.

Militer yang identik dengan keberanian dan heroisme, telah menjadi idola kaum muda Indonesia setelah pasca kemerdekaan. Dengan segala kekurangannya, reposisi dan paradigma baru militer hampir berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada militer. Kemampuan mewujudkan komitmen profesional dan tampil lebih humanis, telah menumbuhkan simpati yang luas. Ditinjau dari geopolitik dan geostrategi dengan posisi geografis, sumber daya alam dan jumlah serta kemampuan penduduk telah menempatkan Indonesia menjadi ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh antar negara besar. Hal tersebut secara langsung maupun tidak, memberikan dampak negatif terhadap segenap aspek kehidupan sehingga dapat mempengaruhi dan membahayakan kelangsungan hidup dan eksistensi NKRI, untuk itu bangsa Indonesia harus memiliki keuletan

dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga berhasil mengatasi setiap bentuk tantangan ancaman hambatan dan gangguan dari manapun datangnya. Militer mempunyai memiliki peran strategis dalam fase ini, selain sebagai figur dari sebuah kekuatan (*Power*), militer juga menjadi simbol pertahanan dan keamanan negara Indonesia.

Jiwa kepahlawanan para pejuang kita menghadapi agresi militer Inggris dan Belanda, atau perang gerilya Panglima Besar Soedirman telah melahirkan cerita-cerita positif yang menimbulkan minat sebagai gaya hidup yang membanggakan. Jenderal Soedirman dengan pakaian sipil dan tongkat serta keris pemberian Kyai Mahfuz ketika memimpin perang gerilya (Adi, 2011: 103) dapat menjadi simbol keteladanan seorang yang mempunyai nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Setelah mengalami perjuangan luar biasa mulai awal tahun 1900-an, Jenderal Soedirman dilantik menjadi Panglima Besar Tentara Republik Indonesia pada tahun 1945. Menurut George Junus Aditjondro (dalam Pontoh, 2005: xxvi), telah terjadi penghianatan terhadap jiwa teladan Jenderal Soedirman dengan realitas dwi fungsi ABRI yang membuat gaya hidup militan para jenderal-jenderal dimasa orde baru sampai sekarang dan menganggap TNI telah mengkhianati teladan pendirinya.

Tentara juga menggulirkan wacana bahwa soal pertahanan negara bukanlah semata-mata urusan politik, aspek militer harus selalu diperhitungkan. Seperti yang dijelaskan oleh Soepardjo Rustam, yang mencerminkan sikap tentara terhadap pemerintah (Dalam Pontoh, 2005:132) ;

*“Tentara (maksudnya Sudirman) tidak menyangkal posisinya sebagai alat negara tetapi bersamaan dengan itu tentara juga merasa dirinya sebagai pejuang kemerdekaan seperti banyak kelompok pejuang kemerdekaan yang lain di luar tentara. (Sayangnya) pemerintah menganggap tentara hanya sebagai alat negara. Perbedaan pendapat antara tentara dan pemerintah sangat disadari Soedirman. Seringkali ia membahas hal itu dengan kami. Soedirman tidak ingin dipermainkan. Ia tidak ingin kalau pemerintah hanya memberi perintah. Ia menghendaki musyawarah. Ia tidak ingin melaksanakan perintah tanpa mengetahui mengapa perintah itu diberikan”.*

Wacana di atas, mengindikasikan bahwa perbedaan paradigma tentara dan pemerintah telah terjadi sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Realitas ini sedikit banyak mempengaruhi penampilan militer di Indonesia dengan gaya hidup masing-masing. Menurut Kolonel Cin



Harso (<http://www.mabesad.mil.id>), berbagai permasalahan selalu dan terus menghadang dalam pelaksanaan pengelolaan militer adalah permasalahan anggaran yang dapat dikatakan sudah sangat klasik, tetapi memang inilah yang menjadi sumber dan pokok permasalahan, disamping kurangnya sumber daya manusia yang terampil serta terbatasnya sarana administrasi untuk sebagai pengelolaan aktivitas militer.

Disisi lain, fenomena penggunaan atribut militer dikalangan sipil nampak sebagai bagian dimana militer menjadi legitimasi kekuasaan. Pemilu tahun 2004 lalu, Mabes Polri meminta para satgas partai untuk tidak menggunakan atribut militer selama kampanye. Penggunaan atribut militer oleh satgas parpol dinilai dapat memberikan dampak sosial yang kurang baik bagi masyarakat. Satgas parpol masih tetap diperlukan untuk pengamanan internal parpol yang bersangkutan. Pelarangan memakai atribut militer lebih disebabkan oleh: *pertama*, demi penghormatan kepada militer. Semua atribut yang disandang oleh seorang anggota militer niscaya diperoleh dengan susah payah. Memasang *wing* di dada, tanda pangkat di pundak, *brevet* di kepala, selalu memerlukan beberapa pengorbanan, baik itu keringat, darah, kadang nyawa. Bukan dibeli di toko yang menjual seragam maupun atribut militer untuk dipasang sendiri. *Kedua*, mencegah iklim, suasana, dan paradigma militer menyelinap ke dunia sipil.

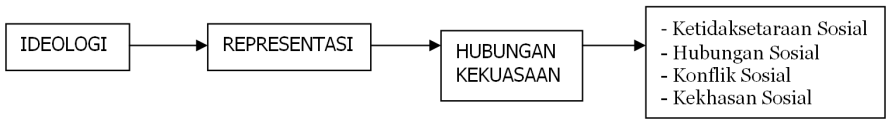
Tampilnya militer menjadi pioner pembangunan nasional di masa awal kebangkitan suatu bangsa, merupakan konsekuensi keunggulan kualitas yang ada didalam diri prajurit militer dibandingkan masyarakat sipil pada umumnya. Disiplin yang tinggi, jiwa kejuangan dan pemahaman lingkungan sekitar, adalah sebagian kecil watak kepemimpinan militer yang dibutuhkan saat itu. Lembaga militer dipandang sebagai miniatur negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa, etnis, agama dan latar belakang budaya. Nasionalisme, menjadi salah satu ciri yang melekat pada diri seorang militer. Dengan atribut militernya, masyarakat memandang militer sebagai perekat bangsa dan personifikasi dari persatuan nasional. Nasionalisme dalam pandangan militer adalah sebuah ideologi yang tidak dapat ditawar. Militer tidak membedakan hal-hal yang menjadi perbedaan latar belakang sosiologis, maka lembaga militer dapat dianggap mengembangkan paham nasionalisme. Di sisi lain, penggunaan atribut militer juga merupakan

bagian dari seni dari *fashion* yang berhak dimiliki oleh siapapun sehingga perlu ada aturan yang jelas dalam setiap penggunaan atribut militer. Tulisan ini akan mengungkap atribut militer Indonesia dengan merepresentasikan kedalam gaya hidup masyarakat yang dikaji melalui pendekatan *fashion komunikasi*.

### **Representasi Gaya Hidup**

Representasi sering dipahami sebagai gambaran sesuatu yang akurat atau realita yang terdistorsi. Konsep lama mengenai representasi ini didasarkan pada premis bahwa ada sebuah gap representasi yang menjelaskan perbedaan antara makna yang diberikan oleh representasi dan arti benda yang sebenarnya digambarkan. Berlawanan dengan pemahaman standar itu, Stuart Hall (dalam Burton, 2008: 141) berargumentasi bahwa representasi harus dipahami dari peran aktif dan kreatif orang memaknai dunia sehingga dalam wacana ini mengartikulasikan bahwa atribut militer harus dipahami sebagaimana orang atau warga sipil memaknai secara sempurna dengan rasionalitas yang dikembangkan sebagai bentuk dari penafsiran aktif atas dasar realitas kehidupan yang terjadi disekitarnya. Disisi lain, Mc Robbie (1994) merujuk representasi sebagai “lokasi tempat kekuasaan, regulasi dan sumber identitas”. Representasi adalah ungkapan wacana-wacana yang memberikan makna terhadap ide tentang rasisme. (Burton, 2008: 141)

Stuart Hall (dalam Burton, 2008: 134) menganggap bahwa ada yang salah dengan representasi kelompok minoritas dalam media, bahkan ia meyakini bahwa imaji-imaji yang dimunculkan oleh media semakin memburuk. Hall mengamati bahwa media cenderung sensitif pada gaya hidup kelas menengah keatas, mayoritas masyarakat yang sudah teratur, sementara yang kulit hitam bermasalah dalam area kekuasaan sensitif itu. *Hall* memahami bahwa komunikasi selalu berhubungan dengan kekuasaan. Kelompok yang memiliki dan menggunakan kekuasaan dalam masyarakat mempengaruhi apa yang direpresentasikan melalui media. Pesan-pesan tersebut bekerja secara kompleks. Pengetahuan dan kekuasaan saling bersilangan. Isu kekuasaan tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan representasi yang tampak dalam gambar 1:

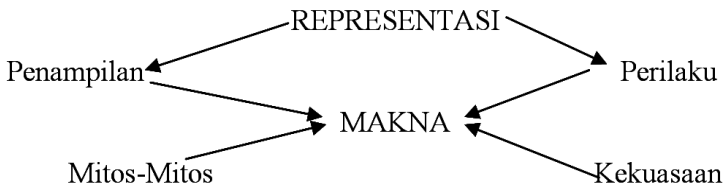


(Burton, 2008:134)

**Gambar 4.7. Hubungan antara representasi, hubungan kekuasaan**

Gaya hidup menurut Chaney (2011: 40) merupakan ciri sebuah dunia modern (modernitas). Artinya, siapapun yang hidup dalam masyarakat modern akan menggunakan gagasan tentang gaya hidup yang menggambarkan tindakannya sendiri maupun orang lain. Gaya hidup adalah pola-pola tindakan yang membedakan antara satu orang dengan orang lain. Dalam interaksi sehari-hari kita dapat menerapkan suatu gagasan mengenai gaya hidup tanpa perlu menjelaskan apa yang kita maksud, dan kita benar-benar tertantang serta mungkin sulit menemukan deskripsi umum mengenai hal-hal yang merujuk pada gaya hidup. Gaya hidup membantu memahami (yakni, menjelaskan tapi bukan berarti membenarkan) apa yang orang lakukan, mengapa mereka melakukannya dan apakah yang mereka lakukan bermakna bagi dirinya maupun orang lain.

Kedua bahasa ini (Representasi dan Gaya Hidup) berperan penting dalam proses pemberian makna yang menjadi kebenaran. Konsep abstrak yang ada dalam kepala kita harus diterjemahkan dalam “bahasa” yang lazim, supaya kita dapat menghubungkan konsep dan ide-ide kita tentang sesuatu dengan tanda dari simbol-simbol tertentu. Adapun representasi yang dikaitkan dengan makna dapat dilihat pada gambar 2:



**Gambar 4.8. Kaitan Representasi dengan Makna**

(Sumber: Burton, 2008:133)

Pada gambar diatas, nampak representasi dihubungkan dan diorganisasikan ke dalam koherensi sosial atau kepercayaan dominan yang ada dalam masyarakat. Representasi bekerja pada hubungan tanda

dan makna. Konsep representasi sendiri bisa berubah dan selalu ada pemaknaan baru. Representasi berubah akibat makna yang berubah-ubah akibat dari adanya penampilan dan perilaku, selain mitos dan kekuasaan yang juga mempengaruhi proses negosiasi dalam pemaknaan sehingga konteks representasi dalam gaya hidup juga melalui pemaknaan.

Menurut Savage et. al (dalam Chaney, 2011: 84), menegaskan bahwa survey TGI menunjukkan tiga tipe utama gaya hidup kelas menengah yang kita labeli; asketis, postmodern dan awam (*undistinctive*). Kesemuanya cenderung memiliki basis sosial yang unik dalam kelas menengah; pertama, di antara para profesional sektor kesejahteraan publik; kedua diantara para profesional dan spesialis sektor swasta; ketiga, para manajer dan birokrat pemerintah. Akan tetapi, proses-proses tersebut jalin-menjalin dengan hal-hal mengenai gender, usia dan lokasi.

Representasi gaya hidup, bukanlah suatu kegiatan atau proses statis tapi merupakan proses dinamis yang terus berkembang seiring dengan kemampuan intelektual dan kebutuhan para pengguna tanda yaitu manusia sendiri yang juga terus bergerak dan berubah. Representasi merupakan suatu proses usaha konstruksi, karena pandangan-pandangan baru yang menghasilkan pemaknaan baru, juga merupakan hasil pertumbuhan konstruksi pemikiran manusia, melalui representasi makna diproduksi dan dikonstruksi. Ini menjadi proses penandaan, praktik yang membuat suatu hal bermakna sesuatu pembaharuan.

### **Atribut Militer Sebagai Fashion Komunikasi**

Menurut kamus filsafat (dalam Bagus 1996: 101-102), atribut mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut:

- 1) Merupakan apa yang dipertalikan dengan sesuatu;
- 2) Lebih jauh dapat dikatakan bahwa atribut merupakan ciri khas tertentu. Tanpa ciri khas itu sesuatu tidak dapat ada atau tidak dapat dikenali;
- 3) Atribut adalah sifat asasi. Tiap substansi memiliki sifat asasinya sendiri, yang menentukan hakikat substansi itu. Sifat asasi ini mutlak perlu dan tidak dapat ditiadakan. Sifat asasi ini adanya diandaikan oleh segala sifat yang lain;
- 4) Ciri atau sifat khas atau kekhususan atau kualitas dari suatu benda atau sesuatu hal.

Ditinjau dari perspektif semiotika sosial, atribut militer bisa diasumsikan sebagai *fashion* yang merupakan penanda (simbol) untuk merepresentasikan petanda-petanda identitas kolektif dari tata nilai dan perilaku sosio-kultural komunitas pemakainya. *Fashion* merupakan simbolitas non verbal yang mengekspresikan identitas soal pemakainya, merepresentasikan status ekonomi penggunanya, serta merefleksikan pilihan masa atau zaman dari para pemakainya. Arti kata *fashion* sendiri mengacu pada kegiatan yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang. *Fashion' Dandan'an' Gaya' Busana dan Pakaian* juga bisa digunakan baik sebagai kata benda maupun kata kerja. Tidak semua *fashion* itu merupakan butir dari busana karena beberapa *fashion* terkait dengan perubahan warna dan bentuk tubuh (Barnard, 2009: 14-15).

*Fashion* atau pakaian dipandang memiliki status yang ambivalen, pada satu sisi positif dan pada sisi lain negatif. Status ambivalen itu dikaitkan dengan status ambivalen serupa dalam produksi budaya atau kreatif secara umum, dan dipandang jauh lebih rumit dalam relasinya dengan gender. Ambivalensi ini menunjukkan, berada atau mempengaruhi banyak kata lain yang bisa digunakan sebagai sinonim atauu mirip dengan *fashion* dan pakaian. Dengan begitu, meski etimologi digunakan untuk memberikan sedikit penjelasan atas masalah ini, pada akhirnya dinyatakan bahwa konteks penggunaan kata-kata itu harus selalu dipertimbangkan manakala memastikan apakah seragam atau pakaian dan atribut militer bisa dipahami atau digunakan sebagai bagian dari *fashion* komunikasi.

Fungsi atribut militer adalah perlindungan dari unsur-unsur, kesopanan, dan daya tarik, namun tidak ada yang menjelaskan *fashion* komunikasi secara memuaskan. Apa yang dipandang sebagai pelindung dari berbagai unsur atribut militer dipandang beragam dari satu titik waktu ke titik waktu lain. Apa yang dipahami sebagai kesopanan pun beragam di antara budaya dan zaman. Atribut militer memperlihatkan bagaimana pembangkitan makna dalam *fashion* komunikasi. Masalah utama yang ada dengan beberapa kajian tentang makna dari atribut militer dalam konteks *fashion* komunikasi dapat dijabarkan menjadi dua jenis tingkatan makna, yakni denotasi dan konotasi dengan menjelaskan perbedaan keduanya bukanlah (sebagaimana yang selama ini diyakini oleh banyak pengarang), melainkan perbedaan antara signifikansi yang "univokal" dengan signifikansi "kabur" atau antara komunikasi "referensial" dengan "emosional" (Eco, 2009: 79).

Menurut De La Mettrie (dalam Fortunati ; 2003: 218), *Fashion* dan teknologi memiliki unsur-unsur penting dalam desain komunikasi dan penyebarannya. Model ini didasarkan pada peningkatan kecanggihan teknologi yang diterapkan pada tubuh. Mereka telah menunjukkan bagaimana masalah ini telah dikaji melalui literatur, studi gender dan interaksi sosial. Tubuh mungkin pada tingkat yang sederhana dilihat sebagai sebuah mesin. Tubuh adalah perwujudan fisik jiwa dan manusia. Dengan demikian, ini juga merupakan bentuk komunikasi. Seperti pepatah dalam sosiologi komunikasi, kita tidak bisa tidak berkomunikasi “dalam kasus tubuh, di tengahnya adalah pesan”. Munculnya kontribusi untuk mengucapkan pesan.

Seseorang yang berseragam hijau loreng misalnya, memberi tanda identitas *uniform* kemiliteran yang digunakannya sebagai bagian integral dari kekuatan bersenjata. Seragam militer juga merupakan simbol afiliasi pemakainya pada tata nilai dan perilaku hidup yang disepakati secara kolektif oleh kelompok sosial tertentu. Dalam konteks ini, seragam militer bermakna afiliatif, di mana seseorang yang mengenakan pakaian yang mencirikan identitas kelompok sosial tertentu, memaknai afiliasi tersebut pada berbagai aspek yang terkait dengan atribut yang melekat pada dirinya.

Menurut Barnard (dalam Ibrahim, 2007: 251), kritik ideologi *fashion* komunikasi menjelaskan berlapis-lapisnya makna yang ada pada busana atau pakaian yang dikenakan dalam konteks budaya tertentu. Pemaknaan terhadap pakaian digunakan untuk menunjukkan nilai sosial atau status dan orang sering membuat penilaian terhadap nilai sosial berdasarkan atas apa yang dipakai oleh orang lain tersebut. *Fashion* bukan hanya soal pakaian, tetapi juga sebagai mekanisme atau ideologi yang berlaku hampir pada setiap area dunia modern, dari akhir abad pertengahan dan periode sesudahnya.

Seragam militer dan atributnya merupakan fenomena kultural dan sudah dijelaskan pula melalui budaya yang secara otodidak telah dimengerti oleh masyarakat Indonesia. Atribut militer adalah kultural dalam artian keduanya merupakan cara yang digunakan suatu kelompok untuk mengonstruksi dan mengomunikasikan identitasnya. Keduanya merupakan cara untuk mengomunikasikan nilai-nilai dan identitas kelompok itu sendiri, ditunjukkan bagaimana, dalam artian apa, *fashion*, dan pakaian itu komunikatif. Atribut militer itu komunikatif

karena keduanya merupakan cara nonverbal untuk memproduksi serta menukarkan makna dan nilai-nilai. *Fashion* dan komunikasi oleh karenanya sangat terkait erat, sehingga *fashion* komunikasi bisa disebut sebagai suatu fenomena komunikatif, terkait erat dengan soal-soal kekuasaan dan status yang dikenalkan dan dijelaskan dalam artian ideologi. Respon ambivalen masyarakat barat terhadap *fashion* tersebut bersifat atraktif dan dapat dijelaskan dalam artian mempunyai korelasi antara ideologi dan komunikasi dalam masyarakat.

### **Penggunaan Atribut Militer Indonesia**

Militer memiliki karakteristik dalam memposisikan institusinya. Kode etik dan sistem yang tertutup merupakan ciri khas dari aktivitas militer. Di sisi lain, seragam, pangkat, sepatu maupun senjata yang merupakan militer digunakan oleh warga sipil di Indonesia sedemikian marak dan seringkali menimbulkan persoalan yang ujung-ujungnya mengarah kepada masalah pidana. Penertiban atribut militer oleh Polisi Militer (POM) dilakukan terhadap masyarakat sipil dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Presiden Soekarno pernah menyatakan kepada pers ketika meninjau kembali perjuangan pembebasan Irian Barat “Rupanya pakaian seragam militer merupakan suatu sihir alias *magic*. Apakah mereka mengira dengan mengenakan pakaian militer, kesulitan ekonomi sekarang bisa diatasi?” (Anwar, 2006: 158).

Penggunaan simbol-simbol militer oleh banser merupakan realitas pemakaian atribut militer. Dalam sejarahnya, banser di tahun 1968 berorientasi politik dan belum mempunyai identitas seragam, namun di tahun 1981 dengan orientasi pada pembangunan sehingga menginspirasi untuk menggunakan seragam corak polos. Tahun 1988, banser berorientasi pada profesi sehingga seragam ditentukan oleh pucuk pimpinan gerakan pemuda anso akan tetapi yang menarik adalah penjelasan atau petunjuk salah satu pasal mengenai penggunaan seragam, yakni “pakaian seragam dan atribut banser harus disesuaikan untuk menghindari kemiripan dengan pakaian militer” (Salim, 2004: 118).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tampil mengenakan atribut atau pakaian kebesaran militer dalam pidato terkait memanasnya hubungan Indonesia-Malaysia. Hal ini mencerminkan sikap Indonesia yang berdaulat sekaligus bermartabat dalam menghadapi Malaysia.



Pidato dengan atribut lengkap seorang tentara cenderung dilakukan untuk mempertaruhkan jati diri dan kehormatan sebagai pemimpin dan menggambarkan kekuatan moral negaranya ([www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com)).

Penggunaan terhadap kelengkapan dan atribut TNI-AD di Indonesia telah diatur dalam petunjuk teknis dan pelaksanaannya yang meliputi:

- 1) Pakaian Dinas Upacara I, II, III dan IV;
- 2) Pakaian Dinas Lapangan I, II, III dan IV;
- 3) Pakaian Dinas Harian I, II dan III;
- 4) Pakaian Dinas Parade;
- 5) Pakaian Dinas Seragam Hamil;
- 6) Pakaian Dinas Seragam Musik I, II, III, IV dan V;
- 7) Pakaian Dinas Seragam Kelompok Pembawa Lambang Kesatuan;
- 8) Pakaian Dinas Seragam Provost I dan II;
- 9) Pakaian Dinas Polisi Militer I, II, III dan IV;
- 10) Pakaian Dinas Seragam PasPamPres I, IIA-d, III dan IV dan V;
- 11) Pakaian Dinas Seragam Pasukan (Satuan Protokol);
- 12) Pakaian Dinas Seragam TNI AD atau Kowad yang bertugas di Aceh.

Dari sejumlah pakaian dinas yang digunakan TNI-AD di Indonesia, tidak banyak berbeda dengan pakaian dinas TNI lainnya (Angkatan Udara dan Angkatan Laut). Dalam sejarah, dominasi TNI-AD dalam supremasi militer sudah diakui oleh banyak pihak. Penggunaan atribut militer dalam aktivitasnya juga mengikuti perkembangan atribut TNI-AD, seperti pakaian dinas Polisi Militer maupun Provost misalnya, memiliki sejumlah kesamaan dalam hal warna maupun atribut yang menyertai dengan TNI-AL maupun TNI-AU ([www.tniad.mil.id](http://www.tniad.mil.id)).

Pembuatan atribut militer melalui proses yang cukup panjang dan rumit. Dari beberapa perusahaan yang memproduksi atribut militer, PT Kuantan Utama menjadi perusahaan pembuat tanda kepangkatan, atribut, dan perlengkapan militer untuk yang sering menjadi mitra TNI serta Polri. Perusahaan yang dipimpin Tien Setianingsih ini juga merancang serta memproduksi seragam TNI dan Polri. Bahkan, lambang pangkat bintang lima mantan Presiden Suharto, A.H. Nasution, dan Sudirman dibuat oleh PT Kuantan Utama. Proses produksi *badge*



sebagai salah satu contoh pembuatan atribut militer. Diawali dengan memasukkan gambar rancangan *badge* ke komputer lalu ditransfer ke mesin bordir. Mesin itu akan bekerja secara otomatis sesuai data gambar yang diterima. Benang yang digunakan untuk membordir harus berkualitas tinggi sehingga hasil bordiran sangat rapi dan kuat. Untuk tahap penyelesaian, *badge* ditempel dan dirapikan untuk selanjutnya siap dikirim serta dibeli pelanggan. Hal serupa berlaku untuk membuatencana. Data gambar dari komputer ditransfer ke mesin pengukir untuk menghasilkan cetakan yang kemudian dituangi cairan perak. Setelah beku, hasilnya dilapisi kuningan atau emas. Langkah akhir adalah menempelkannya ke tatakan bahan agar mudah ditempelkan di baju atau topi. Dengan menjaga kualitas produksi, hampir setengah abad PT Kuantan Utama mengiringi perjalanan sejarah TNI dan Polri di tanah air menyuplai tanda kepangkatan, atribut, serta perlengkapan militer untuk ratusan ribu anggota TNI dan Polri di seluruh wilayah Indonesia (Diadopsi dari berbagai sumber).

Ditegaskan bahwa komunikasi juga melibatkan relasi dan posisi kekuasaan, serta *fashion* komunikasi merupakan fenomena ideologis, yang berimplikasi dalam penciptaan dan reproduksi dari relasi dan posisi tersebut. Munculnya berbagai identitas atribut militer selama ini, merupakan kurang tegasnya aturan dengan semakin mudahnya warga sipil menggunakan atribut militer. Nampaknya kasus ini menunjukkan bahwa *fashion* komunikasi dari atribut militer menjadi lebih berbeda, begitu pula identitas sosialnya, maka dapat ditegaskan bahwa adalah tepat bila mempertimbangkan *fashion* dan pakaian dalam artian reproduksi, pria lebih banyak bertindak sedangkan wanita berdandan. Hal tersebut juga menunjukkan, mesti tidak secara eksplisit dikemukakan, jalinan rumit kelas, dan gender seputar perbedaan antara *fashion* dan pakaian. Misalnya, dikemukakan bahwa hampir secara universal digunakan pembedaan untuk jenis kelamin yang berbeda, meski dikalangan kelas bawah eropa sejak 1340-an sudah digunakan pakaian untuk membedakan jenis kelamin, namun *fashion* dikalangan kelas atas tak melakukan hal seperti ini. *Fashion* dipakai kelas yang lebih tinggi untuk memisahkan perbedaan kelas, namun bukan perbedaan jenis kelamin dan gender.

## Atribut Militer Indonesia dalam Konteks Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional (Atoshoki, 2005: 89).

Konsep profesionalitas militer Indonesia, menurut Jenderal Besar Soeharto (dalam Effendy, 2008: 41) sangat terkait dengan Dwifungsi ABRI (sebutan Militer saat itu), hal ini didasarkan pada asumsi bahwa ABRI yang profesional adalah yang mampu mengabdikan diri dalam kehidupan militer, sosial dan politik. Dalam implementasi dilapangan akan menjadi kontraproduktif ketika militer masuk keranah sosial dan politik kemasyarakatan. Sebaliknya, masyarakat sipil yang memainkan peran militer dengan atribut yang digunakan telah mengindikasikan militerisasi pada warga negara. Kewajiban untuk pemakaian seragam safari bagi para Profesor oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada zaman orde baru menunjukkan bahwa pengetahuan sudah tidak lebih dari penyeragaman pikiran yang secara fisik dilambangkan dalam pakaian seragam (Dhakidae, 2003: 353).

Realitas ini, mengindikasikan bahwa kekuatan yang dominan dipakai oleh militer dalam rangka aktualisasinya adalah penggunaan atribut untuk simbol dalam aktivitas sehari-hari yang secara normatif aturan itu telah dilegalkan dalam bentuk undang-undang maupun peraturan. Pemahaman warga negara sipil maupun anggota organisasi kemasyarakatan terhadap atribut militer lebih kepada hal praktis sebagai bagian gaya hidup yang akan membuat diri mereka lebih maskulin ketimbang warga negara yang lain. Maskulinitas seperti ini tidak dapat memberi contoh yang elegan kepada warga negara dalam konteks *fashion* atau pakaian. Pembentukan identitas yang merupakan salah satu elemen ketahanan nasional dan *fashion* komunikasi akan menjadi baik ketika masing-masing elemen (anggota militer, organisasi masyarakat maupun warga negara sipil) dapat menunjukkan jati diri dengan memakai identitas sosial yang semestinya mereka gunakan.

## Simpulan

Eksistensi militer di negara seperti Indonesia tidak lepas dari sejarah dan perkembangan yang mewarnai. Jenderal Soedirman yang dianggap menjadi teladan para militer Indonesia mengharapkan bahwa sebagai alat negara, militer harus lepas dari kepentingan pemerintah meskipun tetap mempunyai kewajiban mengamankan kebijakan negara demi kepentingan nusa dan bangsa. Penampilan militer sebagai supermasi dari kekuatan negara yang dibingkai dengan label Tentara Nasional Indonesia (TNI) ; baik itu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) dapat menjadi simbol dari kekuatan negara tersebut. Penampilan tidak saja dalam hal seragam ataupun atribut yang digunakan, akan tetapi lebih kepada keseluruhan jiwa dan raga yang harus dimiliki oleh anggota dalam militer.

Salah satu upaya untuk meningkatkan keberhasilan dalam berkarier dalam bidang militer adalah melalui penampilan diri (*performance*). Dengan penampilan diri yang benar-benar tepat akan membuat kesan positif bagi lingkungan dimanapun ia berada, misalnya: teman, bawahan bahkan atasan langsung sekalipun. Penampilan bukan hanya ditunjukkan melalui bentuk tubuh, tutur kata atau tingkah laku saja, tetapi ada sesuatu yang lain dan ini biasanya langsung menjadi perhatian, yaitu: perlengkapan pembungkus badan atau pakaian yang disandangnya. Semakin rapi, bersih walaupun tidak baru, wajar, dan proporsional pakaian yang dikenakan akan menambah simpatik bagi yang memandangnya, apa lagi didukung dengan bentuk tubuh dan wajah yang ideal tentu akan memancarkan suatu pesona anggun dan penuh kewibawaan sebagai seorang yang dianggap kompeten dalam hal fisik maupun intelektual.

Representasi gaya hidup militer diatas, menjadi dominan jika mempunyai implikasi yang positif dalam setiap aplikasinya. Proses dinamis yang terus berkembang seiring dengan kemampuan intelektual dan kebutuhan para pengguna tanda yaitu manusia sendiri yang juga terus bergerak dan berubah. Gaya hidup militer sekarang merupakan ciri sebuah dunia modernitas yang diakibatkan oleh perubahan dan perkembangan teknologi komunikasi. Tentara (militer) pada zaman sebelum kemerdekaan memilih senjata dan atribut seadanya demi meraih kekuatan yang ia inginkan, sebaliknya Tentara (militer) di saat ini cenderung menggunakan kekuatan teknologi dan

perkembangan komunikasi sebagai bagian dari upaya mengikuti trend globalisasi. Representasi penampilan dan perilaku militer saat ini juga menghadirkan mitos-mitos tentang sebuah kekuatan yang luar biasa dan seringkali berujung pada kekuatan sebagai alat legitimasi kepada publik. Kelompok militer yang memiliki dan menggunakan kekuasaan dalam masyarakat mempengaruhi apa yang direpresentasikan dirinya apalagi konstruksi yang dilakukan melalui media massa. Pesan-pesan kelompok militer ini akan bekerja secara kompleks seiring dengan kemampuan atas pengetahuan yang dimilikinya sehingga kekuasaan yang direpresentasikan sebagai bagian gaya hidup mereka menjadi kekuatan dalam mencitrakan institusi militer dengan paradigma yang sudah disepakati sebelumnya.

Penggunaan atribut militer Indonesia oleh warga sipil menjadikan atribut ini tidak lagi sebagai kekuatan spesifik. Beberapa macam atribut militer yang dikenakan prajurit merupakan bentuk dari penghargaan diri kepada individu yang dipandang cakap. Keseragaman atribut militer yang ada telah dipolakan (*design*) sedemikian rupa disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari yang penuh dengan kegiatan fisik sehingga menjadi tidak etis jika atribut militer yang berbentuk pakaian seragam dinas harian dipakai oleh kalangan sipil dengan hanya berorientasi pada penghargaan diri yang berlebihan. Pemahaman aturan tentang peraturan penggunaan atribut militer bagi kalangan sipil harus ditingkatkan sebagai upaya menjaga citra militer sebagai institusi kekuatan pertahanan dan keamanan negara.

Atribut militer dapat diartikan sebagai "*Fashion*" juga bisa digunakan baik sebagai kata benda maupun kata kerja. Tidak semua *fashion* itu merupakan butir dari busana karena beberapa *fashion* terkait dengan perubahan warna dan bentuk tubuh sebagai *fashion* komunikasi. Obyektivitas seseorang dalam memahami *fashion* ini menjadi penting ketika *fashion* juga menjadi bagian menyebarluaskan informasi baik itu melalui tanda, warna dan bentuk tubuh pemakai atribut militer. Identitas sosial yang dikomunikasikan atribut militer dalam konteks *fashion* bisa dimaknai sebagai langkah komunikatif institusi dan individu dalam menyampaikan pesan moral maupun kredibilitasnya.

Fenomena praktis maupun teoritis diatas, terlihat jelas bahwa komunikasi dapat melalui *fashion* yang tidak saja diartikan sebagai busana atau pakaian. Atribut militer sebagai *fashion* akan bercerita tentang

keadaan diri individu yang menggunakannya dengan pesan-pesan non-verbal yang mereka buat sendiri. Memilih *fashion* yang dikomunikasikan harus disesuaikan dengan kepribadian karena fashion juga merupakan perlambangan jiwa kita yang dinilai oleh khalayak. *Fashion* komunikasi dalam atribut militer berusaha mengatakan siapa, untuk membuat orang tertarik atau mengenalkan identitas sosial sehingga pemahaman terhadap penggunaan atribut militer menjadi penting sebagai representasi pertahanan dan keamanan negara Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

- Adi, A. Kresna, 2011, *SOEDIRMAN: Bapak Tentara Indonesia*, Yogyakarta, Mata Padi Presindo.
- Atoshoki, Antonius dkk, 2005, *RELASI dengan SESAMA*, Jakarta. Elex Media Komputindo.
- Anwar, Rosihan, 2006, *Sukarno, Tentara, PKI: Segitiga Kekuasaan sebelum Prahara Politik 1961-1965*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Bagus, Lorens, 2005, *Kamus Filsafat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Barnard, Malcolm, 2009, *Fashion sebagai Komunikasi: Cara Mengkomunikasikan Identitas Sosial, Seksual, Kelas dan Gender*, Yogyakarta, Jalasutra.
- Burton, Graeme, 2008, *Media dan Budaya Populer*, Yogyakarta, Jalasutra.
- Chaney, David, 2011, *Lifestyles (Sebuah Pengantar Kompetenif)*, Yogyakarta, Jalasutra.
- Dhakidae, Daniel, 2003, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Eco, Umberto, 2009. *Teori Semiotika (Signifikasi Komunikasi, Teori Kode serta Teori Produksi-Tanda)*, Yogyakarta, Kreasi Wacana.
- Effendy, Muhadjir, 2008, *Profesionalisme Militer: Profesionalisasi TNI*, Malang, UMM Press.
- Fortunati, Leopoldina, Et. Al, 2003, *Mediating The Human Body (Technology, Communication and Fashion)*, London, Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Ibrahim, Idi Subandy, 2007, *Budaya Populer sebagai Komunikasi*, Yogyakarta, Jalasutra.

Pontoh, Coen Husain, 2005, *Menentang Mitos TENTARA RAKYAT*, Yogyakarta, Resist Book.

Salim, Hairus, 2004, *Kelompok Paramiliter NU*, Yogyakarta, LKiS.

<http://www.mabesad.mil.id/artikel/0203kaporlap.htm> Diakses 21 Maret 2012

<http://www.tniad.mil.id/pengmil/atribut.pdf>. Diakses 23 Maret 2012

[http://www.mediaindonesia.com/read/2010/09/01/166047/15/1/Presiden-SBY Sebaiknya-](http://www.mediaindonesia.com/read/2010/09/01/166047/15/1/Presiden-SBY%20Sebaiknya-Pidato-dengan-Atribut-Militer)

[Pidato-dengan-Atribut-Militer](http://www.mediaindonesia.com/read/2010/09/01/166047/15/1/Presiden-SBY%20Sebaiknya-Pidato-dengan-Atribut-Militer). Diakses 26 Maret 2012

# Komunikasi Militer dalam Kepungan "Pop Culture" (Kajian Kritis Atas Media Massa)

Gregorius Genep Sukendro

## Pendahuluan

Putaran jaman membawa logika publik mendasari pemahaman kekinian yang modern dan bertentangan dengan pemahaman kedisiplinan atas kekakuan dan mengarah pada tindakan kolot. Pertentangan ini diasumsikan hitam atau putih, ya atau tidak, dan salah atau benar hasilnya. Secara sederhananya ada anggapan bahwa proses acak dan bebas menjadi ranah modernitas, sedangkan disiplin dan komando menjadi ranah militer.

*Pop Culture* sering disebut budaya populer, yang mulai berkembang sejak dasawarsa 1920-an ke depan. Dasawarsa 1920-an dan 1930-an merupakan titik balik penting dalam kajian dan evaluasi budaya populer (Strinati: 4) dimulai dari munculnya sinema dan radio produksi massal dan konsumsi kebudayaan, bangkitnya fasisme, dan kematangan demokrasi liberal di sejumlah negara barat. Semuanya memainkan peran dan memunculkan perdebatan atas budaya massa. Perubahan sosial lainnya dihasilkan oleh kemajuan industri. Teori *Pop culture*, di mana kepopuleran adalah hal yang utama. Kepopuleran dapat dibentuk melalui media, yang terus menerus mengangkat dan memuja-muja seseorang ataupun suatu produk tertentu, sehingga menciptakan doktrinisasi di bawah sadar.

*Pop culture* merupakan salah satu studi disiplin ilmu komunikasi yang melihat dari keadaan sosial dan budaya. Teori ini pertama muncul ketika perang dunia ke-2 berakhir dan berkembang pesat di negara bagian Amerika Serikat. John Storey (1998) dalam bukunya *Cultural Theory and*

*Popular Culture*, mendefinisikan *Pop Culture* menjadi enam pemahaman, dan ini cuma salah satunya adalah budaya pop dapat terlihat sebagai budaya komersial yang diproduksi massal untuk konsumsi massa.

Melalui berbagai pengaruh media, baik media massa; televisi, radio, film, iklan maupun jejaring *social*, dan internet, media mencoba mengangkat suatu hiburan seperti film, musik, drama atau produk yang simpel dan disukai oleh masyarakat. Dengan demikian budaya tersebut mencapai ketenaran dan diidolakan oleh masyarakat umum di penjuru negeri tanpa melihat apakah kualitas dari produk yang ditawarkan itu baik atau buruk. *Pop culture* mengedepankan *mainstream* dan permainan industri pasar untuk mendapat keuntungan dibalik ketenaran. Keadaan *Pop Culture* dapat menjadi “senjata makan tuan” bagi produk yang diangkat oleh suatu media. Mereka dapat dikenal di kalangan masyarakat dengan cepat, tetapi mereka juga dapat dijatuhkan dengan cepat.

Mengingat latar belakang kondisi dan doktrin inilah pada sisi tertentu yang menimbulkan perbedaan antara militer dan media sehingga hubungan keduanya juga sangat dinamis dan membutuhkan. Suatu ketika berimpitan secara sinergis, tetapi adakalanya diwarnai ketegangan. Fenomena pasang-surut ini terus terjadi sepanjang dinamika perkembangan dunia.

Secara individual dan institusional militer tidak mudah menyampaikan berita secara bebas kepada media. Dalam beberapa hal yang dianggap sensitif dan rahasia, mereka akan bersikap sangat protektif terhadap media. Hal ini tentu sangat berbeda dari dunia media massa yang selalu mengejar informasi secara cepat, akurat, tepat, dan kredibel. Media massa kini cenderung mengejar pada sifat santai dan ngepop, bagaimana komunikasi militer membuat strateginya untuk memanfaatkan peranan media massa guna kepentingan pertahanan. Perbedaan sudut pandang inilah yang sering menjadi pemicu ketegangan hubungan antara militer dan media.

Fenomena konteks kekinian, apabila militer dapat mengembangkan upaya-upaya untuk memperluas jangkauan dan kedalaman *line of communication* dengan seluruh komponen bangsa, terutama dengan media massa. Kerja sama secara sinergi itu dapat diwujudkan dengan memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh media massa secara professional, proporsional, dan tentunya tetap enak dibaca atau dilihat.



## **Militer, Militerisme, dan Militerisasi**

Militer itu adalah angkatan bersenjata yang berada di suatu negara, segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata, dan populer dengan penyebutan tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Di Indonesia Tentara Nasional Indonesia (TNI), merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Dalam perkembangan selanjutnya usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya bertempur, dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Guna menyatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya TNI.

Membicarakan militer membawa kita me arah militerisme, yang artinya kurang lebih perilaku tegas, kaku, agresif, dan otoriter seperti yang diterapkan dalam militer. Peranan lingkungan atau tugas utamanya berada di medan perang, militer memang dilatih dan dituntut untuk bersikap tegas dan disiplin. Kehidupan militer memang dituntut adanya hirarki yang jelas dan para atasan harus mampu bertindak tegas dan berani karena yang dipimpin adalah pasukan bersenjata dan menghadapi musuh terlatih.

Kata militer, militerisme, dan militeristik adalah kosa kata yang tak asing lagi bagi yang mengalami hidup di Indonesia terutama di era Orde Baru. Kosa kata militerisme telah menjadi wacana populer di kalangan publik yang anti-Dwifungsi ABRI di Indonesia. Militerisasi dan militerisme dipahami banyak orang sebagai bentuk yang sama, yaitu dominasi dan intervensi militer dalam seluruh sektor kehidupan masyarakat. Dominasi militer dalam kehidupan masyarakat melahirkan pemerintahan yang militeristik. Militerisme erat kaitannya dengan penggunaan kekerasan dalam pemerintahan dan dalam masyarakat. Militerisme berarti pula merasuknya nilai-nilai, sikap, dan perilaku militer dalam pemerintahan dan masyarakat, seperti komando, hirarkhi, disiplin, pemaksaan, loyalitas, kekompakan, dan sebagainya. Militerisasi artinya militer masuk dan melakukan intervensi kedalam dunia politik

yang sebenarnya menjadi urusan kaum sipil. Intervensi militer inilah yang menimbulkan tumbuhnya rezim otoriter atau rezim militer. Terjadi internalisasi nilai-nilai, ideologi, perilaku, organisasi, dan wacana militer ke dalam kehidupan sosial atau masyarakat sipil.

Wujud sikap militer antara lain disiplin yang tinggi, taat kepada atasan (terutama bangsa dan negara), loyalitas, komitmen, dan dedikasi. Di sisi lain, hal yang buruk dalam konteks demokratisasi dan harus dihindarkan adalah sikap “militeristik” (militarisme), yakni menerapkan cara-cara militer yang tidak sesuai dalam atau bagi kehidupan sipil. Perlu ditekankan pula, militarisme (karakter dan tendensi kekerasan) tidak identik dengan personel militer. Saat massa menjadi alergi atau trauma terhadap pola-pola otoriter dan represif yang diterapkan oleh rezim Soeharto (yang kebetulan militer) dapat dipahami.

### **Pop Culture dalam Bingkai Media Massa**

Bicara pada ranah ini sering diawali dengan pemahaman atas budaya tinggi (*high culture*) dan budaya massa yang berciri pada produk yang memiliki dua ciri khas masing-masing. Diawali, diciptakan, dan berada di bawah pengawasan elit budaya yang berperan sesuai tradisi estetis, sastra, dan ilmu pengetahuan. Standar yang ketat, tidak bergantung kepada konsumen produk mereka dan dilaksanakan secara sistematis. Budaya massa mengacu kepada pengertian produk budaya yang dicitakan semata-mata untuk pasar. Ciri-ciri lain yang tidak tersurat dalam definisi tersebut adalah standarisasi produk dan perilaku massa dalam penggunaan produk tersebut (Mc.Quail, 1998: 38). Dengan kata lain dalam budaya massa, orientasi produk adalah trend atau mode yang sedang diminati pasar.

*One-Dimensional Man*, Marcuse dalam bukunya mengatakan adanya kebudayaan massa, aspek progresif dari seni klasik telah dihapus hanya sekedar menjadi industri. Seni hanya menjadi nilai operasional dan keinginannya akan kebahagiaan diganti dengan kebutuhan yang salah atau palsu (*false need*) dalam masyarakat konsumtif ini. Itulah sebabnya Marcuse, sebagaimana halnya pemikir Mahzab Frankfurt (*Frankfurt School*) lainnya seperti Theodore Adorno memandang rendah kebudayaan populer (*popular culture*) karena sifatnya yang konservatif dan afirmatif. Kebudayaan populer, menurutnya selalu mendamaikan kita dengan kondisi represif dalam masyarakat kapitalis ini (Marwoto, 2001: 37).

Pandangan berbeda muncul dari para pemikir Mazhab Birmingham seperti John Fiske menyatakan bahwa terminologi “populer” menunjukkan bahwa budaya media muncul dari “people” (rakyat kebanyakan). Sebagaimana halnya di Amerika Latin, budaya populer menunjukkan seni yang diproduksi dari dan untuk rakyat sebagai satu bentuk oposisi terhadap budaya yang hegemonik (*hegemonic culture*) yang berasal dari kelas yang berkuasa (Kellner, 1995: 34).

Definisi “*Popular Culture*” di Wikipedia.org: *Popular Culture is the totality of ideas, perspectives, attitudes, memes, images, and other phenomena that are deemed preferred per an informal consensus within the mainstream of a given culture, especially Western culture of the early to mid 20th century and the emerging global mainstream of the late 20th and early 21st century.* Dalam kalimat selanjutnya, Wikipedia menjelaskan anggapan umum kaitan antara Budaya Pop dan pengaruh media massa, juga pembedaannya dengan budaya rakyat pra-era industri: *folk culture*.

Praktik pemahaman sehari-hari, berbagai pengertian tentang Budaya Pop itu terkait dengan konteks-konteks tertentu, dalam konteks ini dibagi menjadi tiga tahap: **1. Konteks Masyarakat Industri.** Budaya Pop dipahami sebagai budaya yang lahir dalam sebuah masyarakat yang telah terindustrialisasi. Tercatat dalam sejarah, industrialisasi juga terkait dengan sejarah kelahiran atau pertumbuhan kota-kota modern. Tidak heran jika konteks ini juga memberi arah pemahaman Budaya Pop sebagai budaya urban. Paling tidak, terkait erat dengan budaya urban; **2. Konteks Masyarakat Paska-industri.** Konteks ini berhubungan dengan semaraknya studi-studi kritis terhadap modernisasi, pembangunan, dan kapitalisme modern. Dalam perkembangan sejarah pemikiran, modernisasi dianggap sebagai proses dialektika Kapitalisme dan Sosialisme. Sebagian ahli (Daniel Bell, misalnya juga Anthony Giddens) memandang bahwa dominasi Kapitalisme dalam masyarakat modern telah melahirkan pergeseran-pergeseran besar lebih lanjut, kalau bukan revolusi lanjutan, yang mengubah ciri-ciri industri modern dan masyarakat yang dibentuknya. Globalisasi, pergeseran dominasi industri manufaktur ke industri informasi, dan pergeseran dari fungsi kegaya, adalah di antara ciri-ciri menonjol sesuatu yang disebut Kapitalisme Tahap Lanjut (*Late Capitalism*). Budaya Pop tepat di jantung pergeseran itu; **3. Konteks Studi Budaya dan Studi Media.** Budaya Pop juga terdefiniskan, terpahami, oleh semaraknya wacana

tentang Budaya Pop itu sendiri. Tumbuhnya Studi Kebudayaan dan Studi Media, menumbuhkan wacana yang kaya akan Budaya Pop, dan dengan demikian, mengangkat kesadaran akan makna Budaya Pop ke permukaan. Dampak paling nyata dari konteks ini adalah, pemahaman akan kompleksitas masalah Budaya Pop, sehingga seolah Budaya Pop menjadi sebuah “mahluk baru” yang menggairahkan, memancing rasa ingin tahu, kadang secara eksotik, berlebihan, tapi tak lagi dipandang secara sederhana sebagai hanya “budaya sampah” atau “rendahan”.

Denis McQuail (1987) mengemukakan sejumlah peran yang dimainkan media massa selama ini, yakni:

1. Industri pencipta lapangan kerja, barang, dan jasa serta menghidupkan industri lain terutama dalam periklanan atau promosi;
2. Sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, dan inovasi masyarakat;
3. Lokasi (forum) untuk menampilkan peristiwa masyarakat;
4. Wahana pengembangan kebudayaan tata cara, mode, gaya hidup, dan norma;
5. Sumber dominan pencipta citra individu, kelompok, dan masyarakat.

Media massa memiliki arti yang bermacam-macam bagi masyarakat dan memiliki banyak fungsi, tergantung pada jenis sistem politik dan ekonomi dimana media itu berfungsi, tingkat perkembangan masyarakat, dan minat serta kebutuhan individu tertentu. Selain memiliki fungsi, media juga mempunyai banyak disfungsi, yakni konsekuensi yang tidak diinginkan masyarakat atau anggota masyarakat. Fungsi media massa sejalan dengan fungsi komunikasi massa. Adapun fungsi-fungsi media massa menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu:

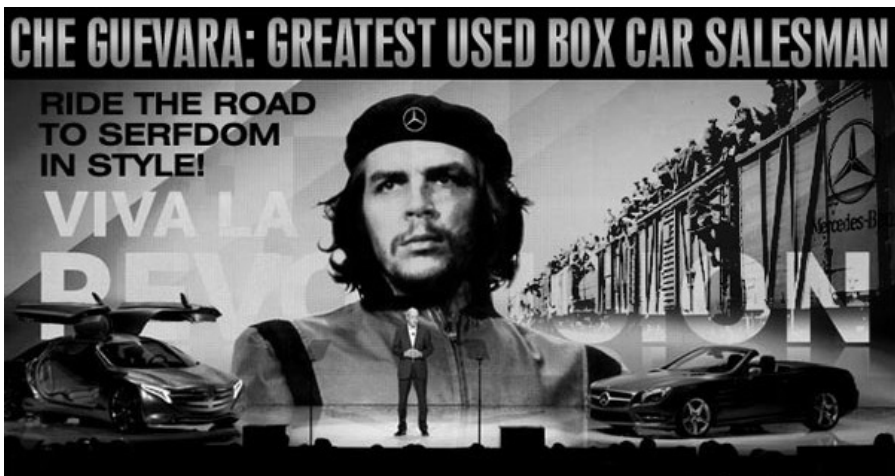
1. Menginformasikan (*to inform*);
2. Mendidik (*to educate*);
3. Menghibur (*to entertain*).

Media Massa sangat berpengaruh dalam membangun masyarakat multi kultur karena perannya yang sangat potensial untuk mengangkat opini publik sekaligus sebagai wadah berdialog antar lapisan masyarakat. Terkait dengan isu keragaman budaya (multikulturalisme), peran media massa seperti pisau bermata dua. Berperan positif sekaligus juga berperan negatif. Peran positif media massa berupa: (1) kontribusi dalam menyebarluaskan dan memperkuat kesepahaman antarwarga; (2) pemahaman terhadap adanya kemajemukan sehingga melahirkan

penghargaan terhadap budaya lain; (3) sebagai ajang publik dalam mengaktualisasikan aspirasi yang beragam; (4) sebagai alat kontrol publik masyarakat dalam mengendalikan seseorang, kelompok, golongan, atau lembaga dari perbuatan sewenang-wenang; (5) meningkatkan kesadaran terhadap persoalan sosial, politik, dan lain-lain di lingkungannya.

Hubungan antara media massa dengan perubahan sosial ialah bahwa media massa merupakan salah satu sarana yang mampu menyebabkan pola pikir dan perilaku masyarakat terpengaruh atau bahkan berubah sesuai dengan pesan atau informasi yang dikandung dalam media tersebut. Dikemukakan di atas, bahwa media massa berperan aktif dan efektif di dalam menyebarkan informasi dari suatu kelompok ke kelompok lain. Peranan media massa dalam membawa arah bagi perubahan masyarakat tidak bisa diabaikan. Bahkan peranan media komunikasi saat ini mengalami perkembangan yang sangat cepat melampaui perkembangan mentalitas sebagian masyarakat, sehingga tidaklah mengherankan bila ada suatu komunitas masyarakat yang kurang siap menghadapi perkembangan tersebut dan mengakibatkan terjadinya krisis nilai dan norma di dalam masyarakat tersebut.

### Strategi Militer pada *Pop Culture* atau Media



**Gambar 4.9.** *“Mercedes-Benz Uses Communist Madman Che Guevara to Sell Luxury Cars”, said the headline on a blog post from the Heritage Foundation, a prominent conservative political organization in Washington.*

Pada foto Che saat persentasi Industri mobil Mercy, revolusioner kelahiran Argentina yang dikenal sebagai pemimpin militer, dokter, dan penulis ini digambarkan dengan pose terkenalnya. Baret yang digunakan memiliki logo bintang Mercy di tengahnya. Dia hampir pasti tidak pernah memakai satu pun topi dengan logo Mercedes-Benz. Saat persentasi tersebut selesai, Mercedes-Benz sadar kalau hal tersebut akan mengundang banyak rasa takut terutama dari para aktivis Kuba atau pun politikus konservatif dari berbagai negara serta para aktivis anti Komunis.

Konteks di atas menandakan peranan atau karakter seorang Che Guevara adalah perwakilan dari penampilan karakter dan atribut militer. Icon Che dengan topi, baju militer, dan wajah yang terlihat kaku, keras, dingin sangat menarik untuk konsumsi media dalam dunia pop

Mengarah pada semuanya ini kemudian akan membentuk citra, ide-ide, dan evaluasi diri sehingga khalayak berperilaku tertentu. Setidaknya, ada tiga hal yang dapat menjelaskan pengaruh media terhadap perilaku masyarakat. Pertama, Pesan-pesan komunikasi massa dapat memperkokoh pola-pola budaya yang berlaku; Kedua, media dapat menciptakan pola-pola budaya baru yang tidak bertentangan dengan pola budaya yang ada; Ketiga, media massa dapat merubah norma-norma budaya yang berlaku dimana perilaku individu-individu dalam masyarakat dirubah sama sekali (De Fleur, 1991:8). Media massa, lanjut Hartman dan Husband (1974) biasa menyajikan sejumlah pandangan, tentang mana yang normal, mana yang disetujui atau yang tidak disetujui. Pandangan ini kemudian diserap oleh individu-individu ke dalam cara pandang khalayak. Efek media dan gaya hidup, sebagian besar merupakan efek yang dikehendaki komunikator, efek-efek bersifat jangka pendek (segera dan temporer) efek-efek itu ada kaitannya dengan perubahan-perubahan sikap, pengetahuan maupun tingkah laku dalam individu efek-efek itu secara relatif tidak diperantarai. Secara keseluruhan, efek-efek tersebut ada hubungannya dengan pemikiran tentang suatu "propaganda" (usaha-usaha sadar atau terencana dalam menggunakan media massa untuk tujuan-tujuan motivasional atau informasional). Suatu gaya hidup yang meluber lewat komunikasi massa ini melahirkan pola kehidupan yang demokratis, artinya, suatu gaya hidup tidak lagi menjadi *privilege* suatu kelompok dalam stratifikasi sosial. Dalam konteks kebudayaan massa, atau biasa juga disebut kebudayaan populer, masyarakat menjadi homogen. Siapa

saja dapat mengambil alihnya, dari strata manapun berasal, pada saat mengidentifikasi dirinya ke dalam kelompok sosial yang dicitrakan oleh kebudayaan massa tersebut. Sentuhan budaya tidak langsung tetapi sangat kuat pengaruhnya, adalah penyebaran informasi dan jaringan komunikasi yang semakin luas jangkauannya. Dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, pengaruh media massa kini tidak terbatas di arena-arena sosial yang terbuka dan bersifat umum. Meningkatnya intensitas arus informasi komunikasi itu menimbulkan pertanyaan sampai berapa jauh pengaruhnya terhadap kehidupan sosial kebudayaan masyarakat.

Peter L. Berger sebagai sosiolog humanis dikutip Ibrahim (1997: 226) menyebut gejala “urbanisasi kesadaran”. Realita kesadaran yang telah terurbanisasikan tersebut disebabkan kemajuan pesat teknologi komunikasi atau informasi mengarah pada terciptanya wajah industrialisasi dan terus merembes ke alam bawah sadar masyarakat sebagai industri kesadaran, diamini oleh Dennis McQuaill telah mengendalikan publik massa baru. Di balik itu, semua orang tahu, publik tidak usah terlalu cerdas hanya untuk memahaminya bahwa yang beroperasi adalah propaganda pasar kapitalis industrial yang menjadikan tubuh sebagai pusat kesadaran. Media, ungkap Malik dalam Sihabudin (1999: 3), telah menjadi semacam tirani kognitif yang terus memiskinkan elemen-elemen budaya tradisional. Lull (1998 :84) berpendapat, media massa komersial amat mempercepat dan mendiversifikasikan pengaruh kekuasaan budaya. Kekuasaan budaya adalah kemampuan individu dan kelompok untuk memproduksi makna dan membangun cara hidup yang menarik bagi indra, emosi, dan pemikiran mengenai diri sendiri dan orang lain. Hal ini menyerupai apa yang Anthony Giddens namakan “politik kehidupan suatu politik pemilihan gaya hidup keputusan dalam hidup”. Kekuasaan budaya dijalankan ketika orang-orang menggunakan tampilan-tampilan simbolik termasuk asosiasi-asosiasi ideologis dan budaya yang sistematis, struktur otoritas, dan peraturan yang mendasarinya, dalam strategi aksi budaya. Memang benar bahwa citra-citra simbolik melalui media mula-mula dikuatkan secara budaya dengan cara lembaga sponsor mengorganisir dan menyajikan citra-citra itu. Tak heran kalau produksi makna dan nilai-nilai juga dikuasai dan dikondisikan oleh agen-agen tersebut, yang legitimasi kekuasaannya dimotori oleh sistem komunikasi massa Lull (1998: 84).



Menjalani kehidupan yang bergaya hidup dibutuhkan kefiguran tokoh. Para bintang yang disebut Akbar S Ahmed dalam Ibrahim (19-97: 26) sebagai “*filosof of pop budaya pascamodern*” seperti Lady Gaga dipuja-puja di berbagai belahan bumi ini. Gagalnya konser Lady Gaga di Indonesia adalah contoh ketika komodifikasi tubuh menemukan ruang pematatannya. Ia menjadi figur fantasi yang memutar balikan relasi tanda-tanda mengenai seksualitas, kekuasaan, pemberontakan, dan ambiguitas modernitas. Pendobrakan itu muncul ke permukaan dalam bentuk komunikasi pergaulan menengah atas, seni desain, dan pertunjukkan. Akhirnya, media, seperti dikatakan Jatman (1997: 127) telah menciptakan estetikanya sendiri. Ia tidak hanya dianggap sebagai agen kebudayaan, tetapi ia adalah kebudayaan itu sendiri. Artinya ketika kebiasaan kaum elit yang dalam hal ini adalah para publik figur masuk dalam media ia menjelma sebagai *pop culture*. Hal ini diperkuat oleh Ade Armando bahwa media turut menset agenda kehidupan konsumen termasuk mempengaruhi apa yang dianggap penting dan tidak penting, apa yang halal, dan haram, apa yang bisa dinikmati dan tidak, melalui proses pembiasaan. Gaya hidup secara luas dapat kita katakan terbentuk dari pesan media massa yang masuk secara bertubi-tubi dalam kehidupan masyarakat.

Figur ketokohan ini bisa dipakai oleh militer untuk memasukkan pertahanan-pertahan negara (bisa dibaca: nasional) dengan pendekatan pop bukan dengan pendekatan militeristik. Pendekatan ini lebih mudah diterima publik, tidak berkesan represif, tidak menakutkan, dan masuk dengan sangat *smooth*.



**Gambar 4.10. Figur tokoh militer**



Lagu pop militer “*Overcoming Myself*” adalah lagu mengenai “saling bersandar dan mengatasi rintangan yang ada”. Lagu tersebut lebih dari lagu penyemangat untuk personil militer. Lagu itu dinyanyikan oleh Park Hyoshin (Korporal, Departemen Hubungan Masyarakat), penyanyi R&B terkenal yang saat ini sedang menjalani wajib militer, dapat mengekspresikan arti dari lagu ini dengan sangat efektif. Korporal Park Hyoshin mengatakan “liriknya sangat berarti dalam dan ritmenya sangat mudah diingat” dan dia berharap lagu ini akan “menjadi lagu pop paling terkenal yang pernah diproduksi militer”. Musik video dari lagu pop militer “*Overcoming Myself*” juga dibuat sehingga semua orang bisa mendengarkan dan menggunakannya. Tersedia di [www.army.mil.kr](http://www.army.mil.kr), “*Armynuri*”, [@ROK\\_Army](https://twitter.com/ROK_Army), dan *Youtube*, dan juga akan tersedia pula *ringtone* telepon selular dan bertebaran di jejaring sosial.

Sebagai ilustrasi riil Korea Selatan (Korsel) dan Korea Utara (Korut) adalah dua tetangga yang tidak akur semenjak mereka pisah tahun 1945. Apabila Korut gencar mengancam menggunakan senjata api dan kendaraan perang mereka, tahukah kamu apa yang digunakan tentara Korsel untuk membuat tetangganya itu jengah? Kesal dengan konflik yang terus berlangsung seperti ini, tentara Korsel di perbatasan lalu memikirkan cara terbaik untuk membuat tentara Korut yang menduduki daerah perbatasan menderita. Pada bulan Juni 2010, rencana mereka tersebut akhirnya dieksekusi. Tentara perbatasan membawa dan memasang senjata rahasia mereka di area perbatasan, yang ternyata berupa satu set perangkat speaker raksasa. Serangan audio seperti ini bukan serangan pertama kali yang pernah pihak dilakukan oleh pihak Korsel. Sampai tahun 2004, yaitu masa-masa dimana perang propaganda diantara kedua negara lagi nge-hit di daerah perbatasan, pihak Korsel juga terkadang memanfaatkan lagu-lagu hit terkenal dari para grup musik terbaik mereka untuk membuat penduduk Korut serta tentara yang berada di perbatasan terlena. Perang propaganda ini berakhir setelah ada perjanjian untuk menghentikan aktivitas seperti ini diantara kedua negara.

Di Indonesia, geliat-geliat budaya pop tidak dibiarkan oleh militer. Militer menggunakan strategi ini untuk menjadi pencitraan dan bagian dari *public relations* (PR) instansi militer, secara terlembaga militer banyak mengisi dan menghiasi media-media masa, seperti di televisi mau pun majalah pop modern. Ada yang juga menyelenggarakan ajang lomba grup

band seperti yang terjadi di Makassar Festival band TNI atau Polri itu mendapat respon positif Kapolda, Pangdam VII Wirabuana, Lantamal VI Makassar serta Pankoopsau II Makassar ini, akan berlangsung tiga bulan. Setiap Sabtu malam, mulai pukul 20.30-22.30 WITA akan disiarkan langsung stasiun Fajar TV di Chanel 49 UHF. Festival Band TNI atau Polri ini akan menjadi seru, pasalnya masing-masing angkatan mengirim puluhan anggotanya untuk menyaksikan festival band TNI atau Polri dan juga akan menjadi hiburan bagi anggota TNI atau Polri.

Penilaian yang digunakan, melalui dewan juri yang berjumlah tiga orang serta *polling* sms peserta. Dewan juri tersebut, merupakan musisi berasal dari kota Makassar. Setiap episode, satu band yang tereliminasi hingga babak grand final. Akhirnya, akan ada 4 band yang bertanding memperebutkan juara 1,2,3 dan favorit. Realita ini sudah mirip seperti *Indonesia Idol* atau kontes idol-idol yang lain.



**Gambar 4.11. The Soldiers Fiesta**

Keberlangsungan institusi militer yang mengarah pada kemasam pop sebagai bagian dari peran yang diambil dari strategi. Sekat antara sipil yang memainkan institusi politik, menjadi tidak terlalu besar, dengan mereka yang aktif dalam menjalankan institusi militer. Militer Indonesia harus selalu memperhatikan dinamika politik dan dinamika trend gaya hidup di dalam negeri. Bersikap awas dan meningkatkan kemampuan melihat kondisi riil di lapangan, sebagai tugas yang tidak boleh dipandang enteng. Dalam hal ini, peran dan strategi militer menjadi sangat penting.

Pada kasus film tentara Indonesia “Merah Putih” menelan biaya yang sangat besar, hampir 64 milyar dengan tidak tanggung-tanggung melibatkan orang-orang hebat di belakang layar mulai dari urusan efek khusus untuk menciptakan dramatisasi dengan melibatkan tim dari pembuat film *Saving Private Ryan* dan *Blackhawk Down*. Ahli persenjataan dalam film *The Matrix The Thin Red line Australia*, dan *Wolverine*, dan tim tata arias *The Dark Knight*, *Save Private Ryan*, dan *Breveheart*. Keseriusan dalam mencitrakan militer dalam film ini sangat terasa dengan pendekatan professional budaya pop, itu bisa dilihat dari oran-orang yang terlibat, dana yang dipakai untuk produksi, juga tidak bisa dilupakan dari sisi promosi yang sangat ngepop itu dilihat dari *layout* poster iklan filmnya.



Gambar 4.12. Cuplikan Film Merah Putih II

Menyitir apa kata Pangarmatim Laksamana Muda TNI Ade Supandi, S.E. Media massa itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan prajurit, karena pada hakekatnya media massa itu bagian dari operasi militer.

## Simpulan

*“Kami tentara Republik Indonesia akan timbul dan tenggelam bersama negara”. Amanat dalam rangka memperingati setengah tahun kemerdekaan RI Panglima Besar Jenderal Soedirman, Yogyakarta 9 April 1946.*

Amanah Panglima Besar Jenderal Soedirman bahwa tentara senantiatasa harus setia dengan Negara. Dalam konteks ini Negara adalah representasi dari dunia, di mana arah perkembangan dunia menjadi sangat kapitalistik yang sarat dengan berbagai hal dikonsumsi.

Budaya konsumen budaya pop dilatarbelakangi oleh munculnya masa kapitalisme yang diusung oleh Karl Marx yang kemudian disusul dengan liberalisme. Budaya konsumen yang merupakan jantung dari kapitalisme adalah sebuah budaya yang di dalamnya terdapat bentuk halusinasi, mimpi, artifisialitas, kemasan wujud komoditi, yang kemudian dikonstruksi sosial melalui komunikasi ekonomi (iklan, *show*, dan media) sebagai kekuatan tanda (*semiotic power*) kapitalisme.

Dalam pemikiran Baudrillard, yaitu bahwa konsumsi membutuhkan manipulasi simbol-simbol secara aktif. Menurut Baudrillard, yang dikonsumsi bukan lagi *use* atau *exchange value*, melainkan "*symbolic value*", maksudnya orang tidak lagi mengkonsumsi objek berdasarkan karena kegunaan atau nilai tukarnya, melainkan karena nilai simbolis yang sifatnya abstrak dan terkonstruksi.

Baudrillard dalam "*Consumer Society*" (1998) telah menunjukkan betapa implikasi bekerjanya budaya populer adalah terciptanya masyarakat konsumtif media. Mesin kerja ideologi konsumtif yang diantar oleh budaya populer muncul dalam beragam bentuk seperti *fashion*, gaya hidup, yang kesemuanya telah menjadi simulakra. Terjadi pergeseran dari nilai tukar dan nilai guna yang dikumandangkan Marx menjadi nilai tanda (*sign value*) yang digerakkan logika hasrat, tidak pernah ada habisnya. Dengan logika yang sama, Andrew Wernick (1991) menunjukkan betapa iklan menjadi kekuatan dahsyat sebagai sebuah ideologi yang membentuk sebuah struktur masyarakat konsumtif. Iklan sebagai sebuah mata rantai dalam putaran publisitas (*vortex of publicity*) yang membawa ideologi tersendiri melalui beragam simbol kebudayaan (*cultural symbol*). Pengakuan atas dua pemahaman penyumbang ideologi ini diberikan oleh Sean Nixon (dalam Paul du Gay, 1997: 182-186). Melalui tulisannya Nixon menegaskan bahwa nilai tanda yang disampaikan Baudrillard dan kompleksitas semiologi oleh Wernick, telah menjadi semacam mesin budaya konsumen. Ideologi kapitalis yang dikhawatirkan Marx telah merasuki relung-relung budaya setiap sisi hidup manusia. Keduanya sepakat, media masalah yang menjadi jembatan penghubungnya.

Mau tidak mau, suka tidak suka kalangan militer hendaknya memahami dan menyadari bahwa secara dinamis kini media massa berkembang sebagai kekuatan strategis yang mampu membentuk opini, memengaruhi pikiran, sikap, dan perilaku masyarakat serta para penentu kebijakan, bahkan menjadi instrumen kontrol sosial dan acuan trend kekinian.

Strategi tempur militer sudah saatnya membidik dunia pop ini dengan kemasan yang ngepop, renyah, dan kekinian agar senantiasa dikonsumsi publik dengan nikmat dan tidak berjarak, namun tidak melupakan kewaspadaan terhadap keamanan negara dan rakyat dari ancaman atau rongrongan dari luar, dan jadi strategi baru dilingkungan militer untuk tetap mempertahankan negara dalam ketahanan nasional, merdeka.

### **Daftar Pustaka**

- Bacevich, Andrew J, 2005, *The New American Militarism*, Oxford: University Press.
- Baudrillard, Jean, 1998, *The Consumer Society: Myths and Structures*. London: Sage Publications.
- Budiman, Hikmat, 2002, *Pembunuhan yang Selalu Gagal: Modernisme dan Krisis Rasionalitas Menurut Daniel Bell*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Davis, Howard dan Paul Walton, 2010, *Bahasa, Citra, dan Media*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Eatwell, Roger, & Anthony Wright (Ed), 2004, *Ideologi Politik Kontemporer*. Penerjemah R.M. Ali, Yogyakarta: Jendela.
- Huntington, Samuel P, 1981, *Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*, Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.
- Marcuse, Herbert, 2000, *Manusia Satu Dimensi*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Strinati, Dominick, 2003, *“Populer Culture: Pengantar Menuju Teori Budaya Populer”*, Penerjemah Abdul Mukhid, Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Storey, John, 2008, *Culture Studies dan Kajian Budaya Pop*, Yogyakarta: Jalasutra.

Sutoro Eko (ed.), 2001, *Masyarakat Pascamiliter: Tantangan dan Peluang Demiliterisme di Indonesia*. Yogyakarta: IRE.

<http://www.goarmy.com/special-forces.html>.

<http://sosiologibudaya.wordpress.com/>

BAGIAN V

MEDIA, JURNALISME  
DAN KETAHANAN  
NASIONAL





# JURNALISME PERANG DAN KONTRIBUSI JURNALISME ALTERNATIF UNTUK PERDAMAIAN

**Andy Corry Wardhani**

## **Pendahuluan**

Berita-berita di media, selalu diwarnai dengan berita konflik ataupun pertentangan. Berita yang banyak mewarnai media akhir-akhir ini adalah konflik di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Bima, Mesuji, Maluku, dan berbagai unjuk rasa yang berakhir dengan tindakan anarkistis. Di belahan duniapun, kita dapat menyaksikan berbagai konflik yang terjadi melalui media massa seperti konflik di Suriah, pertentangan antara Amerika Serikat dengan Iran yang mempersoalkan senjata nuklir, dan baru-baru ini terjadi konflik Israel dengan Palestina yang pada tanggal 10 Maret 2012 lalu, menewaskan 14 warga Palestina.

Berita tentang perang di Sudan, dapat juga diambil sebagai contoh. Pada tanggal 26 Maret 2012, surat kabar Kompas, mengutip tulisan dari kantor berita AP/AFP/REUTERS yang menceritakan tentang kematian seorang anak laki-laki di Sudan Selatan. Seorang anak laki-laki yang bernama Gatkuoth Duop telah membeli sepatu baru, lalu menyeruput secangkir teh manis dan bersiap pulang ketika satu pesawat tempur MiG-29 Sudan mengebom pasar Rubkona, Bentiu. Anak laki-laki berusia 12 tahun itu tewas seketika dan tubuhnya gosong. Tentang Presiden Sudan Omar Al-Bashir, wartawan Kompas menulis, ...saat pertikaian mendidih selama dua pekan di Heglig, Bashir ingin agar perang tidak boleh berakhir di kota minyak itu saja, tetapi juga harus sampai menusuk Juba, ibu kota Sudan Selatan... Selanjutnya Bashir mengatakan pasukan Selatan sebagai "serangga" yang harus dibasmi tuntas. (Kompas 26 Maret 2012).

Pemilihan kata-kata dalam contoh perang di Sudan, seperti "tewas seketika dan tubuhnya gosong", "Bashir ingin agar perang tidak boleh berakhir", "pasukan Selatan sebagai "serangga" yang harus dibasmi

tuntas". Pemilihan kata seperti ini dapat mengarah kepada perang yang berkepanjangan. Jurnalisme seperti ini, dapat disebut sebagai jurnalisme perang atau jurnalisme konflik yakni jurnalisme yang tidak memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan dalam peliputan fakta-fakta di lapangan. Mereka yang berkonflik, salah satunya ingin ditempatkan pada posisi tidak bersalah oleh media. Media yang tidak memberikan persentasi secara adil bagi mereka yang terlibat, dapat mendorong munculnya konflik atau perang. Pertikaian bertambah parah ketika wartawan atau media tertentu ikut terlibat dalam konflik karena mempunyai hubungan khusus dengan salah satu pihak yang terlibat, misalnya pada waktu terjadi konflik di Maluku, surat kabar *Suara Maluku* memberitakan kepentingan kelompok Kristen, sedangkan kepentingan kelompok Islam diwadahi oleh surat kabar *Ambon Ekspres*. Mengorbankan kebencian antar pemeluk agama, merupakan perilaku pers yang tidak menjunjung tinggi jurnalisme kemanusiaan (Harsono dan Setiyono, 2005).

Berita tentang konflik, permusuhan, pertentangan bahkan perang merupakan berita yang menarik oleh media untuk diberitakan karena mengandung unsur *news value*. Konflik merupakan unsur yang menarik untuk diangkat sebagai berita dibanding dengan keharmonisan.

### **Keadaan Perang**

Pada saat terjadinya perubahan pada realitas struktur dan kultur dalam masyarakat yang menyebabkan kesenjangan atau ketimpangan struktural-kultural yang mencolok, maka munculah konflik. Situasi seperti ini, mudah menciptakan persepsi saling curiga, tidak percaya, sikap permusuhan antar kelompok, dan berakhir dengan perilaku konflik terbuka, bentrok, dan kekerasan. Perang terjadi ketika perilaku konflik berlangsung. Dengan demikian, perang dapat dipahami sebagai pecahnya potensi konflik bersifat laten menjadi konflik kekerasan yang bersifat terbuka. Konflik akan semakin mendalam bila timbul kerusakan atau korban jiwa. Situasi ini akan terus berlangsung jika tidak ada perbaikan yang berarti. Pecahnya perang sipil antar etnis di Kalimantan Barat yang sering berulang, menandakan resolusi yang gagal. Kegagalan ini dapat disebabkan belum diketahui secara tuntas akar penyebab konflik itu. Tidak adanya informasi ilmiah yang cukup dan mendalam tentang konflik menyebabkan terjadinya konflik yang berkepanjangan.

## Jurnalisme Perang

Media merupakan instrumen atau saluran yang bisa mempengaruhi opini masyarakat. Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya media dalam mengolah isu-isu yang berkembang dalam masyarakat. Konflik akan menjadi intensitas yang besar atau kecil ketika ada dalam pemberitaan media. Pada sisi ini seringkali media berpihak pada suatu kelompok yang mengusung isu yang dianggapnya menguntungkan.

Berita yang ada di media merupakan produk dari aktivitas yang dinamakan jurnalisme. Jurnalisme itu lebih berkaitan dengan kewartawanan. Jurnalisme juga diartikan sebagai suatu kegiatan mengumpulkan, memeriksa, menganalisis informasi yang diperoleh, dan melaporkannya. Informasi diperoleh dari peristiwa aktual, menyangkut isu atau orang-orang yang dijadikan subjek berita. Jurnalisme merupakan suatu proses yang mencakup pengumpulan, penyiapan, dan menyebarkan berita melalui media massa. Berdasarkan definisi tersebut, jurnalisme dapat dijelaskan sebagai tugas seseorang yang terlibat dalam proses kebijakan kewartawanan.

Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2004), mengungkapkan elemen-elemen jurnalisme yang harus dipraktikkan wartawan, antara lain:

1. Kewajiban pertama jurnalis adalah pada kebenaran;
2. Loyalitas pertama jurnalis adalah kepada warga;
3. Intisari jurnalisme adalah disiplin dan verifikasi;
4. Menjaga independensi dari sumber berita;
5. Jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan;
6. Jurnalisme harus menyediakan forum publik untuk kritik atau dukungan warga;
7. Jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting, menarik dan relevan;
8. Jurnalisme harus menjaga agar berita komprehensif dan proporsional;
9. Para praktisinya harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka.

Dengan demikian jika berpedoman pada pendapat Kovach dan Rosentiel, kegiatan jurnalistik yang memberitakan kekejaman perang dengan akibat semakin jauhnya perdamaian dapat dikatakan sebagai jurnalisme yang merendahkan martabat manusia karena loyalitas

jurnalisme bukan pada warga. Praktek kewartawanan yang tidak memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan dalam peliputan fakta-fakta dilapangan disebut sebagai jurnalisme perang atau jurnalisme konflik.

Dalam jurnalisme perang atau jurnalisme konflik, cara pemilihan kata-kata bisa mengarah pada konflik misalnya “pembasmi”, “perang salib kedua”, “*jihad*”, “pembunuh”, dan sebagainya yang memberi julukan pada kelompok tertentu. Media yang tidak memberikan persentasi secara adil bagi mereka yang terlibat, juga ikut mendorong munculnya konflik atau perang. Menurut Algooth Putranto (2004), Jurnalisme perang cenderung mereduksi kompleksitas persoalan menjadi siapa kawan, lawan, pemenang, dan pecundang. Jurnalisme perang, memanfaatkan berita oleh sebagian pihak untuk kepentingannya saja. Alhasil bukan perdamaian dan berita sesungguhnya yang diperoleh oleh penonton tetapi propaganda, kampanye politik, dan perang sebagai sebuah *TV Show*. Berita lebih berorientasi pada kekerasan, elit, dan kemenangan sehingga tidak menekankan pada proses pencapaian perdamaian.

Dedy N. Hidayat dalam kumpulan tulisannya (2011), menyatakan bahwa media dapat berperan sebagai penabuh genderang perang, berisi tidak saja kecaman terhadap arogansi dan kesewenangan negara adikuasa, tetapi juga seruan *jihad* bila negara adikuasa menyerang negara lain yang sedang bertikai dengan negara adikuasa tersebut.

Cara peliputan dalam jurnalisme perang, hanya berorientasi pada kekerasan, elit, dan kemenangan. Karakteristik pemberitaannya adalah pemberitaan konflik yang terjadi di masyarakat, diliput dengan menonjolkan pada peristiwa kekerasannya. Seolah-olah kekerasan yang terjadi akibat dari kekerasan itu sendiri. Memberi porsi yang lebih pada dampak yang terjadi pada aspek fisik, seperti korban jiwa, cedera, sampai pada kerugian materi.

Dalam jurnalisme perang, jurnalis mengeksploitasi kekerasan yang tampak dibanding kekerasan yang tidak tampak. Jurnalis menyampaikan berita perang dengan dengan jurnalisme perang, khalayak akan mudah terbawa dalam emosi dan memihak salah satu pihak yang berkonflik. Media dalam jurnalisme perang akan mereduksi pihak yang bertikai hanya pada dua kelompok yakni “*u and them*” (kita dan mereka). Mediapun akan memberi penilaian, pihak mana yang menjadi pemenang dan pihak mana yang menjadi pecundang (Puspawati, 2004).

Orientasi pemberitaan jurnalis perang yang dibagi menjadi empat yaitu, jurnalis berorientasi pada perang atau kekerasan, jurnalis yang berorientasi propaganda, jurnalis yang berorientasi elit dan jurnalis yang berorientasi pada kemenangan (Lynch dan Mc. Goldrick, 2005) yaitu:

Ciri-ciri jurnalis yang berorientasi pada perang atau kekerasan adalah

1. Hanya menyoroti daerah-daerah konflik, biasanya hanya melihat dua pihak yang bertikai dengan satu tujuan (kemenangan), konflik direduksi menjadi sebuah perang yang tidak mungkin mencapai titik temu;
2. Melihat waktu dan konflik secara tertutup, hanya menyoroti tempat-tempat kejadian. Melihat sebab dan akibat hanya sebatas peristiwa, seperti siapa yang pertama kali membunuh, bagaimana pihak lain membalasnya, dan sebagainya;
3. Membuat konflik bersifat rahasia;
4. Menggunakan kerangka "kita-mereka" dan hanya menyuarakan kita;
5. Melihat keberadaan mereka sebagai masalah dan selalu menyoroti kemenangan atau kekalahan dari mereka yang terlibat konflik;
6. Menciptakan kesan tentang musuh yang biadab, terutama jika ada yang menggunakan senjata;
7. Reaktif: hanya membuat laporan atau berita ketika kekerasan terjadi;
8. Hanya menyoroti akibat-akibat yang terlihat dari kekerasan, seperti korban pembunuhan, luka-luka, kerusakan bangunan dan sebagainya.

Adapun jurnalis berorientasi propaganda, cirinya adalah:

1. Mengekspose kebenaran mereka;
2. Memahami kebenaran dari satu sisi saja.

Jurnalis yang berorientasi pada elit, cirinya adalah:

1. Menyoroti kesengsaraan rakyat, menggunakan kalangan elit, umumnya laki-laki sebagai corong;
2. Hanya menyebut pelaku kekerasan dari pihak mereka;
3. Hanya menyoroti usaha perdamaian yang dilakukan kalangan elit.

Jurnalis berorientasi pada kemenangan, cirinya adalah:

1. Perdamaian adalah kemenangan dan gencatan senjata berarti musuh berhasil dikalahkan;
2. Menutupi semua usaha perdamaian sampai kemenangan tercapai;
3. Menyoroti kesepakatan damai yang formal, lembaga, dan masyarakat yang terkendali;
4. Kelanjutan tetap mengorbankan semangat perang jika sewaktu-waktu masalah timbul lagi.

Berita sebenarnya dapat memegang peran lain. Melalui jurnalisnya, berita dapat berperan sebagai pemain sentral dalam menyebarkan perdamaian. Berita dapat dibuat dengan menekankan manfaat penting dari perdamaian. Dalam perang, perlu diungkapkan kebenaran. Meliput dan mengabarkan berita, jurnalis memiliki andil yang besar dalam membentuk berita. Pandangan jurnalis yang melakukan konstruksi realitas inilah yang dapat mengarahkan suatu berita dalam arah jurnalisme perang atau jurnalisme damai. Apabila konstruksi realitas jurnalis lebih mengarah pada konsep jurnalisme perang, asumsinya si jurnalis akan menggambarkan realitas ke arah tindak kekerasan saja. Sebaliknya apabila konstruksi realitas jurnalis sesuai dengan konsep jurnalisme damai, asumsinya si jurnalis akan menggambarkan realitas dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip perdamaian dalam penyajian beritanya.

Proses produksi berita tidak bisa lepas dari organisasi, tempat bekerjanya jurnalis tersebut. Teks pemberitaan adalah sesuatu yang tidak berdiri sendiri, ia tidak lepas dari redaksional organisasi dan proses produksi. Dengan demikian bukan hanya reporter saja yang mengambil keputusan bagaimana berita akan dipaparkan tapi ada pula peran organisasi dan media di sini (Eriyanto, 2007).

### **Jurnalis dan Konstruksi Realitas Sosial Media**

Dalam proses pemuatan berita, seperti yang telah disebutkan dimuka, tidak hanya jurnalis yang menentukan berita yang akan dimunculkan, tetapi juga ada peran organisasi dan media. Dalam konstruksi sosial terhadap realitas memang ada beberapa faktor yang sangat dominan dalam proses konstruksi sebuah berita. Faktor itu adalah *individual level* (tingkat individual), *media routines level* (level

rutinitas media), dan *organizational level* (tingkat organisasi) (Shoemaker dan Reese, 1991).

### ***Individual Level***

Pada tingkat level individu, ada beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu faktor intrinsik pekerja media. Faktor ini terdiri dari tiga hal, *pertama*, karakteristik komunikator dan latar belakang personal serta profesional pekerja media, misalnya tingkat pendidikan si jurnalis. Pada level *kedua*, tingkah laku personal dan pekerja media, dan nilai serta kepercayaan yang dianut, dicontohkan dengan sikap politik dan agama jurnalis. *Ketiga*, orientasi profesional dan konsep peran yang terkait dengan pekerjaannya, contoh apakah jurnalis menganggap dirinya netral atau tidak dalam membuat beritanya.

### ***Media Routines Level***

Rutinitas media terkait dengan organisasi dalam media massa. Pada dasarnya rutinitas organisasi berbeda, namun media memiliki kemiripan dengan efisiensi aktifitas media. Efisiensi adalah upaya yang dilakukan oleh organisasi media untuk menghasilkan produk yang paling dapat diterima oleh khalayak dalam waktu dan ruang yang terbatas guna mendapat keuntungan. Dalam menentukan isi media, ada tiga hal yang menjadi pertimbangan yakni cerita dari sumber yang ada, selera dan keinginan khalayak, dan kebutuhan organisasi media itu sendiri. Untuk mengetahui keinginan khalayak, informasi *rating* yang dibuat oleh lembaga survey yang memuat tentang pembagian penonton dari program-program televisi serta karakteristik demografinya dibutuhkan oleh media. Rating inilah yang akan memungkinkan pengiklan untuk memutuskan akan memasang iklan di program televisi.

### ***Organizational Level***

Pada tingkat ini, yang menjadi sorotan adalah pengaruh organisasi media terhadap isi media yang berhubungan dengan bagaimana organisasi menyelesaikan masalah produksinya. Hal ini berkaitan dengan peran organisasi, struktur internal, tujuan, teknologi, dan pasar. Organisasi merupakan suatu kesatuan sosial, formal, ekonomi yang memperkerjakan pekerja media untuk menghasilkan isi media yang memiliki tujuan tertentu. Terdapat tiga tingkat pekerja media, pertama,

pekerja garis depan misalnya dalam organisasi media jurnalistik seperti reporter. Kedua, tingkat menengah contoh produser atau editor. Ketiga, tingkat atas yang terdiri dari para eksekutif yang membuat kebijakan organisasi.

Berdasarkan pembahasan tentang level yang dominan dalam konstruksi media, terlihat bahwa jurnalis bukanlah satu-satunya komponen yang mengkonstruksi berita. Ada unsur lain dalam media yang mengkonstruksi realitas yaitu rutinitas media dan organisasi media. Dengan demikian, berita bukan saja dilihat dari pandangan jurnalis saja, tetapi juga ada kepentingan dan bias dari media dan organisasi tempat jurnalis itu bekerja. Pada saat jurnalis, media, dan organisasi media memiliki pandangan yang sama bahwa jurnalisme perang merupakan hal yang penting sebagai landasan peliputan perang, maka konsep ini akan digunakan sebagai ideologi dalam pemberitaan tentang perang.

Kepentingan merupakan komponen yang dominan ketika mengkonstruksi realitas. Seorang jurnalis tidak akan membuat berita berdasarkan pandangannya sendiri. Jurnalis bekerja dalam media yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan yang menonjol antara lain adalah mendapatkan keuntungan ekonomi. Berita dibuat berdasarkan keinginan pasar, menarik banyak penonton dengan memuat fakta dan gambar yang menimbulkan sensasi.

Sebagai agen konstruksi sosial, media melakukan interpretasi terhadap fakta dan peristiwa perang yang terjadi. Di lapangan ketika melihat fakta dan peristiwa perang, jurnalis sebagai bagian dari media seringkali mengalami hambatan dalam meliput berita yang dilihatnya, mengingat medan yang sulit dijangkau. Akhirnya berita yang disampaikan hanya terbatas pada salah satu pihak yang berkonflik. Efek yang ditimbulkannya tentu saja berita yang diperoleh tidak seimbang.

### **Kontribusi Jurnalisme Alternatif**

Saat ini, banyak orang di dunia merasa prihatin tentang bahaya perang, terutama kalau dalam perang, pihak yang berkonflik menggunakan senjata nuklir ataupun senjata kimia. Jelas jika ini terjadi maka kehancuran dunia tidak bisa ditunda lagi. Loeffelholz, menyebut perang sebenarnya merupakan produk dari proses-proses sosial yang sangat terpengaruh oleh berbagai macam kondisi, sarana, dan efek komunikasi. Konflik-konflik disebabkan tidak hanya oleh perbedaan kepentingan,



namun juga oleh kesalahan komunikasi dan kesalahpahaman diantara berbagai bagian masyarakat ( Loeffelholz, 2002).

Kesalahan dan kesalahpahaman ini tidak terlepas dari peran jurnalis dalam membuat berita. Jurnalis memegang peran penting dalam membuat berita yaitu sebagai interpreter yang menginterpretasikan fakta yang ia lihat dan ia dengar menjadi sebuah berita. Fakta dalam pendekatan konstruksionis dianggap sebagai realitas yang dikonstruksikan. Dalam hal ini manusia secara aktif memberi definisi dan memberikan makna terhadap suatu peristiwa. Dengan demikian fakta itu ada dalam kosepsi pikiran orang.

Jurnalis bukanlah pemulung yang mengambil fakta begitu saja. Dalam kenyataannya, tidak ada realitas yang bersifat eksternal dan objektif yang berada di luar diri jurnalis. Realitas bukanlah sesuatu yang “berada di luar” yang objektif, yang benar, yang seakan-akan ada sebelum diliput oleh jurnalis. Sebaliknya, realitas itu dibentuk dan diproduksi tergantung pada bagaimana proses konstruksi berlangsung. Realitas itu sebaliknya, bersifat subjektif, yang terbentuk lewat pemahaman dan pemaknaan subjektif dari jurnalis (Eriyanto, 2007).

Jurnalisme yang dijalankan media memegang peranan penting, dalam situasi konflik, perang maupun situasi krisis. Bisa berdampak positif maupun negatif. Pada satu sisi bisa mendorong terjadinya peperangan, di satu sisi lain dapat mendorong perdamaian. Jurnalisme perang memainkan peran meningkatkan konflik. Jurnalisme damai bisa menurunkan konflik.

Pertanyaan besar yang harus terjawab adalah, bagaimana mencegah perang, konflik atau mengurangi dampak negatif yang terjadi akibat perang, konflik melalui kegiatan jurnalisme? Jawaban dari pertanyaan ini tidak mudah, diperlukan komitmen yang tinggi untuk menjalankan jurnalisme alternatif yang berorientasi perdamaian. Jurnalisme yang berorientasi kepada perdamaian memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Menelusuri unsur dalam konflik, misalnya berapa pihak yang terlibat, apa tujuannya, apa yang menjadi isu atau masalah yang diperdebatkan dengan perspektif mencari penyelesaian;
2. Melihat waktu dan tempat konflik secara terbuka, tidak dibatasi oleh kejadian-kejadian yang baru berlangsung. Melihat sebab dan akibat di berbagai tempat dan waktu serta menelusuri sejarah konflik dan lain sebagainya;

3. Membuat konflik bersifat transparan;
4. Memberi suara kepada semua pihak dengan empati dan pemahaman;
5. Melihat konflik atau perang sebagai masalah dan melihat bentuk-bentuk lain dari konflik yang tidak menggunakan kekerasan;
6. Melihat pihak-pihak yang berkonflik sebagai manusia. Terutama jika ada yang menggunakan senjata;
7. Proaktif, mencegah terjadinya perang dan kekerasan tanpa harus menutupi konflik;
8. Menyoroti akibat kekerasan yang tidak terlihat, seperti trauma dan demam kemenangan, kehancuran struktur masyarakat dan budaya. (Lynch dan Mc. Goldrick, 2005).

Media massa memegang peranan penting dalam menjalankan jurnalisme perdamaian, mengingat media massa punya potensi besar menciptakan perbedaan tajam konflik antar golongan di tengah masyarakat. Media massa yang tidak dikelola dengan semangat menegakkan jurnalisme perdamaian, akan berubah menjadi agen utama dalam menciptakan *survival of the fittest* (siapa yang kuat akan menang) di sekitar kita.

Pada dasarnya jurnalisme perdamaian merupakan upaya meluruskan kembali apa yang menyimpang dari jurnalisme dalam praktek. Pada hakekatnya jurnalisme bertujuan untuk kebaikan masyarakat. Apabila suatu pemberitaan media tidak memberi pertimbangan penyelesaian konflik atau pemberitaannya itu malah memicu konflik, maka jelas jurnalisme seperti itu bukanlah memberikan kebaikan pada masyarakat. Jurnalisme damai lebih menonjolkan aspek-aspek apa yang mendorong bagi penyelesaian konflik, yang diangkat adalah hal-hal yang sifatnya mendorong kearah perdamaian. Lynch dan Mc. Goldrick, (2005), mengemukakan jurnalisme damai terwujud ketika redaktur dan reporter menetapkan pilihan-pilihan bersifat damai tentang berita apa yang akan dilaporkan dan bagaimana cara melaporkannya. Bersifat damai berarti bentuk pemberitaan yang menciptakan peluang bagi sebagian besar masyarakat untuk mempertimbangkan dan menghargai tanggapan tanpa kekerasan terhadap konflik yang bersangkutan.

Pers dapat menjalankan perannya sebagai provokator tetapi bukan sebagai provokator eskalasi konflik, melainkan sebagai provokator yang menjalankan tugas memprovokasi pihak-pihak yang bersengketa

untuk mencari jalan keluar mengatasi konflik. Pendekatan dilakukan pada pendekatan *win-win solution*, bukan siapa yang menang atau kalah dan memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada kedua belah pihak untuk berdamai. Terjadi kerusuhan misalnya, media hendaknya menempatkan kerusuhan itu dalam bingkai yang lebih luas dan akurat dan berdasarkan pada informasi pada konflik serta perubahan-perubahan yang terjadi. Untuk menghindari konflik yang lebih luas pada peristiwa kerusuhan, media perlu menyembunyikan suatu informasi yang kalau diberitakan dapat memperluas konflik. Jurnalisme yang dilaksanakan seperti ini, perlu dipahami para jurnalis.

Dalam suatu tulisan Jehan Perera (dalam Ispandriarno, Hanitzch, Loeffelholz, 2002), mengemukakan perlunya jurnalis memedomani suatu standar ideal dalam meliput konflik, dia menyebutkan sebagai *Conflict Management Group* yang merupakan pedoman ideal bagi praktek jurnalisme yang bertanggung jawab.

*Pedoman pertama* adalah meliput kedua sisi dari konflik tersebut. Tentu saja ini merupakan aturan standar dalam kode etik perilaku apapun bagi para jurnalis. Pedoman ini mengatur liputan yang akurat, adil, dan seimbang dari seluruh pihak yang terlibat dalam sebuah isu. Bila tampaknya ada lebih dari dua sisi, haruslah dilakukan usaha agar pihak-pihak utama lainnya mengemukakan pandangan mereka sendiri. Hal ini penting karena disinformasi dapat diumpangkan secara sangat profesional kepada para jurnalis, bukan hanya oleh badan-badan pemerintah melainkan juga oleh oposisi.

Kadang sulit mendapatkan suatu pemahaman yang jelas mengenai situasi objektifnya. Jurnalis harus mempresentasikan atau paling tidak merujuk ke berbagai persepsi dan menjelaskan mengapa satu persepsi lebih disukai daripada yang lain. Suatu anjuran yang praktis, bila mau mendapatkan liputan yang akurat dari seluruh pihak yang terlibat dalam suatu konflik, adalah dengan meliput orang-orang yang mengetahui kedua sisi konflik seperti para sejarawan, aktivis warga dan siapa saja yang mempelajari kedua sisi konflik tersebut. Suatu ciri umum dalam situasi konflik etnis di sejumlah negara adalah berbagai macam persepsi telah terpolarisasi. Realitasnya begitu kompleks, dari seluruh totalitasnya hanya menyaring hal-hal yang tampaknya relevan bagi kita. Bila kita tidak hati-hati, ini berbahaya.

*Pedoman kedua*, menyarankan agar para jurnalis mempresentasikan orang-orang tanpa memberikan label terhadap mereka. Studi komparatif tentang konflik menunjukkan bahwa persepsi tentang kelompok-kelompok lain sebagai entitas-entitas yang monolitik dan mengancam, sedang kelompok sendiri sebagai entitas yang lemah, tertindih, dan diadu domba memainkan peranan penting dalam memobilisasi orang untuk berkonflik. Lantas siap melakukan tindakan kekerasan. Para jurnalis mungkin ingin meliput semua sudut dengan mencari para politisi atau para pemimpin etnis individual yang mengangkat diri mereka sendiri yang komentar-komentarnya dapat digunakan untuk mempresentasikan perasaan dan sudut pandang kelompok. Kuncinya bagi jurnalis adalah jangan mengasumsikan komentar-komentar itu sebagai mewakili harapan dan kepentingan kelompok secara keseluruhan dan perbuatan yang dilakukan adalah sebagai individu-individu dan bukan dilakukan oleh seluruh kelompok.

*Pedoman ketiga* menyarankan agar para jurnalis memberikan konteks, bukan sekedar liputan peristiwa saja. Konflik kerap terjadi berlawanan dengan latar belakang historis yang kompleks dengan berbagai interpretasi yang berbeda-beda tentang identitas kelompok klaim atas wilayah. Sebagian besar sejarah etnis relatif baru-baru ini saja muncul, dan berbagai pandangan tentang sejarah dikedepankan oleh berbagai individu dalam suatu kelompok untuk membenarkan agenda-agenda di masa sekarang. Para jurnalis hendaknya berusaha dan memfokuskan kepada manipulasi sejarah oleh para politisi untuk mengorbankan semangat supaya memperkuat dukungan mereka sendiri. Jurnalis hendaknya juga meluangkan lebih banyak waktu untuk mengeksplorasi usaha-usaha berbagai kelompok untuk melakukan mediasi dan perundingan. Bukan berasumsi bahwa peristiwa-peristiwa kekerasan merupakan suatu ukuran yang akurat dari keadaan hubungan-hubungan antarkelompok.

*Pedoman keempat* mengharap para jurnalis mendidik para pembaca bahwa konflik-konflik etnis bersifat global dan dapat dikelola. Konflik-konflik etnis terjadi di seluruh dunia. Untuk menghindari suatu perasaan apati, media hendaknya memfokuskan pada kenyataan bahwa sejumlah konflik etnis sudah berhasil dikelola dengan efektif. Kunci lain untuk mendidik tentang pengelolaan konflik adalah memperlihatkan bahwa keanekaragaman etnis tidak hanya terjadi diantara kelompok dengan

kelompok, melainkan juga di dalam kelompok itu sendiri. Dapat dilakukan generalisasi luas tentang sejarah atau aspirasi suatu kelompok, namun generalisasi itu harus disertai dengan informasi berbagai opini di dalam kelompok yang bersangkutan.

*Pedoman kelima* menuntut agar para jurnalis mempraktekkan jurnalisisme yang bertanggung jawab. Pernyataan saling menyalahkan, benar dan salah dalam suatu konflik, dan laporan kekerasan haruslah ditangani dengan amat hati-hati. Apa yang dibutuhkan bukanlah sensor atas fakta, melainkan usaha yang lebih besar dalam menjelaskan fakta ketika konflik itu dilaporkan. Kecenderungan sensor resmi adalah memperluas lingkup materi dan pandangan yang akan mereka sensor. Sensor juga mengurangi kredibilitas berita dan membuka ruang bagi desas desus. Para jurnalis, menyadari bahwa mereka mempunyai peran konstruktif yang harus mereka mainkan dalam mengurangi tingkat kekerasan etnis, namun mereka hanya dapat mengurangi peran ini, bila mereka secara konsisten jujur dan terbuka dengan para pembaca atau pemirsa mereka.

Pedoman bagi para jurnalis yang meliput konflik, terlihat penting sekali pada negara yang masyarakatnya multikultur. Dalam masyarakat seperti ini, jurnalisisme hendaknya memberikan perhatian kepada kepentingan masyarakat multikultur untuk memelihara kondisi damai dan menjalankan usaha-usaha konstruktif dalam pembangunan masyarakat multikultur. Hal yang perlu diperhatikan adalah menghindari berita yang dapat menyentuh sensitivitas hubungan multikultur.

## **Simpulan**

Beberapa hal yang dipandang urgen dalam jurnalisisme ketika berhadapan dengan peristiwa konflik adalah para jurnalis perlu senantiasa mendorong masyarakat untuk mengakui realitas perbedaan, agar perbedaan itu tidak dianggap sebagai ancaman. Penting memberikan pemahaman yang benar tentang perbedaan itu. Perbedaan perlu dianggap sebagai realitas yang mesti diterima secara bersama-sama sehingga perbedaan itu tidak menyebabkan konflik.

Pemberitaan yang berkaitan dengan etnis dan agama, dianggap sangat sensitif pada masyarakat multikultur. Pada masyarakat seperti ini, mudah didorong untuk terlibat dalam konflik yang berkaitan dengan etnis dan agama. Masih banyak kelompok yang menganggap kebenaran

hanya berada dalam kelompoknya sendiri sedangkan kelompok di luar kelompok dia, dianggap tidak benar. Dalam situasi seperti ini para jurnalis sangat perlu mempertimbangkan aspek sensitivitas dalam pemberitaannya. Pertimbangan dalam penentuan berita, bukan berarti jurnalis menyembunyikan peristiwa yang terjadi. Jurnalis bisa menyampaikan berita konflik, tetapi cara penyampaiannya harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan perdamaian bagi masyarakat.

Jurnalis melaporkan tentang konflik, dapat mendorong terciptanya perdamaian dengan cara memfokuskan pemberitaannya dalam upaya-upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertikai. Jurnalis dapat juga mengambil fokus pemberitaan akibat yang ditimbulkan oleh konflik. Dengan demikian diharapkan pihak yang bertikai menyadari akibat yang ditimbulkan dari konflik itu.

Media berfungsi sebagai ruang publik untuk membuka ruang dialog, membicarakan kepentingan, dan gagasan yang berbeda. Indonesia misalnya, termasuk negara demokrasi sehingga ruang dialog perlu disediakan.

Jurnalis hendaknya selalu menjadikan kode etik jurnalistik sebagai asas dalam melakukan aktivitas pemberitaan. Jurnalis benar-benar mempertimbangkan apa yang bermanfaat dan apa yang tidak bermanfaat bagi khalayak. Jurnalis harus melaksanakan proses pendalaman terhadap suatu berita untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menyampaikan informasi kepada khalayak. Kesalahan dalam penyampaian informasi dapat menyebabkan salah pengertian, salah pemahaman yang berakhir dengan konflik. Sikap menahan diri perlu dilakukan oleh jurnalis agar pemberitaan yang disampaikan tidak menimbulkan konflik atau merugikan masyarakat.

Kebebasan pers yang dijalankan jurnalis hendaknya tidak disalahgunakan, misalnya digunakan untuk meningkatkan penjualan atau keuntungan ekonomi atau untuk menimbulkan sensasi. Pemberitaan tentang konflik yang bertujuan seperti itu, justru akan menimbulkan dampak negatif terhadap media itu sendiri sebab etnis atau pemeluk agama yang tersinggung akan memberi reaksi keras kepada media tersebut. Pemberitaan seperti ini juga akan memberikan dampak negatif terhadap masyarakat sebab dapat menimbulkan provokasi untuk melakukan tindakan yang mengarah kepada prasangka etnis dan agama tertentu (Junaidi, 2010).

Informasi yang jelas dan akurat tentang konflik merupakan suatu kebutuhan yang mutlak ada ketika para jurnalis meliput berita. Tanpa informasi yang memadai, akurat dan jelas tidak mungkin penanganan dan penyelesaian konflik dapat dilakukan secara efektif. Pada saat konflik terjadi seringkali informasi yang diperoleh jurnalis sangat banyak bahkan dapat dikatakan melimpah. Informasi yang banyak ini sulit dijadikan pegangan dalam pemberitaan karena informasinya bersifat sepotong-potong, tidak proporsional. Informasi yang berkualitas buruk ini memberikan dampak pada situasi konflik yang semakin memburuk.

Masalah yang dihadapi jurnalis tentang informasi tersebut, dapat dicarikan solusinya yaitu:

1. Menambah dan terus menerus membuka saluran (*channel*) komunikasi sehingga arus informasi terus mengalir dan ketersediaan informasi bisa diperoleh secara memadai;
2. Meningkatkan kualitas informasi tentang konflik yang ada sehingga bisa diperoleh informasi yang bermakna dan berguna secara memadai bagi kepentingan publik secara luas;
3. Fokus pada penyajian informasi dan proses komunikasi yang mengarah pada isu-isu yang spesifik dari situasi konflik dan setiap dimensi krisis secara mendalam sehingga tidak memperluas dan semakin membuat ruwet interpretasi dan pemaknaan publik yang bisa semakin mengacaukan situasi krisis (Chang dalam Trijono, 2002).

Dalam perspektif peran komunikasi dan informasi pada resolusi konflik, alternatif pertama dikemukakan oleh pendekatan yang disebut sebagai pendekatan saluran informasi yang mengemukakan bahwa jumlah informasi yang memadai sangat menentukan bagi berhasilnya intervensi dan resolusi konflik. Pendekatan ini memandang pentingnya transmisi informasi berlangsung secara lancar, cukup memadai, mengalir, dan disebarluaskan oleh berbagai saluran media massa serta saluran-saluran informasi yang ada. Agar dapat menghasilkan keputusan yang tepat, menurut pandangan ini, sejumlah informasi yang cukup sangat diperlukan. Hal ini hanya dapat dilakukan bila saluran-saluran informasi dan media massa sebanyak-banyaknya dibiarkan tetap terbuka sehingga informasi dapat mengalir dan tersikulasikan secara luas.

Alternatif kedua dan ketiga seringkali ditekankan oleh pendekatan memori dalam teori komunikasi untuk resolusi konflik. Pendekatan ini



memandang proses komunikasi secara interpretatif dan hermeneutik, menekankan pada kualitas dan isi informasi daripada sekedar jumlah. Informasi dan pesan-pesan yang ada dimaknai dan dipersepsi dan disikapi oleh berbagai pihak para pengambil keputusan terutama pihak ketiga, sangat menentukan berhasil tidaknya penanganan konflik. Hal ini sangat tergantung pada jenis dan kualitas informasi tentang konflik dan pesan perdamaian yang ada. Informasi tentang konflik yang mengandung muatan lengkap mengenai dimensi-dimensi konflik secara utuh, dapat memperbaiki persepsi, sikap, dan perilaku konflik, bahkan dalam jangka panjang bisa mendukung perbaikan situasi konflik yang ada.

Informasi yang hanya menekankan pada satu aspek saja, terutama aspek perilaku konflik yang tampak nyata, tidak memuat situasi atau akar konflik serta persepsi apa adanya dari pihak-pihak yang berkonflik, akan menghasilkan informasi yang bias, tidak seimbang dan tidak proporsional yang bisa mengganggu penanganan konflik yang dilakukan. Hal inilah yang harus dihindari.

## **Daftar Pustaka**

- Eriyanto, 2007, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, Yogyakarta: LKiS.
- Harsono, Andreas dan Setiyono, Budi. (Ed), 2005, *Jurnalisme Sastrawi, Antologi Liputan Mendalam dan Memikat*, Jakarta: Pantau.
- Hidayat. N, Dedy, 2011, *Self-Originated Being*, Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI.
- Ispandriarno, S. Lukas, Hanitzsch, T, Loeffelholz. M.(Ed), 2002, *Media-Militer-Politik, Crisis Communication: Perspektif Indonesia dan Internasional*, Yogyakarta: Friedrich E.S dan Galang Press.
- Junaidi, 2010, *Pandangan Editor Surat Kabar Indonesia dan Malaysia terhadap Jurnalisme Multikultural*, Yogyakarta: Jurnal Ilmu Komunikasi UPN Yogyakarta. Vol.8.No.2 Tahun 2010.
- Kovack, Bill dan Tom Rosenstiel, 2004, Terjemahan. *Elemen-Elemen Jurnalisme, Apa yang Seharusnya Diketahui Wartawan dan Diharapkan Publik*, Jakarta: ISAI.



- Lynch, Jake, dan McGoldrick, Anabel, 2005, *"Peace Journalism: How To Do It?" Jurnalisme Damai: Bagaimana Melakukannya?*, LSPP dan The British Council.
- Puspawati. D.H, 2004, Framing Jurnalisme Damai dan Jurnalisme Perang di Media (Analisis Framing Berita Harian Kompas dan Republika Selama Pemberlakuan Darurat Militer I Pada Tanggal 18 Mei 2003 s/d 16 November 2003 di Aceh., Jakarta: Program Pascasarjana FISIP UI: *Jurnal Thesis*. Vol.VIII/No. 3/2009.
- Putranto, Algooth, 2004, *"Jurnalisme Damai dan Jurnalisme Perang"*. (Artikel), Kompas 9 Februari 2004.
- Shoemaker, P.J dan Reese, S.D, 1991, *Mediating the Message: Theories of Influences on Media Content*, New York: Logman Publisher.
- Trijono, Lambang dalam Ispandriarno, S. Lukas, Hanitzsch, T, Loeffelholz. M.(Ed), 2002, *Media-Militer-Politik, Crisis Communication: Perspektif Indonesia dan Internasional*, Yogyakarta: Friedrich E.S dan Galang Press.



# POSISI MEDIA DALAM PERANG MELAWAN TERORISME

**Mubarok**

## **Pendahuluan**

Pasca penyerangan terhadap gedung World Trade Centre (WTC) pada 9 November 2001 Amerika Serikat mendeklarasikan perang terhadap teroris. Istilah tersebut merujuk pada kelompok Al-Qaeda pimpinan Usamah bin Ladin yang dianggap sebagai teroris global. Sejak peristiwa 11 September yang dituduhkan terhadap Al-Qaeda, perang melawan terorisme berskala global dilancarkan dari Washington. Korbannya, tidak hanya para teroris, tetapi juga negara yang dituding membantu terorisme, seperti Afghanistan dan Irak.

Dalam perang melawan terorisme yang dikumandangkan oleh Amerika Serikat sesungguhnya perang utama yang harus dimenangkan adalah persepsi global tentang siapa yang disebut teroris dan siapa yang berhak untuk mengadili dan menghukum mereka. Proses ini harus dimenangkan terlebih dahulu oleh Amerika Serikat sehingga bisa mengajak negara di berbagai belahan dunia manapun untuk mendukung aksi mereka. Secara massif Amerika Serikat mengkampanyekan perang melawan terorisme melalui beragam saluran komunikasi. Perang melawan terorisme menjadi jargon dari setiap kegiatan diplomasi. Materi kampanye setiap kandidat presiden di Amerika Serikat selalu menekankan perang melawan terorisme.

Sebuah negara yang memegang peran di berbagai belahan dunia menjadi wajar jika Amerika Serikat bisa mengontrol isu terorisme sehingga berbagai pemberitaan media massa di seluruh penjuru dunia sepakat dengan definisi teror, teroris, dan tindakan apa yang harus dilakukan. Contohnya saja ketika Amerika Serikat menyerang Afganistan untuk menghancurkan Al Qaeda efeknya tidak hanya dirasakan oleh kelompok tersebut melainkan juga penderitaan dari warga Afganistan. Dunia tidak melakukan protes keras apalagi upaya

untuk menghalangi tindakan Amerika Serikat menyerang Afganistan. Kata kuncinya terletak dari kesepakatan berbagai negara dari seluruh dunia terhadap definisi perang melawan terorisme. Nampak bahwa kemampuan mengontrol arus informasi dalam melakukan propaganda melawan terorisme berhasil mereka lakukan.

Keterlibatan media dalam menyebarkan informasi, menyebarkan gagasan, melakukan amplifikasi dari ideologi dominan memegang peran penting bagi tersebarnya doktrin perang melawan teroris. Sekilas nampak bahwa kemenangan Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya dalam menyebarkan isu terorisme menjadi bukti dominasi mereka dalam mengontrol media. Di sisi lain ternyata berbagai kelompok teroris juga secara sadar memanfaatkan media untuk beragam kepentingan. Menarik untuk dikaji bagaimana kelompok yang disebut teroris menunjukkan eksistensi dalam memanfaatkan media? Hubungan media dan terorisme? Peran media dalam melanggengkan dan menyebarkan ideologi teror? Bagaimana seharusnya posisi media dalam pemberitaan terorisme sehingga bisa memberikan kontribusi positif bagi ketahanan nasional?

## **Teror dan terorisme**

Istilah terorisme berkaitan dengan kata *teror* dan *teroris*. Secara semantik leksikal, teror berarti kekacauan; tindak kesewenang-wenangan untuk menimbulkan kekacauan dalam masyarakat; tindak kejam dan mengancam. Kata terorisme berasal dari bahasa Perancis *le terreur* yang semula dipergunakan untuk menyebut tindakan pemerintah hasil Revolusi Perancis yang mempergunakan kekerasan secara brutal dan berlebihan dengan cara memenggal 40.000 orang yang dituduh melakukan kegiatan anti pemerintah. Terorisme juga dipergunakan untuk menyebut gerakan kekerasan anti pemerintah di Rusia. Kata terorisme sejak awal dipergunakan untuk menyebut tindakan kekerasan oleh pemerintah maupun kegiatan yang anti pemerintah. Istilah teroris berarti pelaku aksi teror yang bisa bermakna jamak maupun tunggal. Terorisme diartikan sebagai paham yang gemar melakukan intimidasi, aksi kekerasan, serta berbagai kebrutalan terhadap masyarakat sipil berdasarkan latar belakang, sebab, dan motif tertentu (Fanani, 2009: 366).

Perkembangan bahasa Arab dewasa ini, kata teror atau teroris ditunjuk dengan kata yang seakar dengan kata "*rahiba*", yakni "*irhab*".

Kata “*irhab*” dipakai untuk menunjuk aksi terorisme. Menurut Quraish Shihab, pengertian simantik “*rahiba*” bukan seperti yang dimaksud oleh kata itu sekarang ini. Quraish Shihab menyatakan bahwa yang digentarkan atau dibuat takut (*turhibun*), sebagaimana yang dimaksud QS al-Anfal [8]: 60, bukanlah masyarakat umum, bukan juga orang-orang yang tidak bersalah. Mereka yang menjadi musuh Allah SWT dan musuh masyarakat (Shihab,2002:486). Menurut Wilkinson, terorisme adalah penggunaan pembunuhan, kekerasan, kerusakan, ancaman, dan sejenisnya secara sistematis untuk menimbulkan suasana mencekam, mempublikasikan ideologi, dan mempengaruhi target yang luas agar mengikuti tujuan pelaku terror (Wilkinson, 2005: 9).

Abu Muhammad AF dalam *Webster New School and Office Dictionary, A Fawcett Crest Book* membagi terorisme dengan dua pendefinisian. Pertama, terorisme sebagai kata benda dan kedua, sebagai kata kerja. Terorisme sebagai kata benda adalah *extreme fear* berarti ketakutan yang teramat sangat, bisa juga diartikan *one who excites extreme fear* yang berarti seseorang yang gelisah dalam ketakutan yang teramat sangat. Arti lain adalah *the ability to cause such fear*, yakni kemampuan untuk menimbulkan ketakutan, atau mengancam, atau memaksa dengan teror atau ancaman teror. Dalam kata kerja, terorisme dapat diartikan sebagai penggunaan kekerasan, ancaman, dan sejenisnya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau tujuan dari suatu sistem pemerintahan yang ditegakkan dengan teror (Pribadi dan Rayyan, 2009: 10-11).

## **Hubungan Media dan Terorisme**

“*The only difference between martyrdom and suicide is the press coverage*” (Panic at the Disco). Kutipan lirik lagu tersebut relevan untuk melihat hubungan antara media dan terorisme.

Di berbagai belahan dunia peristiwa teror dan pelakunya menjadi bahan berita yang menarik bagi media. Fenomena Al Qaeda dan Usamah Bin Ladin menjadi materi berita yang menarik bagi media di berbagai belahan dunia. Di Filipina, Kelompok Abu Sayyaf dan Pejuang Moro adalah dua kelompok yang menjadi sasaran pemberitaan terkait kegiatan terorisme. Di Indonesia, Jamaah Islamiyah dan Noordin M Top menjadi bahan pemberitaan setiap kali terjadi peristiwa pemboman. Terorisme dan media memiliki kaitan erat dalam hubungan simbiosis mutualis meski tidak bersifat langsung. Media membutuhkan bahan berita yang

menarik khalayak, di sisi lain para pelaku teror membutuhkan publisitas untuk menunjukkan eksistensi atau menyebarkan alasan ideologis di balik aksi teror yang mereka lakukan. Penayangan para korban teror atau pelaku teror secara berlebihan dianggap menghadirkan teror baru bagi pemirsa. Contohnya, potongan kepala pelaku Bom Mega Kuningan yang diberitakan berkali-kali oleh media telah mengundang kritik dari berbagai pihak.

Fakta bahwa teroris memanfaatkan media dapat ditarik jauh ke belakang, antara lain ke kasus pembunuhan Empress Elizabeth (Tuchman, 1972). Pelakunya, Luchini, seorang yang gemar melakukan kliping berita, menyatakan: "Saya telah lama ingin membunuh orang penting agar bisa masuk Koran". Pada tataran teoritis, hal ini dinamakan *a violent communication strategy*. Pelaku teror bertindak sebagai sender, para korban menjadi *message generator*, dan *receiver* adalah kelompok yang dianggap musuh atau publik secara luas (Ghozali, Kompas/07-08-2003). Brian Jenkins mengungkapkan bahwa terorisme adalah produk dari kebebasan pers. Walter Laqueur sependapat dengan pernyataan Jenkins dan menyebut media sebagai teman baik teroris karena tanpa publisitas aktifitas mereka tidak berarti (Biernatzki, 2002: 5).

Media massa dan terorisme adalah simbiosis mutualis yang saling menguntungkan satu sama lain. Kelompok teror membutuhkan publikasi sementara media membutuhkan berita yang memiliki nilai informasi tinggi. Grant Wardlaw menyatakan, terorisme merupakan sebuah komoditas yang bisa diekspor, *terrorism is now an export industry*. Terorisme ibarat industri yang bisa dikembangkan di mana-mana. Industri itu, menurut Collin Wilson dan Donald Seamen, sebagai *the world's most sinister growth industry* (industri kekejaman dunia yang paling berkembang) (Mc Alister, 2002). Terorisme memiliki nilai berita yang tinggi karena dramatisasi yang berlangsung secara alami (Gadarian, 2010: 471-472).

Studi yang dilakukan oleh Schmid and de Graaf, 1982, Schlesinger, 1991, Nacos, 1994, Lockyer, 2003, Norris, Kern and Just, 2004 menunjukkan bahwa hubungan media dan teroris bersifat simbiotik. Pemanfaatan secara aktif meliputi: mengomunikasikan pesan-pesan ketakutan kepada khalayak luas; mempolarisasi pendapat umum; mencoba menarik anggota baru pada gerakan teroris; mengecoh musuhnya dengan menyebar informasi palsu; mengiklankan diri dan

menyebabkan mereka merasa terwakili; membangkitkan keprihatinan publik terhadap korban untuk menekan agar pemerintah melakukan kompromi atau konsesi; mengalihkan perhatian publik dari isu-isu yang tidak dikehendaki dengan harapan berita teror mereka mengisi halaman depan media; dan membangkitkan kekecewaan publik terhadap pemerintah. Teroris memanfaatkan reportase media untuk mencapai target politik global (Alkarni, 2005: 3).

Kajian dari Soriano menjelaskan bagaimana hubungan antara media dan terorisme. Soriano memulai eksplorasinya tentang hubungan antara media dan terorisme dengan menggunakan kata dari Marshall McLuhan, *"without communication, terrorism would not exist"*. Pemikiran terorisme membutuhkan peran dari media untuk mewujudkan eksistensinya. Melalui media, pesan teroris dapat disebarluaskan lebih cepat dan lebih meyakinkan. Menurut Brigitte Nacos ada tiga tujuan utama teroris yang berlaku secara universal yaitu: menarik perhatian, mendapat pengakuan, dan mendapat penghormatan serta pengesahan. Tujuan-tujuan tersebut merujuk pada simbiosis hubungan antara media dan teroris. Brigitte Nacos menggabungkan aspek-aspek tujuan tersebut menjadi sebuah kerangka kerja dimana teroris memiliki empat ketergantungan umum terhadap media ketika mereka melakukan serangan. Keempat kerangka kerja tersebut adalah *gain attention and awareness of the audience, recognition of the organization's motives, gain the respect and sympathy, dan gain a quasi-legitimate status and a media treatment similar to that of legitimate political actors* (Soriano, 2008: 1-20). Yonah Alexander mengungkapkan bahwa teroris memanfaatkan media untuk mendapatkan perhatian, pengakuan, keabsahan mereka sebagai organisasi teror (Alexander et al, 1979: 162 dalam COT, 2008: 3).

Kerangka kerja pertama adalah *Gaining Attention and Awareness; Spreading Fear* yakni sebuah upaya untuk mendapat perhatian publik dengan cara menyebar ketakutan. Tindakan para teroris yang bersifat lokal bisa tersebar secara nasional bahkan internasional dengan pemberitaan media. Penyebaran berita yang memuat pesan para teroris menunjukkan peran penting media dalam mendukung aksi teror. Strategi untuk mendapat perhatian merujuk pada upaya menunjukkan pentingnya tindakan para teroris, mengintimidasi pemirsa, pemerintah, dan pengambil keputusan politik melalui ketakutan yang disebarkan (COT, 2008: 3).

Tujuan kedua adalah *recognition of motives*. Tujuan ini secara konsep berhubungan dengan *agenda setting* dan *framing*. Teroris tidak hanya ingin diketahui oleh *audiens* tetapi juga menyampaikan pesan dan motif dibalik tindakan mereka. Tindakan bom bunuh diri yang digunakan para teroris akan menimbulkan pertanyaan di benak audiens tentang motif tindakan mereka. Media melalui *frame* pemberitaan yang dikembangkan akan memberikan penjelasan mengenai motif yang dimiliki oleh para teroris tersebut. Tujuan ketiga adalah *gaining respect and sympathy*. *Audiens* yang menyaksikan tindakan teroris bukan hanya *audiens* yang bisa ditakuti tetapi juga mereka yang secara potensial akan mendukung aksi teror yang terjadi. Kelompok yang memiliki akar ideologi serupa atau memiliki tujuan yang sama dengan para pelaku teror berpotensi untuk memberikan rasa hormat dan simpati. Tujuan keempat dari teroris dalam menggunakan media adalah *gaining legitimacy*. Teroris secara rutin tampil di media, mereka memposisikan diri sebagai wakil resmi dari kelompoknya. *Audiens* bisa setuju dengan tindakan teroris atau justru menolak, namun mereka akan melihat bahwa kelompok teroris tersebut menjadi wakil dari kepentingan tertentu. Kelompok teroris seolah mendapat pengesahan dari para pendukung mereka yang mendapat informasi melalui media (COT, 2008: 10).

Pemanfaatan secara aktif menunjukkan bagaimana upaya para teroris memanfaatkan media untuk mendapatkan efek nyata dari tindakan mereka. Penggunaan media secara aktif, teroris juga menggunakan media secara pasif diantaranya: sebagai jaringan komunikasi eksternal di antara teroris; mempelajari teknik-teknik penanganan terbaru terhadap terorisme dari laporan media; mendapat informasi tentang kegiatan terkini pasukan keamanan menghadapi teror yang sedang mereka lakukan; menikmati laporan media yang berlebihan tentang kekuatan teroris hingga menciptakan ketakutan pihak musuh dan mencegah keberanian polisi secara individual; mengidentifikasi target-target selanjutnya; dan mencari tahu reaksi publik terhadap tindakan mereka.

Hubungan antara media dan teroris tidak hanya nampak pada penggunaan media untuk kepentingan para teroris. Di sisi lain, media menggunakan teroris untuk kepentingan mereka. Tragedi berdarah, peristiwa yang menarik perhatian dan sisi dramatis dari aksi teror selalu menjadi komoditi yang bertiras tinggi bagi media. Beberapa hal yang bisa menjelaskan bagaimana media menggunakan teroris untuk



kepentingan mereka, pertama, *Exacerbating factors: Competition and Speed*. Wilkinson and Ockrent menyebutkan dua faktor penting dari perubahan kerja media yaitu kompetisi dan kecepatan. Kompetisi dan kecepatan menuntut media bekerja dengan lebih baik agar bisa bersaing. Dalam kompetisi, materi berita yang menarik akan menentukan kemampuan untuk menarik *audiens*. Kecepatan menuntut media untuk mendapat berita dari sumber pertama dalam tempo yang singkat. Aksi terorisme menjadi materi menarik bagi pemberitaan sekaligus membutuhkan kecepatan untuk menyiarkannya. Media berlomba untuk mendapatkan kesempatan pertama dalam pemberitaan terorisme. Ada dua hal yang berkumpul secara bersamaan yaitu kasus yang menarik dan isu global yang dibicarakan di berbagai negara (COT, 2008: 16-17). Teori *agenda setting* dan *framing* bisa menjelaskan bagaimana kaitan antara terorisme dan media. *Agenda setting* semakin besar perhatian media terhadap suatu fenomena maka semakin besar perhatian masyarakat terhadap fenomena tersebut. *Framing* menjelaskan bagaimana media menyajikan suatu berita akan mempengaruhi bagaimana audiens mengartikan dan memahami fenomena yang diberitakan.

Relasi antara kepentingan propaganda teroris dengan kepentingan nilai berita dari media bertemu dalam formulasi teks yang lahir. Hubungan simbiosis antara media dan teroris dalam formulasi teks nampak dalam pemberitaan yang menjadikan topik tersebut sebagai agenda utama. Media membutuhkan isu terorisme sebagai berita utama, sementara teroris berusaha untuk menjadi agenda utama dari pemberitaan media. Bertemunya dua kepentingan antara teroris dan media memberikan pengaruh bagi persepsi publik dan reaksi pemerintah dalam menangani terorisme.

Beberapa organisasi teror memberikan penghargaan kepada para pengikutnya yang berani melakukan aksi bom bunuh diri. Propaganda organisasi teroris dilakukan menggunakan media massa, website, poster, dan pamflet untuk memberikan semangat kepada para pengikutnya. Sebagai contoh Macan Tamil di Srilanka memberikan nama khusus kepada pengikutnya yang melakukan serangan bom dengan sebutan pahlawan. Masyarakat di Palestina mengadakan turnamen sepakbola dengan nama pelaku bom bunuh diri sebagai nama piala. Hamas di Lebanon mengadakan pemilihan "*martyr of the month*" yang menjadi kalender rutin organisasi tersebut. Beragam acara dari organisasi teror

tersebut dipublikasikan melalui media massa untuk menunjukkan eksistensi kelompok, menyebarkan kebanggaan sebagai anggota kelompok dan membakar semangat para anggota untuk bertindak sesuai ideologi yang mereka anut. Muaranya adalah sebuah realitas bahwa publikasi melalui media massa dianggap sebagai sarana efektif untuk beragam kepentingan yang ingin mereka capai (Gill, 2007: 146-147)

Di Indonesia para pelaku bom bunuh diri membuat rekaman untuk mempengaruhi opini masyarakat. Mereka memanfaatkan internet, Imam Samudera membuat buku "Aku Melawan Teroris", untuk menunjukkan ideologi sekaligus menyebarkan ajaran yang mereka yakini sebagai sebuah kebenaran. Al Qaeda yang selama ini dianggap sebagai organisasi teror terbesar secara terorganisi memanfaatkan media untuk beragam kepentingan. Al-Qaeda memiliki beragam strategi publikasi yang meliputi pernyataan melalui faksimili, posting di internet, rekaman wawancara dalam bentuk audio dan video serta beragam artikel yang mereka tulis di berbagai media. Beragam publikasi tersebut bermanfaat untuk membentuk solidaritas global dan memperluas area konflik yang mendukung kepentingan Al Qaeda (Fucito, 2006: 6). Fawaz Gerges, 2005 menyebut bahwa Usama Bin Ladin adalah orang yang terobsesi dengan publikasi internasional, hal ini dibenarkan oleh AL Zawahiry yang menyebut bahwa separuh pertempuran terjadi di media massa (COT, 2008: 4).

Jurnalis melakukan reportase untuk mendapatkan informasi seputar terorisme, maka ia memiliki kemungkinan untuk menggunakan beragam istilah yang biasa digunakan oleh kelompok teroris. Istilah tersebut kemudian tersebar ke berbagai penjuru dunia karena pemberitaan media. Secara tidak langsung sebenarnya disinilah peran media untuk menyebarkan ideologi teroris yang mereka liput. Istilah bukanlah sekedar kata mati melainkan sarat makna ideologis. Contoh tata nama yang digunakan untuk menyebut tindakan pelaku teror dan nama yang digunakan oleh pelaku teror terhadap kegiatan mereka.

**Tabel 5.1. Label dan Penamaan Tindakan Terorisme**

Label dari Media	Teroris Menamai Aktifitas mereka
Criminal	Revolutionary
Terorist	Guerrilla
Murderer	Freedom Fighter
Gang	Army
Subversive element	Liberator
Bloodbath	Purge
Lunatic	Martyr
Mercenary	Soldier
Threat	Warning
Aggression	Preventive Counter Strike
Assassin	Avenger
Propaganda	Communiqué
Extremist Fanatic	Dedicated Anti-Imperialist
Attack	Operation
Hired Killer	Example of Revolutionary Solidarity
Murder	Revolutionary Justice

Sumber: (Lockyer, 2003:2)

Istilah-istilah penting yang sering digunakan oleh organisasi teror tersebar ke seluruh penjuru dunia dan membawa pesan ideologis. Contoh istilah “pengantin” yang digunakan oleh kelompok Noordin M Top tersebar melalui pemberitaan media Indonesia. Istilah “pengantin” berarti seseorang yang merelakan dirinya mati sebagai pengebom bunuh diri sesungguhnya sedang dipersiapkan untuk menjadi suami bidadari di surga. Ideologi jaringan ini tersebar dan menginspirasi banyak pemuda untuk menjadi “pengantin”. Para pelaku teror menyadari pentingnya penyebaran ideologi mereka guna mendapatkan dukungan dan simpati dari publik. Guna mendukung kepentingan tersebut mereka memberikan kesempatan bagi media untuk melakukan liputan dan wawancara seputar aktifitas mereka.

### **Bagaimana Seharusnya Posisi Media**

Kecurigaan terhadap adanya interdependensi teroris dan media ditegaskan oleh Giessmann (2002: 734-136), menurutnya kelompok teroris mencari perhatian media untuk sebisa mungkin mendapatkan penerimaan publik. Kelompok teroris kerap mengusung sensasi - sebagai nilai berita yang mereka manipulasi untuk tujuan propaganda.

Media massa, lebih lanjut, menerima bentuk simbiosis ini demi untuk mendapatkan gambar-gambar yang menarik dan berita-berita yang rnegejutkan serta menjadi *leading newspaper* terhadap kompetitomya. Padahal idealnya, menurut Giessmann, media massa memiliki kesempatan dan tanggung jawab untuk membatasi persebaran terorisme dengan pemberitaan yang lebih bersandar pada kesadaran moral dan reportase yang dipilah-pilahkan (Prajarto, 2004: 40).

Persidangan Anders Behring Breivik yang dilakukan di Oslo, Norwegia mengungkapkan sebuah pengakuan yang mengejutkan. Breivik mengaku belajar melakukan teror dari majalah online yang diterbitkan Al Qaeda dan film dokumenter tentang Irak dan Afghanistan. Breivik adalah pelaku pembunuhan terhadap tujuh puluh tujuh orang di Oslo Norwegia pada Juli 2011 lalu. Ia mengaku bahwa tindakannya terinspirasi dari penyerangan Oklahoma dan World Trade Centre pada 2001. Breivik menyebut Al Qaeda sebagai teroris paling sukses sehingga layak ditiru strateginya. Dalam kurun waktu 2006 sampai 2011 Breivik mengikuti Al Qaeda dan mempelajari cara melakukan teror ([www.CNN.com/20/4/2011](http://www.CNN.com/20/4/2011)).

Berkaca dari kasus tersebut maka peran media dalam pemberitaan terorisme diharapkan tidak menimbulkan ekses negatif bagi pemirsa. Pemberitaan media tidak menimbulkan keinginan dari orang yang menonton berita tersebut untuk meniru. Berita media juga diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari amplifikasi penyebaran ideologi teror. Upaya menghalangi kerja media dengan melarang memberitakan kasus terorisme tentu tidak bisa dilakukan karena bertentangan dengan kebebasan pers. Melarang media untuk memberitakan kasus terorisme berarti menghalangi hak kebebasan memperoleh informasi yang ada pada setiap individu.

Beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan oleh awak media ketika meliput berita terorisme adalah:

### 1. *The critical imperative*

Penulis revolusioner Cina, Lu Xun menyatakan bahwa peran penting dari seorang penulis adalah untuk member kritik. Mark Blaisse mengkritik perilaku dari media yang hanya mengedepankan profit dari pemberitaan. Pemberitaan media haruslah menjadi kritik bagi setiap peristiwa yang mereka liput. Kasus terorisme sebagai pemberitaan

media yang hanya mengedepankan aspek bisnis semata tidaklah pantas untuk dilakukan. Media harus bisa memberikan kritik dan masukan bagi pemerintah dan masyarakat bagaimana menyikapi kasus terorisme (Biernatzki, 2002: 20)

## 2. *Interviewing terrorists*

Organisasi teror biasanya akan mengundang media untuk melakukan wawancara terhadap tokoh-tokoh mereka sehingga mendapatkan publikasi yang luas. AL Qaeda secara rutin mengundang media untuk mewawancarai tokoh mereka. Mayor Alfredo Stefano yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Timor Leste mengundang Metro TV untuk mewawancarnya. Pada kondisi ini jurnalis akan mengalami dilemma terkait dengan keyakinan dan pengalaman hidup yang dia alami. Nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi bagaimana wawancara dilakukan, materi pertanyaan dan berita yang dihasilkan.

Jurnalis yang melakukan wawancara dengan teroris seringkali tidak sadar telah masuk dalam pemahaman ideologi mereka. Empati, toleransi, pengertian, dan ketertarikan yang muncul dalam proses wawancara secara perlahan menggiring jurnalis ketika menuliskan berita tentang terorisme. Dalam contoh peristiwa Mayor Alfredo Stefano yang ditayangkan di Metro TV, pemirsa di rumah juga bisa terbawa secara emosional kedalam penjelasan logis yang disampaikannya. Mewawancarai teroris memerlukan kemampuan khusus dari seorang jurnalis sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi *audiens*.

Pada tahun 1997 ketika Peter Begen seorang jurnalis CNN mewawancarai Usama Bin Ladin dari Afghanistan ia menyadari bahwa Bin Ladin adalah seorang yang sangat memahami bagaimana caranya melakukan wawancara dengan media. Bin Ladin meminta daftar pertanyaan yang akan diajukan dan menyatakan hanya akan menjawab pertanyaan yang sesuai dengan keinginannya (Fucito, 2006: 7). Kondisi tersebut menggambarkan bagaimana kemampuan dari tokoh teroris ketika melakukan wawancara dengan media. Tantangan yang dihadapi jurnalis ketika melakukan wawancara dengan mereka adalah kemampuan untuk mendapatkan informasi tanpa terperangkap dalam empati dan ketertarikan berlebih dalam menyebarkan ideologi yang mereka sebarkan.

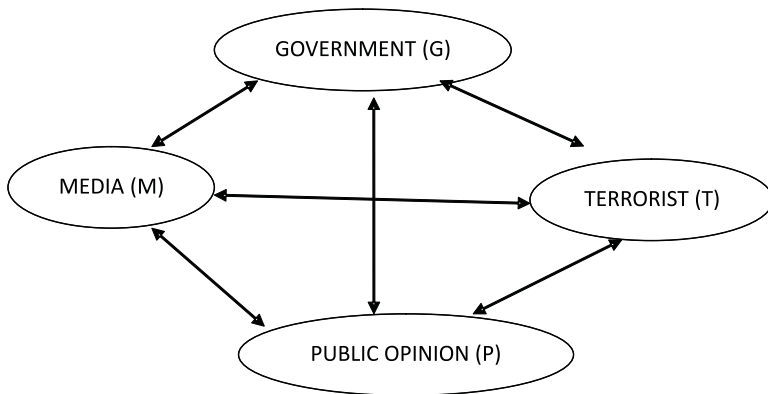
### 3. *Moral obligations of reporting*

David L. Paletz and Laura L. Tawney menekankan pentingnya aspek moral dari jurnalis, editor, penyiar, dan awak media lainnya ketika memberitakan kasus terorisme. Awak media harus menyadari bahwa realitas yang mereka liput, materi wawancara dan kronologi yang mereka beritakan akan membawa dampak bagi orang yang membacanya (Biernatzki, 2002: 20).

Kebebasan berekspresi yang menjadi salah satu hak asasi manusia yang diakui haruslah menimbulkan sebuah dampak baru bagi penyebaran terorisme. Jalan tengah sangat diperlukan seperti ungkapan dari Direktur Media National Council di Uni Emirat Arab (UAE) Saker Ghabbash yang menyatakan bahwa peran media massa sangat penting sehingga perlu dikembangkan metode kreatif ketika memberitakan terorisme. Awak media perlu mendapatkan pelatihan tentang isu terorisme sehingga bisa memainkan peran yang nyata bagi upaya mengurangi dampak pemberitaan terorisme di kalangan generasi muda. Pemberitaan terorisme harus disajikan dengan kecerdasan intelektual sehingga memberikan efek kekebalan di kalangan generasi muda dari pengaruh ideologi teroris dan tetap mencintai tanah tumpah darahnya. Media massa perlu dikembangkan pemberitaan yang bisa mengajak generasi muda melakukan beragam aktifitas bermanfaat agar tidak terpengaruh aktifitas teroris (The Middle East Report, 2010: 12).

Ignacio Ramonet mengungkapkan bahwa keberadaan pimpinan media yang datang dari perusahaan besar dan bukan lahir dari jurnalis yang meniti karir dari bawah ditengarai menjadi penyebab ketidakmampuan dari media untuk menghasilkan pemberitaan cerdas (Biernatzki, 2002: 6). Terorisme adalah fenomena yang berbeda dengan perang gerilya dan kekerasan yang lain. Media memerlukan kemampuan yang berbeda dalam memberitakan terorisme. Beberapa media menyikapi fenomena terorisme sama dengan kasus perang gerilya dan jenis kekerasan lainnya. Kesalahan ini harus diperbaiki sehingga berita tentang terorisme tidak sama dengan berita yang lain.

Contoh model hubungan antara media, teroris, dan pemerintah. Model ini mengembangkan kaitan antara pemerintah, media, organisasi terror, dan terbentuknya opini publik. Model pada gambar 5.1. dikembangkan berdasarkan pengalaman Saudi Arabia dalam kasus terorisme.



**Gambar 5. 1. *The Media-Terrorism Model, Six Bilateral Relations***

Sumber: (Alkarni, 2005:15-18)

Model ini menggambarkan hubungan bilateral diantara dua kelompok dan setiap hubungan merefleksikan apa yang dibutuhkan dari satu kelompok kepada kelompok lain. Berikut penjelasan dari model tersebut:

1. *MG: media to get information, government to censor information*  
 Media mendapatkan kebebasan untuk memberitakan terorisme. Pemerintah menawarkan pandangan mereka dalam menilai kasus terorisme yang terjadi. Pandangan pemerintah dan kebebasan media untuk menyampaikan informasi disandingkan bersama dalam pemberitaan media;
2. *MT: media to cover actions; terrorist to manipulate media and get publicity for their cause and issues.*  
 Media meliput dan memberitakan aksi teroris dalam berbagai bentuk seperti pemboman, penculikan, sabotase. Beragam aksi tersebut ditujukan untuk memperoleh publikasi dari media. Teroris berusaha memanipulasi kasus, dan isu yang terkait dengan aksi mereka agar mendapatkan simpati publik. Pada kondisi ini pemerintah memberikan kesempatan kepada media untuk mewawancarai pelaku teror yang tertangkap dengan harapan berita yang disampaikan media bisa lebih mudah diketahui dan dikontrol pemerintah. Para teroris yang tertangkap mendapatkan intimidasi agar memberikan pernyataan positif terhadap pemerintah;
3. *MP: media to inform the public; the public to understand the whole pictures*

*of events from the media*

Media memiliki peran untuk menyebarkan informasi kepada publik sementara publik memahami gambaran terorisme yang dinformasikan oleh media. Publik mengakses informasi terorisme dari media yang berasal dari luar negeri, maka gambaran terorisme yang mereka peroleh berbeda dengan harapan dari media lokal;

4. *TG: terrorists to change government policies; government to stop violence.*

Teroris berusaha mempengaruhi kebijakan politik pemerintah melalui beragam aksi teror yang mereka lakukan. Sisi lain pemerintah berusaha menghentikan segala bentuk kekerasan dan aksi teror. Peran media dalam proses delegitimasi terorisme sangat dibutuhkan agar aksi teror tidak ditiru oleh generasi muda;

5. *TP: terrorists to use the public as a means to pressurize governments; the public to feel safe and express dissatisfaction with the violent actions of terrorists and encourage them to use peaceful means to achieve their objectives.*

Dukungan dari publik terhadap keamanan nasional sangat dibutuhkan oleh negara. Pemerintah mengharapkan adanya keamanan dan ketentraman di masyarakat. Pada kondisi ini media bisa membantu mengembangkan pemberitaan yang mengarahkan semua pihak agar menggunakan cara damai untuk mencapai tujuan mereka. Tindakan teroris menggunakan kekerasan tidak bisa diterima;

6. *GP: government to convince the public to be calm and to be disassociated from terrorists; the public seek accurate information from the government.*

Publik berusaha untuk mencari informasi yang akurat dari pemerintah tentang kondisi yang sedang terjadi. Pemerintah berusaha untuk meyakinkan *public* agar mempercayai kebijakan yang telah digulirkan dalam menyelesaikan kasus terorisme.

Model tersebut memberikan gambaran bahwa kasus terorisme merupakan ancaman nyata bagi keamanan nasional suatu bangsa. Perlu kerjasama dari berbagai pihak dalam mengatasi permasalahan ini. Beragam kepentingan antara media, teroris, pemerintah, dan publik menggambarkan kompleksitas hubungan diantara mereka. Berikut tingkatan partisipasi teroris dalam proses pembentukan berita media (COT, 2008: 18-19):



1. Ketika teroris melakukan aksinya seperti pemboman, maka mereka akan menunggu bagaimana reaksi media terhadap aksi tersebut. Mereka berusaha mempengaruhi berita media dengan memilih target, menentukan lokasi, dan waktu agar menghasilkan efek yang dramatis. Mereka tidak terlibat dalam menuliskan berita di media. Pada kondisi ini media memegang peran sendiri dalam menuliskan berita tentang aksi teroris;
2. Teroris mengirimkan rekaman video, *press release*, dan bentuk publikasi lain ke media. Teroris menentukan diksi, konstruksi pemberitaan, memilih aktor, dan berharap media memberitakan sesuai keinginan mereka. Proses *gatekeeping* yang ada di media akan berperan besar menentukan bentuk berita yang muncul. Beberapa media memilih untuk menayangkan pernyataan teroris secara utuh untuk menunjukkan orisinalitas dan menjaga objektivitas pemberitaan. Media lain memilih melakukan sensor agar berita yang tampil sesuai kebijakan redaksional;
3. Teroris memiliki kemampuan penuh untuk mengontrol berita media. Beberapa cara yang mereka lakukan adalah dengan membuat media sendiri atau memaksa media dengan cara kekerasan. Cara kekerasan yang ditempuh adalah dengan menculik jurnalis dan memaksa mereka untuk memberitakan sesuai keinginan.

Graber, 2004 mengajukan tiga konsep berkaitan dengan pemberitaan peristiwa yang menyangkut keamanan nasional. Konsep ini menjelaskan hubungan antara media dan pemerintah dalam menyikapi fenomena tersebut. Ketiga konsep tersebut adalah, *the formal censorship*, *the free press approach*, and *the informal censorship approach* (AlKarni, 2005: 4)

1. *The formal censorship*

Pemerintah menentukan materi berita yang boleh dipublikasikan oleh media. Bentuk sensor ini sarat muatan ideologis dan kepentingan dari penguasa. Berkaitan dengan isu keamanan nasional, pemerintah berhak menentukan materi pemberitaan media. Bentuk sensor diwujudkan dalam undang-undang, peraturan, pengawasan langsung dari aparat pemerintah;

2. *The free press approach*

Jurnalis dan media diberikan kebebasan seluas-luasnya tanpa batasan ketika memberitakan isu yang berkaitan dengan keamanan

nasional. Pemerintah tidak melakukan sensor dalam bentuk apapun. *Audiens* dianggap sudah cerdas dan mampu memilah isi pemberitaan sehingga tidak membahayakan keamanan nasional;

3. *The informal censorship approach*

Pemerintah tidak melakukan sensor secara formal dalam bentuk apapun. Media diberikan ruang dan kebebasan untuk memberitakan isu yang terkait keamanan nasional. Pihak internal media memiliki batasan dan tanggungjawab moral kepada masyarakat dalam menentukan materi berita. Pemerintah mengembangkan diskusi yang sehat dengan media dalam membahas isu-isu yang berkaitan dengan keamanan nasional.

Pada kasus pemberitaan terorisme di Indonesia, model manakah yang paling tepat?. Model pertama pernah diterapkan di masa orde baru ketika kebebasan pers dikekang. Setiap pemberitaan yang menyangkut keamanan nasional harus mendapat persetujuan pemerintah. Model ini kembali diterapkan di Indonesia maka kekhawatiran akan matinya kebebasan pers bisa terwujud. Model kedua yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada pers dalam memberitakan terorisme sekilas menjadi wujud dari kebebasan pers dan pemenuhan hak mendapatkan informasi bagi masyarakat. Persoalannya apakah *audiens* sudah benar-benar cerdas dalam membaca berita media, atau justru kebebasan tersebut dijadikan celah para pelaku teror untuk menyebarkan ideologi mereka.

Media diberi kebebasan untuk memberitakan apapun termasuk menyebarkan ideologi teror, cara melakukan teror, kronologi, jenis senjata, dan teknik melakukan teror. Informasi ini tentunya sangat berbahaya jika dibaca oleh *audiens* yang memiliki kecenderungan ideologi sama dengan pelaku teror. Mereka bisa meniru pola dan cara melakukan teror dengan belajar dari pemberitaan media. Fenomena Anders Behring Breivik yang meniru dan mengagumi Al Qaeda bisa terulang kembali. Keamanan nasional adalah kepentingan bersama termasuk kepentingan dari kebebasan.

Model ketiga yang menekankan pentingnya tanggungjawab moral dan kecerdasan media dalam memberitakan isu yang sensitif membutuhkan kecerdasan dan kemampuan dari awak media. Mereka yang menentukan proses *news gathering, producing, dan menyebarkan*

berita. Peran dan tanggungjawab media dalam mendukung terciptanya stabilitas keamanan nasional adalah sebuah keniscayaan. Sebuah studi dari Jimirro Center for the Study of Media Influence di Penn State University menunjukkan bahwa dua pertiga rakyat Amerika Serikat dipengaruhi oleh pemberitaan media ketika menempatkan terorisme sebagai isu keamanan nasional. Media tidak efektif untuk merubah perilaku dan kebiasaan masyarakat agar menyiapkan diri menghadapi serangan teroris. Pemberitaan media secara jelas menunjukkan kengerian dan bahaya dari tindakan teroris, namun masyarakat tidak merubah perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari (Major, 2003 dalam Alkarni, 2005: 6).

Negara yang sering berurusan dengan terorisme adalah India. Pemboman, sabotase, penculikan, dan beragam aksi teror sering terjadi di negara ini. India adalah salah satu negara yang mengembangkan "*non military approach of terrorism*" meliputi pendekatan politik, ekonomi, psikologi, dan *social* ketika menghadapi kasus terorisme. India membagi terorisme menjadi lokal dan internasional. Serangan terhadap suatu tempat pemerintah India memperhitungkan pemberitaan yang muncul tentang kasus tersebut. Mereka mengadakan penelitian berapa banyak *audiens* yang menerima terpaan berita terorisme dan materi apa yang mereka konsumsi. Pemerintah India berusaha untuk menanggapi setiap propaganda yang menguntungkan kelompok teroris. Pemerintah India juga membuat materi pemberitaan agar kelompok teroris dan pimpinannya tidak menjadi idola dikalangan masyarakat (Raman, 2003 dalam Alkarni, 2005: 5).

Beberapa contoh penanganan pemberitaan terorisme di negara lain bisa menjadi pelajaran untuk menerapkan model yang tepat bagi Indonesia. Sebuah negara yang sering berurusan dengan kasus terorisme, pendekatan yang tepat untuk memberitakan kasus ini menjadi kebutuhan mendesak.

## **Simpulan**

Media sesungguhnya berada di tengah realitas sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan, konflik, dan fakta yang kompleks dan beragam. Isi media tidak hadir begitu saja melainkan melalui mekanisme tarik menarik kepentingan internal dan eksternal yang kuat. Apa yang tersaji di media bukanlah realita yang sesungguhnya melainkan

formulasi kerja redaksional yang menghadirkan kembali realitas dalam wajah yang lain. Media melalui formulasi tersebut menghadirkan realitas baru yang telah mengalami penambahan, pengurangan, perbaikan, penghapusan atau bahkan distorsi dari realitas sesungguhnya. Alih-alih menghadirkan realitas obyektif, isi media justru sarat dengan berbagai kepentingan yang melingkupinya.

Mengurangi dampak pemberitaan terorisme di kalangan generasi muda adalah sebuah tanggungjawab yang harus dipikul oleh media. Awak media yang berkaitan dengan pemberitaan tentang terorisme perlu memiliki kesadaran dan kemauan kuat untuk mengurangi dampak buruk berita yang mereka buat. Kronologi, tata cara melakukan aksi, cara menggalang dana, dan ideologi teroris tidak perlu diberitakan secara detail beserta ilustrasi yang bisa dicontoh. Materi berita bisa diganti dengan strategi kontra terorisme yang berisi penguatan semangat nasionalisme, kesetiakawanan, menghargai perbedaan, dan mengalihkan perhatian generasi muda agar tidak mencontoh tindakan teroris.

Terorisme bisa dikurangi dampaknya jika media mampu menyajikan pemberitaan yang cerdas dan sehat. Bagi Indonesia yang selama ini menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya terorisme kemampuan media dalam membantu ketahanan nasional sangat dibutuhkan. Pemberitaan tentang terorisme harus disajikan dalam kerangka untuk menjaga ketahanan nasional dan menghindari efek negatif yang menginspirasi pelaku teror lainnya.

Pada akhirnya kemampuan media untuk menyikapi kasus terorisme dengan pemberitaan cerdas sangat dibutuhkan agar kebebasan pers tetap terjaga tanpa harus menimbulkan dampak buruk dengan lahirnya teroris baru yang terinspirasi pemberitaan media.

## **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman Pribadi dan Abu Rayyan, 2009, *Membongkar Jaringan Teroris*. Jakarta, Abdika.
- Alkarni, Ali, 2005, *A Media/Terrorism Model The Saudi Experience*, dipresentasikan di International Association for Media & Communication Research, Taipei, 2005.
- Akhmad Fanani, 2009, *Kamus Istilah Populer*, Yogyakarta: Mitra Pelajar.

- Biernatzki, William E, 2002, *Terrorism and Mass Media*, Santa Clara University: Centre for the Study of Communication and Culture.
- Hoffman, B, 2006, *Inside Terrorism (Revised and Expanded Edition)*, New York: Columbia University Press.
- Gadarian, Kushner, Shana, 2010, *The Politics of Threat: How Terrorism News Shapes Foreign Policy Attitudes*, *The Journal of Politics*, Vol. 72, No. 2, April 2010, Pp. 469–483.
- Ghozali, Effendi, 2003, *Without Media There Can be no Terrorism*, dimuat di Kompas, 07-08-2003.
- Gill, Paul, 2007, *A Multi-Dimensional Approach to Suicide Bombing*, School of Politics and International Relations, University College Dublin: Ireland, IJCV: Vol. 1 (2) 2007, hal: 146-147.
- Lockyer, Adam, 2003, *The Relationship Between The Media And Terrorism*, The Australian National University.
- Soriano, Manuel R. Torres, 2008, *Terrorism and the Mass Media after Al Qaeda: A Change of Course?* *Athena Intelligence Journal* Vol. 3, No 1, (2008), pp. 1-20.
- Prajarto, Nunung, 2004, *Terorisme dan Media Massa: Debat Keterlibatan Media*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 8, Nomor 1, Juli 2004, Hal:37-52.
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 5.
- Terrorism and The Media*, 2008, COT Institute, Netherland hal: 3.
- The Middle East Reporter* Wednesday January 6, 2010.



# PENGGUNAAN MEDIA SEBAGAI INSTRUMEN PERANG (ANALISIS DISKURSUS DALAM KASUS NUKLIR IRAN)

**Salim Alatas**

## **Pendahuluan**

Perang di era modern adalah sebuah perang yang lebih mengandalkan kekuatan media ketimbang kekuatan fisik. Pemerintahan Amerika Serikat dan Pentagon merupakan contoh bagaimana melakukan salah satu kampanye *public relation* paling sukses dalam sejarah politik modern dalam penggunaan media untuk menggerakkan dukungan terhadap perang. Perang AS terhadap Irak, menurut Kellner (1995), adalah perang yang dihasilkan oleh interaksi antara Pemerintahan Bush, Pentagon dan media yang mempergunakan berbagai citra dan wacana tentang krisis, dan menggerakkan persetujuan dan dukungan bagi intervensi militer AS.

Samuel Huntington (2003: 476) menjelaskan bahwa opini publik dunia menolak penyerangan AS ke Irak pada perang teluk I. Menurut Huntington, upaya militer Barat hanya memperoleh sedikit dukungan masyarakat non-Barat. Lebih dari 50 persen masyarakat non-Barat menentang dan hanya 25 persen menyatakan dukungannya. Upaya untuk membalikkan opini publik ke arah “mendukung perang”, dalam pandangan pemerintah AS, adalah strategi mendesak yang harus dilakukan.

Douglas Kellner (1995: 199) telah melakukan sebuah analisis menarik mengenai bagaimana media telah “diperalat” untuk kepentingan perang. Dalam analisisnya yang cukup kritis, dia menilai bahwa perang terhadap Irak merupakan sebuah teks yang dihasilkan oleh pemerintahan Bush,

Pentagon dan media yang mempergunakan berbagai citra dan wacana tentang krisis, untuk menggerakkan persetujuan dan dukungan bagi intervensi militer AS.

Kellner (1995: 199) juga melihat bahwa sejak awal, berbagai institusi berita utama mengikuti kebijakan pemerintahan Bush dan Pentagon. Media-media utama di AS adalah media komersial, yang bersaing mendapatkan audiens dan keuntungan. Akibatnya, televisi, surat kabar, dan majalah berita utama, tidak mau kehilangan para konsumen, sehingga sangat berhati-hati dalam melawan opini publik dan pendapat resmi pemerintah. Media-media utama juga mendahulukan sumber resmi pemerintah untuk berbagai ceritanya, khususnya dalam masa krisis. Mereka cenderung menjadi corong kebijakan dan tindakan pemerintah AS.

Media-media *mainstream* di AS telah menjadi “kaki tangan” pemerintah. Saat Pemerintahan Bush mengirim pasukan berjumlah besar ke wilayah Irak, media-media utama mendukung tindakan ini dan menjadi corong untuk menggerakkan dukungan bagi kebijakan AS. Selama beberapa minggu, hanya sedikit suara penolakan yang terdengar di media-media utama. Berita, komentar, dan diskusi, terutama di televisi, sangat menyanjung solusi militer atas krisis tersebut, sebagai kendaraan propaganda bagi militer AS. Tidak ada debat televisi yang penting mengenai berbagai konsekuensi berbahaya respons militer besar-besaran AS atas invasi Irak, atau mengenai kepentingan dan kebijakan yang dilakukan oleh invasi militer tersebut. Kritik atas kebijakan AS secara luas menghilang dari media-media utama yang memberitakan krisis tersebut, dan hanya sedikit analisis ditampilkan yang menyimpang dari isu-isu yang dihadirkan oleh Pemerintahan Bush.

Pemerintahan Bush mengontrol wacana media, sebagian melalui penyusutan informasi dan propaganda, dan sebagian lagi melalui kontrol pers dengan sistem sumber daya kolektif (*pool system*). Pada hari-hari pertama “krisis teluk”, misalnya administrasi Bush melakukan kampanye penyusutan informasi yang sangat sukses dengan tujuan mengontrol dan memanipulasi berbagai sumber yang membenarkan pengerahan militer di Arab Saudi pada 8 Agustus 1990. Selama hari-hari pertama krisis, pemerintah AS sering menyatakan bahwa pihak Irak sedang menggerakkan pasukan di perbatasan Arab Saudi dengan tujuan menginvasi kerajaan yang kaya minyak itu. Hal ini merupakan informasi



yang sangat menyesatkan, dan berbagai kajian berikutnya mengungkap bahwa Irak tidak memiliki keinginan menginvasi Arab Saudi dan tidak memiliki pasukan dengan jumlah besar yang mengancam perbatasan Saudi (Kellner, 1995: 201-202).

Chandra Muzaffar (2003: 228) mendeskripsikan bagaimana media-media *mainstream* di AS mendukung perang melawan Irak. Pendapat ini diperkuat dengan tuduhan Direktur Jendral British Broadcasting Corporation (BBC), Greg Dyke, pada Fox News Channel, jaringan televisi kabel AS paling populer selama perang. Ia menyatakan Fox sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab karena "patriotismenya yang berlebihan", Dia juga mengkritik kelompok radio terbesar AS, *Clear Channel Communications* karena telah "menggunakan gelombang siarannya untuk mengorganisir kampanye pro-perang". Demikian juga CNN yang telah melakukan pemberitaan yang timpang mengenai perang tersebut.

Setelah perang media Amerika terus memicu sentimen publik untuk merasionalisasi dan membenarkan segala tindakan Washington demi mempertahankan dan melanggengkan kekuasaannya di Irak. Para tentara Amerika ditampilkan sebagai "pahlawan" dan "pembebas". Rakyat Irak yang berunjuk rasa menentang kekuasaan Amerika dicemooh sebagai orang-orang fanatik yang ingin mendirikan sebuah teokrasi. Ketidakberimbangan benar-benar dapat dilihat secara jelas, betapa sedikit sekali liputan mengenai ribuan rakyat yang terbunuh oleh pasukan pendudukan.

Sejalan dengan apa yang telah dikatakan oleh seorang kritikus media paling berpengaruh di AS, Noam Chomsky, bahwa Institusi-institusi media komersial telah membentuk dan mendefinisikan norma-norma dan keyakinan-keyakinan masyarakat dalam kaitannya dalam kepentingan sosial, politik, dan ekonomi yang dominan di suatu Negara. Menurut Chomsky, media memobilisasi publik untuk mendukung kepentingan-kepentingan sosial kaum elit. Ideologi dominan dalam masyarakat berfungsi sebagai kriteria bagi mereka untuk menetapkan kebijaksanaan bersama dan pemahaman rasional. Ideologi yang dominan juga cenderung menolak keyakinan, nilai, pandangan dunia (*world view*) yang bertentangan dengannya sehingga memarjinalisasi setiap pandangan dunia yang khas dari suatu masyarakat (lihat Izadi dan Biria, 2007: 142).

Pemerintahan Bush “Junior” juga telah melakukan cara-cara yang sama dengan para pendahulunya. Mengontrol dan memanipulasi media untuk menggerakkan dukungan terhadap perang melawan terorisme pada 2001. Jullian Baggini (2003: 107) mengemukakan bukti-bukti mengenai pola-pola yang sama antara “perang teluk I” dengan “propaganda perang melawan terorisme” dalam hal kampanye menggunakan media untuk menggerakkan dukungan terhadap invasi militer. Kampanye semacam itu, menurut Baggini, akan memiliki pengaruh besar. Opini publik domestik juga adalah penting dan untuk itu para politisi berusaha untuk membentuknya dan publik memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan ketika dibutuhkan, atau oposisi jika memang itu yang dibutuhkan.

Mencermati hubungan media dan perang, menurut Mercier (2005: 97) adalah melihat cara dimana media terlibat dalam konflik, baik sebagai target (perang terhadap media) atau sebagai alat bantu (perang berkat media). Militer telah lama mengintegrasikan ke dalam perencanaan operasionalnya prinsip-prinsip masyarakat informasi dan suatu dunia yang terbungkus dalam jaringan ketat media informasi.

Mengontrol cara bagaimana perang dipersepsikan telah mencapai level kepentingan strategis yang sama seperti kemampuan untuk mengganggu komunikasi musuh. Propaganda militer telah lama ada, namun belakangan ini penggunaan media dalam perang telah berkembang dalam pentingnya dan kecanggihan operasionalnya, karena itu harus ada upaya untuk mengidentifikasi apa yang telah berubah dan apa yang masih tetap sama dalam manajemen media pada saat perang, dengan pertimbangan semestinya bagi dimensi hubungan yang saat ini menyatukan perang dan media, personil militer, dan para jurnalis (Marcier, 2005: 98).

Pemerintahan Reagan juga telah menggunakan media sebagai sarana untuk mengabsahkan campur tangan pada tempat-tempat seperti Asia tenggara, Timur Tengah, Amerika Tengah, dan banyak tempat lainnya. Pada krisis nuklir Iran, ketika AS- dengan dukungan Israel-memaksakan kehendak untuk melakukan intervensi militer terhadap Iran. Ada sebuah kecenderungan untuk melakukan hal yang sama dengan kasus “perang teluk” ketika mereka menggunakan media untuk menggerakkan dukungan terhadap perang.

Iran telah memulai program nuklirnya pada pertengahan 1960-an

di bawah rezim otoritarian dan pro-Amerika, Shah Mohammad Reza Pahlevi, dengan dukungan AS kepada program tersebut. Pada 1967, AS menyuplai Iran dengan sebuah reaktor riset nuklir berkekuatan 5 mega watt untuk membangun Tehran Nuclear Research Center. Iran menandatangani traktat non-proliferasi senjata nuklir yang dikenal dengan Non-Proliferation Treaty (NPT), pada 1 Juli 1968. Tujuan traktat internasional adalah “untuk mencegah penyebaran senjata dan teknologi persenjataan nuklir; mendorong penggunaan damai energi nuklir; dan memperluas tujuan untuk mencapai pelucutan senjata yang tuntas (*complete disarmament*)” (lihat Izadi dan Biria, 2007: 145).

Traktat itu juga mengizinkan negara-negara non-senjata nuklir (*non-nuclear weapon states*) untuk mengembangkan energi nuklir demi maksud-maksud damai di bawah inspeksi Badan Energi Atom International (*International Atomic Energy Agency-IAEA*). Negara-negara anggota NPT dengan senjata nuklir (*nuclear weapon states*) seperti AS, Rusia, China, Inggris, dan Perancis, diperbolehkan untuk mempertahankan kepemilikan senjata-senjata mereka, tetapi sepakat untuk tidak menyebarkannya ke negara-negara lain dan berjanji untuk berproses kearah pelucutan senjata-senjata nuklir mereka (lihat Izadi dan Biria, 2007: 145).

Fokus program nuklir Iran meliputi pembangunan pembangkit nuklir Bushehr di pantai Barat Daya negeri itu. Pemerintahan Shah telah menawarkan kontrak kepada Kraftwerk Union (anak perusahaan Siemens) milik Jerman Barat untuk membangun dua reaktor nuklir dengan kapasitas 1.200 megawat pada lokasi tersebut. Meletusnya Revolusi 1979 di Iran, reaktor yang pertama telah selesai 90% dengan 60% dari peralatannya telah terinstalasi. Reaktor kedua hanya selesai 50%. Program ini terhenti setelah revolusi karena adanya instabilitas internal di Iran dan penolakan Jerman untuk menuntaskan proyek tersebut.

Di bawah tekanan AS, Kraftmerk Union menolak untuk membangun kembali proyek Bushehr ketika Iran memulai kembali program nuklirnya pasca-perang Irak-Iran. Jerman juga menolak mengirimkan komponen-komponen reaktor dan dokumentasi teknik yang telah Iran tuntaskan pembayarannya. Berbagai upaya Iran selanjutnya untuk mendapatkan bantuan teknologi bagi program nuklirnya dari perusahaan-perusahaan Barat lainnya di Argentina, Italia dan Ceko-slovakia gagal karena adanya tekanan AS.

Dalam sebuah laporan ke Kongres AS pada 2003, Sharon Squassoni, seorang spesialis dalam bidang keamanan nasional pada Staf Riset Kongres, meminta IAEA untuk memeriksa program nuklir Iran dan memberikan sanksi kepada Iran. Laporan-laporan IAEA selanjutnya mengindikasikan bahwa argumen untuk memberikan sanksi kepada Iran cukup masuk akal karena Iran telah memprogram sebuah reaktor nuklir untuk membuat senjata nuklir.

Iran tetap berargumen bahwa aktivitas pengayaan Uraniumnya bukan untuk senjata nuklir, melainkan untuk kebutuhan energi masa depan mereka. Iran tetap membantah dengan memberikan argumen-argumen ilmiah, keputusannya untuk melanjutkan program pengayaan uranium telah menghasilkan sebuah krisis berkepanjangan antara IAEA, Iran, Trio Eropa (Jerman, Perancis, dan Inggris), serta Amerika Serikat.

Amerika Serikat dengan dukungan Israel menuntut Iran agar menghentikan aktivitas pengayaan uraniumnya, dan keduanya mengancam akan melakukan invasi militer ke Iran jika memang Iran tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan program nuklirnya. Kedua Negara tersebut telah membuat sebuah keputusan untuk menyerang Iran, meski terdapat begitu banyak penolakan dari berbagai Negara di seluruh dunia. Rakyat di kedua Negara tersebut tetap menolak invasi militer sebagai solusi krisis nuklir Iran.

Penguasaan terhadap arus informasi, media-media dominan di AS melakukan distribusi informasi mengenai kebijakan pemerintah AS melalui media-media di seluruh dunia, termasuk Indonesia untuk menggalang dukungan terhadap perang. Akhirnya, isu-isu mengenai krisis nuklir Iran di media-media di Indonesia akan didominasi oleh pandangan-pandangan media Barat dominan.

Studi ini berupaya untuk menjawab pertanyaan, bagaimanakah wacana mengenai program nuklir Iran digambarkan dalam media di Indonesia, serta apakah tema-tema orientalis digunakan sebagai premis-premis dalam menggambarkan program nuklir Iran. Studi ini juga berupaya untuk menyingkap representasi ideologis dari kebijakan-kebijakan media terhadap program nuklir Iran, dengan memperhatikan dua elemen-elemen linguistik, yakni penamaan (*naming choices*) dan pilihan-pilihan leksikal (*lexical choices*) kemudian menemukan fungsi-fungsi ideologi serta bagaimana penggunaan ideologi tersebut untuk kepentingan-kepentingan militer.

## Berita sebagai ideologi

Ideologi menurut Van Dijk (2006: 115) adalah *“the fundamental beliefs of a group and its members”*. Menurut Van Dijk (2006: 116-117) ada beberapa asumsi untuk mendefinisikan ideologi. *Pertama*, ideologi adalah semacam *“ide”* atau sistem kepercayaan (*beliefsystem*). Ini berarti, bahwa ideologi, tidak mengandung praktik ideologis atau struktur sosial yang didasarkan pada dirinya. Hal ini juga menyiratkan bahwa teori ideologi membutuhkan komponen kognitif yang mampu dengan baik menjelaskan pengertian tentang *“keyakinan”* dan *“sistem keyakinan”*. *Kedua*, karena tidak ada bahasa pribadi, maka tidak ada ideologi yang bersifat pribadi. Sistem kepercayaan ini digunakan secara bersama (*socially shared*) oleh anggota kolektivitas aktor sosial. *Ketiga*, ideologi bukan hanya kepercayaan yang digunakan secara bersama (*socially shared beliefs*), seperti pengetahuan sosial budaya atau sikap-sikap sosial, tetapi lebih mendasar atau aksiomatik. Ideologi mengendalikan dan mengatur keyakinan sosial bersama lainnya. Dengan demikian, ideologi adalah keyakinan sosial mendasar yang agak umum dan bersifat abstrak. *Keempat*, sebagai dasar sosio-kognitif kelompok sosial, ideologi secara bertahap diperoleh dan (kadang) diubah melalui hidup atau masa hidup, dan maka harus relatif stabil.

Teori Ideologi bermula dari Marxisme. Menurut Marx, ideologi adalah sebuah *“kesadaran palsu”* (*false consciousness*). Sebagai teori, Marxisme yakin bahwa ide atau gagasan tidak pernah netral, ia senantiasa menyembunyikan kepentingan kelompok yang berkuasa, sedangkan kekuasaan adalah fungsi dari kekuatan ekonomi (Adian, 2011: 1). Sebagai sebuah praktik, teori ideologi kemudian dikembangkan oleh Louis Althusser, seorang Marxis generasi kedua. Bagi Marx, ideologi merupakan suatu konsep yang relatif langsung. Ideologi merupakan sarana yang digunakan untuk ide-ide kelas yang berkuasa sehingga bisa diterima oleh keseluruhan masyarakat sebagai alami dan wajar (Fiske, 2011: 228).

Marx memahami bahwa para anggota kelas subordinat, yakni kelas pekerja, digiring untuk memahami pengalaman sosial dan relasi sosial mereka dengan menggunakan serangkaian ide atau gagasan yang bukan miliknya sendiri, yang datang dari kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial serta politiknya, tidak hanya berbeda dari mereka tetapi juga secara aktif bertentangan dengan mereka (Fiske, 2011: 239).

Ideologi dalam konteks studi media, dapat didefinisikan sebagai proses umum produksi makna dan ide (Fiske, 2011: 228; Eriyanto, 2001: 92). Ideologi di sini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan produksi makna. Di sini, ideologi berperan melegitimasi dari penyalahgunaan kekuasaan oleh kelompok dominan. Salah satu bentuk yang paling efisien dari dominasi ideologis adalah ketika kelompok-kelompok yang didominasi menerima ideologi dominan ideologi suatu hal yang alamiah atau *commonsense*. Tujuan utamanya terletak pada kondisi sosial dari kekuasaan simbolik dan diskursif, seperti otoritas dan legitimasi mereka yang memproduksi wacana.

Berita-berita di media telah melaksanakan sebuah fungsi yang bersifat ideologis. Dalam pandangan Izadi dan Biria (2007: 142) setiap harinya, langsung atau tidak langsung, dengan pengungkapan dan pengecualian, dalam gambar-gambar dan kata-kata, dalam berita, media massa memproduksi ruang-ruang definisi dan korelasi, simbol, dan retorika, yang melalui hal ini ideologi menjadi nyata dan konkret. Izadi dan Biria mendefinisikan ideologi sebagai “cara-cara di mana pemaknaan disampaikan melalui bentuk-bentuk simbolik yang bertujuan untuk mengamankan dan mempertahankan relasi-relasi kuasa”. Sebagai konsekuensinya adalah, alih-alih menjadi agen yang netral, berita-berita di media justru menjalankan fungsi yang bersifat ideologis dan–bahkan–politis.

## **Orientalisme**

Teori orientalisme pertama kali digunakan oleh Edward W. Said, dalam bukunya “Orientalism” yang pertama kali dipublikasikan pada 1978. Menurut Dan Laughey (2007: 138) dengan konsepsinya mengenai orientalisme, Said berupaya untuk menunjukkan bagaimana representasi budaya non-Barat terutama telah dirancang dan disahkan oleh Barat. Secara historis, Barat telah memiliki kekuasaan untuk mengembangkan representasi mereka sendiri mengenai Timur (*orient*) seperti yang terlihat dari perspektif mereka, yang telah menjadi sumber pengetahuan yang lebih luas. Seiring waktu, representasi tentang “Timur” menjadi tidak terpisahkan dari kesadaran universal mengenai “*real Orient*”. “*Real Orient*” menjadi diskursif yang dibangun sebagai “*the other*” sesuai dengan pendapat yang diterima di Barat. Menurut Laughey, orientalisme adalah lebih dekat terkait dengan teori postkolonial dari

ekonomi politik.

Orientalisme sebagai sebuah ideologi, didefinisikan sebagai “konsepsi diskursif mengenai Timur” yang melibatkan oposisi biner bahwa Barat adalah pusat dalam pemikiran yang modern, tercerahkan, sementara Timur adalah “*the other*” yang misterius dan seringkali berbahaya (Izadi dan Biria, 2007: 144). Menurut Said (1978), orientalisme merupakan ideologi dominan Barat ketika berhubungan dengan Dunia Islam. Said sendiri dengan kritis meneliti cara orientalisme, sebagai sebuah diskursus, menggambarkan Timur secara “sosial, politis, militer, ideologis, ilmiah, dan imajinatif”.

Ciri utama Orientalisme adalah pembagian Timur-Barat yang menempatkan masyarakat Barat, serta kebudayaan, religi, dan bahasa Barat lebih unggul daripada Timur (Alatas, 2010). Orientalisme, dalam pandangan Said, menggunakan sebuah narasi realistik, yang mengasumsikan sebuah realitas budaya dan sosial yang berbeda mengenai Timur, yang diungkapkan melalui upaya-upaya para Orientalis dan dianggap sebagai “kebenaran”: sebuah realitas yang berbeda dari lawannya Barat.

Satu karakteristik penting dari diskursus orientalis adalah kebergantungannya kepada bahasa Biner (Said, 1978: 2). Menurut Said, orientalisme, sebagai sebuah cara berpikir, merupakan sebuah pandangan dunia Barat yang dikotomis berdasarkan atas “pembedaan ontologis dan epistemologis” diantara apa yang disebut sebagai Timur dan Barat. Menurut Izadi dan Biria (2007: 143) dalam menggunakan sebuah bahasa yang dikotomis, orientalisme memanfaatkan sebuah diskursus esensialis, yang menguniversalisasi sifat-sifat, dan karakter-karakter tertentu terhadap Timur dan dunia Islam, dan Orientalisme lahir untuk menjustifikasi imperialisme Barat.

Ide untuk membelah dunia ke dalam kategori-kategori dikotomis sebenarnya lahir dari pandangan strukturalis tentang bahasa, khususnya yang diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure, seorang Linguis Swedia yang dipandang sebagai salah satu Bapak Linguistik Modern. De Saussure berpendapat bahwa prinsip struktur universal dalam seluruh bahasa manusia adalah oposisi-oposisi biner. Bahasa, yang dilihat sebagai sebuah totalitas dan konstruksi sosial, dibentuk oleh makna-makna yang disematkan kepada objek-objek, dan oleh relasi-relasi objek tersebut dengan lawan-lawan mereka, misalnya: hitam lawan putih; pria



lawan wanita; dan sebagainya.

Menurut Izadi dan Biria (2007: 143) sebuah sistem dikotomi yang menguasai formasi bahasa, dan pada gilirannya membatasi sejumlah kemungkinan bagi makna lain. Narasi-narasi berita utama didasarkan atas tanda-tanda biner, yang mereduksi realitas menjadi sekadar “fakta-fakta” dikotomis yang terpisah. Salah satu fondasi sosiokultural suatu *ideology* adalah melalui diperlihatkan melalui pandangan mengenai bahasa biner dan kecenderungan untuk mendefinisikan dunia dalam terma-terma yang berlawanan (Lihat Izadi dan Biria, 2007: 144).

Edward Said kemudian mengembangkan teori Orientalisme dan menerapkannya lebih lanjut pada media dan imprealisme budaya kontemporer. Misalnya, ia berpendapat bahwa dua arus istilah yang lazim dalam wacana Barat tentang non- Budaya Barat - “terorisme” dan “fundamentalisme” - muncul pada 1980-an dari sistem kekuasaan Barat termasuk kantor berita. Cara artikulasi ini adalah wacana Amerikanisasi yang mewakili non-Budaya Barat yang seringkali tidak akurat, bahkan menyesatkan (Dan Laughey, 2007: 140).

Sejumlah penelitian telah berusaha untuk menerapkan teori orientalisme Said untuk melihat lebih jauh bagaimana media merepresentasikan “*the Other*”. “Islamofobia” telah menjadi fenomena yang banyak dibahas sejak serangan al-Qaeda terhadap New York, Washington, London, dan Madrid. Sebuah studi mengenai pelaporan berita Inggris tentang Islam dan Muslim oleh Elizabeth Poole mengidentifikasi penciptaan sebuah dikotomi antara Islam dan Barat, disajikan dalam pers bersama serangkaian oposisi-oposisi biner di mana Barat adalah istilah untuk hal-hal yang rasional, manusiawi, maju, dan unggul; sementara Islam untuk hal-hal yang menyimpang, yang tidak berkembang (*undeveloped*) dan inferior (Lihat Dan Laughey, 2007: 140).

Dalam “*Islamic Peril*”, Karim menggambarkan bagaimana media transnasional negara-negara Barat mempertahankan suatu narasi global mengenai Islam, yang merekonstruksi Muslim Timur sebagai musuh lama Barat. Karim menunjukkan pengulangan gambaran-gambaran orientalis tentang Islam dan Muslim dalam media Barat dan berpendapat bahwa gambaran mengenai Islam sebagai sebuah ancaman tersebut telah dikembangkan menjadi sebuah diskursus global yang dominan. Para pembuat kebijakan AS dan ahli strategis mereka berulang kali menekankan posisi penting geopolitik dan strategis Iran di Timur Tengah.



Dalam *“Covering Islam”*, Said menunjukkan peliputan media terhadap Iran pasca-revolusi sebagai sebuah kasus yang terkait dengan dominasi interpretasi orientalis mengenai Islam dan Muslim (Lihat Izadi dan Biria, 2007: 144).

Studi ini akan melakukan analisis terhadap berita mengenai nuklir Iran dan melihat tema-tema orientalisme yang mungkin mendasari bias dalam pemberitaan tersebut, tema-tema orientalisme dapat dirinci sebagai berikut: (dikembangkan dari Izadi dan Biria, 2007: Dan Laughey, 2007).

Tema-tema orientalisme tersebut dapat dirinci sebagai berikut: tema mengenai Timur yang tidak layak dipercaya mendasari keyakinan bahwa orang-orang Timur secara alamiah tidak jujur sehingga tidak bisa dipercaya; tema mengenai Islam sebagai ancaman mendasari keyakinan bahwa orang-orang Timur itu ancaman karena keterikatan mereka dengan sebuah ideologi Islam. Tema tentang inferioritas Timur mempersoalkan dasar kemanusiaan orang Timur dibandingkan dengan orang Barat; tema mengenai keterbelakangan Timur menciptakan menciptakan argument bahwa Timur yang “terbelakang” adalah lawan dari Barat yang “maju”; tema tentang irasionalitas Timur menekankan karakteristik mistik dan irasional dari orang Timur; tema tentang kepatuhan Timur mengetengahkan bahwa Timur secara alamiah berada dalam posisi yang harus patuh; tema tentang keterasingan Timur menekankan bahwa individu-individu Timur itu asing atau ganjil jika dibandingkan dengan standar normal Barat.

Melalui kerangka teoritis tersebut diatas, studi ini akan menganalisis pemberitaan surat kabar di Indonesia, tentang bagaimana media-media Barat menyuarakan kepentingan pemerintahan AS untuk menggalang dukungan dan persetujuan terhadap agresi militer di Iran.

## **Hegemoni**

Konsep hegemoni dipopulerkan ahli filsafat politik terkemuka Italia, Antonio Gramsci, yang berpendapat bahwa kekuatan dan dominasi tidak hanya melalui dimensi material dari sarana ekonomi dan relasi produksi, tetapi juga kekuatan (*force*) dan hegemoni (Eriyanto, 2001: 103). Bagi Gramsci, ideologi tidak hanya tumbuh dan bekerja dalam sebuah kelas buruh yang didominasi oleh kelas pemilik modal - sebagaimana pemikiran Marx - tapi juga dapat berlangsung disetiap

aspek kehidupan, mulai dari keluarga, lembaga agama, budaya politik, dan media massa melalui melalui mekanisme “hegemoni” (Adian, 2011: 41).

Titik awal gagasan hegemoni adalah bahwa sebuah kelompok menyelenggarakan kekuasaan terhadap kelompok subordinat melalui persuasi. Hegemoni, menurut Eriyanto (2001: 104), menekankan pada bentuk ekspresi, cara penerapan, mekanisme yang dijalankan untuk mempertahankan para korbannya, sehingga upaya itu berhasil mempengaruhi dan membentuk alam pikiran mereka. Hegemoni bekerja melalui konsensus ketimbang upaya penindasan satu kelompok terhadap lain. Salah satu kekuatan hegemoni adalah bagaimana ia menciptakan cara berpikir dan wacana tertentu yang dominan, yang dianggap benar, sementara wacana lain dianggap salah.

Hegemoni adalah bentuk kekuasaan yang “memberi dan menerima”. Hegemoni bekerja untuk mengizinkan suara yang berbeda dan politik oposisi, tetapi untuk menekan kekuatan yang berbeda dan oposisi dengan secara aktif mencari dukungan dari semua bagian dari masyarakat (Dan Laughey, 2007: 65). Media, menurut Laughey, didalilkan telah menyandikan (*encode*) produknya untuk kepentingan kekuatan hegemonik yang dominan, seperti pemerintah. Gramsci dan Stuart Hall berpendapat bahwa media – dalam kecenderungan mereka untuk melayani fungsi hegemonis demi kebaikan mereka yang berkuasa – secara efektif memproduksi persetujuan.

Hegemoni bekerja melalui suatu proses atau cara kerja tampak wajar. Dalam produksi berita, prose situ terjadi melalui cara yang halus, sehingga apa yang terjadi dan diberitakan oleh media tampak sebagai suatu kebenaran, memang begitulah adanya, logis, dan bernalar (*common sense*) dan semua orang menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan. Dalam bahasa Stuart Hall, proses hegemoni itu sendiri bahkan menjadi ritual yang sering kali tidak disadari, bahkan, oleh wartawan sendiri (Eriyanto, 2001: 105). Gramsci meyakini bahwa kelompok-kelompok yang berkuasa dalam masyarakat-masyarakat demokratis menjadi dominan melalui sebuah proses-ganda, yakni intimidasi dan persuasi, dimana media merupakan salah satu institusi kunci dalam upaya persuasi di dalam masyarakat modern.

Bagi Gramsci, sebuah kelompok menjadi hegemonik bilamana kelompok tersebut mengartikulasikan kepentingan sektoralnya sebagai

kepentingan umum, lalu merealisasikannya dalam kepemimpinan moral dan politik (Lihat Adian, 2011: 42). Dalam konteks ini, kita melihat bahwa hegemoni digunakan oleh Pemerintahan AS dan sekutunya untuk mengendalikan arus informasi mengenai kasus nuklir Iran untuk kepentingan-kepentingan mereka, yakni persetujuan terhadap agresi militer sebagai solusi. Hal ini jelas menandakan sebuah proses yang hegemonik, ketika kepentingan-kepentingan sektoral AS dan sekutunya, kemudian dijadikan sebagai wacana publik dunia, bahwa persetujuan terhadap perang melawan Iran adalah merupakan kepentingan publik dunia. Asumsi hegemoni Gramsci menegaskan bahwa kekuasaan melibatkan kelompok sosial tertentu yang mengamalkan persetujuan (aktif atau pasif) dari strata sosial lainnya ketimbang memaksakan sebuah keputusan dan untuk memproduksi persetujuan (*manufacture consent*), hegemoni lebih cenderung mengandalkan mekanisme halus yang bersifat ideologis, ketimbang melalui cara-cara koersif.

### **Pendekatan Analisis Wacana**

Studi ini menggunakan pendekatan analisis wacana krisis (*critical discourse analysis*) dengan metode analisis wacana Van Dijk. Menurut Van Dijk (2001: 352) Analisis wacana kritis (CDA) adalah jenis penelitian wacana analitik yang terutama mengkaji tentang cara bagaimana penyalahgunaan kekuasaan sosial, dominasi, dan ketidaksetaraan yang berlaku, direproduksi, dan dilawan dengan teks dan pembicaraan dalam konteks sosial dan politik. Dengan penelitian tersebut, analisis wacana kritis mengambil posisi eksplisit, dan dengan demikian ingin memahami, mengekspos, dan akhirnya melawan ketimpangan sosial.

Fairclough and Wodak (dalam Van Dijk 2001: 353) merangkum prinsip-prinsip utama penelitian analisis wacana kritis: CDA berkaitan dengan masalah-masalah sosial; Hubungan kekuasaan bersifat diskursif; wacana membentuk masyarakat dan budaya; wacana bekerja secara ideologis; wacana bersifat historis; hubungan antara teks dan masyarakat itu termediasi; analisis wacana bersifat interpretif dan eksplanatori; wacana adalah sebuah bentuk aksi sosial.

Model yang dipakai oleh Van Dijk ini sering disebut sebagai “kognisi sosial”. Menurut Van Dijk penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis atas teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktik produksi yang harus juga diamati. Proses produksi itu,

melibatkan proses yang disebut sebagai kognisi sosial. Elemen-elemen wacana dari Van Dijk, yang meliputi struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro, akan digunakan untuk meneliti teks pemberitaan surat kabar mengenai krisis nuklir Iran.

Studi ini akan memfokuskan terhadap tajuk rencana harian Kompas yang memusatkan perhatian kepada program nuklir Iran dalam rentang waktu antara 2005–2012. Pemilihan tajuk rencana sebagai unit analisis didasarkan pada fungsi tajuk rencana sebagai editorial yang mengekspresikan atau menunjukkan opini, perspektif, posisi, kepentingan, atau kepemilikan yang dapat merepresentasikan ideologi-ideologi tertentu. Editorial biasanya dirancang pada tiga kategori skematik: mendefinisikan situasi dan memberikan ringkasan dari suatu peristiwa; menyajikan sebuah evaluasi atas situasi tersebut—khususnya tindakan-tindakan dan aktor-aktornya; serta mengembangkan kesimpulan pragmatik dalam bentuk harapan, rekomendasi, saran, dan peringatan (Izadi dan Biria, 2007: 148).

Dalam melakukan kajian terhadap editorial yang berkaitan dengan tema, studi ini akan memperhatikan dua elemen linguistic, yakni pilihan-pilihan penamaan (*naming choices*) yang digunakan untuk menyebut actor-aktor peristiwa sebagai upaya untuk menetapkan identitas kelompok dan pilihan-pilihan leksikal (*lexical choices*), yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa, aktor, dan kebijakan yang berkaitan dengan sengketa nuklir Iran.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kedua elemen linguistik diatas peneliti akan melihat bagaimana pilihan-pilihan penamaan dan pilihan-pilihan leksikal tadi berkaitan dan merepresentasikan tema-tema ideologi orientalis sebagaimana telah dijelaskan dalam kerangka teori.

### **Iran sebagai Ancaman Barat**

Kompas mendefinisikan Iran sebagai ancaman bagi Barat. Dalam sebuah tajuk rencana berjudul “Iran Ancam Gunakan senjata Minyak” (06 Juni 2006), dituliskan bahwa:

Pemimpin Spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei mengancam akan menggunakan minyak sebagai senjata jika Negara itu sampai diserang Barat. Ancaman itu serius, lebih-lebih dilihat dari posisi Khamenei sebagai pemimpin spiritual yang berwenang memberikan kata akhir atas persoalan kenegaraan yang rumit seperti krisis nuklir sekarang ini. Program nuklir Iran telah

menempatkan Negara itu dalam posisi sulit. Amerika Serikat dan Uni Eropa mengancam menjatuhkan sanksi bahkan serangan militer jika tidak menghentikan program nuklirnya, yang dituduh potensial menciptakan senjata nuklir.

Pilihan-pilihan penamaan (*naming choices*) yang digunakan untuk menyebut aktor-aktor peristiwa dalam editorial tersebut cenderung netral: misalkan, Kompas menyebut Ali Khamenei sebagai pemimpin Spiritual Iran (bandingkan dengan berita lain, yang kadang menyebut Iran sebagai “negeri para Mullah”, sebuah penamaan yang cenderung syarat nilai ideologis). Pilihan-pilihan leksikal yang digunakan cenderung tidak netral dan membesarkan fakta bahwa Iran adalah ancaman bagi Barat. Program nuklir Iran juga digambarkan sebagai ancaman dan berpotensi untuk menciptakan senjata nuklir.

Dalam tajuk rencana berjudul “Teheran Kendurkan Ancaman” dituliskan bahwa Amerika Serikat menyambut gembira berita bahwa Iran mengendurkan ancaman untuk memulai kembali aktivitas nuklirnya.

Amerika Serikat menyambut gembira berita bahwa Iran mengendurkan ancaman untuk memulai kembali aktivitas nuklirnya. Tanggapan dilansir Amerika Serikat segera setelah Iran memutuskan akan mengundurkan jadwal pembukaan kembali pusat pengonversian uranium (*uranium conversion*) di Isfahan hingga awal pekan depan Teheran sebelumnya menyatakan akan mulai mengaktifkan lagi pusat pengonversian uraniumnya, yang sebelumnya sempat dibekukan. Keputusan itu memicu kritikan keras dari Uni Eropa dan AS. Setelah dihujani kritikan dan desakan agar Iran tak memulainya lagi kegiatan produksi bahan bakar nuklir, Negara tersebut akhirnya menyatakan baru akan melakukan hal itu pada awal pekan depan.

Dalam editorial tersebut, disebut bahwa Iran telah mengendurkan ancamannya terhadap Barat. Pilihan-pilihan penamaan (*naming choices*) cenderung netral. Pilihan-pilihan leksikal yang digunakan cenderung tidak netral dan membesarkan fakta bahwa Iran adalah ancaman bagi Barat.

Beberapa kali, dalam editorialsnya, Kompas juga memberikan penamaan (*naming choices*) yang tidak netral. Dalam tajuk rencana berjudul “Serangan ke Iran seolah tinggal Hitungan Hari” (25 Januari 2005) dituliskan:

Dalam pidato pelantikannya, Presiden Bush antara lain berjanji akan menggulingkan seluruh kekuasaan Tirani. Ia juga berjanji akan menyebarkan kebebasan dan demokrasi hingga pelosok

tergelap dunia. Bush sendiri tidak memerinci kekuasaan tirani yang dimaksudkannya, tetapi wakil Presiden AS Dick Cheney kemudian menyebut Iran berada dalam urutan teratas sebagai Negara yang memiliki potensi berbahaya bagi keamanan dunia. Meski tidak menyebut secara eksplisit, dengan mudah orang mengasosiasikan pernyataan Bush dengan Iran. AS tidak mampu lagi menyembunyikan sikap antipatinya kepada Iran. Apalagi, pekan lalu, Presiden Bush menyatakan tidak mengesampingkan kemungkinan menyerang Iran atas tuduhan memiliki program senjata nuklir.

Menggunakan gaya bahasa tak langsung, dengan menggunakan pidato Presiden Bush, dapat terlihat bahwa *naming choices* yang digunakan untuk menyebut aktor-aktor peristiwa dalam editorial tersebut cenderung tidak netral. Pilihan penamaan yang digunakan adalah “Iran adalah Kekuasaan tirani”; “Iran adalah bagian dari pelosok tergelap dunia”; “Iran berada dalam urutan teratas sebagai Negara yang memiliki potensi berbahaya bagi keamanan dunia”. Pilihan-pilihan penamaan mengenai Iran ini sangat berkaitan berkaitan dengan sebuah tema “Iran adalah ancaman”.

Pilihan penamaan yang cenderung tidak netral juga bisa dilihat dalam tajuk rencana berjudul “Presiden Bush Lanjutkan gaya Burung Elang” (22 Januari 2005). Dituliskan: bahwa “Bush menekankan akan mendorong kebebasan dan kemerdekaan melawan “penguasa-penguasa dari rezim-rezim yang tidak tahu aturan”, *rulers of outlaw regimes.*” Dalam editorial tersebut, juga dituliskan:

Bush tidak memerinci rezim-rezim yang berkiprah di luar aturan itu. Wakil presiden AS Dick Cheney menyinggung nama Iran sebagai salah satu yang berada di urutan paling atas karena di mata AS negeri itu memiliki potensi berbahaya atas program persenjataan nuklir. Prasangka negatif terhadap Iran sudah terungkap sejak awal tahun 2002 ketika Presiden Bush menuduh Iran bersama Irak dan Korea Utara berkolaborasi dalam apa yang disebutnya poros kejahatan. Ketiga Negara Negara diyakini mengembangkan program senjata pemusnah massal, seperti nuklir, dan bermain mata dengan organisasi teroris.

Pilihan penamaan yang di gunakan adalah “rezim yang tidak tahu aturan”; “Iran memiliki potensi berbahaya”; “poros kejahatan”; “senjata pemusnah missal”; “teroris”. Fakta-fakta terhadap pilihan-pilihan penamaan (*naming choices*) dan pilihan-pilihan leksikal tersebut dapat ditarik kesimpulan, dalam editorialnya, Kompas telah memberi

label bahwa “Iran adalah ancaman bagi Barat”. Dari sudut pandang orientalis, Tema mengenai Islam sebagai ancaman mendasari keyakinan bahwa orang-orang Timur itu ancaman. Tema tentang inferioritas Timur mempersoalkan dasar kemanusiaan orang Timur dibandingkan dengan orang Barat.

### **Kepatuhan terhadap Barat**

Tema-tema lain yang menggambarkan Iran, menunjukkan adanya representasi mengenai Timur yang harus patuh kepada Barat, asumsi ini didasarkan pada beberapa pilihan-pilihan penamaan dan pilihan leksikal yang digunakan. Dalam tajuk rencana berjudul “Kekuatan Rudal Iran meningkat” (22 Mei 2009), dituliskan:

Uji coba peluru kendali jarak jauh pekan ini mempertegas kemampuan Iran dalam pengembangan program persenjataan canggih.

Peluncuran itu sekaligus mempertontonkan kemajuan Iran dalam meningkatkan kemampuan rudalnya. Selama ini Iran sudah sukses dengan uji coba rudal jarak pendek dan menengah. Jangkauan jelajah rudal yang diluncurkan hari Rabu, 20 Mei, diperkirakan 2.000 sampai 2.500 kilometer. Dengan demikian, Israel dan semua basis kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah dan Eropa Timur berada dalam jangkauan serangan rudal Iran.

Peluncuran rudal jarak jauh pekan ini juga memperlihatkan Iran tidak peduli terhadap kritikan dunia Internasional, terutama dunia Barat. Sikap tidak peduli itu sering diartikan sebagai ekspresi sikap menantang. Tidak sedikit pula yang mengaitkan sikap semacam itu dengan sosok Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, yang di mata Barat dianggap berhaluan keras.

Pilihan penamaan (*naming choices*) terhadap Iran, dapat ditemukan adanya sebuah penamaan yang mengarah kepada Preseiden Iran dengan sebutan (*naming*) “berhaluan keras”. Pilihan leksikal yang digunakan, terlihat bahwa Iran tidak peduli terhadap kritikan, terutama, kepada dunia Barat. Sikap tidak peduli terhadap kritik, sering diistilahkan dengan tidak patuh.

Tema-tema mengenai keharusan Iran patuh kepada barat, juga muncul dalam banyak editorial yang berkaitan dengan kasus nuklir Iran. Dalam tajuk rencana berjudul “Iran tetap menantang Barat” (04 Agustus 2005), dituliskan:

Iran lagi-lagi memperlihatkan sikap kepercayaan diri tinggi dengan menantang, dan tidak mau tunduk terhadap tekanan Barat



atas program nuklirnya. Seolah tidak memedulikan tekanan dan ancaman Barat, Pemerintah Iran menegaskan akan menghidupkan kembali kegiatan nuklirnya pekan ini juga. Penegasan itu membuat Uni Eropa dan Amerika Serikat terperangah dan terkesan panik. Bahkan, Perancis memperingatkan, langkah Iran itu dapat memicu krisis Internasional berskala besar.

Pilihan penamaan dalam editorial diatas cenderung netral, namun dalam pilihan leksikal dapat terlihat adanya sebuah tema mengenai keharusan untuk tunduk dan patuh kepada Barat. Sebagaimana juga terlihat dalam tajuk rencana berjudul “Iran menantang sanksi PBB” (26 Desember 2012) bahwa Iran tidak mau patuh atas sikap PBB yang memberikan sanksi kepada Iran, sebagaimana dituliskan:

Mungkin atas perlakuan yang tidak adil itu, Iran tidak hanya marah, tetapi juga menantang sanksi yang disepakati seluruh 15 anggota dewan keamanan PBB hari Sabtu 23 Desember itu. Iran menegaskan akan meneruskan program pengayaan uranium sebagai bahan dasar reactor nuklir untuk tujuan damai. Bahkan Presiden Mahmoud Ahmadinejad mengingatkan, sanksi ekonomi itu lebih merugikan Barat ketimbang Iran.

Dalam tajuk rencana berjudul “Isu Nuklir Iran tambah sensitif” (20 September 2012) juga ditemukan paragraph yang berkaitan:

Sensitivitas isu nuklir Iran bertambah setelah Negara itu menyatakan mampu menyerang semua sasaran Amerika Serikat di Timur Tengah. Pernyataan yang disampaikan awal pekan ini oleh pasukan elite Iran, Garda Revolusi, hanya menambah ketegangan. Iran ingin menantang AS, yang bersama Uni Eropa terus menggalang dukungan di PBB untuk menjatuhkan sanksi ekonomi lebih keras kepada Iran. Sejauh ini sanksi AS, Uni Eropa, dan PBB sama sekali tidak membuat Iran gentar. Sebaliknya, Iran terus saja mengembangkan program nuklirnya. Pemerintah Iran menjelaskan, program nuklirnya bertujuan damai untuk tenaga listrik. Sebaliknya Barat mencurigai Iran ingin mengembangkan program senjata nuklir.

Temuan-temuan mengenai pilihan-pilihan penamaan dan pilihan leksikal, dapat disimpulkan, dalam editorialnya, Kompas telah memberi label bahwa “Iran harus tunduk kepada Barat”. Dari sudut pandang orientalis, Tema tentang kepatuhan Timur mengetengahkan bahwa Timur secara alamiah berada dalam posisi yang harus patuh.



## **Karakter Program Nuklir Iran**

Program nuklir Iran juga didefinisikan sebagai ancaman dan berpotensi untuk menciptakan senjata nuklir. Pemerintah Iran dipandang memiliki ambisi senjata nuklir. Dalam sebuah tajuk rencana berjudul "Iran Ancam Gunakan senjata Minyak" (06 Juni 2006), dituliskan bahwa:

Program nuklir Iran telah menempatkan Negara itu dalam posisi sulit. Amerika Serikat dan Uni Eropa mengancam menjerat sanksi bahkan serangan militer jika tidak menghentikan program nuklirnya, yang dituduh potensial menciptakan senjata nuklir.

Penamaan leksikal mengenai nuklir Iran cenderung tidak netral, kata-kata yang digunakan adalah "senjata nuklir", senjata pemusnah massal". Sudut pandang yang digunakan adalah bahwa, Iran, meski mengklaim program nuklirnya untuk cara-cara damai, namun berpotensi untuk meneruskannya menjadi senjata pemusnah massal. Persoalannya, bukanlah kemungkinan tentang bom nuklir Iran saat ini, namun hal tersebut akan dimungkinkan di masa depan dalam waktu yg tidak lama lagi. Dalam tajuk rencana berjudul "Iran Tetap Menantang Barat" (04 Agustus 2005), dituliskan:

Sebaliknya Uni Eropa dan Amerika Serikat berpandangan, setelah menguasai teknologi nuklir untuk *energy* listrik, Iran tinggal selangkah lagi akan mengembangkan program senjata nuklir. Atas asumsi itu, Uni Eropa berusaha membujuk Iran segera menghentikan program nuklirnya. Sebagai kompensasinya, Iran ditawarkan bantuan ekonomi dan berbagai kemudahan dalam bidang perdagangan.

Fokus dari makna mengenai karakter program nuklir Iran ini terpusat pada tanggung jawab Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk melawan penyebaran senjata nuklir Iran. Semua itu justru mengabaikan atau mengingkari hak Iran berkaitan dengan seluruh teknologi nuklir yang diaplikasikan demi maksud-maksud damai. Sebagaimana dimiliki oleh Israel dan beberapa Negara-negara yang tercatat sebagai negara-negara non-senjata nuklir (*non-nuclear weapon states*).

## **Bias Orientalisme dalam Krisis Nuklir Iran**

Pemberitaan mengenai krisis nuklir Iran di Indonesia masih diliputi oleh bias orientalisme. Orientalisme dalam kasus nuklir Iran, sebagaimana dapat dilihat dari tajuk rencana Harian Kompas, masih terpusat di sekitar tema bahwa Iran adalah ancaman bagi – khususnya –

Barat. Studi ini juga menunjukkan bahwa, diskursus mengenai program nuklir Iran, masih diliputi oleh bias orientalisme. Salah satu tema orientalisme adalah mengenai ketidakpercayaan Barat terhadap Timur. Tema mengenai Timur yang tidak layak dipercaya mendasari keyakinan bahwa orang-orang Timur secara alamiah tidak jujur sehingga tidak bisa dipercaya. Tema mengenai Timur yang tidak layak dipercaya, mendasari pemberitaan mengenai program nuklir Iran, bahwa program nuklir Iran, pada akhirnya akan mengarah kepada kepemilikan senjata pemusnah massal.

Bias orientalisme, salah satunya disebabkan oleh hegemoni Barat terhadap arus informasi ke Negara-negara dunia ketiga. AS telah menguasai arus informasi, sehingga berita-berita mengenai krisis nuklir Iran mengikuti konstruksi cara pandang Barat. Media transnasional negara-negara Barat mempertahankan suatu narasi global mengenai Timur, yang merekonstruksi Timur sebagai musuh lama Barat. Dengan penguasaan terhadap arus informasi, media-media Barat telah melakukan penggambaran orientalis mengenai Timur, dan media Barat telah mengembangkan sebuah diskursus global yang dominan mengenai Timur sebagai ancaman. Sebuah wacana, yang kemudian, secara begitu saja diserap oleh media-media di Negara-negara non-Barat.

Barat menjadi sedemikian hegemonik karena telah mengartikulasikan kepentingan sektoralnya sebagai kepentingan publik dunia, lalu merealisasikannya dalam kepemimpinan moral dan politik. Hegemoni digunakan oleh Pemerintahan AS dan sekutunya untuk kepentingan-kepentingan militer. Bagaimana memperoleh dukungan dan persetujuan terhadap kepentingan mereka untuk menghentikan program nuklir Iran. Dengan demikian, Amerika Serikat telah menggunakan ideologi Orientalisme untuk kepentingan perang.

## **Simpulan**

Studi ini menemukan bahwa, pemberitaan media di Indonesia masih mengikuti cara pandang Barat. Pemberitaan mengenai krisis nuklir Iran dalam media di Indonesia masih diliputi oleh bias orientalisme, khususnya di seputar tema bahwa Iran adalah ancaman bagi Barat dan publik Dunia. Studi ini juga menemukan bahwa ketidakpercayaan Barat terhadap Timur, telah mempengaruhi pemberitaan mengenai krisis nuklir Iran.

Barat telah memperlalat media sebagai instrumen perang. Perang dalam konteks modern tidak lagi hanya mengandalkan senjata, namun juga telah menempatkan media sebagai suatu instrumen penting sebagai "senjata". Apa yang dilakukan oleh Barat terhadap Iran, menunjukkan bahwa media-media utama di AS cenderung menjadi kendaraan yang jinak bagi strategi pemerintah untuk memanipulasi masyarakat, sehingga membahayakan demokrasi.

Rekomendasi dari studi ini adalah bahwa media telah menjadi bagian dari perang. Telah menjadi sebuah tuntutan bahwa militer harus sepenuhnya menguasai manajemen media. Mulai dari pengelolaan informasi hingga bagaimana berkomunikasi dengan jurnalis, semuanya dilakukan oleh orang-orang yang secara profesional memiliki keahlian jurnalistik. Pihak militer, dalam hal ini TNI, harus mulai melakukan investasi untuk bagaimana melatih para perwira menguasai proses manajemen berita dan bagaimana berhubungan baik dengan media (*media relations*). Pihak militer juga harus mulai mengintegrasikan ke dalam perencanaan operasionalnya prinsip-prinsip masyarakat informasi dan suatu dunia yang terbungkus dalam jaringan ketat media informasi. Hal ini mendesak dilakukan, agar pihak militer dapat memiliki pengetahuan yang memadai untuk bagaimana melakukan penguasaan terhadap arus informasi dan menguasai opini publik. Pihak lawan menggunakan media sebagai instrumen perang, maka senjata yang paling ampuh untuk melawannya adalah dengan menggunakan media.

### **Daftar Pustaka**

- Adian, Donny Gahril, 2011, *Setelah Marxisme; Sejumlah Teori Ideologi Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Koekoesan.
- Alatas, Syed Farid, 2010, *Diskursus Alternatif dalam Ilmu Sosial Asia; Tanggapan terhadap Orientalisme*, Bandung: Mizan Publika.
- Baggini, Jullian, 2003, *Making Sense; Filsafat di Balik Headline Berita*, Jakarta: Penerbit Teraju.
- Dijk. Teun Van, 2001, *Critical Discourse Analysis*, Dalam Deborah Schiffrin, Deborah Tannen, dan Heidi E. Hamilton (ed), *The Handbook of Discourse Analysis*, Blackwel Publisher.

- , June 2006, *Ideology and discourse analysis*, Journal of Political Ideologies, Routledge.
- Eriyanto, 2001, *Analisis Wacana; Pengantar Analisis teks Media*, Yogyakarta: LkiS.
- Fiske, John, 2011, *Cultural and Communication Studies; Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Huntington, Samuel, 1996, *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Izadi, Foad dan Hakimeh Saghaye-Biria, 2007, *A Discourse Analysis of Elite American Newspaper Editorial. The Case of Iran's Nuclear Program*, Journal of Communication Inquiry, Volume 31 Number 2.
- Kellner, Douglas, 1995, *Media Culture; Cultural studies, identity and politics between the modern and the postmodern*, Routledge.
- Laughey, Dan, 2007, *Key Themes in Media Theory*, New York: McGraw Hill Open University Press.
- Mercier Arnaud, 2005, *Perang dan Media: Kepatuhan dan Ledakan*, International Review of Red Cross, Volume 87 Number 860 December 2005.
- Muazaffar, Chandra, 2003, *Muslim, Dialog dan Teror*, Jakarta: Penerbit Profetik.
- Said, Edward W, 1978, *Orientalism*, New York: Vintage Books.

# **RERESENTASI PERAN INDONESIA DALAM PEMBERITAAN KASUS ASYLUM SEEKERS PADA SURAT KABAR 'THE AUSTRALIAN' DAN 'THE WEST AUSTRALIAN' PERIODE 2010 - 2012**

**Noveina Silviyani Dugis dan Finsensius Yuli Purnama**

## **Pendahuluan**

Pasang surut hubungan bilateral Indonesia-Australia terkait dengan berbagai faktor, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, pembangunan, dan kepentingan lainnya. Hal tersebut memungkinkan kedua negara tersebut sering bersinggungan satu sama lain. Secara geografis, Indonesia merupakan salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Australia (dengan Samudra Hindia sebagai pemisahannya). Selain itu, tercatat beberapa kejadian yang melibatkan kedua negara dan sempat menimbulkan hubungan yang fluktuatif.

Di masa lalu, dukungan Australia atas Indonesia muncul dalam kasus pengakuan wilayah Timor Timur sebagai wilayah Indonesia. Australia juga berperan besar dalam membantu Indonesia keluar dari krisis ekonomi pada tahun 1997 dalam bentuk-bentuk kerja sama ekonomi. Terdapat beberapa kejadian yang membuat hubungan antara Indonesia-Australia menjadi kurang harmonis. Contoh Kasus '*Balibo Five*' di Timor Timur yang cukup membekas bagi warga Australia dan tragedi Bom Bali tahun 2012 yang menelan banyak korban jiwa asal Australia.

Berkaitan dengan hal tersebut, mengutip ceramah Imron Cotan, Duta Besar LB & BP RI untuk Australia dan Republik Vanuata (periode 2003-2005), yang disampaikan di Universitas Negeri Jakarta, Universitas

Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan Universitas Andalas, pada Desember 2004, (didownload di <http://www.kbric Canberra.org.au/speeches/2004/041206civitas.html>, pada 7 Februari 2012), terdapat tiga hal yang menimbulkan perhatian besar dari berbagai kalangan masyarakat, terutama media. Pertama, Indonesia dipandang sebagai negara besar yang letaknya terdekat dengan negara Australia sehingga apa yang terjadi pada Indonesia akan diikuti dan berdampak (baik positif maupun negatif). Kedua, Indonesia dipandang sebagai ancaman terbesar bagi 31% rakyat Australia. Hal itu terungkap dari data survei “*The Australian Strategic Institute*” (2001) yang dipublikasikan ulang pada tahun 2004 menjelang pemilu Australia (9 Oktober 2004). Ketiga, beban psikologis media Australia atas peristiwa tewasnya lima wartawan di Balibo, Timor-Timur (1975) yang menurut sebagian rakyat Amerika dilakukan oleh Kopassus (dikenal sebagai peristiwa *Balibo Five*).

Salah satu isu terhangat belakangan ini yang dianggap sebagai tantangan bagi hubungan bilateral Indonesia-Australia adalah kasus penyelundupan manusia (*people smuggling*) atau dalam makalah ini disebut *asylum seekers*. Senator Chris Evans, Menteri Imigrasi dan Kewarganegaraan Australia dalam kunjungannya ke Indonesia, menemui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Matalatta (3 Maret 2011) dengan salah satu agendanya adalah membahas kasus penyeludupan manusia tersebut sebagai isu yang harus diselesaikan terkait hubungan bilateral kedua negara. Penyelundupan pencari suaka (*asylum seekers*) yang dalam banyak kasus melibatkan Indonesia telah menimbulkan ketegangan hubungan bilateral, dan perspektif yang kurang baik dari rakyat Australia terhadap rakyat atau Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hal ini dinilai perlu diperhatikan secara serius dari berbagai pihak.

Dalam hal peristilahan, *asylum seekers* mempunyai makna yang berbeda dengan dua istilah lain yang digunakan untuk merepresentasikan persoalan yang sama dan seringkali dipertukarkan penggunaannya, yaitu *boat people* dan *people smuggling* atau *smuggler people*. Bagi Negara Indonesia, mungkin tidak terlalu penting, bahkan tidak populer di telinga warga Indonesia pada umumnya. Bagi Negara Australia, gabungan kedua kata tersebut sempat atau bahkan telah menjadi ‘*momok*’ selama kurun waktu yang cukup lama. Pengertian *asylum* dalam *Oxford Learner’s Pocket Dictionary* disebutkan: “*Asylum/ n*

[U] (also fml *po,litical a'sylum*) protection that a government gives to people who have left their own countries, usu because they were in danger or political reasons. A'sylum seeker/ n person who asks for asylum: the rights of ~ seekers" (Oxford Learner's Pocket Dictionary 4<sup>th</sup> Edition, 2008: 22).

Dengan demikian, *asylum seekers* berarti sekelompok orang yang mencari suaka atau perlindungan hukum di negara lain, karena kondisi atau keadaannya di negara asalnya terancam. Media Australia menggunakan beberapa istilah dalam menyebut *asylum seekers* ini, seperti (1) *Boat people*, karena mereka menggunakan perahu (*boat*) untuk menempuh perjalanannya ke Negara tujuan; (2) *People smuggling* atau *smuggler people*. Dalam pengertian kamus disebutkan bahwa "*Smuggle /v [T] take goods, people, etc illegally or secretly into or out of a place or country ~ drugs into the country*" (Oxford Learner's Pocket Dictionary 4<sup>th</sup> Edition, 2008: 419). Dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan istilah penyelundup atau penyelundupan. Kata ini digunakan media Australia karena kasus *asylum seekers* dinilai sebagai kasus penyelundupan manusia yang illegal atau tidak benar; (3) *Refugees, people forced to leave their country, esp because of political or religious beliefs* (Oxford Learner's Pocket Dictionary 4<sup>th</sup> Edition, 2008: 370). Dalam bahasa Indonesia, pengertian *refugees* bisa diartikan sebagai pengungsi atau orang-orang yang pergi ke tempat atau Negara lain agar hidupnya menjadi lebih baik.

Berdasarkan daftar istilah yang digunakan media Australia, hal ini menjadi menarik ketika menelusuri representasi yang ingin ditampilkan oleh media Australia tersebut terkait dengan peran Indonesia dalam kasus *asylum seekers*. Melihat lebih jauh adalah mengenai pentingnya penanganan kasus ini bagi perkembangan hubungan bilateral Indonesia-Australia.

Diperlukan sebuah penelitian yang menunjukkan bagaimana pandangan publik Australia atas keterlibatan Indonesia dalam kasus *asylum seekers* melalui representasi berita pada media massa (surat kabar) di Australia. Mengutip berita hukum *online.com* 5 Maret 2009 (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21365/penyelundupan-orang-dan-ekstradisi-kerikil-dalam-hubungan-indonesia--australia>), kasus *asylum seekers* dapat menjadi kerikil hubungan bilateral kedua negara (Indonesia-Australia) yang jika tidak ditangani dengan baik dapat mengganggu hubungan bilateral kedua negara tersebut.

Meninjau dari sisi media, dapat dilakukan penelitian tentang bagaimana posisi atau peran yang dimainkan Indonesia sebagaimana digambarkan oleh (media) Australia untuk kemudian menjadi konsumsi publik warga Australia. Peran media Australia dalam hal ini menjadi sangat penting terkait pencitraan Indonesia dimata Australia, mengingat kekuatan dan dampak pemberitaan media dalam menjalankan fungsinya sebagai media massa. Kajiannya kemudian tidak hanya pada level representasi berita media saja, tetapi juga sampai pada level persepsi khalayak atau publik Australia terhadap Indonesia.

Melalui makalah ini, kajian mengenai representasi yang diciptakan media Australia menjadi menarik dan penting untuk diteliti dalam kaitannya dengan pencitraan Indonesia dimata warga Australia (persepsi khalayak). Pemberitaan kasus *asylum seekers* pada surat kabar (nasional) *The Australian* edisi 11-22 Agustus 2010 kemudian dipilih sebagai bahan atau data utama dalam makalah ini. Berdasarkan data dari *Australian Human Rights Commission* (didownload di [http://www.hreoc.gov.au/racial\\_discrimination/face\\_facts\\_05/refugee.html](http://www.hreoc.gov.au/racial_discrimination/face_facts_05/refugee.html), pada 19 Februari 2012), kasus *boat people* di Australia ini sudah terjadi sejak tahun 1989 dan terus berkembang bahkan sampai saat ini, dengan atau tanpa keterlibatan Indonesia didalamnya.

Tahun 2010 lalu, tepat pada saat pergantian parlemen dan perdana menteri Australia, kasus *asylum seekers* ini kembali berkembang dan cukup banyak melibatkan nama Indonesia didalam pemberitaannya. Berita-berita tentang *asylum seekers* di surat kabar nasional *The Australian* edisi 11-22 Agustus 2010, dipilih karena periode tersebut tepat merupakan 10 (sepuluh) hari menjelang pemilihan PM Australia (dengan dua kandidat utama yaitu Tony Abott dan Julia Gillard). Sepuluh hari menjelang pemilihan dinilai sebagai periode yang tepat untuk melihat pemberitaan media terkait isu-isu yang sedang berkembang di Australia. Salah satu isu terpopuler yang cukup banyak menyita perhatian khalayak pada saat itu adalah kasus *asylum seekers*, sehingga periode tersebut dinilai paling dapat mewakili representasi pemberitaan media Australia tentang *asylum seekers*, terkait dengan pencitraan Indonesia.

Pada kurun waktu tertentu, media-media massa di Australia baik cetak maupun elektronik, sempat membahas isu *asylum seekers* ini secara intensif (mendalam dan terus-menerus). Sampai sekarangpun masih muncul sesekali berita-berita mengenai kasus *asylum seekers* dimana

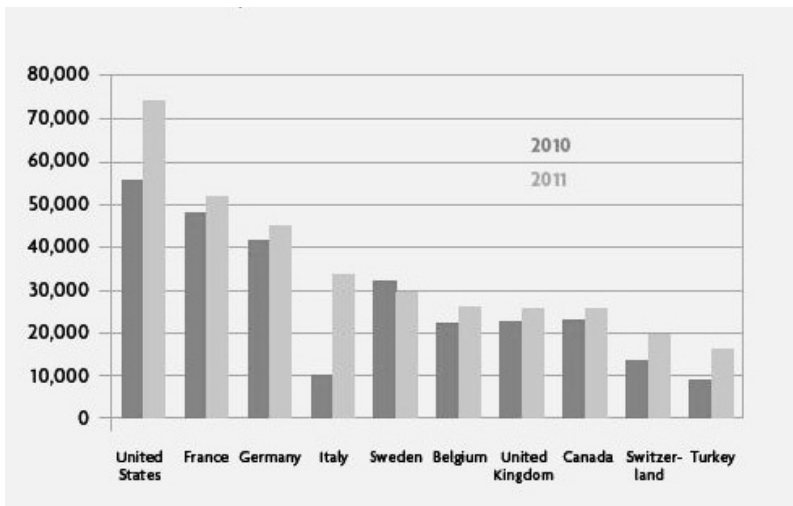


juga kerap kali masih membawa-bawa nama Indonesia. Peran Indonesia dalam kasus ini hampir selalu digambarkan sebagai 'si fasilitator' atau 'si dalang' atau 'si pendukung' atau 'si penyebab' utama meningkatnya angka *boat people* yang masuk ke kawasan Australia. Hal ini terjadi karena secara geografis memang Indonesia-lah yang menjadi jalur paling strategis untuk menuju perairan Australia.

Dalam banyak kasus *asylum seekers* atau disebut juga *boat people* yang berhasil masuk ke Australia, ditemukan fakta bahwa Indonesia memerankan peranan penting dalam proses penyelundupan tersebut. Pasalnya, Indonesia merupakan perantara atau pembawa orang-orang ilegal ini dengan menggunakan perahunya (milik orang Indonesia) dan otomatis kapten (yang mengemudikan) perahu tersebut adalah juga orang Indonesia. Walaupun memang Indonesia bukanlah 'otak utama' dalam kasus penyelundupan orang ini, namun peran Indonesia sebagai 'fasilitator' (pembawa massa) inilah yang dinilai media Australia sebagai kunci utama meningkatnya jumlah *boat people* di Australia.

### **Pemetaan *Asylum Seekers* di Dunia**

Laporan tahunan *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR) tahun 2012 mencatat data-data perkembangan jumlah *asylum seekers* yang semakin meningkat dari tahun 2010 ke 2011. Sepuluh negara penerima *asylum seekers* paling banyak dirilis oleh UNHCR dengan menempatkan Amerika Serikat sebagai negara penerima *asylum seekers* terbesar, yaitu total 74,000 permintaan (bertambah 18,500 dari tahun sebelumnya). Pertambahan tersebut paling banyak didominasi oleh peningkatan *asylum seekers* dari China (+20%), Mexico (+94%) dan India (+241%).



**Grafik 5.2. Sepuluh Besar Negara Penerima *Asylum Seekers* 2011**

Sumber: UNHCR (2012: 9)

Negara pada urutan kedua adalah Prancis, diikuti oleh Jerman dan Italia. UNHCR melaporkan bahwa Italia merupakan negara dengan angka pertambahan yang paling tinggi, yakni dari 10,000 menjadi sekitar 34.1000 (+240%). *Asylum seekers* terbesar berasal dari Tunisia 3,500 (naik dari 140 pada 2011), Nigeria (2,900 claims), Ghana (1,300) dan Pakistan (1,200).

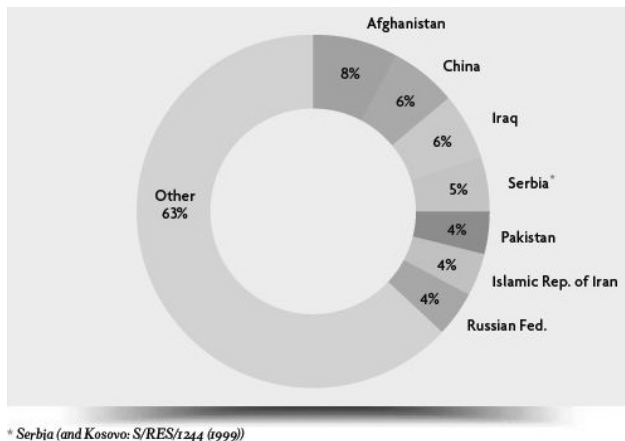
Data UNHCR menunjukkan bahwa *asylum seekers* berasal dari berbagai daerah di dunia. Sejak tahun 2008 hingga 2011, Asia merupakan wilayah dengan prosentase jumlah *asylum seekers* terbesar di dunia (45.4%), disusul oleh Afrika (26.7%), Eropa (14.6%), dan Amerika (8.0%).

**Tabel 5.2. Wilayah Asal *Asylum Seekers* 2011**

Regions	2008	2009	2010	2011
Africa	29.9%	28.4%	25.7%	26.7%
Americas	10.9%	8.8%	7.8%	8.0%
Asia	44.8%	45.1%	45.3%	45.4%
Europe	12.7%	15.4%	19.2%	14.6%
Oceania	0.1%	0.1%	0.2%	0.1%
Unknown*	1.5%	2.2%	1.9%	5.2%

Sumber: UNHCR (2012: 18)

Negara asal *asylum seekers* secara global berasal dari berbagai negara. Data UNHCR menunjukkan bahwa tujuh negara yang mendominasi adalah Afghanistan (8%), Cina (6%), Irak (6%), Serbia (5%), Pakistan (4%), Iran (4%), dan Federasi Rusia (4%).



**Gambar 5.3. Tujuh Besar Kewarganegaraan asal *Asylum Seekers* 2011**

Sumber: UNHCR (2012: 16)

Penggunaan kata *asylum seekers* sendiri juga sering disebut dengan istilah *refugees* yang dikenal secara global. Kontroversi tentang hak dan nasib para *asylum seekers or refugees* ini sudah banyak dibahas dalam beberapa tulisan dan penelitian. Salah satunya yang berjudul '*Framing of asylum seekers in Dutch Regional Newspapers*' (d'Haenens & de Lange, 2001: 847), menuliskan bahwa nasib para pencari suaka ini memang menjadi masalah yang kompleks di berbagai belahan dunia. *Universal Declaration of Human Rights* (1948) menyatakan bahwa setiap orang memang mempunyai hak untuk mencari suaka atau rasa aman ke negara lain dan menikmatinya dengan konsekuensi yang tidak menyenangkan ('*everyone has the right to seek asylum in other countries and to enjoy it in the face of persecution*'). Dapat dipahami bahwa fenomena *asylum seekers* ini memang merupakan isu yang kontroversial dan memiliki kompleksitas kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat di dalamnya.

### **Fenomena *Asylum Seekers* di Australia**

Australia merupakan salah satu negara tujuan bagi *asylum seekers*. Meskipun bukan negara tujuan di urutan 5 (lima) besar, namun Australia

cukup banyak dilirik sebagai negara yang dapat memberikan suaka. Dari tahun ke tahun, jumlah *asylum seekers* yang datang ke Australia mengalami dinamika naik dan turun. Penjelasan berikut bertujuan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan isu *asylum seekers* di Australia.

Dalam kurun waktu 2007-2011, peningkatan terjadi hampir di semua negara. Di beberapa negara, terdapat penurunan jumlah *asylum seekers*. Negara Inggris dan Kanada merupakan dua negara yang mengalami tren penurunan. Australia termasuk merupakan salah satu negara yang mengalami penurunan jumlah *asylum seekers* pada tahun 2011. Dalam tabel III dapat dilihat jumlah *asylum seekers* di Australia sempat mengalami peningkatan pada tahun 2010, dan menurun hingga 9% pada tahun 2011, dari angka 12.980 menjadi 11.820. Peningkatan dan penurunan jumlah *asylum seekers* yang masuk ke Australia inilah yang menjadi fokus dalam kajian makalah ini.

**Tabel 5.3. Klaim Pengajuan *Asylum* di Sejumlah Daerah**

Regions	2009	2010	2011	Change '11-'10
Europe	287,830	274,710	327,190	19%
- EU-total	247,330	240,410	277,370	15%
- EU-"old"	222,130	224,850	262,190	17%
- EU-"new"	25,200	15,560	15,180	-2%
USA/Canada	82,270	78,690	99,370	26%
Australia/New Zealand	7,760	12,980	11,820	-9%
Japan/Rep. of Korea	1,710	1,630	2,880	77%
<b>Total</b>	<b>379,570</b>	<b>368,010</b>	<b>441,260</b>	<b>20%</b>

See notes in **Annex Table 1** for list of countries included.

Sumber: UNHCR (2012: 12).

Penurunan jumlah *asylum seekers* di Australia secara signifikan berpengaruh pada penurunan ranking Australia dalam kategori negara dengan jumlah *asylum seekers* yang cukup besar. Dapat dilihat dalam tabel IV bahwa posisi Australia telah menurun dari ranking 10 menjadi ranking 13, posisi yang pada tahun sebelumnya diduduki oleh Norwegia. Pada urutan ke 14 menyusul Mesir, dan Norwegia pada posisi 15.

**Tabel 5.4. Rangking 15 Besar Negara Tujuan *Asylum Seeker* 2007-2011**

Countries	2007	2008	2009	2010	2011
United States	1	1	1	1	1
France	3	3	2	2	2
Germany	7	7	5	3	3
Italy	8	5	7	14	4
Sweden	2	6	6	4	5
Belgium	10	14	9	7	6
United Kingdom	5	4	4	6	7
Canada	4	2	3	5	8
Switzerland	11	9	13	8	9
Turkey	13	12	15	15	10
Austria	9	13	11	11	11
Netherlands	15	11	12	9	12
Australia	19	16	16	10	13
Greece	6	8	10	12	14
Norway	17	10	8	13	15

Sumber: UNHCR (2012: 12).

Berdasarkan asal negara *asylum seekers* yang menuju ke Australia dapat diidentifikasi 11 negara utama yang menjadi asal dari para *asylum seekers*. Dalam tabel V dapat dilihat laporan UNHCR tahun 2012.

**Tabel 5.5. Asal *Asylum Seekers* di Australia 2011**

Australia	
Islamic Rep. of Iran	2,156
Afghanistan	1,721
China	1,188
Pakistan	817
India	765
Stateless	530
Iraq	491
Egypt	417
Sri Lanka	370
Fiji	276

Sumber: UNHCR (2012: 44)

Warga negara Iran merupakan asal negara *asylum seekers* terbesar yang masuk ke Australia pada tahun 2011, yakni sebesar 2.156 orang. Afganistan di urutan kedua dengan jumlah

1.721. Selanjutnya menyusul China (1.188), Pakistan (819), India (765), tanpa kewarganegaraan (530), Iraq (491), Mesir (417), Sri Lanka (370), dan terakhir Fiji (276).

Bagi Australia sendiri kasus ini sudah terjadi sejak tahun 1989, sehingga memang bukan merupakan kasus baru lagi. Kasus *asylum seekers* ini seperti tidak kunjung selesai, bahkan mengalami peningkatan di tahun 2010 lalu, dan terus terjadi sampai dengan saat ini.

**Tabel 5.6. Jumlah Boat Arrivals sejak 1989 di Australia**

Year	Total arrivals
1989-90	224
1990-91	158
1991-92	78
1992-93	194
1993-94	194
1994-95	1071
1995-96	589
1996-97	365
1997-98	157
1998-99	921
1999-00	4175
2000-01	4137
2001-02	1277
2002-03	0
2003-04	53
<b>Totals</b>	<b>13,593</b>

Source: DIMIA, *Fact Sheet 74 - Unauthorised Arrivals by Air and Sea* <http://www.immi.gov.au/facts/74unauthorised.htm> (accessed 15 February 2005)

Kajian dalam makalah ini adalah mengenai peran media dalam memberitakan isu *asylum seekers* dengan melihat bagaimana media Australia merepresentasikan realitas tersebut. Tahun 2010, tepat pada masa pergantian parlemen di Australia, isu atau kasus *asylum seekers* yang masuk ke Negara tersebut juga mengalami kenaikan. Hal ini

terbukti dengan banyaknya berita mengenai *asylum seekers* di media-media massa Australia, baik itu media cetak maupun elektronik dan internet.

Dalam tesis berjudul '*The Media Framing of the 2010 Australian Election in The West Australian and The Australian Newspapers*' (Dugis, 2010), terdata bahwa selama kurun waktu sepuluh hari menjelang hari pemilihan PM Australia, surat kabar harian nasional (*The Australian*) dan surat kabar harian regional (*The West Australian*) banyak menuliskan berita tentang *asylum seekers* terkait dengan kandidat PM yang dicalonkan. Berita *asylum seekers* ini diidentifikasi sebagai isu yang paling diminati oleh media massa Australia dan khalayak pembaca tentang perkembangan dan penanganan kasus *asylum seekers* di Australia.

**Tabel 5.7. Issues in Election coverage from all pages in both newspapers from August 11 – 22, 2010.**

ISSUES	THE AUSTRALIAN	THE WEST AUSTRALIAN
Asylum seekers	16	10
National Broadband Network	18	5
Economic	12	4
Education	14	4
Environment (Water, Logging)	11	2
Family payment	6	5
Health	14	5
Mining tax	8	8
Newspoll report	13	7
Welfare (Employment, Jobs)	16	5
Others*	220	79
TOTAL	348	134

\*Others include issues such as general reports during the campaign, politicians' agendas, social affairs, industry reform, infrastructure, foreign policy, transport, superannuation, retirement, transport, child support, banks, business, climate change, insulation, and so forth which are less covered compare to the issues mentioned above during the ten days prior to election day.

(Sumber: Dugis, 2010: 32)

Temuan dari tesis tersebut menyatakan bahwa *news frame* yang digunakan atau dibentuk oleh media Australia adalah menganggap isu *asylum seekers* ini sebagai '*main issue*' atau isu penting sekaligus ancaman bagi bangsa Australia. Media Australia benar-benar *concern*

terhadap perkembangan kasus ini agar segera mendapatkan solusi dari pemerintah, khususnya solusi dari kedua calon kandidat PM Australia pada pemilihan tahun 2010.

### **Representasi dalam Media: Keterkaitan Indonesia dalam Pemberitaan Kasus *Asylum Seekers* di Media Australia**

Kasus *asylum seekers* dalam makalah ini dibahas berdasarkan pemberitaan (pesan atau teks) media Australia. Dalam komunikasi, faktor media menempati peran yang sangat penting dalam proses penyebaran pesan. Pengaruh dari pesan media tersebut kemudian menjadi lebih penting lagi ketika melihat kaitannya dengan dampak yang ditimbulkan. Kajiannya melihat pada bagaimana representasi Indonesia yang diciptakan melalui pemberitaan media Australia, bagaimana peran yang dimainkan Indonesia dalam kasus *asylum seekers* dan pada akhirnya bagaimana persepsi yang muncul dimata warga Australia terhadap Indonesia.

Berbicara tentang representasi, menurut Eriyanto (2001: 113), teks dipandang sebagai sarana sekaligus media melalui mana satu kelompok mengunggulkan diri sendiri dan memarjinalkan kelompok lain. Pada titik inilah representasi penting untuk dibicarakan. Ada dua hal yang penting yang patut diperhatikan dalam representasi; (1) apakah seseorang, kelompok, atau gagasan tersebut ditampilkan sebagaimana mestinya dan (2) bagaimana representasi tersebut ditampilkan dengan kata, kalimat, aksentuasi, dan bantuan foto macam apa seseorang, kelompok, atau gagasan tersebut ditampilkan dalam pemberitaan kepada khalayak.

Menurut John Fiske (Eriyanto, 2001: 114), saat menampilkan objek, peristiwa, gagasan, kelompok, atau seseorang, ada tiga proses yang dihadapi oleh wartawan. Level pertama adalah peristiwa yang ditandakan (*encode*) sebagai realitas. Level kedua adalah ketika memandang sesuatu sebagai realitas, lalu kemudian bagaimana realitas itu digambarkan. Level ketiga adalah bagaimana peristiwa tersebut diorganisir ke dalam konvensi-konvensi yang diterima secara ideologis, bagaimana kode-kode representasi dihubungkan dan diorganisasikan ke dalam koherensi sosial, atau kepercayaan dominan yang ada dalam masyarakat. Bila diurutkan maka prosesnya dimulai dari realitas, proses representasi dan terakhir adalah level ideologi.



Fokus dalam makalah ini adalah tentang bagaimana cara media memaknai realitas dengan cara menyeleksi fakta dan menuliskan fakta tersebut. Proses memilih atau menyeleksi fakta yang juga dikenal dalam teori framing ini, dapat menimbulkan dampak yang jauh karena begitu fakta didefinisikan maka akan terjadi proses pemilihan – yang dalam arti tertentu dapat berupa penonjolan–dan mengakibatkan penghilangan atas bagian tertentu dari realitas–bagian dari praktek representasi. Bahasa atau pilihan kata-kata yang digunakan bukan hanya mencerminkan realitas, tetapi juga dapat menciptakan realitas ‘baru’ dengan mengidentifikasi tanda. Tanda selalu punya penanda (*signifier*) dan petanda (*signified*). Penanda yaitu bunyi ujaran, tulisan, gambar, kata yang mewakili tertanda, sedangkan petanda lebih menunjuk pada konsep-konsep yang terkandung dalam kata-kata tersebut.

Dalam kasus atau sebut saja realitas tentang *asylum seekers*, media Australia dalam menyeleksi dan melaporkan realitas tentang *asylum seekers* melalui penggunaan kata-kata dan bahasa, istilah, gambar, dan sebagainya merupakan keseluruhan proses representasi pembentukan makna ideologi media. Terhitung ada sejumlah berita *asylum seekers* di media Australia yang melibatkan nama Indonesia. Penggambaran peran Indonesia dalam kaitannya dengan peningkatan jumlah *asylum seekers* di Australia inilah yang dalam makalah ini disebut sebagai proses representasi citra Indonesia di mata khalayak Australia yang juga berdampak pada hubungan bilateral antara kedua negara tersebut.

Dari sekian banyak kasus *asylum seekers* yang dimuat pada media massa Australia (surat kabar, televisi, radio dan internet), menyebutkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam kasus *asylum seekers* di Australia dinilai sebagai pemegang kunci keberhasilan sekelompok *asylum seekers* masuk ke perairan Australia. Pemberitaan kasus *asylum seekers* pada surat kabar nasional *The Australian*, banyak membahas tentang kredibilitas pemerintahan Australia dalam menangani jumlah *asylum seekers* di Australia.

*“ ‘The Australian’ covered issues on Labor’s promise to send back asylum seekers ‘thwarted’ on appeal, they figured out the increase number of boatpeople intercepted to Australia and about the weaker border policies in the prime ministerial candidate’s plan (on Thurs, August 19). In their view, “the policy debate needs to identifying root causes and finding durable solutions, examining the events that cause asylum movements, and considering the plight of asylum seekers warehoused in transit countries.”*

Similarly, 'The West Australian' reported asylum issues on the failure of the Labor's government (The West Australian, August 20). "The boat stopped on Wednesday night was the 86<sup>th</sup> to arrive in Australia waters – equalling the most to arrive in one year... So far this year 4089 asylum seekers have arrived, but 5516 people arrived on 44 boats in 2001" (p.10)." (Dugis, 2010: 33).

Kedua surat kabar tersebut banyak melaporkan tentang peningkatan jumlah *asylum seekers* yang masuk ke Australia selama beberapa tahun belakangan, khususnya sampai dengan tahun 2010. Menurut kedua media tersebut masalahnya bukan saja terletak pada kelemahan 'border policy' yang ditetapkan pemerintah Australia, atau dalam bahasa *The Australian* dikatakan sebagai 'inability to strengthen Australia's border.' Bahkan dalam salah satu headline-nya ditulis 'Refugees identified as Tigers' (*The Australian*, edisi 16 Agustus 2010). Dalam perspektif media Australia, kasus ini dipandang sebagai ancaman bagi stabilitas bangsa Australia baik dari segi budaya, politik, hukum, ketahanan nasional dan masalah-masalah sosial lainnya.

Makalah ini kemudian mengkaji lebih jauh tentang bagaimana pemberitaan *asylum seekers* di media Australia dalam kaitannya dengan keterlibatan Indonesia dalam membantu para *asylum seekers* ini masuk ke perairan Australia. Beberapa artikel berita yang ditulis seringkali tidak segan-segan menyebut Indonesia dalam judul beritanya. Melihat konsep representasi dalam media, maka dapat dikatakan bahwa media Australia secara tidak langsung ingin menggarisbawahi peran Indonesia yang cukup signifikan dalam kasus peningkatan jumlah *asylum seekers* di Australia.

Dalam artikel media online *The West Australian: 'Few boats fit for return' to Indonesia*, dituliskan bagaimana peran penting Indonesia dalam upaya pencegahan atau pemberhentian jalur masuknya *asylum seekers* ke perairan Australia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Australia adalah rencana mengirimkan kembali rombongan *asylum seekers* ini, namun hal ini ternyata tidak didukung oleh Indonesia. Hal inilah yang direpresentasikan dalam artikel berita tersebut.

"Sutrisno, the head of the Indonesian agency responsible for the search and rescue operation off East Java last month, said on Thursday that he doubted whether any of the vessels that made it to Australia would be in a condition that would allow them to be safely turned around.

He said the vessels that leave from Indonesia are generally in a poor state of

*repair and ill-equipped for the perilous journey in the first place, and many would be unlikely to survive the return voyage.*

*It's common for the boats to be heavily overloaded as the syndicates that organise the boats try to squeeze as many people aboard as they can for as much profit as possible, Sutrisno said.*

*"If they are sent back, I would be really worried. Not only about the vessel, but about their ability to navigate," he told AAP." (<http://au.news.yahoo.com/thewest/a/-/world/12731523/few-boats-fit-for-return-to-indonesia/> January 26, 2012, 12:33 pm).*

Berbagai kendala memang dihadapi Australia dalam upaya pencegahan *asylum seekers* ini, dan jelas menurut media Australia bahwa peran serta Indonesia dalam upaya ini sangatlah penting mengingat bahwa secara geografis Indonesia adalah tetangga yang berbatasan langsung dengan Australia. Batas perairan antara Indonesia dan Australia inilah yang kerap kali menjadi penyebab keterlibatan Indonesia dalam kasus penyelundupan manusia ini. Dalam beberapa kasus yang dituliskan media Australia menyebutkan bahwa Indonesia terlibat sebagai aktor pendukung yang memuluskan jalur masuknya para *asylum seekers* ini berhasil masuk ke Australia.

Bagi Indonesia, beberapa masalah soal batas perairan yang menyebabkan kedua negara ini bersinggungan adalah soal penyeragaman peta perairan untuk pegangan para nelayan. Hal ini dipandang sebagai persoalan batas perairan antara Indonesia dan Australia. Menurut media Australia, masalah *asylum seekers* ini bukanlah soal perbatasan perairan yang tidak jelas, namun lebih pada persoalan kepedulian Indonesia (sebagai tetangga sekaligus jalur wajib yang akan dilewati) untuk turut mencegah arus masuknya *asylum seekers* ke Australia.



**Gambar 5.6. Peta Pencarian Perbatasan Indonesia-Australia.**

Mengutip sebuah kasus *asylum seekers* berdasarkan hasil observasi langsung dalam persidangan di pengadilan daerah di Perth, WA (*The District Court of Western Australia*) yang melibatkan warga negara Indonesia bernama Hasanusi pada bulan Maret 2010. Keterlibatan Hasanusi yang berumur 41 tahun dan telah menjadi nelayan selama kurang lebih 27 tahun itu diadili sebagai tersangka karena menjadi kapten kapal atau pengemudi perahu yang membawa 38 penumpang (*asylum seekers*) yang berasal dari berbagai negara tanpa passport masuk ke perairan Australia.

*“The District Court of Western Australia The Queen ~v~ HASANUSI (Trial) At 10:00 am in Court 2~1 before his Honour Judge Fenbury and a Jury Mr Hasanusi told the police in his interviewed, he had received 15 million rupiah (\$1789), which’s four times his normal profit, to take a group of*

*people fishing to Krakatau – not to go to Australian water. Simply apply the law in this case. The lawyer told the jury about the ‘defamation of intention’ means to engage, to conduct, and/or to facilitate. The commonwealth case showed that Mr Hasanusi was not the mastermind of the people smuggling, but he did engage to facilitate and made it much easier – less difficult – for the passengers to reach Christmas Island. In other words, he was the part of the plan. It is easy to make allegations but it is difficult to prove it. For sure, sympathy and prejudice has no place in human life. Presumption of innocence is the key of the trial and Mr Hasanusi has to admit that he was attempted to bring people smuggling to Christmas Island. A minimum sentence of five years in jail is the final decision.”*  
(Sumber: *observasi langsung dalam persidangan – Dugis, 2010, Cover Court Story: Hasanusi Case*). (Sumber artikel berita tentang Hasanusi: <http://www.perthnow.com.au/news/western-australia/th-asylum-boat-intercepts-navy-patrol/story-e6frg13u-1225847286954>).

Dalam kasus Hasanusi ini dapat dilihat bahwa berdasarkan perspektif Australia, Indonesia dianggap memegang peranan penting dalam proses keberhasilan maupun pencegahan masuknya *asylum seekers* ke perairan Australia. Disinilah sebenarnya muncul keinginan bahwa pemerintah Indonesia-pun dapat turut mendukung upaya pencegahan penyelundupan ini terjadi.

*“Indonesia is the main transit point for asylum seekers who make their way to Australia by boat, who depart from beaches and towns along largely un-patrolled coastlines. Both Indonesia and Australia had a moral responsibility to take a cooperative approach to the people-smuggling problem”.* (Sumber: <http://au.news.yahoo.com/thewest/a/-/world/12731523/few-boats-fit-for-return-to-indonesia/January26,2012,12:33pm>)

Dalam makalah ini dibahas bagaimana representasi yang diciptakan oleh media Australia dalam penggunaan istilah *asylum seekers or refugees or boat people or people smugglers* dalam bahasa pemberitaannya. Arti kata dan makna dari masing-masing istilah tersebut juga mengandung representasi tersendiri baik itu yang berkonotasi negatif maupun positif. Sama halnya dengan istilah yang digunakan media Australia dalam memunculkan peran yang dimainkan Indonesia sebagai salah satu agen dalam kasus *asylum seekers* tersebut.

Sebenarnya secara tidak langsung media Australia ini merepresentasikan peran Indonesia kedalam suatu kapasitas ukuran nilai tertentu yang keputusannya ada di tangan Indonesia. Misalnya dengan pemberian judul *‘Indonesia wants deal to stop asylum seekers,’*

penggunaan kalimat tersebut jika dimaknai, seolah media Australia ingin mengatakan bahwa selama ini Indonesia tidak atau belum setuju untuk membantu Australia dalam upaya pemberhentian *asylum seekers*. Artikel lain juga menuliskan '*Indonesians unhappy with Abbott plan,*' dimana dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa rencana Tony Abbott (kandidat PM Australia 2010) adalah untuk mengembalikan para sejumlah *asylum seekers* ini ke Indonesia, dan Indonesia dikatakan '*unhappy*' dengan keputusan tersebut.

Proses penerimaan penanda (*signifier*) yang dibaca khalayak dan petanda (*signified*) yang dimunculkan dalam benak khalayak tentu akan sangat berpengaruh terhadap proses pencitraan Indonesia dimata khalayak (pembaca) di Australia. Terlebih lagi jika mengingat sejarah hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia terkait berbagai isu dan kepentingan di berbagai bidang kehidupan bernegara.

## Simpulan

Fenomena *Asylum seekers* memang bukanlah persoalan baru bagi sejumlah negara yang telah menjadi negara tujuan para pencari suaka. Bagi Australia sendiri hal ini sudah terjadi sejak tahun 1989, yakni sebanyak 13,593 *asylum seekers* masuk ke Australia menggunakan *boat* tanpa persetujuan visa dari pemerintah Australia (lihat tabel 3: Jumlah *Boat Arrivals* sejak 1989 di Australia). Fenomena ini terus berkembang dan dinilai dapat mengancam kestabilan negara tujuan dengan asumsi bahwa dengan semakin banyaknya para pencari suaka di suatu negara bisa saja menimbulkan masalah-masalah sosial dan budaya di negara tersebut.

Peran berbagai pihak yang terlibat menjadi penting. Kasus *asylum seekers* yang kontroversial dan sangat kompleks ini juga menarik perhatian media massa. Proses menyeleksi isu dan membentuk realitas baru versi media dikatakan dalam makalah ini sebagai proses representasi dalam media. Di mana kajiannya adalah tentang representasi keterlibatan Indonesia dalam pemberitaan media Australia terkait kasus *asylum seekers*, khususnya pada tahun 2010 - 2012.

Berdasarkan hasil analisis tekstual atas pemberitaan pada surat kabar harian *The Australian* dan *The West Australian*, diperoleh dua kesimpulan bahwa; *Pertama*, bahwa media Australia memandang kasus *asylum seekers* ini sebagai ancaman bagi stabilitas negara Australia terkait

masalah-masalah sosial yang dapat ditimbulkan oleh para pencari suaka ini. Keresahan dan kesadaran ancaman stabilitas bangsa membuat media kian gencar memberitakan segala hal terkait perkembangan *asylum seekers* di negaranya. Proses representasi yang berangkat dari sebuah realitas kemudian menjadi sebuah proses yang kompleks. *Selecting issues dan creating news*, demikian proses yang dilakukan media dalam menciptakan representasi 'makna baru' dalam masyarakat.

*Kedua*, dampak pemberitaan yang merupakan hasil representasi dalam media mengenai kasus *asylum seekers* memosisikan Indonesia sebagai pemegang kunci keberhasilan masuknya *asylum seekers* ke Australia. Melalui pemberitaan yang giat dilakukan oleh media Australia, ternyata Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu actor atau agen atau pelaku dalam kasus *asylum seekers* yang jumlahnya sempat meningkat di tahun 2010. Peran yang dimainkan Indonesia sendiri sangatlah bergantung pada bagaimana media merepresentasikannya melalui kata yang dipilih, bahasa yang digunakan, gambar atau foto yang ditampilkan, dan sebagainya. Hasil pemaknaan dari penanda dan petanda sebagai proses representasi dalam media inilah yang diterima oleh khalayak Australia yang kemudian memberikan persepsi bagi bangsa Indonesia.

Menarik ketika kasus *asylum seekers* ini dilihat sebagai fenomena yang dapat memengaruhi hubungan bilateral dua negara (Indonesia dan Australia) dikarenakan peran media massa di dalamnya. Pembentukan realitas media tentang *asylum seekers* yang awalnya adalah sebuah fenomena sosial kemudian menjadi ancaman bagi kestabilan nasional sebuah negara bahkan berdampak pula bagi keharmonisan hubungan kerjasama dua negara.

Mengutip pedapat Sutrisno, kepala badan Indonesia yang bertanggung jawab atas pencarian dan operasi penyelamatan dari Jawa Timur, dalam artikel berita *online The Australian* yang mengatakan "*Cooperation between the two countries is crucial because we don't want to disturb each others' security and stability," he said. We want to have good neighbourhood relationship, helping each other economically and socially without hurting each other. Both of us don't want to be the nest of crime action. This is a common moral responsibility as well as an international relationship responsibility.*" (<http://au.news.yahoo.com>).



## Daftar Pustaka

- Cotan, Imron, 2004, *Peluang dan Tantangan Hubungan Bilateral Indonesia-Australia*, Pidato yang disampaikan di UNJ, UNPAD, UGM, dan Universitas Andalas, Desember 2004, didownload pada 7 Februari 2012 di <http://www.kbri-canberra.org.au/speeches/2004/041206civitas.html>.
- Dugis, Noveina, 2010, *The Media Framing of the 2010 Australian Election in The West Australian and The Australian Newspapers*, Thesis, Perth, WA: Curtin University of Technology.
- d'Haenens, Leen dan de Lange, Mariëlle, 2001, "Framing of asylum seekers in Dutch regional newspapers", *Media, Culture, and Society* Vol. 23. London: Sage Publications. Page 847-860, <http://mcs.sagepub.com/content/23/6/847.refs.html>, download from mcs.sagepub.com at Curtin University Library on October 13, 2010
- Eriyanto, 2001, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara.
- Gartrell, Bennett & Salna, 2012, *Indonesians unhappy with Abbott plan*. AAP. Updated January 23, 3:06 pm. Didownload di <http://au.news.yahoo.com/thewest/a/-/national/12691023/indonesians-unhappy-with-abbott-plan/>.
- Hukum online.com., 5 Maret 2009, *Penyelundupan Orang dan Ekstradisi, Kerikil dalam Hubungan Indonesia*, didownload pada 7 Februari 2012 di <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21365/penyelundupan-orang-dan-ekstradisi-kerikil-dalam-hubungan-indonesia--australia>.
- Kowaltzke, A., & Stewart, C., 2008, *Media: new ways and meanings* (3<sup>rd</sup> Ed). Queensland: John Wiley Sons Australia Ltd.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary 4th Edition*, 2008, United Kingdom: Oxford University Press.
- Nickels, Henri Charles, 2007, "Framing Asylum Discourse in Luxembourg", *Journal of Refugee Studies* Vol. 20, No. 1. Published by Oxford University Press. All rights reserved. For Permissions, please email: [journals.permissions@oxfordjournals.org](mailto:journals.permissions@oxfordjournals.org) doi:10.1093/jrs/fel029. Download from [jrs.oxfordjournals.org](http://jrs.oxfordjournals.org) at Curtin University of Technology on 13 October 2010.
- Probyn & Butterly, 2009, *Indonesian wants deal to stop asylum seekers*. The West Australian. Updated October 14, 2:46 am. Didownload



di <http://au.news.yahoo.com/thewest/a/-/news/6213991/indonesia-wants-deal-to-stop-asylum-seekers/>)

Salna, South-East Asia Correspondent, 2012, AAP. Updated January 26, 12:33 pm. Didownload di <http://au.news.yahoo.com/thewest/a/-/world/12731523/few-boats-fit-for-return-to-indonesia/> .

The Australian, 2010, *Refugees identified as Tigers*, edisi 16 Agustus.

UNHCR, 2009, *Global Trends*. [http://unhcr.org.au/unhcr/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=46&Itemid=92](http://unhcr.org.au/unhcr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&Itemid=92).

UNHCR, 2012, *Fewer asylum claims in Australia in 2011*. [http://unhcr.org.au/unhcr/index.php?option=com\\_content&view=article&id=241:fewer-asylum-claims-in-australia-in-2011&catid=35:news-a-media&Itemid=63](http://unhcr.org.au/unhcr/index.php?option=com_content&view=article&id=241:fewer-asylum-claims-in-australia-in-2011&catid=35:news-a-media&Itemid=63).

UNHCR. 2012, *Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries*. <http://www.unhcr.org/4e9beaa19.html>.

UNHCR, 2012, *Asylum levels & trends report – Australia*. [http://unhcr.org.au/unhcr/index.php?option=com\\_content&view=article&id=172:asylum-levels-a-trends-report-australia&catid=35:news-a-media&Itemid=63](http://unhcr.org.au/unhcr/index.php?option=com_content&view=article&id=172:asylum-levels-a-trends-report-australia&catid=35:news-a-media&Itemid=63)



# **KEBEBASAN PERS DALAM KONTEKS HUBUNGAN INDONESIA-MALAYSIA:**

## **Kajian Berita Ambalat di Berita Harian (Malaysia) dan Kompas (Indonesia)**

**Fitaha Aini, B.Comm (Hons)**

### **Pendahuluan**

#### **Hubungan Malaysia-Indonesia**

Pada masa Orde Baru sebelum 1998, pers senantiasa mendapat tekanan dan kontrol yang ketat dari pemerintah. Pada Era Reformasi telah dirumuskan undang-undang baru yang menjamin kemerdekaan bagi insan pers. Pemerintah memberikan kebebasan pers yang tidak dalam kontrol pemerintah tetapi masih tertakluk kepada Kode Etik Jurnalistik. Pada masa yang sama, Malaysia masih mengontrol pers karena dalam proses membangun negara, kestabilan sangat diperlukan supaya tidak terganggu oleh usaha-usaha yang dapat mengganggu pembangunan. Kebebasan pers yang wujud di Malaysia adalah kebebasan yang berada dalam peraturan perundang-undangan, hal ini untuk mencegah supaya tidak tersebar berita yang dapat menggugat kestabilan negara.

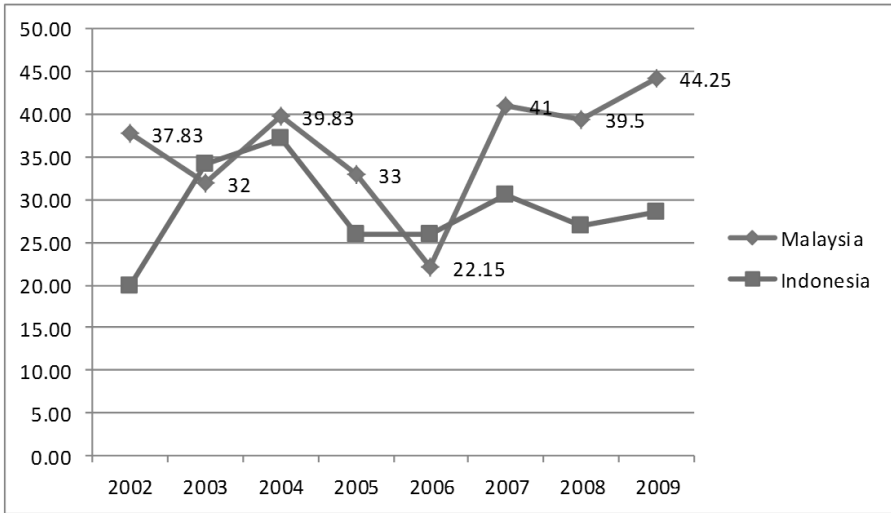
Setelah memasuki era reformasi banyak peristiwa yang telah menimbulkan perselisihan antara dua negara. Sejak itu, golongan media berlomba-lomba menulis tentang isu sensitif yang berpotensi mengganggu hubungan bilateral. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam beberapa tahun ke belakang telah menjadi fokus utama pihak media. Hal ini terbukti dari perhatian yang diberikan oleh kedua pers terhadap operasi penangkapan serta pemulangan pendatang tanpa izin (PATI). Selain itu, pers juga mempublikasikan berita tentang sikap beberapa majikan Malaysia yang cenderung tidak manusiawi terhadap pekerja Indonesia.

Keadaan bertambah buruk ketika media Malaysia melaporkan keluhan masyarakatnya terhadap berbagai masalah sosial dan kriminal yang ditimbulkan oleh pendatang tanpa izin yang berasal dari Indonesia, kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan dan perang dunia "maya". Paparan berita mengenai Malaysia-Indonesia terdiri dari berbagai topik seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Salah satu isu yang menjadi sorotan pers ialah sengketa wilayah Sipadan-Ligitan dan Ambalat. Isu ini merupakan isu politik tentang wilayah yang berada di perbatasan kedua negara. Isu Sipadan-Ligitan merupakan isu perbatasan pertama yang muncul di pers kedua negara setelah Indonesia menggulingkan pemerintahan Orde Baru. Sengketa Sipadan-Ligitan merupakan perselisihan antara Malaysia dan Indonesia atas kepemilikan dua pulau yang berada di Selat Makassar. Pada 13 Januari 2003, berita yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Sipadan-Ligitan Interpelasi" dipaparkan oleh *Kompas*. Dua tahun setelah itu, Ambalat menjadi fokus utama pihak pers. Wajarlah jika hubungan semakin keruh dan perasaan-perasaan emosional menjaral dalam jiwa masyarakat di dua negara. Dilanjutkan pula dengan perang blog yang terjadi di internet ([www.topix.com/forum/world/malaysia](http://www.topix.com/forum/world/malaysia)). Perang dunia maya tersebut menggunakan kata-kata yang kasar bahkan kadang merusak *website* pihak-pihak tertentu (*detikinet*, 31 Agustus 2007).

### **Kebebasan Pers: Perspektif Dunia**

Sistem pers sebuah negara dibentuk oleh keadaan negara tersebut. Sistem ini berlandaskan sistem pemerintahan, politik, undang-undang, nilai budaya dan sejarah negara itu. Selain itu, keanekaragaman etnis, agama, dan bahasa turut memainkan peranan penting dalam pembentukan sistem pers tersebut. Sistem pers yang telah disepakati ini akan berpengaruh kepada kebebasan pers (Safar Hasim, 1996).

Dari Indeks Kebebasan Pers 2009, Malaysia berada di posisi ke-131 sedangkan Indonesia berada di posisi 100 dari 175 negara. Rating ini diberikan oleh *Reporters Sans Frontières* yang berlokasi di Paris, Perancis. RSF telah memantau kebebasan pers di seluruh dunia sejak tahun 1985. Semakin tinggi indeks suatu negara, semakin banyak kekangan terhadap kebebasan pers di negara itu (lihat grafik 1. ([www.rsf.org](http://www.rsf.org))).



**Grafik 5.4. Indeks Kebebasan Pers Berdasarkan *Reporters Without Borders***

Sumber: *Reporters Without Borders* (www.rsf.org)

Indeks kebebasan pers ini mengukur tingkat kebebasan pers di dunia yang menggambarkan tahap kebebasan yang dinikmati oleh wartawan dan organisasi media di suatu negara. Indeks ini juga memperhitungkan usaha pemerintah dalam menghormati kebebasan bersuara. Pada tahun 2006, Malaysia memiliki indeks kebebasan pers yang rendah. Prestasi ini diperoleh ketika Malaysia dipimpin oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi. Tan Sri Ramon Navaratman, Presiden *Transparency International* (Malaysia), mengatakan bahwa peningkatan dari segi pemahaman media adalah sesuatu yang membanggakan dan hal ini membuktikan bahwa pemerintah telah membuka ruang untuk berdiskusi dan berwacana (*New Strait Times*, 27 Oktober 2006).

Tidak seperti di Malaysia, perkembangan media khususnya pers di Indonesia telah melahirkan sistem dan organisasi pers baru. Perubahan ini berpengaruh terhadap pemberitaan mengenai hubungan Malaysia-Indonesia disebabkan kebebasan pers tanpa kontrol. Pemimpin besar Malaysia dan Indonesia memaknai kebebasan pers dengan perspektif yang berbeda. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menulis dalam *The New Straits Times* pada 9 Juli 1981 dengan judul *Freedom of the Press: Fact and Fallacy*.

Dalam menjunjung kebebasan pers peranan potensi ini mesti diingat, selagi pers sadar (sadar) mengenai dirinya sebagai satu potensi ancaman kepada demokrasi dan secara baik menghadkan (membatasi) pelaksanaan hadnya, ia patut dibenarkan berfungsi tanpa gangguan pemerintah. Tetapi apabila pers dengan telah menyalahgunakan haknya dengan mengapi-apikan rakyat tanpa perlu, dalam keadaan itu pemerintah demokrasi patut mempunyai hak untuk mengontrolnya.

Presiden Republik Indonesia mempunyai pendapat yang berbeda terhadap kebebasan pers. Dalam pidato di Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta wartawan dan pakar media untuk melatih *self-censorship* (melakukan kontrol atas dirinya sendiri) karena zaman pemerintah mengontrol pers sudah berakhir. Kata beliau:

“Saya sangat ingin melihat “self censoring” diterapkan. Saya berharap para dewan press, wartawan senior, dan reporter dan pemimpin asosiasi wartawan akan menerapkan prinsip bagaimana menentukan apa yang sepatutnya diberitakan dan yang tidak patut diberitakan. Kebebasan press sangat dihargai di Indonesia sekarang dan Indonesia tidak akan kembali ke saat ketika pemerintah ikut campur dalam masalah media, tetapi kebebasan ini memiliki batasan sendiri. Kami mendukung kebebasan press, tetapi ketika kebebasan tersebut digunakan dengan baik dan bertanggungjawab”. ([www.waspada.co.id](http://www.waspada.co.id))

Kini, Indonesia-Malaysia telah menjalin hubungan selama 55 tahun. Sejauh ini, hubungan diplomatik antara kedua negara serumpun ini secara formal terjalin rukun, terutama di kalangan pemerintah. Di sebagian masyarakat kadang masih muncul perselisihan yang berpotensi memicu konflik bilateral. Salah satu sumber dari masalah hubungan dua negara serumpun ini adalah pelaporan media di negara masing-masing yang menyuarakan perasaan tidak puas terhadap beberapa isu yang timbul.

Media merupakan *platform* untuk mengapresiasi pemikiran yang lahir dari seluruh lapisan masyarakat. Abdul Latiff (2009) menyatakan dalam tulisannya, kebanyakan berita mengenai hubungan Malaysia-Indonesia hanya bersifat sensasional-provokatif, tidak berdasarkan kenyataan dan tindakan ini justru mampu mengeruhkan hubungan Malaysia-Indonesia. Apakah ini terjadi karena perbedaan indeks kebebasan pers yang pada akhirnya mampu mencorakkan berita tentang isu Ambalat?

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pelaporan berita digunakan untuk menjelaskan corak pemberitaan mengenai hubungan Indonesia-Malaysia di *Berita Harian* dan *Kompas*. Paparan isu mengenai Ambalat yang pernah dipublikasikan oleh *Berita Harian* dan *Kompas* diidentifikasi secara dalam menggunakan Teori Pers. Metode kuantitatif digunakan dalam menganalisis berita berdasarkan unit analisis yang telah ditentukan seperti jumlah berita, format jurnalistik dan fungsi pesan. Di samping itu, kaidah kualitatif juga digunakan dalam menganalisis berita berdasarkan empat komponen *framing* yang dikemukakan oleh Robert Entman seperti *Defines Problem*, *Diagnose Causes*, *Moral Judgement*, dan *treatment recommendations*.

### **Latar belakang Isu Ambalat**

Isu perselisihan mengenai Blok Ambalat di Laut Sulawesi antara Indonesia dengan Malaysia menjadi topik yang hangat dibicarakan di media Indonesia dan Malaysia. Perbedaan pendapat yang terjadi sempat mengganggu kestabilan hubungan bilateral antara kedua negara. Penyebab utama kasus Ambalat, menurut Arif Havas Oegroseno, Direktur Perjanjian Internasional Bidang Politik, Keamanan dan Kewilayahan dari Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, adalah pencantuman kepemilikan wilayah secara sepihak oleh Malaysia dalam peta perbatasan kontinjen Malaysia (*Kompas*, 1 Maret 2005). Peta baru Malaysia yang dikeluarkan pada tahun 1979 itu tidak sesuai dengan Perjanjian Tapal Batas Kontinental Malaysia-Indonesia yang ditandatangani bersama pada 27 Oktober 1969 mengenai penentuan perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Dalam peta baru tersebut, Malaysia memasukkan Pulau Sipadan, Ligitan, dan Batu Puteh serta blok maritim Ambalat ke dalam wilayahnya yaitu dengan memajukan koordinat 4° 10' arah utara melewati pulau Sebatik. Akibatnya, wilayah Ambalat Timur yang diduga Malaysia sebagai Blok ND6 dan Blok ND7 miliknya bertindih dengan wilayah Blok Ambalat milik Indonesia dan pertindihan inilah yang diperselisihkan oleh kedua negara.



**Gambar 5.5. Peta Ambalat**

(Sumber: [www.kinablu.wordpress.com](http://www.kinablu.wordpress.com))

Menurut perspektif pers Indonesia, isu pertindihan wilayah perbatasan di Laut Sulawesi dimulai sejak tahun 1967. Isu ini baru mendapat perhatian publik termasuk media sejak tahun 2005 ketika pemerintah Malaysia memberikan hak konsesi eksplorasi di perairan Ambalat Timur yang diduga Malaysia sebagai Blok ND6 dan Blok ND7 kepada perusahaan Shell (*Kompas*, 3 Maret 2005). Sejak saat itu berita demi berita mengenai isu Ambalat dipublikasikan baik di media Indonesia maupun di media Malaysia. Puncaknya yaitu pada pertengahan tahun 2009 ketika kapal KD Baung-3509 milik Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) memasuki wilayah perairan Indonesia di Laut Sulawesi sejauh 7.3 mil (*Kompas*, 31 Mei 2009).

### Hasil Kajian Analisis Isi

Hasil analisis isi media menunjukkan bahwa kedua media sebagai objek penelitian menyampaikan pemberitaan isu politik antara Malaysia dengan Indonesia terkait dengan konflik perbatasan wilayah



perairan Ambalat. Dari keseluruhan jumlah pemberitaan mengenai isu tersebut, *Kompas* memublikasikan 30 berita (71.4%), jauh lebih banyak dibandingkan *Berita Harian* yang hanya memaparkan 12 berita (28.6%) saja. Statistik di bawah menunjukkan bahwa isu konflik perbatasan wilayah perairan Ambalat yang mencetuskan ketegangan antara Malaysia dan Indonesia mendapat perhatian yang lebih banyak di Indonesia.

**Tabel 5.8. Jumlah Berita Ambalat**

<b>Koran</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
<i>Berita Harian</i>	12	28.6
<i>Kompas</i>	30	71.4
<b>Jumlah</b>	<b>42</b>	<b>100</b>

### **Format Jurnalistik**

Hasil penelitian ini juga mengkaji format jurnalistik untuk mengetahui sifat informasi yang disampaikan di kedua pers yang menjadi objek penelitian. Isu perbatasan wilayah di perairan Ambalat merupakan isu sensitif karena mempengaruhi hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia. Perlu diketahui sifat dari pelaporan informasi mengenai isu tersebut baik dalam format berita, editorial, surat pembaca, kolom maupun wawancara.

Informasi yang disampaikan dalam format berita biasanya disampaikan untuk menjelaskan laporan sesuai dengan fakta. Informasi dalam editorial atau tajuk rencana pula berupa laporan dan latar belakang lengkap tentang suatu peristiwa. Dalam bagian ini dipaparkan komentar, penjelasan atau juga kritik dari berita tersebut. Pemaparan dalam “lidah wartawan” merupakan pemikiran yang logis dari wartawan yang mencoba untuk menerangkan secara singkat tentang pendapatnya terhadap isu ketika berlaku (Wrinn, 1977).

Pers juga biasanya menyediakan ‘ruang pembaca’ untuk menyampaikan gagasan mengenai sesuatu isu dalam format surat pembaca. Selain surat pembaca, pers juga kadang kala melaporkan berita dalam format kolom yang mengangkat pendapat atau gagasan pakar mengenai suatu isu. Suatu isu juga dapat ditulis dalam format wawancara yang merupakan hasil wawancara wartawan dengan

tokoh-tokoh tertentu bagi mendapatkan penjelasan yang lebih terinci. Berdasarkan analisis, format jurnalistik yang digunakan oleh *Berita Harian* dan *Kompas* mengenai pemberitaan isu Ambalat digambarkan dalam tabel 2 di bawah ini.

**Tabel 5.9. Format jurnalistik Berita Ambalat**

Format Jurnalistik	<i>Berita Harian</i>		<i>Kompas</i>	
	F	%	F	%
Berita	5	41.7	19	63.3
Editorial	5	41.7	3	10
Surat Pembaca	0	0	3	10
Kolom	2	16.7	5	16.7
Wawancara	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

*Berita Harian* menggunakan format berita dalam lima berita (41.7%), begitu juga format editorial terdapat lima berita (41.7%). Berita editorial mengenai isu Ambalat dalam *Berita Harian* antaranya “Malaysia, Indonesia patut cari dalang pencetus kekecohan” (29 Oktober 2009: 22). Surat khobar ini sama sekali tidak menggunakan format surat pembaca dan wawancara, sementara format kolom digunakan dalam dua berita (16.7%) saja. Dibandingkan dengan *Berita Harian*, *Kompas* menggunakan hampir semua format jurnalistik yang ada kecuali format wawancara. Untuk format berita, *Kompas* menerbitkannya dalam 19 berita (63.3%). Bagi format editorial dan surat pembaca, keduanya digunakan dalam jumlah yang sama, yaitu tiga berita (10%) sedangkan format kolom yaitu lima berita (16.7%).

Statistik di atas menunjukkan bahwa format berita masih menjadi keutamaan kedua media dalam pemberitaan isu sengketa perbatasan wilayah Ambalat antara Malaysia dan Indonesia. Hal ini karena format berita lebih memaparkan fakta dan masyarakat berhak mendapatkan fakta yang akurat agar tidak keliru. Sangat penting bagi *Berita Harian* dan *Kompas* untuk menyediakan informasi dalam format berita daripada menggunakan format lainnya karena isu sengketa perbatasan wilayah Ambalat berpotensi mencetuskan ketegangan di kalangan masyarakat kedua negara jika fakta yang diberikan tidak jelas dan lengkap.

Format selanjutnya ialah surat pembaca yang tidak digunakan oleh

*Berita Harian*, sebaliknya, *Kompas* masih menggunakannya dalam tiga berita. Malah dalam surat pembaca yang dipaparkan *Kompas*, terjadi perdebatan antara pembaca satu dengan pembaca lainnya. Salah satu dari tiga surat pembaca yang ada merupakan tanggapan seorang pembaca terhadap kolum yang ditulis oleh seorang dosen mengenai penjelasan perbedaan kedaulatan (*sovereignty*) dan hak berdaulat (*sovereign right*). Dalam kasus Ambalat, perairan yang kaya akan sumber minyak dan gas alam itu terletak dalam wilayah yang berlaku hak berdaulat sehingga baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama tidak mempunyai kedaulatan ke atas perairan Ambalat. Bagaimanapun pembaca tersebut mempersepsi penjelasan itu sebagai pengkhianatan dan menganggap dosen tersebut tidak mempunyai rasa nasionalisme.

Tidak lama kemudian, akademisi tersebut membalas kritikan pembaca melalui satu lagi surat pembaca. Dosen itu menjelaskan bahwa tulisannya dalam kolum yang dipaparkan *Kompas* pada 5 Juni 2009 ialah penjelasan tentang konsep kedaulatan berdasarkan bidang ilmu yang berkaitan. Ia menjelaskan bahwa masyarakat memerlukan fakta yang akurat dan objektif di balik isu Ambalat dan menegaskan bahwa perang bukanlah penyelesaian yang baik untuk menangani isu ini. Di sisi lain, hal ini menunjukkan bahwa *Kompas* telah berhasil dalam menampung berbagai pandangan dari masyarakat. Perbedaan cara berfikir antara kedua pembaca *Kompas* tersebut menunjukkan bahwa pemberitaan tentang isu Ambalat menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia. *Kompas* telah berhasil menunjukkan kredibilitasnya sebagai pers yang berfungsi sebagai *platform* untuk menampung berbagai pandangan masyarakat yang ingin menyuarakan pendapat mereka dalam isu-isu sensitif seperti ini. *Kompas* perlu memberikan fakta yang akurat dan jelas dalam pemberitaan terutama jika menyangkut isu politik dan kedaulatan seperti kasus ini.

### **Fungsi Pesan**

Aspek yang perlu ditekankan dalam analisis kajian ini ialah fungsi pesan. Fungsi pesan dalam suatu berita menunjukkan kecenderungan arah pesan yang disampaikan kepada pembaca. Kecenderungan pesan itu adalah integrasi, disintegrasi dan netral. Hasil analisis ke atas fungsi pesan yang digunakan *Berita Harian* dan *Kompas* dalam pemberitaan mengenai isu Ambalat terdapat dalam Tabel 3 berikut.

**Tabel 5.10. Fungsi Pesan dalam Berita Ambalat**

Fungsi pesan	<i>Berita Harian</i>		<i>Kompas</i>	
	F	%	F	%
Integrasi	9	75	6	20
Disintegrasi	0	0	7	23.3
Netral	3	25	17	56.7
<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Fungsi pesan pada *Berita Harian* kebanyakan merupakan fungsi integrasi yaitu sebanyak sembilan berita (75%), fungsi disintegrasi tidak ada dan fungsi netral sebanyak tiga berita (25%). Pada *Kompas* pula, fungsi pesan yang mengarah kepada integrasi terdapat sebanyak enam berita (20%) saja, lebih sedikit dibandingkan fungsi pesan disintegrasi yaitu tujuh berita (23.3%). Fungsi pesan netral mendominasi jumlah keseluruhan berita, yaitu 17 (56.7%).

*Berita Harian* mengutamakan pesan integrasi manakala *Kompas* mengutamakan pesan netral. Hal ini menunjukkan bahwa media Malaysia mengupayakan agar hubungan baik yang terjalin lama antara Malaysia dengan Indonesia tidak tercemar oleh isu Ambalat. Bagi *Kompas*, hampir seluruh berita mengandung pesan netral karena *Kompas* lebih menitikberatkan pada fakta di lapangan mengenai masuknya kapal milik Tentera Laut Diraja Malaysia ke wilayah Indonesia di perairan Ambalat. Terdapat beberapa tulisan di *Kompas* yang mengandung pesan disintegrasi. Hal itu disebabkan beberapa sumber yang diwawancarai oleh *Kompas* meluapkan emosinya ke atas Malaysia yang membuat provokasi di perairan Ambalat. Kesimpulannya, *Berita Harian* yang merupakan salah satu pers Malaysia lebih menginginkan Malaysia dan Indonesia untuk tidak bermusuhan. *Kompas* memberikan pesan yang cenderung ke arah *netral* dan menyerahkan keputusan mengenai perselisihan Indonesia dan Malaysia mesti dilanjutkan atau tidak kepada pemerintahan dan masyarakat Indonesia.

### *Framing*

Setiap pemberitaan dalam media pasti mengandung aspek-aspek tertentu yang ditekankan dan ditonjolkan secara ketara sehingga seakan-akan pesan dalam berita tersebut diatur dalam satu bidang tertentu. Pemingkaiannya inilah yang disebut sebagai *framing*. Bagi isu Ambalat,

terdapat tiga *framing* yang digunakan, yaitu etika, hukum, dan politik. Analisis *framing* ke atas pemberitaan *Berita Harian* dan *Kompas* mengenai isu Ambalat menghasilkan statistik seperti pada Tabel 4 di bawah ini.

**Tabel 5.11. Framing Berita Ambalat**

<i>Framing</i>	<i>Berita Harian</i>		<i>Kompas</i>	
	F	%	F	%
Etika	6	50	8	26.7
Hukum	0	0	0	0
Politik	6	50	22	73.7
<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Dari 12 berita mengenai isu Ambalat yang dipaparkan oleh *Berita Harian*, enam berita (50%) diatur dengan *framing* etika. Enam berita (50%) lainnya disusun dalam *framing* politik. Artinya, *framing* pemberitaan oleh *Berita Harian* mengenai isu Ambalat adalah seimbang antara etika dengan politik.

Bingkai *Kompas*, berbeda daripada bingkai *Berita Harian*, lebih kepada *framing* politik, yaitu sebanyak 22 berita (73.7%). Hal ini menunjukkan bahwa isu sengketa ke atas perbatasan wilayah di perairan Ambalat dilihat oleh *Kompas* sebagai isu politik. Isu ini muncul pada musim pemilihan presiden Indonesia dan digunakan oleh calon-calon presiden sebagai agenda politik mereka dengan tujuan untuk menarik pemilih. Kesimpulannya, isu Ambalat dilihat sebagai isu politik oleh *Kompas*, sementara *Berita Harian* melihat isu tersebut berada antara isu politik dan etika. Hal tersebut karena *Berita Harian* lebih menanggapi sikap masyarakat Indonesia terhadap Malaysia yang mengandung sentimen kebencian.

## **Framing Berita Ambalat**

### **Berita Harian**

*Berita Harian* mengangkat isu politik mengenai sengketa perbatasan wilayah di perairan Ambalat, Laut Sulawesi, yang menjadi berita hangat di media Indonesia maupun media Malaysia pada pertengahan 2009. Dua antara pemberitaan tersebut ialah “KL, Jakarta perlu selesai isu Ambalat” dan “Krisis Ambalat dapat selesai cara diplomasi” yang sama-sama dicetak pada 9 Juni 2009.

### a. *Define problems*

*Berita Harian* memberi penekanan kepada jalan penyelesaian isu Ambalat oleh pemerintah Malaysia dan pemerintah Indonesia melalui cara diplomasi. Beberapa saran penyelesaian turut dipaparkan oleh *Berita Harian*. Selain itu, *Berita Harian* juga menegaskan bahwa penyebab isu Ambalat menjadi panas yaitu pihak-pihak tertentu di Indonesia yang menggunakan isu Ambalat sebagai agenda politik ketika kampanye pemilihan umum Presiden Indonesia 2009.

### b. *Diagnose causes*

Dalam berita “Krisis Ambalat dapat selesai cara diplomasi”, wartawan secara tidak langsung menyalahkan sikap calon presiden Indonesia dalam pemilu pada tahun 2009. Mereka memanfaatkan isu sensitif mengenai persoalan kedaulatan negara sebagai agenda politik untuk meningkatkan semangat nasionalisme rakyat. Di samping itu, berita tentang kapal milik Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) yang melanggar wilayah perairan Indonesia di kawasan Ambalat merupakan puncak tercetusnya ketegangan antara Indonesia dengan Malaysia. Isu ini kemudian banyak dilaporkan dalam media di Indonesia sehingga merangsang rasa nasionalisme masyarakat yang ingin mempertahankan kedaulatan. Kedaulatan merupakan isu sensitif bagi rakyat Indonesia. Isu Ambalat dijadikan agenda politik bagi pihak-pihak tertentu menjelang Pemilu Presiden.

### c. *Moral Judgments*

Penilaian moral yang ditekankan oleh *Berita Harian* adalah kawasan Ambalat sudah dihasilkan *moratorium*, yaitu penangguhan pelaksanaan suatu perencanaan, dan Malaysia menghormati *moratorium* tersebut. Hal ini dinyatakan oleh Presiden dan Ketua Eksekutif Petronas, Tan Sri Mohd Hassan Merican:

“Kawasan Ambalat dikenakan moratorium (penangguhan pelaksanaan sesuatu rancangan). Kedua-dua pemerintahan perlu memersetujui sesuatu peraturan sebelum dapat dilakukan sesuatu. Bagi pihak kami, kami menghormati moratorium itu.” (petikan daripada “KL, Jakarta perlu selesai isu Ambalat”, (*Berita Harian*, 9 Juni 2009).

Selain itu, perwakilan dari kedua negara bertemu untuk mendiskusikan isu Ambalat. Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri

Dr Ahmad Zahid Hamidi memberikan saran supaya kedua negara menghentikan patrol di kawasan Ambalat untuk sementara waktu sehingga isu perbatasan ini diselesaikan (*Berita Harian*, 9 Juni 2009).

#### d. *Treatment recommendations*

Kedua negara perlu menyelesaikan isu Ambalat melalui jalan diplomasi secara menyeluruh dan berorientasi untuk jangka masa panjang. Saran yang dapat dilaksanakan adalah mengkaji kembali peraturan bagi menghindari insiden di laut yang sudah disetujui oleh TLDM dan Tentera Nasional Indonesia-Angkatan Laut (TNI-AL). Selain itu, kedua negara juga perlu melakukan perundingan perbatasan laut; mewujudkan kawasan kerjasama eksplorasi sumber perikanan, minyak dan gas atau mengekalkan *status quo* untuk tidak sama-sama mengeksploitasi sumber perikanan, minyak dan gas; dan melibatkan pihak internasional, dalam hal ini *International Justice Court*, bagi memutuskan perbatasan kelautan.

### **Kompas**

Isu sengketa perbatasan wilayah di perairan Ambalat, Laut Sulawesi, serta jalan penyelesaiannya menjadi topik utama *Kompas* pada pertengahan tahun 2009. Mengenai isu tersebut, *Kompas* melihatnya sebagai isu politik. Dua dari beberapa judul berita mengenai isu tersebut ialah, “Merah Putih berkibar: Penyelesaian Ambalat tetap lewat diplomasi” yang diterbitkan pada 4 Juni 2009 dan “Sengketa Ambalat: RI-Malaysia sepakat mendinginkan suasana” yang diterbitkan 11 Juni 2009.

#### a. *Define problems*

*Kompas* menekankan bendera Merah Putih berkibar di bagan milik nelayan pulau Sebatik dan Nunukan di perairan blok Ambalat sebagai langkah penegasan bahwa wilayah tersebut masih milik Indonesia. Sementara itu, pemerintah Republik Indonesia (RI) dan pemerintah Malaysia sepakat untuk mendinginkan suasana akibat ketegangan di perbatasan kawasan perairan blok Ambalat. Upaya mendinginkan suasana dapat dimulai dengan pengurangan aktivitas patroli kapal TLDM di kawasan tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Indonesia, Juwono Sudarsono, seperti dikutip dari *Kompas* 11 Juni 2009.

## b. *Diagnose causes*

Sumber masalah dari ketegangan Indonesia-Malaysia ke atas perbatasan wilayah perairan Ambalat ialah pencerobohan kapal perang milik Malaysia sepanjang tahun 2009 yang dicatatkan sudah sebanyak 13 kali. Pernyataan ini sesuai yang disampaikan Kepala Staf TNI-AL Tedjo Edhy Purdijatno. Sementara itu, Komandan Gugus Tempur Wilayah Indonesia Timur Laksamana Pertama, RM Harahap, mengatakan:

“Semuanya biasa saja. Kesalahan mereka (kapal Malaysia) adalah masuk jauh ke tempat kita seperti pukul 07.00 tadi sejauh satu mil. Tugas kami sebagai TNI-AL menggiring mereka kembali ke Malaysia.” (petikan daripada “Merah Putih berkibaran: Penyelesaian Ambalat tetap lewat diplomasi”, *Kompas*, 4 Juni 2009).

Hal ini semakin menguatkan bahwa ketegangan antara Indonesia dengan Malaysia terkait isu Ambalat disebabkan oleh provokasi kapal perang milik Malaysia.

## c. *Moral Judgments*

Penilaian moral yang coba diangkat oleh *Kompas* ialah kesalahpahaman antara Indonesia dan Malaysia mengenai wilayah Hak Daulat di wilayah Ambalat. Hak Daulat ialah hak yang ditegakkan ke atas wilayah perairan sejauh 12 mil hingga 24 mil dari garis pantai di kontinen. Di wilayah Hak Daulat ini, suatu negara diberi wewenang untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di dalamnya tetapi tidak diberi hak untuk mendirikan kedaulatan. Menteri Pertahanan Indonesia, Juwono Sudarsono, dalam *press conference* tepatnya setelah menerima kunjungan Pemimpin Tentera Malaysia, Jeneral Abdul Aziz Zainal, mengatakan:

“Dalam pertemuan tadi saya sampaikan, masalah sensitif dalam kasus ini terjadi lantaran (karena) muncul persepsi telah terjadi pelanggaran wilayah kedaulatan Indonesia yang serius oleh Malaysia, termasuk di wilayah Hak Daulat (Sovereign Right) tadi. Mereka seharusnya berhati-hati dalam menggelar patroli maritim.” (petikan daripada “Sengketa Ambalat: RI-Malaysia sepakat mendinginkan suasana”, *Kompas*, 11 Juni 2009).

*Kompas* juga menunjukkan bahwa pihak Malaysia telah berjanji mempercepat penyelesaian masalah Ambalat, karena tidak menginginkan peperangan terjadi antara Indonesia dengan Malaysia. Janji tersebut disampaikan oleh wakil Menteri Luar (Negeri) Malaysia,



Kohilan Pilay. Bagi masalah kedatangan Tentera Laut Diraja Malaysia ke bagian nelayan Indonesia di Pulau Sebatik dan Nunukan, belum ada laporan mengenai perusakan nelayan oleh tentara Malaysia. Pengibaran Merah Putih itu dilakukan sebagai langkah pencegahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Komandan Pos Angkatan Laut Sungai Nyamuk, Letnan Dua Sudariyono.

“Sampai sekarang kami tidak menerima laporan perusakan bagan nelayan oleh pihak luar. Tetapi, kami tetap menyarankan nelayan untuk memasang bendera Merah Putih agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.” (petikan “Merah Putih berkibaran: Penyelesaian Ambalat tetap lewat diplomasi”, *Kompas*, 4 Juni 2009).

#### d. *Treatment recommendations*

Dalam pertemuan dengan Pemimpin Tentera Malaysia, Menteri Pertahanan Indonesia, Juwono Sudarsono, menyarankan agar kedua negara mengadakan patroli bersama di wilayah kelautan masing-masing di dekat perbatasan di perairan Ambalat. Beliau juga meminta semua pihak di Indonesia sebaiknya tidak bertindak menurut emosi dan mempelajari pokok permasalahan mengenai isu Ambalat.

Penyelesaian isu Ambalat perlu dilakukan melalui jalan diplomasi, seperti yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Marsekal Muda Sagom Tamboen. Kesimpulannya, baik Malaysia maupun Indonesia sebaiknya mendinginkan suasana untuk sementara waktu sampai keputusan mengenai perbatasan wilayah maritim kedua-dua negara di perairan dekat blok Ambalat telah disepakati bersama. Bila tidak, masalah ini akan mengeruhkan keadaan dan menimbulkan konflik baru yang berakibat buruk pada hubungan politik kedua negara.

### **Pembahasan Isu Ambalat**

Berbagai pemberitaan mengenai isu Ambalat menjadi isu utama di pers Malaysia dan Indonesia. Di *Kompas*, tercatat 30 berita (19 berita, 3 editorial, 3 surat pembaca dan 5 kolom). Format berita mendominasi karena *Kompas* kebanyakan memaparkan informasi isu Ambalat, reaksi masyarakat dan usaha pemerintahan Indonesia untuk menyelesaikan isu tersebut. Berbeda dengan *Kompas*, *Berita Harian* memaparkan pemberitaan mengenai isu Ambalat lebih sedikit, 12 berita saja (5 editorial dan 2 kolom).

Pemberitaan *Berita Harian* dan *Kompas* mengenai isu Ambalat diharapkan dapat mempengaruhi hubungan Indonesia-Malaysia ke arah yang lebih positif melalui fungsi pesan yang ditonjolkan. Fungsi pesan yang diutamakan oleh *Berita Harian* ialah pesan integrasi sedangkan *Kompas* mengutamakan pesan netral. Hal ini menunjukkan *Berita Harian* mengupayakan agar hubungan baik Malaysia-Indonesia tidak terpengaruh oleh isu Ambalat, sementara *Kompas* lebih menitikberatkan pada fakta di lapangan mengenai pencerobohan kapal milik Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) ke wilayah Indonesia di perairan Ambalat. Artinya, *Berita Harian* yang mewakili media Malaysia lebih menginginkan Malaysia dan Indonesia untuk tidak berselisih hanya karena isu sengketa Ambalat. *Kompas* pula sebagai wakil media Indonesia memberikan pesan yang cenderung ke arah *netral* dan menyerahkan keputusan kepada pemerintahan dan masyarakat Indonesia.

Isu Ambalat dinilai sebagai isu politik dan etika oleh *Berita Harian*. *Framing Berita Harian* menunjukkan keseimbangan antara politik (50%) dan etika (50%). Isu etika yang diangkat oleh *Berita Harian* tersebut dengan sikap rakyat dan media Indonesia yang dinilai berlebihan dalam merespon isu Ambalat seperti pada “Baling batu bukan dasar Indonesia” (7 Oktober 2009) dan “Media perlu tingkat kefahaman” (9 Desember 2009). Isu politik pula berkaitan dengan usaha pemerintah Malaysia menyelesaikan isu tersebut melalui diplomasi dengan pemerintah Indonesia “Krisis Ambalat dapat selesai cara diplomasi”, (9 Juni 2009). *Berita Harian* melihat isu Ambalat menimbulkan perselisihan antara Indonesia dengan Malaysia setelah Indonesia menduga kapal milik Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) menceroboh wilayah perairan republik itu di perbatasan Indonesia-Malaysia, di Laut Sulawesi. Isu itu juga semakin panas apabila media Indonesia mengangkatnya sebagai agenda politik, mewakili pihak-pihak tertentu menjelang Pemilu Presiden 2009.

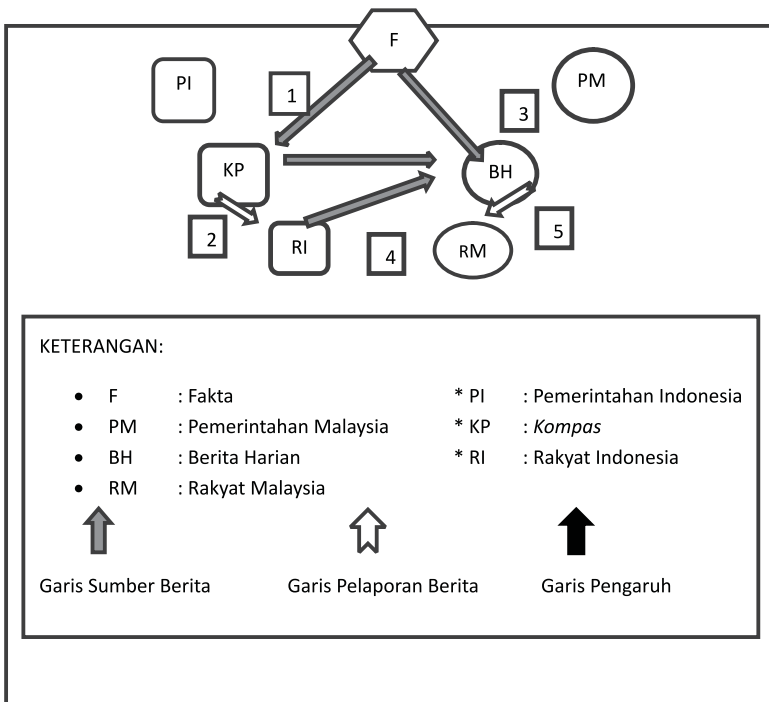
*Framing* yang digunakan *Kompas* dalam mempublikasikan berita Ambalat yaitu *framing* politik dengan jumlah berita sebanyak 22 daripada 30 berita yang ada. Tindakan kapal milik TLDM yang melanggar perbatasan wilayah Indonesia dianggap sebagai tindakan menantang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tercetus ketegangan antara Indonesia dengan Malaysia sehingga mempengaruhi hubungan bilateral antara kedua-dua negara termasuk di bidang politik. *Kompas*

menangkap sumber masalah Ambalat ialah tindakan provokasi kapal perang Malaysia di perairan Ambalat. Menurut Kepala Staf TNI-AL, Tedjo Edhy Purdijatno, pelanggaran wilayah oleh kapal dan pesawat perang milik Malaysia sepanjang tahun 2009 terjadi sebanyak 13 kali.

Banyaknya pemberitaan mengenai isu Ambalat di pers Indonesia termasuk *Kompas* disebabkan kedaulatan bagi rakyat Indonesia ialah harga mati ("Daulat Ambalat itu harga mati", *Kompas*, 3 Juni 2009 hal.15). Isu tersebut semakin semakin panas karena berdekatan dengan pemilu Presiden Indonesia 2009 (*Berita Harian*, 9 Juni 2009). Pemberitaan mengenai isu Ambalat di *Berita Harian* dan media lainnya di Malaysia sedikit karena isu Ambalat bukan isu politik utama di Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa isu Ambalat dianggap penting oleh *Kompas* dan diangkat sebagai agenda umum agar dibicarakan oleh khalayak. *Berita Harian* tidak berpikiran seperti itu. *Agenda Setting Theory* menyatakan bahwa media mampu mempengaruhi khalayak untuk menganggap sesuatu isu itu penting ketika media memberi penekanan terhadap isu tersebut (McCombs & Shaw, 1972). *Kompas* memberi penekanan kepada isu Ambalat sehingga isu tersebut mampu mempengaruhi publik di Indonesia untuk merespon dalam berbagai cara termasuk mengadakan demo menentang Malaysia ("Demo Malaysia: Pendemo minta kirim nota protes", *Kompas*, 4 Juni 2009 hal. 27). Oleh karena itu, reaksi masyarakat yang seperti ini merupakan bukti bahwa agenda dilihat sebagai kunci kepada sesuatu isu untuk menjadi kebijakan publik (Smith, 1997).

Banyaknya pemberitaan mengenai isu Ambalat di *Kompas* juga menunjukkan bahwa *Kompas* mendekati ciri yang dikemukakan oleh Teori Libertarian. Teori ini menjelaskan manusia dianggap memiliki kemampuan untuk memimpin dirinya dan mampu membedakan antara kebenaran dan kesalahan (McQuail, 1987). *Kompas* memberikan pemberitaan dan membiarkan masyarakat Indonesia menganalisis isu yang diperdebatkan dalam pemberitaan tersebut sebagai benar atau salah, sambil menekankan kepentingan isu tersebut. Pers yang mengamalkan teori ini juga mampu mengontrol pemerintahan, seperti *Kompas*. Pernyataan ini dibuktikan dengan beberapa tulisan dalam *Kompas* yang mengkritik pemerintah Indonesia berkaitan dengan isu Ambalat seperti "Kasus Ambalat: Pemerintah jangan lembek" (11 Juni 2009:24) dan "Visi pasangan calon: Krusial, pembangunan pertahanan Indonesia" (5 Juni 2009: 1).

Di lain pihak, *Berita Harian* lebih mendekati ciri teori pers yang memiliki pemerintahan yang mengontrol dan menseleksi berita sebelum disampaikan kepada khalayak. Pers di Malaysia mesti tunduk dan patuh terhadap peraturan yang ditentukan oleh pemerintahan termasuk Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, Akta Fitnah 1957, Akta Hasutan 1948, Akta Rahsia Resmi 1972, dan Akta Keselamatan dalam Negeri 1960. Selain itu, *Berita Harian* juga digunakan untuk membantu melaksanakan kebijakan pemerintahan. Pemberitaan surat khabar ini mengenai isu Ambalat sendiri kebanyakan berkaitan dengan upaya pemerintahan Malaysia menyelesaikan isu Ambalat seperti “KL, Jakarta perlu selesaikan isu Ambalat”, (9 Juni 2009) dan “Krisis Ambalat dapat selesai cara diplomasi”, (9 Juni 2009). Skema proses perputaran informasi antara dua institusi pers ini digambarkan dalam gambar 1.



**Gambar 5.7. Pengaliran Informasi Berita Ambalat**

Gambar 1. terdiri dari tiga komponen utama yang mempengaruhi operasi pers yaitu institusi pers, institusi pemerintah, dan khalayak (Ashandi Siregar, 2001). Gambaran ini menjelaskan tentang alur informasi yang terjadi terhadap isu Ambalat. Nomor satu menunjukkan bahwa ketika terjadi peristiwa pelanggaran wilayah kapal perang Malaysia di

perairan Indonesia, *Kompas* melaporkan berita tersebut kepada rakyat Indonesia. *Berita Harian* pun mencari informasi dan menerbitkan berita tentang isu ini kepada rakyat Malaysia dalam *framing* politik. Beberapa berita juga dibingkai dalam *framing* etika. Hal ini disebabkan topik yang menjadi fokus dalam berita tersebut yaitu media Indonesia yang terlalu mengangkat sensasi isu, calon presiden Indonesia yang memanfaatkan isu untuk mencari popularitas ketika kampanye pemilihan umum Presiden tahun 2009, serta sikap rakyat Indonesia yang dinilai terlalu berlebihan ketika berdemonstrasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa pemberitaan mengenai isu Ambalat dalam *Berita Harian* tidak memenuhi ciri yang dikemukakan oleh Teori Authoritarian karena *Berita Harian* lebih fokus kepada pemaparan informasi mengenai usaha pemerintah Malaysia bersama pemerintah Indonesia menyelesaikan isu tersebut dan tidak ada tanda bahwa berita yang dipaparkan mengkritik pihak berkuasa. Dalam konteks hubungan bilateral dua negara ini, *Berita Harian* telah mempunyai inisiatif dalam upaya menjaga perpaduan negara serumpun. Hal ini terbukti dari jumlah berita mengenai Ambalat mengarah kepada netral dan integrasi. *Kompas* lebih mendekati Teori Libertarian karena lebih fokus kepada penjelasan mengenai perkembangan sengketa Ambalat selain memberikan kritikan kepada pemerintah Indonesia yang dianggap terlalu lemah terhadap pemerintah Malaysia sehingga kasus Ambalat ini masih terus berlanjut.

## **Simpulan**

Indonesia memiliki pers yang lebih bebas dibandingkan dengan Malaysia. Dalam konteks pelaporan berita mengenai Ambalat, *Berita Harian* lebih sering memaparkan berita yang mengarah kepada upaya perpaduan negara serumpun. *Kompas* memiliki kelebihan dalam menampung berbagai pandangan kritis masyarakat tersebut isu mengenai Ambalat. Dalam usaha menjaga harmonisasi hubungan bilateral, maka baik pemerintah Indonesia maupun Malaysia, termasuk semua unsur pertahanan militer perlu mengembangkan berbagai riset akademik guna memastikan dan menjaga objektivitas data dan informasi pers yang sekaligus memerkokoh landasan dalam mengambil langkah proaktif untuk mendukung kebebasan pers yang bersandar pada hukum yang tegas, politik yang stabil, dan ekonomi yang progresif.

## Daftar Pustaka

- Abdul Latiff Abu Bakar, 2009, *Hubungan Malaysia-Indonesia melalui media cetak: satu tafsiran*, Makalah dipresentasikan dalam Seminar Hubungan Indonesia-Malaysia 2009, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Ashandi Siregar, 1983, *Etika komunikasi*. Yogyakarta: Fisipol Universitas Gadjah Mada, 1983.
- Eriyanto, 2002, *Analisis Framing: konstruksi, ideologi, dan politik media*, Yogyakarta: LKIS.
- McCombs, M. E. & Shaw, D, 1972, *The agenda-setting function of mass media*, *Public Opinion Quarterly*, 36, 176 – 187.
- McQuail, D, 1994, *Mass communication theory*, London: Sage Publications.
- Mohd Safar Hasim, 2005, *Akhbar di Malaysia; Antara kebebasan dengan tanggung jawab*. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Mohd. Safar Hasim, 1996, *Mahathir dan Akhbar*, Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distributors. Smith, 1997.
- Schramm, W., Siebert, F, & Peterson, T, 1956, *Four theories of the press: the authoritarian, libertarian, social responsibility and soviet communist concepts of what the press should be and do*. Chicago: University of Illinois.
- Shad Saleem Faruqi & Sankaran Ramanathan, 1998, *Mass media laws and regulation in Malaysia*, Singapore: AMIC.
- Smith, A.,1997, *Political communication*, New York: Harcourt Brace Jovanovich.

# **PROSES GATEKEEPING MEDIA MASSA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL (STUDI KASUS PEMBERITAAN MILITER JAWATIMUR DI SURAT KABAR REGIONAL HARIAN SURYA)**

**Maria Yuliasuti & Yuli Nugraheni**

## **Kasus Militer di Media Massa Indonesia**

Banyak kasus yang melibatkan organisasi militer terjadi di Jawa Timur. Tercatat pada Oktober 2011 kasus korban tabrak lari oknum polisi Lettu Joko Sumantri di Malang Jawa Timur. Kasus tersebut sudah terlunta-lunta 18 tahun lamanya dari tahun 1993. Diduga kuat pihak penyidik sengaja tidak memroses perkara tersebut, hingga dokumen tidak pernah sampai ke oditur militer. Perkara ini ditangani oleh Pengadilan Militer Surabaya (Mulyono, 2011). Muncul kasus tiga belas tersangka anggota Marinir sebagai pelaku penembakan empat warga Desa Alas Telogo, Pasuruan, Jawa Timur yang cukup menegangkan. Kasus yang terjadi pada tahun 2008 ini ditangani oleh Mahkamah Militer (Sup, 2009).

Kasus lain adalah ditemukannya 25 kasus sengketa tanah di Jawa Timur yang terjadi sejak tahun 2004, yang secara keseluruhan telah melibatkan organisasi militer. Ditemukan bahwa TNI Angkatan Laut terlibat dalam 12 kasus, TNI Angkatan Darat tujuh kasus, dan TNI Angkatan Udara enam kasus dengan total tanah yang disengketakan mencapai 15.374,29 hektar. Jumlah ini sebagian besar terjadi karena perampasan tanah yang dilakukan pihak militer, sengketa tanah ini biasanya meliputi pengambilan tanah untuk kepentingan bisnis militer dan pusat latihan tempur yang kadang dilakukan dengan cara kekerasan (TI, 2009).

Banyak kasus yang melibatkan organisasi militer di Jawa Timur inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi *SURYA* yang merupakan media massa regional di Jawa Timur. Hal ini disebut sebagai tantangan karena berkaitan erat dengan tanggungjawab media, yang tidak hanya menginformasikan tetapi sekaligus juga mempertimbangkan efek ke depannya. Bisa jadi berdampak pada menurunnya citra organisasi militer yang akhirnya memperburuk ketahanan nasional di daerah pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

### **Harian Regional Jawa Timur “*SURYA*”**

Di Jawa Timur telah hadir surat kabar harian regional *SURYA* yang sangat berperan aktif dalam pemberitaan, khususnya informasi seputar regional Jawa Timur. Telah terbukti dari prinsip dasar yang telah disusun oleh harian *SURYA* di dalam ‘*Company Profile* Harian *SURYA*, Januari 2012’, sebagai berikut:

“Harian *SURYA* saat ini telah memosisikan dirinya sebagai koran regional no.1 di Jawa Timur, ini jelas terbaca dalam rumusan visinya yang menyatakan menjadikan *SURYA* sebagai perusahaan media informasi terbesar, terpadu, dan terbaik di Jawa Timur melalui penerbitan surat kabar regional dan *online* dengan menyajikan informasi yang terpercaya. Hal ini juga didukung oleh konsep editorial yang disajikan Harian *SURYA* yaitu secara isi 80% berisi berita regional atau daerah Jawa Timur dan 20% berita nasional dan internasional.

*SURYA* memiliki sejarah kepemilikan sebagai berikut: berawal dari Minggu *SURYA* yang dimiliki Grup Pos Kota kemudian beralih ke Harian *SURYA* yang dimiliki oleh Kompas Gramedia Group. *SURYA* tergabung dalam kelompok media Kompas Gramedia, Tribune (Group of regional *newspaper*), [surya.co.id](http://surya.co.id) (portal Surabaya terkini). Sejarah kepemilikan *SURYA* mulai pada 26 Juni 1986 *SURYA* terbit secara mingguan dan dimiliki grup Pos Kota. Pada 10 November 1989 *SURYA* terbit secara harian dan dimiliki oleh dua grup media yaitu Grup Pos Kota dan Grup Kompas Gramedia. Perkembangan terakhir adalah pada Mei 2001 *SURYA* tetap terbit secara harian dan dimiliki secara penuh oleh Grup Kompas Gramedia.

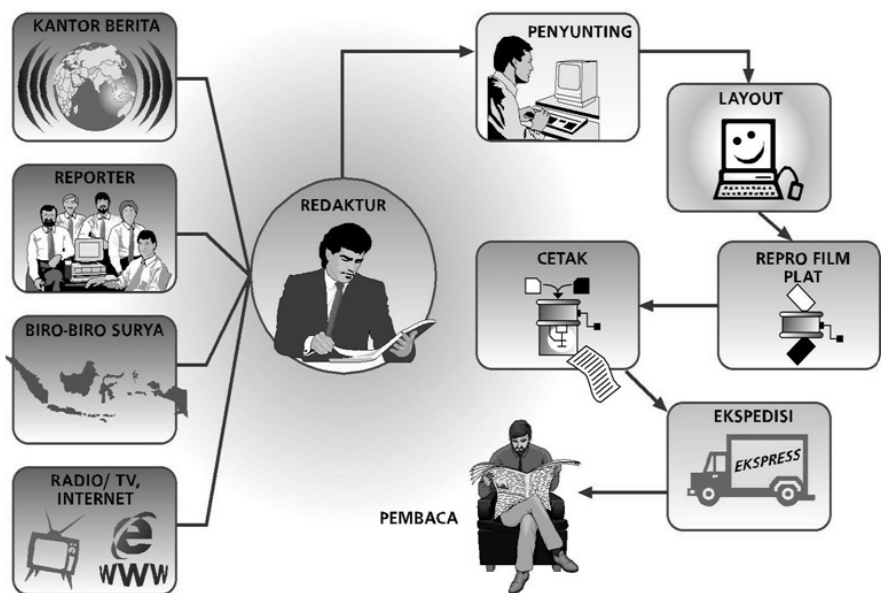
Misi Harian *SURYA* adalah menjalankan bisnis secara sehat yang menguntungkan bagi *shareholder*, karyawan, dan masyarakat. Jika dicermati masyarakat menjadi bagian dari misi utama Harian *SURYA*. Sejak 1 Januari 2011 bidang usahanya dikembangkan pada 2 unit usaha yaitu penerbitan dan jasa percetakan. Penerbitan dikelola oleh PT Antar Surya Media sedangkan jasa percetakan dikelola oleh PT Antar Surya Jaya (Gramedia Surabaya Plant) yang



melayani percetakan dalam grup sendiri yaitu Harian SURYA, Harian KOMPAS, Tabloid Nova, Tabloid Bola, Tabloid Otomotif, Tabloid Otoplus, Tabloid Soccer, dan juga melayani percetakan di luar grup.

Harian SURYA terbit dengan rata-rata jumlah 20 halaman dengan oplah mencapai 155.000 eksemplar. Segmen pasar harian SURYA dikhususkan pada pembaca dengan rentang usia dewasa 20-60 tahun. Sementara jika ditinjau dari komposisi jenis kelamin profil pembaca Harian SURYA adalah pria sebesar 60% dan wanita sebesar 40%. Perimbangan antara pelanggan tetap dan eceran hampir sama yaitu sebesar 46% dan 54%. Nilai berita yang dianut oleh Harian SURYA adalah baru, tragedi atau bencana, konflik, glamor, seks, human interest, kedekatan, prominence.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan Harian SURYA dalam mengelola bisnis informasi ini adalah keinginan konsumen, kecenderungan perubahan sosial, kiat-kiat pesaing, mencermati perubahan teknologi, ekonomi, sosial, dan politik. Sementara proses produksi Harian SURYA adalah (lihat gambar 1).



**Gambar 5.8. Proses Produksi Surat Kabar**

Sumber: *Company Profile Harian Surya* 2012.

## **Teori Fungsi Media Massa**

Tidak dapat dipungkiri bahwa media massa memiliki peran besar dalam pembangunan negara. Media massa sejalan dengan fungsinya mampu memberikan informasi, korelasi, keberlanjutan, hiburan, dan mobilisasi, seperti yang disampaikan oleh McQuail (2011a: 108) sebagai berikut:

Fungsi informasi berarti media harus mampu:

1. Menyediakan informasi mengenai peristiwa dan kondisi dalam masyarakat dan dunia;
2. Menunjukkan adanya hubungan kekuatan;
3. Memberikan sarana bagi inovasi, adaptasi dan pertumbuhan.

Fungsi korelasi berarti media harus mampu:

1. Menjelaskan, menafsirkan, dan memberikan komentar atas makna peristiwa dan informasi;
2. Menyediakan dukungan untuk kekuasaan dan norma yang mapan
3. Sosialisasi;
4. Mengatur aktivitas yang terpisah;
5. Membangun konsensus;
6. Mengatur tatanan prioritas dan melambangkan status relatif.

Fungsi keberlanjutan berarti media harus mampu:

1. Mengekspresikan budaya dominan dan memahami perkembangan kultur dan subkultur yang baru;
2. Mendorong dan memelihara kesamaan nilai.

Fungsi hiburan berarti media harus mampu:

1. Menyediakan kesenangan, pengalihan, dan sebagai alat relaksasi;
2. Mengurangi tekanan sosial.

Fungsi mobilisasi media harus mampu:

Mengampanyekan tujuan sosial di ranah politik, perang, perkembangan ekonomi, pekerjaan, dan terkadang agama.

George Gerbner dalam Stephen W Littlejohn menyimpulkan pentingnya media massa sebagai berikut kemampuan untuk menciptakan masyarakat, menjelaskan masalah, memberikan referensi umum, dan memindahkan perhatian dan kekuasaan (Littlejohn, 2011: 405)

Di sisi lain Laswell dalam Littlejohn mengidentifikasi fungsi-fungsi utama media komunikasi yaitu pengamatan (*surveillance*), memberikan informasi tentang lingkungan, memberikan pilihan untuk memecahkan masalah, atau hubungan (*correlation*), dan sosialisasi serta pendidikan yang dikenal dengan transmisi (*transmission*). Oleh sebab itu, yang penting bagi komunikasi massa adalah media itu sendiri (LittleJohn, 2011: 407).

Memasuki usia ke 67 tahun ini, Indonesia masih terus menerus dihadapkan pada masalah demi masalah yang tak kunjung usai. Berbagai pemberitaan negatif dalam dunia militer Indonesia tidak lepas dari sorotan media massa. Berbagai metafora telah diciptakan untuk untuk mengartikan aspek-aspek media Denis Mc Quail (dalam LittleJohn, 2011:407) memberikan delapan metafora tersebut yaitu:

1. Media merupakan jendela (*windows*) yang memungkinkan kita untuk melihat lingkungan kita lebih jauh;
2. Media menjadi penafsir (*interpreter*) yang membantu kita memahami pengalaman;
3. Media menjadi landasan (*platform*) atau pembawa yang menyampaikan informasi;
4. Media merupakan komunikasi interaktif (*interactive communications*) yang meliputi opini audiens;
5. Media sebagai penanda (*signpost*) yang member kita instruksi atau petunjuk;
6. Media sebagai penyaring (*filter*) yang membagi pengalaman dan fokus pada orang lain;
7. Media sebagai cermin (*mirrors*) yang merefleksikan diri kita;
8. Media sebagai penghalang (*barriers*) yang menutupi kebenaran.

Di sinilah tantangan yang harus dihadapi oleh media massa khususnya surat kabar yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan dengan media massa lainnya.

### **Surat Kabar sebagai Media Massa**

Dikatakan bahwa komunikasi massa merupakan proses organisasi surat kabar merupakan salah satu bentuk media massa, dimana didukung oleh pendapat Pool (dalam Wiryanto, 2000: 3) bahwa "Komunikasi

yang berlangsung dalam situasi interposed ketika antara sumber dan penerima tidak terjadi kontak secara langsung, pesan-pesan komunikasi mengalir kepada penerima melalui saluran-saluran media massa, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi atau film". Surat kabar sebagai salah satu media cetak memiliki karakteristik yang berbeda dibanding dengan media massa lainnya. Berikut kutipan yang diambil dari Effendy (1994: 154-155) sebagai berikut:

a. Publisitas

Bahwa surat kabar diperuntukkan umum; karenanya, berita, tajuk rencana, artikel, dan lain-lain harus menyangkut kepentingan umum.

b. Universalitas

Universalitas sebagai ciri lain dari surat kabar menunjukkan bahwa surat kabar harus memuat aneka berita mengenai kejadian-kejadian di seluruh dunia dan tentang segala aspek kehidupan manusia.

c. Aktualitas

Yang dimaksud dengan aktualitas adalah kecepatan penyampaian laporan mengenai kejadian di masyarakat kepada khalayak. Bagi surat kabar aktualitas ini merupakan faktor yang sangat penting karena menyangkut persaingan dengan surat kabar yang lain dan berhubungan dengan nama baik surat kabar yang bersangkutan.

Karakteristik surat kabar inilah yang menjadikan media ini tetap ada hingga saat ini. Surat kabar mampu memenuhi fungsinya sebagai media massa seutuhnya. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi surat kabar.

### **Teori Fungsi Surat Kabar**

Mengikuti perkembangan yang ada, surat kabar kini tidak lagi hanya memiliki fungsi sebagai penyebar informasi saja, tetapi juga memiliki fungsi yang lain. Berikut kutipan yang disampaikan oleh Effendy (1994: 149):

1. Fungsi menyiarkan informasi (*to inform*)

Merupakan fungsi pers yang pertama dan utama. Khalayak pembaca berlangganan atau membeli surat kabar karena memerlukan informasi mengenai berbagai hal, mengenai peristiwa yang terjadi, gagasan atau pikiran orang lain, apa yang dilakukan oleh orang lain, apa yang dikatakan oleh orang lain dan sebagainya;

## 2. Fungsi mendidik (*to educate*)

Sebagai sarana pendidikan massa, surat kabar dan majalah, televisi dan radio memuat tulisan-tulisan, dan tanyangan-tayangan yang mengandung pengetahuan sehingga khalayak pembaca bertambah pengetahuannya;

## 3. Fungsi menghibur (*to entertain*)

Hal-hal yang bersifat hiburan sering dimuat oleh surat kabar dan majalah untuk mengimbangi berita-berita berat dan artikel yang berbobot;

## 4. Fungsi mempengaruhi (*to influence*)

Peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi mempengaruhi media massa secara implisit terdapat pada tajuk rencana dan artikel.

Selama ini suatu organisasi yang memiliki keterkaitan dengan militer, seringkali dianggap sebagai sesuatu yang negatif -dalam arti tertutup. Banyak kasus peradilan militer yang masih menjadi pekerjaan rumah panjang hingga kini belum terselesaikan. Ujungnya justru semakin memperburuk citra organisasi militer sendiri. Dengan bergulirnya waktu, organisasi militer mulai mencoba sedikit demi sedikit memperbaiki citranya. Baik dengan membangun relasi lebih dekat dengan masyarakat melalui media massa baik cetak, elektronik, maupun *online*.

Tampaknya citra negatif masih belum bisa benar-benar lepas dari militer. Kasus-kasus yang melibatkan pihak militer tidak juga tuntas, justru bertambah. Pada dasarnya, media massa telah menjalankan fungsinya guna menyampaikan informasi kepada khalayaknya. Pemberitaan di media massa tentang perkembangan negara tidak pernah dilewatkan, tanpa terkecuali dalam kasus militer. Dalam hal ini, tentunya perlu dilakukan analisis apakah media massa sebagai perpanjangan mata khalayak telah bersikap bijak dalam pemilihan berita mengenai militer? Ataukah pihak militer yang masih harus bekerja keras lagi demi meningkatkan citra positif?

## **Proses *Gatekeeping* di Ruang Redaksi**

Mempertimbangkan banyaknya penelitian media yang menggunakan analisis isi media dan masih jaranganya pendekatan *news room*

atau ruang redaksi digunakan. Maka tulisan ini akan lebih banyak menyoroti ruang redaksi (*news room*) secara menyeluruh. Sudut pandang media dalam menentukan kebijakan redaksionalnya berkaitan dengan pemberitaan militer akan sangat menarik jika digali lebih dalam.

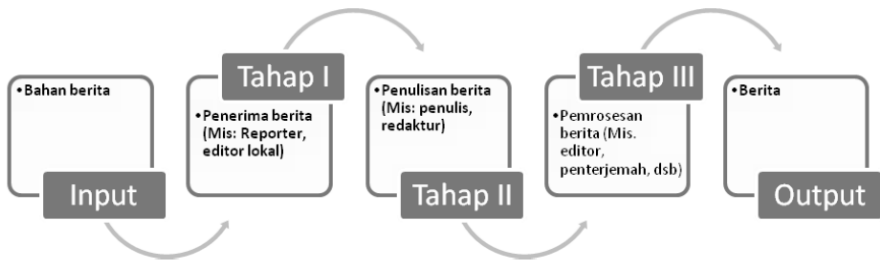
Permasalahan keredaksionalan tentunya tidak lepas dari proses *gatekeeping* yang disampaikan oleh White (dalam Eriyanto, 2012: 3), bahwa terdapat proses seleksi atau pemilihan berita dalam ruang redaksi. Ruang redaksi merupakan 'dapur' dari banyak kepentingan yang akhirnya menghasilkan berita media. Dalam ruang redaksi akan ada banyak proses yang harus dilakukan, mulai dari pencarian bahan berita, diseleksi, diproses hingga disajikan kepada khalayak lewat berita.

Proses perubahan dari bahan mentah berita menjadi berita yang siap disajikan inilah yang disebut White sebagai *gatekeeping*. Banyaknya teori dan model dari *gatekeeping*, maka oleh Eriyanto dibagi ke dalam tiga kategori (Eriyanto, 2012: 3-6), yaitu; *pertama*, *gatekeeping* merupakan proses internal dalam ruang redaksi media. *Kedua*, *gatekeeping* sebagai proses eksternal yang berpengaruh pada ruang redaksi. *Ketiga*, *gatekeeping* sebagai proses internal sekaligus eksternal dalam ruang redaksi.

Ketiga kategori tersebut memiliki fokus masing-masing, dan kategori pertama inilah yang dibahas secara lebih detail. Kategori *pertama*, fokus pada *gatekeeping* yang merupakan proses internal dalam ruang redaksi media. Berangkat dari pemahaman yang disampaikan McQuail dan Windahl (dalam Eriyanto, 2012: 3) bahwa:

"*Gatekeeping* merupakan proses internal dalam ruang redaksi media. Menurut pandangan ini, *gatekeeping* adalah proses yang terjadi dalam ruang redaksi (*newsroom*) media. Ruang redaksi seperti sebuah mesin produksi, dimana bahan diolah dan diproses hingga menjadi produk berupa berita. Penelitian dari perspektif ini memusatkan perhatian pada proses dan tahapan yang terjadi dari bahan berita hingga menjadi berita yang diterima oleh khalayak.

Secara sederhana *gatekeeping* dalam pandangan ini bisa digambarkan sebagai berikut: bahan dan sumber berita disaring oleh pencari berita (misalnya reporter lapangan). Dari bahan berita itu, kemudian ditulis (misalnya oleh penulis dan redaktur). Tulisan ini kemudian disunting sebelum akhirnya diterbitkan ke dalam media. Di semua tahapan tersebut, terdapat proses seleksi sehingga akan selalu terjadi perbedaan antara bahan mentah dengan berita yang akhirnya tersaji di media. Organisasi media mempunyai standar tersendiri (misalnya apa yang layak dan tidak layak, tekanan *deadline*, keterbatasan ruang atau halaman, konsepsi mengenai nilai berita dan sebagainya) yang menentukan proses *gatekeeping*."



**Gambar 5.9. Proses Gatekeeping**

Sumber: adaptasi dari McQuail and Windahl (1996: 171)

Istilah *gatekeeping* telah secara luas digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan proses dimana seleksi dibuat dalam kerja media, terutama keputusan mengenai apakah dibolehkan atau tidak sebuah laporan berita tertentu melewati pintu media berita ke dalam saluran berita (Mc Quail, 2011b: 42).

Proses filter ini dilakukan oleh media tentunya memiliki tujuan tertentu. Berangkat dari visi dan misi media, diharapkan apa yang diberitakan oleh media tidak berbeda dengan prinsip yang telah ditetapkan. Media memiliki peran dalam memperkuat ketahanan nasional, dengan membangun dan mencerdaskan bangsa melalui fungsinya. Kekuatan nasional ini secara langsung dan tidak langsung semakin menambah integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa, dan negara dalam perjuangan mengejar tujuan nasional bersama.

### **Ketahanan Nasional**

Ketahanan nasional merupakan salah satu kekuatan besar yang muncul dari kesejahteraan dan keamanan yang seimbang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Kesejahteraan tercermin dari tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai nasional guna meningkatkan kemakmuran yang adil dan merata. Dalam hal ini keamanan dapat dilihat dari kemampuan bangsa dalam melindungi serta mempertahankan nilai-nilai nasional, baik ancaman dari luar maupun dari dalam. Didukung pula dengan asas-asas ketahanan nasional yang menjadi dasar nilai-nilai yang telah disusun dari Pancasila dan UUD 1945. Asas-asas ketahanan nasional tersebut adalah sebagai berikut (Lemhannas, 2000: 99 – 11).

a) Asas Kesejahteraan dan Keamanan

Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Didalam kehidupan nasional berbangsa dan bernegara, unsur kesejahteraan dan keamanan ini biasanya menjadi tolak ukur bagi mantap atau tidaknya ketahanan nasional;

b) Asas Komprehensif (menyeluruh terpadu)

Artinya, ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan. Aspek-aspek tersebut berkaitan dalam bentuk persatuan dan perpaduan secara selaras, serasi, dan seimbang;

c) Asas kekeluargaan

Asas ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal hidup dengan asas kekeluargaan ini diakui adanya perbedaan, dan kenyataan real ini dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik yang bersifat merusak atau destruktif.

Pada intinya, asas ketahanan nasional ini merupakan suatu kebutuhan yang secara sadar atau tidak perlu dipenuhi karena memiliki peran penting untuk membangun negara. Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan tidak hanya sekedar menjadi hiasan semata. Sila 'Persatuan Indonesia' secara eksplisit menyampaikan ketahanan nasional, diterjemahkan oleh UUD 1945 sebagai negara kesatuan, dan harus dipertahankan. Pada pasal 30 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa: 'Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara'. Tanpa terkecuali tentunya peran dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat Indonesia sebagai kekuatan pendukung.

Bertolak belakang dengan perannya sebagai pemilik kekuatan utama, justru TNI dan Kepolisian Negara RI memiliki citra negatif. Dua komponen antara dunia militer dan media massa sedikit bergesekan untuk kasus ini. Media massa tampak 'galau' untuk tetap terus mendukung citra positif dunia militer Indonesia dan menyediakan informasi bagi rakyat Indonesia.



## **Analisis Proses *Gatekeeping* di Surat Kabar Regional Harian SURYA dalam Upaya Peningkatan Ketahanan Nasional**

Banyaknya kasus yang melibatkan organisasi militer di Jawa Timur, membuat surat kabar *SURYA* sebagai harian regional di Jawa Timur harus terlibat aktif seturut fungsinya sebagai media massa. Karakteristiknya surat kabar Harian *SURYA* yang diperuntukkan untuk umum telah dipenuhi (*publisitas*), begitu pula dengan rubriknya yang sangat variatif mulai dari *hard news* sampai *soft news* telah tersaji dengan berbagai kemasan berita (*universalitas*), juga didukung aktualitas berita yang tersaji dengan kecepatan penyampaian laporan mengenai kejadian di masyarakat.

Dua komponen antara dunia militer dan media massa bertemu, seringkali sedikit bergesekan untuk kasus ini. Media massa seturut fungsinya sebagai sumber informasi diharapkan mampu menyampaikan informasi sesuai fakta yang terjadi. Begitu halnya dengan Harian *SURYA* sesuai dengan prinsip dasar yang telah disusun oleh harian *SURYA* di dalam '*Company Profile Harian SURYA, Januari 2012*', sebagai berikut:

"Harian *SURYA* saat ini telah memposisikan dirinya sebagai koran regional no.1 di Jawa Timur, ini jelas terbaca dalam rumusan visinya yang menyatakan menjadikan *SURYA* sebagai perusahaan media informasi terbesar, terpadu dan terbaik di Jawa Timur melalui penerbitan surat kabar regional dan online dengan menyajikan informasi yang terpercaya. Hal ini juga didukung oleh konsep editorial yang disajikan Harian *SURYA* yaitu secara isi 80% berisi berita regional atau daerah Jawa Timur dan 20% berita nasional dan internasional."

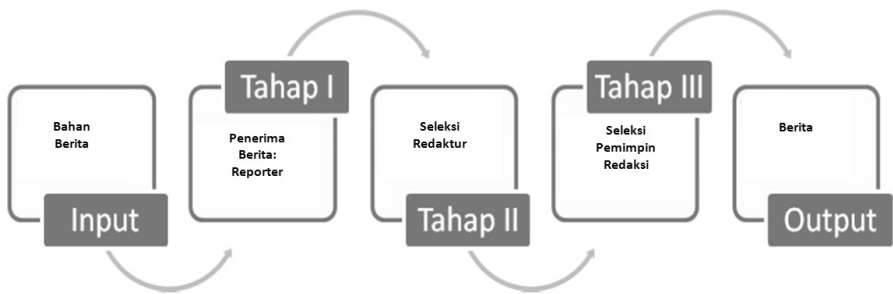
Tanpa terkecuali informasi mengenai organisasi militer yang cukup marak di Jawa Timur. Menurut Soenarko - Pemimpin Redaksi Harian *SURYA*, berita militer adalah berita yang mempunyai sangkut paut dengan militer, baik langsung maupun tidak langsung. Sangat berbeda dengan kasus kriminalitas, kasus militer selalu punya sangkut paut dengan kekuasaan. Dalam memproduksi berita militer Harian *SURYA* menjadi lebih ekstra hati-hati. Seandainya ditemukan kasus yang melibatkan salah satu anggota organisasi militer, Harian *SURYA* tidak menggunakan sebutan anggota militer tetapi oknum militer. Pilihan kata ini digunakan untuk tidak serta merta secara eksklusif langsung menunjuk militer. Hal inipun juga diterapkan di media lain seperti apa yang telah disampaikan Soenarko.

*Check and recheck* selalu dilakukan dan menjadi *Standard Operating Procedures* (SOP) dalam produksi beritanya. Harian SURYA berusaha untuk lebih disiplin, karena menurut Soenarko masalah militer adalah masalah sensitif. Militer merupakan alat Negara yang berperan besar untuk mendukung pembangunan negara. Dalam penulisan beritanya, sumber berita yang diambil harus sumber berita primer, tidak akan berani mengambil sumber berita sekunder. Bentuk sajian berita militer ini seringkali disajikan dalam bentuk *hard news* bukan dalam bentuk *developing news* ataupun *continuing news*. Dalam hal ini setiap elemen baik wartawan, redaktur maupun pemimpin redaksi dituntut untuk memahami *Wawasan SURYA* yaitu cara pandang SURYA untuk melihat persoalan atau isu.

*Wawasan SURYA* dalam hal ini merupakan sebuah pedoman yang terus dipegang teguh dan dilaksanakan dalam prosesnya. Berangkat dari visi misi, Harian SURYA menelurkan *editorial policy* yang kemudian dipegang teguh mulai dari pemimpin redaksi hingga redaktur. Turun untuk diterapkan pula pada jajaran wartawan, dimana pada prakteknya prinsip pemilihan berita mana yang sensitif dan yang tidak sudah menjadi pemahaman bersama. Pada jajaran wartawan tingkat prosentase pemahaman *editorial policy* tidak sebesar pemahaman para redaktur, antara 60-70 % wartawan Harian SURYA paham *editorial policy*.

Mengapa hanya 60-70 % saja wartawan Harian SURYA paham *editorial policy*? Soenarko menjelaskan memang Harian SURYA tidak ingin terlalu mendoktrin wartawan untuk membatasi terlalu ketat sumber informasi yang dipilih. Wartawan lebih diberikan pada pilihan untuk melakukan penelusuran secara keseluruhan tanpa filter. Setelah dituangkan dalam bentuk tulisan, maka di tangan redaktur tulisan tersebut sedikit demi sedikit mengalami seleksi. Baik dari sudut pandang pemberitaan maupun pilihan kata dalam penulisan, bahkan keputusan untuk dimuat atau tidak. Keputusan akhir tetap ada di tangan pemimpin redaksi. Dalam hal ini adalah pemberitaan militer, dimana memiliki pemahaman *editorial policy* yang berbeda. Bukan hanya pada konsep pemberitaan saja, namun lebih pada keputusan *wisdom*. Soenarko menegaskan seringkali jika dilihat dari konsep pemberitaan, kasus militer yang ditemukan memiliki *news value* yang tinggi, tetapi jika dilihat dari sisi *wisdom* itu sangat riskan.

Pemahaman antara *wisdom* dan riskan atau beresiko inilah yang tidak ditanamkan pada wartawan, karena wartawanlah yang berada di lapangan. Wartawan merupakan perpanjangan mata yang tahu secara langsung dan menemukan fakta-fakta untuk dijadikan bahan berita. Bila wartawan sudah diberi batasan, tentunya hasil pemberitaan nantinya tidak akan maksimal. Biarlah pihak redaktur dan pemimpin redaksi yang menjalankan tugas untuk melakukan seleksi. Proses ini didukung oleh pemahaman yang disampaikan McQuail dan Windahl bahwa secara sederhana proses *gatekeeping* dalam Harian SURYA bisa dilihat pada gambar 3:

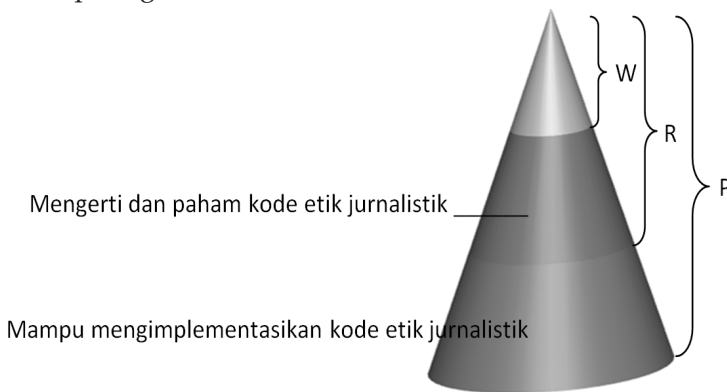


**Gambar .5.10. Penerapan Model *Gatekeeping***

Sumber: Hasil olahan penulis, 2012

Membicarakan penerapan model *gatekeeping* sebagaimana tergambar dalam bagan, Harian SURYA melakukannya sesuai tahapan. Pada proses awal, wartawan tidak dibatasi untuk mencari informasi apapun yang berkaitan dengan masalah militer yang muncul. Kreativitas wartawan tidak terbatas, berbagai sumber bisa digali semaksimal mungkin. Hal tersebut mempengaruhi proses yang terjadi pada tahap I, dimana tulisan yang dibuat oleh wartawan di lapangan tampil apa adanya tanpa filter. Pada tahap berikutnya redakturlah yang akan menyeleksi. Pada tahapan ini terjadi lolos berita. Lolos berita dalam arti redaktur memfasilitasi masukan yang diberikan oleh wartawan. Wartawan cenderung takut, ketika tulisannya tidak dimuat maka akan kalah bila ada media lain yang berani memuat tulisan dengan kasus yang sama. Pada tahap III inilah, penyeleksian berita bertambah ketat. Pemimpin redaksi turut berperan melakukan filter berita untuk tetap menjaga *track* penulisan berita. berpedoman pada kesesuaian dengan apa yang disebut *Wawasan SURYA*.

Melalui hasil wawancara yang telah dibahas, pada dasarnya Harian *SURYA* telah berusaha melaksanakan asas-asas ketahanan nasional. Walaupun pada dasarnya asas ini diterapkan pada tiap individu, namun pada prakteknya di lapangan khususnya Harian *SURYA* tidak akan mampu menjalankan asas ini bila di dalam sistemnya tidak ada individu yang memiliki ketiga asas ini. Harian *SURYA* sangat paham akan perannya untuk memberikan dukungan sesuai dengan fungsinya sebagai media massa. Melalui *Wawasan SURYA* yang telah ditanamkan pada jajaran redaksinya, maka secara langsung telah mendukung tiga asas ketahanan sosial diantaranya Asas Kesejahteraan dan Keamanan, Asas Komprehensif, dan Asas kekeluargaan. Ketiga hal tersebut tertuang secara jelas dalam prinsip kerja Harian *SURYA* yang disampaikan Soenarko seperti gambar 4.



Keterangan:

W = Wartawan

R = Redaktur

P = Pemimpin Redaksi

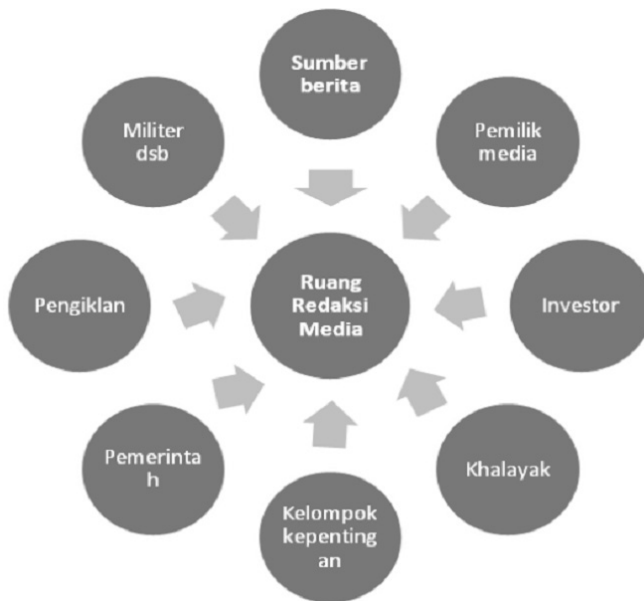
### Gambar 5.11. Prinsip Kerja Harian Surya.

Pada skema tersebut dapat dijelaskan bahwa pada prinsipnya wartawan harus mengerti dan paham kode etik jurnalistik. Berbeda dengan redaktur, disamping harus mengerti dan paham kode etik jurnalistik juga harus mampu mengimplementasikannya. Ditambah dengan pemimpin redaksi, diharapkan tidak hanya mengerti dan paham kode etik jurnalistik tetapi juga filosofinya. Filosofi ini tidak bisa dipisahkan secara tegas ataupun dipukul rata, dalam arti setiap kasus yang muncul khususnya kasus militer harus melalui pertimbangan *Wawasan SURYA* yang dibangun dari visi dan misi Harian *SURYA*.

Pada prosesnya Harian SURYA juga menemui banyak tantangan, dimana telah disinggung pula oleh Eriyanto (2012: 4) bahwa:

“Proses *gatekeeping* (dari bagaimana bahan diolah, ditulis hingga disajikan kepada khalayak) tidak bisa dilepaskan dari pengaruh eksternal. Pertimbangan mengenai seleksi berita misalnya bukan hanya ditentukan oleh nilai berita, tetapi juga kepentingan pengiklan, pasar dan apakah berita itu bertabrakan dengan kepentingan kekuatan politik dan ekonomi atau tidak. Pandangan ini justru melihat faktor eksternal jauh lebih dominan dibandingkan dengan internal media.”

Harian SURYA menghadapi dua kepentingan yang mempengaruhi profesionalisme media. Soenarko menyampaikan ada kepentingan pemilik dan pengiklan yang tidak bisa dilepaskan. Banyak berita yang memiliki *news value* namun bertabrakan dengan kepentingan perusahaan sendiri antara pemilik dan pengiklan. “Ini adalah musuh terbesar media,” tegas Soenarko. Dijelaskan pula dengan skema McQuail dan Windahl (dalam Eriyanto, 2012: 5)



**Gambar 5.12. Kekuatan Eksternal Media**

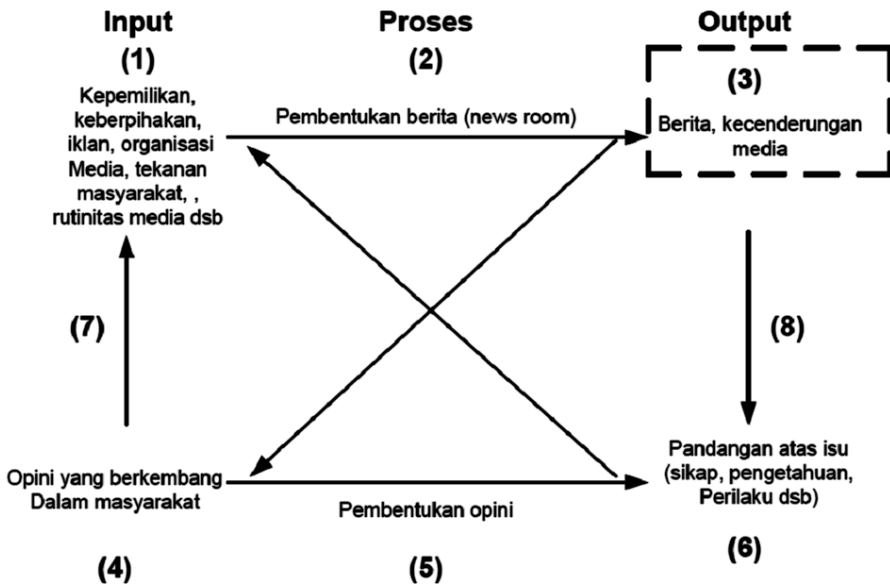
Sumber: adaptasi dari McQuail and Windahl (1996: 161)

Skema tersebut menggambarkan bahwa kekuatan eksternal itu bersifat total dan mutlak. Jurnalis dan pekerja media tidak lain hanya

menyuarakan apa yang dikatakan oleh peingiklan, pemilik media, dan kekuatan politik ekonomi (Herman & Comsky dalam Eriyanto, 2012: 5). Salah satu kekuatan eksternal itu adalah organisasi militer sendiri.

Organisasi militer menjadi bagian penting penggerak *newsroom* media. Militer menurut Soenarko selalu berhubungan dengan kekuasaan dan alat negara, militer berbeda dengan kriminalitas, sehingga komponen ini militer ini menjadi sangat penting dalam mempengaruhi kebijakan media dalam proses produksi berita.

Di luar itu, sebenarnya terdapat skema yang mampu menjelaskan keterkaitan antara media massa, pengaruh eksternal media massa, dan hasil produksi media itu sendiri dalam hal ini berita. Berikut skema untuk menjelaskan keterkaitan antara ketiganya (Eriyanto, 2012: 10):



Gambar 5.13. Skema Ketekaitan antara Input, Proses, Output.

Sumber: Eriyanto, 2012

Pada prosesnya diawali dari Harian *SURYA* sendiri yang dipengaruhi oleh pemilik dan pengiklan. Pada proses pembentukan beritapun (*news room*) akan menyesuaikan kesemua pengaruh tersebut. Akhirnya, berita yang disajikanpun jauh dari tuntutan profesionalisme media yang selama ini didengarkan.

Berkaitan dengan kasus pemberitaan organisasi militer di media massa, tentunya skema di atas merupakan proses sederhana untuk menjelaskannya. Pemilik tentunya akan berusaha supaya media massa yang dimilikinya akan terus maju, dalam proses tersebut tentunya diperlukan kewaspadaan tingkat tinggi. Hal ini adalah pemberitaan kasus organisasi militer di Harian *SURYA* akan disesuaikan dengan *Wawasan SURYA* yang tidak lepas dari visi misinya sebagai penyalur informasi. Tetapi hal tersebut juga memiliki batasan, porsi berita seperti apa yang harus diberitakan. Harian *SURYA* tidak berani memilih format berita *indepth report*. Berbeda dengan TEMPO yang memang memiliki *track record* sebagai media massa yang kuat dengan *indepth report*. Harian *SURYA* masih belum mencapai *track record* seperti TEMPO, dan *track* pemberitaan Harian *SURYA* fokus pada *hard news*. Apabila Harian *SURYA* merambah *track record* TEMPO, mungkin bisa dibayangkan apa yang nantinya terjadi pada surat kabar tersebut kedepannya.

Harian *SURYA* tetap berusaha memberikan yang terbaik, dengan memperhatikan banyak faktor yang mempengaruhinya, tetap berpegang teguh pada *Wawasan SURYA*. Dalam prakteknya akan banyak tantangan yang dihadapi, Harian *SURYA* akan tetap berusaha semaksimal mungkin, sesuai dengan penempatan posisinya sebagai koran regional no.1 di Jawa Timur. Harian *SURYA* menjadi media informasi terbesar, terpadu dan terbaik di Jawa Timur. Harian *SURYA* paham bahwa opini yang berkembang di masyarakat tidak lain berawal apa yang sudah diberitakan oleh media massa. Media massa akan mendikte pandangan masyarakat. Sebagai sumber informasi, media massa secara sadar atau tidak telah merubah pandangan masyarakatnya. Media massa menjadi salah satu alat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Di sinilah peran Harian *SURYA* semakin tampak kokoh sebagai media yang mendukung ketahanan sosial melalui *Wawasan SURYA*, sesuai dengan sila 'Persatuan Indonesia' secara eksplisit menyampaikan ketahanan nasional. Serta implementasi dari UUD 1945 sebagai negara kesatuan, dan harus dipertahankan salah satunya melalui peran media massa, yaitu Harian *SURYA*. Sesuai pasal 30 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa: 'Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara'.

Media massa di Indonesia ada dan berdiri hingga saat ini tentunya juga berkat dukungan serta usaha rakyat Indonesia yang ada di dalamnya. Dalam hal ini peran Harian *SURYA* yang didukung oleh seluruh pihak didalamnya, khususnya wartawan, redaktur, dan pemimpin redaksi. Mereka merupakan rakyat Indonesia yang tergabung di dalam satu wadah organisasi media massa, yaitu Harian *SURYA*.

Filosofi dari rakyat untuk rakyat telah terbukti nyata, Harian *SURYA* membutuhkan peran wartawan, redaktur, dan pemimpin redaksi sebagai rakyat dan sebaliknya. Ditambah dengan kekuatan media massa yang terus meningkat hingga kini, diharapkan terus menerus mampu mendukung ketahanan negara. Kemanfaatan media massa butuh untuk terus menerus digali, walaupun seringkali media massa bagaikan telur diujung tanduk. Inilah tantangan bagi media massa di Indonesia, khususnya surat kabar regional Harian *SURYA*.

## **Simpulan**

Di tengah maraknya kasus yang melibatkan dunia militer di Jawa Timur, hadirnya Harian *SURYA* sebagai lembaga dalam masyarakat diharapkan dapat bersikap bijaksana. Tantangan besar bagaimana Harian *SURYA* memberitakan kasus militer demi menunjang pemberitaan yang positif. Berangkat dari pemberitaan yang positif di media massa itulah ketahanan regional atau daerah sebagai bagian dari ketahanan nasional dapat terjaga di seluruh hati rakyatnya. Media massa diharapkan akan terus menerus memupuk keberlangsungan bangsa, demi mencapai kesatuan Indonesia.

Ketahanan nasional Indonesia meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Bangsa Indonesia ditantang untuk mampu mengatasi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan (TAHG), baik dari luar maupun dari dalam negeri. Proses tersebut memerlukan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan untuk menghadapinya. Dengan didukung oleh identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia sedikit demi sedikit akan mampu mencapai tujuan nasionalnya. Di sinilah peran media massa dibutuhkan untuk mampu membawa dan mendukung munculnya kekuatan besar bagi ketahanan nasional Indonesia.



## Daftar Pustaka

- Effendy, Onong U, 1994, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Eriyanto, 2012, *Media dan Teknologi: Tantangan Studi Tentang Ruang Redaksi (newsroom) dalam Kajian Media di Indonesia*, Jakarta: Konferensi Nasional Ilmu Komunikasi, 9-10 Februari 2012.
- LittleJohn, Stephen W dan Karen A Foss, 2011, *Teori Komunikasi*, Jakarta: Salemba Humanika
- Lemhanas , 2000, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta.
- McQuail, Denis, 2011a, *Teori Komunikasi Massa McQuail*, Buku 1 Edisi 1, Jakarta: Salemba Humanika.
- McQuail, Denis, 2011b, *Teori Komunikasi Massa McQuail*, Buku 2 Edisi 6, Jakarta: Salemba Humanika.
- Wiryanto, 2000, *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Mulyono, Budi, 2011, 18 Tahun Kasusnya Mandeg, Protes dengan Jalan Kaki Malang-Jakarta. Diakses dari <http://www.surabayapagi.com/> tanggal 5 Maret 2012, pukul 14.56 WIB.
- Sup, Tim Liptan, 2009, Kasus Alas Telogo: Minta Disidangkan di Mahkamah Militer. Diakses dari [http://www.indosiar.com/fokus/kasus-alas-telogo--minta-disidangkan-di-mahkamah-militer\\_62032.html](http://www.indosiar.com/fokus/kasus-alas-telogo--minta-disidangkan-di-mahkamah-militer_62032.html), tanggal 5 Maret 2012, pukul 14.36 WIB.
- TI, 2009, 25 Kasus Tanah di Jawa Timur Melibatkan Militer, Diakses dari [http://www.trenggalek.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=216&Itemid=1](http://www.trenggalek.com/index.php?option=com_content&task=view&id=216&Itemid=1), tanggal 5 Maret 2012, pukul 13.25 WIB.
- Company Profile Harian *SURYA*, Januari 2012.
- Wawancara dengan Pemimpin Redaksi Harian *SURYA*, Soenarko, Jumat, 27 April 2012.



# **PERTARUNGAN PROPAGANDA IDEOLOGI *JIHAD* DENGAN KEAMANAN MELALUI INTERNET**

**Dicky Andika dan Morissan**

## **Pendahuluan**

Terorisme adalah fakta yang tidak dapat ditolak karena memang benar-benar ada di Indonesia yang dilakukan oleh orang Indonesia. Fakta juga menunjukkan bahwa para pelaku teror adalah kelompok-kelompok Islam radikal yang memiliki ajaran garis keras (radikal) yang membenarkan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya.

Internet adalah media yang paling sering digunakan dan paling diandalkan para pelaku teroris untuk menyebarkan ajarannya. Karakteristik media internet yang terbuka dan dapat diakses siapa saja, kapan saja, dan dimana saja mendorong teroris untuk memanfaatkan media ini. Teroris memanfaatkan internet tidak saja untuk menyebarkan ajaran radikal tetapi juga sebagai sarana komunikasi diantara mereka. Teroris tampaknya tidak akan pernah menggunakan jenis media massa lain yang bersifat lebih jelas, terstruktur, dan terorganisir seperti televisi, radio, surat kabar, dan lain-lain karena sifat gerakan yang tersembunyi dan rahasia.

Persoalan terorisme telah menjadi kekhawatiran semua pihak, baik pada level nasional maupun internasional. Terorisme telah menjadi isu internasional yang seringkali dibahas pada pertemuan antar kepala negara. Hubungan antar negara sering dipengaruhi oleh kuat atau lemah komitmen suatu negara untuk membasmi terorisme.

Salah satu kunci keberhasilan penelusuran dan pengungkapan terorisme adalah melalui teknologi informasi. Kegiatan terorisme berubah seiring dengan perubahan atau perkembangan teknologi. Teroris tidak lagi menggunakan media tradisional saja, misalnya dengan

menggunakan sel-sel yang rapi, namun juga menggunakan kemajuan teknologi informasi. Beberapa kasus yang pernah mengemuka adalah penggunaan laptop dengan koneksi Internet oleh sejumlah teroris.

Pemanfaatan internet untuk mendukung kegiatan terorisme merupakan fakta yang tidak dapat dibantah dan bahkan diduga semakin marak. Sejumlah situs ditenggarai digunakan sebagai media komunikasi dan propraganda untuk memasyarakatkan *jihad* radikal. Dalam hal ini, baik situs maupun blog semacam itu tidak dapat dianggap sepele karena dari substansi komunikasi yang terjadi diduga adanya hubungan antara yang disampaikan dengan kejadian yang ada.

Berdasarkan observasi sejauh ini terdapat dua hal yang perlu dipahami bahwa terorisme telah menggunakan media baru seperti internet untuk berkomunikasi, baik dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikut baru. Kedua, dengan sifat internet yang global dan canggih, para pelaku terorisme nampaknya mempunyai latar belakang pendidikan dan pemanfaatan internet yang cukup bagus serta bersifat lintas negara.

Kelihatannya, audiens yang ingin diajak berkomunikasi adalah komunitas berbahasa Indonesia, namun belum tentu situs bersangkutan dikendalikan di Indonesia, begitu pula sebaliknya. Selain itu, pemanfaatan blog merupakan metode baru, dimana berbeda dengan situs dengan domain tertentu yang lebih mudah ditelusuri, blog punya tingkat kesulitan *cyber forensic* yang lebih tinggi, apalagi dengan sifat internet yang anonimous. Situs dengan muatan *jihad* radikal bisa saja bukan dikerjakan para teroris, tapi tidak berarti tak terkait dengan para simpatisan terorisme di tanah air.

## **Kajian Pustaka**

Kontroversi mengenai pengertian *jihad* sebenarnya sudah dimulai sejak lama namun kembali menghangat ketika aksi terorisme mulai bermunculan di tanah air dan menjadi topik perdebatan antara ulama agama Islam, khususnya antara mereka yang berpandangan moderat dan mereka yang berpandangan radikal. Internet merupakan salah satu media massa yang memiliki karakteristik berbeda dengan media massa lainnya. Pengertian lebih mendalam mengenai konsep ajaran *jihad* dan internet diperlukan karena terkait dengan metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini.

## Ajaran Islam dan *Jihad*

Agama Islam memiliki seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan aturan mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya. Sumber-sumber ajaran islam ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Pada umumnya ulama sependapat bahwa sumber hukum primer adalah kitab suci Al Qur'an dan Hadits. Sumber hukum lainnya setelah kedua sumber hukum utama tersebut adalah *ijtihad*. Ketiga sumber ajaran tersebut merupakan satu rangkaian kesatuan dengan urutan yang tidak boleh dibalik.

Al Qur'an adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad dengan menggunakan bahasa Arab, merupakan mukjizat dan diriwayatkan secara mutawatir serta membacanya adalah ibadah. Pokok-pokok kandungan dalam Al Qur'an mencakup ajaran mengenai keesaan Tuhan (*tauhid*), ibadah, janji, dan ancaman serta kisah umat terdahulu.

Sumber hukum kedua setelah Alquran adalah Sunnah yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad baik perbuatan, perkataan, dan penetapan pengakuan. Sunnah berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat Al Qur'an yang kurang jelas atau sebagai penentu hukum yang tidak terdapat dalam Al Qur'an.

Sumber hukum berikutnya setelah Al Qur'an dan Hadits adalah *Ijtihad* yang berarti mencurahkan segala kemampuan berfikir untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalil Al Qur'an dan hadits. *Ijtihad* dapat dilakukan apabila ada suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat di dalam Al Qur'an maupun hadits, maka dapat dilakukan *ijtihad* dengan menggunakan akal pikiran namun tetap mengacu pada Al Qur'an dan Hadits.

*Jihad* merupakan salah satu ajaran Islam yang termuat baik dalam Alquran maupun hadits. Mereka yang terlibat dalam tindakan bom bunuh diri, peledakan di berbagai tempat, dan aksi kekerasan lainnya sering kali menyatakan bahwa tindakan mereka adalah *jihad*. Kalangan ulama Islam moderat umumnya memiliki dua pengertian terhadap *jihad* yaitu:

- (1) Segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi

musuh dalam segala bentuknya. *Jihad* dalam pengertian ini juga disebut *qital* atau *al-harb*;

- (2) Segala usaha yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah.

Perbedaan antara terorisme dengan *jihad* adalah bahwa terorisme sifatnya merusak dan anarkis, tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan atau menghancurkan pihak lain, dan dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas, sedang *jihad* sifatnya melakukan perbaikan sekalipun dengan cara peperangan, tujuan-nya menegakkan agama Allah dan atau membela hak-hak yang terzalimi, dan dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syariat dengan sasaran musuh yang sudah jelas.

Kriteria terorisme dapat dipahami sebagai kegiatan menyengsarakan penduduk, merusak perdamaian, mengancam keselamatan jiwa, dan harta benda, dan mengancam ketenteraman dan kenyamanan hidup manusia. Dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang diterangkan bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Munculnya kelompok-kelompok radikal yang melakukan aksi kekerasan disebut sebagai bentuk distorsi dalam memahami ajaran agama yang salah satunya adalah sifat terlalu kaku atau rigid dalam memahami teks ajaran agama (*nash*) sehingga menimbulkan sikap tidak toleran terhadap pemahaman ajaran agama yang berbeda dari pemahaman kelompoknya. Tekstualisme agama membawa dampak buruk pada citra umat Islam yang dipersepsikan eksklusif, kaku, dan tertutup tidak bisa menerima hal-hal baru. Kelompok ini juga cenderung secara frontal menyalahkan kelompok lain yang tidak sefaham dengan kelompoknya, sehingga sering menimbulkan benturan dan tidak jarang juga menimbulkan konflik di antara umat Islam (Wahid, 2009).

## **Internet**

Internet didefinisikan sebagai *A global network of interconnected computers that communicate freely and share and exchange information* (suatu

jaringan global dari sejumlah komputer yang saling terkoneksi yang berkomunikasi secara bebas dan saling berbagi serta tukar menukar informasi). Media Internet memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mengemukakan pendapatnya tanpa dapat dihalangi.

Internet awalnya muncul pada periode Perang Dingin dalam rangka persiapan jika terjadi Perang Dunia ke-3. Pada tahun 1962, militer AS berencana membangun sistem pengiriman informasi yang tidak akan terhambat apapun termasuk jika terjadi perang. Ide menciptakan Internet muncul setelah adanya komputer yang awalnya hanya berfungsi sebagai mesin hitung.

Pada awalnya Internet digunakan hanya untuk mengirim pesan dalam bentuk teks seperti *e-mail*, *mailing lists* dan *usenet*:

- 1) *E-mail (Electronic Mail)*. Pengguna yang memiliki akun dapat berkomunikasi dengan siapa saja secara *online* dimana saja di dunia dengan biaya murah. Dengan menggunakan *e-mail* antara lain orang dapat mengumpulkan seluruh surat yang telah diterima atau dikirimkan, membaca atau menghapus surat yang diterima, mencantumkan lampiran pada surat, meneruskan surat kepada orang lain, dan mengirimkan surat sekaligus kepada beberapa orang
- 2) *Mailing List*. *E-mail* juga dapat digunakan untuk turut serta dalam *mailing list*, *bulletin boards* atau kelompok diskusi. Pengguna dapat mendaftar pada suatu kelompok diskusi, dan seluruh surat yang dikirimkan ke kelompok itu secara otomatis juga diteruskan kepada semua anggota yang sudah mendaftar.
- 3) *Usenet*. Dikenal juga sebagai jaringan berita dimana pengguna dapat memasukkan pesan dan kemudian disebarakan ke seluruh pengguna *usenet* lainnya.

### ***The World Wide Web***

*The World Wide Web* (WWW) merupakan fasilitas yang digunakan pengguna komputer untuk mengakses Internet yang menggunakan *hypertext transfer protocols* (HTTP) untuk membawa data dari satu lokasi kepada lokasi lainnya. HTTP dikembangkan pada awal tahun 1990-an oleh pria berkebangsaan Inggris Tim Berners-Lee yang bekerja pada laboratorium fisika partikel milik Cern di Jenewa, Swiss. Berners-Lee memberikan mendedikasikan HTTP kepada dunia secara cuma-cuma.

Kelebihan yang dimiliki WWW adalah pada penggunaannya yang mudah dan juga penampilannya yang menarik karena kemampuannya menampilkan tidak saja teks tetapi juga warna, gambar, suara, dan video. Kemudahan mengakses Web merupakan fungsi dari sejumlah komponen yaitu: *host*, *URL*, *browser*, *search engine*, dan *homes pages*.

Komputer yang terhubung dengan internet disebut dengan *host*. Kegiatan Internet berarti menggunakan komputer untuk menghubungi atau mengakses data yang terdapat pada komputer lain. Untuk dapat mengakses data pada komputer lain, pengguna pertama-tama harus mendapatkan akses ke Internet melalui komputer yang terhubung dengan internet (*wired-to-the-net host*) atau *server*.

Pengguna memperoleh akses ke internet, maka mereka harus menuliskan dengan tepat lokasi data komputer yang ingin ditemukan. Setiap data yang tersedia pada komputer yang terhubung dengan Internet (*host*) didesain oleh suatu *Uniform Resource Locator* (URL) yang menunjukkan antara lain program yang dibutuhkan untuk mengakses suatu data atau protokol yang akan digunakan (misalnya *http://* atau *telnet://* dan lain-lain).

Dalam menggunakan Web, pengguna harus menuliskan nama domain (*domain names*) yaitu lokasi yang hendak dituju misalnya: *www.republika.co.id*, *www.yahoo.co.id*, *www.games.co.id*, *www.bbc.co.uk*, dan lain-lain. Kode nama paling kanan menunjukkan wilayah, misalnya: *id* (Indonesia), *uk* (Inggris), *us* (Amerika) dan lain-lain. Kode sebelum wilayah menunjukkan organisasi atau sifat kegiatan yang dilakukan pemilik situs web, misalnya: *com* untuk organisasi komersil, *edu* untuk lembaga pendidikan, *gov* untuk pemerintahan, *int* untuk organisasi internasional dan *org* untuk organisasi lainnya.

## **Pembahasan**

Berdasarkan pencarian pada halaman internet dengan menggunakan mesin pencari Google, peneliti berhasil menemukan sejumlah nama organisasi, kelompok atau individu yang mengemukakan pendapat atau pandangannya mengenai *jihad*. Penelitian ini memiliki tiga kategorisasi yaitu: kategori moderat, kategori radikal dan kategori netral.

### **1. Footpath**



Kelompok ini memiliki alamat situs web <http://afootpath.wordpress.com/2008/11/14/definisi-jihad>, namun lokasi kelompok ini tidak diketahui, begitu pula latar belakang kelompok ini. Adapun pendapat kelompok Footpath terhadap *jihad* sebagaimana dikutip pada situs web yang mereka miliki dapat dikemukakan sebagai berikut. "Bahwasannya *jihad* itu jika dinyatakan secara mutlak tanpa *qayyid* maksudnya adalah *qital* (Perang) dan mengerahkan kemampuan dari padanya untuk meninggikan *kalimatullah*. *Ta'rif jihad* yang lebih mendasar dan lebih mencakup adalah yang dinyatakan dalam Mazhab Hanafi yaitu mencurahkan kemampuan dan kekuatan dengan berperang di jalan Allah SWT, dengan jiwa, harta, dan lisan dan selain itu", (Al-Kisani, *Badai'u Ash-Shanai'i* 9/4299).

Footpath mengutip Ibnu Rusyd yang mengatakan "setiap orang yang meletihkan dirinya di dalam mentaati Allah, maka sungguh ia telah berjihad di jalan-Nya, kecuali bahwasanya perkataan '*Jihad fie Sabilillah*' bila dinyatakan secara mutlak, maka dengan kemutlakannya itu tidak dapat diartikan selain dari; Memerangi orang-orang kafir dengan pedang, hingga mereka masuk kedalam agama Islam atau membayar *jizyah* dari tangan mereka, sedang mereka dalam keadaan hina", (Muqaddimah Ibnu Rusyd 1/369). "*Fie Sabilillah*" jika dinyatakan secara mutlak atas sesuatu perbuatan, yang dimaksud adalah *jihad* yang maknanya perang.

Banyak para ulama penyusun berbagai kitab mencantumkan hadist-hadist yang mengandung perkataan "*fie Sabililla*" di dalam bab-bab *jihad*. Misalnya hadist: "Siapa yang berpuasa sehari *fie sabilillah* niscaya Allah menjauhkan mukanya dari api neraka 70 tahun perjalanan", (*Fathul Bari* no. 2840, *Kitabul Jihad*, Bab *Fadlus Soum fie Sabilillah* 6/47).

Mujuk kitab-kitab seperti Shahih Bukhari, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, At-Tarhib wat Tarhib, dan lain-lain. Ibnu Hajar berkata "Dan yang tidak memerlukan pemikiran yang panjang untuk memahami lafaz "*fie sabilillah* adalah *jihad*".

Berdasarkan apa yang diuraikan kelompok Footpath ini pada halaman situs web mereka mengenai *jihad* maka dapat disimpulkan bahwa pandangan mereka termasuk dalam kategori radikal.

## 2. Hizbut Tahrir

Organisasi selanjutnya adalah Hizbut Tahrir Indonesia dengan alamat situs web <http://hizbut-tahrir.or.id/> Organisasi kemasyarakatan ini beralamat di kantor pusat Hizbut Tahrir Indonesia dengan alamat: Crown Palace, Jl. Prof. Soepomo no. 231, Jakarta Selatan, 12790. Telp / fax: (62-21) 83787370 / 83787372.

Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds (Baitul Maqdis), Palestina. Gerakan yang menitik beratkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali khilafah Islamiyah ini dipelopori oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir, dan pernah menjadi hakim di mahkamah syariah di Palestina.

Hizbut Tahrir kini telah berkembang ke seluruh negara Arab di Timur Tengah, termasuk di Afrika seperti Mesir, Libya, Sudan, dan Aljazair, juga ke Turki, Inggris, Perancis, Jerman, Austria, Belanda dan negara-negara Eropa lainnya hingga ke Amerika Serikat, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan, Malaysia, Indonesia, dan Australia.

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an ide-ide dakwah Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan.

Organisasi ini menyatakan pendapatnya tentang *jihad* sebagai berikut:

*“Eksekusi terhadap Amrozi dkk, kembali menimbulkan perdebatan seputar pengertian jihad. Dari kalangan kelompok liberal menyempitkan makna jihad sebatas melawan hawa nafsu bahkan cenderung menolak makna jihad dalam pengertian perang. Berikut ini kami kumpulkan pengertian syari’ dari jihad menurut ulama yang tidak ada pengertian yang lain kecuali perang di jalan Allah SWT.”*

Hasil penelitian yang dilakukan Nuraidah (2009) pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap pandangan Hizbut Tahrir mengenai pengertian *jihad* menunjukkan hal senada. Menurut Nuraidah dalam laporannya menyatakan bahwa *jihad* menurut Hizbut Tahrir dimaknai dengan makna *syar’i* yaitu perang untuk menyebarkan risalah Islam (berperang di jalan Allah). Aktualisasi *jihad* Hizbut Tahrir

dilakukan dengan melihat kondisi di mana terjadi ancaman terhadap kaum muslimin. Hizbut Tahrir yang berada di daerah tersebut wajib ikut dalam peperangan.

Realisasi *jihad* hizbut Tahrir terwujud dalam bentukbentuk *jihad* defensif (pertahanan) dan *jihad* ofensif (penyerangan). Konsep *jihad* menurut Hizbut Tahrir tersebut tidak menyimpang dari tujuan inti *jihad*, menurut *fiqh siyasa*, sebagaimana yang dipahami oleh beberapa tokoh. Dalam implementasi *jihad*, Hizbut Tahrir pada dasarnya menyesuaikan dengan pemahaman makna dan melihat suatu kondisi, yang mana bila kasus berkaitan dengan ancaman yang sedang dialami oleh kaum muslimin dibelahan dunia ini, dalam konteks di mana kaum muslimin terdzalimi terancam jiwanya maka yang dilakukan adalah *jihad* defensif. Aktualisasi yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir tergolong bentuk aktualisasi yang dibenarkan dalam *fiqh siyasa*, yaitu dengan melakukan perlawanan fisik secara terang-terangan terhadap berbagai hal-hal dan tindakan yang tidak sesuai dengan syari'ah Islam, khususnya yang dapat merusak keadilan dan kesejahteraan sebuah negara.

Berdasarkan apa yang diuraikan kelompok ini mengenai *jihad* maka dapat disimpulkan bahwa pandangan Hizbut Tahrir termasuk dalam kategori radikal karena hanya memaknai *jihad* hanya dalam pengertian perang.

### **3 . Pesantren Langitan**

Salah satu pesantren terkemuka di Jawa ini memiliki alamat situs web pada [http:// langitan.net/](http://langitan.net/) dengan lokasi organisasi berada pada pondok pesantren langitan Jl. Raya Widang, Tuban. PO Box 02 Babat 62271 Telp/Fax.0322-451156. Pondok Pesantren Langitan memiliki lebih dari 5.500 santri yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan sebagian Malaysia ini dahulunya adalah hanya sebuah surau kecil tempat pendiri Pondok Pesantren Langitan, KH. Muhammad Nur mengajarkan ilmunya dan menggembleng keluarga dan tetangga dekat untuk meneruskan perjuangan dalam mengusir kompeni penjajah dari tanah Jawa.

Dalam rentang masa satu setengah abad Pondok Pesantren Langitan telah menunjukkan kiprah dan peran yang luar biasa, berawal dari hanya sebuah surau kecil berkembang menjadi Pondok yang representatif dan populer di mata masyarakat luas baik dalam negeri

maupun manca negara. Banyak tokoh-tokoh besar dan pengasuh pondok pesantren yang dididik dan dibesarkan di Pondok Pesantren Langitan ini, seperti KH.Kholil Bangkalan, KH. Hasyim Asy'ary, KH. Syamsul Arifin (ayahanda KH. As'ad Syamsul Arifin) dan lain-lain.

Menurut pandangan pesantren Langitan setiap individu muslim yang sudah dewasa diwajibkan (*fardlu ain*) mempertahankan negaranya dari serangan musuh yang ingin menghancurkan kedaulatan dan keutuhan negara Islam. Hal ini dijelaskan dalam Surah Al Baqarah ayat 190: "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah melampaui batas".

Selain berperang mempertahankan kedaulatan negaranya dari serangan musuh, dalam Islam juga dikenal dengan penaklukan terhadap negara-negara kafir yang memusuhi Islam, menghalangi dakwah dan membuat kerusakan di muka bumi. Perang yang bersifat menyerang ini hukumnya *fardlu kifayah* bagi umat Islam yang sudah menikah, laki-laki, merdeka, tidak cacat dan mempunyai biaya yang cukup untuk berperang dan cukup untuk keluarga yang ditinggalkannya.

Allah Subhanahu wata'ala berfirman, "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Hari Akhir, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (Islam), yaitu dari orang-orang yang diberikan Al Kitab kepada mereka, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (QS. At Taubah:29).

Sekilas, dengan pendekatan perang model kedua ini, Islam terkesan sebagai agama radikal dan penuh kekerasan. Seakan Islam adalah agama yang disebar dengan pedang dan cara-cara pemaksaan. Namun sebenarnya, Islam tidak pernah memaksakan keyakinan keberagaman Islam kepada orang-orang non muslim. Allah Subhanahu wata'ala berfirman, "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al Baqarah:256).

Berdasarkan apa yang diuraikan Pesantren Langitan pada halaman situs web mereka mengenai Jihad maka dapat disimpulkan bahwa pandangan mereka termasuk dalam kategori moderat.

#### 4. STID Dirosat Islamiyah

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirosat Islamiyah (STID DI) memiliki alamat situs web pada <http://alhikmah.ac.id>. STID DI Jakarta didirikan pada tahun 1989, dengan nama Lembaga Dakwah dan Studi Islam Al-Hikmah atau yang lebih dikenal dengan nama “*Ma’had Al-Hikmah*”. Lembaga ini didirikan atas dasar kepedulian dan perhatian yang besar terhadap problematika dakwah Islamiyah dan juga untuk merevisi dan membenahi pergeseran nilai-nilai moral dan sikap hidup yang semakin dirasakan menurun. Pada sisi yang lain juga terlihat bahwa kesadaran umat Islam untuk mempelajari al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai sumber utama syari’at Islam, kian hari nampak semakin meningkat terutama dikalangan mahasiswa/mahasiswi dan kawula muda pada umumnya.

Adapun pendapat organisasi ini tentang jihad dapat dikemukakan sebagai berikut. *Jihad* secara bahasa berarti mengerahkan dan mencurahkan segala kemampuannya baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dan secara istilah syari’ah berarti seorang muslim mengerahkan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk memperjuangkan dan menegakkan Islam demi mencapai ridha Allah SWT. Kata-kata *jihad* selalu diiringi dengan *fi sabilillah* untuk menunjukkan bahwa *jihad* yang dilakukan umat Islam harus sesuai dengan ajaran Islam agar mendapat keridhaan Allah SWT.

Imam Syahid Hasan Al-Banna berkata, “Yang saya maksud dengan jihad adalah; suatu kewajiban sampai hari kiamat dan apa yang dikandung dari sabda Rasulullah SAW.,” Siapa yang mati, sedangkan ia tidak berjuang atau belum berniat berjuang, maka ia mati dalam keadaan *jahiliyah*”.

Adapun urutan yang paling bawah dari *jihad* adalah ingkar hati, dan yang paling tinggi perang mengangkat senjata di jalan Allah. Di antara itu ada jihad lisan, pena, tangan dan berkata benar di hadapan penguasa tiran. Dakwah tidak akan hidup kecuali dengan *jihad*, seberapa tinggi kedudukan dakwah dan cakupannya yang luas, maka *jihad* merupakan jalan satu-satunya yang mengiringinya. Firman Allah, “*Berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad*” (QS Al-Hajj 78). Dengan demikian anda sebagai aktifis dakwah tahu akan hakikat doktrin ‘*Jihad* adalah Jalan Kami.

Berdasarkan apa yang diuraikan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirosat Islamiyah (STID DI) pada halaman situs web mereka mengenai

*Jihad* maka dapat disimpulkan bahwa pandangan mereka termasuk dalam kategori moderat.

## 5. Era Muslim

Organisasi Era Muslim berlokasi di Cibubur Time Square Blok 3/01 Cibubur. Jl. Transyogi Cibubur Km. 3 Jakarta Timur. Telepon +62 (021) 843 05440, +62 (021) 843 05439. Fax: +62 (021) 843 05441 dengan alamat situs web pada <http://www.eramuslim.com/>.

Kelompok ini menyatakan bahwa salah satu pilar kekuatan umat Islam sejak dulu hingga di hari akhir nanti adalah jihad. Hal ini sangat dipahami oleh musuh-musuh Allah SWT sehingga untuk bisa mengalahkan umat Muhammad SAW ini, mereka pun berusaha menghantam dan menghancurkan hakikat jihad. Salah satunya dengan menyelewengkan hakikat jihad menjadi sekadar “berusaha dengan bersungguh-sungguh”. Mereka mengatakan hal itu dengan beralasan jika akar kata “*jihad*” adalah “*mujadalah*” yang memang berarti bersungguh-sungguh.

*Jihad* berasal dari bahasa Al-Qur’an. Jadi pemahamannya juga harus *Qur’ani*. Bukan sekadar bahasa Arab di mana orang-orang seperti Abu Lahab dan para pemuka *kafirin Quraiys* pun menggunakannya. Bahasa boleh sama namun kedalaman makna dan hakikat sangatlah beda. Walau sama-sama berbahasa Arab, namun apa yang keluar dari mulut seorang Abu Lahab atau seorang pemuka *kafirin Quraiys*, dengan apa yang keluar dari mulut Rasulullah Saw dan para shahabatnya tentulah berbeda sekali. Bagai langit dengan dasar jurang samudera.

Para ulama *shalafus-shalih* sejak dahulu hingga sekarang tidak ada berbantahan-pendapat soal pengertian jihad, yakni berperang di jalan Allah SWT dengan niat yang satu: Hidup mulia atau mati syahid. Jadi bukan sekadar bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu. Jihad memiliki berbagai tingkatan. Bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu mungkin berada di tingkatan yang lebih rendah, sedangkan jihad tertinggi adalah *qital* atau *jihad fi sabilillah*, berperang di jalan Allah Swt.

Terdapat ulama yang mengatakan bahwa *jihad* merupakan sekadar bersungguh-sungguh, maka tentu saja itu hal itu memperlihatkan fakta kepada kita jika orang itu tengah melayani kepentingan musuh-musuh Allah SWT. Dalam menghancurkan salah satu pilar kekuatan umat ini yang bernama *jihad*.

Umat Islam di Indonesia memang sedang dalam situasi diperangi oleh musuh-musuh Allah SWT. Sampai sekarang, senjata yang mereka pakai masih berupa serangan budaya, ekonomi, dan pemikiran, maka kita pun wajib melawannya dengan senjata yang sama.

Musuh-musuh Allah SWT di Indonesia kini berkumpul di dalam kelompok besar yang dimotori oleh kaum Neo-Liberal (Neolib) yang jelas-jelas merupakan budak dari kepentingan Dajjal yang berpusat di Washington. Sebab itu, mereka dan para pendukungnya harus diingatkan dan disuruh bertobat. Mereka tidak mau ya baru dilawan sesuai dengan senjata yang mereka pakai terhadap kita. Serangan budaya dihadapi dengan budaya, serangan ekonomi dihadapi dengan ekonomi, dan jika mereka menyerang dengan bom, baru kita melawan mereka dengan bom.

Jika ada yang bertanya, bukankah sekarang ini di dalam kubu Neolib juga ada orang yang mengaku pembela Islam? Maka kita harus belajar sejarah jika dulu pun Firaun memiliki barisan para pendeta yang menggunakan agama mereka untuk menegakkan sistem Firaunik. Jadi, agama yang diperlihatkan mereka hanya sekadar *lips-service* atau alat jualan, bukan dalam hakikat sebenarnya. Kelompok yang seperti ini pun kita harus doakan supaya segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar dan lurus. Semoga mereka tidak terjerumus lebih jauh ke dalam sistem Dajjal yang sungguh-sungguh mencelakakan.

Berdasarkan apa yang diuraikan kelompok Era Muslim pada halaman situs web mereka mengenai Jihad maka dapat disimpulkan bahwa pandangan mereka termasuk dalam kategori netral.

## **6. Muslim**

Organisasi bernama 'Muslim' ini memiliki alamat situs web pada <http://muslim.or.id>. dan berlokasi di Wisma Misfallah Thalabul Ilmi (MTI), Pogung Kidul 8C, RT 01/RW 49, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, 55284. Kontak HP: 0818 0854 7436. Situs ini dikelola oleh mahasiswa dan alumni di Yogyakarta dan sekitarnya. Muslim.or.id berusaha menyebarkan dakwah Islamiyyah Ahlu Sunah wal Jama'ah di jagad maya. Moto Muslim.or.id adalah "Memurnikan Aqidah, Menebarkan Sunah".

Organisasi ini mengambil moto "Memurnikan Aqidah" karena banyaknya kerancuan-kerancuan yang tersebar di kalangan masyarakat,



khususnya di Indonesia tercinta ini, tentang Aqidah Islamiyyah. Menurut kelompok ini: "Ibadah yang seharusnya dipersembahkan hanya kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* telah dipalingkan pada selain Allah *subhanahu wa ta'ala*. Kesyririkan tersebar merajalela, sampai-sampai orang-orang yang telah dijuluki dengan sederetan titel dunia pun tidak luput dari virus yang sangat ganas ini."

Selanjutnya dikatakan bahwa masalah paling besar di balik itu semua adalah bahwa kesyririkan akan membuat pelakunya kekal selama-lamanya di dalam neraka. Hanya satu hal yang bisa mencegah itu semua yaitu dakwah dengan memurnikan aqidah, menjadikan Allah *subhanahu wa ta'ala* sebagai satu-satunya sesembahan dan tidak memalingkan segala macam ibadah baik perbuatan anggota badan, lisan dan perbuatan hati pada selain Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Kelompok ini mengambil moto "Menebarkan Sunah" karena merajalelanya berbagai macam ibadah yang tidak bersumber dari ajaran Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dan sekali lagi, hal itu tersebar di seluruh lapisan masyarakat yang tua maupun yang muda. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memperingati umat islam tentang bahaya bid'ah, bahwasanya amal ibadah yang tidak dilakukan berdasarkan petunjuk beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* tertolak di sisi Allah *subhanahu wa ta'ala*. Para ulama pun telah memperingati bahaya bid'ah, bahkan mereka menyebutkan bahwa bid'ah lebih disukai oleh iblis dibandingkan kemaksiatan, karena pelaku bid'ah lebih sulit untuk bertaubat dibandingkan seorang maksiat. Hal ini terjadi karena pelaku bid'ah akan menganggap perbuatannya adalah kebaikan, akan tetapi pelaku maksiat sebaliknya menyadari bahwa dia melakukan perbuatan dosa.

Menurut kelompok sebagaimana ditulis Penulis: Ustadz Kholid Syamhudi, Lc, kata 'Jihad' berasal dari kata Al Jahd (الْجَهْدُ) dengan difathahkan huruf jimnya yang bermakna kelelahan dan kesusahan atau dari Al Juhd (الْجُهْدُ) dengan didhommahkan huruf jimnya yang bermakna kemampuan. Kalimat (جُهْدُهُ بَلْعٌ) bermakna mengeluarkan kemampuannya. Sehingga orang yang berjihad di jalan Allah adalah orang yang mencapai kelelahan karena Allah dan meninggikan kalimatNya yang menjadikannya sebagai cara dan jalan menuju surga. Di balik jihad memerangi jiwa dan jihad dengan pedang, ada jihad hati yaitu jihad melawan syetan dan mencegah jiwa dari hawa nafsu dan



syahwat yang diharamkan. Juga ada jihad dengan tangan dan lisan berupa amar ma'ruf nahi mungkar.

Sedangkan Ibnu Rusyd (wafat tahun 595 H) menyatakan, "Jihad dengan pedang adalah memerangi kaum musyrikin atas agama, sehingga semua orang yang menyusahkan dirinya untuk dzat Allah maka ia telah berjihad di jalan Allah. Namun kata jihad fi sabilillah bila disebut begitu saja maka tidak dipahami selain untuk makna memerangi orang kafir dengan pedang sampai masuk islam atau memberikan upeti dalam keadaan rendah dan hina".

Ibnu Taimiyah (wafat tahun 728H) mendefinisikan jihad dengan pernyataan, "Jihad artinya mengerahkan seluruh kemampuan yaitu kemampuan mendapatkan yang dicintai Allah dan menolak yang dibenci Allah". Di tempat lainnya, beliau *rahimahullah* juga menyatakan, "Jihad hakikatnya adalah bersungguh-sungguh mencapai sesuatu yang Allah cintai berupa iman dan amal sholeh dan menolak sesuatu yang dibenci Allah berupa kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan".

Tampaknya tiga pendapat di atas sepakat dalam mendefinisikan jihad menurut syariat islam, hanya saja penggunaan *lafadz* jihad *fi sabilillah* dalam pernyataan para ulama biasanya digunakan untuk makna memerangi orang kafir. Oleh karena itu, Syaikh 'Abdurrazaq bin 'Abdul Muhsin Al 'Abaad menyatakan bahwa definisi terbaik dari jihad adalah definisi Ibnu Taimiyah di atas dan beliau menyatakan: Dipahami dari pernyataan Ibnu Taimiyah di atas bahwa jihad dalam pengertian syar'i adalah istilah yang meliputi penggunaan semua sebab dan cara untuk mewujudkan perbuatan, perkataan dan keyakinan (*i'tiqad*) yang Allah cintai dan ridhoi serta menolak perbuatan, perkataan dan keyakinan yang Allah benci dan murkai.

Kata jihad bila didengar banyak orang maka konotasinya adalah jihad memerangi orang kafir. Padahal hal ini hanyalah salah satu dari bentuk dan jenis jihad karena pengertian jihad lebih umum dan lebih luas dari hal tersebut. Oleh karena itu, Imam Ibnul Qayyim menjelaskan jenis jihad ditinjau dari obyeknya dengan menyatakan bahwa jihad memiliki empat tingkatan, yaitu **(1) jihad memerangi hawa nafsu, (2) jihad memerangi syetan, (3) jihad memerangi orang kafir dan (4) jihad memerangi orang munafik.** Namun dalam keterangan selanjutnya Ibnul Qayyim menambah dengan jihad melawan pelaku kezhaliman, bid'ah dan kemungkar.

Kemudian beliau menjelaskan 13 tingkatan bagi jenis-jenis jihad di atas dengan menyatakan bahwa **jihad memerangi nafsu** memiliki empat tingkatan:

- 1) Jihad memeranginya untuk belajar petunjuk ilahi dan agama yang lurus yang menjadi sumber keberuntungan dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Siapa yang kehilangan ilmu petunjuk ini maka akan sengsara di dunia dan akhirat.
- 2) Jihad memeranginya untuk mengamalkannya setelah mengilmuinya. Kalau tidak demikian, maka sekadar hanya mengilmuinya tanpa amal, jika tidak membahayakannya, maka tidak akan memberi manfaat.
- 3) Jihad memeranginya untuk berdakwah dan mengajarkan ilmu tersebut kepada yang tidak mengetahuinya. Kalau tidak demikian, ia termasuk orang yang menyembunyikan petunjuk dan penjelasan yang telah Allah turunkan. Dan ilmunya tersebut tidak bermanfaat dan tidak menyelamatkannya dari adzab Allah.
- 4) Jihad memeranginya untuk tabah menghadapi kesulitan dakwah, gangguan orang dan sabar memanggulnya karena Allah.

Berdasarkan apa yang diuraikan kelompok Muslim pada halaman situs web mereka mengenai Jihad maka dapat disimpulkan bahwa pandangan mereka termasuk dalam kategori moderat.

## 7. Islam House

Kelompok yang menamakan dirinya Islam House ini memiliki alamat situs web pada <http://www.islamhouse.com> dengan lokasi di Riyadh, Saudi Arabia Po. Box: 29465, Riyadh: 11457. Kelompok situs IslamHouse.com bertujuan untuk mengenalkan Islam dan kemuliaannya kepada non muslim dengan puluhan bahasa dunia, serta meluruskan pemahaman yang keliru seputar agama Islam dan menepis kesalah pahaman terhadapnya serta memberikan pemahaman terkadap kaum muslimin seputar ajaran-ajaran islam yang meliputi aqidah, ibadah, dan hal-hal yang harus diketahui oleh setiap muslim sesuai dengan manhaj ahlussunnah wal jamaah menurut pemahaman salafusshalih semoga Allah meridhai mereka semua.

Pandangan kelompok ini dikemukakan oleh Erwandi Tarmizi dalam tulisannya yang berjudul "Konsep Jihad Dalam Islam" yang

menyatakan bahwa ada opini yang berkembang di tengah masyarakat Islam hampir di seluruh belahan dunia Islam, bahwa jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu (*Mujahadatun nafsi*) sedangkan jihad mengangkat senjata melawan orang kafir hanyalah jihad kecil, biasanya ungkapan ini disertai dengan menyitir sebuah hadist Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam, sepulang beliau dari sebuah peperangan melawan orang kafir yang mengatakan: “Kalian datang dari melakukan suatu amal yang paling baik, dan kalian datang dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar, yaitu: seorang hamba melawan hawa nafsunya.”

Opini ini perlu diberi catatan dari beberapa sisi. Hadits yang dijadikan landasan opini diatas “mardud” didhaifkan oleh banyak ulama hadist, diantaranya; Al Baihaqi, Al Iraqi dan As Suyuthi dalam Al Jami` As Shaghir, dikarenakan seorang perawinya yang bernama Yahya bin Al `Ala` seorang yang tertuduh sebagai pemalsu hadits seperti yang dijelaskan Ibnu Hajar dalam “*Taqrib at tahzib*”. Jadi pembagian jihad kepada; jihad ashghar dan jihad akbar tidak mempunyai dalil yang kuat.

- Makna jihadun nafsi terlalu luas, sebagian orang memahaminya dengan terminologi masing-masing, andai maksudnya membersihkan jiwa dengan zikir, wirid-wirid khusus dan amalan-amalan sunnat tentulah jihad memerangi orang-orang kafir lebih mulia disisi Allah, sebagaimana ketentuan Q.S. An Nisaa` :95-96 yang berbunyi:

المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما . درجات منه ومغفرة وفضل الله )

( ورحمة وكان الله غفورا رحيمًا )

*Dan Allah melebihi orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang tidak ikut berjihad dengan pahala yang besar. Beberapa derajat dari Allah, maghfirah dan rahmat-Nya, adalah Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang*

Makna *jihadun nafsi* mengendalikan jiwa untuk selalu merealisasikan *tauhid*, kafir terhadap *thaghut* dan komitmen dengan seluruh syari`at Allah, tidak dapat diingkari bahwa jihadun nafsi adalah asas dan jihad memerangi kekafiran merupakan salah satu hasil dari jihadun nafsi. Implikasinya bahwa orang yang sukses dalam jihad memerangi orang kafir dengan meraih syahadah yang dapat memberikan syafa`at untuk 72 orang anggota keluarganya dan kekal dalam surga Allah hanyalah orang yang berhasil melewati fase awal jihad, yakni jihadun nafsi.

Inilah makna ungkapan Ibnu Al Qayyim, “ Manakala jihad

memerangi musuh-musuh Allah (orang-orang kafir) hanya bagian dari jihad nafsi dalam merealisasikan tauhid ... maka jihadun nafsi lebih diprioritaskan dari pada jihad mengangkat senjata menumpas kekafiran. Ungkapan “jihad akbar adalah *jihadun nafsi*” sering disalahgunakan untuk mengecilkan peran orang yang memanggul senjata mengorbankan anak, isteri dan harta benda demi tegaknya kalimat Allah, bahkan untuk melemahkan dan menghalangi orang berjihad *fi sabilillah*, dengan mengatakan bahwa menyibukkan diri dengan jihad akbar lebih *afdhal*, padahal andai kita mencermati dengan seksama tentunya kita akan mengambil kesimpulan bahwa konsisten dengan jihadun nafsi mengharuskan kita untuk berjihad *fi sabilillah* jika memang waktunya telah tiba.

Berdasarkan apa yang diuraikan kelompok Islam House pada halaman situs web mereka mengenai jihad maka dapat disimpulkan bahwa pandangan mereka termasuk dalam kategori radikal.

## 8. Jaringan Islam Liberal

Kelompok Jaringan Islam Liberal (JIL) memiliki situs web beralamat pada <http://www.islamlib.com>, dengan lokasi berada di Jalan Utan Kayu, No. 68H, Jakarta Timur 13120. Kelompok ini berpijak pada penafsiran Islam yang memihak kepada kaum minoritas yang tertindas dan dipinggirkan. Setiap struktur sosial-politik yang mengawetkan praktek ketidakadilan atas minoritas adalah berlawanan dengan semangat Islam. Minoritas di sini dipahami dalam maknanya yang luas, mencakup minoritas agama, etnik, ras, jender, budaya, politik, dan ekonomi.

Islam Liberal meyakini bahwa urusan *beragama* dan *tidak beragama* adalah hak perorangan yang harus dihargai dan dilindungi. Islam Liberal tidak membenarkan penganiayaan (persekusi) atas dasar suatu pendapat atau kepercayaan. Adapun misi JIL adalah: Pertama, mengembangkan penafsiran Islam yang liberal sesuai dengan prinsip-prinsip yang kami anut, serta menyebarkannya kepada seluas mungkin khalayak; Kedua, mengusahakan terbukanya ruang dialog yang bebas dari tekanan konservatisme. Kami yakin, terbukanya ruang dialog akan memekarkan pemikiran dan gerakan Islam yang sehat; Ketiga, mengupayakan terciptanya struktur sosial dan politik yang adil dan manusiawi.

Pandangan kelompok ini terhadap konsep jihad dikemukakan oleh oleh M. Guntur Romli yang mengatakan sebagai berikut: "Saya hendak menegaskan bahwa arti jihad adalah *perjuangan* bukan *peperangan*. Ia bisa mengalami evolusi sesuai dengan konteksnya. Qitalhanyalah salah satu corak dari model jihad yang beragam. Sementara 'penguncian' jihad pada makna peperangan merupakan modus penggerusan terhadap keragaman model jihad yang mesti dilawan. Adapun mengenai ayat-ayat *qital*, sebagaimana menurut Gamal Al-Banna, merupakan ayat-ayat "situasional". Maksudnya adalah ayat-ayat sejenis ini tidak bisa dipisahkan dari situasi: sebab-musabab dan tujuan yang melahirkannya."

Selanjutnya Guntur Romli mengatakab bahwa perang adalah keterpaksaan untuk mempertahankan diri (*difâ' an al-nafs*), bukan kebringasan untuk melakukan penyerangan (*al-hujûm*). Justeru perang pada era Rasulullah dilegalkan untuk mempertahankan prinsip kebebasan beragama (*urriyah al-'aqîdah*) yang dirongrong oleh kekuatan bersenjata. Bukan seperti dalih para kawan terorisme saat ini yang menggunakan jihad untuk memberhanguis prinsip kebebasan beragama ataupun usaha untuk menebarkan bibit-bibit kebencian.

Sudah seharusnya kita melakukan pembebasan untuk melawan modus "penguncian" yang terjadi pada sebagian besar doktrin agama Islam khususnya doktrin jihad ini. Lebih-lebih lagi, doktrin ini sering dijadikan sebagai kekuatan dan penghalalan ideologi terorisme. Adapun "mengunci" jihad hanya pada makna peperangan, ataupun melayangkan sederet cap; kafir, musyrik, murtad, dan sesat secara membabi-buta hanya pada golongan non-muslim atau pada musuh politiknya, merupakan penafsiran yang sewenang-wenang atas nama Tuhan dan Al-Quran. Tuhan tidak butuh jihad ataupun qital agar Dia menjadi Mahakuasa. Pun Al-Quran adalah "kitab terbuka". Siapapun berhak untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran—tidak hanya sekedar membaca dan melagukannya saja. Namun tidak seorang pun memiliki hak dan sedikitpun otoritas untuk "mengunci" makna Al-Quran hanya pada penafsirannya saja.

Berdasarkan apa yang diuraikan kelompok jaringan Islam Liberal pada halaman situs web mereka mengenai jihad maka dapat disimpulkan bahwa pandangan mereka termasuk dalam kategori moderat.

## 9. Wikipedia

Wikipedia merupakan ensiklopedia isi bebas yang dimulai pada tahun 2001 (versi bahasa Indonesia dimulai pada tahun 2003). Artikel-artikel di Wikipedia merupakan hasil kolaborasi oleh para penyumbang dari seluruh dunia. Situs ini merupakan situs wiki, yang berarti siapapun dapat menyunting artikel, memperbaiki dan menambahkan informasi, hanya dengan mengklik pranala sunting yang berada di atas setiap halaman.

Wikipedia dengan alamat situs web pada <http://id.wikipedia.org/wiki/jihad> merupakan merek dagang dari Wikimedia Foundation, Inc. yang juga telah membuat keseluruhan keluarga Wikipedia, antara lain Wikiquote, Wiktionary, Wikisource, Wikibooks dan Wikinews. Di Wikipedia dan proyeknya yang lain,

Wikipedia dimulai pada 15 Januari 2001 oleh Jimmy Wales, Larry Sanger, dan beberapa kolaborator antusias bahasa Inggris. Kini ada 13.000 kontributor aktif yang mengerjakan 7.000.000 artikel dalam lebih dari 250 bahasa. Saat ini terdapat 167.365 artikel dalam bahasa Indonesia; setiap harinya ratusan ribu pengunjung dari seluruh dunia membuat puluhan ribu suntingan dan membuat ribuan artikel baru di Wikipedia berbahasa Inggris.

Menurut ensiklopedia online ini arti kata jihad sering disalahpahami oleh yang tidak mengenal prinsip-prinsip Din Islam sebagai ‘perang suci’ (*holy war*); istilah untuk perang adalah *qital*, bukan jihad. Jihad dalam bentuk perang dilaksanakan jika terjadi fitnah yang membahayakan eksistensi ummat (antara lain berupa serangan-serangan dari luar).

Pada dasar kata arti jihad adalah “berjuang” atau “ber-usaha dengan keras” , namun bukan harus berarti “perang dalam makna “fisik” . jika sekarang jihad lebih sering diartikan sebagai “perjuangan untuk agama”, itu tidak harus berarti perjuangan fisik. Jika meng-artikan jihad hanya sebagai peperangan fisik dan *extern*, untuk membela agama, akan sangat ber-bahaya, sebab akan mudah dimanfaatkan dan rentan terhadap fitnah .

Jika mengartikan jihad sebagai “perjuangan membela agama” , maka lebih tepat bahwa berjihad adalah : “perjuangan menegakkan syariat Islam” . Sehingga berjihad haruslah dilakukan setiap saat, 24 jam sehari, sepanjang tahun, seumur hidup. Jihad bisa ber-arti berjuang

“Menyampaikan atau menjelaskan kepada orang lain kebenaran Ilahi Atau bisa ber-jihad dalam diri kita sendiri” , Bisa saja berjihad adalah : “Memaksakan diri untuk bangun pagi dan salat Subuh , walau masih mengantuk dan dingin dan memaksakan orang lain untuk salat subuh dengan menyetel TOA mesjid dan memperdengarkan salat subuh.” dlsb.

Berdasarkan apa yang diuraikan Wikipedia pada halaman situs web mereka mengenai Jihad maka dapat disimpulkan bahwa pandangan mereka termasuk dalam kategori moderat.

## 10. *Almuhajirun*

Kelompok ini memiliki alamat situs web pada <http://almuhajirun.net/>. Al-Muhajirun adalah gerakan Islam yang berdiri untuk memenuhi perintah syara' yang ada dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah. Tujuannya adalah untuk meraih ridho Allah SWT. Sejak didirikan, aktivitas Al-Muhajirun berkembang dengan sangat cepat di beberapa negara yang berbeda, seperti: Lebanon, Saudi Arabia, Mauritius, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Indonesia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Perancis dan Inggris. Hari ini, aktivitas Al-Muhajirun telah dikenal luas di dunia internasional, terutama karena perjuangan utama mereka untuk menegakkan kembali negara Islam, Khilafah.

Adapun pendapat kelompok ini tentang jihad dapat dikutip pada halaman web mereka sebagai berikut: “...Masih banyak ayat lain yang mengungkapkan kebencian dan permusuhan orang kafir terhadap Islam. Jika mereka mampu, pasti akan melakukan gerakan-gerakan untuk memurtadkan umat Islam atau memberhagus umat Islam sehingga punah dari muka bumi ini. Karenanya, Allah Subhanahu wa Ta’ala memerintahkan umat Islam untuk mempersiapkan kekuatan fisik guna menghadapi kaum kafirin yang senantiasa dengki dan memusuhi mereka”.

Selanjutnya dikatakan jika mereka mampu, pasti akan melakukan gerakan-gerakan untuk memurtadkan umat Islam atau memberhagus umat Islam sehingga punah dari muka bumi ini. Karenanya, Allah memerintahkan umat Islam untuk mempersiapkan kekuatan fisik guna menghadapi kaum kafirin. Allah Ta’ala berfirman:



وَعَدُوَكُمْ اللَّهُ عَدُوٌّ بِهِ تُرْهَبُونَ الْخَيْلَ رِبَاطٍ وَمِنْ قُوَّةٍ مِنْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مَا لَهُمْ وَأَعْدَاؤُا  
يَعْلَمُهُمُ اللَّهُ نَعْلَمُونَهُمْ لَنَا دُونِهِمْ مِنْ آخِرِينَ

*"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya." (QS. Al Anfal: 60).*

Kandungan ayat ini sangat jelas, Allah memerintahkan kaum mukminin untuk mempersiapkan segala kekuatan yang mampu untuk diwujudkan, baik kekuatan akal, badan, persenjataan, dan semisalnya yang bisa digunakan untuk memerangi orang-orang kafir yang senantiasa berusaha memerangi dan menghancurkan agama Islam dan pemeluknya. Tujuannya, agar niat orang kafir untuk memerangi dan membantai kaum muslimin tidak diwujudkan karena gentar dan takut melihat kekuatan kaum muslimin. Hal ini karena, jika umat Islam memiliki kekuatan dan kemampuan untuk berperang akan membuat takut musuh-musuh dari kalangan kafirin dan munafikin dari melakukan penyerangan. Jika mereka melihat umat Islam lemah, tidak memiliki kekuatan, dan tidak berlatih perang sehingga terlihat tidak mampu menghalau dan melawan musuh, maka mereka akan bersemangat untuk memerangi umat Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala: ". . dan hendaklah mereka bersiaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus." (QS. Al Nisa': 102).

Kesimpulannya, bahwa kaum muslimin harus mulai mempersiapkan jihad dengan mulai berlatih fisik, mempersiapkan alat-alat berperang, dan melakukan upaya-upaya untuk kesempurnaan jihad *fi sabilillah*. Wallahu a'lam bil shawab(syk/alm/Voa-islam).

Berdasarkan apa yang diuraikan kelompok Almuhajirin pada halaman situs web mereka mengenai Jihad maka dapat disimpulkan bahwa pandangan mereka termasuk dalam kategori radikal.

## 11. Voice of al-Islam

Kelompok yang menamakan dirinya Voice of al-Islam ini memiliki alamat situs web pada <http://www.voa-islam.com/> . VOA-Islam dot com didirikan di Bekasi pada bulan April 2009 dan resmi beroperasi



pada tanggal 1 Juni 2009. Latar belakang pendirian tersebut atas dasar keprihatinan atas realita umat islam di Asia Tenggara (pada khususnya) yang makin termarginalkan oleh kapitalis, dan gerakan zionis melalui labelisasi sebagai ekstrimis, konservatif dan fundamentalis thd perjuangan dan dakwah Islam yang Haq, sesuai dengan pemahaman generasi terbaik, *salafus sholeh* (Rasulullah, generasi Tabiin dan Tabiut Tabiin).

VOA Islam memiliki visi “menjadi media terpercaya yang mengedepankan kebenaran dan keadilan secara professional dan terwujudnya masyarakat muslim yang sadar akan kemuliaan dirinya dan peran serta tanggungjawab yang harus diembannya untuk terwujudnya sebuah peradaban yang bermartabat

Pendapat kelompok ini tentang jihad dapat dikutip sebagai berikut: “Bagaimana seseorang bisa mendapatkan derajat syuhada’ kalau dia tidak meninggal dan terbunuh di medan jihad? Dan bagaimana seseorang bisa terbunuh di medan jihad, kalau dia menjauh dari bumi jihad? Padahal mati syahid merupakan jalan besar untuk masuk surga.”

Selanjutnya dikatakan oleh VOA bahwa sudah tepatlah pertanyaan Allah kepada orang-orang yang merindukan surga tapi takut berjihad karena takut mati atau terbunuh di dalamnya, padahal surga tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang mati terlebih dahulu.

الصَّابِرِينَ وَيَعْلَمَ نَكْمَهُمْ جَاهِدُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَلَمَّا الْجِنَّةَ تَدْخُلُوا أَنْ حَسِبْتُمْ أَمْ

*“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar.”* (QS. Ali Imran: 142)

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda,

السُّيُوفُ ظِلَالٌ تَحْتَ الْجَنَّةِ أَنْ وَعَلَّمُوا

*“Ketahuilah bahwasanya surga itu berada di bawah kilatan pedang.”* (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Menurut kelompok ini sesungguhnya kematian adalah sesuatu yang pasti. Setiap yang bernyawa harus merasakannya. Setiap yang tinggal di muka bumi harus mati. Tak seorangpun bisa menghindar darinya. Allah Ta'ala berfirman, *“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati.”* (QS. Ali Imran: 185) Sedangkan kematian di jalan Allah atau terbunuh di dalamnya adalah lebih baik, seandainya mereka tahu dan

meyakininya, dari apa saja yang mereka kumpulkan di dunia ini yang karenanya mereka meninggalkan jihad disebabkan takut mati dan terbunuh. Allah ta'ala berfirman,

يَجْمَعُونَ مِمَّا خَيْرٌ وَرَحْمَةً اللَّهِ مِنْ لَمَعْفَرَةٍ مُتُّمْ أَوْ اللَّهُ سَبِيلٌ فِي فِتْنَتُمْ وَلَيْنَ

“Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik (bagimu) dari harta rampasan yang mereka kumpulkan.” (QS. Ali Imran: 157)

Imam Ibnu Katsir berkata, “Firman Allah ini mengandung makna bahwa terbunuh di jalan Allah (jihad) dan juga meninggal (di dalamnya) merupakan sarana mendapatkan rahmat Allah, ampunan dan keridhaan-Nya. Dan itu lebih baik daripada tetap tinggal di dunia dan mengumpulkan semua kemewahannya yang fana.”

Berdasarkan apa yang diuraikan kelompok VOA pada halaman situs web mereka mengenai Jihad maka dapat disimpulkan bahwa pandangan mereka termasuk dalam kategori radikal.

## 12. Arrahmah Media Network

Kelompok ini memiliki alamat situs web <http://arrahmah.com/>. Ar Rahmah Media adalah jaringan media Islam yang bertujuan memberikan informasi berimbang tentang Islam dan dunia Islam di tengah-tengah arus informasi modern dan globalisasi. Ar Rahmah Media menjadikan media jurnalisme sebagai wadah perjuangan intelektual dan spiritual untuk membangun kehidupan dunia yang lebih baik.

Ar Rahmah Media dalam aktivitasnya mengembangkan strategi jurnalisme investigatif, argumentatif, dan Persuasif. Investigatif berarti melakukan investigasi berimbang dengan konsep *tabayyun*. Argumentatif berarti mengedepankan argumentasi yang kuat dan ilmiah (bersumber dari Al Qur'an dan As Sunnah) tanpa meninggalkan realitas kekinian. Persuasif berarti mengajak sekaligus membuka diri terhadap seluruh komponen ummat kepada kebaikan.

Visi Ar Rahmah Media adalah menebarkan Islam sebagai *Rahmatan lil Alamien*, mencerahkan dan mencerdaskan umat, serta meneladani generasi terbaik ummat (Salafus Sholeh). Misi Ar Rahmah Media adalah dakwah menuju tatanan dunia yang lebih baik dan membangun jaringan kerjasama secara luas demi tegaknya *Izzul Islam wal Muslimin*.

Pendapat kelompok ini tentang jihad dapat dikutip sebagai berikut:

“Saat ini, masyarakat mulai mendiskusikan hukum pengeboman terhadap properti, mobil dan tempat-tempat umum lainnya, dan kami mendengar beberapa pendapat yang menarik bahwa pengeboman dan peledakan tersebut bukan ‘jalan penyelesaian masalah’ atau ‘kebangkitan’. Itu adalah pendapat yang sangat menarik, tapi tidak fair, ini adalah sebuah penilaian (analisis) yang tidak adil dari para “pengamat” Islam. Peledakan-peledakan tersebut hanyalah sebuah ikhtiar, dan bukanlah jalan hidup atau metode mencapai tujuan. Oleh karena itu hukum dari ikhtiar tersebut akan sama dengan hukum dari target dan tujuannya.

Menurut kelompok ini, pengeboman punya sebuah tujuan. Memiliki buah dan hasil serta dalil. Ini berbeda dengan apa yang orang simpulkan tentang tujuan pengeboman. Ini bukanlah persoalan benar salah ataupun fair tidak fair bagi seseorang menerima bahwa hukumnya semata-mata berdasarkan upaya untuk menyempurnakan tujuan. Orang-orang yang mengutuk penyerangan-penyerangan tersebut tidak pernah berhenti berpikir, baik tentang tujuan pengeboman maupun targetnya. Masyarakat (dilandasi perasaan dan rasio semata) mengutuk pengeboman-pengeboman yang terjadi dan tidak pernah berpikir mengapa tempat-tempat tersebut menjadi target pengeboman. Masyarakat bahkan mulai bertanya, “Dapatkah kita menggunakan bom bunuh diri di Palestina?”

Berdasarkan apa yang diuraikan kelompok Ar Rahmah Media Network pada halaman situs web mereka mengenai Jihad maka dapat disimpulkan bahwa pandangan mereka termasuk dalam kategori radikal.

## **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dan dengan mengacu pada pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, ajaran mengenai jihad yang menganjurkan radikalisme merupakan yang terbanyak ditemui di media internet yaitu sebanyak 50% (ditemukan pada enam situs web), sedangkan pandangan mengenai jihad yang bersifat moderat dan netral adalah masing-masing 40% (ditemukan pada lima situs web) dan 10% (ditemukan pada satu situs web). *Kedua*, ajaran jihad moderat yang muncul di Internet pada umumnya disampaikan oleh organisasi resmi yang sebagian besar

berlokasi di Indonesia seperti organisasi pendidikan, organisasi da'wah dan sebagainya. *Ketiga*, ajaran jihad radikal yang muncul di Internet pada umumnya disampaikan oleh organisasi atau kelompok resmi maupun tidak resmi dengan kegiatan di bidang da'wah yang sebagian berlokasi di Indonesia ataupun di luar negeri.

Sebagai saran, maka perlu ada usaha mengupayakan peningkatan jumlah situs web dengan ajaran jihad moderat dalam upaya menangkal ajaran jihad radikal yang dapat berujung pada radikalisme dan bahkan terorisme yang sama sekali tidak menguntungkan masyarakat umum.

### **Daftar Pustaka**

Alquran dan terjemahannya oleh Departemen Agama RI.

Griffin, E.M, 2003, *A First Look At Communication Theory, Special Consultant Glen McClish, Fifth Edition*, McGraw Hill.

Krippendorff, K , 1980, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Beverly Hills, CA, Sage Publication.

Littlejohn, Stephen W. dan Foss, Karen A, 1988, *Theories of Human Communicatio*, Belmont, Wadsworth Publishing Company.

McLuhan, Marshal dan Fiore, Quentin , 1967, *The Medium is the Massage*, New York, Bantam.

McLuhan, Marshal ,1964, *Understanding Media*, New York, McGraw-Hill.

McQuail, Dennis, 2000, *McQuail's Mass Communication Theory, 4th Edition*, London, Sage Publication Ltd.

Walizer, M.H. & Wienir, P.L., 1978, *Research Methods and Analysis: Searching for Relationship*. New York, Harper & Row.

West, Richard dan Turner, Lynn H, 2007, *Introducing Communication Theory*, New York, McGraw-Hill.

Wimmer, Roger D dan Dominick, Josep R. , 2003, *Mass Media Research: An Introduction, 7th Edition*. Belmont, Wadsworth Publishing Company.

# PERSEPSI MAYARAKAT TENTANG “TALKSHOW INDONESIA LAWYERS CLUB” DAN ASPEK KETAHANAN NASIONAL

**Elva Ronaning Roem dan Yesi Puspita**

## **Latar belakang**

Program acara Indonesia *Lawyers Club* yang ditayangkan oleh TV One, salah satu program acara televisi milik Bakrie ini terkadang dianggap punya faktor negatif dan memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat sebagai penonton. Program acara yang ditayangkan *live* di TVOne setiap Selasa pukul, 19.30-21.00 WIB dengan *host* seorang wartawan senior. Program acara tersebut, selalu membahas isu-isu terkini, dengan diselingi debat yang cukup “panas” sampai dengan humor dari pembicara, memicu polemik dalam masyarakat, sebab disetiap acaranya selalu menuai pro dan kontra baik, yang berada dalam studio maupun masyarakat yang menonton di rumah. Apakah program televisi sampai mengganggu aspek kestabilan ketahanan nasional Republik Indonesia? Pertanyaan tersebut yang akan didiskusikan dalam tulisan ini.

Televisi sebagai media komunikasi, diakui telah banyak memberikan sumbangsih bagi perkembangan peradaban manusia, namun, di balik hal-hal positif yang disebarkan, televisi juga kerap dituding sebagai media yang menyebarkan kekerasan, pornografi, tayangan yang berbau mistik, serta tayangan yang merusak ketahanan nasional. Kehadiran stasiun televisi yang “sehat” dan mendidik pun semakin dirasakan kebutuhannya, terutama oleh keluarga di negara berkembang seperti di Indonesia.

Media massa seharusnya berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa sebagaimana yang dahulu di pergunakan para pejuang kita untuk mempertahankan ketahanan nasional, namun kini yang terjadi justru

jauh berbeda dari fungsi yang sebenarnya. Televisi swasta nasional milik Aburizal Bakrie ini berkiprah sejak awal tahun 2008 lalu, tidak sedikit pula banyak masyarakat yang keberatan dengan tayangan-tayangan berani dan kritisnya, mungkin sesuai dengan prinsip “Memang Beda” TV One, dianggap menjadi televisi yang sensasional dimata masyarakat.

Indonesia *Lawyers Club* (ILC) merupakan suatu program televisi yang dapat dikatakan sebagai suatu acara yang dapat memberikan pengetahuan dan wawasan terhadap masyarakat terutama Indonesia terhadap berbagai permasalahan bangsa yang dikupas secara luas dan dapat dijelaskan dari berbagai sisi dan sudut pandang. Program ini dimeriahkan dengan adanya diskusi dan debat mengenai topik yang dibahas tersebut. Program yang dibawakan oleh Karni Ilyas ini dihadiri oleh para tamu undangan yang cukup menjanjikan, mulai dari kalangan mahasiswa, hingga para pejabat Negara. Mereka semua berasal dari kalangan pemilik kenamaan di panggung politik, hukum, seni, dan budaya hingga penerus bangsa. Mereka semua dihadirkan untuk berbagi serta memberikan pendapat, tanggapan, dan analisa mereka terhadap permasalahan yang akan dibahas tersebut. Program yang disiarkan pada pukul 19.30 WIB ini, menyajikan berbagai masalah pelik yang melanda negara Indonesia dan tentunya sedang hangat di telinga para masyarakatnya. Permasalahan tersebut disajikan lewat prinsip kebebasan berpendapat di muka umum oleh para nara sumber.

Program Indonesia Lawyers Club memanglah sebuah wadah dan saluran diskusi yang membahas berbagai konflik bangsa Indonesia, yang dapat dengan bebas mengajukan pendapat, namun bukanlah sebebas-bebas mungkin. Kebebasan pendapat, sampai pada perbedaan pendapat yang begitu kontras tidak terlihat dibatasi. Pada akhirnya menyebabkan adanya adu argument dengan memamerkan dan terlalu memuji diri sendiri, saling menyerang ranah pribadi, membuka aib orang lain hingga saling mengolok-olok. Kata-kata yang disuguhkan tajam, beberapa kali muncul kata-kata yang tak pantas disebut. Beberapa topik pembicaraan, muncul posisi seolah wibawa pemerintah menjadi hilang, dan bisa jadi mengancam aspek stabilitas ketahanan nasional, karena aspek sistem pertahanan secara luas dianggap remeh oleh politisi dan para ahli hukum.

Penelitian mengenai media massa terkait dengan program acara *Talkshow* ini sejak lama menarik perhatian banyak kalangan ilmuwan dan masyarakat, sebab ada yang bersifat pro maupun kontra setelah

menyaksikan tayangan ini. Menurut Pawito, yang mengutip Dye dan Zeigler (1986: 3), pandangan Laswell yang menyatakan bahwa informasi bukan hanya merupakan persoalan *who gets what, when and how* (siapa, memperoleh apa, kapan, dan bagaimana). Melainkan juga *who says what ini which channel to whom with what effect* (siapa menyatakan apa melalui saluran mana, kepada siapa, dengan pengaruh apa). Menurut Littlejohn (1996: 40) secara teortis, khalayak media massa dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu khalayak aktif dan khalayak pasif. Khalayak aktif, yaitu khalayak yang sudah biasa melakukan seleksi dalam mengikuti media, sehingga pengaruh media tidaklah begitu perkasa. Bagi khalayak pasif, media massa berpengaruh kuat.

Salah satu penelitian yang berkaitan tentang penelitian ini adalah penelitian Pembentukan Opini Publik Tentang Citra Polisi Sebagai Dampak Berita Tindak Kriminal Polisi di Media Massa ditulis oleh Tika Primasiwi dari Universitas Diponegoro Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan opini tentang citra polisi sebagai dampak berita tindak kriminal oleh polisi sedikit mengalami perbedaan dengan proses pembentukan opini dan persepsi. Dikemukakan oleh W. P. Davidson (dalam Kasali, 2003: 25), pembentukan persepsi terjadi pada empat faktor yaitu, pengalaman, latar belakang budaya, nilai yang dianut, dan berita yang berkembang sehingga terbentuk opini,serta akan terbentuk opini setelah terbentuk konsensus. Persepsi juga terbentuk dari pengalaman dan terpaan media massa sehingga membentuk opini. Pengungkapan opinipun tidak serta merta menjadi opini publik, namun opini terpecah dahulu menjadi opini minoritas dan mayoritas. Hanya opini mayoritaslah yang membentuk konsensus dan menjadi opini publik.

Suguhan program acara yang bersifat *talkshow*, terkadang terjadi literasi terhadap media sebagai sumber informasi. Menurut Elvinaro (2007: 216) tahapan literasi media terdiri dari peduli akan pentingnya mengelola media, membuat pilihan tontonan, mengurangi waktu menonton televisi, video, *games*, film, dan berbagai bentuk media cetak. Media juga perlu mempelajari beberapa keahlian khusus untuk melihat secara kritis, belajar menganalisis, dan bertanya apa yang ada di dalam *frame*, bagaimana hal itu terbentuk, dan hal apa yang akan terlewati.

Menurut Rubin (dalam Baran, 2004: 51), batasan literasi media berarti keahlian memahami dan menggunakan isi media massa secara



efektif dan efisien. Literasi media adalah memahami sumber-sumber dan teknologi-teknologi dari komunikasi, kode-kode yang digunakan, pesan yang akan diproduksi dan seleksi, interpretasi dan bentrokan dari pesan-pesan tersebut. Pandangan lain menyebutkan literasi media adalah suatu kumpulan perspektif yang aman dimana secara aktif seseorang mengungkap dirinya ke media untuk menafsirkan pemaknaan pesan-pesan yang diterimanya.

Menurut Lasswell (1970: 103), ada tiga fungsi utama media massa dalam masyarakat, yaitu: (1) pengawas lingkungan (*surveillance of environment*); (2) korelasi antar bagian-bagian dalam masyarakat dalam memberikan reaksi terhadap lingkungan (*correlation of the parts of society in responding to the environment*); (3) Transmisi warisan sosial budaya, yang dilakukan secara berkesinambungan yang berhubungan dengan penyampaian informasi dari generasi ke generasi berikutnya (*Transmission of the social heritage of generation to the next*). Wright (2000: 80) menambahkan fungsi media keempat ke dalam daftar yang telah dibuat oleh Lasswell yaitu sebagai sarana untuk memperoleh hiburan, di samping melihat adanya fungsi atau efek positif dan disfungsi atau efek negatif media. Teori Dependensi yang dikembangkan DeFleur dan Sandra Ball-Rokeach (1976: 70) memfokuskan pada kondisi struktural suatu masyarakat yang mengatur kecenderungan terjadinya suatu efek media massa. Teori ini pada dasarnya merupakan suatu pendekatan struktur sosial yang berangkat dari gagasan mengenai sifat suatu masyarakat, di mana media massa dapat dianggap sebagai sistem informasi yang memiliki peran penting dalam proses pemeliharaan, perubahan, dan konflik pada tataran masyarakat, kelompok atau individu dalam aktivitas sosial. Pemikiran terpenting dari teori ini adalah bahwa dalam masyarakat modern, audiens menjadi tergantung pada media massa sebagai sumber informasi bagi pengetahuan, tentang dan orientasi kepada, apa yang terjadi dalam masyarakatnya.

Persepsi sendiri dapat didefinisikan sebagai proses yang digunakan untuk menginterpretasikan data sensoris. Data sensoris sampai pada penikmat media massa melalui lima indera dalam tubuh manusia normal, yaitu indera pendengaran, indera penciuman, indera penglihatan, indera perasa, dan indera peraba. Ada dua jenis pengaruh dalam persepsi yaitu pengaruh struktural dan pengaruh fungsional. Pengaruh struktural pada persepsi berasal dari aspek-aspek fisik rangsangan



yang terpapar pada penikmat media massa. Pemberitaan media massa, baik ataupun buruk, akan tersampaikan kepada masyarakat penikmat media massa sebagai sebuah pesan yang diterima oleh otak. Pesan inilah yang kemudian menjadi persepsi. Pengaruh fungsional merupakan faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi persepsi, dan karena itu membawa pula subyektivitas kedalam proses penilaian.

Bagaimana persepsi terbentuk tidaklah dalam waktu yang singkat, melainkan dalam waktu yang relatif lama, tergantung pada tingkat kedewasaan dan intelegensi masyarakat sebagai objek penikmat media massa. Individu dalam masyarakat lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menikmati kabar yang tertuang dalam media massa, maka waktu untuk membentuk persepsi tersebut semakin singkat. Sejalan dengan hal tersebut adalah jika individu sebagai objek dari media massa tersebut tidak dikaruniai tingkat kedewasaan dalam berpikir kritis dan intelegensi yang memadai pula maka persepsi yang terbentuk akan berbeda. Bukan hanya frekuensi atau waktu yang di habiskan penikmat media massa yang mempunyai efek lebih besar, tetapi ternyata isi dari media massa yang bersangkutan lebih berperan dalam membentuk persepsi masyarakat.

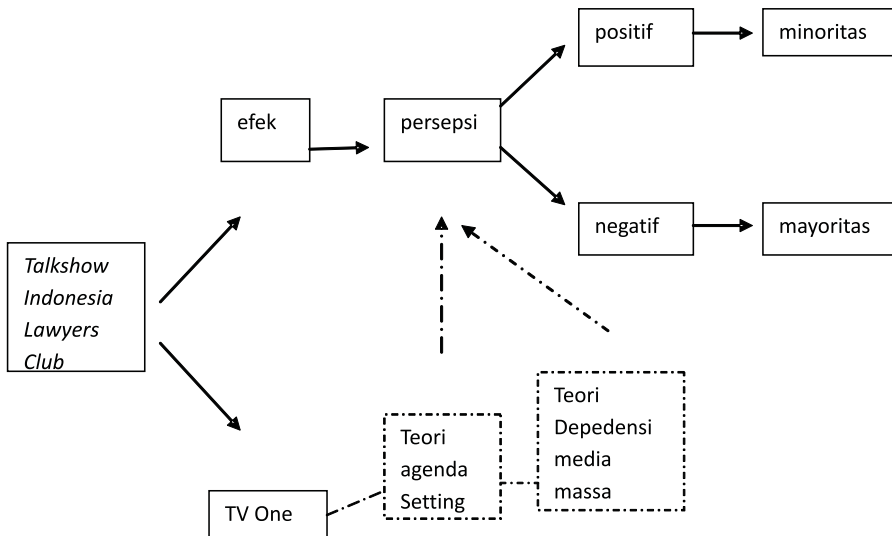
### **Penelitian Persepsi Masyarakat Tentang *Talkshow* ILC - TV One**

Penelitian persepsi Masyarakat tentang *Talkshow* Indonesia *Lawyers Club* Di TV One, mencoba untuk mengetahui persepsi masyarakat di Kota Padang mengenai masalah ini, sehingga dapat diketahui apakah acara ILC ini memiliki hubungan dengan aspek ketidakstabilan ketahanan nasional.

Defenisi lain tentang persepsi yaitu dari Severin dan Tankard Jr. (1988: 121) yang menyatakan bahwa persepsi merupakan sebuah *complex process by which people select, organize and interpret sensory stimulation into a meaningful and coherent picture of the world*. Dalam hal ini individu-individu pada dasarnya tidak bersifat pasif, tetapi bersifat aktif dalam proses persepsi. Kedua ahli ini mengamati bahwa persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor psikologis, seperti asumsi, motivasi, penghargaan terhadap nilai-nilai budaya, minat, dan sikap. Berkenaan dengan hal ini, peneliti berpendapat bahwa faktor-faktor sosiokultural dan demografik seperti pekerjaan, tingkat pendidikan, umur, dan status ekonomi mempengaruhi timbulnya faktor-faktor psikologis tadi.

Adanya program unggulan TV One ini sedikit banyaknya menimbulkan *shock culture* terutama bagi masyarakat awam, dimana dalam program yang disiarkan secara *live* ini menampilkan bentuk komunikasi yang: tegas, langsung, terbuka. Contohnya saja proses peradilan yang dibingkai media. Artinya masyarakat yang belum siap menerima pesan seperti itu akan merasa bingung atau *confuse*, dan mungkin tertekan akibat komunikasi yang selama ini belum ada yang berani tampil beda seperti itu dalam penayangan *talkshow* yang sarat dengan isu-isu hukum, politik, dan pemerintahan.

Menurut Agee, et al. (2001: 279), dari semua media komunikasi yang ada, televisilah yang paling berpengaruh pada kehidupan manusia. Tayangan televisi mereka dijejali hiburan, berita, dan iklan. Kaitannya dengan program *Talkshow Indonesia Lawyers Club* ini, sebenarnya memberikan wawasan mengenai aspek hukum, politik, sosial, budaya, dan pemerintahan. Artinya ini merupakan sisi positif dari acara tersebut, selain *up date* informasi yang sedang *hot* saat ini. Persepsi tentang sebuah acara yang bersifat *talkshow* dapat dikaitkan dengan komunikasi. Hakekat komunikasi sendiri adalah penyampaian informasi atau pesan dari komunikator kepada komunikan. Berikut alur pikir persepsi masyarakat terhadap program acara *Talkshow Indonesia lawyers Club* di TV One yang diduga dapat memicu aspek ketidakstabilan ketahanan nasional.



Gambar 5.14. Kerangka pikir

## Metode Penelitian

Guna mencapai tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat tentang pesan-pesan mereka dalam program acara Indonesian *Lawyer Club*, maka jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode pengumpulan data *focus group discussion*, wawancara, dan observasi. Watt dan Berg (1995: 360-362), mengemukakan bahwa metode *focus group discussion* sering disebut *focus group interview* pada dasarnya merupakan metode ilmiah kualitatif bersifat *class procedure* dengan kehadiran seorang moderator yang memfasilitasi jalannya diskusi atau interview.

Penelitian ini juga dilakukan dengan cara prosedur, yakni dilakukan pada masyarakat Sumbar yang tinggal di beberapa kelurahan, yakni Kelurahan Bungus, Kecamatan Teluk Kabung, Kelurahan Gunung Sariak, Kecamatan Kuranji, Kelurahan Marapalam Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan. Keempat kelurahan tersebut dianggap mewakili dalam penelitian ini. Masing-masing kelurahan dan kecamatan terpilih beberapa masyarakat yang teracak dan dianggap mampu mengikuti *focus group discussion* atau *focus group interview*, mereka adalah lima belas (15) orang kelompok khalayak, dari kalangan pekerja yang tinggal di Kelurahan Bungus, Kecamatan Teluk Kabung, sepuluh (10) orang partisipan pegawai negeri, dari Kelurahan Gunung Sariak, Kecamatan Kuranji, dan mahasiswa beserta akademisi masing-masing sepuluh (10) orang dari dua Kelurahan, yakni Kelurahan Marapalam Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Teluk Bayur, dan Kecamatan Padang Selatan. Adapun kalangan pekerja yang menjadi kelompok masyarakat dalam penelitian ini terdiri dari kalangan kelas bawah secara sosial dan ekonomi.

Kelompok Pegawai Negeri pada umumnya berusia dewasa, sedangkan mahasiswa adalah kalangan muda dengan status sosial ekonomi lebih mapan. Kalangan akademisi, mereka adalah orang-orang dewasa dengan kemampuan penalaran tinggi dan status ekonomi-sosial yang mapan. Keempat kelompok masyarakat ini diundang pada waktu dan tempat yang berbeda, dan seorang moderator dihadirkan untuk kepentingan ini. Fokus grup dilakukan sebanyak lima (5) pertemuan mulai dari Januari hingga Maret 2012. Sebelum diskusi dimulai, kepada masing-masing kelompok disajikan program acara Indonesia *Lawyers Club*.

Adapun topik khusus yang didiskusikan dalam FGD tersebut adalah program acara yang sudah ditayangkan Indonesian *Lawyers Club* di TV One.

**Tabel 5.12. Tema dan Waktu Tayang Indonesia *Lawyers Club***

No	Tema Indonesia <i>Lawyers Club</i>	Waktu Tayang
1	Aduh DPR	25 Januari 2012
2	Pengemudi Eksistensi dan 9 Nyawa	31 Januari 2012
3	Setelah Angie, Anas di Bidik	8 Februari 2012
4	Angie....Oh...Angie	22 Februari 2012
5	Mau dibawa Kemana PSSI	6 Maret 2012
6	Anas Siap di Gantung di Monas	14 Maret 2012

Tayangan yang disajikan tersebut berisi tiga item. Item pertama yakni, isu-isu media dan peristiwa yang sedang menjadi topik utama pembicaraan disetiap media. Biasanya peristiwa tersebut menyangkut ranah hukum, politik, dan pemerintahan. *Item kedua* bentuk tayangan yang dibingkai TV One dalam sebuah *theater peradilan media massa* yang sudah disetting oleh TV One dengan mendatangkan para pengacara kondang, anggota legislatif yang pro dan kontra terhadap topik yang diangkat TVOne setiap pekan. Item pemberitaan *ketiga*, tayangan Indonesia *Lawyers Club* yang mengundang respon masyarakat sehingga memunculkan opini masyarakat.

Setelah melihat tayangan tersebut, kelompok masyarakat dipersilahkan mendiskusikan isu-isu pemberitaan selama 30 menit, dan setelah itu baru dilakukan interview.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dari temuan-temuan data analisis maka data yang sering diperoleh adalah sebagai berikut:

#### **Isu yang paling sering didiskusikan dalam Indonesian *Lawyers Club* di TV One**

Persoalan yang paling banyak didiskusikan oleh semua kelompok, pada program acara Indonesian *Lawyers Club* di TV One adalah, TV One lebih banyak mengangkat pemberitaan mengandung unsur kepentingan sebuah kelompok dibalik kata-kata. Partisipan juga menyorot Karni

Ilyas, sang pembawa acara dari Indonesia *Lawyers Club*, sebagai pemandu acara yang dinilai kurang berimbang dan dapat menyebabkan masyarakat seperti menjadi terpecah belah dengan adanya penanaman persepsi yang tidak sehat dari media tersebut.

Menurut partisipan, media seharusnya dapat bersifat netral dalam penyampaian dan penyajian suatu masalah. Bukan dengan cara memihak salah satu kubu yang dirasa menguntungkan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa semua kelompok menilai program acara Indonesia *Lawyers Club* yang dipandu oleh Karni Ilyas tidak memberikan solusi, melainkan hanya menjadi “petugas” yang seakan-akan memojokkan pemerintah. Secara keseluruhan, program acara ini lebih menghasilkan suatu persepsi negatif dan menimbulkan masalah menjadi sensitif karena penayangan ini terlihat lebih mengarah pada pendapat pribadi pembawa acara yang dapat menimbulkan polemik bagi sebagian masyarakat, terutama di kota Padang, Sumatera Barat.

Kalangan pekerja dan pegawai negeri cenderung menilai program acara Indonesia *Lawyers Club* memiliki dua sisi. Dipandang dari segi hukum, program acara ini dapat memberikan sentuhan wawasan terhadap masyarakat untuk memperlihatkan suatu bentuk transparansi berbagai keputusan, kebijakan, dan polemik politik di kalangan pemerintah. Pemberian wawasan hukum dan politik, memicu paradigma yang positif dan negatif bagi masyarakat. Sisi positif akan membentuk karakter masyarakat yang dapat lebih mengetahui mengenai kehidupan politik dan lebih taat pada aturan hukum yang ada. Sisi negatif akan memberikan suatu bentuk penanaman persepsi yang dapat menimbulkan adanya paradigma-paradigma negatif yang akan sangat memicu ketidakstabilan ketahanan nasional.

Kelompok mahasiswa dan akademisi, lebih mendiskusikan bahwa program acara Indonesia *Lawyers Club* merupakan program acara yang dapat membawa masyarakat, untuk dapat berpikir lebih aktif, cermat, dan lebih kritis dalam menerima informasi yang diberikan oleh media massa. Para akademisi dan mahasiswa lebih melihat dibalik sisi negatif program acara tersebut juga terdapat sisi positif yang begitu berarti bagi para penikmatnya. Program ini telah mampu memanfaatkan fasilitas media menjadi sebuah forum yang dapat lebih memberikan partisipasi masyarakat untuk tahu dan peka akan permasalahan di negara sendiri.

Partisipan dari kalangan berpendidikan ini juga menilai, bahwa Indonesia *Lawyers Club* banyak memberikan pengetahuan mengenai aturan-aturan hukum dengan adanya sajian jaminan kepastian hukum. Bagi masyarakat awam, program inilah yang sebenarnya diharapkan. Terlepas dari sisi buruk acara ini, partisipan menyatakan semua pesan yang disampaikan dalam program acara *talkshow* Indonesia *Lawyers Club* kembali kepada masing-masing masyarakat pula dalam menyampaikan dan menerima. Partisipan juga mengharapkan program *talkshow* Indonesia *Lawyers Club* ini hendaknya tetap berpedoman pada kode etik jurnalistik dan ketentuan-ketentuan pers, dan KPI juga harus tetap mengawasi dan memfilter tayangan ini, sehingga tidak mengakibatkan aspek sara atau adu domba. Tabel 1 merangkum hasil pembahasan secara valid dari hasil wawancara dengan partisipan yang dijadikan sampel dalam penelitian in.

**Tabel 5.13. Persoalan yang Banyak Dibicarakan**

No	Kelompok Partisipan	Persoalan Yang dibicarakan
1.	Pekerja Buruh dan Pegawai Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program Indonesia Lawyers Club, (ILC) tidak memberikan solusi, melainkan hanya memojokkan pemerintah.</li> <li>▪ Secara keseluruhan, Karni Ilyas lebih menghasilkan suatu persepsi negatif dan menimbulkan masalah karena penayangan ini terlihat lebih mengarah pada pendapat pribadi pembawa acara yang dapat menimbulkan polemik bagi sebagian masyarakat, terutama di kota Padang, Sumatera Barat.</li> <li>▪ Program ILC memberikan wawasan dan pengetahuan yang cerdas, dan memicu paradigma yang positif dan negatif bagi masyarakat.</li> </ul>
2.	Akademisi: Mahasiswa Dan Dosen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indonesia <i>Lawyers Club</i> banyak memberikan pengetahuan mengenai aturan-aturan hukum dengan adanya sajian jaminan kepastian hukum.</li> <li>▪ Indonesia <i>Lawyers Club</i> hendaknya tetap berpedoman pada kode etik jurnalistik dan ketentuan-ketentuan pers, dan KPI</li> </ul>

### **Persepsi Masyarakat Minangkabau Terhadap Program Acara *Talkshow* Indonesia *Lawyers Club***

Berkenaan dengan persepsi terhadap program acara *Talkshow* Indonesia *Lawyers Club*, partisipan diminta untuk mengemukakan

padangan-pandangannya mengenai hal tersebut. Jawaban yang ada menunjukkan kecenderungan bahwa kelompok yang berbeda-beda memiliki persepsi yang berbeda-beda pula mengenai peranan televisi dalam penayangan program acaranya, dengan kata lain perbedaan latar belakang sosio-kultural masyarakat mempengaruhi persepsi mereka terhadap program acara *Talkshow Indonesia Lawyers Club* di TV One.

Hasil analisis menunjukkan bahwa bagi kalangan pekerja dan Pegawai Negeri Sipil mengenai Indonesia *Lawyers Club* di TV One, cenderung memiliki persepsi yang bersifat negatif. TV One dianggap memberikan *shock culture* bagi penonton. Kedua partisipan ini menilai penonton akan mendapatkan *shock culture* pada saat menonton dan membuat persepsi yang berbeda setiap individunya. *Shock culture* yang ditimbulkan karena Indonesia tidak terbiasa dengan debat yang kontroversial secara terang-terangan. Pendapat pro dan kontra dari program Indonesia *Lawyers Club* sendiri merupakan dampak dari *shock culture* yang ditampilkan.

Partisipan menilai narasumber yang melakukan perdebatan menjadi tontonan yang mengejutkan bagi penonton. Sikap yang ditunjukkan oleh narasumber seolah-olah bukan untuk memecahkan masalah, namun menjadi tempat adu mulut sambil menunjukkan kekuasaan dari diri mereka sendiri. Kelompok ini juga menilai program Indonesian *Lawyers Club* sangat tidak mendidik, sebagai program acara yang membuat penonton bukan menerima solusi dari masalah yang dibahas melainkan akan membingungkan dengan *statement* yang diberikan oleh nara sumber. *Statement* tersebutlah yang dapat memicu ketidakstabilan ketahanan nasional di Indonesia pada akhirnya.

Kalangan mahasiswa dan akademisi memberikan persepsi bahwa program acara Indonesian *Lawyers Club* merupakan suatu program acara yang baik karena menjadikan media massa sebagai suatu forum diskusi oleh pemerintah dan diperuntukkan kepada rakyat. Kelompok intelektualitas dari akademisi menilai setiap tayangan memiliki konsekuensi, namun selama hal tersebut tidak melanggar undang-undang dan konstitusi yang berlaku, hal tersebut tidak menjadi masalah. Artinya program Indonesian *Lawyers Club* masih berada dalam koridor yang netral dalam membawakan acara *Talkshow*.

Menurut mahasiswa, Indonesia *Lawyers Club* merupakan salah satu bentuk dari kebebasan pers yang sejak dulu dituntut oleh mahasiswa.



Di era demokrasi ini, pers bahkan bisa dikenakan sanksi apabila tidak memberikan informasi kepada masyarakat. Kelompok mahasiswa menilai *talkshow* Indonesia *Lawyers Club* tersebut memang tidak melanggar undang-undang pers yang berlaku di Indonesia. Banyak reaksi negatif yang muncul dari masyarakat setelah menonton program tersebut, akan tetapi sangat kecil kemungkinan bahwa *talkshow* Indonesia *Lawyers Club* dapat memicu ketidakstabilan ketahanan nasional.

**Tabel 5.14. Persepsi Terhadap Pemberitaan**

No	Kelompok Partisipan	Persoalan Yang dibicarakan
1.	Pekerja (Buruh)& Pegawai Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program acara “Indonesia <i>Lawyers Club</i>” di TV One cenderung membuat masyarakat <i>shock culture</i> dengan dinamika komunikasi yang disajikan.</li> <li>▪ Program Indonesia <i>Lawyers Club</i> dinilai negatif, sebab banyak <i>statement</i> yang dilontarkan narasumber sangat tidak mendidik dan tidak pantas diucapkan dihadapan publik yang ditonton ratusan orang di Indonesia.</li> <li>▪ Indonesia <i>Lawyers Club</i> menghadirkan komunikasi yang langsung, keras, menuding tanpa melihat azas praduga tak bersalah, akhirnya memungkinkan untuk memicu ketidakstabilan ketahanan nasional.</li> </ul>
3.	Mahasiswa	Indonesia <i>Lawyers Club</i> merupakan salah satu bentuk dari kebebasan pers.
4.	Dosen	Indonesian <i>Lawyers Club</i> merupakan suatu program acara yang baik karena menjadikan media massa sebagai suatu forum diskusi oleh pemerintah dan diperuntukkan kepada rakyat.

### **Pengaruh Program Acara *Talkshow* Indonesian *Lawyers Club* terhadap Masyarakat Minangkabau**

Semua kelompok masyarakat diminta untuk mengemukakan secara terpisah ada atau tidaknya pengaruh (*effect*) Program Acara *Talkshow* Indonesian *Lawyers Club*. Jawaban yang masuk diperoleh kesan bahwa tayangan Indonesia *Lawyres Club* sangat berdampak negatif, jika dilihat dari ketahanan ideologi, justru sangat membahayakan negara, sebab *talkshow* ini lebih sering diwarnai dengan kericuhan antar narasumber. Hal ini terlihat, jelas ketika perselisihan antara narasumber yang ditampilkan dalam program Indonesia *Lawyers Club*.



Partisipan buruh menilai adanya *talkshow* tersebut sangat mempengaruhi pola pikir dan sikap mereka dalam menonton. Kelompok ini juga mengeluhkan bahwa, narasumber yang dihadirkan selalu tidak berimbang dan cenderung subjektif. Para pengacara yang merupakan kelompok mayoritas dalam program acara *talkshow* ini sekaligus yang diundang sebagai pembicara selalu tidak objektif.

Kalangan pegawai negeri memiliki pandangan yang berbeda pula mengenai pengaruh program acara *talkshow* Indonesian *Lawyers Club*. Mereka banyak yang mengecam karena topik yang ditampilkan dapat menampilkan *image* negatif pada masyarakat mengenai persoalan yang diangkat. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa, seharusnya TV One segera mengevaluasi setiap tayangan yang mereka suguhkan kepada masyarakat, agar masyarakat tidak terlanjur mengecam tayangan ini sebagai salah satu tayangan yang hanya dapat meruntuhkan moral bangsa.

Kelompok pegawai negeri juga menilai pengaruh acara Indonesia *Lawyers Club* memberikan dampak yang buruk bagi penerus bangsa, sebab dari setiap episode *talkshow* yang berani, masalah yang diungkap pada akhirnya juga cenderung tidak fokus dan tidak ada solusi, hal ini disebabkan karena narasumbernya sibuk bertengkar sendiri-sendiri dengan argumennya masing-masing, bahkan malah cenderung tidak bermutu.

Kalangan mahasiswa dan dosen memiliki pandangan yang sangat berbeda dengan dua kelompok sebelumnya. Partisipan yang tergabung dalam kelompok yang memiliki tingkat intelektualitas tinggi ini menilai tayangan ini menimbulkan dampak bagi masyarakat, namun program acara ini merupakan salah satu bentuk dari kebebasan pers di Indonesia.

Pada umumnya mereka melihat pengaruh penting dalam program acara yang di pandu Karni Ilyas tersebut. *Pertama* tayangan ini bukanlah suatu hal yang salah untuk mendiskusikan kasus yang morat - marit di negara ini. Masyarakat pun dapat mengetahui kebenarannya langsung dari pihak yang terlibat, meskipun kasus tersebut selalu ditunda-tunda oleh kepolisian untuk ditindaklanjuti. Permasalahannya adalah kurangnya etika berbicara para intelektual yang hadir dalam acara tersebut.

*Kedua*, jika dipandang dari segi hukum, program acara ini dapat memberikan sentuhan wawasan terhadap masyarakat untuk memperlihatkan suatu bentuk transparansi berbagai keputusan, kebijakan dan polemik politik di kalangan pemerintah. Pemberian wawasan hukum dan politik, memicu paradigma yang positif dan negatif

bagi masyarakat. Sisi positif akan membentuk karakter masyarakat yang cerdas mengenai kehidupan politik dan lebih taat pada aturan hukum yang ada. Sisi negatifnya masyarakat menjadi tahu bahwa sifat aslinya para pejabat dan pemain hukum di Indonesia.

Program acara ini sebaiknya mampu memberikan solusi terhadap semua persoalan yang diangkat dalam pengadilan ala media “Indonesia *Lawyers Club*”. Artinya apa yang ditampilkan dalam *talkshow* tersebut sama seperti situasi dan kondisi dalam persidangan yang sebenarnya namun dikonstruksi oleh TV One dalam bentuk *talkshow*. Sudah seharusnya ada keputusan yang dibuat setelah berakhirnya sebuah persidangan.

**Tabel 5.15. Persepsi Terhadap Pengaruh Program Acara *Talkshow Indonesian Lawyers Club* Terhadap**

No	Kelompok Partisipan	Pandangan Tentang Pengaruh Pemberitaan
1.	P e k e r j a (Buruh)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Positifnya <i>talkshow</i> tersebut sangat mempengaruhi pola pikir dan sikap mereka dalam menonton.</li> <li>• Negatifnya narasumber yang dihadirkan selalu tidak berimbang dan cenderung subjektif. Selain itu, para pengacara yang merupakan kelompok mayoritas dalam program acara <i>talkshow</i> ini sekaligus yang diundang sebagai pembicara selalu tidak objektif.</li> </ul>
2.	P e g a w a i Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mereka banyak yang mengesam karena topik yang ditampilkan dapat menampilkan image negatif pada masyarakat mengenai persoalan yang diangkat. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa, seharusnya TV One segera mengevaluasi setiap tayangan yang mereka suguhkan kepada masyarakat, agar masyarakat tidak terlanjur mengesam tayangan ini sebagai salah satu tayangan yang hanya dapat meruntuhkan moral bangsa.</li> <li>▪ Acara Indonesia <i>Lawyers Club</i> memberikan dampak yang buruk bagi penerus bangsa, sebab dari setiap episode <i>talkshow</i> yang berani, masalah yang diungkap pada akhirnya juga cenderung tidak fokus dan tidak ada solusi, hal ini disebabkan karena narasumbernya sibuk bertengkar sendiri-sendiri dengan argumennya masing-masing, bahkan malah cenderung tidak bermutu.</li> </ul>

3.	Mahasiswa& Dosen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Positifnya:</b></li> <li>▪ Tayangan ini bukanlah suatu hal yang salah untuk mendiskusikan kasus yang morat - marit di negara ini. Masyarakat pun dapat mengetahui kebenarannya langsung dari pihak yang terlibat.</li> <li>▪ Membuka wawasan mengenai transparansi hukum</li> <li>▪ Membuka wawasan mengenai masalah-masalah yang sedang dihadapi bangsa</li> <li>▪ <b>Negatifnya:</b></li> <li>▪ Tidak ada pembatasan baik untuk kata-kata maupun sikap dan perilaku karena disiarkan secara <i>live</i></li> <li>▪ Memicu ketidakstabilan ketahanan Negara karena keserangan menampilkan perselisihan dan perdebatan antara yang pro dan kontra apalagi yang berselisih tersebut kebanyakan tokoh penting di negara kita.</li> <li>▪ Tidak ada <i>conclusion</i> setelah berakhirnya pengadilan ala media ini.</li> </ul>
----	---------------------	---

## Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan, bahwa kelompok masyarakat berasal dari kelompok sosial yang berbeda-beda cenderung memiliki persepsi yang berbeda-beda pula terhadap *Talkshow "Indonesia Lawyers Club"* yang merupakan program unggulan di TV One saat ini. Dapat dikatakan bahwa kelompok masyarakat yang mewakili masyarakat Padang secara geografis, mereka rata-rata cenderung memersepsi program acara *Talkshow Indonesia Lawyers Club* ini dapat memicu ketidakstabilan ketahanan nasional.

Berdasarkan dari FGD yang telah dilakukan dengan beberapa informan dalam memperkuat validitas data mengenai program acara *Indonesia Lawyers Club* di TV One. Persepsi berbagai kalangan ini diketahui bahwa persepsi para buruh tentang *talkshow Indonesia Lawyers Club* ini lebih banyak negatifnya karena disetiap tayangannya yang ditonjolkan adalah adu mulut dari pihak yang pro dan kontra, sehingga sedikit nilai pendidikannya. Positifnya membuka pola pikir mereka tentang sesuatu yang berbeda dari program talkshow lainnya.

Kelompok pegawai negeri, lebih ekstrem dalam mempersepsi acara ini. Bagi mereka acara tersebut bisa membuat rusak moral bangsa saja. Tidak berbobot karena sering berakhir dengan pertengkaran yang tidak pantas dipamerkan oleh para petinggi di negara kita. Kalangan mahasiswa dan dosen, cenderung memiliki persepsi yang lebih kompleks terhadap *talkshow* Indonesia *Lawyers Club* ini. Kelompok ini pada dasarnya merupakan kelompok yang tingkat pengetahuan sosialnya relatif tinggi karena memiliki pemahaman serta interpretasi yang lebih kompleks, mereka menilai acara ini memang beda dengan lainnya, menampilkan gaya persidangan yang dikonstruksi media dengan komunikasi militer yang berlaku dalam pembicaraannya, sehingga persepsi mereka pun menghasilkan sisi positif dan negatif. Positifnya, masyarakat dapat mengetahui kebenarannya langsung dari pihak yang terlibat dan membuka wawasan mengenai transparansi hukum serta membuka wawasan mengenai masalah-masalah yang sedang dihadapi bangsa untuk bias dicermati bersama. Negatifnya tidak ada pembatasan baik untuk kata-kata maupun sikap dan perilaku karena disiarkan secara *live*, dapat memicu ketidakstabilan ketahanan Negara karena sering menampilkan perselisihan dan perdebatan antara yang pro dan kontra apalagi yang berselisih tersebut berasal dari tokoh penting di negara kita dan tidak ada *conclusion* setelah berakhirnya pengadilan ala media ini.

Munculnya persepsi yang beragam, maka pengelola media massa khususnya TV One kedepannya diharapkan dalam pemberian informasi berita tentang permasalahan negara, hendaknya memberikan informasi sesuai dengan fungsi utama media massa yakni mengomunikasikan ke semua manusia lainnya mengenai informasi yang sesungguhnya, sehingga perilaku, perasaan, dan pemikiran media pun juga tidak akan lepas dengan tanggung jawab dari kebenaran informasi.

## **Daftar Pustaka**

- Agee, Warren K, Philip H. Ault dan Edwin Emery, 2001, *Introduction To Mass Communications*, New York: Longman.
- Ardianto, Elvinaro, Komala, Lukiati dan Karlinah, Siti, 2007, *Komunikasi massa Suatu Pengantar*, Bandung: Sempiosa Rekatama Media.

- Baran, Stanley J, 2004, *Introductions to Mass Communication: Media Literacy and Culture*, New York: the Mc. Graw-Hill Companies.
- Triana, Yosal, 2006, *Model Pelatihan Literasi Media Untuk Pemberdayaan Khalayak Media Massa*. Disertasi Doktor, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
- Liliweri, Alo, 1991, *Memahami Peran Komunikasi Massa Dalam Masyarakat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurudin, 2003, *Komunikasi Massa*, Malang: Cespur.
- Potter, W. James, 2005, *Media Literacy*, Thousand Oaks-London-New Delhi: Sage Publications.
- Dye, Thomas R. dan Harmon Zeigler, 1986, *American politics in the Media Age*. Brooks/Cole Publishing Company: Monterey, California.
- Jatya, Anuraga, 2009, *Persepsi Masyarakat Tentang Pengaruh Media Terhadap Tingkat Kejahatan Di Kotamadya Jogjakarta Dan Upaya Regulasi Hukum Pidana Untuk Mengendalikannya*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Nelson, Nici dan Wright, Susan, 1995, *Power and Participatory Development: Theory and Practice*, London: Intermediate Technology Publications.
- McQuail, Denis, 1987, *Teori Komunikasi Massa; Suatu Pengantar, Edisi Kedua*, Jakarta: Erlangga.
- Mulyana, Deddy dan Solatun, 2007, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lasswell, Harold D, 1970, *Power and Society*, New Haven, Yale University Press, 1971,
- A Review of the Policy Sciences, New York: Elsevier. Latunreng.
- Littlejohn, Stephen & Foss, A, Karen, 2009, *Teori Komunikasi*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Rubin, 1992, *Community Organizing and Development: Second Edition*, New York: Macmillan Publishing Company.

- Severin, Werner J., James W. Tankard Jr, 2005, *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, & Terapan Di Dalam Media Massa*, Edisi kelima. Jakarta: Prenada Media.
- Saverin, Werner J. & Saverin Tankard Jr, 1988, *Communication THEORIES: Origin, Methods, Uses* 2<sup>nd</sup>ed, New York: Longman.
- Watt, James H.dan Sjef A. Van den Berg, 1995, *Research Methods For Mass Communication Science*: allyn and Bacon, Boston.
- <http://www tempo.co/read/news/2012/03/07/173388716/KPI-Terima-2500-Pengaduan-Soal-Karni-Ilyas>. Diakses tanggal 07 Maret 2012.
- <http://www.ceritamu.com/Bola/Sepakbola-Nasional/Boikot-TV-One-dan-Antv--PSSI-Tolak-Undang-an-Indone> Diakses tanggal 07 Maret 2012.
- [http://video.tvonenews.tv/arsip/view/54932/2012/04/04/di\\_balik\\_batalnya\\_bbm\\_naik.tvOne](http://video.tvonenews.tv/arsip/view/54932/2012/04/04/di_balik_batalnya_bbm_naik.tvOne). Diakses tanggal 04 April 2012.
- [http://video.tvonenews.tv/arsip/view/54583/2012/03/21/atas\\_nama\\_rakyat\\_perlukah\\_bbm\\_dinaikkan.tvOne](http://video.tvonenews.tv/arsip/view/54583/2012/03/21/atas_nama_rakyat_perlukah_bbm_dinaikkan.tvOne). Diakses tanggal 08 April 2012.
- <http://repository.uui.ac.id/.../uui-skripsi-04410162-jatya%20anuraga-04410>).Diakses tanggal 25 April 2012
- [http://eprints.undip.ac.id/29037/SUMMARY\\_SKRIPSI\\_Tika\\_Primasiwi](http://eprints.undip.ac.id/29037/SUMMARY_SKRIPSI_Tika_Primasiwi). Diakses tanggal 25 April 2012.

# GLOSARIUM

**Agitasi:** upaya untuk menggerakkan massa dengan lisan atau tulisan, dengan cara merangsang dan membangkitkan emosi khalayak.

**Analisis wacana kritis:** jenis penelitian wacana analitik yang terutama mengkaji tentang cara bagaimana penyalahgunaan kekuasaan sosial, dominasi, dan ketidaksetaraan yang berlaku, direproduksi, dan dilawan dengan teks dan pembicaraan dalam konteks sosial dan politik.

**Bercerita (*story telling*):** bagaimana cara kita menyampaikan pelajaran dari generasi ke generasi, kultur ke kultur. Cerita-cerita tidak dimaksudkan untuk disimpan sendiri, tapi dimaksudkan untuk diceritakan kembali.

**Citra (*image*):** “*representing the totality of all information about the world any individual has processed, organized, and stored*” (menunjukkan keseluruhan informasi tentang dunia ini yang telah diolah, diorganisasikan, dan disimpan individu).

**Cyberwarfare (*cyberwar*):** adalah penggunaan teknologi komputer dan internet untuk melakukan perang di dunia maya. Pelaku cyberwar saling bersaing untuk menguasai dan memanfaatkan sumber daya teknologi serta informasi yang ada di dalamnya untuk menyerang, menghancurkan, menyesatkan, mempengaruhi, menyandera, mengurangi, menghilangkan, mengalihkan, mengganggu, menghentikan komunikasi, arus informasi dan isinya serta berbagai tindakan lain yang mengakibatkan kerugian dan melemahkan lawan.

**Doktrin Strategis (Doktrin Dasar):** Doktrin yang berisi pengetahuan (*understanding*) dan bukan instruksi (*not instruction*). Doktrin ini sebenarnya merupakan penjabaran kebijakan pemerintah yang tertuang pada Buku Putih.

**Doktrin Operasional:** berisi prinsip-prinsip bagaimana melaksanakan operasi militer pada saat konflik militer. Doktrin tersebut berisi

pengetahuan dan instruksi bagaimana melaksana-nakan operasi militer, meskipun demikian penekanan dasarnya masih pada pengetahuan. Sifat doktrin ini adalah terbatas (*limited*).

**Doktrin Taktis:** petunjuk-petunjuk bagaimana menggunakan kekuatan militer dalam rangka mendukung tujuan taktisnya. Doktrin ini banyak sekali, dari yang bersifat prosedur teknis di home-base sampai dengan petunjuk operasional taktis yang akan digunakan didaerah pertempuran. Umumnya petunjuk tersebut berisi instruksi-instruksi tentang bagaimana melaksanakan latihan operasi sampai dengan menggunakan kekuatan militer di daerah operasi.

**Empati:** turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang diajak berbicara. Empati merupakan tahap lanjut dari memahami.

**Fenomenologi:** ilmu tentang kesadaran manusia, karena ia berkaitan dengan fakta yang disadari dan masuk ke dalam pemahaman manusia. Fenomenologi merefleksikan pengalaman langsung manusia, sejauh pengalaman itu secara intensif berhubungan dengan suatu objek. Fokus studi fenomenologi adalah fenomena dalam kehidupan sehari-hari (*everyday life*): emosi (kesepian, kecemburuan, kemarahan), hubungan (pernikahan, kontrak kerja, ketetanggaan), program (rencana kerja, organisasi, bahkan budaya).

**Gaya komunikasi:** seperangkat perilaku antarpribadi yang terspesialisasi yang digunakan dalam suatu situasi tertentu. Masing-masing gaya komunikasi terdiri dari sekumpulan perilaku komunikasi yang dipakai untuk mendapatkan respon atau tanggapan tertentu dalam situasi yang tertentu pula. Kesesuaian dari satu gaya komunikasi yang digunakan, bergantung pada maksud dari pengirim (*sender*) dan harapan dari penerima (*receiver*).

**Google Earth :** sebuah aplikasi yang dimaksudkan untuk pemetaan bumi bagi pengguna dalam pencarian lokasi dan penentuan lokasi tujuan secara cepat dan tepat.

**Geospasial web (geoweb):** menekankan kekuatan lokasi geografis sebagai kunci untuk mengintegrasikan pengetahuan dan memberikan informasi posisi. Kedua hal ini menjadi dasar dari ilmu sistem informasi geografis atau GIS namun mendapatkan momentum baru ketika pertumbuhan Web dan karena kesiapan akses terhadap mekanisme untuk menambah lokasi data.



- Hegemoni:** istilah dipopulerkan ahli filsafat politik terkemuka Italia, Antonio Gramsci, yang berpendapat bahwa kekuatan dan dominasi tidak hanya melalui dimensi material dari sarana ekonomi dan relasi produksi, tetapi juga kekuatan (*force*) dan hegemoni.
- Hollywood:** pusat hiburan dan perfilman terkemuka di AS yang terkenal dengan produksi filmnya.
- Intelijen militer:** informasi dan pengetahuan yang didapatkan melalui pengamatan, penyelidikan, analisis, atau pemahaman.
- Internet:** suatu jaringan global dari sejumlah komputer yang saling terkoneksi yang berkomunikasi secara bebas dan saling berbagi serta tukar menukar informasi.
- Jurnalisme perang:** jurnalisme yang mereduksi kompleksitas persoalan menjadi siapa kawan, lawan, pemenang dan pecundang. Jurnalisme perang, memanfaatkan berita oleh sebagian pihak untuk kepentingannya saja.
- Komunikasi internasional:** kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah atau negara dengan pemerintah atau negara lain.
- Komunikasi organisasi:** sebagai proses pertunjukkan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian suatu organisasi tertentu.
- Komunikasi persuasif:** komunikasi yang menggunakan tanda-tanda dan bahasa sebagai hasil penyesuaian antara sumber dengan penerima komunikasi. Persuasi diartikan sebagai proses yang mengubah sikap, kepercayaan, opini, atau perilaku dari orang yang diajak berkomunikasi. Persuasi terjadi jika terjadi kerja sama antara sumber dan penerima. Komunikasi persuasif didasarkan pada prinsip-prinsip empati, keterbukaan, kesetaraan, dan saling menghargai.
- Keterlibatan (interaksi):** bentuk komunikasi persuasif yang bersifat tindakan.
- Konflik:** keadaan anomali—keadaan yang bertolak belakang dari suatu kondisi stabil. Dalam Teori Struktural Fungsional, konflik dianggap sebagai suatu masalah yang mengancam stabilitas suatu sistem.
- Kerusuhan (konflik sosial):** suatu kondisi dimana terjadi huru-hara/kerusuhan atau perang atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun organisasi tertentu.

**Manajemen:** seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengontrolan atas *human and national resources* untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu.

**Manajemen konflik:** tindakan konstruktif yang direncanakan, digerakkan, dan dievaluasi secara teratur atas semua usaha demi mengakhiri konflik.

**Manajemen komunikasi:** proses yang sistematis antara anggota organisasi dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam menyelesaikan suatu pekerjaan melalui proses negosiasi pengertian/pemahaman antara satu individu maupun lebih yang bertujuan mencapai keinginan dan kepuasan bersama.

**Militer:** organisasi yang diberi otoritas oleh organisasi di atasnya (negara) untuk menggunakan kekuatan yang mematikan (*lethal force*) untuk membela/mempertahankan negara dari ancaman yang serius ataupun hal-hal yang dianggap sebagai ancaman serangan terhadap ideologi dan wilayah kenegaraan.

**Opinion leader:** pribadi yang berkemampuan mempengaruhi dan menciptakan opini publik, pemikir, elite politik, dan tokoh masyarakat/agama yang memiliki kemampuan memimpin, pandai dan terampil dalam membawakan pembicaraan secara pribadi maupun pendapat umum untuk tujuan-tujuan tertentu, disamping mempunyai waktu khusus untuk mendiskusikannya bersama, sehingga mampu membangun masyarakat heterogen menjadi masyarakat homogen

**Orientalisme:** bagaimana representasi budaya non-Barat terutama telah dirancang dan disahkan oleh Barat. Secara historis, Barat telah memiliki kekuasaan untuk mengembangkan representasi mereka sendiri mengenai Timur (*orient*) seperti yang terlihat dari perspektif mereka, yang telah menjadi sumber pengetahuan yang lebih luas. Seiring waktu, representasi tentang "Timur" menjadi tidak terpisahkan dari kesadaran universal mengenai "*real orient*".

**Perang:** perselisihan bersenjata antar golongan-golongan masyarakat dalam suatu negara (perang saudara, perang suku) atau antar negara.

**Perang urat syaraf:** penerapan bagian-bagian dari ilmu psikologi guna melanjutkan kegiatan-kegiatan politik, ekonomi atau militer.

**Perang urat syaraf (*psywar*) politik:** penyampaian pesan-pesan yang

dapat menjatuhkan mental lawan-lawan politik sebagai komunikasi politik, terutama lawan-lawan politik itu diketahui memiliki rekam jejak (*track record*) atau reputasi kurang baik, dan ini diketahui lawan politiknya, sehingga dalam kampanye politiknya, yang cenderung menjadi kampanye hitam (*black campaign*) dapat saling menjatuhkan mental lawan.

**Persepsi:** proses yang digunakan untuk menginterpretasikan data sensoris. Data sensoris sampai pada penikmat media massa melalui lima indera dalam tubuh manusia normal, yaitu indera pendengaran, indera penciuman, indera penglihatan, indera perasa, dan indera peraba.

**Propaganda:** teknik memengaruhi tindakan manusia dengan memanipulasi representasi (penyajian).

**Publisitas:** penyebaran pesan yang direncanakan dan dilakukan untuk mencapai tujuan lewat media tertentu untuk kepentingan tertentu pada media.

**Ruang publik:** sebuah tempat untuk debat dan berargumen secara bebas dan demokratis yang memediasi antara masyarakat sipil dengan negara di mana publik mengorganisir dirinya untuk membentuk sebuah pendapat umum untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan publik.

**Strategi:** bagian terpadu dari suatu rencana (plan), sedangkan rencana merupakan produk dari suatu perencanaan (planning), yang pada akhirnya perencanaan adalah fungsi dasar dari proses manajemen.

**Terorisme:** kegiatan menyengsarakan penduduk, merusak perdamaian, mengancam keselamatan jiwa, dan harta benda, dan mengancam ketenteraman dan kenyamanan hidup manusia. Secara semantik leksikal, teror berarti kekacauan; tindak kesewenang-wenangan untuk menimbulkan kekacauan dalam masyarakat; tindak kejam dan mengancam. Kata terorisme berasal dari bahasa Perancis *le terreur* yang semula dipergunakan untuk menyebut tindakan pemerintah hasil Revolusi Perancis yang mempergunakan kekerasan secara brutal dan berlebihan dengan cara memenggal 40.000 orang yang dituduh melakukan kegiatan anti pemerintah.

**Wikipedia:** ensiklopedia isi bebas yang dimulai pada tahun 2001 (versi bahasa Indonesia dimulai pada tahun 2003). Artikel-artikel di

Wikipedia merupakan hasil kolaborasi oleh para penyumbangsih dari seluruh dunia. Situs ini merupakan situs wiki, yang berarti siapapun dapat menyunting artikel, memperbaiki dan menambahkan informasi, hanya dengan mengklik pranala sunting yang berada di atas setiap halaman.

**World Wide Web (WWW):** fasilitas yang digunakan pengguna komputer untuk mengakses Internet yang menggunakan hypertext transfer protocols (HTTP) untuk membawa data dari satu lokasi kepada lokasi lainnya.

# INDEKS

## A

Adityawarman 19, 20, 25  
Agitasi 248, 651  
Agresi 1948 20  
Aktualitas 592  
Askar Watania 60

## B

Bandoro 59, 62, 64, 81  
barriers 591  
Belanda 18, 19, 20, 96, 126, 127, 197,  
246, 379, 384, 387, 390, 452,  
614

## C

Cantril 6, 7  
Chomsky 18, 25, 422, 423, 525  
correlation 591, 636  
Cyberwarfare 651

## D

Dahlan 16, 17, 25  
Daugherty 11  
Defence Diplomacy 61, 74  
delegasi 77  
demokratisasi 17, 19, 470  
doktrin operasional 338, 345, 651  
doktrin strategis 337, 345, 651  
doktrin taktis 338, 345, 652

## E

empati 231, 329, 513, 652

## F

fenomenologi 370, 652

filter 591, 595, 598, 599  
fotografi udara 27, 29

## G

gaya komunikasi 294, 295, 296, 297,  
298, 652  
George Gerbner 590  
Glander 24, 25  
Goodchild 29, 31, 44

## H

hegemoni 254, 533, 534, 542, 653  
Hilgard 5  
Hill 21, 22, 25, 56, 57, 179, 352, 449,  
544, 632, 649

## I

ideologi 10, 15, 18, 23, 24, 90, 123,  
124, 164, 184, 212, 214, 240,  
253, 261, 349, 374, 376, 385,  
396, 412, 413, 423, 434, 448,  
453, 458, 459, 470, 480, 492,  
504, 508, 510, 511, 512, 513,  
514, 518, 520, 528, 529, 530,  
531, 533, 536, 542, 556, 557,  
586, 625, 644  
Ilmu Komunikasi xiv, xvii, 3, 4, 5, 25,  
178, 252, 291, 292, 301, 352,  
500, 605  
Indonesia vii, ix, xiii, xiv, xvii, xviii,  
xix, xxiii, xxiv, xxv, xxvi, xxvii,  
8, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22,  
23, 25, 30, 40, 42, 43, 45, 47, 48,  
49, 50, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64,  
65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77,  
78, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88,

89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98,  
99, 100, 103, 106, 109, 114, 115,  
116, 117, 118, 119, 121, 123,  
124, 125, 126, 127, 128, 129,  
130, 135, 136, 142, 146, 147,  
148, 149, 150, 151, 152, 153,  
156, 157, 159, 166, 169, 170,  
172, 179, 181, 182, 183, 192,  
194, 197, 198, 199, 200, 210,  
213, 217, 230, 232, 233, 237,  
238, 245, 246, 247, 248, 249,  
646, 647, 648, 649, 655

Inggris 20, 27, 37, 39, 47, 151, 247,  
248, 268, 275, 278, 414, 417,  
418, 419, 433, 438, 452, 527,  
528, 532, 552, 611, 612, 614,  
626, 627

intelijen xi, 4, 7, 8, 23, 28, 30, 35, 36,  
38, 39, 40, 41, 70, 117

intelijen militer 653

interactive communications 591

interpretasi simbol 54

interpreter 246, 252, 493, 591

## J

Jepang 5, 19, 20, 45, 90, 265, 268, 379,  
394, 397, 398, 399, 401, 414,  
415, 434, 436, 442, 443, 444

jurnalisme perang 488, 493, 653

## K

kapitalis media 23

Kementerian Pertahanan xvii, xxi, 45,  
56, 116, 122

Kolasowki 28, 43

Komisi Penyiaran Indonesia 23

komunikasi internasional 85, 87, 88,  
107, 108, 139, 141, 653

komunikasi organisasi 305, 653

komunikasi persuasif 323, 331, 653

komunikasi verbal 54

konflik horizontal 60, 74, 149, 169, 183

## L

Lake dan Farley 27

Laswell 4, 6, 9, 10, 13, 14, 591, 635

Lemhannas 46, 595

Lerner 8, 9, 15, 16, 17, 396

Likert 5

Lippmann 8, 10, 11, 13, 25, 131, 428

LittleJohn 591, 605

## M

Malaysia xix, xxiv, 59, 60, 61, 70, 71,  
77, 78, 81, 84, 85, 88, 95, 96, 97,  
98, 99, 103, 114, 116, 142, 156,  
170, 275, 282, 290, 352, 394,  
446, 459, 500, 567, 568, 569,  
570, 571, 572, 573, 574, 575,  
576, 577, 578, 579, 580, 581,  
582, 583, 584, 585, 586, 614,  
615, 627

manajemen komunikasi 160, 176, 340,  
654

Manajemen komunikasi 160, 176, 340,  
654

manajemen konflik 160, 654

Mead 5

mesin psikologi 3

militer i, iii, ix, xiv, xvii, xviii, xix, xxi,  
xxii, xxiii, xxiv, xxvii, 28, 35,  
37, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57,  
66, 81, 136, 235, 239, 240, 244,  
245, 249, 261, 262, 263, 265,  
267, 281, 282, 283, 285, 294,  
298, 311, 313, 314, 320, 328,  
336, 342, 376, 378, 379, 451,  
452, 453, 456, 459, 460, 462,  
465, 466, 467, 469, 473, 477,  
478, 500, 501, 526, 587, 598,  
602, 605, 654

modernisasi 8, 14, 15, 16, 17, 396, 405,  
471

Muhaimin 45, 57

## N

Nasution 14, 15, 18, 25, 45, 246, 266,  
460

National Geographic 39, 43

## O

opinion leader 654

Orde Baru 21, 22, 23, 25, 126, 130,  
213, 237, 238, 239, 253, 254,  
288, 388, 451, 465, 469, 567,  
568  
orientalisme 531, 532, 541, 542, 543,  
654

## **P**

paradigma klasik 24  
Perang Dunia I 306, 307, 412, 413,  
415, 435, 438  
Perang Dunia II 4, 5, 9, 12, 14, 16, 18,  
23, 103, 108, 199, 306, 413, 414,  
415, 434, 435, 443  
persepsi xix, xxiv, xxvi, 176, 263, 635,  
636, 637, 638, 642, 644, 646,  
647, 649, 655  
point of interest 31, 41  
praktik manipulasi 11, 13  
Prison Planet Forum 7, 8, 9, 25  
propaganda xvii, xix, xxi, xxiv, 9, 10,  
11, 18, 19, 25, 26, 64, 81, 247,  
248, 301, 421, 441, 509, 511,  
526, 655  
propaganda opini publik 11  
psychological warfare 10, 11, 12, 13,  
14, 15, 18, 19, 23, 24  
psywar 247, 248, 249, 252, 654  
publisitas 307, 314, 592, 655  
Publisitas 307, 314, 592, 655

## **R**

Renell 27  
Rogers 3, 5, 6, 25, 188, 189, 298, 299  
ruang publik 133, 134, 655

## **S**

satelit komersil 27  
Schramm 3, 4, 5, 9, 13, 24, 25, 396,  
586  
Setijadi 10, 25  
signpost 591  
Simpson 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13  
Slesinger 13, 14, 24  
Stephen W Littlejohn 590  
strategi diplomasi 77

Suciu 4, 25  
surveillance 43, 591

## **T**

Tay 17, 26  
terminologi 8, 18, 155, 243, 390, 471,  
623  
Terorisme xix, xxiv, xxvi, 333, 504,  
505, 506, 511, 514, 520, 521,  
607, 610, 655  
the fifth estate 3  
transmission 12, 591

## **U**

Universalitas 592

## **V**

Varhsney 28, 36

## **W**

Watts 16, 26  
Wikipedia 15, 131, 132, 471, 626, 627,  
655, 656  
Willitz 14, 24  
Wiryanto 591, 605

## **Y**

Yulianto 47, 57

## **Z**

Zaglove 15, 26





# UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis :

1. Aat Ruchiat Nugraha  
Staf Pengajar Universitas  
Padjadjaran Bandung  
aatruchiat.nugraha@gmail.com
2. Ahmad Toni & Rocky Prasetyo  
Jati  
Staf Pengajar Universitas Budi  
Luhur Jakarta  
tonianthonovubl@gmail.com
3. Anastasia Yuni Widyaningrum  
Staf Pengajar Universitas Widya  
Mandala Surabaya  
anastasia\_widya@yahoo.com
4. Andrian Wira Syah Putra dan M.  
Najib Husaini  
Staf Pengajar Universitas  
Haluoleo Kendari  
juniorwira@rocketmail.com
5. Andy Corry. W  
Staf Pengajar Universitas  
Lampung  
andyc\_wd@yahoo.com
6. Ani Yuningsih  
Staf Pengajar Fikom Universitas  
Islam Bandung  
yuningsihani@yahoo.com
7. Aprilani, M.Si  
Staf Pengajar STAIN Kediri  
duta86@yahoo.com
8. Dewi K. Soedarsono  
Staf Pengajar Institut Manajemen  
Telkom Bandung  
dsoedarsono@hotmail.com
9. Dicky Andika & Morissan  
Staf Pengajar Universitas Mercu  
Buana Jakarta  
dq\_andika@yahoo.com
10. Doddy Salman  
Staf Pengajar Universitas  
Tarumanegara Jakarta  
dodysalman@tarumanegara.ac.id
11. Edwi Arief Sosiawan  
Staf Pengajar UPN "Veteran"  
Yogyakarta  
edwias@yahoo.com
12. Elva Ronaning Roem & Yesi  
Puspita  
Staf Pengajar Universitas Widya  
Mandala Surabaya  
elvarona80@gmail.com
13. Elvinaro Ardianto  
Staf Pengajar Universitas  
Padjadjaran Bandung  
narodianto@yahoo.com
14. Fitaha Aini  
Staf Pengajar Universitas Islam 45  
Bekasi  
fita\_h@yahoo.co.uk
15. Gregorius Genep Sukendro  
Staf Pengajar Universitas  
Tarumanegara Jakarta  
genepisme@ymail.com
16. Hadi Purnama  
Staf Pengajar Institut Manajemen  
Telkom Bandung  
hadi\_pnama@yahoo.co.id

17. Ike Junita Triwardhani  
 Staf Pengajar Fikom Universitas  
 Islam Bandung  
 junitatriwardhani@yahoo.com
18. Inda Fitriyarni & Hj. Hairunnisa  
 Staf Pengajar Universitas  
 Mulawarman  
 inda.unmul@gmail.com
19. Lisa Lindawati  
 Asisten Peneliti JIK Fisipol UGM/  
 licadecacan@yahoo.com
20. M. Badri  
 Staf Pengajar Universitas Islam  
 Negeri Suska Riau  
 negeribadri@gmail.com
21. Maria Yuliasuti & Yuli  
 Nugraheni  
 Staf Pengajar Universitas Widya  
 Mandala Surabaya  
 ria\_audivi@yahoo.com
22. Maya  
 Staf Pengajar Fikom Universitas  
 Islam Bandung  
 mel02cute@yahoo.com
23. Mubarak  
 Staf Pengajar Universitas Islam  
 Sultan Agung Semarang  
 mubgabus@gmail.com
24. Noveina Silviyani Dugis &  
 Finsensius Yuli Purnama  
 Staf Pengajar Universitas Widya  
 Mandala Surabaya  
 vena\_noge@yahoo.com
25. Prio Handoko & Adhi Gurmilang  
 Staf Pengajar Universitas  
 Pembangunan Jaya Jakarta  
 gurmilang29@yahoo.com
26. Rahmi Surya Dewi dan Anggi  
 Ayudia Arifano  
 Staf Pengajar Fikom Universitas  
 Andalas Padang  
 rahmi.ikom@gmail.com
27. Rita Gani  
 Staf Pengajar Fikom Universitas  
 Islam Bandung  
 ritagani911@yahoo.com
28. Salim Alatas  
 Staf Pengajar Universitas  
 Pembangunan Jaya Jakarta  
 salim\_oemar@yahoo.co.id
29. Santi Indra Astuti  
 Staf Pengajar Fikom Universitas  
 Islam Bandung  
 dyaning2001@yahoo.com
30. Sarmiati  
 Staf Pengajar Universitas Andalas  
 Padang  
 mia\_cc4@yahoo.com
31. Teguh Ratmanto  
 Staf Pengajar Fikom Universitas  
 Islam Bandung  
 teguh\_ratman@yahoo.com
32. Tuti Widiastuti  
 Staf Pengajar Universitas Bakrie  
 Jakarta  
 tuti.widiastuti@bakrie.ac.id
33. Yugih Setyanto dan Riris Loisai  
 Staf Pengajar Universitas  
 Tarumanegara Jakarta  
 yugih\_s@yahoo.com
34. Yuliandre Darwis  
 Staf Pengajar Universitas Andalas  
 Padang  
[yuliandre.darwis@yahoo.com](mailto:yuliandre.darwis@yahoo.com)